SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dibutuhkan dokumen perencanaan tahunan untuk menjadi landasan operasional;
c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan tahunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu diatur rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:

a. kerangka acuan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027;
b. bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027; dan

c. acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2027 bagi Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2027.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
BAB VII : PENUTUP.
(3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2027

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... xv
BAB I PENDAHULUAN..... I – 1
1.1 Latar Belakang..... I – 1
1.2 Tahapan Penyusunan RKPD..... I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan..... I – 3
1.4 Hubungan Antar Dokumen..... I – 5
1.5 Maksud dan Tujuan..... I – 6
1.6 Sistematika Dokumen RKPD..... I – 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II – 1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah..... II – 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II – 1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah..... II – 1
2.1.1.2 Demografi..... II – 42
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II – 47
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II – 47
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II – 59
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II – 66
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II – 70
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II – 72
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II – 123
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... II – 195
2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan..... II – 214
2.1.3.5 Fokus Keistimewaan..... II – 245
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II – 281
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II – 281
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... II – 283
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi..... II – 286
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II – 288
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2025..... II – 309
2.2.1 Capaian Kinerja Tujuan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025……..... II – 313

2.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025…… II – 328
2.2.3 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025…… II – 338
2.2.4 Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025..... II – 343
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah…… II – 434
2.3.1 Isu Strategis…… II – 434
2.3.2 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah…… II – 439
2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah……..... II – 441
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III – 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III – 1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi 2021-2027..... III – 1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi ..... III – 3
3.1.3. PDRB Per Kapita..... III – 5
3.1.4. Ketenagakerjaan..... III – 6
3.1.5. Kemiskinan..... III – 7
3.1.6. Ketimpangan Pendapatan..... III – 8
3.1.7. Sumber Daya Manusia…… III – 9
3.1.8. Penanaman Modal..... III – 10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III – 11
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III – 13
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III – 18
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah..... III – 21
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... IV – 1
4.2 Tema Pembangunan Tahun 2027..... IV – 5
4.3 Evaluasi Efektifitas Program Prioritas 2025-2026…… IV – 10
4.4 Keselarasan Tema RKPD Tahun 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045…… IV – 12
4.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029…… IV – 13
4.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027…… IV – 15
4.7 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027…… IV – 16
4.8 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2027 dengan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2027…… IV – 17
4.9 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama…… IV – 20
4.10 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan…… IV – 27
4.11 Penerapan Proyek Strategis Nasional dan Dukungan terhadap Asta Cita IV – 30
4.12 Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik…… IV – 57
4.13 Pokok-Pokok Pikiran DPRD…… IV – 63
4.13.1 Maksud dan Tujuan..... IV – 65
4.13.2 Rekomendasi DPRD……..... IV – 65
4.14 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah..... IV – 65
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V – 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI – 1
BAB VII PENUTUP……..... VII – 1
7.1 Kaidah Pelaksanaan..... VII – 1
7.2 Kesimpulan..... VII – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo.... II – 1
Tabel 2.2 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo..... II – 5
Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo..... II – 6
Tabel 2.4 Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo..... II – 8
Tabel 2.5 Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo..... II – 10
Tabel 2.6 Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates... II – 11
Tabel 2.7 Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo..... II – 12
Tabel 2.8 Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo..... II – 13
Tabel 2.9 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan 2025..... II – 15
Tabel 2.10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025..... II – 17
Tabel 2.11 Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo II – 21
Tabel 2.12 Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo..... II – 24
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Tahun 2025 (jiwa). II – 40
Tabel 2.14 Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 41
Tabel 2.15 Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana per Kapanewon Tahun 2025……..... II – 41
Tabel 2.16 Data Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2025..... II – 42
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 43
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa) Tahun 2021-2025..... II – 44
Tabel 2.19 Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 46
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2021 – 2025..... II – 46
Tabel 2.21 Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2021 – 2025 (jiwa/km²).... II – 47
Tabel 2.22 PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (dalam Milyar Rupiah)..... II – 48
Tabel 2.23 PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (dalam Milyar Rupiah)…… II – 49
Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (persen)…… II – 50
Tabel 2.25 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (persen)..... II – 51
Tabel 2.26 PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2021-2025 (juta rupiah)..... II – 53
Tabel 2.27 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2021-2025... II – 55
Tabel 2.28 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Tahun 2021-2025..... II – 55
Tabel 2.29 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025..... II – 57
Tabel 2.30 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021–2025…… II – 58
Tabel 2.31 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021–2025..... II – 59
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 61
Tabel 2.33 Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 61
Tabel 2.34 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 62
Tabel 2.35 Keterbandingan Komponen IPM dan IPM tiap Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2025……..... II – 62
Tabel 2.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 64
Tabel 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2021-2025(%)..... II – 64
Tabel 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2021-2025..... II – 64
Tabel 2.39 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.... II – 65
Tabel 2.40 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2021-2025..... II – 67
Tabel 2.41 Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 68
Tabel 2.42 Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 69
Tabel 2.43 Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 70
Tabel 2.44 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun ke Tahun..... II – 71
Tabel 2.45 Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 73
Tabel 2.46 Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2021–2025..... II – 75
Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025..... II – 76
Tabel 2.48 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023-2025..... II – 78
Tabel 2.49 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2023-2025..... II – 79
Tabel 2.50 Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Waktu, Jenis, Lokasi Kejadian dan Jumlah Kasus Tahun 2020-2025..... II – 80
Tabel 2.51 Data Prevalensi dan Kasus Penyakit Tahun 2021-2025..... II – 83
Tabel 2.52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025..... II – 86
Tabel 2.53 Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 87
Tabel 2.54 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 89
Tabel 2.55 Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ..... II – 90
Tabel 2.56 Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 91

Tabel 2.57 Data Embung di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 95
Tabel 2.58 Panjang dan Luas Daerah Irigasi berdasar kewenangan Tahun 2025..... II – 97
Tabel 2.59 Pemanfaatan Sumber Air Baku Untuk Akses Air Bersih Masyarakat..... II – 98
Tabel 2.60 Cakupan Akses Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 100
Tabel 2.61 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo…… II – 104
Tabel 2.62 Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2025..... II – 105
Tabel 2.63 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021–2025.....……..... II – 107
Tabel 2.64 Perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang…… II – 107
Tabel 2.65 Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.....……..... II – 110
Tabel 2.66 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 112
Tabel 2.67 Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kapanewon Tahun 2021-2025..... II – 113
Tabel 2.68 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Sumber Dana tahun 2025..... II – 114
Tabel 2.69 Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020)..... II – 114
Tabel 2.70 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2021 -2025..... II – 115
Tabel 2.71 Jumlah Kegiatan politik, jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2021-2025..... II – 117
Tabel 2.72 Data PPKS menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025…… II – 118
Tabel 2.73 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025……. II – 119
Tabel 2.74 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025..... II – 119
Tabel 2.75 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY..... II – 120
Tabel 2.76 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY..... II – 120
Tabel 2.77 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2025-2029 Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin..... II – 121
Tabel 2.78 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025..... II – 121
Tabel 2.79 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Kabupaten Kulon Progo……..... II – 122
Tabel 2.80 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-2025.. II – 122
Tabel 2.81 Data Ketenagakerjaan Tahun 2021-2025..... II – 123
Tabel 2.82 Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2021-2025..... II – 123
Tabel 2.83 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024..... II – 124
Tabel 2.84 Angkatan kerja menurut golongan umur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 124
Tabel 2.85 Lowongan Kerja, Pencaker dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 125

Tabel 2.86 Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... Ii – 125
Tabel 2.87 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 126
Tabel 2.88 Data Produktivitas Tenaga Kerja 2020-2024..... II – 127
Tabel 2.89 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2025..... II – 127
Tabel 2.90 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021–2025..... II – 128
Tabel 2.91 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani..... II – 129
Tabel 2.92 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 130
Tabel 2.93 Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2021-2025..... II – 131
Tabel 2.94 Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 131
Tabel 2.95 Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 132
Tabel 2.96 IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025…… II – 134
Tabel 2.97 Capaian IKLH Tahun 2025..... II – 135
Tabel 2.98 Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025..... II – 138
Tabel 2.99 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025..... II – 141
Tabel 2.100 Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 142
Tabel 2.101 Layanan Catatan Sipil Tahun 2021–2025..... II – 143
Tabel 2.102 Jumlah Bantuan Keuangan Kalurahan (Desa)dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 144
Tabel 2.103 Kondisi Kantor Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 144
Tabel 2.104 Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 – 2025..... II – 145
Tabel 2.105 Perkembangan Jumlah Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) / Indeks Desa (ID) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025…… II – 147
Tabel 2.106 Swadaya Masyarakat Pembangunan Kalurahan Tahun 2021-2025..... II – 147
Tabel 2.107 Jumlah Lembaga Ekonomi Kalurahan Tahun 2022-2025..... II – 148
Tabel 2.108 Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 149
Tabel 2.109 BUMDes se Kabupaten Kulon Progo tahun 2025..... II – 150
Tabel 2.110 9 Indikator Bangga Kencana…… II – 155
Tabel 2.111 Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2021-2025 ..... II – 156
Tabel 2.112 PUS Bukan Peserta KB (Unmet Need) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 157
Tabel 2.113 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 157
Tabel 2.114 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 ..... II – 158

Tabel 2.115 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 160
Tabel 2.116 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2021-2025..... II – 162
Tabel 2.117 Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo..... II – 162
Tabel 2.118 VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025…… II – 163
Tabel 2.119 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 165
Tabel 2.120 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 167
Tabel 2.121 Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi..... II – 168
Tabel 2.122 Rute Layanan *Shuttle* Damri Pendukung Bandara Internasional Yogyakarta..... II – 169
Tabel 2.123 Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo..... II – 170
Tabel 2.124 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025..... II – 170
Tabel 2.125 Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 171
Tabel 2.126 Kapasitas *Bandwith* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 172
Tabel 2.127 Cakupan Jaringan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 172
Tabel 2.128 Cakupan Jaringan Internet Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025... II – 174
Tabel 2.129 Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024..... II – 175
Tabel 2.130 Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 179
Tabel 2.131 Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon ProgoTahun 2021-2025..... II – 179
Tabel 2.132 Data UMKM Non Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 180
Tabel 2.133 Data Omset UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2021-2025..... II – 180
Tabel 2.134 Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (TOMIRA) Menurut Kapanewon Tahun 2021-2025..... II – 181
Tabel 2.135 Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)..... II – 182
Tabel 2.136 Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sektor Tahun 2025 (Juta Rupiah)..... II – 182
Tabel 2.137 Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025….....…. II – 183
Tabel 2.138 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 184
Tabel 2.139 Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 184
Tabel 2.140 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi..... II – 185
Tabel 2.141 Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional..... II – 185
Tabel 2.142 Data Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 190

Tabel 2.143 Perkembangan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa /Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021-2025..... II – 192
Tabel 2.144 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 193
Tabel 2.145 Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2021-2025..... II – 193
Tabel 2.146 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat tahun 2021-2025..... II – 194
Tabel 2.147 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2025..... II – 194
Tabel 2.148 SDM Pengelola Arsip Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 195
Tabel 2.149 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025..... II – 195
Tabel 2.150 Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2021-2025 ..... II – 196
Tabel 2.151 Kondisi Produksi Ikan, Konsumsi Ikan, Pembinaan Nelayan, dan Proporsi Tangkapan Ikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 196
Tabel 2.152 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 198
Tabel 2.153 Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 199
Tabel 2.154 Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota Se-DIY (Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2021-2025..... II – 200
Tabel 2.155 Data Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 200
Tabel 2.156 Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Beretribusi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 201
Tabel 2.157 Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 202
Tabel 2.158 Usaha Jasa Pariwisata ber-NIB tahun 2025……..... II – 203
Tabel 2.159 Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 - 2025..... II – 204
Tabel 2.160 Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025..... II – 206
Tabel 2.161 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2023-2025..... II – 206
Tabel 2.162 Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Rakyat Tahun 2021-2025..... II – 208
Tabel 2.163 Data Ekspor Bersih Tahun 2021-2025..... II – 208
Tabel 2.164 Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025..... II – 208
Tabel 2.165 Perkembangan Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021–2025.. II – 210
Tabel 2.166 Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat dan Jumlah Pedagang Tahun 2023 -2025……..... II – 211
Tabel 2.167 Rekapitulasi Kondisi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2021-2025…… II – 212
Tabel 2.168 Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Berdasarkan Sarana Perdagangan yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 212
Tabel 2.169 Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Rakyat Tahun 2021 – 2025..... II – 213

Tabel 2.170 Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025.. II – 213
Tabel 2.171 Penempatan Dan Bantuan Modal Transmigrasi Tahun 2021 – 2025…… II – 214
Tabel 2.172 Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2021-2025..... II – 214
Tabel 2.173 Daftar Perangkat Daerah Tahun 2025..... II – 215
Tabel 2.174 Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2025..... II – 218
Tabel 2.175 Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan Tahun 2023..... II – 221
Tabel 2.176 Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga PembiayaanTahun 2024..... II – 221
Tabel 2.177 Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga PembiayaanTahun 2025..... II – 222
Tabel 2.178 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)..... II – 222
Tabel 2.179 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)..... II – 222
Tabel 2.180 Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 223
Tabel 2.181 Lembaga BUMD Tahun 2025.....……..... II – 225
Tabel 2.182 Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2021-2025…… II – 225
Tabel 2.183 Nilai SPIP Untuk Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025... II – 227
Tabel 2.184 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2021-2025..... II – 228
Tabel 2.185 Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2021-2025..... II – 230
Tabel 2.186 Pelatihan Kepemimpinan ASN Tahun 2021-2025..... II – 231
Tabel 2.187 Data ASN Menurut Jabatan Tahun 2021-2025..... II – 232
Tabel 2.188 Capaian Pemkab Kulon Progo dalam Innovative Government Award..... II – 235
Tabel 2.189 Inovasi Kabupaten Kulon Progo.....……..... II – 236
Tabel 2.190 Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021-2025..... II – 240
Tabel 2.191 Jumlah SILPA Tahun 2021-2025..... II – 241
Tabel 2.192 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2025..... II – 241
Tabel 2.193 Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025..... II – 241
Tabel 2.194 Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2021-2025..... II – 242
Tabel 2.195 Perbandingan Kelompok Belanja Tahun 2021-2025 (Rp)..... II – 242
Tabel 2.196 Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan Tahun 2021-2025..... II – 243
Tabel 2.197 Produk Hukum DPRD..... II – 245
Tabel 2.198 Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 246
Tabel 2.199 Urusan Kelembagaan..... II – 247
Tabel 2.200 Urusan Kebudayaan..... II – 257
Tabel 2.201 Kondisi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025..... II – 271
Tabel 2.202 Urusan Pertanahan..... II – 272

Tabel 2.203 Progres Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan..... II – 275
Tabel 2.204 Urusan Tata Ruang..... II – 277
Tabel 2.205 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (persen)..... II – 282
Tabel 2.206 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makana di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (persen)..... II – 283
Tabel 2.207 Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 283
Tabel 2.208 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2025..... II – 284
Tabel 2.209 Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2021-2025..... II – 285
Tabel 2.210 Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 285
Tabel 2.211 Jumlah Kejadian Kejahatan Kabupaten Kulon Progo 2021-2025..... II – 287
Tabel 2.212 Jumlah Demo Tahun 2021- 2025..... II – 288
Tabel 2.213 Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2021-2025..... II – 289
Tabel 2.214 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023..... II – 290
Tabel 2.215 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024..... II – 291
Tabel 2.216 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025..... II – 291
Tabel 2.217 Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II – 292
Tabel 2.218 Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan..... II – 294
Tabel 2.219 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023..... II – 297
Tabel 2.220 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024..... II – 298
Tabel 2.221 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025..... II – 299
Tabel 2.222 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023..... II – 301
Tabel 2.223 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024..... II – 301
Tabel 2.224 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025..... II – 302
Tabel 2.225 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 304
Tabel 2.226 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024..... II – 304
Tabel 2.227 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 305
Tabel 2.228 Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.... II – 306
Tabel 2.229 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023..... II – 307
Tabel 2.230 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024..... II – 307
Tabel 2.231 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025..... II – 308
Tabel 2.232 Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 309
Tabel 2.233 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-

2025..... II – 313
Tabel 2.234 Angka Kemiskinan (Po) Kabupaten Kulon Progo (%), Tahun 2024-2025 (persen)..... II – 316
Tabel 2.235 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 -2025..... II – 320
Tabel 2.236 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo (%) Tahun 2024-2025..... II – 321
Tabel 2.237 Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo menurut Kategori 2024-2025, Perubahan, serta Andil Pertumbuhan Tahun 2025 (persen)..... II – 321
Tabel 2.238 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 323
Tabel 2.239 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 324
Tabel 2.240 Crime Rate Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 325
Tabel 2.241 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo (%), Tahun 2024-2025..... II – 326
Tabel 2.242 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 327
Tabel 2.243 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (tahun). II – 328
Tabel 2.244 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (tahun)..... II – 328
Tabel 2.245 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025 (ribu rupiah/orang/tahun)..... II – 329
Tabel 2.246 Rata-rata indeks dimensi ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, Tahun 2024-2025..... II – 329
Tabel 2.247 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (% PDRB)..... II – 330
Tabel 2.248 PDRB per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (ribu rupiah)..... II – 330
Tabel 2.249 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024- 2025 (miliar rupiah)..... II – 331
Tabel 2.250 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kulon Progo Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)..... II – 331
Tabel 2.251 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (%)..... II – 331
Tabel 2.252 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025..... II – 332
Tabel 2.253 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025..... II – 332
Tabel 2.254 Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025..... II – 332
Tabel 2.255 Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025..... II – 334
Tabel 2.256 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 334
Tabel 2.257 Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 335

Tabel 2.258 Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 335
Tabel 2.259 Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (%)..... II – 335
Tabel 2.260 Persentase Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (%)..... II – 336
Tabel 2.261 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 336
Tabel 2.262 Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025 (Level of Service/LOS)..... II – 336
Tabel 2.263 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025.. II – 337
Tabel 2.264 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025..... II – 338
Tabel 2.265 Predikat Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 339
Tabel 2.266 Capaian Kinerja Fisik RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 339
Tabel 2.267 Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Daerah s.d Triwulan IV Tahun 2025..... II – 340
Tabel 2.268 IP SPM Kabupaten Kulon Progo (semua bidang)..... II – 342
Tabel 2.269 Persentase Realisasi Capaian SPM Kabupaten Kulon Progo (per bidang)..... II – 342
Tabel 2.270 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025..... II – 344
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2023 s.d 2027 Kabupaten Kulon Progo..... III – 17
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2023 s.d 2027 Kabupaten Kulon Progo..... III – 20
Tabel 3.3 Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2023 s.d. 2027..... III – 21
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2026-2027..... IV – 2
Tabel 4.2 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2027..... IV – 13
Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kulon Progo 2027 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027..... IV – 15
Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD DIY 2027 dengan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2027..... IV – 17
Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Nasional pada RKP 2027 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2027..... IV – 18
Tabel 4.6 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama…… IV – 20
Tabel 4.7 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan…… IV – 27
Tabel 4.8 Intervensi Kabupaten Kulon Progo terhadap Proyek Strategis Nasional…… IV – 30
Tabel 4.9 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita, Hasil Kesepakatan Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027..... IV – 34

Tabel 4.10 Gambaran Konsistensi Program Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027..... IV – 58
Tabel 4.11 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat..... IV – 60
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027..... VI – 1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027… VI – 2
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027…… VI – 3
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027…… VI – 9
Tabel 6.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027…… VI – 32
Tabel 6.6 Indikator Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2026…… VI – 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap Penyusunan RKPD ..... I – 2
Gambar 1.2 Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya..... I – 6
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo..... II – 3
Gambar 2.2 Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo..... II – 4
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Kulon Progo..... II – 7
Gambar 2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo..... II – 16
Gambar 2.5 Peta Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo..... II – 25
Gambar 2.6 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kulon Progo..... II – 27
Gambar 2.7 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo..... II – 28
Gambar 2.8 Peta Wilayah Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Kulon Progo. II – 29
Gambar 2.9 Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kulon Progo..... II – 30
Gambar 2.10 Peta Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Kulon Progo. II – 31
Gambar 2.11 Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kulon Progo..... II – 33
Gambar 2.12 Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo..... II – 34
Gambar 2.13 Peta Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kulon Progo..... II – 36
Gambar 2.14 Peta Wilayah Rawan Bencana Wabah Penyakit Kabupaten Kulon Progo..... II – 37
Gambar 2.15 Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Kulon Progo..... II – 38
Gambar 2.16 Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kulon Progo II – 39
Gambar 2.17 Grafik Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk..... II – 43
Gambar 2.18 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025..... II – 45
Gambar 2.19 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (ribu rupiah)..... II – 52
Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2021-2025..... II – 54
Gambar 2.21 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kulon Progo (%) Tahun 2024-2025..... II – 58
Gambar 2.22 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025 (tahun)..... II – 59
Gambar 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2021 -2025..... II – 60
Gambar 2.24 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2021-2025 (tahun)..... II – 62
Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025..... II – 63
Gambar 2.26 Persentase Capaian Indikator TPB..... II – 66
Gambar 2.27 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2025..... II – 85

Gambar 2.28 Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025..... II – 92
Gambar 2.29 Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2021 – 2025..... II – 93
Gambar 2.30 Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2019 – 2025..... II – 93
Gambar 2.31 Jumlah Pelanggan Air Minum Tirta Binangun Tahun 2020-2025..... II – 98
Gambar 2.32 Akses Air Bersih Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 II – 101
Gambar 2.33 Akses Air Limbah Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 102
Gambar 2.34 Kondisi Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 103
Gambar 2.35 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025..... II – 112
Gambar 2.36 Cakupan Semesta Peserta Aktif BPJS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025…… II – 126
Gambar 2.37 Kondisi BUMDes Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2025..... II – 152
Gambar 2.38 Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025..... II – 176
Gambar 2.39 Presentasi Hasil Evaluasi Monev KID Tahun 2025…… II – 177
Gambar 2.40 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2025…… II – 183
Gambar 2.41 Perkembangan Laba Disetor oleh BUMD Tahun 2021-2025..... II – 224
Gambar 2.42 Tingkat Capaian Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025. II – 230
Gambar 2.43 Perkembangan Jumlah Peserta Anugerah Iptek Kreanova Menoreh Tahun 2021-2025..... II – 234
Gambar 2.44 Crime Rate di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025…… II – 287
Gambar 2.45 Potret IPM Kulon progo dengan Provinsi dan Nasional…… II – 314
Gambar 2.46 IPM Antar Kabupaten/Kota DIY…… II – 315
Gambar 2.47 Tingkat Kemiskinan Kulon progo, DIY, dan Nasional…… II – 317
Gambar 2.48 Persentase Penduduk Miskin Antar Kab/Kota di DIY…… II – 317
Gambar 2.49 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Antar Kab/Kota di DIY…… II – 318
Gambar 2.50 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2025…… II – 435
Gambar 3.1 PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo Tahun 2021-2025 dan Proyeksi 2026 dan 2027 (miliar rupiah) ..... III – 2
Gambar 3.2 Kontribusi Enam Sektor Terbesar Pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2021-2025 (%)..... III – 3
Gambar 3.3 Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2025 Menurut Lapangan Usaha (%)..... III – 4
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2021-2025 dan Proyeksi 2026-2027 III – 5
Gambar 3.5 PDRB Per Kapita ADHB tahun 2021-2025 dan Proyeksi 2026-2027 (juta rupiah) ..... III – 6
Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2021-2025 dan Proyeksi 2026 dan 2027..... III – 7
Gambar 3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2021-2025 dan Proyeksi 2026 dan 2027..... III – 8

Gambar 3.8 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027..... III – 9
Gambar 3.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027…… III – 10
Gambar 3.10 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) …… III – 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang akan diselesaikan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2025, persentase penurunan kemiskinan 1,09 persen poin dari 15,62 persen menjadi 14,53 persen merupakan penurunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 pada 0,02 persen poin. Meskipun tahun 2025 persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan paling besar dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY, akan tetapi Kabupaten Kulon Progo juga masih menjadi kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY. Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian khusus. Walaupun indikator indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih di bawah capaian rata-rata DIY, sehingga prioritas pembangunan SDM juga harus selalu ditingkatkan.

Permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2025 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2027, yang merupakan tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal ini juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah, RKPD Tahun 2027 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

a. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
c. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi fungsi pengawasan lembaga legislatif. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kalurahan/ kelurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo dimulai dari analisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan kondisi daerah, kebijakan nasional dan provinsi, yang selanjutnya dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik yakni berupa analisis isu strategis daerah. Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tahap penyusunan RKPD dimulai dengan orientasi penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD, pelaksanaan reviu oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah, pelaksanaan fasilitasi Gubernur DIY, dan penetapan RKPD Tahun 2027. Secara detail, tahapan penyusunan RKPD disajikan dalam gambar 1 berikut ini.

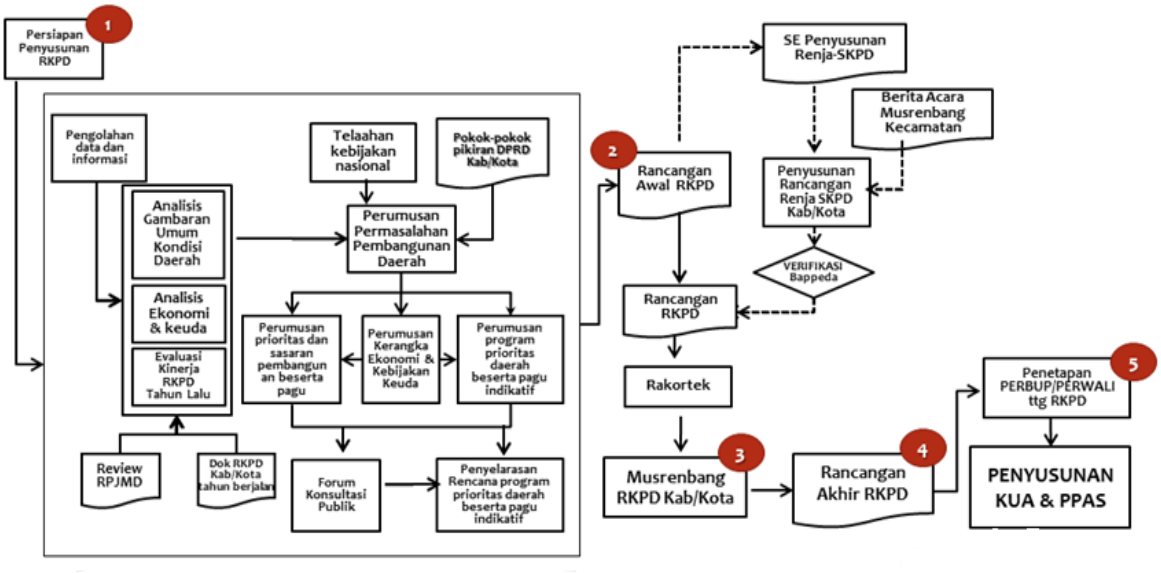

Gambar 1.1

Tahap Penyusunan RKPD

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2024);
30. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 52);

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan/ berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka RKPD Kabupaten Kulon Progo akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini

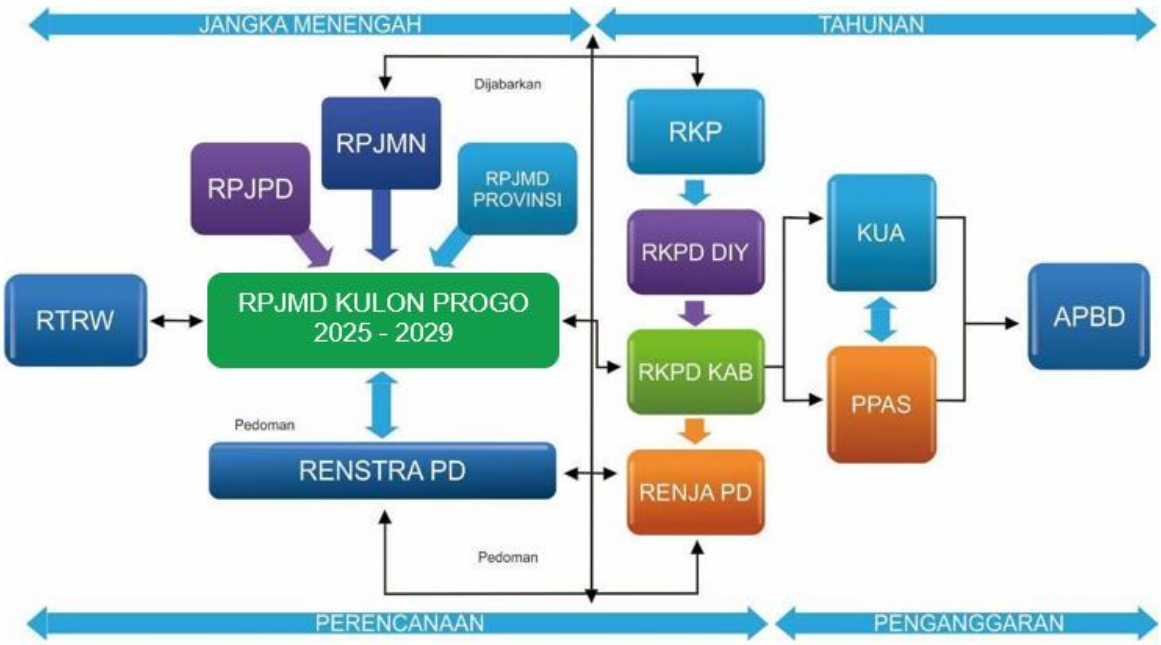

Gambar 1.2
Hubungan antara Dokumen RKPD
dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2027 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.

Tujuan disusunnya RKPD tahun 2027 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum Kabupaten Kulon Progo, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu, perkiraan tahun berjalan, serta proyeksi tahun n+1, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2025-2029, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2025-2029.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat DIY. Kabupaten Kulon Progo tidak bersinggungan langsung dengan Kota Yogyakarta dan harus menempuh jarak kurang lebih 25 km untuk mencapainya. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, setiap kapanewon memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Berdasarkan karakteristik topografinya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 3 zona yakni wilayah utara, tengah dan selatan. Dengan karakteristik topografi demikian menyebabkan perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda di tiap zona. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 576,821 km2. Secara rinci nama kapanewon dan prosentase luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
1.	Temon	36.523	6,33
2.	Wates	32.425	5,62
3.	Panjatan	43.98	7,62
4.	Galur	32.202	5,58
5.	Lendah	37.563	6,51

No	Kapanewon	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
6.	Sentolo	53.867	9,34
7.	Pengasih	58.103	10,07
8.	Kokap	70.162	12,16
9.	Girimulyo	55.309	9,59
10.	Nanggulan	39.114	6,78
11.	Kalibawang	66.32	11,50
12.	Samigaluh	51.253	8,89
	Kabupaten Kulon Progo	**576.821**	**100,00**

Sumber data : Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi DIY, 2026.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara.
- Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur.
- Samudera Hindia di bagian selatan.
- Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat.

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut ini :

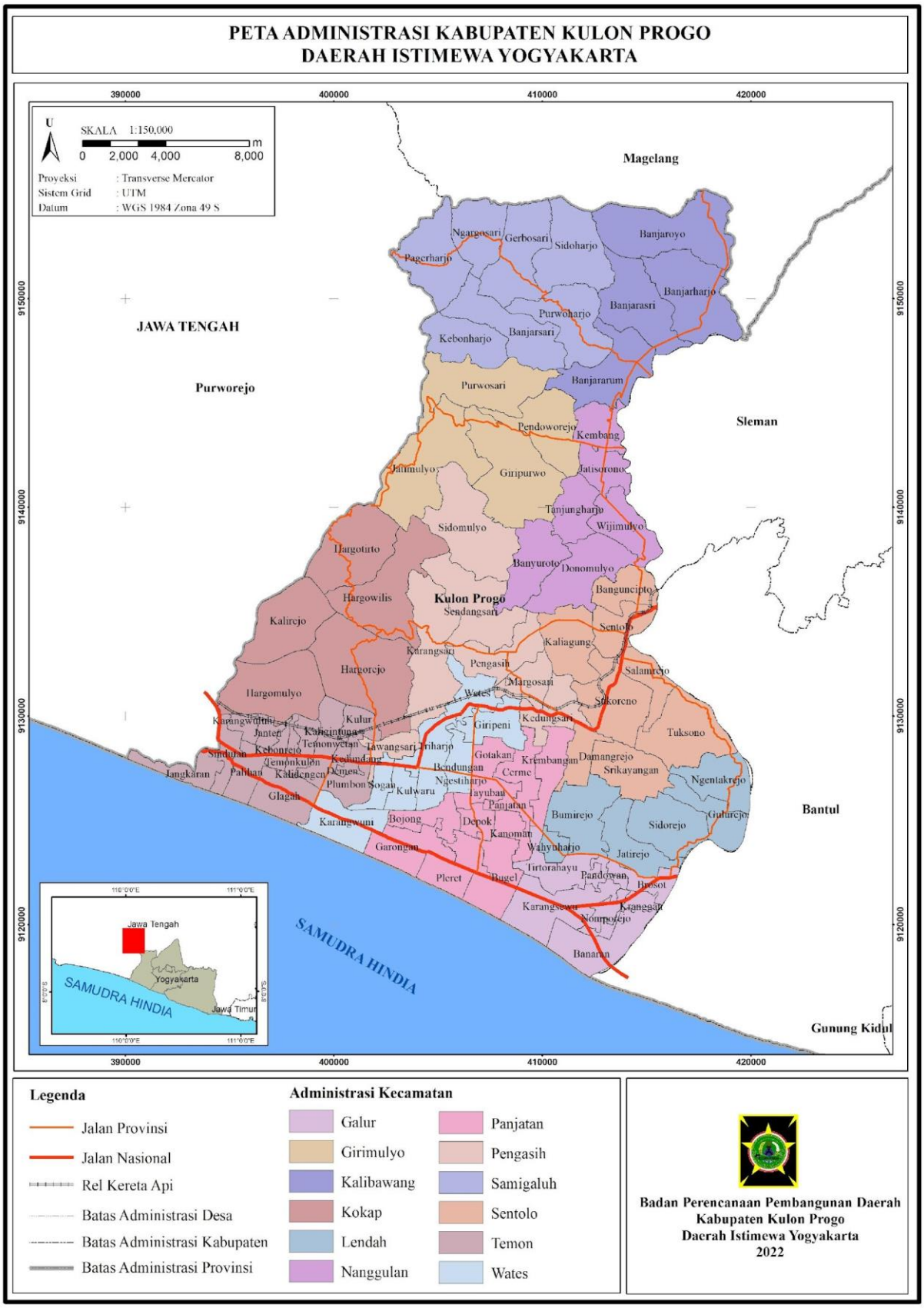

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7°38'30" – 7°58'3" LS dan 110°1'37" – 110°16'26" BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategic* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, merupakan 'pintu gerbang' Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa (Kabupaten Purworejo) dan bagian utara Pulau Jawa (Kabupaten Magelang, KSPN Borobudur). Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia. Posisi *geostrategic* dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2

Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, tentunya akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur wisata dari bandara baru menuju

Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Keberadaan BIY dapat memberikan nilai tambah/*global value chain* bagi Kabupaten Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi.

Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai di Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan. Posisi *geostrategi*c tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu:

a. Kawasan pesisir

   Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, sebagian Kapanewon Sentolo, dan sebagian Kapanewon Pengasih. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2 persen, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

b. Kawasan dataran

   Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih dan sebagian Kapanewon Kalibawang. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15 persen, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Kawasan pegunungan

   Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang.

2.1.1.1.3 Topografis

a. Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng <2^0 (40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan >40%. Untuk lebih jelasnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng

Kabupaten Kulon Progo

No	Kemiringan Lereng	Persentase (%)
1.	< 2^0	40,11
2.	3^0-15^0	18,70
3.	16^0-40^0	22,46
4.	>40^0	18,73
	Kabupaten Kulon Progo	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020, diolah

Dilihat dalam skala kapanewon wilayah dengan kemiringan lereng >40^0 (daerah pegunungan) berada pada kawasan barat Kulon Progo yang membentang dari Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Nanggulan. Sedangkan Kapanewon yang tidak mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng >40^0 meliputi Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, dan Kapanewon Sentolo. Kelima Kapanewon tersebut terletak di daerah dataran rendah sehingga tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi pegunungan. Kapanewon yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng <2^0 terluas adalah Kapanewon Panjatan. Sedangkan Kapanewon Samigaluh merupakan kapanewon yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi dataran. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah, aktivitas ekonomi maupun konektivitas antar daerah.

b. **Ketinggian Lahan**

Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 meter di atas permukaan laut (dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,84% berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 meter dpal, dan 11,37% berada pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3

Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo

No	Ketinggian Lahan	Cakupan Kapanewon
1.	500-1000 m dpal	Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang
2.	100-500 m dpal	Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Kokap
3.	0-100 m dpal	Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Lendah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020 diolah

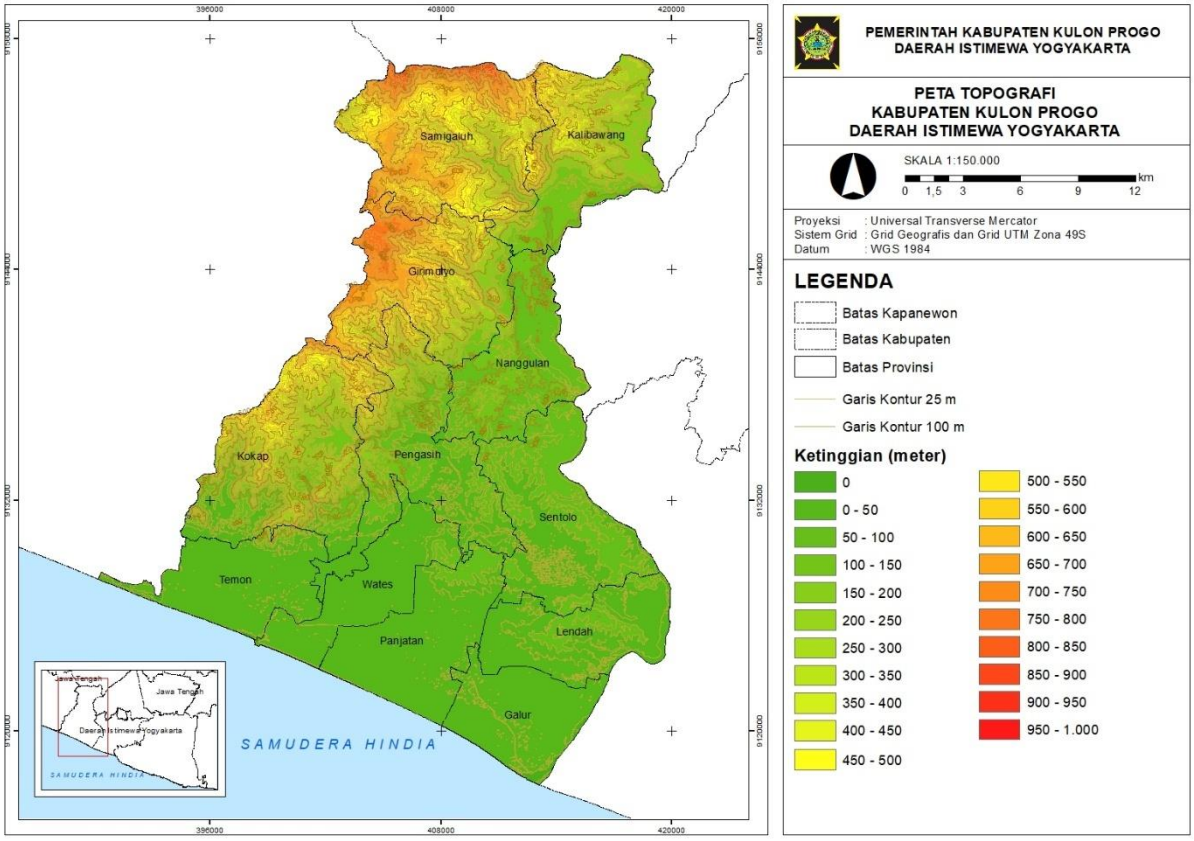

Gambar 2.3

Peta Topografi Kabupaten Kulon Progo

2.1.1.1.4 Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

1. Karakteristik dan Struktur

Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau menyerupai kubah *(Dome),* dengan struktur geologi daerah terdiri atas :

a. Struktur Geologi berupa Perlipatan Batuan (*Fold*), merupakan deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur.

b. Struktur Geologi Patahan/Sesar (*Fault*), merupakan bagian dari batuan yang saling bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain yang dipisahkan oleh zona patahan atau dapat diistilahkan pecahan batuan yang disertai gerakan massa batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan ini merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta adalah Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon Progo dan Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota Yogyakarta menjadi dataran rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, sedangkan patahan Progo berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di bagian timur Kulon Progo meliputi wilayah Kalibawang bagian timur, Nanggulan bagian timur, Sentolo, Panjatan, Galur dan Lendah.

- Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. Patahan ini banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo utara bagian barat, dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat laut – tenggara, barat – timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat di wilayah Kapanewon Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, Nanggulan bagian barat.

c. Struktur Kekar (*joint*) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. Struktur kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua.

2. Formasi Batuan

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan terobosan (4,43%). Lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4

Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Luas Satuan Batuan (Ha)				Jumlah
		Endapan Gunung Api	Batuan Sedimen	Batuan Gunung Api	Batuan Instrusi	
1.	Temon	3.688	-	-	-	**3.688**
2.	Wates	3.063	138	-	-	**3.197**
3.	Panjatan	3.872	588	-	-	**4.454**
4.	Galur	2.229	-	1.063	-	**3.288**
5.	Lendah	2.009	1.075	475	-	**3.555**
6.	Sentolo	3.165	1.175	925	-	**5.259**
7.	Pengasih	4.342	1.825	-	-	**6.161**
8.	Kokap	550	4.230	-	2.600	**7.372**
9.	Girimulyo	125	5.366	-	-	**5.485**
10.	Nanggulan	250	2.736	975	-	**3.957**
11.	Kalibawang	375	3.971	950	-	**5.290**
12.	Samigaluh	-	6.929	-	-	**6.922**
TOTAL		**23.667**	**28.032**	**4.388**	**2.600**	**58.628**
Persentase		**40,37%**	**47,81%**	**7,48%**	**4,43%**	**100%**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007

Kabupaten Kulon Progo secara stratigrafis termasuk ke dalam stratigrafis Pegunungan Kulon Progo. Unit stratigrafis yang paling tua di daerah Pegunungan Kulon Progo dikenal dengan Formasi Nanggulan, kemudian secara tidak selaras diatasnya diendapkan batuan-batuan dari Formasi Jonggaran dan Formasi Sentolo, yang menurut Van Bemmelen (1949) kedua formasi terakhir ini mempunyai umur yang sama, keduanya hanya berbeda faises.

a. Formasi Nanggulan

Formasi Nanggulan merupakan formasi yang paling tua di daerah pegunungan Kulon Progo. Singkapan batuan-batuan penyusun dari Formasi Nanggulan dijumpai di sekitar Kalurahan Nanggulan, yang merupakan kaki sebelah timur dari Pegunungan Kulon Progo. Penyusun batuan dari formasi ini terdiri dari batupasir dengan sisipan lignit, Napal pasiran, batulempung dengan

konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir dan tuff serta kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan ketebalan formasi ini adalah 300 meter.

b. Formasi Andesit Tua

Batuan penyusun dari formasi ini terdiri atas breksi andesit, tuff, tufflapili, aglomerat dan sisipan aliran lava andesit. Lava, terutama terdiri dari andesit hiperstein dan andesit augit hornblende. Formasi Andesit Tua ini mempunyai ketebalan mencapai 660 meter mempunyai kedudukan yang tidak selaras di atas formasi Nanggulan. Batuan penyusun formasi ini berasal dari kegiatan vulkanisme di daerah tersebut, yaitu dari beberapa gunung api tua di daerah Pegunungan Kulon Progo yang oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai Gunung Api Andesit Tua. Gunung api yang dimaksud adalah Gunung Gajah, di bagian tengah pegunungan, Gunung Ijo di bagian selatan, serta Gunung Menoreh di bagian utara Pegunungan Kulon Progo. Formasi Andesit Tua diperkirakan berumur Oligosen Atas sampai Meiosen Bawah.

c. Formasi Kaligesing

Formasi Kaligesing tersusun oleh litologi breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan. Formasi ini berdasarkan radiometroi berumur Oligosen dan menumpang tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Formasi ini terdapat di bagian Tengah sisi selatan barat dan barat laut dari kubah Kulon Progo.

d. Formasi Dukuh

Formasi Dukuh tersusun oleh perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batu lempung. Litologi satuan ini menunjukkan perlapisan baik dan silang – siur, sejajar pada batulempung dan batupasir. Formasi ini tidak selaras ditas Formasi Nanggulan. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan pelamparan di daerah Dukuh Kapanewon Samigaluh.

e. Formasi Jonggrangan

Litologi dari Formasi Jonggrangan ini tersingkap baik di sekitar Kalurahan Jonggrangan, suatu Kalurahan yang ketinggiannya di atas 700 meter dari muka air laut dan disebut sebagai Plato Jonggrangan. Bagian bawah dari formasi ini terdiri dari Konglomerat yang ditumpangi oleh Napal tufan dan Batupasir gampingan dengan sisipan Lignit. Formasi Jonggrangan ini terletak secara tidak selaras di atas Formasi Andesit Tua. Ketebalan dari Formasi Jonggrangan ini mencapai sekitar 250 meter (Van Bemmelen, (1949). Formasi Jonggrangan dan Formasi Sentolo keduanya merupakan Formasi Kulon Progo ("*Westopo Beds*") diduga berumur Miosen Tengah.

f. Formasi Sentolo

Litologi penyusun Formasi Sentolo ini di bagian bawah, terdiri dari Aglomerat dan Napal, semakin ke atas berubah menjadi Batugamping berlapis dengan fasies neritik. Batu gamping koral dijumpai secara lokal, menunjukkan umur yang sama dengan formasi Jonggrangan, tetapi di beberapa tempat umur Formasi Sentolo adalah lebih muda Formasi Sentolo ini mempunyai ketebalan sekitar 950 meter. Satuan Endapan Vulkanik Kuarter merupakan endapan Gunung Merapi yang tersusun oleh breksi sisipan laca dan endapan lahar. Satuan ini berumur Pliosen-Pleistosen. Satuan ini terdapat di atas semua formasi di bagian timur. Satuan Endapan Aluvial tersusun oleh endapan kerikil, pasir, lanau dan lempung dan bongkah sepanjang sungai dan dataran pantai.

Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5

Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo

Umur	Formasi	Deskripsi Litologi	Ketebalan (m)
Kuarter	Aluvium	Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai dan dataran pantai.	**100**
Pliosen-Pleistosen	Endapan Vulkanik Kuarter	breksi sisipan lava dan endapan lahar	**20**
Miosen Bawah	Sentolo	Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas diatasnya napal tufaan bersalangan dengan vitriks tuf	**950**
Miosen Bawah	Jonggrangan	Bagian atas batu gamping berlapis ke arah atas menjadi batu gamping koral Bagian bawah konglomerat diatasnya napal tufaan dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit	**250**
Oligo–Miosen	Dukuh	Perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batulempung	**660**
Oligosen	Kaligesing	breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan	**600**
Oligo-Miosen	Andesit Tua	Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen batuan lebih tua.	**660**
Eosen Atas – Oligosen	Nanggulan	Batu pasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batu lempung gampingan struktur konkresi, selang-seling napal dan batu gamping, batu pasir dan tuf, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska	**300**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012

b. Potensi Air Tanah

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) tersendiri yang tidak melampaui ke wilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates. CAT Wates telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Hendrayana (2020) selain CAT Wates, terdapat pula CAT Menoreh yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan kalkulasi pada penelitian tersebut, CAT Wates memiliki potensi air tanah bebas sejumlah 34.650.385 m^3/tahun sedangkan CAT Menoreh sebesar 56.889.340 m^3/tahun. Pemanfaatan CAT pada umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian, industri dan non industri lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan perkantoran. Berdasarkan perhitungan, proyeksi pemanfaatan air tanah bebas pada CAT Wates pada tahun 2021 mencapai 7.721.376 m3. Selain Cekungan Air Tanah (Cekungan Wates), sumber mata air yang ada di Kabupaten Kulon Progo lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6

Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates

No	Sumber	Lokasi (Kapanewon)	Debit (Liter/Detik)	Pemanfaatan
1.	Mata air Clereng	Pengasih	125	Sudah/PDAM
2.	Tuk Mudal	Girimulyo	5 – 15	Sudah
3.	Tuk Gua Kiskendo	Girimulyo	24 – 60	Sudah
4.	Tuk Grembul	Kalibawang	5 – 10	Sudah/PDAM
5.	Tuk Gua Upas	Samigaluh	1,5 - 3,5	Sudah/PDAM
6.	Mata air Sekepyar dan Kayangan	Samigaluh	-	Belum
7.	Tuk Mudal Anjir	Pengasih	3 – 11	MCK
8.	Cekungan Air Tanah Wates *)	Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan	34,6 juta m3/th	Sudah

Sumber data : - Bappeda, DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2018
- *) Hendrayana, Heru.dkk. 2020. Neraca Airtanah Cekungan Airtanah (CAT) Menoreh dan Wates Kabupaten Kulo Progo. Geomedia Vol.18 No.2 Tahun 2020.Hal 10-29

2.1.1.1.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo, DAS Serang dan sebagian kecil yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo

No.	DAS	Luas DAS (ha)	Sub DAS
1	Bogowonto	2.509,931	Dekso
			Gesing
			Keduren
			Kodil
			Ngasinan
			Plamping
			Semanggung
2	Serang	23.532,85	Nagung
			Ngrancah
			Serang Hilir
			Serang Sekiyep
			Sidatan
			Sumitro
3	Progo	30.141,92	Batang
			Bedog

No.	DAS	Luas DAS (ha)	Sub DAS
			Blongkeng
			Diro
			Gandri
			Jenes
			Kedung-Gong
			Konteng
			Krasak
			Krawang
			Mlinting Putih
			Penter
			Progo Hilir
			Sileng
			Sindon Salak
			Sudu
			Tangsi
			Tinalah

Sumber data: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017

Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah pengaliran seluas 8.894 hektare, dengan debit maksimum 381,90 m³/detik dan debit minimum 13,00 m³/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali Serang dengan anak–anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektare, dengan debit maksimum 153,6 m³/detik dan debit minimum 0,03 m³/detik. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.

Kabupaten Kulon Progo memiliki danau buatan yaitu Waduk Sermo yang terletak di Kapanewon Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 Ha. Waduk ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplisi irigasi sawah yang berada di Kapanewon Temon, Wates dan Pengasih dan sebagian suplisi kebutuhan air minum.

b. Sungai

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Kulon Progo memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara umum sungai utama di Kulon Progo adalah Sungai Progo dan Sungai Serang. Sungai Progo memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kulon Progo. Sungai Progo menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Kulon Progo untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan industri khususnya pada kawasan perkotaan. Sungai Progo juga menjadi penyokong utama air irigasi lahan pertanian pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Daerah Irigasi Sapon yang merupakan area pertanian irigasi teknis terluas yang berada di Kulon Progo. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Progo Opak Serang 2015-2035 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

23/KPTS/M/2016, Debit maksimum yang tercatat di stasiun Kalibawang adalah sebesar 331 m^3/detik dan debit minimum sebesar 12 m^3/detik.

Sungai Serang meliputi daerah tangkapan air seluas 280 kilometer persegi dengan debit rerata bulanan yang tercatat di stasiun Durungan sebesar 10,83 m^3/detik dengan debit maksimum sebesar 61,10 m^3/detik dan debit minimum sebesar 0,28 m^3/detik. Sungai Serang memiliki anak Sungai Ngrancah yang dibendung untuk mengoperasikan Waduk Sermo untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan suplesi irigasi pada sistem Daerah Irigasi Kalibawang. Secara umum kondisi morfologi sungai di Kulon Progo sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 yang menyajikan data inventarisasi sungai di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.8

Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Kedalaman (m)
1	Progo	56,70	650	6
2	Serang	23,16	60	8
3	Ngrancah	9,12	50	10
4	Gede	11,17	50	10
5	Nagung	10,97	20	8
6	Seling	7,75	15	4
7	Pening	7,63	15	6
8	Sidatan	3,86	8	2
9	Sari	3,31	6	3
10	Bogem	2,60	6	3
11	Kopat	1,69	8	3
12	Papah	21,94	30	5
13	Tinalah	6,70	50	15
14	Kamal/Sudu	11,60	20	12
15	Salak	5,64	10	6
16	Dunggong	5,45	10	7
17	Klegung	6,48	15	6
18	Rowo Jembangan	8,30	12	3
19	Banyu Meneng	5,03	8	5

Sumber data: Neraca Sumber Daya Alam Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018.

2.1.1.1.6 Klimatologi

a. Iklim

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 (enam) bulan. Iklim musim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon Progo juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia maka terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. Sedangkan klasifikasi iklim dengan menggunakan deskripsi tipe iklim menurut F. H. Schmidt dan J. H. A Ferguson yang didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah, dimana bulan basah adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif >100 mm, bulan kering adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif <60 mm dan bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan rata-rata antara 60-100 mm. Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan pada nisbah bulan kering ke bulan basah yang disimbolkan dengan Q (dalam persen), yaitu iklim A, Q<14,3, daerah sangat basah, hutan hujan tropis; iklim B, 14,3=<Q<33,3, daerah basah, hutan hujan tropis; iklim C, 33,3=<Q<60,0, daerah agak basah, hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau); iklim D, 60,0=<Q<100,0, daerah sedang, hutan peluruh; iklim E, 100,0=<Q<167,0, daerah agak kering, padang sabana; iklim F, 167,0=<Q<300,0, daerah kering, padang sabana; iklim G, 300,0=<Q<700,0, daerah sangat kering, padang ilalang; dan iklim H, Q>=700,0 daerah ekstrim kering, padang ilalang.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh selama 5 tahun (2015-2019) dalam Buku Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka yang diterbitkan BPS Tahun 2020, maka Kabupaten Kulon Progo mempunyai rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 dan rata-rata bulan basah sebanyak 7,17, sehingga akan didapatkan nilai Q sebesar 53,49%. Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C kategori daerah agak basah.

b. Curah Hujan

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw. Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan November - Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan.

Berikut secara rinci Curah Hujan (CH) dan Hari Hujan (HH) menurut bulan dan rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2023 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan 2025

No	Bulan	2023		2025	
		CH	HH	CH	HH
1	Januari	199,4	27	450,40	25
2	Pebruari	232,1	24	222,80	16
3	Maret	203	19	219,90	21
4	April	115,9	14	173,20	15
5	Mei	85,2	5	137,10	14
6	Juni	53,4	8	33,40	11
7	Juli	49,4	9	18,60	5
8	Agustus	6	2	161,40	8
9	September	-	1	64,80	13
10	Oktober	-	-	253,00	20
11	Nopember	8	8	406,80	20
12	Desember	36,4	6	367,50	19
	Jumlah	**3.572**	**155**	**2.508,90**	**187**
	Rata-rata	**297,67**	**12,92**	**209,80**	**15,58**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan secara umum dapat dikategorikan menggunakan pendekatan klasifikasi penutup lahan terdiri atas daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi terdiri atas lahan pertanian dan lahan non pertanian. Sedangkan daerah tak bervegetasi terdiri dari lahan terbuka, permukiman serta perairan. Mendasar pada hal tersebut, penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 terdiri atas daerah bervegatasi sebesar 77% dan daerah tak bervegetasi sebesar 23%. Adapun pada daerah bervegetasi terdiri dari 73% lahan pertanian dan 4% lahan non pertanian. Sedangkan pada daerah tak bervegatasi terdiri dari 20,4% permukiman, 2,3% perairan dan 0,5% lahan terbuka. Penggunaan lahan yang masih didominasi oleh lahan pertanian menunjukkan karakteristik masyarakat Kulon Progo yang agraris. Sebaran penggunaan lahan diilustrasikan pada gambar berikut.

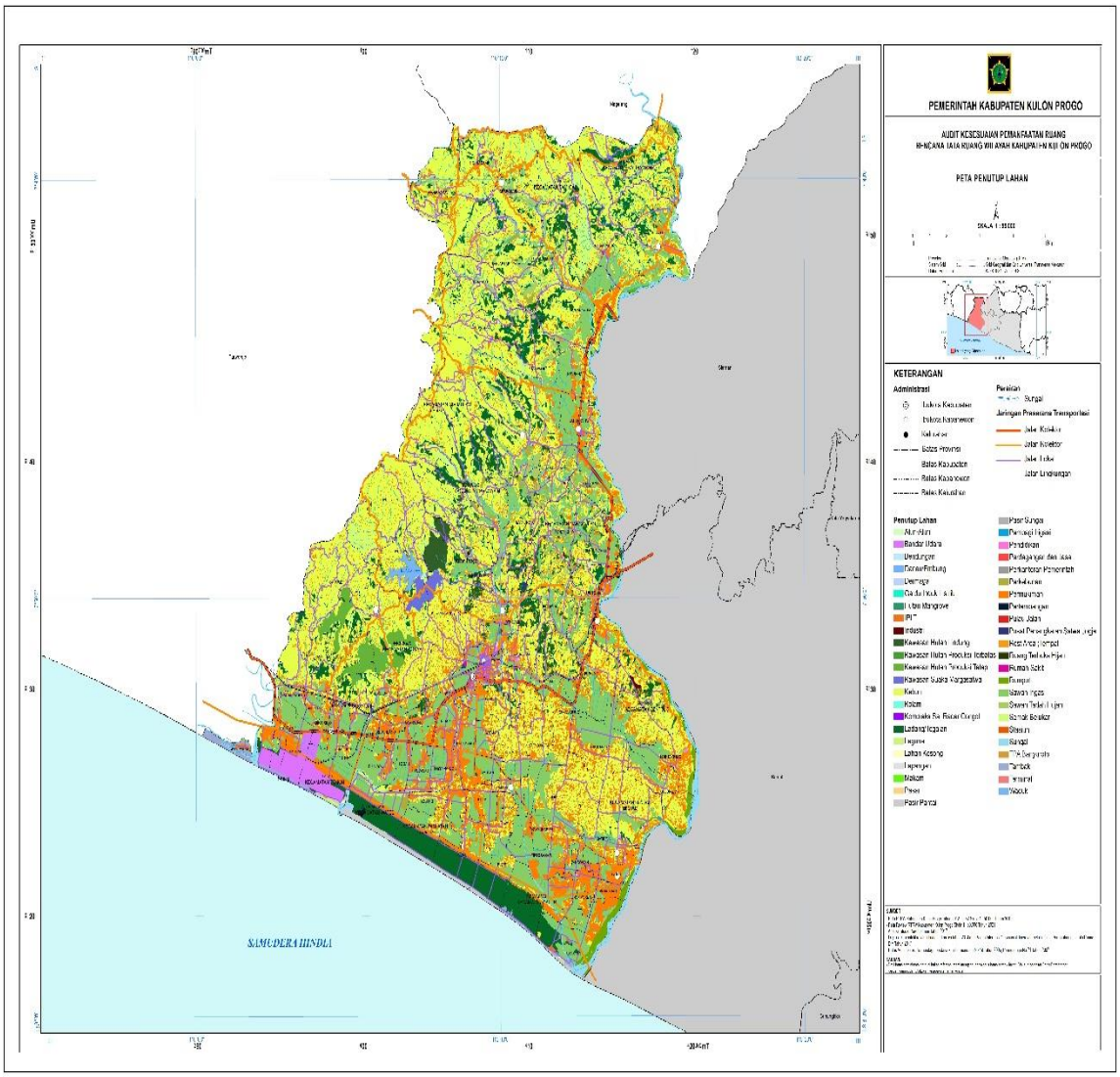

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha NIti Mandhala lan Niti Sasana) Kab.Kulon Progo, 2026 (diolah)

Gambar 2.4

Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo

Apabila dilihat dari penggunaan lahan terluas di Kabupaten Kulon Progo, berikut disajikan 10 penggunaan lahan terluas berdasarkan kelas penggunaan lahan pada tahun 2024 – 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025

Penggunaan Lahan	2024		2025	
	Ha	%	Ha	%
Kebun	25.218,52	43,79	25.142,87	43,57
Permukiman	10.421,25	18,10	10.449,15	18,11
Sawah Irigasi	9.881,12	17,16	9.864,52	17,09
Ladang	5.479,53	9,52	5.707,82	9,89
Sawah Tadah Hujan	1.320,05	2,29	1.358,71	2,35
Sungai	924,64	1,61	985,24	1,71
Semak Belukar	738,49	1,28	728,50	1,26
Kawasan Hutan Produksi Tetap	605,48	1,05	605,47	1,05
Bandara/Pelabuhan	594,20	1,03	586,09	1,02
Rumput	502,88	0,87	338,47	0,59

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, 2026. *Diolah*.

Penggunaan lahan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, masih didominasi oleh lahan kebun yang kemudian disusul oleh permukiman dan sawah irigasi. Hal tersebut mengindikasikan aktivitas ekonomi yang masih didominasi dari sektor pertanian.

2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan substansi pola ruang yang dirumuskan dalam substansi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari DPRD Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Kawasan lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan terdiri dari:

1. Badan Air

   Kawasan Lindung Badan air meliputi waduk dan sungai. Luas Badan air adalah kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) hektar yang terdiri atas waduk, embung, dan sungai yang berada di seluruh kapanewon.
2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar, berada di Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, dan Samigaluh.
3. Kawasan Perlindungan Setempat

   Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 428 (empat ratus dua puluh delapan) hektar berupa sempadan pantai yang terdapat di Kapanewon Galur, Kapanewon Panjatan, Kaanewon Temon, dan Kapanewon Wates.
4. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi terdiri atas:

a. Kawasan suaka alam berupa suaka margasatwa dengan luas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektare berada di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih.
b. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa suaka pesisir dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare, berada di Kapanewon Galur..

5. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung Geologi berupa:

a. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
b. Kawasan Keunikan Bentang Alam.

Untuk kawasan Keunikan Batuan dan Fosil seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, meliputi:

a. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang yang berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Naggulan.
b. Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih.

Sedangkan untuk Kawasan Keunikan Bentang Alam seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektare yang meliputi:

a. Goa Kiskendo yang berada di Kapanewon Girimulyo;
b. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari yang berada di Kapanewon Samigaluh; dan
c. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo yang berada di Kapanewon Samigaluh.

6. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya memiliki luas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa Makam Girigondo yang berada di Kapanewon Temon.

7. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Kapanewon Temon.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Kesesuaian kawasan untuk kegiatan budidaya, selain berdasar atas perhitungan skor kesesuaian lahan, secara lebih rinci juga dilakukan identifikasi faktor-faktor fisik kawasan untuk kesesuaian fungsi kegiatan tertentu. Bentang alam Kabupaten Kulon Progo merupakan area dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan lerengan beragam mulai 0-70 persen. Kawasan budidaya terdiri dari:

1) Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, dan Kapanewon Samigaluh. Sedangkan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) hektar berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Temon.

2) Kawasan perkebunan rakyat

Perkebunan Rakyat merupakan perkebunan yang dikelola masyarakat dan bertempat di lahan milik masyarakat. Luasan kawasan perkebunan rakyat adalah 4.885 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar yang berada di seluruh Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates.

3) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan sebagian besar merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan tanaman pangan kurang lebih seluas 11.041 (sebelas ribu empat puluh satu) hektare yang berada di seluruh kapanewon.

b. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan hortikultura sebagian besar merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Lokasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 3.544 (tiga ribu lima ratus empat puluh empat) hektar tersebar di seluruh kapanewon.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan dengan potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, tembakau, nilam, lada, teh, gebang, jambu mete. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 2.876 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektare yang berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapnewon Nanggulan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, dan Kapanewon Temon.

4) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Lokasi pengembangan kawasan perikanan:

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) meliputi Kapanewon Temon dan Kapanewon Wates seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare.

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektare yang berada di Kapanewon Galur, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Pengasih, dan Kapanewon Temon.

5) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam dengan luasan kurang lebih 11 (sebelas) hektare yang terdapat di Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Temon, Kapanewon Galur, Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Wates.

6) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan seluas kurang lebih 2.313 (dua ribu tiga ratus tiga belas) hektare yang berada di Kapanewon Wates, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Temon.

7) Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata meliputi luasan kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektare meliputi:

a. Laguna Pantai Glagah di Kapanewon Temon;
b. Laguna Pantai Trisik di Kapanewon Galur;
c. Pantai Congot di Kapanewon Temon;
d. Taman Wisata Ancol di Kapanewon Kalibawang;
e. Taman Wisata Embung Krapyak di Kapanewon Kalibawang; dan
f. Wisata Hutan Mangrove di Kapanewon Temon.

8) Kawasan Permukiman meliputi:

a. Permukiman perkotaan seluas 8.945 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektare yang berada di seluruh kapanewon.
b. Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 20.180 (dua puluh ribu seratus delapan puluh) hektare tersebar di seluruh kapanewon.

9) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi berupa kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) seluas kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) hektare di Kapanewon Temon.

10) Kawasan Pertanahan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare meliputi:

a. Satuan Radar 215 Congot berada Kapanewon Temon;
b. Detasemen 2 Satuan Brigade Mobil Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kapanewon Sentolo;
c. Pos Pengamat TNI Angkatan Laut Congot berada di Kapanewon Temon;
d. Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo berada di Kapanewon Pengasih; dan
e. Lapangan Tembak Sentolo berada di Kapanewon Sentolo.

Adapun sebaran peruntukan ruang berdasarkan pola ruang Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.11

Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo

NO	PERUNTUKAN RUANG BERDASARKAN POLA RUANG	LUAS (Ha)
A	KAWASAN LINDUNG	
	1. Badan air (Waduk dan Sungai)	1.143
	2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan lindung)	254
	3. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk/embung)	428
	4. Kawasan Konservasi Kawasan Suaka Alam Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil (Konservasi Penyu)	 185 2
	5. Kawasan lindung geologi Kawasan keunikan batuan dan fosil Kawasan keunikan bentang alam	 84 17
	6. Cagar Budaya	2
	7. Kawasan ekosistem mangrove	3
B	KAWASAN BUDIDAYA	
	1. Badan Jalan	363
	2. Kawasan hutan produksi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasn Hutan Produksi Tetap	 1 625
	3. Kawasan Perkebunan Rakyat	4.885
	4. Kawasan peruntukan pertanian Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Hortikultura Kawasan Perkebunan	 11.041 3.544 2.876
	5. Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan Perikanan Budidaya	 10 163
	6. Kawasan Pertambangan dan Energi Kawasan Pertambangan Mineral Logam	 11
	7. Kawasan Peruntukan Industri	2.313
	8. Kawasan Pariwisata	33
	9. Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan	 8.945 20.180
	10. Kawasan Transportasi (Kawasan BIY)	595
	11. Kawasan Pertanahan dan Keamanan	16

Sumber data : Substansi Revisi RTRW Kulon Progo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha NIti Mandhala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tidak semua peruntukan ruang dapat terdokumentasikan secara numerik karena beberapa peruntukan ruang sifatnya tersebar di seluruh kapanewon. Satu ruang dalam pola ruang Kabupaten Kulon Progo dapat diperuntukkan untuk pemanfaatan ruang yang berbeda – beda (bukan merupakan peruntukan ruang tunggal) asalkan pemanfaatan ruangnya tidak saling bertentangan.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo juga dapat dilihat berdasarkan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo. Dalam substansi reviu RTRW Kabupaten Kulon Progo banyak dinamika perubahan struktur ruang yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang ada dalam substansi RTRW Kabupaten Kulon Progo yang lama. Rencana struktur ruang yang cukup signifikan berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah salah satunya adalah keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Jika merujuk pada tujuan penataan ruang sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2012 bahwa arah penataan ruang kabupaten lebih menitik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian sebagai basis yang didukung oleh pariwisata, pertambangan dan industri bahari kemudian dengan mempertimbangkan keberadaan BIY dan semua potensi ikutannya maka tujuan penataan ruang bergeser dan menjadikan sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor tumpuan yang didukung oleh bahari, kebudayaan, perdagangan dan jasa serta industri. Adapun keberadaan BIY menimbulkan efek berganda bagi munculnya pusat pertumbuhan kawasan – kawasan strategis baru di Kabupaten Kulon Progo.

1) Pengembangan Kawasan Aerotropolis

Keberadaan BIY di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2020 merupakan pemicu perubahan arah pengembangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo yang paling signifikan. Kawasan sekitar BIY menjadi kawasan strategis Kabupaten yang dikembangkan dengan konsep Aerotropolis. Kawasan Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo meliputi 8 Kapanewon yaitu Kapanewon Temon, Wates, Pengasih, Kokap, Galur, Lendah, Panjatan dan Sentolo dengan luas total mencapai 26.605,5 Ha.

Kawasan Sekitar BIY menjadi pusat transportasi udara berskala Internasional yang memberikan peluang besar bagi tumbuhnya pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Sebagai Bandar Udara skala internasional baru, diharapkan dapat menjadi gerbang keluar masuknya barang maupun orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengusung konsep pengembangan wilayah sekitar BIY sebagai Aerotropolis yang terarah dan terencana diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk potensi ekonomi lokal kawasan. Selain itu, dalam pengembangan dan pembangunan kawasan sekitar BIY harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan serta memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Infrastruktur pendukung keberadaan BIY dan kawasan Aerotropolis juga terus dikembangkan antara lain dengan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang berstandar internasional dalam rangka menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pengembangan sarana prasarana transportasi darat juga dilakukan dengan pembangunan jalur kereta api Bandara yang memudahkan dan mempercepat para penumpang tujuan Bandara untuk langsung menuju Bandara. Dengan dibangunnya jalur kereta api tersebut, stasiun Kedundang yang semula non aktif saat ini direaktivasi untuk mendukung operasional kereta tersebut.

Kedepannya dengan semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi maka direncanakan pengembangan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar kawasan Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang. Sebagai tambahan, dalam rangka memperlancar pergerakan para pengguna jasa angkutan udara menuju BIY direncanakan pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo. Selain pengembangan infrastruktur di bidang transportasi, pengembangan infrastruktur penunjang pemenuhan kebutuhan dasar khususnya air minum juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro. Adapun pembangunan bendungan Kamijoro terletak di Kapanewon Sentolo. Rencananya air baku dari bendung Kamijoro akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Kulon Progo terutama untuk memenuhi kebutuhan di kawasan Aerotropolis dan kawasan Peruntukan Industri Sentolo serta kawasan perkotaan di Kapanewon Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Temon dan Wates. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kulon Progo adalah sekitar 286 Liter/detik. Sumber alternatif air baku lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum adalah dari rencana pembangunan bendung Bener yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi DIY termasuk Kabupaten Kulon Progo didalamnya adalah sebesar 700 Liter/detik.

2) Pengembangan Kawasan Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur

Dengan ditetapkannya Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan target pencapaian kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo yang terletak bersebelahan dengan kawasan Borobudur memiliki potensi besar untuk menangkap peluang positif yang ada. Kawasan perbukitan Menoreh sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur memiliki potensi daya tarik pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan agar dapat bersinergi dengan pengembangan pariwisata Borobudur. Rencana pembangunan Koridor Temon – Borobudur merupakan salah satu strategi daerah dalam rangka menyediakan akses transportasi dari BIY menuju kawasan Borobudur. Rencana *exit – entry* jalan Tol juga mengakomodir keberadaan Koridor Temon – Borobudur agar konektivitas wilayah tetap sinergi.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, bahwa strategi pengembangan pola ruang Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten dilakukan dengan penetapan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten dalam rangka mewujudkan pelestarian nilai – nilai budaya dan sosial masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Di Kabupaten Kulon Progo, terdapat 4 (empat) Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten meliputi 1) Perbukitan Menoreh; 2) Makam Girigondo; 3) Pusat Kota Wates; dan 4) Pantai Selatan Kulon Progo.

2.1.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 (dua belas) potensi bencana meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah/ tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/ wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Adapun tingkat risiko dari keduabelas potensi bencana sebagai berikut.

Tabel 2.12

Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo

NO.	KATEGORI BENCANA	JENIS POTENSI BENCANA	TINGKAT RISIKO BENCANA
1	Geologi	Gempa Bumi	Tinggi
2		Tsunami	Tinggi
3		Letusan Gunung Api	Rendah
4		Gerakan Tanah/ Tanah Longsor	Tinggi
5	Hidrometeorologi	Banjir	Tinggi
6		Banjir Bandang	Tinggi
7		Kekeringan	Tinggi
8		Cuaca Ekstrem	Tinggi
9		Gelombang Ekstrem	Sedang
10		Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang
11	Biologi	Epidemi/ Wabah Penyakit	Tinggi
12	Anthropogenik	Kegagalan Teknologi	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Dari aspek kemiringan lereng wilayah Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Girimulyo memiliki tingkat kemiringan lereng dengan kategori sangat curam (>40º), sehingga ketiga wilayah kapanewon ini merupakan wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor yang tinggi. Selain ketiga kapanewon ini juga ada Kapanewon Kalibawang, Pengasih, dan Nanggulan yang sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng curam sampai sangat curam dengan potensi bahaya longsor tinggi. Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada peta berikut:

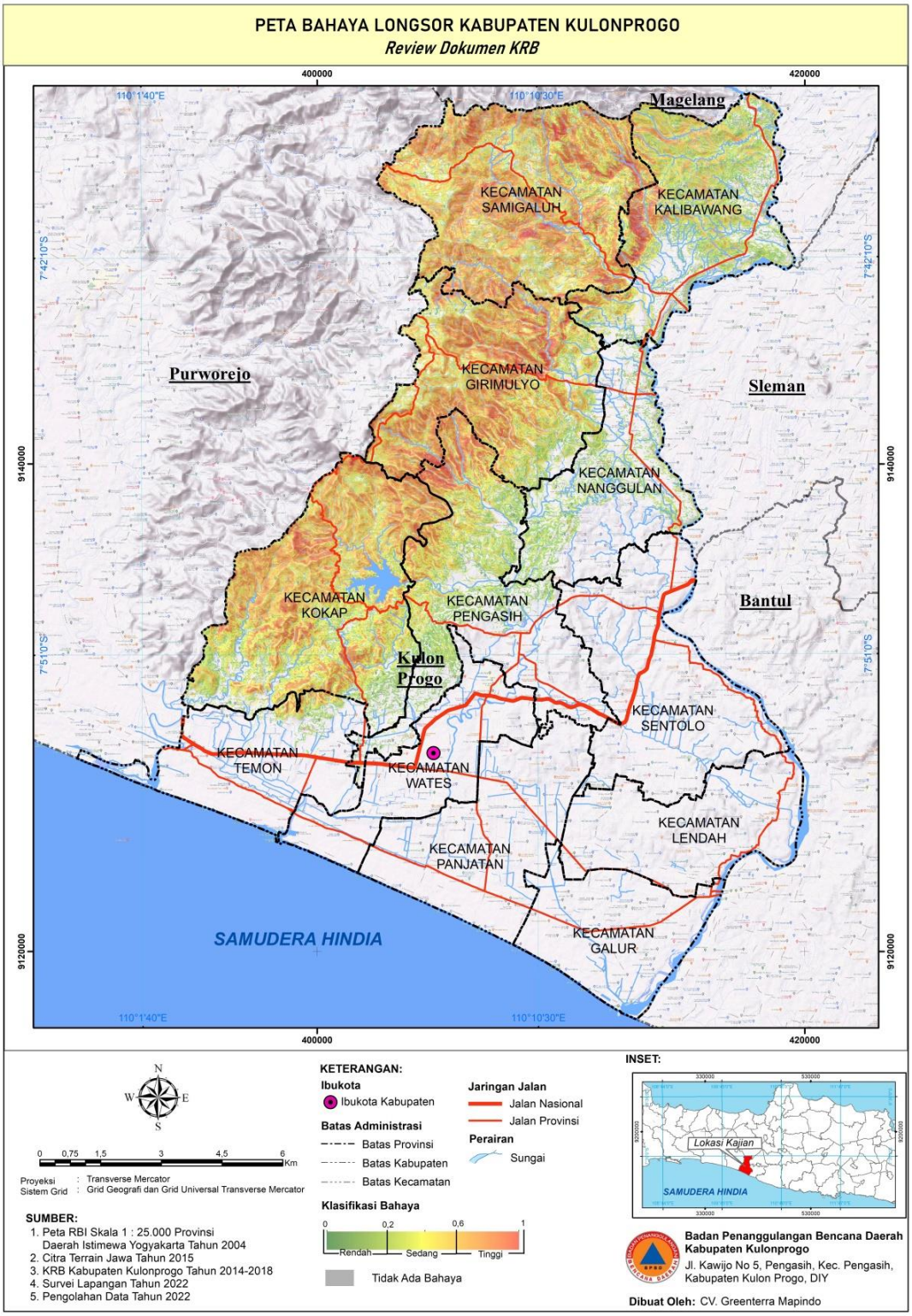

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.5

Peta Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo

Longsor adalah bencana yang intensitasnya paling tinggi. Untuk meminimalkan risiko bencana longsor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural untuk penanganan longsor berupa intervensi pengurangan risiko bencana di bidang pembangunan infrastruktur yang berorientasi pengurangan risiko bencana, pemasangan EWS

(Early Warning Systems), dan lain-lain. Mitigasi non struktural dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, kajian-kajian, regulasi di level Kalurahan; pembuatan SOP, dan simulasi/gladi. Adapun kegiatan mitigasi non struktural secara komprehensif dilaksanakan dalam program Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana.

Karakteristik geografis dan administratif Kabupaten Kulon Progo berpengaruh terhadap adanya potensi bencana lintas batas wilayah administratif seperti misalnya intensitas hujan tinggi yang terjadi terjadi di kawasan Hulu DAS Progo dan DAS Bogowonto dapat mengakibatkan banjir atau banjir bandang yang dampaknya sampai ke wilayah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, kemiringan lereng yang besar di perbukitan menoreh terutamanya di Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Sentolo, Pengasih, Kokap, dan Nanggulan, menyebabkan daerah ini memiliki potensi banjir bandang (Flash Flood Potential Index - FFPI) yang tinggi. Ditambah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang luas menghasilkan debit aliran yang besar. Selain itu, banjir terjadi karena limpasan air hujan yang berada di bentang topografi yang relatif rendah terhambat mengalir ke pantai akibat drainase/sungai tidak berfungsi optimal. Selanjutnya, tingginya intensitas curah hujan pada periode musim hujan berdampak terhadap kejadian bencana banjir terutamanya di wilayah langganan banjir di Kapanewon Panjatan dan Temon.

Banjir hampir terjadi di setiap musim penghujan mengakibatkan kerugian di semua sektor, terutama sektor jasa, pertanian, dan perikanan. Penanganan banjir dan genangan dilakukan dari level pemerintah pusat, propinsi maupun Pemerintah Kabupuaten Kulon Progo sesuai kewenangan. Bentuk penanganannya berupa kegiatan konservatif (pengurangan laju run off dengan vegetasi) maupun teknis (rehabilitasi dan normalisasi saluran) serta pembuatan bangunan sipil teknis lainnya. Saat ini masih berlangsung proyek multiyears pengendali banjir sekitar kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian PUPR yang bertujuan untuk menanggulangi banjir di kawasan sekitar bandara.

Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana banjir bandang dan banjir di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada peta berikut.

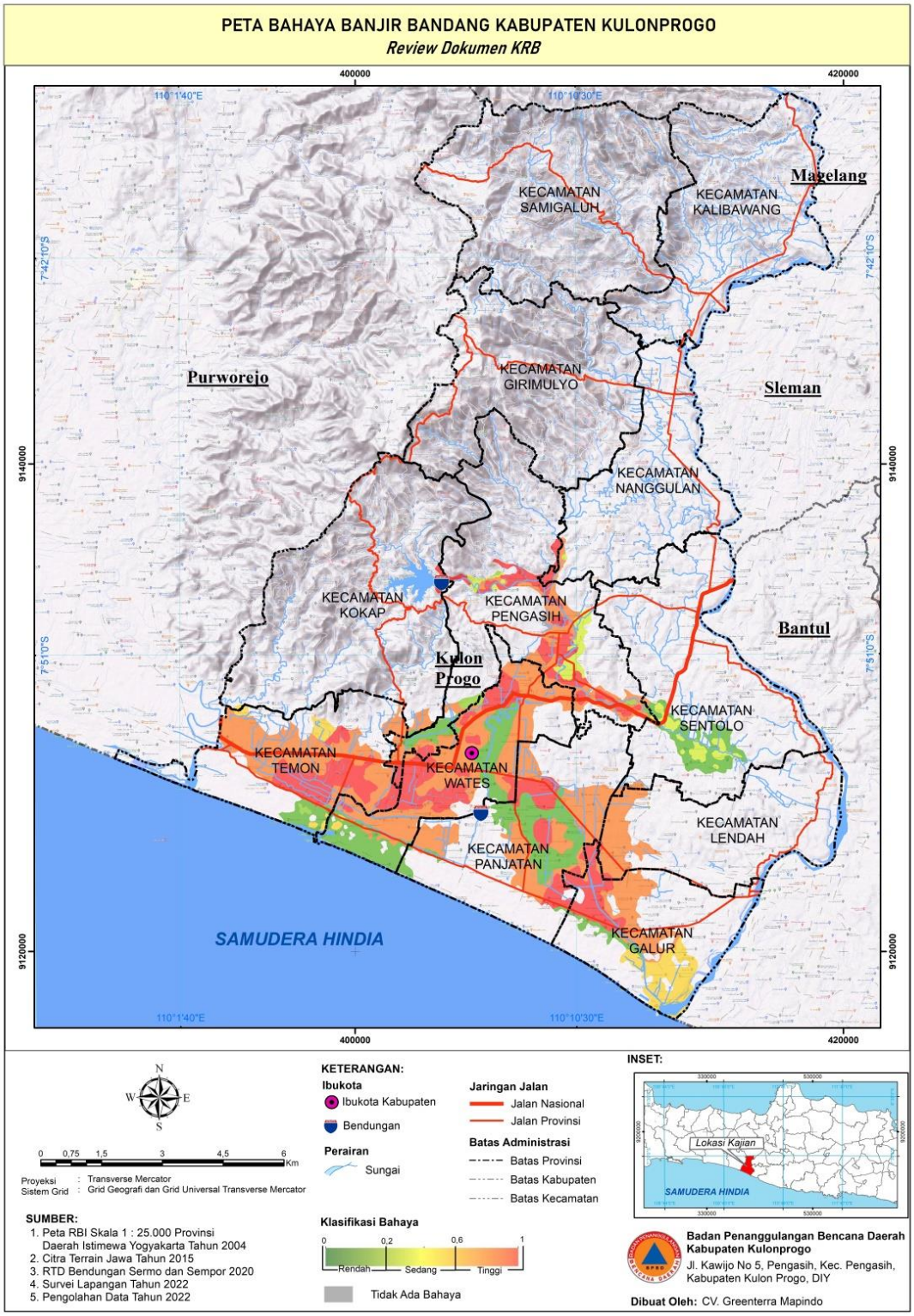

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.6

Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kulon Progo

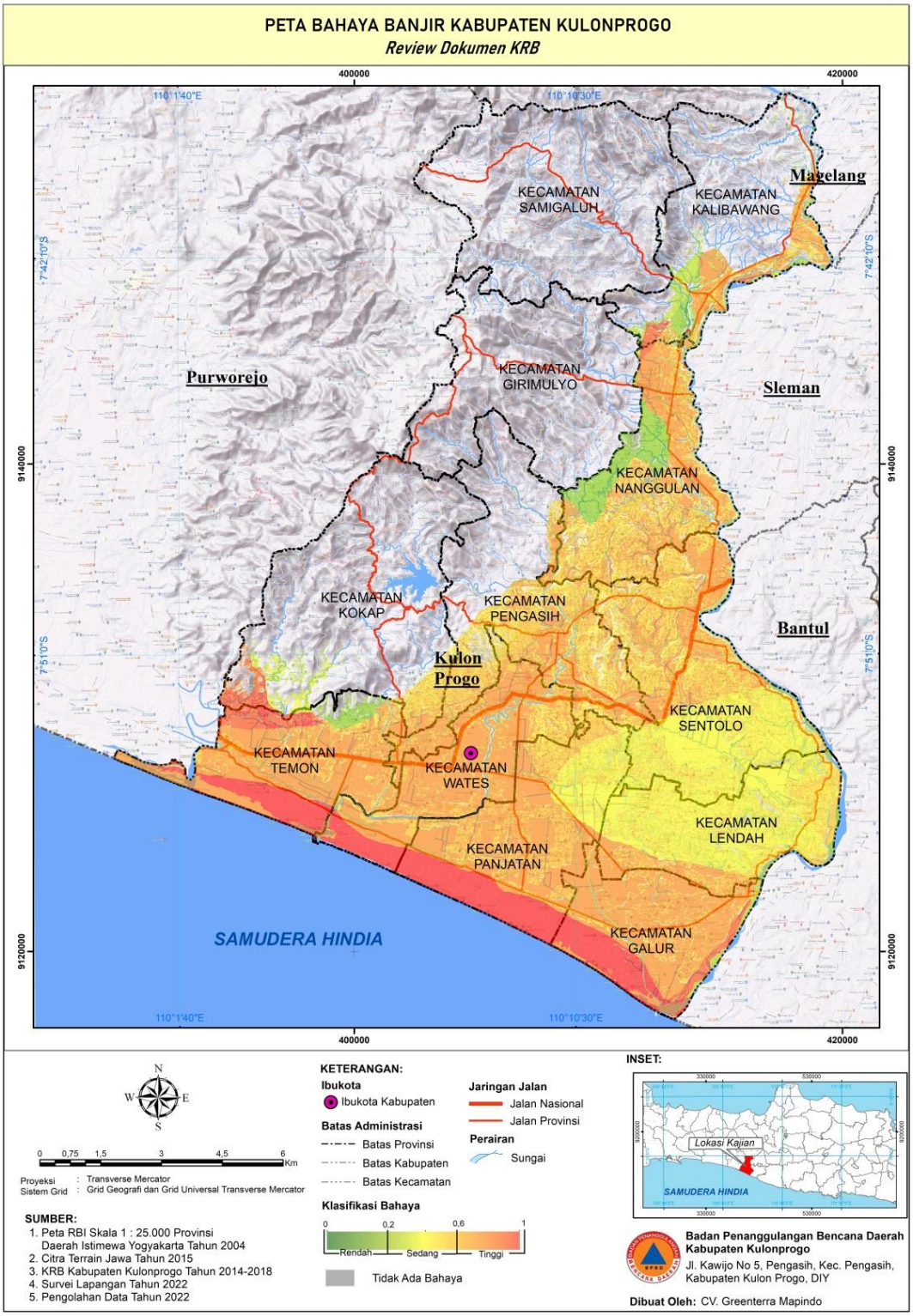

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.7

Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo

Dampak hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunungapi Merapi yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten dapat melanda wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana letusan gunung api dapat dilihat pada peta berikut.

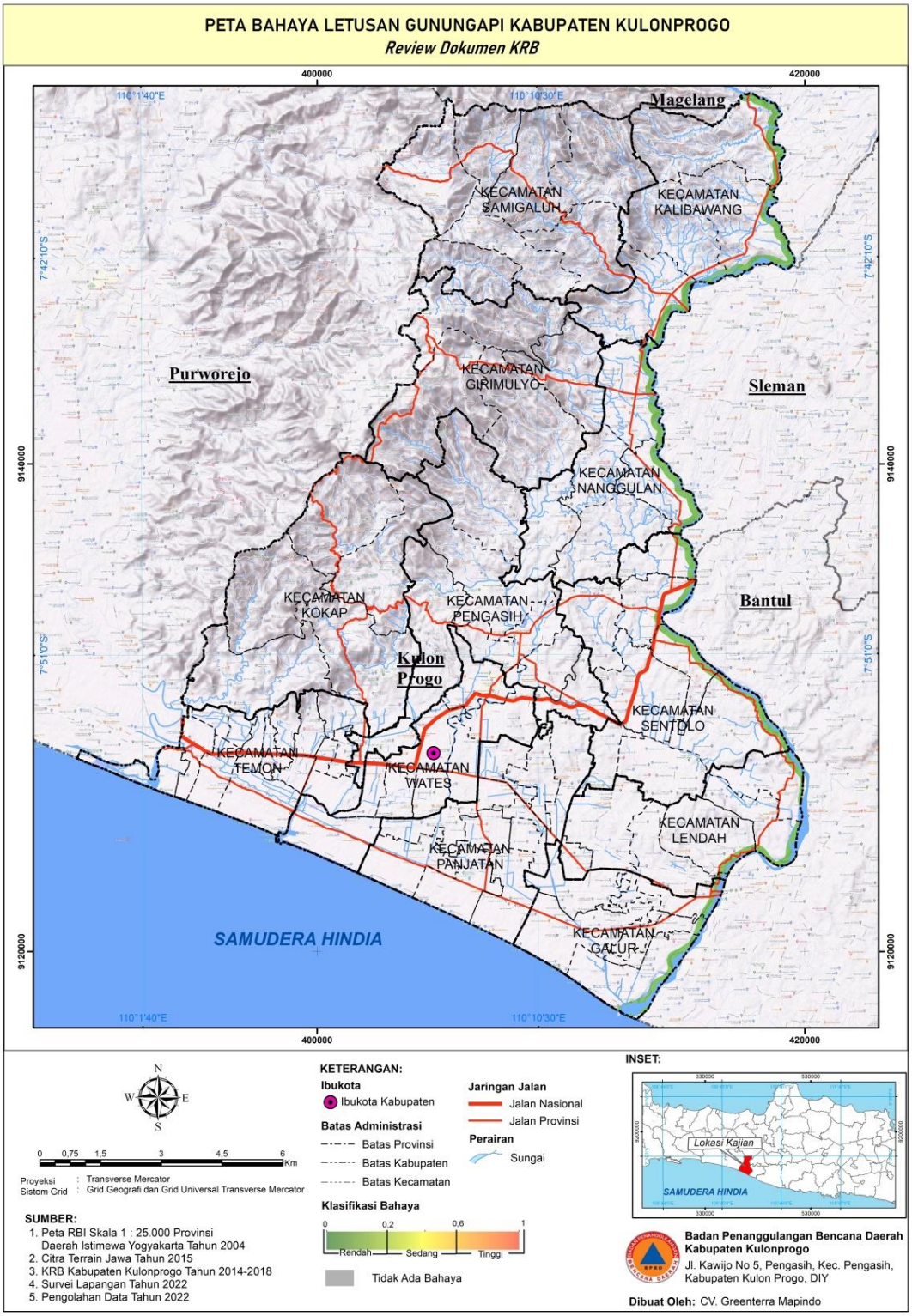

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.8

Peta Wilayah Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Kulon Progo

Tatanan geologi dan geomorfologi di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bentang lahan pesisir meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, dan Galur memiliki potensi bahaya tsunami, banjir, liquifaksi, gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana Tsunami dan Gelombang Ekstrem dan Abrasi dapat dilihat pada peta berikut.

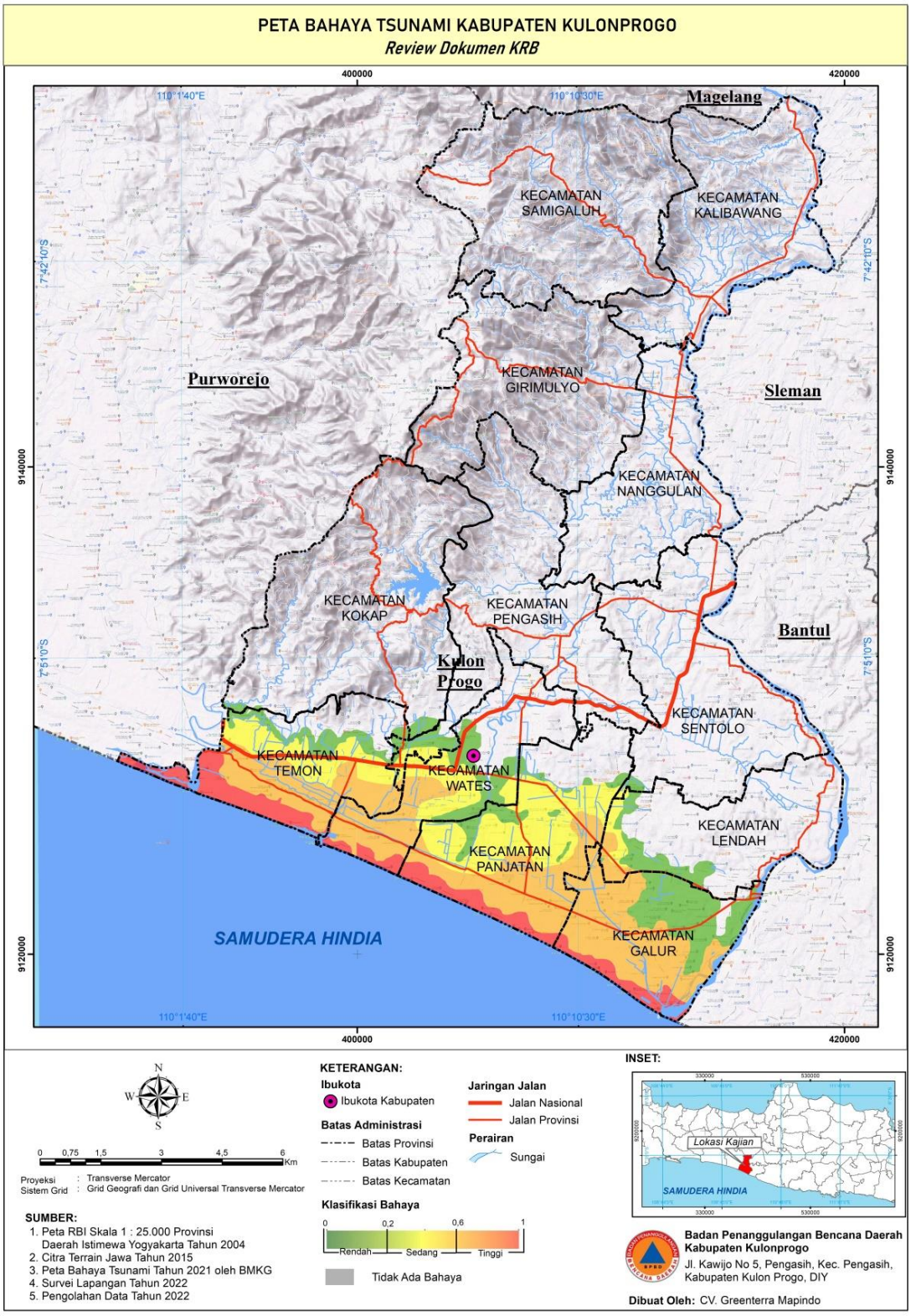

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.9

Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kulon Progo

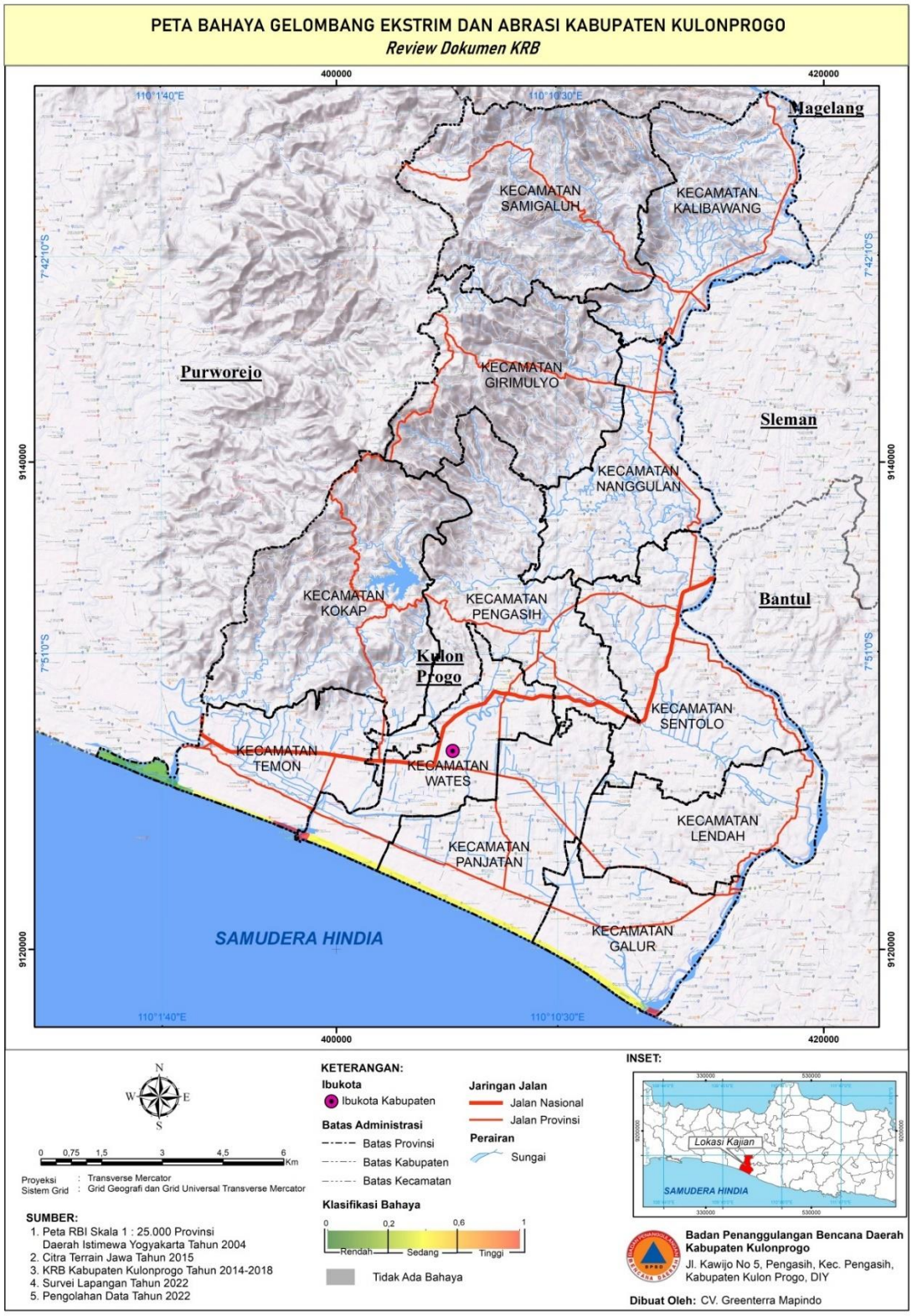

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.10

Peta Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Kulon Progo

Tsunami adalah ancaman dengan probabilitas relatif rendah tetapi berdampak sangat tinggi terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengkajian dan modeling BMKG (2021) dengan skenario terburuk, potensi gempa bumi berkekuatan 8,8 M berpotensi memicu tsunami di selatan Pulau Jawa. Wilayah yang berpotensi terdampak di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 Kapanewon dan 31 Kalurahan yang berpotensi terdampak tsunami akibat gempa bumi megathrust dengan waktu tiba gelombang tsunami berkisar 38 – 42 menit dengan ketinggian maksimum 18 – 22 meter dan landasan maksimal sejauh 7 km. Daerah yang berpotensi terlanda tsunami adalah daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kawasan strategis bagi pengembangan dan pembangunan Kulon Progo bagian selatan. Untuk meminimalkan dampak tsunami, di wilayah selatan sudah menginisiasi pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan berbagai pihak juga telah menyediakan layanan peringatan dini tsunami yang selalu diuji coba setiap jam 10.00 WIB pada tanggal 26 setiap bulannya. Pemerintah juga sudah menyusun dan mensosialisasikan SOP dan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi tingkat kabupaten untuk kemudian di breakdown di level Kalurahan; pemerintah juga sudah menyusun rencana kontigensi yang diuji dengan simulasi tsunami yang melibatkan berbagai pihak.

Secara geologi wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki keragaman yang sangat tinggi. Banyaknya struktur sesar di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengakibatkan potensi bencana karena faktor geologis seperti gempa bumi menjadi semakin tinggi. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut.

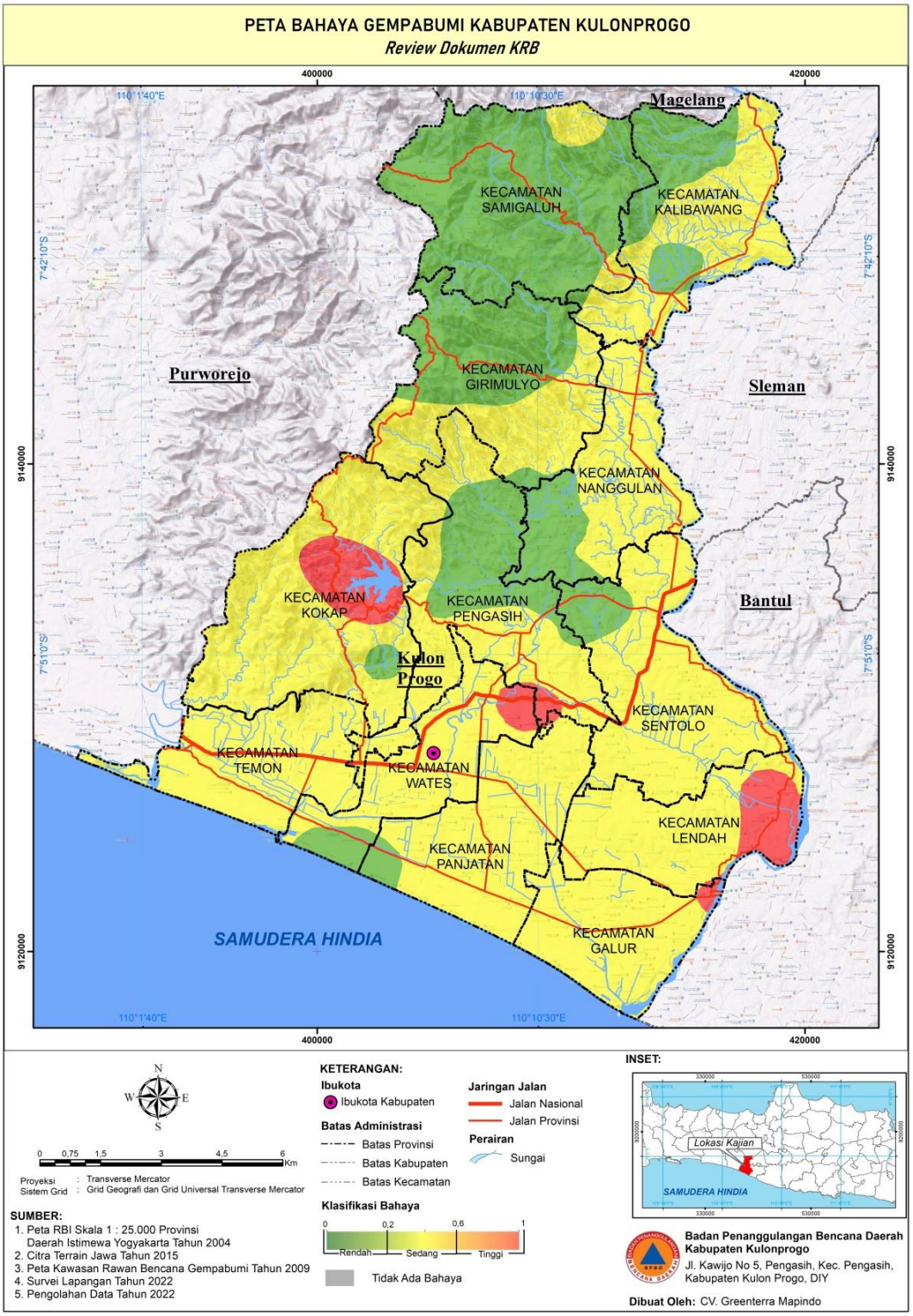

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.11

Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan kondisi karakteristik akuifer, pada periode musim kemarau beberapa wilayah di perbukitan menoreh yang meliputi Kapanewon Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap mengalami bencana kekeringan, sehingga pada puncak musim kemarau diperlukan upaya droping air untuk memenuhi

kebutuhan air bersih warga masyarakat terdampak. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana kekeringan dapat dilihat pada peta berikut

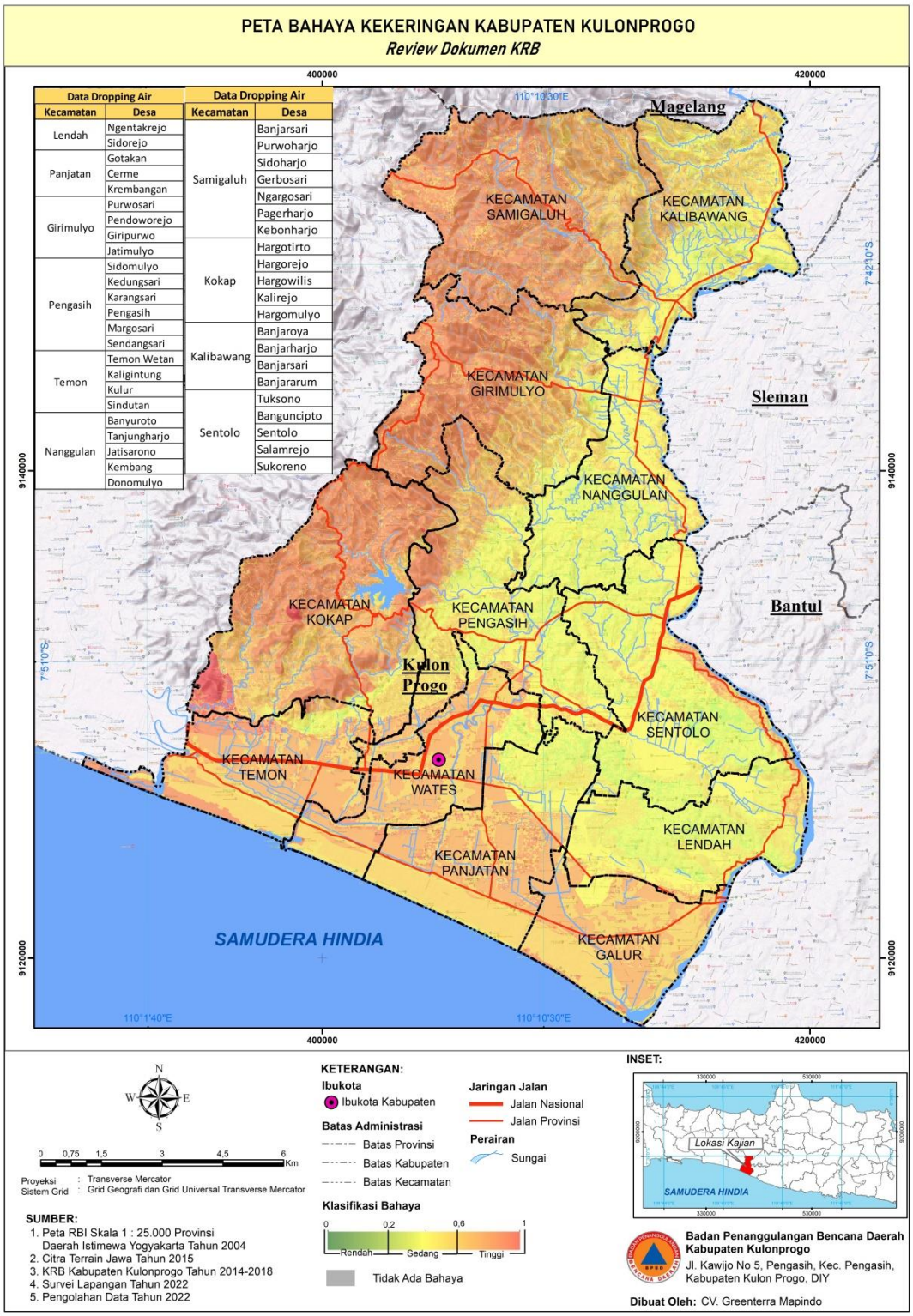

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.12

Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo

Upaya dalam rangka menanggulangi bencana kekeringan dilakukan secara komprehensif dari berbagai pihak. Mulai dari upaya (edukasi) pelestarian sumber mata air yang digagas masyarakat, PAMSIMAS, SPAM Kalurahan, SPAM Mandiri Masyarakat, penambahan jaringan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. Dalam kondisi kekeringan parah dan panjang upaya dropping air bersih dilakukan dengan pelibatan kolaborasi berbagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten, BAZNAS, PMI, Perumda Air Minum Tirta Binangun dan lembaga lainnya.

Ancaman bencana lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan, epidemi/ wabah penyakit, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat risiko bencana bervariasi dari tinggi hingga sedang. Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo, antara lain : fenomena cuaca panas, hujan lebat dan angin kencang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor terutama di wilayah perbukitan yang mempunyai potensi hujan lebat. Hujan disertai angin juga dapat disertai dengan kilat/petir bisa menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/roboh selain itu dapat meningkatkan tinggi gelombang air laut. Penyebab terjadinya cuaca ekstrem ini antara lain akibat peningkatan aliran udara basah dari Asia menuju wilayah Jawa. Selain itu juga faktor siklon tropis Savannah, yang berdampak pada ketersediaan uap air melimpah dalam pembentukan awan hujan di wilayah Jawa.

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi antara lain disebabkan karena: kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi, kerusakan komponen dan kebocoran reaktor. Kejadian tersebut dapat menimbulkan dampak berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia berbahaya atau bahan radioaktif, kecelakaan industri atau kecelakaan transportasi yang menimbulkan korban tewas serta kerugian harta benda.

Di wilayah Kulon Progo ada beberapa potensi terjadinya bencana karena kegagalan teknologi antara lain: potensi banjir bandang akibat jebolnya tanggul Waduk Sermo yang bisa mengancam Wilayah Perkotaan Wates. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana tersebut, dapat dilakukan mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana, antara lain dengan : peningkatan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini, perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan penanganan bencana, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar, sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya bekerjasama dengan instansi terkait, peningkatan standar keselamatan di bangunan dan Desa peralatan, antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain bangunan, pembuatan prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi.

Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, epidemi, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi dapat dilihat pada peta – peta berikut.

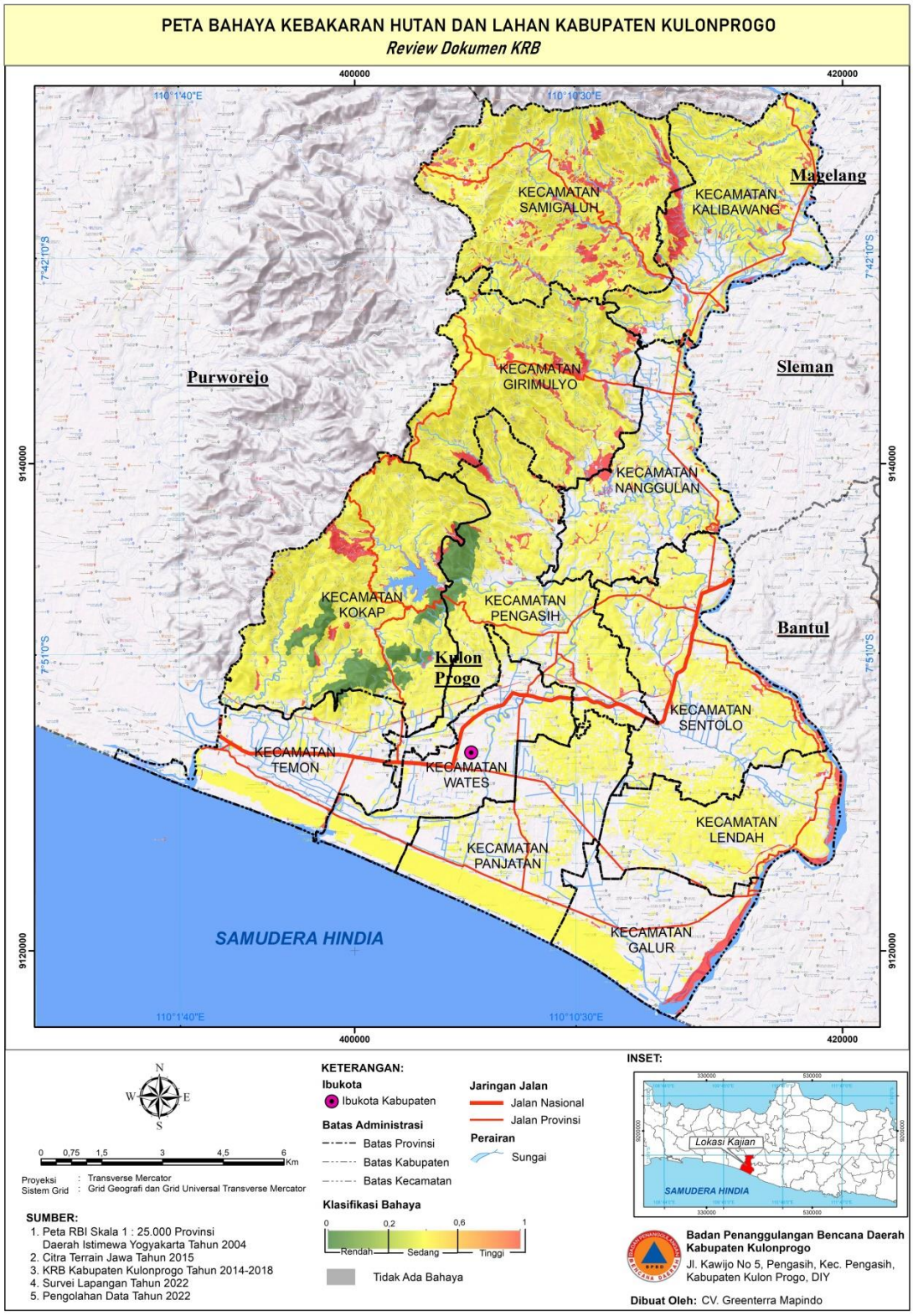

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.13

Peta Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kulon Progo

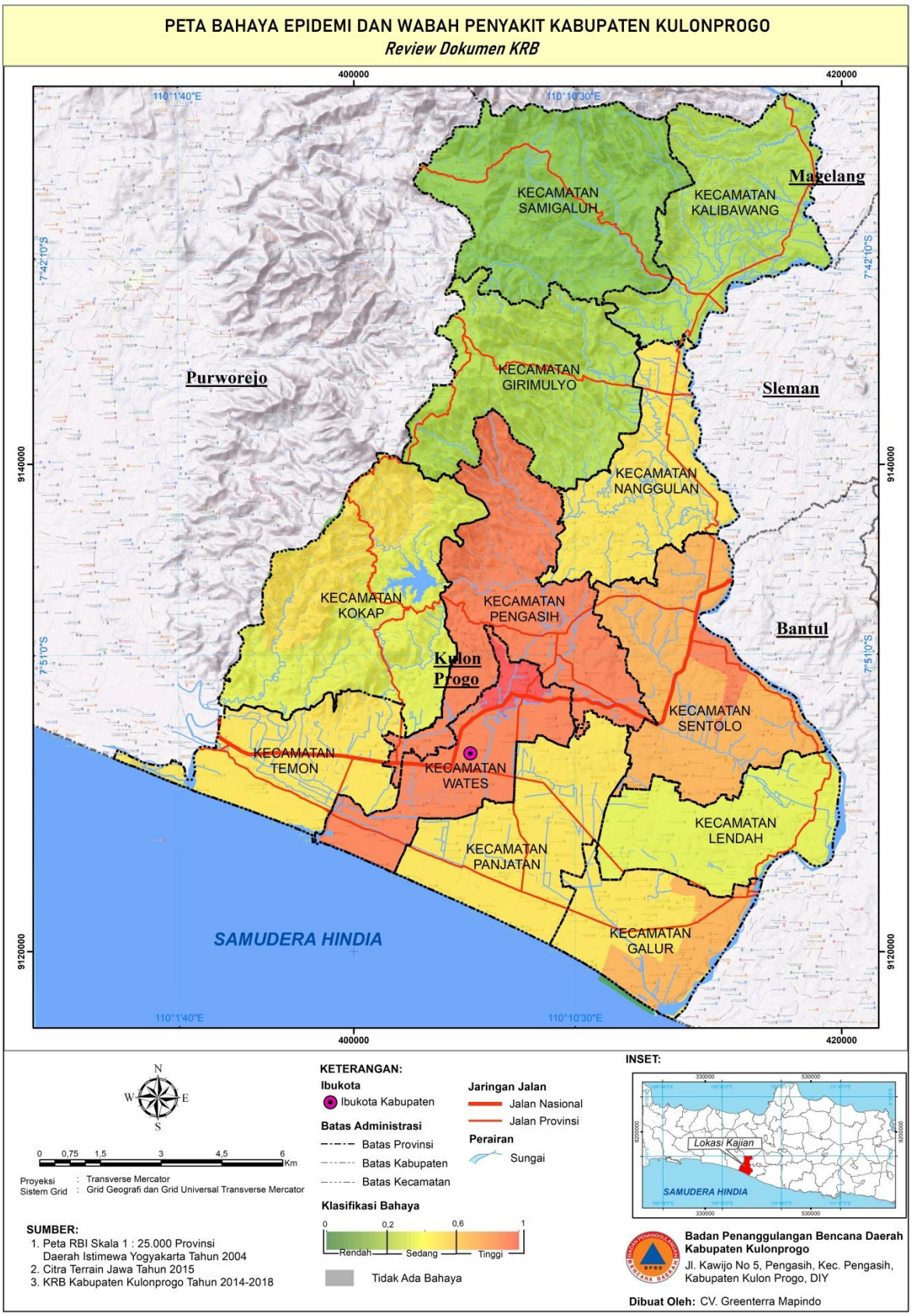

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.14

Peta Wilayah Rawan Bencana Wabah Penyakit Kabupaten Kulon Progo

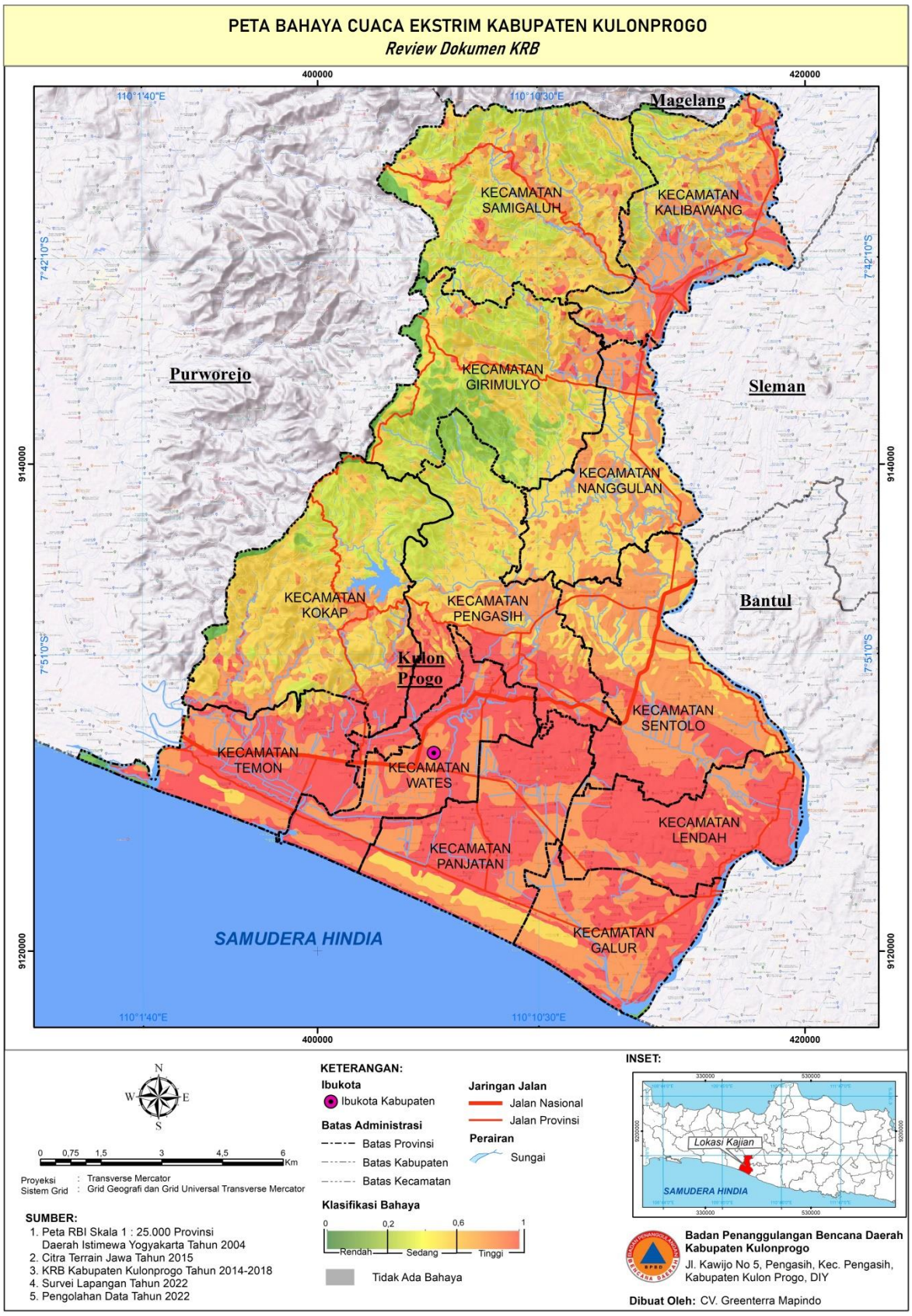

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.15

Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Kulon Progo

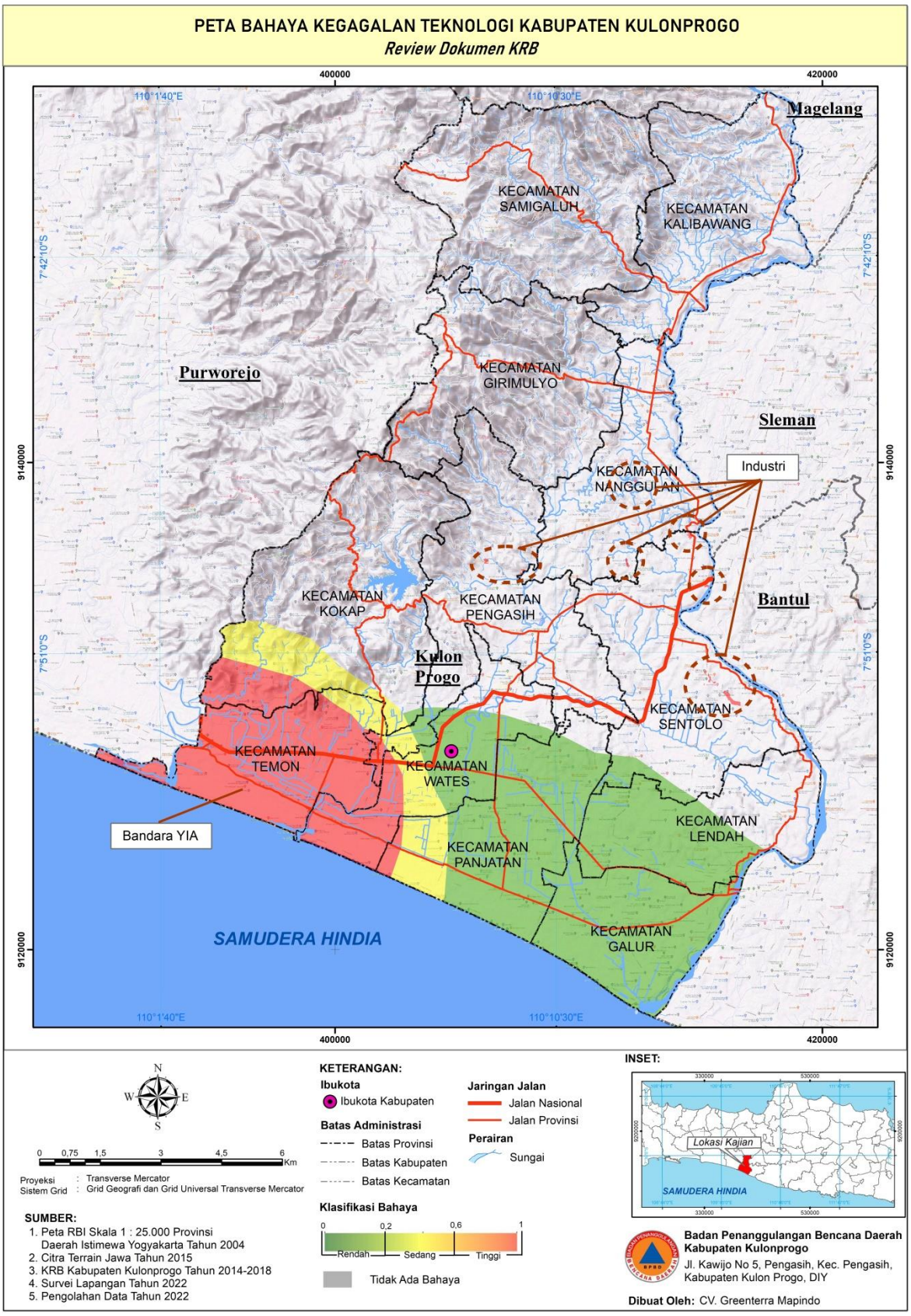

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.16

Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kulon Progo

Dengan kondisi topografi dan geografi seperti di atas, hampir dipastikan tidak ada daerah yang benar-benar aman dari ancaman bencana, sehingga kejadian bencana di Kulon Progo hampir dipastikan selalu terjadi tiap tahun. Hal itu disebabkan banyaknya penduduk Kulon Progo yang tinggal di daerah rawan bencana. Ada kawasan yang memiliki satu ancaman bencana, namun lebih banyak daerah yang memiliki multi ancaman bencana. Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Tahun 2025 (jiwa)

No	Kapanewon	Penduduk Yang Tinggal Di Wilayah Ancaman Bencana										
		Jumlah Penduduk	Longsor	Banjir	Kekeringan	Gempa	Tsunami	Cuaca Ekstrim	Kebakaran	Epidemi Wabah	Gelombang Ekstrim	Letusan Gunung Api
1	Temon	29.125	7714	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	9.414	0
2	Wates	48.948	0	48.948	48.948	48.948	26.630	48.948	48.948	48.948	3.526	0
3	Panjatan	38.784	0	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	13.097	0
4	Galur	32.749	0	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	13.851	12.997
5	Lendah	41.108	0	41.108	41.108	41.108	18152	41.108	41.108	41.108	0	29.885
6	Sentolo	50.042	0	50.042	50.042	50.042	3378	50.042	50.042	50.042	0	26.683
7	Pengasih	52.529	31.567	35.934	52.529	52.529	4929	52.529	52.529	52.529	0	0
8	Kokap	36.115	36.115	0	36.115	36.115	17568	36.115	36.115	36.115	0	0
9	Girimulyo	24.621	24.621	5652	24.621	24.621	0	24.621	24.621	24.621	0	0
10	Nanggulan	30.883	24.345	30.883	30.883	30.883	0	30.883	30.883	30.883	0	15.458
11	Samigaluh	27.093	27.093	0	27.093	27.093	0	27.093	27.093	27.093	0	0
12	Kalibawang	29.877	29.877	29.877	29.877	29.877	0	29.877	29.877	29.877	0	29.877
	Total	**441.874**	**181.332**	**343.102**	**441.874**	**441.874**	**171.315**	**441.874**	**441.874**	**441.874**	**39.888**	**114.900**

Sumber data : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 lebih banyak didominasi oleh bencana hidrometeorologi daripada bencana geologi. Bencana hidrometerologi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta tanah longsor. Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi terjadi dengan probabilitas yang cukup rendah. Untuk informasi kejadian bencana di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Kapanewon	JENIS BENCANA											KEBAKARAN					Jumlah Kejadian
		Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah longsor	L. Gunung Berapi	Gelombang Ekstrim & Abrasi	Cuaca Ekstrim / Angin Kencang	Kekeringan	Wabah Penyakit	Kegagalan Teknologi	Konflik Sosial	Lahan	Gedung	Hutan	Pemukiman	Lain-lain	
1	Temon	0	0	1	2	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	2	0	15
2	Wates	0	0	3	3	0	0	21	0	0	0	0	1	0	0	4	0	32
3	Panjatan	0	0	2	4	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	2	0	32
4	Galur	0	0	6	1	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22
5	Lendah	0	0	3	3	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	22
6	Sentolo	0	0	0	5	0	0	30	0	0	0	0	1	1	0	4	1	42
7	Pengasih	0	0	6	19	0	0	17	0	0	0	0	2	3	0	5	0	52
8	Kokap	0	0	3	91	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	4	0	114
9	Girimulyo	0	0	0	131	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	143
10	Nanggulan	0	0	2	5	0	0	13	2	0	0	0	1	0	0	5	0	28
11	Samigaluh	0	0	0	27	0	0	15	11	0	0	0	0	0	0	2	0	55
12	Kalibawang	0	0	1	79	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	2	0	109
	JUMLAH	**0**	**0**	**27**	**370**	**0**	**1**	**196**	**26**	**0**	**0**	**0**	**6**	**5**	**0**	**33**	**2**	**666**

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Salah satu bentuk mitigasi bencana non struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu melalui pembentukan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Desa/Kalurahan Tangguh Bencana adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana yang merugikan. Pengembangan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Dalam Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko – risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. Sebaran desa rawan bencana dan progress pembentukan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Kulon Progo diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15

Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana per Kapanewon Tahun 2025

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Desa Rawan Bencana	Jumlah Desa Tangguh	Rincian Desa Tangguh		
					Utama	Madya	Pratama
1	Temon	15	15	15	4	1	10
2	Wates	8	8	8	5	-	3
3	Panjatan	11	11	11	6	2	3
4	Galur	7	7	7	7	-	-
5	Nanggulan	6	6	4	-	-	4
6	Sentolo	8	8	4	-	-	4
7	Pengasih	7	7	7	1	1	5

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Desa Rawan Bencana	Jumlah Desa Tangguh	Rincian Desa Tangguh		
					Utama	Madya	Pratama
8	Kokap	5	5	5	5	-	-
9	Girimulyo	4	4	4	2	2	-
10	Lendah	6	6	6	-	-	6
11	Samigaluh	7	7	7	5	2	-
12	Kalibawang	4	4	4	3	1	-
	Total	**88**	**88**	**82**	**38**	**9**	**34**

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Salah satu *stakeholder* yang berperan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah institusi pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah sebagai institusi yang setiap harinya didatangi oleh para siswa menjadi potensi dalam menanamkan nilai-nilai kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam skala besar. Banyaknya siswa yang datang ke sekolah menjadi institusi yang dapat menanamkan nilai-nilai siaga dalam menghadapi bencana lewat kurikulum yang ada. Data sebaran Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.16

Data Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2025

No	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
1	SMA Negeri 1 Temon - Temon	SDN Trayu Samigaluh	MIN 1 Kulon Progo	SD N Nomporejo
2	SMK Negeri 1 Kokap - Kokap	SDN Madigondo Wetan Samigaluh	SD N Karangwuni	SD N Sidakan, Banaran
3	SLB Dekso - Nanggulan			
4	MTsN 4 Girimulyo - Girimulyo			
5	SMP N 1 Kokap - Kokap			
6	SMP N 2 Kokap - Kokap			
7	SMP N 3 Kokap - Kokap			
Jumlah SPAB	**7**	**2**	**2**	**2**

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.1.2 Demografi

2.1.1.2.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2025 adalah 445.318 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 220.731 jiwa dan perempuan sebanyak 224.587 jiwa dengan jumlah keluarga sebesar 159.192. Dari tahun 2021-2024, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen. Pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Jumlah keluarga di Kabupaten Kulon Progo trennya terus meningkat sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 mencapai 159.192 keluarga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat g disebutkan: penyajian Data

Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu masih ditemukan data ganda (data ganda dapat terjadi karena elemen data nama sama atau bisa diartikan punya kependudukan lebih dari satu, data ganda karena perekaman KTP Elektronik di lebih dari satu tempat, juga data kematian umpan balik kerja sama dari lembaga lain misalnya BPS, dan PT. Taspen), selain itu kematian belum terlaporkan, dan anomali lain yang kemudian dilakukan pembersihan data di level nasional, hal ini menyebabkan fluktuasi data penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	
1	2021	219.347	223.527	442.874	-0,03	153.404
2	2022	219.776	223.815	443.591	0,16	155.219
3	2023	221.249	224.943	446.192	0,59	156.775
4	2024	220.557	224.437	444.994	-0,27	157.726
5	2025	220.731	224.587	445.318	0,07	159.192

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026 (diolah)

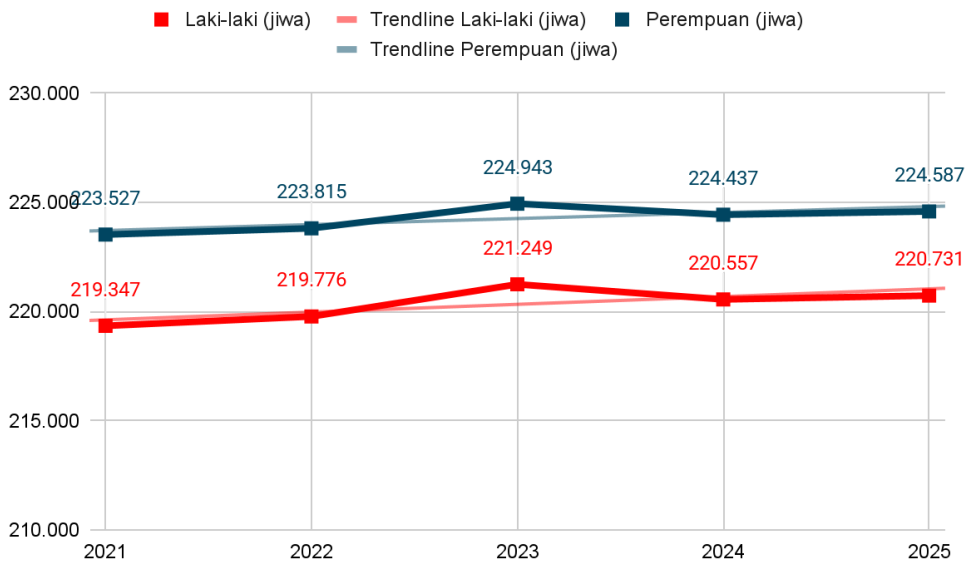

Gambar 2.17

Grafik Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data penduduk menurut komposisi umur dapat diketahui pada tahun 2025 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun mengalami penurunan jumlah terbesar dibandingkan kelompok umur lain, yakni 23.365 pada tahun 2024 menjadi 21.681 jiwa pada tahun 2025. Sedangkan kenaikan jumlah

penduduk terbesar terjadi pada kelompok umur 65-69 tahun dari semula 21.735 jiwa pada tahun 2024 menjadi 22.957 jiwa pada tahun 2025.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami kenaikan pada tahun 2025, dimana jumlahnya ada sekitar 302.950 jiwa. Sebelumnya, jumlah penduduk usia produktif mengalami kenaikan dan penurunan selama empat tahun. Pada tahun 2021 ada 300.743 jiwa. Kemudian pada tahun 2022 ada 303.633 jiwa. Kemudian naik menjadi 303.846 jiwa pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 302. 719 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa)

Tahun 2021-2025

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	0 – 4	25.506	19.970	24.546	23.365	21.681
2.	5 – 9	29.933	29.111	29.217	28.688	28.134
3.	10 – 14	32.561	31.616	31.861	31.251	30.777
4.	15 – 19	31.065	31.574	31.819	31.875	32.470
5.	20 – 24	32.196	31.822	31.321	31.156	30.470
6.	25 – 29	31.666	31.574	31.482	31.312	31.520
7.	30 – 34	27.656	29.312	29.365	29.797	30.580
8.	35 – 39	30.829	28.578	28.782	27.905	27.239
9.	40 – 44	31.665	32.065	32.366	31.837	31.800
10.	45 – 49	30.589	30.703	30.861	31.495	31.318
11.	50 – 54	31.153	30.533	30.626	29.534	29.985
12.	55 – 59	28.725	30.553	30.490	31.304	30.619
13.	60 – 64	25.199	26.919	26.734	26.504	26.949
14	65-69	19.049	21.088	20.765	21.735	22.957
15	70-74	13.261	14.780	14.312	15.165	15.904
16	>75	21.821	23.516	21.645	22.071	22.915
TOTAL		**442.874**	**443.591**	**446.192**	**444.994**	**445.318**

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2025 berdasarkan kelompok umur serta jenis kelamin ditampilkan dalam piramida penduduk seperti pada gambar berikut ini. Piramida penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk cenderung berbentuk konstriktif (constrictive/stasioner). Hal ini terlihat dari lebar kelompok umur produktif (15–59 tahun) yang lebih besar dibandingkan kelompok umur muda (0–14 tahun), sementara pada kelompok umur lanjut (60 tahun ke atas) jumlah penduduk masih cukup besar. Bentuk ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran cenderung menurun dan pertumbuhan penduduk mulai melambat.

Kelompok umur produktif (15–64 tahun) merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar. Puncak piramida berada pada kelompok umur 15–19 tahun dengan jumlah sekitar 16.738 laki-laki dan 15.732 perempuan. Kelompok umur 20–54 tahun juga relatif besar dan stabil, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi tenaga kerja yang cukup tinggi. Kondisi

tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan sektor produktif.

Pada kelompok umur anak (0–14 tahun), jumlah penduduk relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia produktif. Kelompok umur 0–4 tahun tercatat sekitar 11.328 laki-laki dan 10.353 perempuan, sedangkan kelompok umur 5–9 tahun dan 10–14 tahun mengalami peningkatan tetapi masih lebih rendah dibandingkan kelompok usia produktif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir.

Pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), jumlah penduduk mulai menurun seiring bertambahnya usia, namun proporsinya masih cukup signifikan. Menariknya, pada seluruh kelompok usia lanjut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Misalnya pada kelompok umur 75 tahun ke atas, terdapat sekitar 13.702 perempuan dibandingkan 9.213 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan lansia, perlindungan sosial, serta layanan perawatan jangka panjang akan semakin meningkat.

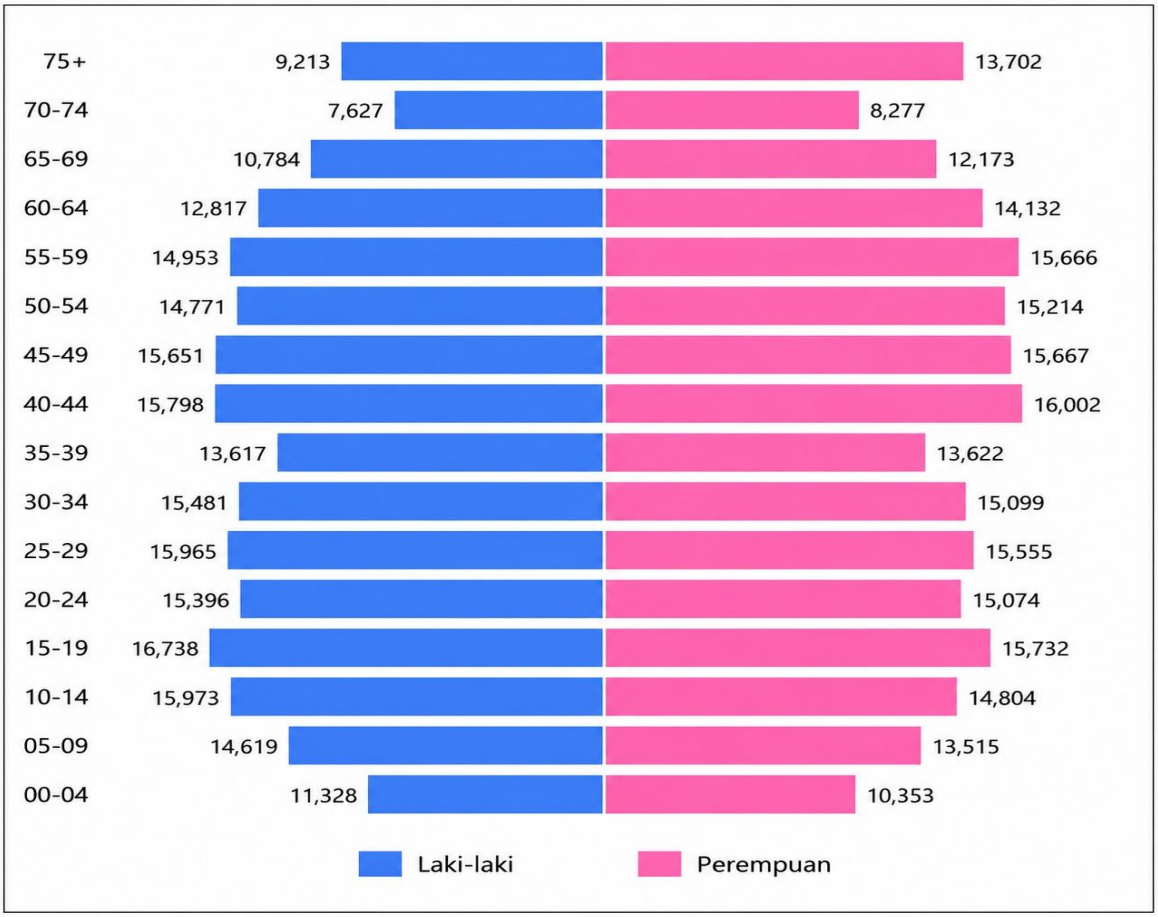

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo, 2026 diolah

Gambar 2.18

Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan Kulon Progo sebesar 50,43%, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,56%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024 Sex ratio

pada tahun 2025 sebesar 98,28 yang berarti terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk menurut sex ratio disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19

Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2021	219.347	223.527	442.874	98,12
2022	219.776	223.815	443.591	98,19
2023	221.249	224.943	446.192	98,40
2024	220.557	224.437	444.994	98,27
2025	220.731	224.587	445.318	98,28

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026

2.1.1.2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2025 tidak berbeda signifikan dengan tahun 2024. Jumlah penduduk terbesar secara berurutan berada di Kapanewon Pengasih dengan jumlah 53.561 jiwa, Kapanewon Sentolo dengan jumlah 50.514 jiwa, kemudian Kapanewon Wates dengan jumlah 49.508 jiwa. Di tahun 2025, pertumbuhan penduduk terjadi di Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Kalibawang. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kapanewon Pengasih. Sedangkan penurunan penduduk terjadi di Kapanewon Temon, Kapanewon Galur, Kapanewon Kokap dan Kapanewon Samigaluh. Penurunan penduduk paling besar terjadi di Kapanewon Kokap.

Tabel 2.20

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2021 – 2025

No.	Kapanewon	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan (%)
1	Temon	29.125	29.148	29.442	29.171	29.095	-0,26
2	Wates	48.948	49.088	50.041	49.396	49.508	0,23
3	Panjatan	38.784	38.939	39.203	39.239	39.381	0,36
4	Galur	32.749	32.751	32.869	32.834	32.755	-0,24
5	Lendah	41.108	41.241	41.385	41.404	41.410	0,01
6	Sentolo	50.042	50.150	50.346	50.424	50.514	0,18
7	Pengasih	52.529	52.784	53.237	53.357	53.561	0,38
8	Kokap	36.115	36.016	36.094	35.814	35.658	-0,44
9	Girimulyo	24.621	24.647	24.712	24.708	24.735	0,11
10	Nanggulan	30.883	31.044	31.286	31.296	31.314	0,06
11	Samigaluh	28.093	27.959	27.848	27.683	27.657	-0,09
12	Kalibawang	29.877	29.824	29.729	29.668	29.730	0,21
Jumlah		**443.003**	**442.874**	**443.591**	**444.994**	**445.318**	**0,07**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026 (diolah)

Kepadatan penduduk Kulon Progo tertinggi tahun 2025 berada di Kapanewon Wates dengan angka 1.526,85 jiwa/km² atau setara dengan 3,66 kali lebih padat dibandingkan dengan Kapanewon

Samigaluh yang memiliki kepadatan terendah yaitu 417,02 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kapanewon Wates merupakan pusat perkantoran, pelayanan, perbelanjaan dan hiburan di lingkup Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, kepadatan penduduk tertinggi selalu berada di Kapanewon Wates, diikuti Kapanewon Lendah dan Kapanewon Galur.

Tabel 2.21

Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2021 – 2025 (jiwa/km²)

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (Km²)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Temon	36,523	797,44	798,07	806,12	798,70	796,62
2	Wates	32,425	1.509,58	1.513,89	1.543,28	1.523,39	1.526,85
3	Panjatan	43,98	881,86	885,38	891,38	892,20	895,43
4	Galur	32,202	1.016,99	1.017,05	1.020,71	1.019,63	1.017,17
5	Lendah	37,563	1.094,37	1.097,92	1.101,75	1.102,25	1.102,41
6	Sentolo	53,867	928,99	931,00	934,64	936,08	937,75
7	Pengasih	58,103	904,07	908,46	916,25	918,32	921,83
8	Kokap	70,162	514,74	513,33	514,44	510,45	508,22
9	Girimulyo	55,309	445,15	445,62	446,80	446,73	447,21
10	Nanggulan	39,114	789,56	793,68	799,87	800,12	800,58
11	Samigaluh	66,32	423,60	421,58	419,90	417,42	417,02
12	Kalibawang	51,253	582,93	581,90	580,04	578,85	580,06
Jumlah		**576,821**	**768,01**	**767,78**	**769,03**	**771,46**	**772,02**

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarnya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan

kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi: PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2021-2025 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun Pada tahun 2021, PDRB sebesar 12,64 triliun Rupiah dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14,3 triliun Rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB mencapai 15,84 triliun Rupiah. Kemudian pada tahun 2024 mencapai 16,91 triliun Rupiah dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 17,93 triliun Rupiah. Selengkapnya nilai PDRB berdasar ADHB Tahun 2021-2025 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.22

PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (dalam miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.039,61	2.233,50	2.450,14	2.566,07	2.802,92
Pertambangan dan Penggalian	167,39	178,30	205,75	209,29	229,09
Industri Pengolahan	1.367,02	1.464,83	1.576,90	1.709,15	1.852,33
Pengadaan Listrik dan Gas	10,08	11,08	12,36	13,67	14,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,46	16,51	17,41	18,32	18,22
Konstruksi	2.146,80	2.279,42	2.365,63	2.546,64	2.612,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.544,66	1.750,48	1.871,59	2.004,42	2.144,01
Transportasi dan Pergudangan	1.151,84	1.760,89	2.363,58	2.534,71	2.561,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	453,00	542,97	597,42	655,55	728,16
informasi dan Komunikasi	721,86	781,71	829,18	864,88	920,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	352,14	406,90	455,94	493,56	509,81
Real Estate	395,80	420,56	444,05	467,35	504,86
Jasa Perusahaan	34,71	38,75	43,46	46,70	49,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	963,22	1.030,73	1.071,59	1.152,12	1.211,03

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jasa Pendidikan	680,72	716,48	772,42	819,69	875,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204,17	222,16	248,28	269,80	293,49
Jasa Lainnya	394,07	470,66	515,70	539,69	601,01
Produk Domestik Regional Bruto	12.642,56	14.325,95	15.841,34	16.911,59	17.929,51

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo,2026

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2021-2025. Pada tahun 2021 PDRB ADHK sebesar 8,77 triliun Rupiah. Di tahun 2022, PDRB ADHK kembali naik menjadi 9,41 triliun Rupiah, di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 9,95 triliun Rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 10,43 triliun Rupiah kemudian pada tahun 2025 menjadi 10,88 triliun Rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23

PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (dalam miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (miliar rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.244,58	1.267,43	1.283,51	1.294,36	1.370,33
Pertambangan dan Penggalian	124,14	125,78	134,03	134,95	144,70
Industri Pengolahan	988,14	1.009,18	1.051,75	1.097,32	1.152,72
Pengadaan Listrik dan Gas	8,40	8,95	9,60	10,60	10,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,35	11,84	12,22	12,81	12,64
Konstruksi	1.446,02	1.491,30	1.565,35	1.669,96	1.678,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.098,60	1.169,49	1.215,41	1.278,88	1.350,35
Transportasi dan Pergudangan	772,66	1.017,89	1.207,62	1.276,76	1.305,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,42	351,87	375,65	400,89	430,22
informasi dan Komunikasi	710,78	747,10	780,94	813,04	853,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	221,90	233,94	260,39	279,36	282,71
Real Estate	298,98	307,74	317,21	330,08	343,88
Jasa Perusahaan	28,64	30,63	33,06	34,90	36,60
Administrasi Pemerintahan,	584,79	601,68	613,82	652,66	693,39

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (miliar rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	523,43	529,61	548,76	575,15	609,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,79	157,66	165,99	175,82	188,54
Jasa Lainnya	313,53	357,24	376,63	388,70	416,68
Produk Domestik Regional Bruto	**8.838,14**	**9.951,95**	**9.951,95**	**10.426,23**	**10.881,10**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kulon Progo,2026

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Kulon Progo sudah menunjukkan peningkatan yang berarti terbukti dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami rebound dari -3,45% di tahun 2020 menjadi 4,37% di tahun 2021 dengan penyumbang terbesar adalah sektor Informasi dan komunikasi. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami peningkatan mencapai 6,57% dengan penyumbang terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan persentase mencapai 31,76%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65% pada kategori pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, Transportasi dan Pergudangan memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 18,64%. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 4,77%, kontribusi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 disumbangkan oleh Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,41%. Kemudian pada tahun 2025 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,36% dengan sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,24%.

Rincian laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,61	1,84	1,27	0,84	5,87
Pertambangan dan Penggalian	-2,29	1,33	6,55	0,69	7,22
Industri Pengolahan	0,95	2,13	4,22	4,33	5,05
Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	6,61	7,18	10,41	3,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,23	4,32	3,23	4,76	-1,32
Konstruksi	4,03	3,13	4,97	6,68	0,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,54	6,45	3,93	5,22	5,59
Transportasi dan Pergudangan	9,65	31,74	18,64	5,73	2,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,59	12,99	7,47	6,72	7,32

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Informasi dan Komunikasi	17,40	5,11	4,53	4,11	4,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,38	5,43	10,24	7,28	1,20
Real Estate	0,53	2,93	3,08	4,06	4,18
Jasa Perusahaan	7,90	6,97	7,92	5,55	4,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	-1,96	2,89	2,02	6,33	6,24
Jasa Pendidikan	4,36	1,18	3,62	4,81	6,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,22	4,56	5,28	5,92	7,24
Jasa Lainnya	16,45	13,94	5,43	3,21	7,20
Produk Domestik Regional Bruto	**4.37**	**6.58**	**5,65**	**4,77**	**4,36**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo,2026

3. Distribusi Persentase PDRB

Pada tahun 2021-2025, secara umum terjadi pergeseran dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB, Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi namun mulai menurun, sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Kulon Progo karena digeluti oleh mayoritas pendudu, di sisi lain sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan makin meningkat seiring peningkatan aktivitas Bandara YIA. Perkembangan distribusi persentase PDRB ADHB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (persen)

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,13	15,53	15,43	15,17	15,63
Pertambangan dan Penggalian	1,32	1,25	1,30	1,24	1,28
Industri Pengolahan	10,81	10,23	9,95	10,11	10,33
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
Konstruksi	16,98	15,92	14,93	15,06	14,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,22	12,23	11,81	11,85	11,96
Transportasi dan Pergudangan	9,11	12,30	14,98	14,99	14,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	3,79	3,77	3,88	4,06
informasi dan Komunikasi	5,71	5,46	5,23	5,11	5,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,84	2,88	2,92	2,84
Real Estate	3,13	2,94	2,80	2,76	2,82
Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	7,62	7,20	6,76	6,81	6,75

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jasa Pendidikan	5,38	5,01	4,87	4,85	4,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	1,55	1,57	1,60	1,64
Jasa Lainnya	3,12	3,29	3,25	3,19	3,35
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2026

4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita, Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk,

Selama kurun waktu 2021-2025, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo sebesar 28,85 juta Rupiah, kemudian pada tahun 2022, PDRB per kapita mencapai 32,51 juta Rupiah. Selanjutnya pada tahun 2023 PDRB per kapita kembali naik menjadi 35,76 juta Rupiah dan pada tahun 2024 naik menjadi 37,98 juta Rupiah dan tahun 2025 sebesar 40,07 juta Rupiah.

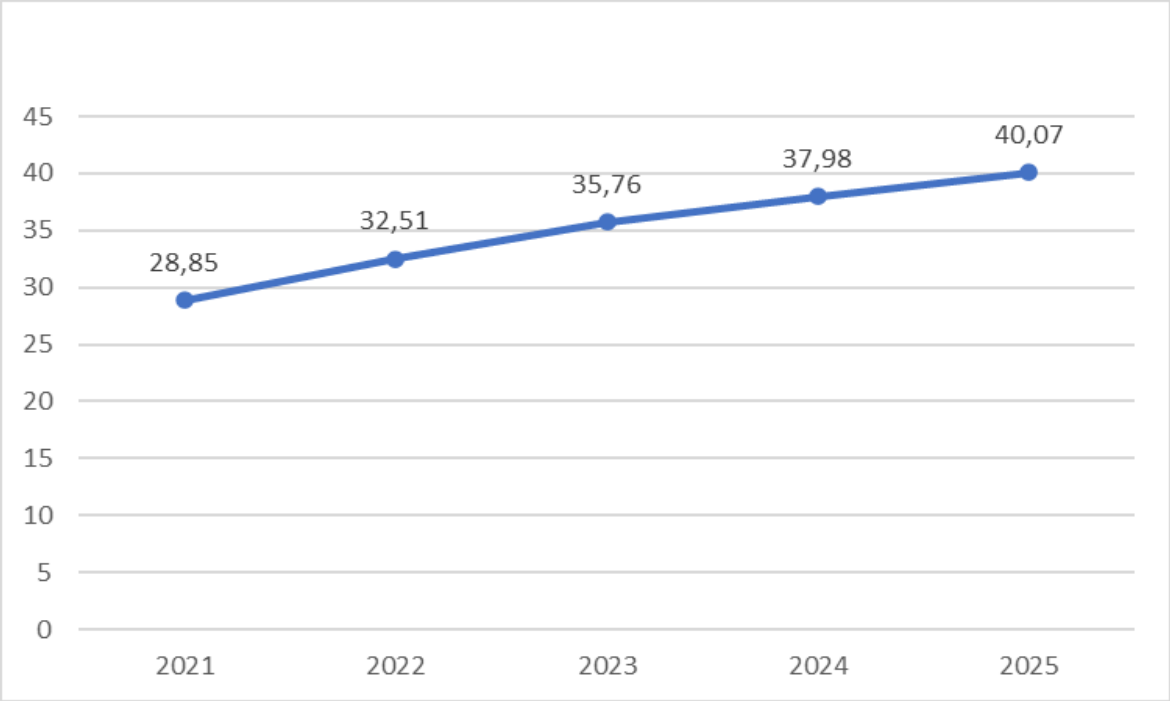

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026

Gambar 2.19

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025 (ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil hitungan PDRB per kapita ADHB kabupaten/kota di DIY oleh BPS DIY menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah yang cukup besar. Sampai tahun 2025 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi yaitu 140.641 ribu Rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai PDRB relatif besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit. Sementara Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai PDRB paling tinggi untuk tingkat kabupaten di wilayah Provinsi DIY mencatat PDRB per kapita sebesar 58.602 ribu Rupiah jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Kabupaten Sleman cukup besar yaitu 3 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai PDRB per kapita berada pada posisi 3 setelah Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Berikut ini nilai PDRB perkapita se Provinsi DIY.

Tabel 2.26

PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 (ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024*	2025**
Kulon Progo	28.851	32.508	35.755	37.987	40.069
Bantul	28.356	31.168	33.694	35.829	38.187
Gunung Kidul	27.304	30.356	33.258	35.504	38.330
Sleman	43.560	47.754	51.339	54.502	58.602
Kota Yogyakarta	102.702	113.499	122.954	131.433	140.641

Sumber data : BPS DIY, 2026

Keterangan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

5. Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan acuan nilai dari Kota Yogyakarta dikarenakan BPS belum menetapkan Kota Wates sebagai salah satu lokasi dalam mengidentifikasi inflasi. Laju inflasi year on year (Desember 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 3,11%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,00 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,44 persen; kelompok transportasi sebesar 1,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,28 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,49 persen. Untuk mengendalikan laju inflasi telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan program antara lain: operasi pasar, monev harga

pasar terutama pada momentum menjelang hari raya keagamaan, tahun baru, dan libur panjang. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan sistem informasi terkait harga pangan yaitu SIKEPOKU (sistem informasi kebutuhan pokok Kabupaten Kulon Progo) dimana harga pokok dipantau setiap hari pada 6 pasar (Pasar Wates, Bendungan, Sentolo, Temon, Galur, Nanggulan).

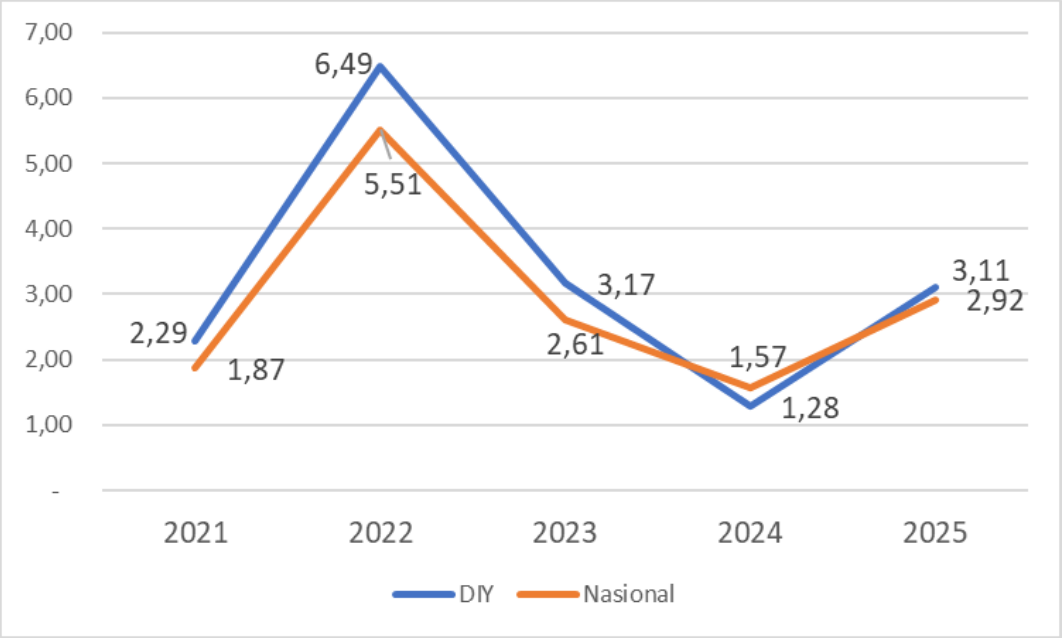

Sumber data: BPS DIY, 2025

Gambar 2.20

Perbandingan Tingkat Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2021-2025

6. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 sebesar Rp452.717,00 naik dari tahun 2024 yaitu sebesar Rp 438.007,00. Garis kemiskinan sebesar Rp452.717,00 artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai konsumsi di bawah Rp452.717,00 selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selalu di bawah D.I Yogyakarta dan

Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas untuk mengukur kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional.

Pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 15,62% pada tahun 2024 menjadi 14,53% pada tahun 2025. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya ditunjukkan dengan tabel berikut.

Tabel 2.27

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)			Presentase Penduduk Miskin (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Kulon Progo	416.870	438.007	452.717	70,74	71,48	67,25	15,64	15,62	14,53
Bantul	488.340	510.740	531.458	128,51	126,93	127,25	11,96	11,66	11,54
Gunung Kidul	382.249	401.209	413.617	122,24	120,41	113,48	15,60	15,18	14,15
Sleman	491.652	513.926	534.300	97,50	97,94	89,28	7,52	7,46	6,71
Kota Yogyakarta	662.267	686.973	729.196	29,48	28,79	28,58	6,49	6,26	6,14
DIY	573.022	602.437	649.331	448,47	445,55	422,79	11,04	10,83	10,08

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.28

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kulon Progo	3,01	2,32	2,54	2,48	1,81	0,75	0,56	0,61	0,62	0,34
Bantul	2,24	2,11	1,79	2,18	1,28	0,54	0,50	0,44	0,56	0,26
Gunungkidul	2,98	2,63	2,71	2,56	1,99	0,76	0,67	0,60	0,65	0,42
Sleman	1,26	0,80	0,86	1,21	0,76	0,32	0,27	0,32	0,27	0,14
Kota Yogyakarta	1,07	1,18	1,34	0,76	0,61	0,21	0,13	0,18	0,14	0,08
D.I.Yogyakarta	**2,42**	**2,01**	**1,72**	**1,87**	**1,79**	**0,65**	**0,50**	**0,38**	**0,45**	**0,47**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 secara umum semakin kecil. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo sebesar 18,38%. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 16,39% di tahun 2022. Penurunan di tahun 2022 ini sebesar 1,99 persen poin merupakan penurunan terbesar baik di DIY maupun untuk Kulon Progo sendiri sepanjang waktu. Pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,09 poin persen menjadi 14,53% dibandingkan tahun 2024.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di

Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja. Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, namun secara umum mengalami penurunan, dari 3,01 di tahun 2021 menjadi 1,81 di tahun 2025. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021-2025 juga mengalami fluktuasi, namun demikian secara umum mengalami penurunan dari 0,75 pada tahun 2021 menjadi 0,34 pada tahun 2025.

Meskipun tren angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, laju penurunannya belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik kemiskinan yang tersisa didominasi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga memerlukan intervensi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat utama penurunan angka kemiskinan antara lain masih terbatasnya kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan, rendahnya produktivitas sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama sebagian masyarakat, tingginya proporsi pekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap permodalan, pengembangan usaha, dan perluasan pasar. Di samping itu, dinamika inflasi, kerentanan terhadap guncangan ekonomi, perubahan iklim, serta belum optimalnya integrasi data dan sinergi pelaksanaan program antar pemangku kepentingan turut mempengaruhi efektivitas upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, penguatan daya saing UMKM, hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan investasi daerah agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, penyempurnaan basis data kemiskinan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Penurunan kemiskinan sebesar 1,09% poin ini mengindikasikan efektivitas intervensi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Namun, mengingat perkembangan Kulon Progo dan pergeseran fungsi lahan, penurunan ini masih menghadapi risiko kerentanan ekonomi bagi rumah tangga petani terdampak. Hal tersebut memerlukan transisi kebijakan dari perlindungan sosial murni menuju pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan profil tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari untuk bertahan hidup, termasuk makanan, air minum bersih, sanitasi, kesehatan, dan tempat tinggal. Sesuai standar Bank Dunia, penduduk kategori ini hidup dengan pengeluaran di bawah $2,15 USD 2017 *Purchasing Power Parity* (PPP) per hari. Apabila dilihat dari kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 sebesar 0,61 kemudian pada tahun 2025 sebesar 0,26 atau menurun sebesar 0,35 poin. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan semakin efektifnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo. Penurunan ini didukung oleh penguatan konvergensi program lintas sektor, pemanfaatan data sasaran yang semakin akurat, serta optimalisasi intervensi pemerintah daerah yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin ekstrem. Berikut tabel data perbandingan kemiskinan ekstrem di Provinsi DIY Tahun 2024-2025:

Tabel 2.29

Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

NO	PROV/KAB/KOT	2024	2025	PERUBAHAN
1	D.I. Yogyakarta	0,61	0,27	-0,34
2	Kulon Progo	0,61	0,26	-0,35
3	Bantul	0,61	0,24	-0,37
4	Gunung Kidul	0,61	0,29	-0,32
5	Sleman	0,61	0,24	-0,37
6	Kota Yogyakarta	0,61	0,34	-0,27

Sumber: BPS RI, *diolah*.

Berdasarkan data kemiskinan ekstrem tahun 2024–2025, Kabupaten Kulon Progo berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dari 0,61 persen pada tahun 2024 menjadi 0,26 persen pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persentase. Penurunan tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persentase, yaitu dari 0,61 persen menjadi 0,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo berada sedikit di atas capaian rata-rata provinsi.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY, capaian Kabupaten Kulon Progo berada pada kelompok yang cukup baik. Tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,26 persen, lebih rendah dibandingkan Gunungkidul (0,29 persen) dan Kota Yogyakarta (0,34 persen), namun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Bantul (0,24 persen) dan Sleman (0,24 persen). Dari sisi besaran penurunan, Kulon Progo mencatat penurunan sebesar 0,35 poin persentase, lebih baik dibandingkan DIY (0,34 poin), Gunungkidul (0,32 poin), dan Kota Yogyakarta (0,27 poin), namun masih berada di bawah Bantul dan Sleman yang masing-masing berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 0,37 poin persentase.

7. Rasio Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio

Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.30

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	Rasio Gini	Kriteria Oshima
2021	0,367	Ketimpangan Moderat
2022	0,380	Ketimpangan Moderat
2023	0,402	Ketimpangan Moderat
2024	0,373	Ketimpangan Moderat
2025	0,351	Ketimpangan Moderat

Sumber data: BPS DIY dan BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang semakin melebar, namun demikian pada tahun 2025 kondisinya membaik dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu menurun sebesar 0,022 poin. Apabila dilihat dari 3 kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas penurunan ini disumbang paling besar peranannya dari penurunan kelompok pengeluaran 20 persen teratas, yang turun dari 66,18% menjadi 62,99% atau 3,19 persen poin. Di sisi lain kelompok menengah dan terendah naik masing-masing dari 21,51% menjadi 24,14% dan 12,30% menjadi 12,86%. Selengkapnya ditunjukkan pada gambar berikut.

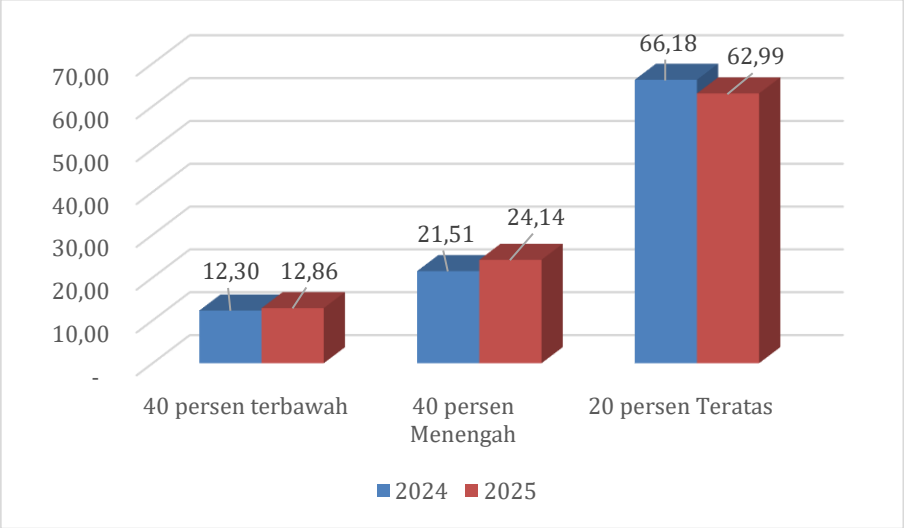

Gambar 2.21

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kulon Progo (%) Tahun 2024-2025

Besaran Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 lebih rendah dari rata-rata DIY dan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang Kabupaten Kulon Progo yang

lebih merata dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Gini ratio pada Tahun 2024 sebesar 0,373, turun menjadi 0,351 pada tahun 2025.

Tabel 2.31

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021–2025

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kulon Progo	0,367	0,380	0,402	0,373	0,351
2.	DIY	0,441	0,439	0,449	0,435	0,414
3.	Nasional	0,384	0,381	0,388	0,379	0,363

Sumber data : BPS DIY, 2026

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tabel rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

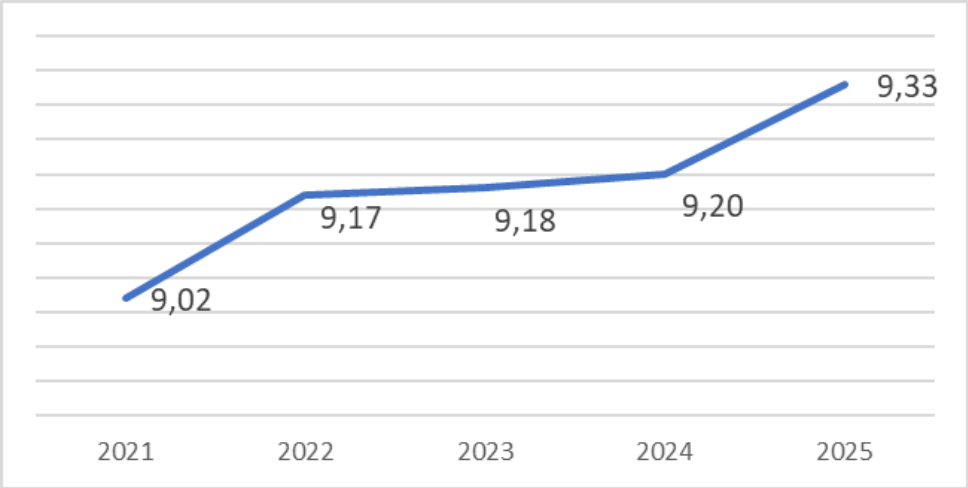

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2024

Gambar 2.22

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (tahun)

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 9,02 tahun hingga pada tahun 2025 meningkat menjadi 9,33 tahun. Angka 9,33 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 9,33 tahun atau sudah menyelesaikan sekolahnya sampai dengan tingkat SMP, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak

tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

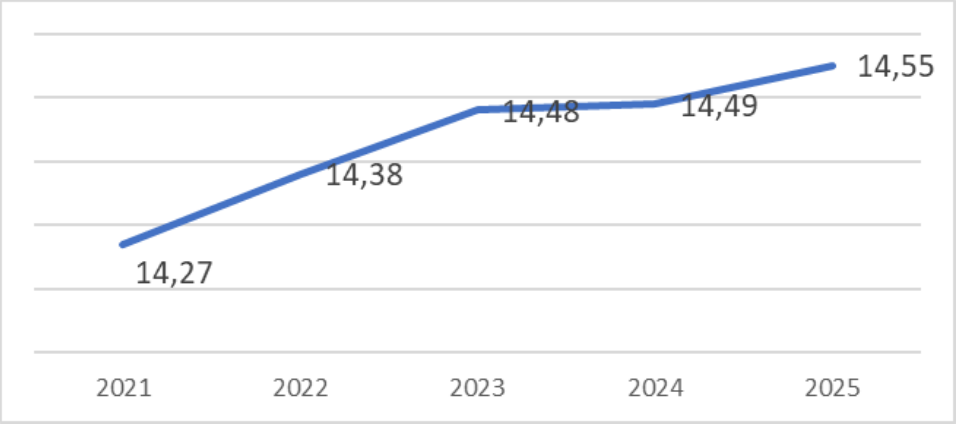

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.23

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2021-2025

Dari gambar diatas terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021-2025 terus menunjukkan peningkatan terutama di 3 tahun terakhir.

3. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APM pada jenjang SD/MI pada tahun 2022 hingga tahun 2025 memiliki tren kenaikan positif dari 88,17 menjadi 99.01 persen. APK dari tahun 2021 sampai 2025 sangat fluktuatif dan untuk tahun 2025 mencapai 103,12 untuk jenjang SD dan 100,21 untuk jenjang SMP. Angka partisipasi sekolah jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2023 dari 97,04 persen menjadi 99,13, tetapi terjadi penurunan di tahun 2024 dan tahun 2025 sehingga capaiannya menjadi 98,60 persen.

APM jenjang SD/MI di bawah 100% artinya: (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan

tertentu lainnya. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo selengkapnya tercantum pada Tabel berikut. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.32

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Angka Partisipasi Murni (%)						
1.	SD/MI (%)	93,73	88,17	89,09	98,54	99,01
2.	SMP/MTs(%)	95,22	79,90	92,64	86.28	93,76
Angka Partisipasi Kasar (%)						
1.	SD/MI(%)	95,11	95,16	93,32	99.82	103,12
2.	SLTP/MTs(%)	98,53	98,56	109,69	94.71	100,21
Angka partisipasi sekolah (%)						
1.	SD/MI(%)	93,98	94,00	99,46	98.54	99,01
2.	SLTP/MTs(%)	97,04	97,06	99,13	98.76	98,60

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2025

4. Angka Kelulusan

Capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Pada tahun 2025, Angka Kelulusan jenjang SD dan SMP mencapai 100%. hal ini mengindikasikan upaya perbaikan terhadap capaian tahun 2025 cukup efektif, sehingga angka kelulusan mencapai 100%. Upaya tersebut diantaranya adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat, dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung. Angka kelulusan di Kabupaten Kulon Progo selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33

Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Kelulusan SD (%)	100	100	100	99,99	100
2.	Angka Kelulusan SMP (%)	100	100	100	99,99	100

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2025

5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup selalu meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Peningkatan usia harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebesar 75,71 masih di atas angka DIY yaitu sebesar 75,64 tahun.

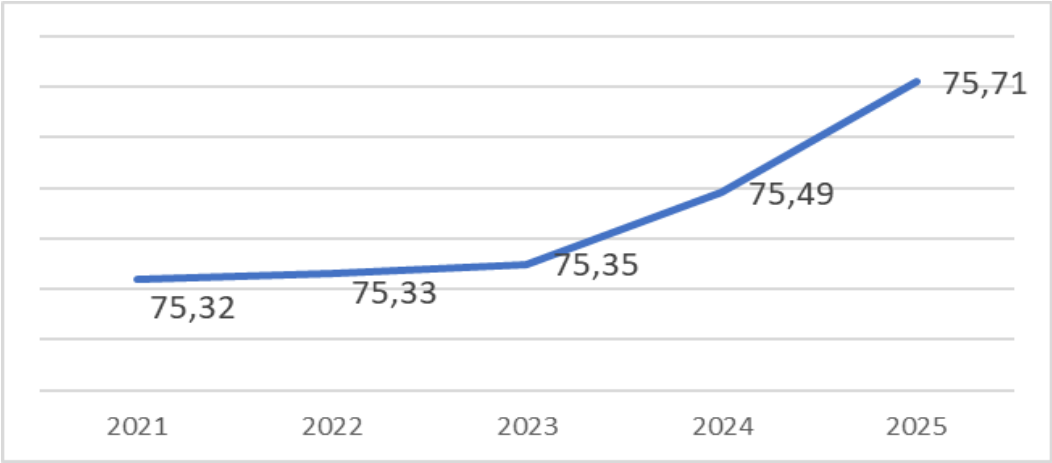

Sumber data: BPS DIY, 2025 (diolah)

Gambar 2.24

Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2021-2025 (tahun)

6. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2021-2025 angka IPM Kabupaten Kulon Progo menunjukan tren meningkat. Berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2021-2025.

Tabel 2.34

Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,32	75,33	75,35	75,49	75,71
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,27	14,38	14,48	14.49	14,55
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,02	9,17	9,18	9.2	9,33
4.	Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)	10.069	10.511	10.723	10,99	11,50
	IPM	**74,73**	**75,48**	**75,82**	**76,18**	**76,97**

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Apabila dilihat pencapaian nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup stabil. Komponen IPM yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sampai dengan tahun 2025 status pembangunan manusia kabupaten/ kota di DIY terbagi hanya menjadi 2 kategori, yaitu Sangat Tinggi dan Tinggi. Kategori Sangat Tinggi dicapai: Kota Yogyakarta (89,53), Kabupaten Sleman (86,35), dan Kabupaten Bantul (83,03), sedangkan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo (76,97) dan Kabupaten Gunungkidul (73,13) termasuk wilayah yang pencapaian kinerjanya tinggi. Berikut ini keterbandingan komponen IPM di DIY tahun 2025.

Tabel 2.35

Keterbandingan Komponen IPM dan IPM tiap Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2025

Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Rp.000)	IPM
Kulon Progo	75,71	14,55	9,33	11.499	76,97
Bantul	75,04	15,91	10,11	17.240	83,03

Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Rp.000)	IPM
Gunungkidul	75,12	13,56	7,64	11.006	73,13
Sleman	75,81	16,80	11,42	18.231	86,35
Yogyakarta	76,05	17,67	12,13	21.104	89,53
DIY	**75,64**	**15,78**	**10,20**	**15.855**	**82,48**

Sumber data: BPS Kulon Progo, 2025

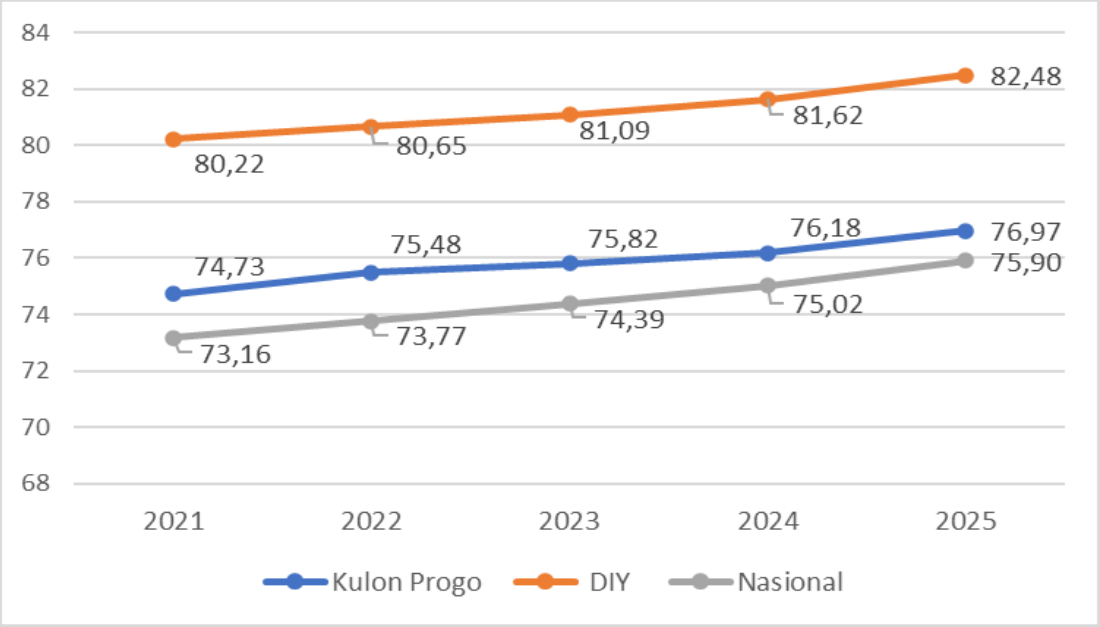

Sumber data: BPS Kulon Progo, 2025 diolah

Gambar 2.25

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY dan Nasional kurun waktu 2021-2025. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Kulon Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun IPM Nasional. Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang kategori tinggi yaitu 76,97 pada tahun 2025 dibandingkan angka IPM pada tahun 2021 yang sebesar 74,73.

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2021–2025 seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.36

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (%)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2021	85,65	68,32	76,72
2022	87,15	70,99	78,83
2023	85,53	66,31	75,75
2024	84,69	72,66	78,57
2025	85,35	71,81	78,46

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

TPAK 2025 mengalami penurunan menjadi 78,46 yang sebelumnya berada pada angka 78,57 di tahun 2024. Partisipasi laki-laki mengalami kenaikan dari 84,69 menjadi 85,35 di tahun 2025. Sementara itu partisipasi perempuan justru menurun dari 72,66 pada tahun 2024 menjadi 71,81 pada tahun 2025.

Tabel 2.37

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2021-2025 (%)

Tahun	Kulon Progo	DIY	Indonesia
2021	76,72	73,52	74,20
2022	78,83	72,60	73,10
2023	75,75	74,08	73,90
2024	78,57	74,78	70,63
2025	78,46	74,74	70,59

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Nilai TPAK Kulon Progo pada tahun 2025 sebesar 78,46, dimana angka tersebut berada diatas nilai Provinsi dan Nasional. Nilai TPAK di DIY sebesar 74,74 sedangkan nilai TPAK Nasional adalah 70,59.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2025 TPT Kulon Progo berada pada angka 2,01 turun 0,39 dibandingkan tahun sebelumnya. TPT Kulon Progo dari periode 2020 – 2024, selalu di bawah rata-rata TPT D.I Yogyakarta dan TPT Nasional.

Tabel 2.38

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kulon Progo	3,69	2,80	2,40	2,01	2,23
Bantul	4,04	3,97	3,78	3,62	3,57
Gunungkidul	2,20	2,08	2,09	2,16	2,15

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sleman	5,17	4,78	4,47	4,13	4,07
Yogyakarta	9,13	7,18	6,07	5,80	5,72
DIY	**4,56**	**4,06**	**3,69**	**3,48**	**3,46**
Indonesia	**6,49**	**5,86**	**5,32**	**4,91**	**4,85**

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Capaian indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan upaya dalam pencapaiannya. Penilaian capaian TPB di Kulon Progo dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Penilaian pencapaian TPB didasarkan pada dua aspek yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang bersifat penilaian objektif terhadap suatu indikator TPB melalui persetujuan dalam rapat. Berdasarkan data yang terkumpul, dikelompokkan atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data. Pencapaian TPB di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KODE	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	TPB-1	14	1	7	2	24
TPB 2. Tanpa Kelaparan	TPB-2	1	4	3	3	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	TPB-3	1	1	30	2	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	TPB-4	6	2	0	5	13
TPB 5. Kesetaraan Gender	TPB-5	1	2	9	2	14
TPB. 6 Air Bersih	TPB-6	6	0	12	0	18
TPB 7. Akses Energi	TPB-7	0	0	2	0	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	TPB-8	6	1	10	2	19
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	TPB-9	2	0	8	3	13
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	TPB-10	4	0	7	0	11
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	TPB-11	5	2	4	2	13
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	TPB-12	2	0	3	0	5
TPB 13. Perubahan Iklim	TPB-13	2	0	0	0	2
TPB 14. Ekosistem Lautan	TPB-14	1	0	0	0	1
TPB 15. Ekosistem Daratan	TPB-15	1	0	2	1	4
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	TPB-16	6	5	10	0	21
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	TPB-17	2	0	13	1	16

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KODE	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
Total		60	18	120	23	221

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Keterangan : Kategori 1: Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
Kategori 2: Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
Kategori 3: Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
Kategori 4: Indikator yang belum memiliki data

Ringkasan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan kategori pencapaian terhadap target indikator daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

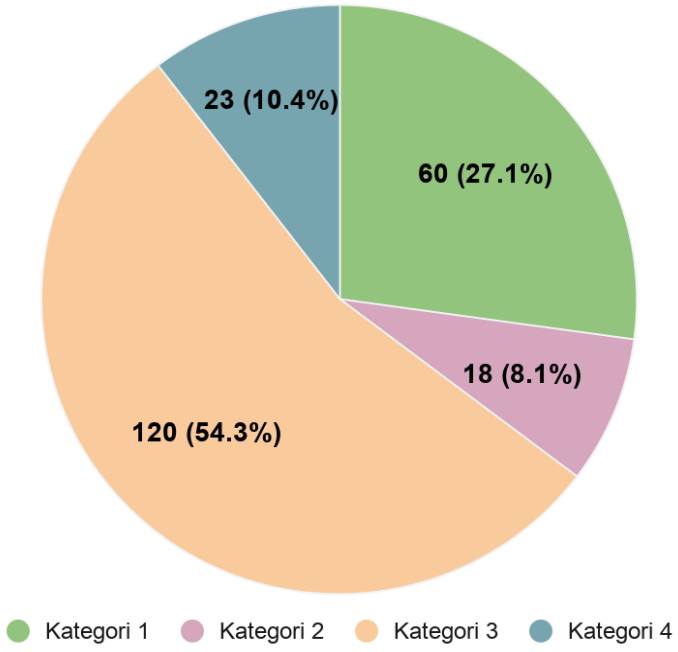

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Gambar 2.26
Persentase Capaian Indikator TPB

Secara umum Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya pencapaian indikator TPB. Hal ini dapat dilihat dari jumlah capaian jumlah indikator TPB yang telah mencapai target daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukan bahwa indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan dan mencapai target daerah baru mencapai 10,4% (23 indikator) dari total 221 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai ketentuan yang ada. Terdapat capaian TPB yang relatif rendah yaitu kategori 3 dan 4, hal ini dikarenakan tidak semua indikator menjadi kewenangan kabupaten sehingga tidak tersedia datanya.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya dan beradab. Pembangunan keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional

a. Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian tradisi, mendorong kreativitas masyarakat, serta memperkuat identitas budaya daerah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui data mengenai jenis seni, jumlah grup kesenian, penyelenggaraan lomba dan festival, upacara adat, himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, ketersediaan gedung kesenian, kesenian khas daerah, serta desa budaya selama periode tahun 2021–2025. Tabel berikut menyajikan data perkembangan seni dan budaya sebagai gambaran kondisi kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.40

Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2021-2025

No.	Kondisi Perkembangan Kebudayaan	Tahun					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	**Jenis Seni**						
	1. Seni Tari						
	a. Tradisional	366	366	352	394	406	Buah
	b. Kreasi baru	31	31	30	33	33	Buah
	2. Seni Musik						
	a. Diatonis	104	104	61	78	117	Buah
	b. Pentatonis	171	171	171	171	186	Buah
	3. Seni Rupa						
	a. Lukis	9	9	6	6	4	Buah
	b. Pahat	-	-	-	-	-	Buah
	4. Seni Theater						
	a. Tradisional	153	153	153	153	142	Buah
	b. Modern	7	7	6	10	9	Buah
	Jumlah	**841**	**841**	**779**	**845**	**897**	**Buah**
2.	Jumlah Grup Kesenian	1.320	1.365	1.454	1.552	1.652	Grup
3.	Penyelenggaraan Lomba Unit						
	a. Banyaknya Lomba/Festival	19	24	16	13	12	Kali
	b. Jenis Lomba /Festival	13	5	5	5	6	Jenis
4.	Upacara Adat	93	75	80	15	40	Kel
5.	Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	18	18	20	20	19	Kel
6.	Jumlah gedung kesenian	2	2	2	2	2	Unit
7.	Kesenian khas Kab. Kulon Progo	13	13	13	13	13	Buah
8.	Desa Budaya	15	16	16	21	21	Kalurahan

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan pertumbuhan pada beberapa bidang seni sekaligus adanya penyesuaian pada jenis lainnya. Seni tari tetap dominan, dengan tari tradisional berjumlah 394 buah pada 2024 dan meningkat menjadi 406 buah pada 2025, sedangkan tari kreasi baru tetap stabil pada 33 buah. Musik diatonis tercatat 78 buah pada 2024 dan meningkat menjadi 117 buah pada 2025, sedangkan musik pentatonis tetap 171 buah pada 2024 dan naik menjadi 186 buah pada 2025. Seni rupa khususnya lukis berjumlah 6 buah pada 2024 dan menurun menjadi 4 buah pada 2025, sementara seni pahat tidak tercatat pada kedua tahun. Seni teater tradisional tercatat 153 buah pada 2024 dan sedikit menurun menjadi 142 buah pada 2025, sedangkan teater modern berjumlah 10 buah pada 2024 dan menurun menjadi 9 buah pada 2025. Secara keseluruhan, jumlah jenis seni meningkat dari 845 buah pada 2024 menjadi 897 buah pada 2025, menunjukkan pertumbuhan aktivitas seni yang signifikan di masyarakat.

Dari aspek kelembagaan dan kegiatan, jumlah grup kesenian meningkat dari 1.552 pada 2024 menjadi 1.652 grup pada 2025 karena partisipasi masyarakat yang semakin aktif dan terbentuknya komunitas baru. Penyelenggaraan lomba dan festival serta upacara adat mengalami penurunan pada 2025 karena efisiensi anggaran Dana Keistimewaan sekaligus penyesuaian program dengan fokus pada peningkatan kualitas kegiatan dibandingkan kuantitas. Akibatnya, frekuensi lomba berkurang dari 14 pada 2024 menjadi 12 kali pada 2025, jenis lomba/festival dari 7 pada 2024 menjadi 6 pada 2025, dan upacara adat dari 44 pada 2024 menjadi 40 pada 2025. Himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME juga berkurang dari 20 pada 2024 menjadi 19 kelompok pada 2025. Dua gedung kesenian, yaitu Gedung Kesenian Kulon Progo dan Taman Budaya Kulon Progo, tetap menjadi pusat kegiatan seni, jumlah kesenian khas daerah tetap 13 jenis, dan desa budaya tetap 21 kalurahan karena proses peningkatan status desa rintisan budaya tertunda akibat penjadwalan penilaian dari provinsi yang belum rutin.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya memperkuat seni dan budaya melalui pembinaan kelompok kesenian, peningkatan kualitas lomba dan festival, serta pelestarian upacara adat. Dua gedung kesenian, yaitu Gedung Kesenian Kulon Progo dan Taman Budaya Kulon Progo, akan terus dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan seni. Pengembangan desa budaya juga akan didukung melalui pendampingan dan pembinaan kepada kalurahan rintisan budaya kategori berkembang agar dapat naik kelas menjadi kalurahan budaya, serta koordinasi yang lebih intensif dengan provinsi untuk memastikan standar dan panduan pengembangan budaya dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga dan mengembangkan 13 kesenian khas daerah dan mendorong inovasi sertakreasi baru agar budaya Kulon Progo tetap lestari.

Tabel 2.41

Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	364	316	371	373	375
	a. Masa Prasejarah	11	4	3	5	6
	b. Masa Hindu-Budha	166	119	128	128	128
	c. Masa Islam	83	51	82	82	83
	d. Masa Kolonial/Perjuangan	86	127	139	139	139

No.	Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	e. Tradisional	18	15	19	19	19
2.	Museum	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Perkembangan peninggalan sejarah purbakala di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan kelanjutan pelestarian situs dari berbagai masa. Pada tahun 2024, Masa Prasejarah tercatat sebanyak 5 unit dan bertambah menjadi 6 unit pada tahun 2025. Masa Hindu-Budha tetap sebanyak 128 unit pada kedua tahun tersebut. Masa Islam berjumlah 82 unit pada 2024 dan meningkat menjadi 83 unit pada 2025, sedangkan Masa Kolonial/Perjuangan tetap stabil sebanyak 139 unit. Peninggalan tradisional juga tetap 19 unit pada kedua tahun tersebut. Hingga tahun 2025, Kabupaten Kulon Progo belum memiliki museum, sehingga sebagian peninggalan masih tersebar, meskipun beberapa di antaranya telah disimpan dan dilestarikan di Eks Pengepul Nila Bulurejo. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan dan pelestarian peninggalan sejarah yang berkelanjutan pada berbagai masa di wilayah tersebut.

b. Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat lima tahun terakhir dan jumlah klub olahraga cenderung fluktuatif lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 jumlah organisasi olahraga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 46 organisasi, sedangkan jumlah klub olahraga menurun menjadi 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42

Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Organisasi Olahraga	45	45	46	46	46
2.	Jumlah Klub Olahraga	280	148	173	173	173

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga selain melalui pembinaan klub dan atlet olahraga juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat namun perlu peningkatan dari segi kualitasnya. Sampai dengan tahun 2025 telah tersedia gedung olahraga sebanyak 92 unit meningkat satu gedung olahraga dibandingkan tahun 2019, dan lapangan olahraga sebanyak 1.193 unit dari 13 cabang olahraga berprestasi yang diminati masyarakat dan tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Data selengkapnya dapat dilihat sesuai pada tabel berikut

Tabel 2.43

Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kapanewon	Cabang Olah Raga													
		Sepak Bola	Bulu Tangkis	Voli	Tenis meja	Tenis Lapangan	Renang	Tinju	Panjat Tebing	Sepak Takraw	Voli Pantai	Dayung	Basket	Futsal	Jumlah
1	Temon	8	33	28	34	0	2	0	0	0	2	1	2	1	111
2	Wates	10	54	32	47	5	1	0	1	15	0	1	4	3	173
3	Panjatan	10	34	24	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102
4	Galur	6	16	10	10	2	0	0	0	2	0	0	0	0	46
5	Lendah	7	20	12	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
6	Sentolo	12	44	48	41	1	2	0	0	0	0	0	2	1	151
7	Pengasih	15	32	28	17	2	0	1	0	2	0	0	4	1	102
8	Kokap	3	17	23	43	0	0	0	0	0	0	1	2	0	89
9	Girimulyo	2	34	14	36	0	0	0	0	0	0	0	4	0	90
10	Nanggulan	4	10	22	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	50
11	Samigaluh	6	21	45	38	0	3	0	1	0	0	0	6	0	120
12	Kalibawang	4	20	26	27	1	0	1	0	1	0	0	0	0	80
	JUMLAH	95	335	312	369	11	8	2	2	20	2	3	28	6	1.193

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Bupati Kulon Progo 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018. Pengaturan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan, telah dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit pelayanan publik yaitu sejumlah 42 unit pelayanan yang terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 21 UPTD Puskesmas, 12 Kapanewon, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 bahwa nilai interval konversi hasil survei pada 25,00-64,99 kinerja unit pelayanan “Tidak Baik”, nilai interval konversi hasil survei pada 65,00-76,60 kinerja unit pelayanan “Kurang Baik”, nilai interval konversi hasil survei pada 76,61-88,30 kinerja unit pelayanan “Baik”, dan nilai interval konversi hasil survei pada 88,31-100 kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

hasil survei dimana nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 sebesar 86,856 naik dari pencapaian Tahun 2024 sebesar 86,797 dengan predikat ”Baik”.

Secara umum hasil survei kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.44

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun ke Tahun

No.	Perangkat Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
1	BKAD	80,135	83,604	82,196	85,942	90,094
2	Dinas DUKCAPIL	86,452	88,392	89,254	89,189	89,844
3	UPT Pengujian Kend. Bermotor	78,856	78,924	82,745	82,862	84,669
4	Dinas NAKERTRANS	89,633	88,578	87,662	86,745	92,167
5	DPMPT	85,331	87,921	89,455	85,970	87,5
6	Dinas PERPUSSIP	84,2	86,959	87,654	85,378	84,367
7	Dinas Sosial PPPA	-	80,286	80,634	83,409	89
8	Bag. Adm Kesra SETDA	-	85,066	85,342	84,813	88,319
9	RSUD Nyi Ageng Serang	80,247	84,181	84,527	84,864	86,305
10	Kelurahan Wates	85,416	85,723	85,544	87,875	-
11	Kapanewon Kalibawang	81,199	87,274	90,952	89,882	89,972
12	Kapanewon Samigaluh	83,19	80,906	84,714	85,331	89,142
13	Kapanewon Girimulyo	89,466	83,576	90,632	89,161	91,669
14	Kapanewon Nanggulan	95,46	87,912	86,358	87,385	90,989
15	Kapanewon Sentolo	83,828	78,167	81,85	86,136	87,783
16	Kapanewon Pengasih	88,023	87,44	92,186	86,053	91,892
17	Kapanewon Wates	83,916	83,992	87,246	82,563	86,833
18	Kapanewon Kokap	81,689	81,113	83,964	89,300	87,55
19	Kapanewon Temon	81,974	82,536	90,861	82,343	88,722
20	Kapanewon Panjatan	91,575	87,811	85,137	92,768	91,722
21	Kapanewon Lendah	86,414	88,023	90,943	92,824	88,167
22	Kapanewon Galur	83,084	82,679	86,108	84,776	90
23	Puskesmas Kalibawang	78,563	79,477	84,274	84,952	89,972
24	Puskesmas Samigaluh I	82,14	81,596	85,259	87,857	83,842
25	Puskesmas Samigaluh II	81,038	80,236	83,842	88,486	87,955
26	Puskesmas Girimulyo I	81,437	83,031	85,933	88,727	84,783
27	Puskesmas Girimulyo II	75,4	81,907	85,211	86,673	85,005
28	Puskesmas Nanggulan	82,452	81,699	84,934	86,414	82,042
29	Puskesmas Sentolo I	79,518	79,994	84,638	89,744	83,514

No.	Perangkat Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
30	Puskesmas Sentolo II	76,812	80,148	83,618	89,725	82,833
31	Puskesmas Pengasih I	84,138	82,234	85,97	86,321	78,053
32	Puskesmas Pengasih II	83,694	81,541	85,382	85,137	85,361
33	Puskesmas Wates	79,032	81,382	82,954	82,368	85,669
34	Puskesmas Kokap I	74,774	81,696	84,804	89,836	85,669
35	Puskesmas Kokap II	78,493	81,641	83,783	89,670	85,933
36	Puskesmas Temon I	85,877	83,725	85,581	85,230	85,778
37	Puskesmas Temon II	82,664	83,417	84,934	85,452	85,686
38	Puskesmas Panjatan I	76,849	82,825	83,25	88,615	84,7
39	Puskesmas Panjatan II	81,881	84,656	83,287	89,614	83,967
40	Puskesmas Lendah I	81.169	82,843	84,49	84,508	84,097
41	Puskesmas Lendah II	80,279	83,38	85,504	86,895	86,514
42	Puskesmas Galur I	75,436	81,936	84,12	85,470	84,7
43	Puskesmas Galur II	80,253	80,11	84,527	86,081	82,278
	Kulon Progo	**82,487**	**83,268**	**85,63**	**86,797**	**86,856**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh surveyor non ASN pada Unit Pelayanan Publik tersasar, sedangkan pada Tahun 2025 pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh unit pelayanan publik. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey dari Tahun 2019 dengan nilai IKM sebesar 82,96 dan untuk capaian IKM Tahun 2020 sebesar 84,12. Pada Tahun 2021 capaian IKM mengalami penurunan menjadi 82,49 hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 menggunakan 12 indikator penilaian sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan 9 indikator penilaian (sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017), selain itu pelayanan di masa pandemi bisa mempengaruhi persepsi penilaian dari masyarakat. Pada tahun 2022, capaian IKM kembali mengalami peningkatan yaitu pada nilai 83,268, pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 85,63. Kemudian Pada tahun 2024 nilai IKM mencapai 86.797 dan melebihi target. Faktor pengungkit nilai IKM diantaranya adalah keberadaan Mall Pelayanan Publik dan digitalisasi layanan dengan penerapan SPBE sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, aman dan nyaman. Pada Tahun 2025 nilai IKM meningkat 0,059 mencapai nilai 86,856 didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan dalam hal kewajaran biaya layanan dan perilaku pelayanan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola,

akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.45

Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Literasi dan Numerasi						
	Kemampuan Literasi SD	Skor	56,67	61,06	69,13	69,19	65,23
	Kemampuan Literasi SMP	Skor	67,69	71,64	77,33	82,91	83,65
	Kemampuan Numerasi SD	Skor	37,55	44,24	51,46	58,81	54,09
	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	56,2	58,69	67,53	70,7	71,92
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,02	9,17	9,18	9,20	9,33
3.	Angka Partisipasi Murni						
	- APM SD	%	93,73	88,17	89,09	98,54	99,01
	- APM SMP	%	95,22	79,90	92,64	86,28	93,76
4.	Angka Partisipasi Kasar						
	- APK SD	%	95,11	93,45	93,32	99,82	103,12
	- APK SMP	%	98,53	100,04	109,69	94,71	100,21
5.	Angka Partisipasi Sekolah						
	- APS SD	%	93,98	99,72	99,46	98,54	99,01
	- APS SMP	%	97,04	99,59	99,13	98,76	98,60
6.	Angka Kelulusan						
	- Angka kelulusan SD	%	100	100	100	99,90	100
	- Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	99,90	100
7.	Angka melanjutkan						
	- Angka melanjutkan SD ke SMP	%	100	100	100	97,08	100
	- Angka melanjutkan SMP ke SMA	%	100	100	100	99,80	n.a
8.	Angka Putus Sekolah						
	- SD	Orang	1	6	6	0	0
	- SMP	Orang	6	34	11	0	0
9.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	14,38	14,48	14,49	14,55
10.	Standar Kompetensi Pendidik						
	- Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	%	89,45	89,61	89,8	88,82	73,41
	- Guru yang telah bersertifikat pendidik	%	76,73	76,81	60,79	56,43	57,23

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2025
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Skor kemampuan literasi SD maupun SMP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2025 Skor kemampuan literasi SD mengalami penurunan.

Kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Skor kemampuan numerasi SD maupun SMP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2025 Skor kemampuan numerasi SD mengalami penurunan.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari 8,86 di tahun 2020, kemudian 9.02 di tahun 2021, 9,17 di Tahun 2022, menjadi 9,18 pada Tahun 2023 dan menjadi 9,2 di tahun 2024 dan menjadi 9,33 di tahun 2025. Adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun disebabkan (1) adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan anak-anaknya melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, (2) adanya dukungan tertib administrasi oleh seluruh masyarakat, khususnya pada pembaharuan data pendidikan di dinas terkait, dan (3) adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat, baik pada pendidikan formal, maupun pada pendidikan non formal (Paket A, B atau C), serta adanya mutasi penduduk dari luar kabupaten ke dalam kabupaten.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM jenjang SD/MI pada Tahun 2021 sebesar 93,73 %, pada Tahun 2022 menurun menjadi 88,17%, tahun 2023 mengalami perbaikan kinerja menjadi 98,90%, di tahun 2024 menjadi 98,54%, dan di tahun 2025 sebesar 99.01%. APM jenjang SD/MI di bawah 100% artinya (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 95,22%, tahun 2022 turun menjadi 79,9%, dan tahun 2025 mengalami perbaikan kinerja menjadi 93,76%. Kenaikan dan penurunan APM SMP/MTs disebabkan oleh (1) sebagian warga masyarakat telah menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, namun masih terdapat sebagian yang belum sesuai harapan (misalnya: siswa usia lebih dari 13 Tahun masih ada di SD/MI dan sederajatnya dan/atau siswa usia lebih dari 15 Tahun masih di SMP/MTs dan sederajatnya), hal ini dapat pula karena alasan tertentu,

yakni kondisi/kebutuhan/ karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Angka kelulusan cenderung stabil dimana naik turunnya tidak lebih dari 1% atau berkisar di angka 99-100%. Pada Tahun 2020 hingga 2025, angka kelulusan SD maupun SMP mencapai 100%, hanya di tahun 2024 angka kelulusan sebesar 99.90%. Angka kelulusan umumnya dipengaruhi adanya perubahan kurikulum dan strategi pembelajaran dengan cara pandang yang berbeda. Setingkat SD/MI saat ini menggunakan sistem tema (Tematik) dan pada Jenjang SMP/MTs menggunakan sistem mata pelajaran. Bobot soal tingkat daerah dan nasional pun berubah-ubah sesuai kebijakan yang ditetapkan, tentu dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan tantangan zaman, serta karakteristik peserta didik di setiap daerah.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan yang lebih baik, dengan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 14,17, tahun 2022 sebesar 14,38, tahun 2023 sebesar 14.48, tahun 2024 naik menjadi 14,49, dan di tahun 2025 menjadi 14,55 tahun berdasarkan data BPS. Peningkatan tersebut atas dukungan semua pihak, baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal, maupun non formal.

Pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021–2025 dilihat dari kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dengan capaian yang bervariasi yaitu tahun tahun 2021 sebesar 89,45%, tahun 2022 meningkat menjadi 89,61%, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 88,09%, dan di tahun 2025 menurun kembali menjadi 73,41%. Sedangkan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2021 sebesar 76,73%, tahun 2022 meningkat menjadi 76,81%, namun berangsur turun di tahun 2023 dan 2024 menjadi 52,24%. Di tahun 2025, kinerja membaik menjadi 57.23%.

Kedua hal di atas disebabkan belum terpenuhi guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan, dimana hampir setiap tahun terdapat guru pensiun berkisar 200-300 orang, namun belum diimbangi dengan adanya penambahan guru PNS sehingga upaya pemenuhan dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun sebagian GTT masih belum memenuhi kualifikasi S1/DIV sebagaimana yang dipersyaratkan, termasuk persyaratan dalam hal mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam hal penetapan Guru Profesional (telah mendapatkan sertifikat pendidik). Selain itu, terdapat sebagian Guru PNS (yang usianya melebihi 50 tahun) belum dapat mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah terakhirnya (misalnya DII-PGSD), hal ini disebabkan karena faktor usia, dan/atau semangat.

Tabel 2.46

Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2021–2025

No	Indikator	Capaian kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio guru terhadap murid SD/MI	11,44	9,65	10,32	14,74	10,86
2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	9,56	7,67	9,79	11,15	12,48

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

Rasio guru terhadap murid, baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs sangat dipengaruhi pemenuhan guru pada satuan pendidikan serta pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut. Di Kulon Progo, melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, kenaikan/penurunan rasio lebih disebabkan pada faktor minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan di Kulon Progo. Pada tahun 2025 capaian rasio guru terhadap murid sebesar 10,86 pada SD/MI dan 12,48 pada SMP/MTs, angka menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar yaitu pada setiap rombongan belajar/kelas terdapat 10-11 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat SD/MI dan 12-13 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat SMP/MTs. Hal ini berbeda dengan kondisi di daerah perkotaan, dimana setiap kelas memiliki peserta didik yang optimal. Namun kondisi Kabupaten Kulon Progo memiliki daerah pegunungan/perbukitan yang sulit dijangkau. Disana masih terdapat sedikit siswa, karena pertumbuhan penduduk yang kecil dan di sisi lain minat masyarakat untuk bersekolah cenderung ke daerah perkotaan, sehingga rasionya relatif kecil.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2.47

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,17	75,28	75,29	75,49	75,71
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	222,17	194,69	25,30	58,53	30,65
	Kematian Ibu	*Kasus*	*10*	*8*	*1*	*2*	*1*
	Kelahiran hidup	*Kali*	*4.501*	*4.901*	*3.728*	*3.419*	*3.272*
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10,00	10,71	9,61	10,24	10,39
	Kematian Bayi	*Kasus*	*45*	*44*	*38*	*35*	*34*
	Kelahiran hidup	*Kali*	*4.501*	*4.901*	*3.728*	*3.419*	*3272*

Sumber data : BPS DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat. BPS DIY menyatakan bahwa pada tahun 2020 usia harapan hidup Kulon Progo sebesar 75,24, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 75,17, di tahun 2022 meningkat menjadi 75,28 lalu meningkat menjadi 75,29 tahun di 2023 dan kembali naik di tahun 2024 menjadi 75,49 dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan kembali sebesar 75,71. Tingginya usia harapan hidup tersebut di atas tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain hal tersebut di atas juga didukung oleh stabilitas sosial politik dan keamanan.

Kematian ibu melahirkan pada tahun 2025 turun menjadi 1 orang, dengan seluruh kasus kematian ibu terjadi di fasilitas kesehatan lanjutan dan tidak terjadi di fasilitas kesehatan dasar. Jika dihitung dengan prevalensi maka angka kematian ibu adalah 30,65 per 100.000 kelahiran hidup (1 kematian dari 3. kelahiran hidup).

Kematian bayi pada tahun 2025 sebanyak 43 kasus naik 8 kasus dari tahun 2024. Jumlah kasus kematian bayi dalam 5 tahun terakhir masih fluktuatif. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun

2020 sebanyak 38 kasus, tahun 2021 sebanyak 45 kasus, tahun 2022 turun menjadi 44 kasus, kemudian pada tahun 2023 turun lagi menjadi 38 kasus, tahun 2024 sebanyak 35 kasus. Jika dihitung dengan prevalensi maka kasus kematian bayi mencapai 10.24 per 1.000 kelahiran hidup (35 kematian dari 3.419 kelahiran hidup).

Pada tahun 2025 dilakukan penyempurnaan aplikasi yaitu aplikasi yang dapat menyediakan informasi keadaan ibu hamil mulai dari tingkat kesehatan sampai lokasi tempat tinggal ibu hamil dapat diakses oleh tenaga kesehatan dan pejabat yang berwenang. Aplikasi ini mendapatkan penghargaan dari Badan Informasi Geospasial atas pemanfaatan aplikasi berbasis GPS untuk membantu meningkatkan pelayanan pada ibu hamil. Untuk menekan angka kematian ibu, selain dengan meningkatkan kapasitas dan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, akan dilaksanakan peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Ibu hamil harus diberikan informasi tentang kesehatan kehamilan, dan harus ada peningkatan kesadaran ibu hamil untuk selalu memonitor sendiri kesehatan dirinya maupun kandungan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu provinsi dengan status derajat kesehatan dengan ranking yang tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang rendah serta usia harapan hidup yang tinggi. Dengan tingginya jumlah lanjut usia, bisa menjadi masalah kesehatan lain apabila para lanjut usia (lansia) tidak dalam kondisi sehat pada masa tuanya. Dengan adanya perbedaan pengertian sakit antara stakeholder kesehatan dan masyarakat, dimana masyarakat baru menganggap “sakit” apabila sudah terganggu aktivitas fisiknya dan baru merasa perlu untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan. Hal ini akan menyebabkan upaya penanganan penyakit tidak menular terlambat. Penyakit tidak menular yang merupakan penyakit kronis dan membutuhkan masa waktu yang panjang sampai dengan munculnya gejala. Penyakit ini juga identik dengan “mahal”, karena untuk penentuan diagnosis memerlukan peralatan medis yang lebih canggih dan pengobatannya memerlukan waktu yang lama. Meskipun penyakit tidak menular merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui perubahan perilaku dan gaya hidup, namun hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh masyarakat modern sekarang ini. Karenanya diperlukan upaya keras stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mereka mau melakukan deteksi dini. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat diperlukan inovasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun strategi yang efektif dengan penyusunan kebijakan yang tepat untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak terdapat desa indigenous malaria. Indikator daerah tereliminasi yaitu daerah yang tidak ditemukan lagi desa dengan kasus malaria yang lebih dari 1‰ penduduk dan tidak ditemukan kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan surveilans yang baik.

Kematian ibu dan bayi masih cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 kasus kematian meningkat menjadi 10 kasus lalu pada tahun 2022 menurun menjadi 8 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 1 kasus, tahun 2024 2 kasus dan tahun 2025 ada kasus 1. Kematian bayi terdapat 45 kasus pada tahun 2021, turun 1 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kematian bayi menurun menjadi 36 kasus dan kembali menurun menjadi 35 kasus di tahun 2024 dan tahun 2025 ada 25 kasus. Berdasar kasus AKI dan AKB yang fluktuatif, maka kematian ibu dan bayi harus terus diupayakan untuk penurunannya.

Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2025, dari 21 Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi, seluruh puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi paripurna. Namun secara umum masih diperlukan perbaikan baik dari sisi fisik maupun dari kualitas pelayanan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah pada masyarakat. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, terdapat 10 klinik swasta sudah terakreditasi paripurna dan 6 klinik yang sedang dalam tahap persiapan survei akreditasi. Terdapat juga 39 tempat praktik mandiri dokter/ dokter gigi (TPMDG) dengan status 26 sudah pada tahap persiapan survei dan sisanya ditargetkan pada bulan Desember 2024 sudah terakreditasi secara keseluruhan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, kapasitas rawat inap untuk Kelas utama (VIP) sebanyak 13 tempat tidur, Kelas 1 sebanyak 29 tempat tidur, Kelas 2 sebanyak 28 tempat tidur, dan Kelas 3 sebanyak 83 tempat tidur. Untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit dengan standar Internasional RSUD Wates sudah selesai membangun gedung Medik Terpadu 4 lantai, Gedung Rawat Inap 4 lantai baru beserta fasilitasnya.

Selain RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki RSUD Nyi Ageng Serang. Sesuai konsep awal pendirian RSUD Nyi Ageng Serang, RSUD Nyi Ageng Serang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan kualitas pelayanan, sehingga didesain menjadi Rumah Sakit tanpa kelas. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang lebih mengutamakan privacy dalam pelayanan, maka dibangunlah ruang perawatan (bangsal) dewasa dengan beberapa tingkatan kelas perawatan.

Tabel 2.48

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023-2025

No.	Uraian Indikator	Satuan	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah balita yang ditimbang	Balita	21.868	19.178	21.450	20.737	19.917	18.375
2	Jumlah balita stunting	Balita	2.759	1.828	5.003	2.152	3.226	2.058
3	Jumlah ibu hamil dengan anemia	Orang	799	535	797	410	395	385
4	Jumlah ibu hamil	Orang	5.333	3.984	3.981	3.585	3.464	3.160
5	Jumlah bayi dengan BBLR	Bayi	397	308	198	267	180	249
6	Jumlah bayi	Bayi	4.960	3.844	3.944	3.990	3.408	3.273
7	Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif	Bayi	3.844	3.320	3.156	3.626	3.215	2.670
8	Jumlah balita kurus	Balita	1.150	1.545	1.502	1.048	961	871
9	Jumlah desa siaga yang sudah aktif (mandiri)	Desa	46	66	35	66	40	66
10	Jumlah desa	Desa	88	88	88	88	88	88
11	Jumlah kecamatan sehat	Kec.	12	12	12	12	12	12
12	Jumlah desa STBM semua pilar	desa	68	64	88	88	88	88

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan status gizi masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah balita stunting. Pada tahun 2025, terdapat perubahan definisi operasional balita bawah garis merah yang awalnya hanya balita dengan berat sangat kurang menjadi berat badan kurang berdasarkan berat badan/umur. Hal ini mengakibatkan balita bawah garis merah meningkat dan mencapai sekitar 10% dari balita yang ditimbang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting dengan intervensi gizi spesifik langsung kepada balita stunting, optimalisasi posyandu dan PAUD, peningkatan cakupan air bersih, penyediaan sanitasi layak, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tersebut diberikan kepada:

(1). Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui,

(2). anak usia 0-23 bulan,

(3). anak usia 24-59 bulan,

(4). remaja putri,

(5). calon pengantin, dan

(6). keluarga dan masyarakat.

Upaya menurunkan jumlah ibu hamil dengan anemia dan meningkatkan capaian bayi dengan ASI eksklusif perlu ditingkatkan pemantauan minum tablet Fe (zat besi) bagi ibu hamil dan menemukan inovasi untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif bagi bayi.

Pada tahun 2025 kalurahan siaga aktif mandiri mengalami penurunan hingga mencapai 66 kalurahan. Beberapa desa belum termasuk dalam kategori desa siaga aktif, oleh karena keberadaan forum desa siaga yang kurang aktif serta keberadaan data-data pendukung belum terdokumentasi dengan baik, sehingga pada masa yang akan datang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi. Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo sudah termasuk dalam kategori Kecamatan Sehat. Jumlah kalurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 88 kalurahan (semua kalurahan). Tingkat capaian kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.49

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2023-2025

No.	Uraian Indikator	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) tertangani <24 jam	15	23	17	27	21	21
2	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)	15	23	15	27	21	21
3	Jumlah bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	4049	3991	100	98.35	95	98.1
4	Jumlah bayi	5.100	3.944	4.073	4.006	3408	3351
5	Jumlah Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI)	88	88	88	88	88	88
6	Jumlah Desa	88	88	88p	88	88	88

No.	Uraian Indikator	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Jumlah penderita Tuberkulosis yang diobati sembuh dan lengkap	299	256	245	159	277	277
8	Jumlah penderita Tuberculosis	590	286	321	349	867	377
9	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	4.113	5.119	5.261	5.671	5.690	5.966
10	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV	16.901	5.119	5.261	6.008	5.690	5.690
11	Jumlah Desa tidak memiliki kasus indigenous malaria	88	88	88	88	88	88
12	Jumlah kematian penderita DBD	1	0	0	0	0	0
13	Jumlah penderita DBD	155	76	263	1.431	371	1844
14	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.492	10.447	10.447	12.946	12.946	13.373
15	Jumlah penderita hipertensi	29.237	31.658	29.366	31.041	30.635	31.030
16	Jumlah desa/kelurahan mempunyai posbindu	88	88	88	88	88	88
17	Jumlah penderita ODGJ berat dilayani sesuai standar	1.441	1.410	1.411	1.497	1.465	1.455
18	Jumlah penderita ODGJ berat	1.555	1.562	1.555	1.516	1.465	1.455

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah kasus KLB tertinggi pada tahun 2025 terjadi akibat Keracunan Makanan di wilayah Wates (Puskesmas Wates) pada bulan Juli sebanyak 552 kasus, sedangkan kejadian dengan jumlah kasus cukup tinggi lainnya adalah Keracunan Makanan di Sogan pada bulan Agustus sebanyak 79 kasus, Keracunan Makanan di Margosari pada bulan Maret sebanyak 43 kasus, Keracunan Makanan di SD Muhammadiyah Wates pada bulan Januari sebanyak 31 kasus dan kasus Chikungunya di Bendungan pada bulan Maret sebanyak 43 kasus. Berikut KLB yang terjadi pada tahun 2020-2025.

Tabel 2.50

Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Waktu, Jenis, Lokasi Kejadian dan Jumlah Kasus Tahun 2020-2025

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
			Tahun 2020		
1	Januari	Suspek difteri	Kokap 2	Hargowilis	1
2	November	Keracunan Makanan	Sentolo 1	Sukoreno	7
3	November	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	5

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
4	Desember	Keracunan Makanan	Temon 2	Karangwuluh	15
			Tahun 2021		
1	Februari	Keracunan Makanan	Temon I	Kulur	10
2	Maret	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	7
3	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Jangkaran	2
4	Desember	Keracunan Makanan	Lendah II	Gulurejo	2
5	Desember	Keracunan Makanan	Temon II	Sindutan (Temon II)	6
6	Desember	Chikungunya (suspect)	Temon I	Temon Wetan	46
7	Desember	Chikungunya	Sentolo I	Sentolo	33
8	Desember	Keracunan Makanan	Sentolo I	Sentolo	3
			Tahun 2022		
1	Januari	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	2
2	April	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	45
3	Mei	Malaria	Samigaluh II	Gerbosari dan Ngargosari	56
4	Juli	Keracunan Makanan	Galur II	Kranggan	28
5	Oktober	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	81
6	Oktober	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	1
7	November	Malaria	Kokap I	Kalirejo	2
			Tahun 2023		
1	Januari	Malaria	Samigaluh II	Pagerharjo	1
2	Februari	Keracunan makanan	Pengasih I	Sidomulyo	34
3	Februari	Malaria	Kokap II	Hargotirto	2
4	Maret	Muntaber/ diare	Lendah I	Jatirejo	11
5	Maret	Keracunan makanan	Samigaluh I	Sidoharjo	6
6	April	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	4
7	Mei	Keracunan makanan	Sentolo I	Sukoreno	54
8	Juni	Diare	Sentolo II	Tuksono	40
9	Juli	Leptospirosis	Nanggulan, Girimulyo I	Pendoworejo, Giripurwo, Tanjungharjo, Donomulyo, Wijimulyo, Jatisarono, Kembang	26
10	Juli	Diare	Wates	Triharjo	23
11	Juli	Pertusis	Wates	Bendungan	1
12	September	Keracunan makanan	Wates	Terbah	49
13	Oktober	Pertusis	Girimulyo I	Pendoworejo	4
14	Oktober	Keracunan makanan	Kokap II	Hargotirto	3
15	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Ngargosari	23
15	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Jatimulyo	
17	November	Keracunan makanan	Lendah II	Jatimulyo	
18	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	76
19	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	5
20	November	Keracunan makanan	Sentolo I	Kaliagung	7
21	Desember	Keracunan makanan	Nanggulan	Wijimulyo	62

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
22	Desember	Keracunan makanan	Kokap I	Hargorejo	16
23	Desember	Pertusis	Pengasih I	Sendangsari	6
			Tahun 2024		
1	Februari	Pertusis	Wates	Triharjo	5
2	Februari	Keracunan Makanan	Wates	SDN 2 Wates	34
3	Februari	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	3
4	Maret	Keracunan Makanan	Wates	Giripeni	116
5	April	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
6	April	Keracunan Makanan	Lendah II	Ngentakrejo	41
7	April	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	12
8	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Puskesmas	20
9	Mei	Keracunan Makanan	Wates	Triharjo	2
10	Juli	Keracunan Makanan	Samigaluh I	Ngargosari	24
11	Agustus	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	3
12	Agustus	Parotitis	Temon II	Jangkaran	196
13	Agustus	Keracunan Makanan	Wates	Triharjo	26
14	September	Keracunan Makanan	Kalibawang	Banjarharjo	50
15	September	Varicella	Wates	SDN Karangwuni	22
16	September	Parotitis	Nanggulan	SDN Jatisarono	24
17	Oktober	Keracunan Makanan	Sentolo II	Tuksono	4
18	Oktober	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	4
19	Oktober	Varicella	Nanggulan	SDN Lengkong	6
20	Oktober	Parotitis	Samigaluh I	SDN Samigaluh	28
21	November	Keracunan Makanan	Galur I	SD Muh Wonopeti 2	10
22	November	Parotitis	Nanggulan	SMP N 2 Nanggulan	9
23	November	Keracunan Makanan	Panjatan I	Gotakan	3
24	November	Keracunan Makanan	Sentolo I	Kaliagung	3
25	November	Parotitis	Kokap I	SMP N 2 Kokap	63
26	November	Parotitis	Temon I	Kulur	13
27	Desember	Varicella	Sentolo I	TK Bantar i	10
			Tahun 2025		
1	Januari	Keracunan Makanan	Puskesmas Wates	SD Muhammadiyah Wates	31
2	Maret	Chikungunya	Puskesmas Wates	Bendungan	43
3	Maret	Keracunan Makanan	Puskesmas Pengasih II	Maargosari	43
4	Maret	Pertusis	Puskesmas Lendah II	Gulurepjo	1
5	April	Chikungunya	Puskesmas Wates	Bendungan	13
6	April	Keracunan Makanan	Puskesmas Girimulyo II	Jatimulyo	4
7	Mei	Keracunan Makanan	Puskesmas Nanggulan	Wijimulyo	18
8	Juni	Keracunan Makanan	Puskesmas Wates	Wates	12
9	Juni	Keracunan Makanan	Puskesmas Pengasih II	Karangsari	19
10	Juni	Scabies	Puskesmas Panjatan II	Bojong	11

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
11	Juli	Keracunan Makanan	Puskesmas Wates	Wates	552
12	Agustus	Keracunan Makanan	Puskesmas Samigaluh I	Ngargosari	30
13	Agustus	Keracunan Makanan	Puskesmas Sentolo I	Sentolo	11
14	Agustus	Keracunan Makanan	Puskesmas Wates	Sogan	79
15	Agustus	Pertusis	Puskesmas Panjatan I	Gotakan	2
16	September	Chikungunya	Puskesmas Galur I	Karangsewu	9
17	September	Keracunan Makanan	Puskesmus Panjatan II	Bojong	2
18	September	Pertusis	Puskesmas Nanggulan	Wijimulyo	2
19	November	Keracuanan Makanan	Puskesmas Nanggulan	Banyuroto	2

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar KLB adalah keracunan makanan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan peran masyarakat melalui pengenalan makanan berisiko baik dari sisi jenis makanan, sumber makanan, cara pengolahan dan penyajian. Untuk mempermudah pemahaman maka perlu diupayakan pemahaman cara penyediaan dan konsumsi makanan yang baik meliputi bagaimana mendeteksi makanan yang baik dan aman, cara pengolahan makanan yang higienis dan aman, cara distribusi, cara penyimpanan, penyajian sampai cara konsumsi yang aman. Sanitasi tempat penyimpanan, pengolahan dan penyajian maupun konsumsi juga memegang peran yang sangat penting untuk antisipasi yang akan datang.

Di sisi lain adanya ancaman KLB penyakit menular baru yang kemungkinan berasal dari luar wilayah terlebih dengan adanya kemajuan wilayah dengan operasionalnya Bandara Internasional Yogyakarta sangat berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan kegawatdaruratan Kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang perlu diwaspadai seperti: EBOLA, Mers-Cov, SARS, Nipah, Hanta virus. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mengatasi KLB melakukan deteksi dini dan respon cepat untuk pencegahan KLB maupun perluasan KLB serta melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan.

Tabel 2.51

Data Prevalensi dan Kasus Penyakit Tahun 2021- 2025

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	3,613	13,759	2,241	11.523	12.118
2	Angka kasus malaria	Kasus	16	59	10	8	6
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	442.874	443.591	446.192	444.994	448.285
4	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0,00248	0,0065	0,0053	0.0064	0,0073
5	Jumlah pasien HIV/AIDS	Kasus	11	28	54	49	35
6	Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue	Kasus	213	231	76	1.431	1.844

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
7	Jumlah Penderita Diare	Kasus	2028	3.618	4.851	3.676	7.491
8	Jumlah Penderita TB	Kasus	205	270	282	5.549	382
9	Jumlah Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut	Kasus	12.354	1.190	26.308	59.581	97.919

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, capaian indikator outcome bidang kesehatan menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada masing-masing indikator. Angka kejadian malaria per 100.000 penduduk mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,613, meningkat pada tahun 2022 menjadi 13,759, kemudian menurun menjadi 2,241 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan 2025 kembali meningkat menjadi 11,523 dan 12,118 per 100.000 penduduk.

Jumlah kasus malaria menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 16 kasus pada tahun 2021 menjadi 6 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pengendalian malaria yang cukup efektif meskipun angka kejadian masih berfluktuasi. Prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 prevalensi tercatat sebesar 0,00248 persen dan meningkat menjadi 0,0073 persen pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pasien HIV/AIDS juga mengalami peningkatan dari 11 kasus pada tahun 2021 menjadi 35 kasus pada tahun 2025, meskipun sempat mencapai puncak sebanyak 54 kasus pada tahun 2023. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah menurun dari 231 kasus pada tahun 2022 menjadi 76 kasus pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat signifikan menjadi 1.431 kasus pada tahun 2024 dan 1.844 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Jumlah penderita diare menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode pengamatan. Dari 2.028 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 7.491 kasus pada tahun 2025 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan cakupan pelaporan kasus. Jumlah penderita tuberkulosis (TB) juga mengalami peningkatan secara bertahap, dari 205 kasus pada tahun 2021 menjadi 382 kasus pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kasus dapat mencerminkan semakin baiknya upaya penemuan kasus (case finding) dan pelacakan penderita di masyarakat.

Sementara itu, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menunjukkan tren meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Setelah mencapai 12.354 kasus pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 26.308 kasus pada tahun 2023, 59.581 kasus pada tahun 2024, dan 97.919 kasus pada tahun 2025. Peningkatan ini perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pernapasan di masyarakat. Secara umum, capaian indikator outcome bidang kesehatan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan keberhasilan pada penurunan kasus malaria, namun masih terdapat tantangan pada pengendalian HIV/AIDS, DBD, diare, TB, dan ISPA yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir

sehingga memerlukan penguatan program promotif, preventif, kuratif, dan surveilans kesehatan secara berkelanjutan.

Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi permasalahan stunting, menurut WHO stunting menjadi permasalahan kesehatan jika prevalensinya 20 persen atau lebih. Stunting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dengan Z-score < -2 SD (pendek dan sangat pendek) dan target nasional balita stunting < 20%. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan dan berlangsung lama. Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan resiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa. Prevalensi stunting di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020-2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 s.d 2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 11,80% pada tahun 2020 menjadi 9,43% pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2025 terjadi kenaikan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

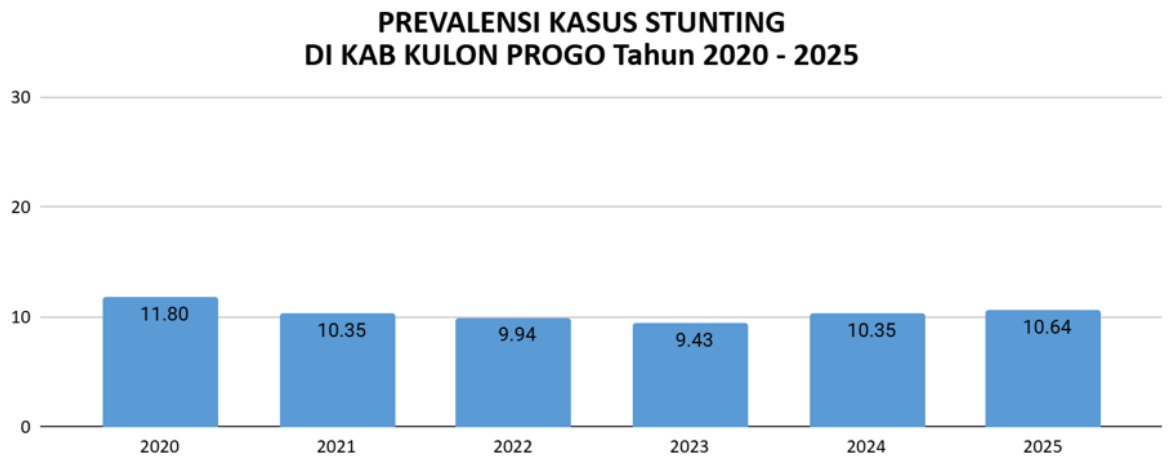

Gambar 2.27

Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2025

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting yaitu:

a) Pelaksanaan *Community Feeding Center* (CFC) di Puskesmas Kalibawang dan Panjatan II;
b) Pelaksanaan *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) di Puskesmas Galur II;
c) Sosialisasi dan Konseling PMBA (Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi kader, ibu hamil dan keluarga baduta;
d) Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis);
e) Pemberian Makanan Tambahan Balita Wasting;
f) Pendampingan balita gizi buruk oleh kader dan petugas;
g) Kunjungan rumah pada ibu hamil, bayi dan balita resiko tinggi (BBLR/PBLR);
h) Konseling laktasi;
i) Pelaksanaan ANC (*Antenatal Care*) Terpadu;
j) Pelaksanaan kelas ibu hamil;
k) Pemberian Vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas;
l) Pemberian obat cacing pada balita;
m) Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil;

n) Eliminasi malaria;
o) Pendampingan balita diare minum Zinc;
p) Dusun Kabar (Kawasan Bebas Asap Rokok);
q) KTR (Kawasan Tanpa Rokok);
r) Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Deklarasi STBM;
s) Pemeriksaan kualitas air bersih;
t) Kesehatan reproduksi remaja;
u) Konseling catin (calon pengantin);
v) Penyegaran kader dalam pemantauan pertumbuhan balita;
w) Pendampingan petugas saat PSG di posyandu;
x) Dukungan dan kerja sama lintas program dan lintas sektor.

Peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar, khusus maupun rujukan, kesiapsiagaan bencana, pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan laboratorium, serta meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa indikator dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.52

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No.	Uraian Indikator	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (RS. Puskesmas. Klinik Pratama)	38	38	43	43	43	43
2	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS. Puskesmas. Klinik Pratama)	38	38	43	43	43	43
3	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer	21	21	21	21	21	21
4	Jumlah puskesmas	21	21	21	21	21	21
5	Jumlah Puskesmas yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat di atas 81.26 (Sangat Baik)	21	21	21	21	21	21
6	Jumlah Puskesmas	21	21	21	21	21	21

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dan pengawasan Obat Makanan dan Bahan Adiktif (OMKABA) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut ini data sumber daya kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.53

Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan puskesmas	%	175	175	175	175	175
	Jumlah puskesmas	*Unit*	*21*	*21*	21	*21*	*21*
	Jumlah kecamatan	*kecamatan*	*12*	*12*	12	*12*	*12*
2	Cakupan puskesmas pembantu	%	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
	Jumlah puskesmas pembantu	*Unit*	63	63	63	63	63
	Jumlah kalurahan/ kelurahan	*Kalurahan/ kelurahan*	88	88	88	88	88
3	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per satuan balita	40,82	38,65	45,17	44,06	44,06
	Jumlah Posyandu	*Unit*	960	959	957	957	957
	Jumlah Balita	*Jiwa*	23.514	24.808	21.182	21.717	21.717
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,0225	0,0225	0,0224	0,0231	0,0231
	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	*Unit*	100	100	100	103	103
	Jumlah Penduduk	*Jiwa*	442.874	443.591	446.192	444.994	444.994
5	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,0203	0,00202	0,00201	0,00202	0,00202
	Jumlah rumah sakit	*Unit*	9	9	9	9	9
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,030	0,028	0,057	0,062	0,062
	Jumlah dokter	*Jiwa*	134	127	254	280	280
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per satuan penduduk	2,190	2,191	1,205	2,910	2,910
	Jumlah tenaga medis	*Jiwa*	970	972	538	1.295	1.295

Sumber data: SIPD Ewalidata dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025 *diolah.*

Perkembangan sumber daya kesehatan di Kabupaten Kulon Progo selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada aspek sarana pelayanan kesehatan dasar, dengan beberapa peningkatan pada ketersediaan tenaga kesehatan. Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada indikator cakupan puskesmas, Kabupaten Kulon Progo memiliki 21 unit puskesmas yang melayani 12 kecamatan selama tahun 2021–2025. Dengan kondisi tersebut, cakupan puskesmas mencapai 175%, yang menunjukkan bahwa jumlah puskesmas telah mencukupi bahkan melebihi jumlah kecamatan yang ada sehingga akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat dapat terjangkau secara merata.

Untuk cakupan puskesmas pembantu (pustu), jumlah pustu tercatat sebanyak 63 unit yang tersebar pada 88 kalurahan/kelurahan. Capaian cakupan pustu selama tahun 2021–2025 sebesar 71,6%. Kondisi ini menunjukkan dukungan pelayanan kesehatan dasar di tingkat wilayah masih cukup baik dalam membantu pelayanan puskesmas induk. Pada indikator rasio Posyandu per satuan balita, terjadi fluktuasi selama periode tersebut. Tahun 2021 rasio tercatat sebesar 40,82 dan menurun menjadi 38,65

pada tahun 2022. Selanjutnya meningkat menjadi 45,17 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 44,06 pada tahun 2024 dan 2025. Jumlah Posyandu relatif stabil, yaitu sekitar 957–960 unit, sementara jumlah balita mengalami perubahan setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu masih terjaga dengan baik untuk mendukung pemantauan kesehatan ibu dan anak.

Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk menunjukkan kecenderungan stabil. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio sebesar 0,0225, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,0231 pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dari 100 unit menjadi 103 unit. Dengan jumlah penduduk sekitar 444 ribu jiwa, kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Pada indikator rasio rumah sakit per satuan penduduk, jumlah rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo tetap sebanyak 9 unit selama tahun 2021–2025. Rasio rumah sakit terhadap penduduk relatif stabil pada kisaran 0,00201–0,00203. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Kulon Progo masih terjaga.

Ketersediaan tenaga dokter mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 jumlah dokter tercatat sebanyak 134 orang, menurun menjadi 127 orang pada tahun 2022, kemudian meningkat tajam menjadi 254 orang pada tahun 2023 dan 280 orang pada tahun 2024–2025. Sejalan dengan itu, rasio dokter per satuan penduduk meningkat dari 0,030 pada tahun 2021 menjadi 0,062 pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan sumber daya manusia kesehatan khususnya tenaga dokter untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, rasio tenaga medis per satuan penduduk juga mengalami peningkatan. Jumlah tenaga medis pada tahun 2021 sebanyak 970 orang dan meningkat menjadi 1.295 orang pada tahun 2024–2025. Rasio tenaga medis meningkat dari 2,190 pada tahun 2021 menjadi 2,910 pada tahun 2024–2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan melalui penambahan dan pemenuhan tenaga kesehatan.

Secara umum, kondisi sumber daya kesehatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada peningkatan tenaga kesehatan dan stabilitas sarana pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 331/A/2015 tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Bupati. Nomor 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten. Ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai Jalan Lokal Primer.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Kulon Progo adalah 636,025 km, sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 672,620 km. Pada tahun 2024 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten, dimana dalam SK tersebut panjang dan jumlah ruas jalan Kabupaten berkurang dari yang semula 1.308,645 km yang terdiri dari Lokal Primer I dan Lokal Primer II menjadi 807.758 km tersebar di semua Kapanewon. Dengan adanya perubahan SK tersebut menjadikan banyak ruas jalan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten beralih menjadi kewenangan Kalurahan atau Kelurahan dan menjadi jalan Lingkungan. Realisasi penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 - 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan serta Keputusan Bupati Nomor 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten adalah sebagai berikut.kondisi jalan

Tabel 2.54

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Status Jalan			Kondisi				Total
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tahun 2021	LK I	Km	300.012	152.022	101.178	82.813	636.025
			%	47,17	23,90	15,91	13,02	100
		LK II	Km	240.907	249.368	60.101	122.244	672.620
			%	35,82	37,07	8,94	18,17	100
		Total LK I dan LK II	Km	540.919	401.390	161.279	205.057	1.308.645
			%	41,33	30,67	12,32	15,67	100
2	Tahun 2022	LK I	Km	302.642	150.331	100.235	82.818	636.025
			%	47,58	23,64	15,76	13,02	100
		LK II	Km	248.497	249.898	69.765	104.461	672.620
			%	36,94	37,15	10,37	15,53	100
		Total LK I dan LK II	Km	551.139	400.229	170.000	187.279	1.308.645
			%	42,12	30,58	12,99	14,31	100
3	Tahun 2023	LK I	Km	300.886	155.990	98.453	80.696	636.025
			%	47,31	24,53	15,48	12,69	100
		LK II	Km	256.315	247.291	67.378	101.636	672.620
			%	38,11	36,77	10,02	15,11	100
		Total LK I dan LK II	Km	557.201	403.281	165.831	182.332	1.308.645
			%	42,58	30,82	12,67	13,93	100
4	Tahun 2024	LK I	Km	305.986	157.590	96.053	76.396	636.025
			%	48,11	24,78	15,10	12,01	100
		LK II	Km	260.315	248.491	64.978	98.836	672.620
			%	38,70	36,94	9,66	14,69	99,99
		Total LK I dan LK II	Km	566.301	406.081	161.031	175.232	807.758
			%	43,27	31,03	12,31	13,39	100
5	Tahun 2025	Total LK I dan LK II	Km	419.241	137.135	57.022	194.360	807.758
			%	51,90	16,98	7,06	24,06	100

Sumber : SIPD Ewalidata dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2026 (*diolah*).

Pada tahun 2021, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I adalah 71,07 %, dan Lokal Primer II adalah 72,39%. Pada tahun 2022, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I naik dari 71,07 % menjadi 71,22 %, dan Lokal Primer II naik dari 72,39 % menjadi 74,09 %. Pada Tahun 2023, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,22% menjadi 71,82 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal primer II terjadi kenaikan kondisi mantab dari 74,09 % menjadi 74,88%. Pada tahun 2024, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,82 % menjadi 72,98 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal Primer II terjadi kenaikan kondisi mantab dari 74,88 menjadi 75,64 %. Pada tahun 2025, kondisi jalan kabupaten secara keseluruhan yaitu 68,88 %.

Peningkatan kualitas jalan periode 2021-2024 dalam kondisi mantab di Kabupaten Kulon Progo disebabkan beberapa faktor, antara lain : Efektifitas dari program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga DPUPKP sehingga dengan dukungan anggaran yang ada baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD dapat meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Kulon Progo. Melihat faktor-faktor tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ada laju peningkatan kualitas jalan kabupaten di Kulon Progo pada periode 2021-2024. Namun demikian, penurunan kondisi mantab tahun 2025 menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, upaya mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program penanganan jalan akan ditingkatkan, disertai dengan penguatan komitmen pendanaan dari semua sumber yang tersedia, guna mewujudkan infrastruktur jalan kabupaten yang mantab dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait pengembangan wilayah maka untuk rekonstruksi jalan dan pemeliharaan berkala jalan kabupaten berupaya meraih dana dari APBD DIY, Dana Keistimewaan dan APBN (Anggaran Dana Alokasi Khusus maupun Inpres Jalan Daerah). Selain Jalan Kabupaten, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 47.180 m dengan kondisi baik 34.761 m (73,68%) kondisi sedang 11.172 m (23,68%) dan kondisi Rusak Ringan 1.247 km (2,64%). Jalan Provinsi sepanjang 154.440 m kondisi baik 79.802 m (51,67%), kondisi sedang 35.773 m (23,16%) kondisi ringan 31.163 m (20,18 %) dan kondisi rusak berat 7.702 m (4,99 %). Kondisi jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat di Tabel berikut ini..

Tabel 2.55

Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	Km	%	Km	%	
1.	Nasional*	34.761	73,68	11.172	23,68	1.247	2,64	-	-	47.180
2.	Provinsi*	79.802	51,67	35.773	23,16	31.163	20,18	7.702	4,99	154.440

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025

**) Data sementara*

Kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan kualitas pada Tahun 2021. Terjadi penurunan kualitas Jalan Nasional kondisi mantap dari 100 persen pada Tahun 2020 menjadi 98,59 persen pada Tahun 2021. Untuk Jalan Provinsi kondisi mantap: dari 79,47 persen pada Tahun 2020 menjadi 70,31 persen pada Tahun 2021 dan turun lagi menjadi 68,04 persen pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,59 % pada tahun 2023.Pada

tahun 2024 status jalan Nasional dengan total 47.180 m kondisi baik sepanjang 34.761 m atau 73,68 persen, kondisi sedang 11.172 m atau 23,68%, kondisi rusak ringan sepanjang 1.247 m atau 2,64 % dan rusak berat tidak ada. Sedangkan kondisi jalan Provinsi dengan total panjang 154.440 m dengan kondisi baik 79.802 m atau 51,67 %, kondisi sedang sepanjang 35.773 m atau 23,16 %, kondisi Rusak Ringan sepanjang 31.163 m atau 20,18 % dan Rusak Berat sepanjang 7.702 m dengan prosentase 4,99 %.

Jumlah jembatan pada tahun 2025 sebanyak 241 buah, meliputi 7 buah jembatan nasional (dalam keadaan baik), 77 buah Jembatan Propinsi (49 buah keadaan baik, 20 buah keadaan rusak ringan dan 8 buah rusak berat) dan Jembatan kabupaten sebanyak 157 buah (19 buah dalam keadaan baik, 69 buah keadaan rusak ringan, 55 buah keadaan rusak sedang dan 14 buah keadaan rusak berat) Rincian kondisi jembatan secara detail berdasarkan status jembatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.56

Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Status Jembatan	Satuan	Kondisi				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak berat	Total Jembatan
1.	Nasional	unit	7	-	-	-	7
2.	Provinsi	unit	49	20	-	8	77
3.	Kabupaten	unit	19	69	55	14	157

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pengembangan akses jalan dan jembatan merupakan dukungan untuk pengembangan wilayah dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah. Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk terus ditingkatkan terutama untuk akses pada pusat, pusat pertumbuhan seperti di sekitar Bandara YIA, pada kawasan peruntukan industri, kawasan dengan potensi pariwisata, dan juga perlu untuk memperbaiki akses jalan di wilayah pedesaan maupun pegunungan. Berdasarkan data diatas kondisi status jembatan Nasional pada tahun 2025 dalam kondisi baik sebanyak 7 (tujuh). Sedangkan kondisi status jembatan Provinsi pada tahun 2025 Kondisi Baik 49 (empat puluh sembilan), Kondisi Rusak Ringan 20 (dua puluh) dan Kondisi Rusak Berat 8 (delapan) dan Kondisi status jembatan Kabupaten pada tahun 2025 dalam kondisi Baik 90 (sembilan puluh), Kondisi Rusak Ringan 58 (lima puluh delapan), Kondisi Rusak sedang 7 (tujuh) dan Kondisi Rusak Berat 2 (dua)

b. Sarana Irigasi

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Upaya tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Untuk mencapai irigasi yang baik diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan irigasi berupa saluran, bangunan utama, dan bangunan pelengkap merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem

golongan, menyusun rencana, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

Prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dari prasarana tersebut didalamnya termasuk bangunan irigasi. Secara garis besar jaringan irigasi mencakup 5 macam bangunan irigasi yaitu : (i) Bangunan pengambilan (intake), (ii) Bangunan pembawa (saluran), (iii) Bangunan bagi dan sadap, (iv) Bangunan pengaturan dan pengukuran debit, (v) Bangunan pelindung dan pelengkap.

Kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan pusat kurun waktu 2019-2025 penilaian prasarana fisiknya menggunakan perhitungan Indeks Kinerja Sistem irigasi pada aplikasi e-Paksi sebagian besar dalam kondisi rusak ringan dan rusak sedang dengan kondisi pada tahun 2025 yaitu 37,01% dalam kondisi Rusak Ringan dan 41,86% Rusak Sedang. Sedangkan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2025 sebanyak 63,84% dalam kondisi baik. Kondisi rusak berat pada tahun 2025 berada di angka 18,12% mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2021 dengan rata-rata sebesar 0,33 %. Kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan pemerintah provinsi kondisinya rusak sedang tertinggi pada tahun 2023 yaitu 6.900 meter. Dalam kurun tahun 2021-2025 hampir setiap tahunnya melaksanakan peningkatan jaringan irigasi, tertinggi pada tahun 2022 yaitu 7.470 meter dan tahun 2025 hanya 1.397 meter. Grafik kondisi masing masing saluran irigasi berdasar wilayah kewenangan dapat dicermati pada Gambar di bawah ini. Bila dibandingkan, nampak bahwa persentase kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawah provinsi dan pusat terutama keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan dan pengembangannya mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian di Kulon Progo. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan perlu diperhatikan setiap daerah irigasi berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing daerah irigasi sehingga fungsi dari saluran irigasi masih dapat dipergunakan.

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2026 (diolah).

Gambar 2.28

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025

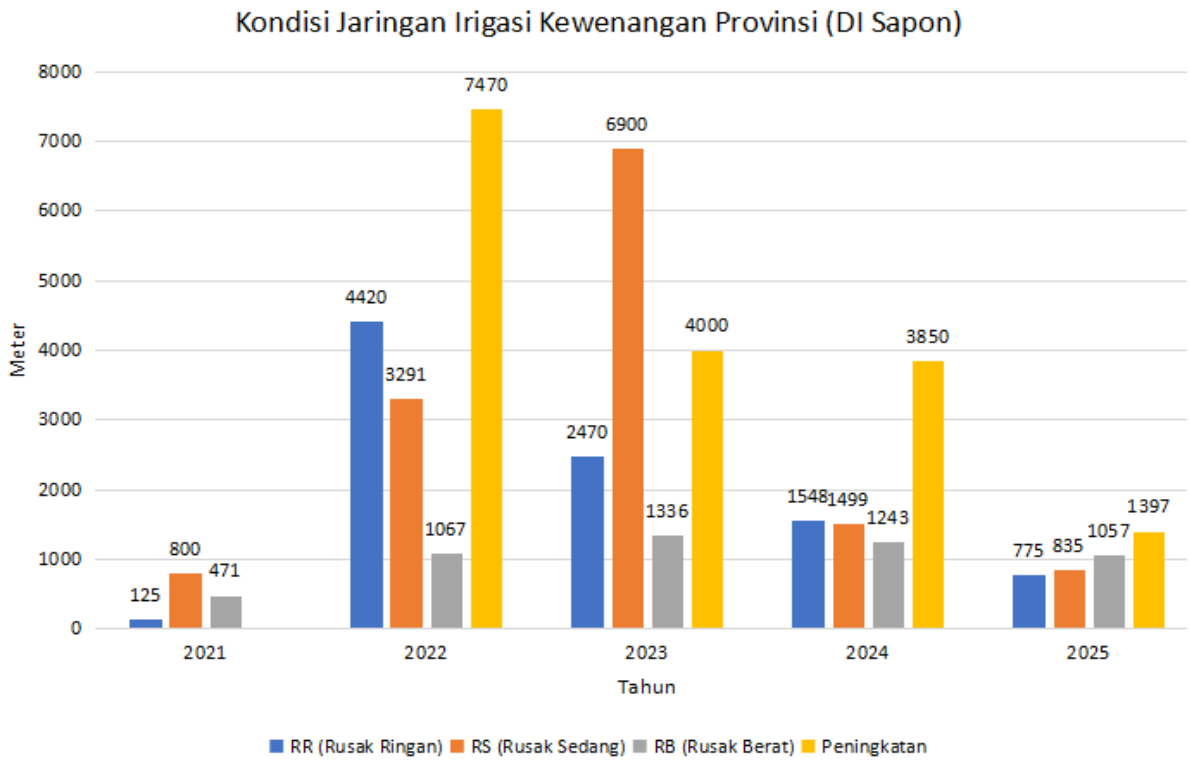

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, 2026 (diolah).

Gambar 2.29

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2021 – 2025

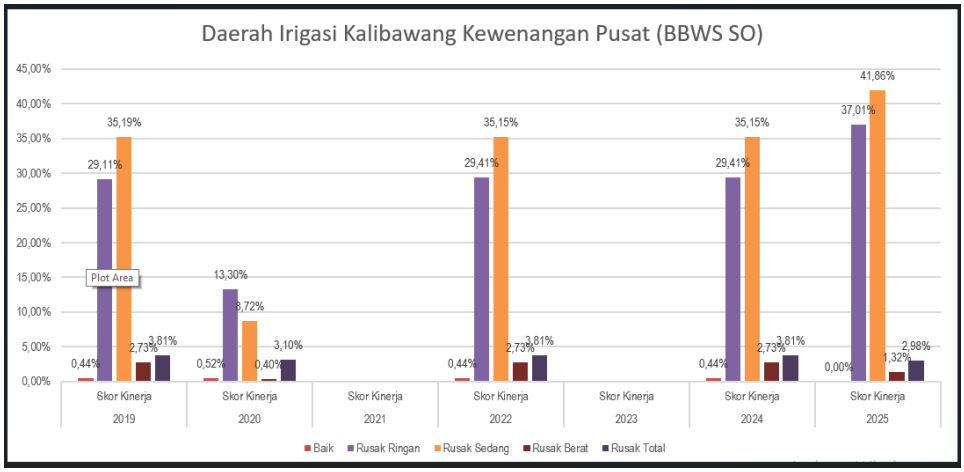

Sumber data: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2026 (diolah).

Gambar 2.30

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2019 – 2025

Pada pengelolaan irigasi, salah satu unsur penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu adalah operasi dan pemeliharaan (O & P) jaringan irigasi agar fungsi irigasi dapat berlangsung dengan baik. Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan O & P, diperlukan penunjang infrastruktur irigasi yang mencukupi. Namun demikian, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam hal infrastruktur irigasi antara lain:

1. Data jaringan irigasi pada saat ini kurang up to date dan belum mencakup seluruh wilayah daerah irigasi berdasar kewenangan.
2. Penyebaran penyimpanan data pada umumnya tidak tersimpan dalam satu kesatuan sehingga menyulitkan dalam akses dan updating.
3. Satuan ukuran data baik data kualitatif maupun data peta umumnya berbeda sehingga perlu upaya standarisasi atau pembakuan.
4. Ketersediaan SDM dan dana untuk pengelolaan irigasi yang masih terbatas.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka pengelolaan irigasi dapat menjadi kurang optimal. Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan di Kabupaten Kulon Progo masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Waduk Sermo tercatat sebanyak 21 embung yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo yang dimanfaatkan untuk air baku, irigasi dan konservasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.57

Data Embung di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Nama Embung	Lokasi	Kapasitas (m^3)	Sumber mata air (sungai, mata air, air hujan)	Sumber Pendanaan Pembangunan (APBN, APBD DIY, APBD KP)	Pemanfaatan (pengairan, konservasi, wisata)	Pemeliharaan/perawatan/ penanggungjawab (ada tenaga THL/Kalurahan/ warga)	Keterangan
1.	Embung Blubuk	Dusun Girinyono, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	18.655	Sungai	APBD DIY Th 2015	Konservasi, perikanan, irigasi, pariwisata an air baku	Kalurahan	
2.	Embung Bogor	Dusun Girinyono, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	6.000	Sungai	APBD KP Th 2015	Konservasi, Irigasi an air baku	THL	
3.	Embung Batur	Dusun Batur, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	8.900	Sungai	APBD DIY 2016	Konservasi, perikanan, irigasi, pariwisata an air baku	THL	
4.	Embung Kalibuko I	Kalurahan Kalirejo, Kap. Kokap	6.170	Sungai	APBD DIY Th 2015	Konservasi dan air baku	P3A	
5.	Embung Kayangan	Dusun Paingan, Kalurahan Sendangsari, Kap Pengasih	6.000	Sungai		Konservasi dan air baku	P3A	
6.	Embung Kedungromo	Kalurahan Giripurwo, Kap. Girimulyo	3.500	Sungai	APBN Th 2008	Konservasi	Kalurahan	
7.	Embung Penggung	Kalurahan Hargorejo, Kap. Kokap	4.000	Air Hujan	APBN Th 2013	Konservasi	Kalurahan	
8.	Embung Tangkisan I	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap	35.000	Air Hujan	APBN Th 2004	Konservasi	Kalurahan	
9.	Embung Tangkisan II	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap	7.500	Air Hujan	APBN Th 2004	Konservasi	Kalurahan	

No.	Nama Embung	Lokasi	Kapasitas (m^3)	Sumber mata air (sungai, mata air, air hujan)	Sumber Pendanaan Pembangunan (APBN, APBD DIY, APBD KP)	Pemanfaatan (pengairan, konservasi, wisata)	Pemeliharaan/perawatan/ penanggungjawab (ada tenaga THL/Kalurahan/ warga)	Keterangan
10.	Embung Plampang	Kalurahan Kalirejo, Kap. Kokap	1.500	Air Hujan	APBD DIY Th 2015	Konservasi	Kalurahan	
11.	Embung Cikli	Kalurahan Giripurwo, Kap. Girimulyo	3.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	P3A	bendung kali penggung
12.	Embung Sambeng	Dusun Anjir, Kalurahan Hargowilis, Kap. Kokap	12.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	P3A	
13.	Embung Bibis	Dusun Klepu, Kalurahan Hargowilis, Kap Kokap	40.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	BBWS SO	
14.	Embung Jurug	Kalurahan. Sidorejo, Kap. Lendah	9.000	Sungai	APBD KP Th 2009 ; 2016	Konservasi, Irigasi	P3A	
15.	Embung Samigaluh	Kap. Samigaluh	6.523	Sungai	APBD DIY Th 2011-2012	Konservasi, irigasi dan air baku	P3A	
16.	Embung Krapyak	Kalurahan Banjaroya, Kap. Kalibawang	35.400	Sungai	APBD KP Th 2017	Konservasi, irigasi, air baku dan pariwisata	THL	
17.	Embung Tonogoro	Kalurahan Banjaroyo, Kap. Kalibawang	10.000	Air Hujan	APBD KP Th 2013	Irigasi dan Wisata	Warga	
18.	Embung Kleco	Kec. Girimulyo	8.000	Sungai	APBD KP Th 2015-2016	Wisata	Kalurahan	
19.	Embung Gorolangu	Kalurahan Sidoharjo, Kap. Samigaluh	10.000	Sungai	APBD DIY Th 2018	Konservasi, Wisata	Kalurahan	
20.	Embung Talunombo	Kap. Pengasih	1.800	Air Hujan	APBD KP Th 2018	Pariwisata	THL	
21.	Embung Dlingseng	Ds. Banjaroya, Kap. Kalibawang	10.000	Sungai	APBD DIY Th 2020	Konservasi, irigasi dan air baku	THL	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Keberadaan embung tersebut, selain dalam jangka pendek dapat dijadikan sumber air baku baik untuk irigasi maupu air minum, pada jangka panjang dapat menunjang keberlangsungan potensi air tanah di kawasan sekitar embung dan bagian hilirnya. Selain itu, dengan berkurangnya laju limpasan permukaan (*run off*) air hujan, maka potensi erosi, banjir dan tanah longsor dapat diminimalisir. Secara ekonomi, embung juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata, bercocok tanam dan budidaya perikanan.

c. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dapat digunakan untuk mengetahui gambaran kinerja sektor irigasi di suatu daerah. Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara total seluruh panjang saluran irigasi di kabupaten yang terdiri baik kewenangan pusat, provinsi, kabupaten maupun kewenangan petani terhadap luasan daerah irigasi. Ada penambahan Nama Daerah Irigasi baru dan luasnya, tapi belum masuk di Permen, sudah diusulkan untuk perubahannya, untuk kewenangan Kabupaten ada penambahan panjang jaringan Irigasi Daerah Irigasi kecil sepanjang 212,5 m di Tahun 2024, sehingga menjadi 193.529 m dan panjang Jaringan keseluruhan menjadi 457.941 m dengan luas area 10.869,05 Ha.

Tabel 2.58

Panjang dan Luas Daerah Irigasi berdasar kewenangan Tahun 2025

No	Kewenangan Irigasi	Panjang saluran (m)	Luas area (Ha)
1	Pusat	73.749	7.168,00
2	Provinsi	65.654,00	1.922,05
3	Kabupaten	214,93	1.779,00
4	P3A	125.009,00	0
	Total	**479.305,00**	**10.869,05**

Sumber data : DPUPKP dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2026 diolah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas oncorannya di bawah 1.000 Ha (DI Kecil) dan sebagaimana diatur dalam Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tabel di atas merupakan kondisi daerah irigasi serta saluran yang melayani daerah irigasi. Berdasarkan aturan tersebut, secara luasan seluruh daerah irigasi terbagi habis dalam 3 kewenangan yang berbeda yaitu pusat, provinsi dan kabupaten sehingga secara kewenangan P3A tidak diklasifikasikan dalam aturan tersebut. Sedangkan terkait saluran irigasi, acuan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yang memberikan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier kepada P3A.

d. Sarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun, dengan sumber air dari Waduk Sermo, Clereng, Tuk Mudal, dan Sungai Progo. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta

industri. Jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM terus meningkat tiap tahunnya dari tahun 2021 mencapai 35.712 SR sampai tahun 2025 mencapai 47.707 SR. Gambar berikut menunjukkan tren peningkatan jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM.

Sumber data: PDAM Kabupaten Kulon Progo, 2026 (diolah)

Gambar 2.31

Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Binangun Tahun 2020-2025

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, masyarakat mengunakan berbagai sumber air. Sumber air baku tersebut antara lain bersumber dari : Sumur Gali, Mata Air, Waduk dan Sungai dengan kebutuhan air baku bervariasi sesuai karakteristik masyarakat yang digunakan dari sumber-sumber air tersebut. Berdasarkan jumlah KK yang mempunyai akses terhadap air minum maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.59

Pemanfaatan Sumber Air Baku Untuk Akses Air Bersih Masyarakat

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	**Perpipaan**					
1.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM	35.711	37.576	40.416	44.034	47.707
2.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan non PDAM	22.175	24.921	25.210	26.946	28.063
3.	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (liter/detik)	-	-	-	367,66	381,18
B	**Non Perpipaan Terlindungi**					
3.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Layak	84.297	74.870	84.914	82.323	79.685
4.	Jumlah KK dengan akses air minum terlindungi lainnya	19.486	17.307	n.a.	n.a.	n.a.
5.	Jumlah KK dengn akses air minum Isi Ulang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
C	**Non Perpipaan Tidak Terlindungi**					
6.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Tidak Terlindungi	n.a	n.a	5.429	3.178	2.556

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK				
		2021	2022	2023	2024	2025
7.	Jumlah KK dengan akses air minum ke lainnya:sungai, danau, saluran irigasi, dll	n.a	n.a	n.a	n.a.	n.a.
	Jumlah	**160.073**	**154.674**	**155.969**	**156.824**	**158.011**

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo; PDAM; Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2026 (*diolah*).

Masyarakat di wilayah selatan sebagian besar mendapatkan akses air bersih perpipaan dari PDAM dan sebagian kecil dari Pamsimas/Spamdes. Sedangkan untuk di wilayah utara sebagian besar dilayani oleh Pamsimas/Spamdes yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat. Salah satu kendala jaringan perpipaan PDAM belum dapat menjangkau daerah-daerah yang berada di wilayah utara adalah karena topografi wilayahnya yang merupakan dataran tinggi serta perbukitan yang menyebabkan biaya teknis dan operasional untuk pembangunan jaringan perpipaan menjadi cukup mahal. Sampai dengan saat ini, PDAM mengelola enam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu: 1) SPAM Clereng yang melayani sebagian besar Wates kota dan Temon, sebagian Kapanewon Panjatan dan Pengasih serta sebagian kecil Kapanewon Kokap; 2) SPAM Kalibawang yang melayani Kalurahan Banjaroyo dan Banjararum, Kapanewon Kalibawang dan Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan; 3) SPAM Lendah melayani seluruh Kapanewon Galur dan Lendah, sebagian besar Kapanewon Panjatan, sebagian Kapanewon Pengasih, Sentolo, Temon, Wates serta sebagian kecil Kapanewon Kokap dan Nanggulan; 4) SPAM Salamrejo melayani Kalurahan Salamrejo, Sentolo, Sukoreno dan Tuksono di Kapanewon Sentolo; 5) SPAM Sentolo melayani seluruh Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Girimulyo, Pengasih dan Sentolo; 6) SPAM Sermo melayani seluruh Kapanewon Kokap, sebagian besar Kapanewon Temon, sebagian Kapanewon Pengasih, Wates, Sentolo serta sebagian kecil Kapanewon Panjatan.

Akses perpipaan terdiri dari dua klasifikasi yaitu yang dilayani oleh PDAM dan yang dilayani oleh non PDAM meliputi jaringan perpipaan Pamsimas dan Spamdes yang dikelola oleh KPSPAMS/Pokmas/Pamaskarta. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM berasal dari Sungai Progo, Waduk Sermo serta mata air Clereng. Sedangkan sumber air baku yang dimanfaatkan oleh jaringan perpipaan Pamsimas dan Spamdes berasal dari mata air yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2025 jumlah rumah tangga yang mengakses air minum melalui jaringan perpipaan adalah sebesar 47,95% mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang sebesar 45,25%. Sementara itu untuk jaringan non perpipaan yaitu sebesar 50,43 % pada tahun 2025, menurun dari sebesar 52,49% di tahun 2024. Pada tahun 2025 menunjukkan adanya tren kenaikan akses perpipaan dari waktu ke waktu yang dapat diasumsikan bahwa derajat keamanan dan kelayakan air semakin membaik. Peningkatan akses perpipaan ini secara signifikan merupakan kontribusi dari Dinas PUPKP maupun PDAM Tirta Binangun. Akses air bersih melalui jaringan perpipaan terutama di wilayah perkotaan meningkat menjadi 30,19% pada tahun 2025 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 28,08%. Akses air bersih melalui perpipaan juga dilakukan oleh masyarakat melalui Kelompok Masyarakat. Pada tahun 2025, mengalami peningkatan menjadi 17,76% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 17,18%.

Sebagai tambahan, pada tahun 2025 cakupan akses air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 98,38 %. Daerah kapanewon Samigaluh masih terjadi kejadian

bencana kekeringan sehingga perlu diprioritaskan pengembangan akses layak dan berkelanjutan pada kawasan tersebut.

Tabel 2.60

Cakupan Akses Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kapanewon	Jumlah KK	Layanan Sarana Air Bersih			KK yang Memiliki Akses Air Minum Layak Dan Berkelanjutan	
			Non Perpipaan (KK)	Perpipaan (KK)			
				PDAM	Non PDAM	Jumlah	%
1	TEMON	10.488	6.268	1.548	2.578	10.394	99,10%
2	WATES	17.322	8.575	8.091	651	17.317	99,97%
3	PANJATAN	14.051	6.036	5.894	2.121	14.051	100,00%
4	GALUR	11.860	9.771	1.865	182	11.818	99,65%
5	LENDAH	14.678	10.565	3.882	216	14.663	99,90%
6	SENTOLO	17.350	8.826	6.277	2.226	17.329	99,88%
7	PENGASIH	18.642	8.691	8.990	873	18.554	99,53%
8	KOKAP	12.870	6.258	3.849	2.563	12.670	98,45%
9	GIRIMULYO	8.928	3.762	380	4.164	8.306	93,03%
10	NANGGULAN	10.981	4.978	3.165	2.693	10.836	98,68%
11	SAMIGALUH	10.046	1.859	129	6.988	8.976	89,35%
12	KALIBAWANG	10.795	4.096	3.637	2.808	10.541	97,65%
	JUMLAH	**158.011**	**79.685**	**47.707**	**28.063**	**155.455**	**98,38%**

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2026.

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta industri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan, mulai Tahun 2013 PDAM Tirta Binangun telah mengembangkan usahanya melalui produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Air-Ku”. Pada Tahun 2013, PDAM Tirta Binangun memulai dengan memproduksi AMDK kemasan gelas/cup ukuran 240 ml, kemudian mulai mengembangkan diversifikasi produk pada tahun 2015 dengan menambah produksi Air-Ku kemasan botol 600 ml. Selanjutnya pada tahun 2016 diproduksi Air-Ku kemasan galon 19 l, tahun 2018 menambah produksi Air-Ku kemasan gelas/cup 120 ml dan pada tahun 2019 mengeluarkan produk Air-Ku kemasan botol 330 ml. Tiap tahun produksi Air-Ku terus meningkat mengikuti permintaan pasar.

e. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, terutama yang berkaitan dengan pembuangan limbah dan kotoran manusia, serta penyediaan air bersih. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo kondisinya sudah cukup baik. Sanitasi layak di sini mengacu pada fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti penggunaan kloset leher angsa dan pengolahan tinja yang aman. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan akses sanitasi melalui berbagai program, seperti jambanisasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat. Penyediaan air bersih dan penanganan air limbah yang merupakan kewenangan Dinas PUPKP Berikut kondisi akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo.

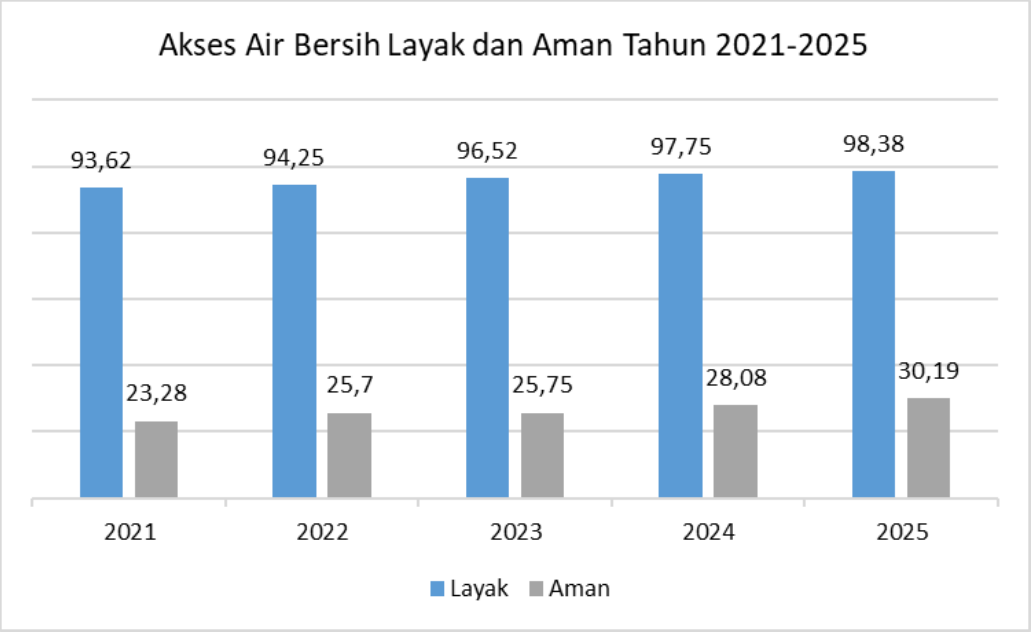

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2026

Gambar 2.32

Akses Air Bersih Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Air bersih layak adalah air yang bisa diakses oleh masyarakat jika sumber air utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan, namun belum tentu aman untuk dikonsumsi. Air bersih aman adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, bebas dari kontaminan dan aman untuk diminum. Penanganan Air limbah yang aman mengacu pada air limbah yang telah diolah sehingga tidak lagi mengandung zat berbahaya atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sementara itu, air limbah yang layak mengacu pada fasilitas dan sistem pembuangan limbah yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, seperti penggunaan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).

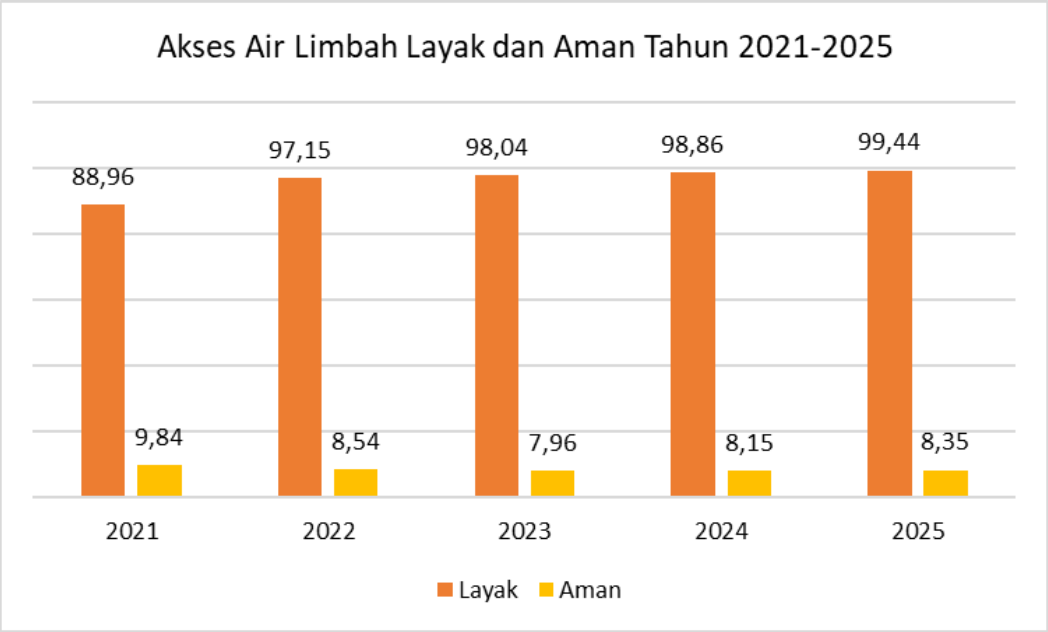

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2026

Gambar 2.33

Akses Air Limbah Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo yang ditunjukkan dengan indikator Akses Air Bersih Layak dan Air Bersih Aman dari tahun 2021 sampai 2025 terus menunjukkan peningkatan dari 93,62% pada tahun 2021 meningkat menjadi 98,38% pada tahun 2025 untuk Akses Air Bersih Layak, sementara itu Akses Air Bersih Aman meningkat dari 23,28% pada tahun 2021 menjadi 30,19% pada tahun 2025. Untuk Akses Air Limbah Layak juga meningkat dari kondisi tahun 2021 88,96% meningkat menjadi 99,44% pada tahun 2025. Sementara untuk Akses Air Limbah Aman sempat menurun namun sekarang mengalami tren peningkatan.

f. Kondisi Gedung Kantor

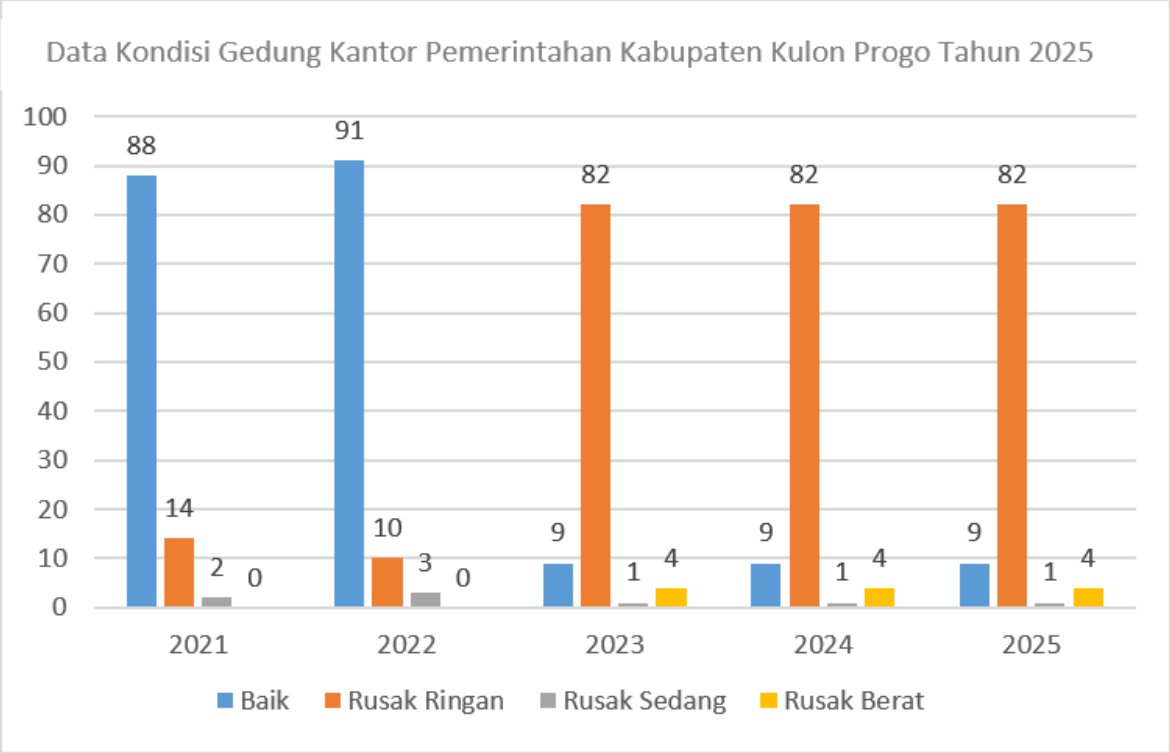

Sumber data : DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2026 (diolah)

Gambar 2.34

Kondisi Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Data kondisi gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 dalam keadaan baik sebanyak 88, rusak ringan 14, rusak sedang 2 dan rusak berat 0. Ditahun 2022 dalam keadaan baik ada 90, keadaan rusak ringan 10, rusak sedang 3, dan rusak berat 0. Pada tahun 2023 kondisi baik berjumlah 9, rusak ringan 82, rusak sedang 1 dan rusak berat 4. Pada tahun 2024 kondisi baik berjumlah 9, rusak ringan 82, rusak sedang 1 dan rusak berat 4. Sedangkan di tahun 2025 dalam keadaan baik ada 9, rusak ringan 82, rusak sedang 1, dan rusak berat ada 4.

2. Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait perencanaan tata ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dengan yang diatur dalam peraturan terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 maka pengaturan untuk kawasan strategis Kabupaten dalam Rencana Rinci Tata Ruang sudah tidak ada lagi. Hal ini juga menjadi salah satu dinamika regulasi yang harus disesuaikan oleh Kabupaten dalam meninjau kembali terhadap rencana penyusunan dokumen tata ruang. Selain itu, lamanya proses dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama yang dihadapi. Target dokumen perencanaan tata ruang yang harus disusun oleh Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61

Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo

NO	JENIS DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG	URAIAN DOKUMEN	JUMLAH (DOKUMEN)
1	RTRW	Revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo	1
2	RDTR	Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043	1
3		Perkotaan Wates 2024-2044	1
4		Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	1
5		Kulon Progo Utara	1
6		Kulon Progo Tengah	1
7		Kulon Progo Selatan	1
Total dokumen			7

Adapun progress penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.62

Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2025

No	Dokumen Rencana Tata Ruang	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	RTRW	- Reviu PK RTRW dan substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 - Proses Pra Loket Persetujuan Substansi	- Klinik Pra Loket Persetujuan Substansi - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian substansi Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian Audit Tata Ruang (Indikasi Pelanggaran Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo)	- Klinik ke 5 dengan Kementerian ATR - Penyesuaian substansi revisi RTRW terkait dengan KP2B dan harmonisasi substansi dengan RTRW DIY 2023 – 2043 - Proses perbaikan dokumen sebagai tindak lanjut dari hasil asistensi dengan Kementerian ATR	- Finalisasi luasan KP2B pada substansi revisi RTRW - Proses perbaikan dokumen revisi RTRW	- Update Peta Dasar Kabupaten Kulon Progo - Konfirmasi KLHS RTRW Kulon Progo ke Dinas Lingkungan Hidup DIY terkait KRP validasi KLHS di tahun 2018 dan KRP Pra Linsek - Perbaikan berdasarkan hasil asistensi - Target Rapat Linsek (Lintas Sektor)	- Pengajuan KLHS sudah mendapatkan validasi. Menunggu jadwal pertemuan lintas sektoral.
2	RDTR	- Reviu substansi RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA, RDTR Perkotaan Kokap dan	- Proses penyiapan pra-validasi KLHS, pengajuan pleno rekomendasi BIG dan persetujuan substansi untuk reviu RDTR Perkotaan Wates	- Penetapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043	- Penetapan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Wates 2024-2044 - Proses lanjutan perbaikan dokumen	- Integrasi RDTR Perkotaan Wates kedalam Sistem OSS - Fasub RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata	- RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur (BOB) sudah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2026.

No	Dokumen Rencana Tata Ruang	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Kalibawang menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 - Rekomendasi BIG terbit atas peta dasar RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA	- Proses pengajuan validasi KLHS RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA dan persiapan pembahasan lintas sektor di Kemen ATR/BPN - Proses penyusunan reviu RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur beserta KLHS-nya (pendetailan delineasi khusus wilayah Kabupaten Kulon Progo)	- Klinik ke-2 pra-loket RDTR Perkotaan Wates dengan Kementerian ATR dan proses tindak lanjut perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi - Klinik ke-1 pra-loket RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi - Proses penyusunan RDTR Kulon Progo Utara beserta KLHSnya	RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur - Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Tengah beserta KLHSnya - Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Selatan beserta KLHSnya	Borobudur (Target Rapat Lintas Sektor) - Bimbingan Teknis RDTR Kulon Progo Tengah oleh Kementerian ATR - Proses lanjutan perbaikan RDTR Kulon Progo Utara - Proses lanjutan perbaikan RDTR Kulon Progo Selatan	- RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur (BOB) Proses pengintegrasian dengan OSS - RDTR Kulon Progo Tengah menunggu hasil persetujuan substansi.

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2026

Berdasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung/ tidak langsung serta penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Perwujudan pemanfaatan ruang yang dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan program–program sektoral akan dipersandingkan dengan rencana pola dan struktur ruang untuk mendapatkan persentase kesesuaiannya. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dari hasil evaluasi dari rata-rata struktur ruang dan pola ruang tersebut. Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2021–2025.

Tabel 2.63

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021–2025

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Struktur ruang	87,00	87,22	87,33	87,36	87,53
2.	Pola ruang	89,58	89,88	89,78	89,86	89,91
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,29	88,55	88,56	88,61	88,72

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2026

Berdasarkan data di atas, perwujudan struktur ruang dan pola ruang semakin meningkat. Program – program yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dalam mewujudkan rencana struktur ruang meliputi program perwujudan Sistem Pusat Pelayanan, Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Prasarana Lainnya. Sedangkan program yang masih perlu didorong untuk mewujudkan rencana struktur ruang yaitu program perwujudan Sistem Jaringan Energi. Selanjutnya, program – program yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dalam mewujudkan rencana pola ruang meliputi program perwujudan Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta Kawasan Perikanan. Sedangkan program yang perlu didorong untuk mewujudkan rencana pola ruang yaitu program perwujudan Kawasan Perkebunan dan Kawasan Pertambangan.

Tabel 2.64

Perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang

No	Jenis Perwujudan	Nilai Program	Nilai Lokasi	Nilai Perwujudan
A	**Perwujudan Struktur Ruang**	97,19	77,86	**87,53**
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman	100,00	63,96	81,98
1.1	Perwujudan Rencana Detail Tata Ruang	100,00	80,00	90,00
1.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	100,00	66,67	83,33
1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan	100,00	46,67	73,33
1.4	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	100,00	62,50	81,25
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	94,39	91,77	93,08
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	87,66	86,54	87,10
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	90,00	78,33	84,17
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	100,00	100,00	100,00
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	100,00	100,00	100,00
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	94,29	93,96	94,12

No	Jenis Perwujudan	Nilai Program	Nilai Lokasi	Nilai Perwujudan
B	**Perwujudan Pola Ruang**	91,63	88,18	**89,91**
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	87,64	80,74	84,19
1.1	Perwujudan Badan Air	92,86	92,86	92,86
1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	100,00	100,00	100,00
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	100,00	100,00	100,00
1.4	Perwujudan Kawasan Konservasi	100,00	100,00	100,00
1.5	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi	70,59	43,14	56,86
1.6	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	75,00	54,17	64,58
1.7	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove	75,00	75,00	75,00
2.	Perwujudan Kawasan Budi Daya	95,63	95,63	95,63
2.1	Perwujudan Badan Jalan	100,00	100,00	100,00
2.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	100,00	100,00	100,00
2.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	100,00	100,00	100,00
2.4	Perwujudan Kawasan Pertanian	100,00	100,00	100,00
2.5	Perwujudan Kawasan Perikanan	100,00	100,00	100,00
2.6	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi	100,00	100,00	100,00
2.7	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	77,78	77,78	77,78
2.8	Perwujudan Kawasan Pariwisata	100,00	97,06	98,53
2.9	Kawasan Permukiman	94,12	97,06	95,59
2.10	Perwujudan Kawasan Transportasi	80,00	80,00	80,00
2.11	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	100,00	100,00	100,00
SKOR AKHIR		94,41	83,02	**88,72**

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2026

Berdasarkan hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Kulon Progo memperoleh skor akhir perwujudan sebesar 88,72, yang merupakan hasil dari nilai program sebesar 94,41 dan nilai lokasi sebesar 83,02. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum implementasi RTRW telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek perwujudan lokasi yang nilainya relatif lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan program.

Pada aspek perwujudan struktur ruang, diperoleh nilai perwujudan sebesar 87,53. Capaian tersebut didukung oleh tingginya tingkat perwujudan sistem jaringan prasarana yang mencapai 93,08, terutama pada sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air yang telah mencapai nilai 100. Selain itu, sistem jaringan prasarana lainnya juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 94,12, yang mencerminkan bahwa sebagian besar infrastruktur dasar telah berkembang sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Sebaliknya, pada komponen sistem pusat permukiman, nilai perwujudan masih sebesar 81,98, terutama dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada Pusat Pelayanan Kawasan (73,33) dan nilai lokasi yang masih relatif rendah pada beberapa pusat pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan struktur ruang masih perlu diarahkan pada pemerataan fungsi pusat-pusat pelayanan agar mampu mendukung pelayanan wilayah secara lebih optimal.

Sementara itu, perwujudan pola ruang memperoleh nilai 89,91, yang terdiri atas capaian kawasan lindung sebesar 84,19 dan kawasan budi daya sebesar 95,63. Tingginya capaian kawasan budi daya menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya telah

sesuai dengan rencana tata ruang, terutama pada kawasan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang masing-masing telah mencapai nilai 100. Selain itu, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman juga menunjukkan capaian yang sangat baik, masing-masing sebesar 98,53 dan 95,59, yang mencerminkan semakin baiknya kesesuaian pemanfaatan ruang pada sektor-sektor strategis pembangunan daerah.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa komponen yang memerlukan perhatian dalam implementasi pola ruang. Nilai perwujudan kawasan lindung geologi masih sebesar 56,86, sedangkan kawasan cagar budaya mencapai 64,58 dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 75,00. Pada kawasan budi daya, kawasan peruntukan industri memperoleh nilai 77,78 dan kawasan transportasi sebesar 80,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan ruang pada beberapa kawasan strategis masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga memerlukan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi RTRW Kabupaten Kulon Progo telah berada pada kategori yang baik dengan tingkat perwujudan mendekati 90 persen. Tantangan ke depan diarahkan pada peningkatan perwujudan lokasi, optimalisasi pengembangan pusat-pusat pelayanan, serta percepatan implementasi pada kawasan lindung dan beberapa kawasan budi daya yang capaian perwujudannya masih relatif rendah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan sesuai dengan arah kebijakan penataan ruang.

Keseluruhan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 ini berupa pelanggaran belum memiliki ijin atau KKPR dan pelanggaran menyebabkan perubahan fungsi ruang. Oleh karena itu pelanggaran tersebut termasuk dalam tipologi 1.a.2 yaitu *Memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang* sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 191 huruf a PP No. 21 Tahun 2021; dan Pasal 134 ayat (1) huruf a, Pasal 135 ayat (1) huruf a, dan Pasal 135 ayat (2) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021 direkomendasikan adanya sanksi administratif. Namun penjatuhan sanksi masih memerlukan kajian lebih lanjut dan investigasi.

Terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tindakan penertiban dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2025 tentang Perpu UUCK Pasal 17 dan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Sanksi administratif dikenakan bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenai yaitu dapat berupa:

(1) peringatan tertulis;
(2) denda administratif;
(3) penghentian sementara kegiatan;
(4) penghentian sementara pelayanan umum;
(5) penutupan lokasi;
(6) pencabutan KKPR;
(7) pembatalan KKPR;

(8) pembongkaran bangunan; dan/atau
(9) pemulihan fungsi Ruang.

Sedangkan sanksi pidana dikenakan setelah dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana tata ruang yang dilakukan oleh penyidik polri, dan atau PPNS ATR/BPN. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud memiliki wewenang:

(1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
(2) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
(3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
(4) melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
(5) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Sebagai langkah percepatan, maka yang semula direncanakan akan menyusun 16 dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten) kemudian melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan topografi dan karakteristik wilayah dirangkum menjadi 8 dokumen RDTR. Adapun perubahan penyusunan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65

Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

No	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang		Keterangan
	Semula	Menjadi	
1	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates	Sudah penetapan
2	RDTR Perkotaan Kokap	RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta RDTR Perkotaan Wates	Sebagian masuk kedalam RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta
3	RDTR Perkotaan Samigaluh	RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur RDTR Kulon Progo Utara	Sebagian masuk kedalam RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudu Sebagian masuk kedalam RDTR Kulon Progo Utara
4	RDTR Dekso	RDTR Kulon Progo Utara	Meliputi Sebagian Kapanewon Kalibawang, Sebagian Kapanewon Samigaluh, Sebagian Kapanewon Girimulyo (yang tidak termasuk delineasi RDTR BOP Borobudur dan RDTR Kulon Progo Tengah)

No	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang		Keterangan
	Semula	Menjadi	
5	RDTR Kawasan Agropolitan Kalibawang		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Utara
6	RDTR Perkotaan Kalibawang		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Utara
7	RDTR Perkotaan Girimulyo		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Utara
8	RDTR Perkotaan Nanggulan	RDTR Kulon Progo Tengah	Meliputi Sebagian Kapanewon Kokap, Sebagian Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan (tidak termasuk delineasi RDTR Perkotaan Kokap dan RDTR Perkotaan Kalibawang)
9	RDTR Kawasan Minapolitan Nanggulan		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo tengah
10	RDTR Perkotaan Sentolo	RDTR Kulon Progo Selatan	Meliputi Sebagian Kapanewon Wates, Sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Panjatan
11	RDTR Perkotaan Lendah		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Selatan
12	RDTR Perkotaan Panjatan		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Selatan
13	RDTR Perkotaan Galur		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Selatan
14	RDTR Brosot		Di deliniasi dalam perencanaan RDTR Kulon Progo Selatan
15	RDTR Perkotaan Wates		Sudah ditetapkan dan terintegrasi dengan OSS
16	RRTR Kawasan Strategis Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta	RDTR Kawasan Strategis Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta	Sudah penetapan
17	RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur	RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	Sedang proses Penertiban Substansi dai Kementrian ATR

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan atau RTBL. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi perseorangan atau badan usaha dalam mendirikan sebuah bangunan gedung adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam rangka mewujudkan tertib pembangunan dan pemanfaatan ruang, maka Pemerintah Kabupaten rutin melakukan pengawasan dan pengendalian IMB terhadap bangunan gedung. Dalam kurun waktu Tahun 2021–2025, rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

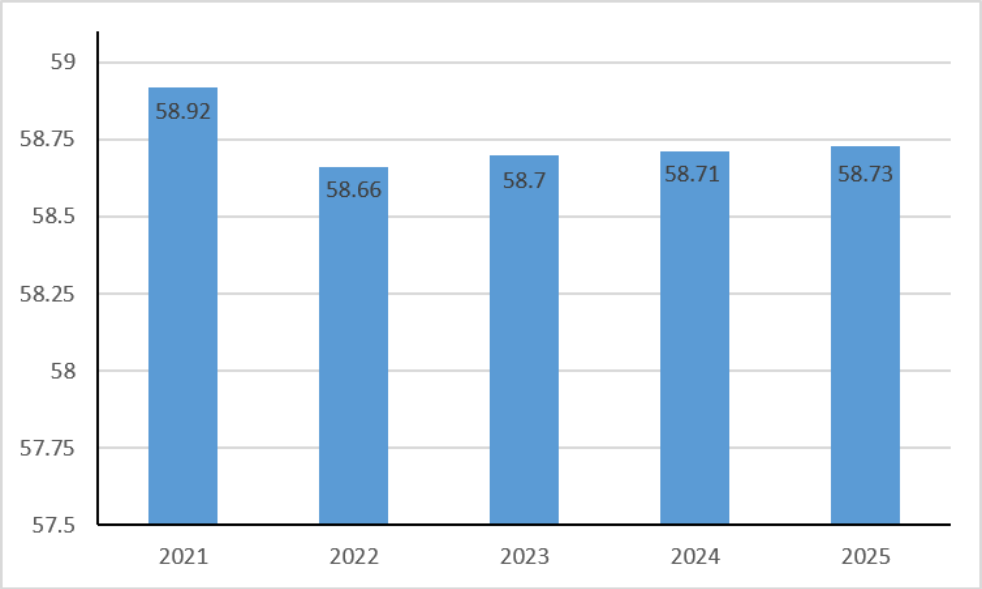

Sumber data: DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2026 (diolah)

Gambar 2.35

Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025

Rata–rata peningkatan rasio bangunan mempunyai IMB dari tahun ke tahun relatif landai hanya sekitar 0,2%. Pada Tahun 2025, rasio bangunan mempunyai IMB di Kabupaten Kulon Progo mencapai 58,73%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan memiliki IMB masih rendah. Pengawasan dan pengendalian IMB relatif lebih mudah untuk dilakukan terhadap bangunan yang baru berdiri dibandingkan bangunan yang sudah lama berdiri. Bagi bangunan baru yang belum memiliki IMB, maka Pemerintah Kabupaten mengenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan. Terdapat 3 (tiga) tahapan pemberian Surat Peringatan yaitu Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila hingga Surat Peringatan ketiga telah diberikan dan pihak yang bersangkutan tidak menindaklanjutinya maka penertiban akan diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk diambil langkah penindakan yang lebih tegas.

Tabel 2.66

Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Kapanewon	Penambahan PBG 2025	Jumlah Bangunan IMB/PBG	Monitoring Bangunan Baru 2025	Jumlah Seluruh Bangunan	Rasio
1	Temon	3	5,990	10	8,346	71.77
2	Wates	33	9,978	19	13,506	73.88
3	Panjatan	23	7,820	2	10,035	77.93
4	Galur	12	3,955	3	9,351	42.29
5	Lendah	3	7,980	11	11,095	71.92
6	Sentolo	62	8,127	3	13,126	61.92
7	Pengasih	50	8,552	38	13,599	62.90
8	Kokap	16	2,706	0	10,190	26.56

No	Kapanewon	Penambahan PBG 2025	Jumlah Bangunan IMB/PBG	Monitoring Bangunan Baru 2025	Jumlah Seluruh Bangunan	Rasio
9	Girimulyo	4	2,464	3	7,688	32.05
10	Nanggulan	8	5,723	20	8,585	66.66
11	Kalibawang	4	3,970	2	9,048	43.88
12	Samigaluh	12	4,541	0	7,693	59.03
Kab. Kulon Progo		**230**	**71,808**	**111**	**122,262**	**58.73**

Sumber: SIPD Ewalidata, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, DPMPT dan 12 Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, 2026 (*diolah)*.

Rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo terutama di perdesaan yang terletak di wilayah perbukitan seperti di Kapanewon Kokap, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terletak di wilayah dataran rendah yang sebagian besar merupakan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi dan upaya penertiban terhadap IMB di wilayah-wilayah tersebut.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2023 sebanyak 6.818 unit dan pada tahun 2024 sebanyak 6.349 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.67

Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kapanewon Tahun 2021-2025

No	Kapanewon	Jumlah Rumah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temon	396	441	405	345	344
2	Wates	0	282	256	262	262
3	Panjatan	729	349	306	374	374
4	Galur	125	420	381	381	381
5	Lendah	557	586	462	438	438
6	Sentolo	813	928	881	809	809
7	Pengasih	621	1062	887	872	872
8	Kokap	1285	1155	796	707	707
9	Girimulyo	838	610	546	517	516
10	Nanggulan	306	527	486	470	470
11	Kalibawang	683	525	478	477	697
12	Samigaluh	658	1223	934	697	474
	TOTAL	**6.840**	**8.108**	**6.818**	**6.349**	**6.344**

Sumber data: DPUPKP, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Upaya penurunan jumlah rumah tidak layak huni telah ditempuh bersama-sama baik oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan bansos RTLH bagi warga miskin, kemudian dari Pemerintah Provinsi melalui skema yang sama dengan target sasaran rumah warga yang berada di Kapanewon yang ditetapkan sebagai wilayah miskin. Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain dari program/ kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan program "Bedah Rumah". Program bedah rumah merupakan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dimana sumber dana yang digunakan sama sekali bukan berasal dari APBD tetapi merupakan sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang memberikan sumbangan dalam rangka program bedah rumah ini antara lain berasal dari : CSR perusahaan yang berlokasi di Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo, BAZNAS, Paguyuban Pegawai Kristiani, Habitat dan lain-lain.

Tabel 2.68

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Sumber Dana tahun 2025

NO	Sumber	Jumlah
1	APBD II 2025 (PENINGKATAN KUALITAS RTLH)	172
2	APBD II 2025 (PEMBANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA)	4
3	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PROV. DIY	69
4	DANA KEISTIMEWAAN (DAIS) DIY	6
5	HABITAT (NGO)	24
6	BAZNAS	74
7	CSR BANK BPD DIY	15
8	PERKUMPULAN PEGAWAI KRISTIANI (PPK) KULON PROGO	29
	Jumlah	**393**

Sumber data: DPUPKP, 2025

Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 53/C/2025 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 terdapat 76 Ha kawasan kumuh yang perlu ditangani. Adapun rincian lokasi kawasan kumuh di perkotaan dan luasan pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.69

Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

(Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 53/C/2025)

No.	Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luasan Kumuh di SK (Ha)	Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2025 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh tahun 2025 (Ha)
1	Wates	Wates	10,01	0	10,01
		Giripeni	4,44	2,03	2,41

No.	Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luasan Kumuh di SK (Ha)	Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2025 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh tahun 2025 (Ha)
2	Nanggulan	Wijimulyo	11,13	0	11,13
3	Galur	Brosot	19,90	0	19,90
4	Pengasih	Sendangsari	9,97	0	9,97
		Margosari	4,71	0	4,71
		Tawangsari	15,84	0	15,84
	Total		**76**	**2,03**	**73,97**

Sumber data: DPUPKP Kab Kulon Progo, 2025

Didalam Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yaitu untuk kawasan permukiman kumuh dengan luasan 15 (lima belas) hektar atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi penanganan kumuh, kemudian untuk luasan di antara 10 – 15 Hektar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan untuk luasan dibawah 10 (sepuluh) Hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka sisa kawasan kumuh yang masih perlu ditangani merata, baik kewenangan Pemerintah Pusat yaitu di Kalurahan Brosot dan Kalurahan Tawangsari; sedangkan untuk kawasan kumuh yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu di Kelurahan Wates serta Kalurahan Wijimulyo serta untuk kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu di Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Sendangsari.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan perda dan perbup dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat, sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun Capaian Peningkatan Keamanan dan Lingkungan pada kurun waktu Tahun 2021-2025 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.70

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pelanggaran yang ditegakkan	695	613	370	347	302
2.	Jumlah pelanggaran	5695	613	370	347	302
3.	Jumlah Anggota Sat Linmas	3968	3.968	3807	3.807	3807

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
4.	Jumlah Linmas yang pernah dibina	3968	3.968	3807	3.807	3807
5.	Jumlah Patroli	447	478	456	461	741
6.	Jumlah Kelompok Jaga Warga	16	285	535	535	535
7.	Jumlah anggota SRI (Satlinmas Rescue Istimewa)	63	63	63	63	63

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, 2026

Jumlah pelanggaran pada tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun 2021-2025 jumlah linmas yang pernah dibina sudah sama dengan jumlah linmas yang ada. Jumlah Anggota Satlinmas pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 3807 personil.

Khusus untuk patroli, intensitas pelaksanaan pada tahun 2025 dilaksanakan patroli lebih sering dibanding tahun 2024, patroli yang dilaksanakan peningkatan menjadi 741 kali patroli. Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan partai politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas yang sangat penting yaitu :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana,
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
5. Membantu upaya pertahanan negara.

Di Kabupaten Kulon Progo baru ada 3.807 orang personil linmas, sedangkan jumlah Rukun Tetangga ada 4.478, sehingga masih kekurangan sebanyak 424 orang personil linmas, artinya baru tercapai sebesar 95,01%. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kalurahan/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif Masyarakat, Kelompok Jaga Warga ber kedudukan sebagai mitra Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung, Wilayah kerja Kelompok Jaga Warga sama dengan wilayah kerja Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung. Kelompok Jaga Warga diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga. Sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo telah terbentuk Kelompok Jaga Warga dengan anggota sebanyak 535 orang, Jumlah anggota menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2021–2025, yaitu dari 16 anggota pada tahun 2021 menjadi 535 anggota pada tahun 2025.

Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2021 telah terbentuk SRI sebanyak 63 personil. Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa atau Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) adalah satuan tugas

yang berasal dari kekuatan Satuan Perlindungan Masyarakat yang melakukan pertolongan dan pencarian terhadap korban kecelakaan dan musibah yang terjadi di lokasi wisata serta serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengaturan Satlinmas Rescue Istimewa bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Rescue Istimewa dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi penyelamatan dan pertolongan yang berdaya guna dan berhasil guna, Satlinmas Rescue Istimewa diatur dalam Pergub DIY No.4 Tahun 2019 ttg Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa.

Selama periode tahun 2021-2025, jumlah lembaga politik, ormas, LSM dan OKP terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan dari tahun 2023 yakni terdiri dari parpol, ormas, LSM, dan OKP sebanyak 4 lembaga. Kemudian di tahun 2025 kembali mengalami penambahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 lembaga politik, ormas, LSM, dan OKP bertambah sebanyak 21 lembaga.

Tabel 2.71

Jumlah Kegiatan Politik, Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	4	5	5	5
2	Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik	Orang	100	120	250	262	320
3	Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP yang telah mendapat pembinaan	Lembaga	119	139	145	149	170
4	Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP	Lembaga	133	139	145	149	170

Sumber data: SIPD Ewalidata, Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2026

2.1.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan sosial yang belum memadai, SDM yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial. Di sisi lain permasalahan sosial, terutama penyandang sakit jiwa, orang terlantar, gelandangan, lanjut usia terlantar, korban bencana, membutuhkan penanganan secara serius. Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Data PPKS di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Data PPKS di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Nama PPKS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum)	16	4	20
2.	ABT (Anak Balita Terlantar)	12	9	21
3.	ADK (Anak dengan Kedisabilitasan)	161	134	295
4.	AJ (Anak Jalanan)	-	-	-
5.	AKTK (Anak yang menjadi Korban Tindak kekerasan atau diperlakukan salah)	-	-	-
6.	AMPK (Anak yang memerlukan perlindungan khusus)	4	10	14
7.	AT (Anak Terlantar)	230	238	468
8.	BWBLP (Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan)	19	-	19
9.	FM (Fakir Miskin)	37	556	593
10.	GEL (Gelandangan)	-	-	-
11.	KBA (Korban Bencana Alam)	-	-	-
12.	KBS (Korban Bencana Sosial)	-	-	-
13.	KBSP (Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis)	300	105	405
14.	KM (Kelompok Minoritas)	-	-	-
15.	KPN (Korban Penyalahgunaan Napza)	7	-	7
16.	KT (Korban Trafficking)	-	-	-
17.	KTK (Korban Tindak Kekerasan)	-	-	-
18.	LUT (Lanjut Usia Terlantar)	535	1660	2.195
19.	PD (Penyandang Disabilitas)	2702	2000	4.702
20.	PEM (Pemulung)	12	7	19
21.	PENG (Pengemis)	3	-	3
22.	PMBS (Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	16	7	23
23.	PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi)	-	783	783
24.	TS (Tuna Susila)	-	-	-
25.	ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)	-	-	-
	.JUMLAH	4.054	5.513	9.567

Sumber Data : SIPD Ewalidata dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025 *diolah*.

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025, jumlah PPKS di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 9.567 jiwa, terdiri atas 4.054 laki-laki dan 5.513 perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang lebih dominan, yaitu sekitar 57,6 persen dari total PPKS, sedangkan laki-laki sebesar 42,4 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo relatif lebih banyak dialami oleh kelompok perempuan sehingga memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan dan program penanganan sosial.

Berdasarkan jenis PPKS, Penyandang Disabilitas merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak, yaitu 4.702 jiwa atau sekitar 49,2 persen dari total PPKS. Selanjutnya, Lanjut Usia Terlantar berjumlah 2.195 jiwa (22,9 persen), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 783 jiwa (8,2

persen), Fakir Miskin sebanyak 593 jiwa (6,2 persen), Anak Terlantar sebanyak 468 jiwa (4,9 persen), dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) sebanyak 405 jiwa (4,2 persen).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, di Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial tahun 2025, adapun realisasi pencapaian SPM Tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.73

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	467	100	100
2.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	440	100	100
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	1.000	100	100
4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.	40	100	100
5.	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.	160	100	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

2.1.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2025, peran perempuan dan laki laki di bidang ketenagakerjaan secara berurutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.74

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

No.	Sektor	2021		2022		2023		2024		2025	
		Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan
1	Petani/ pekebun	45.114	48.830	43.619	47.446	41.284	13.751	42.588	45.129	41.889	44.012
2	Wiraswasta	30.560	19.551	31.710	20.042	26.970	3.117	30.936	19.341	30.746	19.137
3	Karyawan swasta	28.556	20.706	24.605	20.042	22.234	1.716	30.046	21.719	29.984	21.621
4	Buruh harian lepas	12.174	4.184	11.387	3.978	11.678	984	15.005	4.483	16.032	4.593
5	Pegawai Negeri Sipil	4.256	3.538	3.793	3.359	3.773	472	3.821	3.594	3.654	3.551

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025

Menurut data di atas, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG di kabupaten/kota se-DIY selama kurun waktu 5 tahun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.75

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kulon Progo	95,61	95,63	96,08	95,80	95,86	95,91
2.	Bantul	95,68	95,75	95,93	95,90	96,05	96,43
3.	Gunungkidul	85,19	85,77	86,24	86,35	87,13	87,37
4.	Sleman	96,74	96,86	96,96	96,94	97,11	97,17
5.	Kota Yogyakarta	98,84	99,08	99,25	99,04	99,25	99,26
6.	DIY	94,80	94,93	95,02	94,98	95,40	95,58

Sumber Data: BPS (menggunakan UHH hasil SP2020 LongForm), 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.76

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/ Kota di DIY

Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Kulon Progo	71,41	72,27	71,68	70,60
2.	Bantul	65,27	65,03	70,35	75,97
3.	Gunungkidul	76,7	77,93	77,3	79,41
4.	Sleman	81,31	81,65	79,94	81,49
5.	Kota Yogyakarta	73,18	75,5	75,7	71,86
6.	DIY	76,57	76,87	78,46	74,65

Sumber Data: BPS DIY, 2025

Urusan pilah gender di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024, terdapat 7 orang perempuan atau 17.5 persen yang menjadi anggota DPRD, sedangkan untuk jumlah ASN (PNS dan P3K) perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3.936 orang atau 64.2 persen dari total ASN (PNS dan P3K) sebanyak 6.130 orang, untuk ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural terdapat 218

orang atau 50.8 persen dari total 429 orang ASN yang menduduki jabatan struktural, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2025 - 2029

Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SLTA	17	-	17
DI/DII/DIII	-	1	1
S1	15	6	21
S2	1	-	1
Jumlah	**33**	**7**	**40**

Sumber Data: BPS Kulon Progo, 2025

Tabel 2.78

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

	2025		
Jabatan	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
Fungsional Tertentu	1.337	3415	4.752
Fungsional Umum	616	333	949
Struktural			
- Eselon IV	126	134	260
- Eselon III	86	51	137
- Eselon II	29	3	32
Jumlah	**2.194**	**3.936**	**6.130**

Sumber Data: BKPP Kulon Progo, 2025

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang Tahun 2025 terdapat kasus 44 kasus kekerasan yang ditangani. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Terlayaninya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan kerjasama yang baik dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama Tahun 2021-2025 seperti tabel berikut.

Tabel 2.79

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Kabupaten Kulon Progo

Jenis Kasus	Jumlah Korban berdasarkan jenis layanan dari Jejaring PK2PA khusus untuk kasus baru				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perempuan	32	27	42	43	44
Anak	81	62	43	45	40
Jumlah Korban	113	89	85	88	84
KDRT	23	27	33	33	33

Sumber Data: SIPD Ewalidata dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2025 *diolah*.

Sedangkan dilihat dari tren kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 - 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Korban Kekerasan terhadap Perempuan	54	32	27	42	43	44
2	Korban Kekerasan terhadap Anak	98	81	62	43	45	40
3	Jumlah Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	152	113	89	85	88	84
4	Jumlah Kasus KDRT	26	23	27	33	33	33
	Jumlah Keluarga	**152.251**	**153.404**	**155.219**	**156.775**	**157.726**	**158.001**
	Persentase kasus KDRT (%)	**0,017**	**0,014**	**0,017**	**0,021**	**0,020**	**0,020**

Sumber Data: SIPD Ewalidata dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 *diolah*.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 44 kasus, meningkat 1 kasus dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 43 kasus. Adapun kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2025 berjumlah 40 kasus, menurun 5 kasus dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 45 kasus. Secara keseluruhan, total korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 sebanyak 84 kasus, menurun 4 kasus dari tahun 2024 yang berjumlah 88 kasus. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing tercatat sebanyak 33 kasus. Kondisi ini menunjukkan tren yang stagnan (konstan) dan menjadi perhatian serius, mengingat KDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling sering berulang dan berdampak langsung pada stabilitas keluarga.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo melalui berbagai strategi. Salah satu langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) hingga tingkat desa, sehingga jangkauan layanan perlindungan dapat lebih dekat dan cepat kepada masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan secara kolaboratif dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Selain itu,

penguatan kapasitas keluarga, peningkatan kesadaran tentang pola asuh positif, serta literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi prioritas intervensi dalam menekan angka kekerasan.

Dari sisi kelembagaan, sinergi antara UPTD PPA, P2TP2A, FPKK, dan jejaring PK2PA terus diperkuat guna memastikan setiap korban mendapatkan layanan yang komprehensif, mulai dari pendampingan awal, proses hukum, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi ke keluarga dan masyarakat.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Berikut data ketenagakerjaan di kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 2.81

Data Ketenagakerjaan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk usia kerja	350.568	355.095	355.488	357.960	360.737
2	Angkatan kerja	268.964	279.905	269.268	281.246	282.745
3	Penganggur	9.920	7.824	6.455	5.657	6.053

Sumber: BPS Sakernas 2021 – 2025, SIPD Ewalidata (*diolah*)

Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 2.777 orang menjadi 360.737 dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja menjadi 282.745 orang pada tahun 2025 atau meningkat sebanyak 1.499 orang. Di sisi lain jumlah penganggur meningkat dari 5.657 orang menjadi 6.053 pada tahun 2025.

Tabel 2.82

Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Kulon Progo	96,31	97,20	97,60	97,99	97,77
2	Kab. Bantul	95,95	96,03	96,22	96,38	96,43
3	Kab. Gunungkidul	97,37	97,92	97,91	97,84	97,85
4	Kab. Sleman	94,83	95,22	95,53	95,87	95,93
5	Kota Yogyakarta	90,87	92,82	99,75	94,20	94,28
6	Provinsi DIY	95,44	95,94	96,31	96,52	96,54

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2025 (diolah)

Penduduk usia kerja di Kulon Progo pada tahun 2024 berjumlah 357.960 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 281.246 dan pengangguran 5.657. Sedangkan persentase penduduk bekerja di tahun 2025 sebesar 97,77 % dan menjadi nilai tertinggi kedua di Provinsi DIY.

Tabel 2.83

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Maksimum SD	81.318	70.764	88.355	73.595	71.382
2	SMP	45.639	49 919	57.166	49.229	51.916
3	SMA Umum	36.662	39 719	42150	42.333	46.632
4	SMA Kejuruan	62.684	69 227	68.124	78.357	81.838
5	Diploma	6.624	8 499	6.262	6.916	7.383
6	Universitas	23.705	30 836	17.848	18.838	22.095
	Jumlah	**269.426**	**268 964**	**279.905**	**269.268**	**281.246**

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2024 (diolah)

Dilihat dari tingkat pendidikannya angkatan kerja di Kulon Progo paling banyak dari lulusan SMA Kejuruan sebesar 81.838 (29,10%) dan paling sedikit dari lulusan Diploma sebesar 7.383 (2,63%). Pada angkatan kerja lulusan SD memiliki tren yang menurun yang dapat menjadi indikator peningkatan pendidikan tenaga kerja di Kulon Progo.

Tabel 2.84

Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Umur	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	15 – 19	9.736	8.135	8,255	6.497	7.596
2	20 – 24	16.405	17.330	22,955	22.807	25.693
3	25 – 29	25.581	24.489	24,457	28.101	27.309
4	30 – 34	26.884	25.998	26,517	27.665	26.430
5	35 – 39	26.452	28.650	22,604	26.388	26.708
6	40 – 44	30.325	30.597	24,796	28.373	27.229
7	45 – 49	29.969	30.013	26,893	26.344	27.533
8	50 – 54	26.908	28.190	25,582	26.878	27.414
9	55 – 59	24.717	24.868	25,208	25.821	26.927
10	60 – 64+	51.973	61.635	55,546	62.372	59.906
	Jumlah	**268,964**	**279.905**	**262.813**	**281.246**	**282.745**

Sumber : Sakernas BPS, 2026

Berdasarkan kelompok umur, angkatan kerja pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia produktif utama (25–54 tahun) dengan proporsi sebesar 67,04 persen. Meskipun masih menjadi kelompok terbesar, proporsi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,36 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 67,40 persen. Sementara itu, kelompok usia muda (15–24 tahun) menyumbang 11,77 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2025. Angka ini meningkat sebesar 1,35 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,42 persen, menunjukkan meningkatnya partisipasi penduduk usia muda dalam pasar kerja. Adapun kelompok usia produktif lanjut (55–64 tahun) memiliki proporsi sebesar 21,19 persen. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,99 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 22,18 persen.

Pergeseran komposisi angkatan kerja tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi tenaga kerja usia muda yang diikuti dengan penurunan proporsi tenaga kerja pada kelompok usia produktif utama dan usia produktif lanjut. Kondisi ini dapat mengindikasikan mulai bertambahnya pasokan tenaga kerja baru yang memasuki pasar kerja pada tahun 2025.

Tabel 2.85

Lowongan Kerja, Pencaker dan Penempatan Tenaga Kerja

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	Lowongan Kerja	Pencaker	Penempatan	Penempatan Berdasarkan Lokasi			Rasio Penempatan terhadap Pencaker
				AKL (Lokal DIY)	AKAD (Antar Daerah)	AKAN (Antar Negara)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 4/3*
2021	7.348	4.676	3.242	3.065	177	-	0,69
2022	9.261	4.233	3.592	3.321	181	90	0,85
2023	8.823	4.268	3.458	3.115	94	249	0,81
2024	8,622	4,204	3,464	2,957	334	173	0.82
2025	7,982	4,215	3,370	2,878	239	253	0,79

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2025 (diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah lowongan kerja belum sepenuhnya bisa terpenuhi karena belum adanya *link and match* antara pencari kerja dan perusahaan. Salah satu Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mendorong lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dirintis sehingga terwujud *link and match* antara output lembaga pendidikan dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri/perusahaan.

Tabel 2.86

Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	Besar	Sedang	Menengah	Kecil		Jumlah
	TK>100	TK 50-99	TK 25-49	<25	<10	
2021	20	14	28	49	48	**158**
2022	20	18	28	49	48	**163**
2023	19	21	28	49	48	**165**
2024	20	21	28	50	49	168
2025	25	18	25	50	51	169

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2025

Hubungan industrial diperlukan agar komunikasi antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja dapat terjalin dengan baik. Bagi tenaga kerja yang sudah memasuki dunia usaha harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu perlindungan tenaga kerja dalam dunia usaha adalah hubungan industrial karena masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan dengan konsekuen. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 2.87

Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	PP	PKB	SP/SB	BIPARTIT	PHI/PHK	TK Korban PHK
2021	29	14	18	10	1	4
2022	35	16	15	11	1	114
2023	41	16	10	11	-	116
2024	43	16	10	14	5	897
2025	44	15	20	15	9	73

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Tahun 2025 perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) meningkat sebanyak 1 perusahaan menjadi 44. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki PKB berkurang 1 menjadi 15, perusahan dengan SP/SB meningkat dari 10 menjadi 20 perusahaan, dan perusahaan dengan Bipartit bertambah 1 menjadi 15. Pada permasalahan pemutusan hubungan kerja terdapat pada perusahan dengan jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 73 orang.

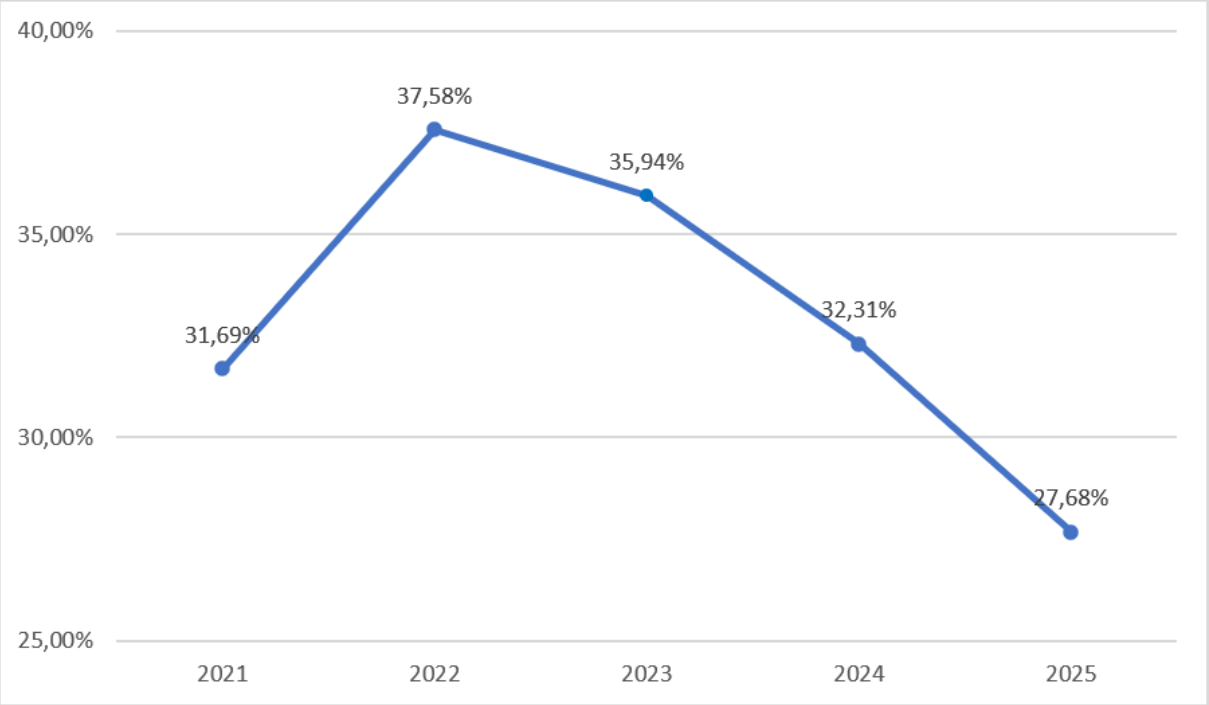

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Gambar 2.36

Cakupan Semesta Peserta Aktif BPJS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Cakupan semesta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan memberikan gambaran penduduk yang sudah mendapat jaminan Ketenagakerjaan BPJS dalam satu daerah. Cakupan semesta dihitung dari total penduduk yang aktif dalam kepesertaan BPJS Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi dibandingkan dengan potensi peserta BPJS pada satu daerah. Kulon Progo. Realisasi pada tahun 2025 adalah 27,68 % turun 4,63 poin dibanding tahun 2024 yang bernilai 32,31 %. Penurunan ini didorong oleh bertambahnya potensi kepesertaan serta masih rendahnys cakupan peserta pada kepesertaan BPJS BPU dan Jasa Konstruksi.

Tabel 2.88

Data Produktivitas Tenaga Kerja 2020-2024

Produktivitas	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kulon Progo	45,25	48,80	52,61	60,30	61,37
Kab. Bantul	44,67	49,23	51,85	58,66	62,29
Kab. Gunungkidul	48,62	44,52	50,15	54,39	57,89
Kab. Sleman	68,36	70,46	82,20	94,69	97,01
Kota Yogyakarta	159,15	161,80	171,54	219,71	242,41
DIY	64,96	67,05	73,94	84,45	88,66

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Target yang akan dicapai adalah pengurangan angka pengangguran, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan produktivitas dengan mengadakan pelatihan ketrampilan baik yang dilakukan di UPT Balai Latihan Kerja maupun lainnya. Pelatihan dilakukan kepada pencari kerja juga tenaga kerja mandiri untuk melakukan diversifikasi usaha.

2.1.3.2.2 Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, dengan capaian pada Tahun 2021-2025 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.89

Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan Energi Per kapita (kkal/kap/hr)	3.420	3.461	3.361	2.943	3,241
		Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr)	161,09	102,65	78	92,57	99,95
		Cadangan pangan pemerintah (ton)	4,55	14,55	24,22	32,92	41,25
		Penguatan Cadangan Pangan masyarakat (ton)	2.537,50	2.602	2.650	2.658	2,725
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	91,45	91.52	91,55	91,60	91,60
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan(%)	99,38	99.43	99,44	99,46	99,46
3.		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,82	92.1	92,53	93,77	87,84

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	98	98	98	95,42	91,67
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kalurahan)	0	0	0	0	0

Sumber data: SIPD Ewalidata dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2026 *diolah*.

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja urusan pangan di atas, ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Gubernur nomor 2 Tahun 2025 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 96 ton. Sampai dengan tahun 2025 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kulon Progo baru mencapai 41,25 ton beras.

Capaian ketersediaan energi sebesar 3,241 meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 2.943 kkal/kap/hari, ini sudah jauh melampaui standar yaitu 2.100 kkal/kap/hari. Capaian ketersediaan protein mengalami kenaikan tahun 2025 menjadi 99,95 gr/kapita/hari. Capaian tersebut di atas angka batas minimal ketersediaan protein (56 gr/kapita/hari). Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 mencapai 87,84, menurun dari tahun sebelumnya dan masih di bawah standar nasional sebesar 90. Penurunan ini disebabkan oleh berubahnya indikator yang digunakan dalam penilaian skor PPH, terdapat perubahan kuesioner dibandingkan tahun 2025, jumlah komoditas yang masuk dalam perhitungan tahun 2024 sebanyak 197 dan tahun 2025 sebanyak 225. Data menggunakan data dari Susenas dan terdapat perbedaan waktu pengambilan data. Tahun lalu di bulan Maret 2024 dan tahun 2025 di bulan Februari.

Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2025 dilakukan fasilitasi/pendampingan desa rawan pangan agar tidak menjadi desa rawan pangan sehingga mulai tahun 2021, semua desa di Kulon Progo memiliki ketahanan pangan. Kondisi sampai tahun 2025 tetap, tidak ada desa rawan pangan di Kulon Progo. Perkembangan desa rawan pangan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.90

Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021–2025

No.	Kapanewon	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1.	Temon	0	0	0	0	0	
2.	Wates	0	0	0	0	0	
3.	Panjatan	0	0	0	0	0	
4.	Galur	0	0	0	0	0	
5.	Lendah	0	0	0	0	0	
6.	Sentolo	0	0	0	0	0	
7.	Pengasih	0	0	0	0	0	
8.	Kokap	1	0	0	0	0	2020 : Kalirejo
9.	Girimulyo	0	0	0	0	0	
10.	Nanggulan	0	0	0	0	0	
11.	Kalibawang	0	0	0	0	0	

No.	Kapanewon	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
12.	Samigaluh	2	0	0	0	0	2020 : Banjarsari, Kebonharjo
	Jumlah	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pemerintah melakukan intervensi dengan kegiatan pemberdayaan rawan pangan melalui aksi Desa Mandiri Pangan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat menuju ketahanan pangan. Intervensi terutama dilakukan di 10 desa yang merupakan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kulon Progo. Desa-desa tersebut adalah Sendangsari, dan Sidomulyo di Kapanewon Pengasih; Desa Demangrejo dan Kaliagung di Sentolo; Desa Kebonharjo, Purwoharjo dan Banjarsari di Samigaluh; serta Desa Kalirejo, Hargotirto dan Hargowilis di Kapanewon Kokap. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo adalah 14,53% atau sebanyak 67,25 ribu jiwa.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269/A/2025 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029 menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan melalui pendekatan holistik: data, layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan kolaborasi. Dengan dukungan kebijakan pusat, diharapkan angka kemiskinan di Kulon Progo dapat ditekan secara signifikan hingga 2029.

Program penyuluhan pertanian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2021 - 2025 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.91

Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No.	Kondisi	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelompok tani	1.584	1.590	1.616	1.628	1.645
a.	Kelas Pemula	177	134	148	151	139
b.	Kelas Lanjut	528	477	493	494	483
c.	Kelas Madya	743	824	820	825	862
d.	Kelas Utama	136	155	155	158	170
2.a.	Jumlah petani/buruh tani	139.710	141.919	142.619	143.054	143.947
b.	Jumlah keanggotaan dlm kelompok tani	76.560	78,725	79,425	79.833	80.719
c.	Rasio jumlah anggota kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani (%)	54,79	55,47	55,69	55,81	56,07

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah kelompok tani pada tiap kelasnya. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 jumlah kelompok tani mengalami perubahan dikarenakan adanya penumbuhan kelompok baru dan kenaikan kelas kelompok. Di sisi lain, banyak penumbuhan kelompok tani baru, terutama kelompok wanita tani (KWT). Sehingga di tahun 2025, jumlah kelompok tani mengalami peningkatan dari 1.628 di 2024 menjadi 1645 di tahun 2025.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu, pangan merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem.Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berikut ini Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 - 2025.

Tabel 2.92

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Padi-padian	21,6	20,3	21,30	21,5	22,31
2.	Umbi-umbian	1,9	2,5	1,90	2,20	1,35
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,00	24,14	17,6
4.	Minyak dan Lemak	3,0	3,0	3,93	3,80	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,9	0,9	0,96	01,0	0,90
6.	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,00	10,00	8,10
7.	Gula	1,5	1,5	1,44	1,40	2,49
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,00	30,00	30,00
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	Total	**92,82**	**92,1**	**93,53**	**93,77**	**87,84**

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (dietary score)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Melihat skor pangan harapan kabupaten Kulon Progo menunjukan capaian yang semakin meningkat dari tahun 2021-2024 meskipun belum mencapai angka standar 100. Tahun 2025 ini, skor PPH sebesar 87,84. Faktor pendorong penurunan PPH adalah karena adanya perubahan pengisian kuesioner, pada tahun 2024 jumlah komoditas yang masuk dalam perhitungan sebanyak 197 namun pada tahun 2025 jumlah komoditas yang masuk ke dalam kuesioner sebanyak 225. Skor PPH menggunakan data dari Susenas, dan pada tahun 2025 waktu pengambilan data adalah pada bulan Februari sedangkan pada tahun 2024 waktu pengambilan data di bulan Maret.

Kegiatan sosialisasi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) di setiap pertemuan kelompok wanita tani, dengan harapan anggota KWT (ibu-ibu) bisa mengimplementasikan menu - menu B2SA di keluarga mereka. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anak – anak dan remaja kurang menyukai menu - menu sesuai Isi Piringku (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman - B2SA) dan banyak yang menyukai menu siap saji yang nutrisinya kurang lengkap.

2.1.3.2.3 Pertanahan

Sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pertanahan terutama terkait dengan administrasi pertanahan baik di tingkat nasional, regional dan sektoral sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Cakupan jumlah aset Pemda yang bersertifikat terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 31,37% kemudian pada tahun 2025 bertambah menjadi 50,33%. Terdapat penambahan yang signifikan jumlah Aset Pemda dikarenakan terdapat tambahan penerbitan Peta Bidang Tanah. Aset Pemda yang belum bersertifikat sebagian besar berupa jalan dan daerah/saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.

Tabel 2.93

Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah aset Pemda bersertifikat	bidang	299	324	434	992	1.284
2.	Jumlah aset Pemda yang seharusnya bersertifikat	bidang	953	953	953	1.468	2.551
3.	Persentase lahan Pemda bersertifikat	%	31,37	34,00	45,54	67,57	50,33

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2026

Urusan pertanahan merupakan salah satu unsur keistimewaan yang membedakan Pemda DIY dengan provinsi yang lain, yaitu pada status kepemilikan tanahnya. Selain tanah milik masyarakat dan tanah negara, terdapat tiga status kepemilikan tanah lainnya yaitu tanah Kasultanan (Sultan Ground), tanah Kadipaten (Paku Alam Ground) dan tanah Kalurahan. Menurut Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Sedangkan tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan disebutkan bahwa Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Sebaran dan status kepastian hukum Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94

Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Kapanewon	Tanah Kasultanan (bidang)		Tanah Kadipaten (bidang)		Tanah Desa (bidang)	
		SS	BS	SS	BS	SS	BS
1	Temon	-	-	55	39	490	40
2	Wates	-	-	88	42	233	30
3	Pengasih	114	267	-	-	454	56
4	Lendah	12	148	-	-	220	8
5	Nanggulan	76	52	-	-	368	39
6	Kokap	89	28	-	-	196	4

No	Kapanewon	Tanah Kasultanan (bidang)		Tanah Kadipaten (bidang)		Tanah Desa (bidang)	
		SS	BS	SS	BS	SS	BS
7	Kalibawang	230	188	-	-	320	64
8	Girimulyo	188	194	-	-	129	213
9	Samigaluh	20	163	-	-	229	24
10	Sentolo	116	63	-	-	404	25
11	Panjatan	-	-	40	79	228	17
12	Galur	-	-	65	371	329	12
Total Kabupaten		**845**	**1.103**	**248**	**531**	**3.600**	**532**
		1.948		**779**		**4.132**	

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2025
Keterangan : SS: Sudah Bersertifikat; BS: Belum Bersertifikat

Tanah Kasultanan banyak tersebar di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo, sedangkan tanah Kadipaten tersebar di wilayah selatan antara lain meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Apabila dilihat berdasarkan status kepastian hukumnya, baik tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Desa masih belum semua bidang tanah bersertifikat sampai dengan tahun 2024. Maka, dalam rangka menjamin kepastian hukum dari tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah Kalurahan, Pemerintah DIY melalui Dana Keistimewaan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk percepatan pendaftaran atau pengurusan sertifikat tanah – tanah tersebut.

Penanganan permasalahan pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025, sebagaimana berikut:

Tabel 2.95

Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Permasalahan	Penanganan	Capaian	Jumlah
1	Tanah Kasultanan/Kadipaten terindikasi masuk ke SHM Warga	Klarifikasi dan verifikasi dokumen, cek lokasi, serta kesepakatan para pihak	Pengeluaran Tanah Kasultanan/Kadipaten dari SHM warga dan fasilitasi Pendaftaran Tanah	9
2	Permasalahan Pemanfaatan/ Penggunaan Tanah Kalurahan	Melakukan mediasi antara Pemerintah Kalurahan selaku pemegang Hak Anggaduh dengan pengguna	Adanya kesepakatan penggunaan Tanah Kalurahan menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku	21
3	Pendaftaran Tanah hasil Pengadaan Tanah Pengganti	Melakukan klarifikasi dan validasi dokumen, serta fasilitasi penyiapan dokumen untuk pendaftaran tanah	Diperolehnya sebagian kelengkapan dokumen pendaftaran tanah	12
4	Tukar Menukar:			

No	Permasalahan	Penanganan	Capaian	Jumlah
	- Verifikasi Tukar Menukar	Klarifikasi dan verifikasi	Kesediaan dari warga/pemegang SHM terkait keluasan bidang tanah	1
	- Tukar Menukar dengan dokumen yang dapat digunakan untuk pendaftaran tanah	Validasi berkas dan fasilitasi permohonan pendaftaran tanah	Dokumen pendaftaran tanah	15
	- Tukar Menukar yang belum memiliki Izin Kasultanan	Fasilitasi permohonan izin tukar-menukar tanah kalurahan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Lurah	Dokumen permohonan izin tukar-menukar tanah kalurahan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Lurah	12
		Jumlah		**70**

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2026

Permasalahan yang paling banyak ditemui adalah pemanfaatan atau penggunaan Tanah Kalurahan, yaitu sebanyak 21 kasus. Penanganan dilakukan melalui mediasi antara Pemerintah Kalurahan sebagai pemegang Hak Anggaduh dengan pihak pengguna tanah, sehingga diperoleh kesepakatan pemanfaatan tanah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingginya jumlah kasus pada kategori ini menunjukkan bahwa aspek pemanfaatan Tanah Kalurahan masih memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan pemahaman regulasi, serta pengawasan terhadap penggunaan aset desa agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan tukar-menukar tanah, yang secara keseluruhan mencakup 28 kasus, terdiri atas 15 kasus tukar-menukar dengan dokumen yang dapat digunakan untuk pendaftaran tanah, 12 kasus tukar-menukar yang belum memiliki izin Kasultanan, dan 1 kasus verifikasi tukar-menukar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses tukar-menukar tanah masih memerlukan penyempurnaan administrasi, khususnya dalam pemenuhan persyaratan perizinan dan kelengkapan dokumen sebelum proses pendaftaran tanah dapat diselesaikan.

Selain itu, terdapat 12 kasus terkait pendaftaran tanah hasil pengadaan tanah pengganti dan 9 kasus Tanah Kasultanan/Kadipaten yang terindikasi masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) warga. Penanganan terhadap kedua jenis permasalahan tersebut dilakukan melalui klarifikasi, verifikasi, validasi dokumen, pengecekan lokasi, serta fasilitasi pendaftaran tanah. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat kepastian hukum atas status tanah sekaligus mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari.

Secara keseluruhan, permasalahan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 masih didominasi oleh aspek administrasi pertanahan dan legalitas pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, upaya penyelesaiannya perlu terus diarahkan pada percepatan legalisasi aset, penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, instansi pertanahan, dan Kasultanan, serta peningkatan pembinaan kepada masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan potensi sengketa pertanahan, serta mendukung penyelenggaraan penataan ruang dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air/IKA), udara (Indeks Kualitas Udara/IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Lahan/IKL). IKLH merupakan nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air dihitung berdasarkan parameter Derajat Keasaman (pH), Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD), Padatan Tersuspensi Total (TSS), Nitrat (sebagai N), Total Fosfat (sebagai P) dan Fecal Coliform. Sampel kualitas air diambil pada 9 titik sungai yaitu 1) Sungai Serang, 2) Sungai Papah, 3) Sungai Papak, 4) Sungai Sudu, 5) Sungai Nagung, 6) Sungai Tedunan/Gede, 7) Sungai Tinalah, 8) Sungai Ngrancah, dan 9) Sungai Pening. Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter SO2 dan NO2 yang diambil di kawasan perkantoran, industri, pemukiman, dan transportasi. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan.

Perhitungan target dan realisasi IKLH tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air pada 9 sungai dengan 8 parameter, IKU diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara di 4 lokasi. IKL dihitung menggunakan data spasial / peta deliniasi.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan formulasi sebagai berikut:

IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL)

Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo beserta angka indeks dari ketiga parameter IKLH sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.96

IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
1.	2021	38	92,15	73,32	68,69

No.	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2.	2022	36	91,30	69,55	66,01
3.	2023	50,61	90,74	53,51	67,50
4.	2024	44,24	91,62	53,51	65,46
5.	2025	75,46	81,94	63,48	75.46

Sumber data : Ewalidata SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Sedangkan capaian IKLH Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.97

Capaian IKLH Tahun 2025

Indikator	Target	Capaian	Persentase
Indeks Kualitas Air (IKA)	71,90	75,46	104,95
Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,70	81,94	108,24
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,04	63,48	115,33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,75	75,46	108,19

Sumber Data: Ewalidata SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Capaian IKLH Tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKLH sudah memenuhi target yang ditetapkan. Faktor pendorong tercapainya IKLH adalah nilai realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang memenuhi target. Persentase capaian Indeks Kualitas Air tahun 2025 yaitu 75,46 (nilai kategori ‘sedang’). Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2025. Kondisi pemantauan air sungai yang dilakukan mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan air sungai. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas air sungai, di mana nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2025 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan kualitas air sungai selama 2 (dua) periode merepresentasikan kondisi pada musim penghujan dan musim kemarau. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 66 (enam puluh enam) titik pantau.

Target IKA-INA Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebesar 71,90, dengan nilai IKA-INA realisasi sebesar 75,46 di atas target yang ditetapkan. Nilai IKA-INA tahun 2025 sebesar 75,46 termasuk ke dalam kategori Sedang. Nilai IKA pada tahun 2024 merupakan nilai IKA-IP sebesar 44,24. Nilai IKA pada tahun 2025 merupakan nilai IKA-INA yang didapatkan hasil nilai IKA sebesar 75,46, dan

apabila dikonversi ke nilai IKA-IP menjadi sebesar 50,30. Apabila dibandingkan, nilai IKA-IP antara tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan dari 44,24 menjadi 50,30.

Tren kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 ke 2025 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas air sungai mengalami peningkatan. Namun, perlu diketahui bahwa tren tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi arus sungai dan faktor meteorologis pada saat dilakukan pemantauan, seperti debit aliran sungai, suhu, cuaca, kelembaban udara, dan lamanya penyinaran matahari. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan dan mempengaruhi kualitas air sungai.

Parameter yang dilakukan pengujian dalam perhitungan nilai IKA, meliputi: a) pH; b) *Dissolved Oxygen* (DO); c) *Total Suspended Solid* (TSS); d) *Total Phosphate* (TP); e) Nitrat; f) *Chemical Oxygen Demand* (COD); g) *Biological Oxygen Demand* (BOD); dan h) *Fecal Coliform*. Parameter yang dominan pada beberapa titik pantau melebihi baku mutu lingkungan terhadap hasil pemantauan tahun 2025, di antaranya meliputi *Total Phosphate* (TP) dan *Fecal Coliform*.

Sumber pencemar air sungai *Total Phosphate* bisa berasal dari sumber alami dan buatan manusia. Sumber alami *Total Phosphate* dapat berasal dari pelapukan batuan fosfat geologis, endapan atmosfer, dan pembusukan tanaman. Sumber buatan manusia *Total Phosphate* dapat berasal dari pupuk, kotoran hewan peliharaan, limpasan pertanian dan perkotaan, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, serta sistem septik yang rusak atau kelebihan muatan. Sedangkan, sumber pencemar air sungai *Fecal Coliform* dapat berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Limbah domestik dapat berasal dari: a) Limbah cair dari buangan manusia, seperti tinja dan urin; b) Limbah cair dari kegiatan rumah tangga, seperti mencuci, mandi, dan memasak; dan c) Limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa diolah. Limbah pertanian berasal dari sisa-sisa pupuk organik dari hasil pertanian yang masuk ke sungai irigasi. Kotoran hewan dapat berasal dari: a) Kotoran hewan yang mencemari air minum yang tidak didesinfeksi dengan baik; dan b) Kotoran hewan yang masuk ke sungai melalui pembuangan limbah langsung.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2025. Metode yang digunakan pada pemantauan kualitas udara ambien pada tahun 2025, meliputi Metode *Passive Sampler* untuk parameter Nitrogen Dioksida (NO2) dan Sulfur Dioksida (SO2) serta Metode *Satelite* untuk parameter *Particulate Matter* 2.5 (PM2.5). Pemantauan kualitas udara ambien yang dibiaya dengan APBN dan APBD dilakukan selama 2 (dua) periode yang dilakukan pada beberapa titik lokasi pemantauan di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien untuk APBN dilakukan sebanyak 4 (empat) titik pantau per periode pemantauan serta untuk APBD dilakukan sebanyak 4 (empat) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 8 (delapan) titik pantau.

Target IKU-INA Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebesar 75,70, di mana nilai IKU-INA realisasi sebesar 81,94 masih berada di atas target yang ditetapkan. Nilai IKU-INA tahun 2025 sebesar 81,94 termasuk ke dalam kategori Sedang. Nilai IKU pada tahun 2024 merupakan nilai IKU-IEU sebesar 91,62. Nilai IKU pada tahun 2025 merupakan nilai IKU-INA yang didapatkan hasil nilai IKU sebesar

81,94, dan apabila dikonversi ke nilai IKU-IEU menjadi sebesar 93,53. Apabila dibandingkan, nilai IKU-IEU antara tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan dari 91,62 menjadi 93,53.

Tren kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 ke 2025 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas udara ambien mengalami peningkatan. Namun, perlu diketahui bahwa tren tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi udara dan faktor meteorologis pada saat dilakukan pemantauan, seperti suhu, cuaca, kelembaban udara, arah angin, dan lamanya penyinaran matahari. Pada kondisi musim kemarau dispersi dan transportasi polutan di udara akan lebih masif dan menyebar atau terdispersi secara lebih luas daripada musim penghujan. Sedangkan, pada kondisi musim penghujan polutan akan ter-*scrub* (tertangkap) bersama air hujan yang jatuh ke tanah, sehingga kondisi polutan di udara akan mengalami pembersihan secara alami dan polutan tersebut akan jatuh ke bawah bersama air hujan (ter-*scrubbing*). Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas udara ambien, seperti kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan lamanya penyinaran matahari dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme dispersi dan transportasi kualitas ambien terhadap nilai Indeks Kualitas Udara (IKU).

Parameter yang dilakukan pengujian dalam perhitungan nilai IKU, meliputi: a) Nitrogen Dioksida (NO2); b) Sulfur Dioksida (SO2); dan c) *Particulate Matter* 2.5 (PM2.5). Pada pemantauan kualitas udara ini, tidak terdapat parameter yang dominan atau tidak ada parameter yang melebihi baku mutu lingkungan. Pada tahun 2025, kualitas udara ambien yang telah dilakukan pemantauan di Kabupaten Kulon Progo untuk Parameter Nitrogen Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), dan *Particulate Matter* 2.5 (PM2.5) untuk semua lokasi titik pemantauan masih berada di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VII.

Realisasi IKL (Indeks Kualitas Lahan) memenuhi target yang ditetapkan (capaiannya 108,19%). Nilai IKL Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebesar 63,48 dengan predikat “Sedang”. Nilai IKL Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mengalami perubahan dengan IKL tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tutupan vegetasi pada data spasial yang digunakan dalam perhitungan IKL. Data tutupan vegetasi wajib menggunakan data yang sudah didelineasi sehingga perhitungan nilai IKL sangat bergantung pada ketersediaan data spasial yang dapat menunjukan nilai luas, titik koordinat, dan visual peta pada setiap tutupan lahan sesuai dengan masing-masing kategori. Dibutuhkan kerjasama antar OPD dalam melakukan perhitungan dan pendataan terhadap kondisi tutupan lahan di Kabupaten Kulon Progo agar data yang tersaji dapat up to date, akurat, serta validasi satu data untuk seluruh OPD di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu menyediakan data dalam bentuk spasial membutuhkan tim khusus agar data yang tersaji memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Demikian juga setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo akan menimbulkan masalah lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang

mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Untuk meminimalkan dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha/kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa Persetujuan Lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan UKL/UPL juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dari pemilik usaha dan atau kegiatan/ pemrakarsa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungannya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan / atau kegiatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan pengawasan langsung dilakukan oleh personil DLH yang mendatangi langsung lokasi usaha/ kegiatan, sedangkan kegiatan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan dokumen maupun pengawasan yang dilakukan bersama dengan OPD lain.

Selain melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan juga dilaksanakan penanganan kasus lingkungan yang merupakan laporan pengaduan masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan tersebut. Pada Tahun 2025 terdapat 13 laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya timbulan sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya pengurangan sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan pengurangan sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kulon Progo terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan sumber daya alam dalam pengelolaan sampah dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi Pengelolaan Sampah, Pembinaan Sekolah dalam Pengelolaan Sampah dan Pembinaan Kelompok Peduli Lingkungan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Selain itu pemerintah daerah mendorong pembentukan 1 Bank Sampah Induk di setiap Kalurahan dan 1 Bank Sampah Unit di setiap Padukuhan, dan kepada pelaku usaha dihimbau menerapkan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025. Tabel berikut ini merupakan kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang melakukan pengelolaan sampah.

Tabel 2.98

Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No.	Kapanewon	2023		2024		2025	
		Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
1	Temon	6	1	7	1	7	1
2	Wates	17	5	18	5	19	5
3	Panjatan	22	-	22	-	25	-

No.	Kapanewon	2023		2024		2025	
		Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
4	Galur	3	1	3	1	17	1
5	Lendah	5	-	6	-	6	-
6	Sentolo	13	3	13	3	13	3
7	Pengasih	29	1	30	1	29	1
8	Kokap	7	-	7	-	6	-
9	Girimulyo	5	-	5	-	2	-
10	Nanggulan	7	2	7	2	6	2
11	Kalibawang	6	-	7	-	3	-
12	Samigaluh	6	1	7	1	7	1
	JUMLAH	**126**	**14**	**132**	**14**	**140**	**14**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah kelompok masyarakat pengolah sampah sebagaimana tabel di atas selama periode 2023-2025 terus mengalami peningkatan, bank sampah yang semula 126 unit pada Tahun 2023 bertambah menjadi 132 pada Tahun 2024 dan bertambah lagi menjadi 140 pada tahun 2025. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berjumlah 14 pada Tahun 2023 namun pada tahun 2024 dan 2025 tidak ada penambahan. Dengan kondisi tersebut perlu terus dilakukan upaya untuk mendorong agar kelompok-kelompok pengolah sampah dapat aktif dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok pengolah sampah di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan bidang lingkungan hidup kepada bank sampah, sekolah, perumahan, perkantoran, dan puskesmas baik oleh pemerintah maupun diinisiasi oleh masyarakat.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Kulon Progo sudah mencakup semua kapanewon dengan luas area pelayanan 238,01 km2 atau 40.60 % dari luas area Kabupaten Kulon Progo 586,25 km2. Belum semua kalurahan di Kabupaten Kulon Progo terjangkau oleh pelayanan persampahan, pelayanan masih terbatas pada wilayah perkotaan di tiap kapanewon. Dari jumlah Pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh UPT Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo berasal dari berbagai sumber sampah. Sumber sampah yang terlayani meliputi kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan komersial, industri, rumah makan, rumah sakit, sekolah, pasar, terminal, taman publik dan jalan umum.

Berdasarkan hasil evaluasi jakstrada tentang kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 jumlah timbulan sampah sebesar 80.286,09 ton/tahun. Dari jumlah tersebut jumlah sampah yang terkelola sebesar 43.907,91 ton/tahun atau 54,69% yang terdiri dari kegiatan Pengurangan sampah sebesar 17.918,34 ton/tahun atau 22,32% dan Penanganan Sampah sebesar 25.989,57 ton/tahun atau 32,37%. Data tersebut sesuai Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan sudah tervalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA adalah dengan optimalisasi pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, optimalisasi pemilahan sampah di TPS/TPS3R sehingga sampah yang dikirim ke TPA hanya tinggal residu saja yang berkisar 20% dari

timbulan sampah di sumber sampah. Pengembangan TPS3R agar mampu mengolah sampah hingga residunya juga perlu terus dilakukan.

Pertambahan penduduk yang pesat serta perubahan gaya hidup (lifestyle) masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat dan beragam jenisnya. Timbulan sampah yang tidak terangkut atau tidak segera ditangani akan menyebabkan bau yang tidak sedap, kotor dan mengganggu pemandangan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber penyakit. Telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat yakni menghendaki kualitas lingkungan yang sehat, namun di lain pihak tidak mau berkompromi apabila lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan lahan pengolahan sampah. Ini yang sering dikenal sebagai NIMBY (not in my backyard) syndrome. Keadaan ini jika tidak ditangani secara memadai, dapat menimbulkan gangguan dan kerugian pada lingkungan yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat (public health). Selain pertumbuhan alami, adanya berbagai kegiatan strategis di Kulon Progo seperti bandara dan pengembangan kawasan industri akan semakin meningkatkan timbulan sampah yang harus ditangani. Sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan pemrosesan sampah pada segmen hulu dengan upaya mengurangi sampah, mengembangkan bank sampah, pembangunan TPS 3R di setiap kawasan serta TPST pada kawasan strategis. Upaya ini akan membantu dalam mengurangi timbulan sampah dan dampaknya secara luas kepada masyarakat. Struktur sarana persampahan sebagaimana tergambar pada gambar di atas.

Pada Tahun 2025 Pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Telah terdapat Komitmen bersama antar perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan sampah. Pengelolaan persampahan terintegrasi dari hulu-hilir dilaksanakan secara kolaboratif melalui program/kegiatan pada beberapa perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, meliputi intervensi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, di masyarakat/sekolah, di KSM Pengelola TPS 3R dan di TPA Banyuroto.

Sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2025 terkait pengelolaan sampah baik itu pengurangan maupun penangan menjadi satu di Dinas Lingkungan Hidup dengan bergabungnya UPT. Persampahan dan Pertamanan. Upaya-upaya pengadaan peralatan baik di TPS 3R maupun di TPA Banyuroto dibarengi upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Tahun 2009). Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya pihak-pihak yang saling terkait untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat dan dunia usaha/swasta, karena masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan

sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prestasi yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.99

Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Nama	Prestasi	Institusi Pemberi Penghargaan
1	SD N Ngebung Beran	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
2	SD N Depok	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
3	SD N I Sentolo	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
4	SD N II Jonggrangan	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
5	SMP N II Girimulyo	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
6	SDN Mejing	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
7	SDN Kembang	Sekolah Adiwiyata	Gubernur DIY
8	Kalurahan Kebonharjo	Proklim	Gubernur DIY
9	Padukuhan Klewonan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates Kab. Kulon Progo, DIY	Proklim Utama Tropi	Kementerian LH RI
10	Padukuhan Graulan, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates Kab. Kulon Progo, DIY	Proklim Utama Sertifikat	Kementerian LH RI
11	Padukuhan Kembang, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo, DIY	Proklim Utama Sertifikat	Kementerian LH RI
12	SD N Trisik	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian LH RI
13	MAN 3 Kulon Progo	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian LH RI

Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan akurasi data, mulai tahun 2014 dilakukan perekaman data kependudukan dengan program KTP-el. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat. Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 319.126 penduduk melakukan perekaman KTP Elektronik, namun realisasinya melebih target yaitu 346.166 penduduk, untuk tahun 2025 dengan target sebesar 347.341 penduduk tercapai 349.726 penduduk.

Pada tahun 2022 rasio penduduk ber-KTP mencapai 98,80, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, rasio penduduk ber KTP meningkat menjadi 99,32, kemudian pada tahun 2024 tercatat semakin meningkat menjadi 99,46 dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 99,52. Data jumlah penduduk ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100

Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Rasio penduduk ber KTP per satuan wajib KTP**	**98,43**	**98,80**	**99,32**	**99,46**	**99,52**
	a. Jumlah penduduk usia>17 tahun atau telah menikah ber KTP	337.272	338.560	342.125	346.467	349.726
	b. Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	342.669	342.669	344.474	348.351	351.388

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026

Layanan pencatatan sipil adalah layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, dan pengesahan pengakuan anak. Layanan ini merupakan upaya melakukan tertib administrasi untuk pengakuan kewarganegaraan. Rasio bayi berakte dari tahun 2021 sampai dengan 2023 secara umum menunjukkan peningkatan yaitu dari 93,88% pada tahun 2021 meningkat menjadi 100% pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan yakni pada angka 99,99%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Pada tahun 2025, capaian pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan perkembangan yang relatif baik, terutama pada perekaman KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran. Perekaman KTP-el terealisasi sebanyak 349.726 dari target 351.388, sehingga capaian berada sangat dekat dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, kepemilikan akta kelahiran mencapai 100.191 dari target 97.794, atau melampaui target yang direncanakan. Informasi umum tentang IKD dan pemanfaatan data kependudukan memang menjadi bagian dari layanan administrasi kependudukan yang lebih luas di Dukcapil.

Capaian kepemilikan KIA sebanyak 78.643 dari target 78.719 belum sepenuhnya tercapai. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KIA, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Aktivasi IKD mencapai 25.467 dari 183.423 dengan persentase 13,88%

Pemanfaatan data kependudukan terealisasi 12 dari 41 target, yang menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan data masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama dan perluasan akses layanan. Pada aspek pemanfaatan data kependudukan, capaian layanan terus menunjukkan peran penting dalam mendukung kebutuhan instansi pengguna melalui akses data yang dikelola secara resmi oleh Dukcapil. Pemanfaatan data kependudukan merupakan bagian dari layanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada lembaga pengguna melalui hak akses yang sah.

Dalam bidang pencatatan sipil tahun 2025, capaian kepemilikan akta kematian telah memenuhi target, yaitu 46.091 dari 46.091. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pencatatan peristiwa kematian telah berjalan optimal dan sesuai sasaran. Untuk kepemilikan akta perkawinan, realisasi mencapai 209.680 dari target 229.756, sedangkan kepemilikan akta perceraian mencapai 6.839 dari target 8.137. Kedua capaian tersebut masih belum mencapai target, sehingga perlu penguatan layanan jemput bola, validasi data, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa penting secara tertib dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menjadi baseline penting dalam memetakan target penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2027. Dengan

mengacu pada arah kebijakan dan sinkronisasi perencanaan, hasil capaian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat strategi pelayanan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi layanan Dukcapil pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2025, capaian pendaftaran penduduk menunjukkan hasil yang relatif baik. Perekaman KTP-el terealisasi 349.726 dari target 351.388, sedangkan kepemilikan KIA mencapai 78.643 dari target 78.719 dan belum tercapai sepenuhnya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat. Aktivasi IKD tercatat sebanyak 7.226 dan pemanfaatan data kependudukan terus mendukung layanan instansi pengguna. Pada pencatatan sipil, kepemilikan akta kelahiran mencapai 100.191 dari target 97.794, akta kematian 46.091 dari 46.091, akta perkawinan 209.680 dari 229.756, dan akta perceraian 6.839 dari 8.137. Capaian ini menjadi baseline penting untuk penyusunan target dan penguatan layanan administrasi kependudukan tahun berikutnya

Tabel 2.101

Layanan Catatan Sipil Tahun 2021–2025

Pelayanan Akta Catatan Sipil	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
Rasio bayi berakte	**93,88**	**100**	**100**	**99,99**	**99,99**	**Persen**
a. Jml bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran	4.539	5.594	5.446	8.255	7.463	Orang
b. Jml keseluruhan bayi lahir	4.835	5.594	5.446	8.256	7.464	Orang
Rasio perkawinan berakte nikah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Persen**
a. Jumlah pasangan nikah berakte nikah	248	152	110	110	129	Pasangan
b. Jumlah pasangan nikah bersurat nikah	2.942	2.503	2.432	2.249	2.012	Pasangan
c. Jumlah keseluruhan pasangan nikah	3.190	2.655	2.542	2.359	2.141	Pasangan
d. Akta Perceraian	25	18	13	17	16	Pasangan
e. Akta Kematian	8.132	5.119	4.476	6.993	7.944	Orang
f. Pengakuan dan pengesahan anak	2	9	3	4	5	Orang
g. Pengangkatan Anak	12	17	15	13	26	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2026

2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan. Pemerintah Desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102

Jumlah Bantuan Keuangan Kalurahan (Desa) dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Jenis Bantuan	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Alokasi Dana Desa	67.381.014.000	66.905.865.901	68.437.004.702	72.484.397.000	74.213.755.400
Bagi hasil pajak dan retribusi	9.628.009.533	11.778.750.925	10.341.727.086	13.495.225.365	16.296.852.044
Jumlah	**77.009.023.533**	**78.684.616.826**	**78.778.731.788**	**85.979.622.365**	**90.510.607.444**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan tabel tersebut bantuan keuangan kepada kalurahan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2020 tercatat dalam kondisi tertentu, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, alokasi dana desa kembali mengalami peningkatan seiring dengan normalisasi kebijakan fiskal daerah.

Sementara itu, komponen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah menunjkukan trend fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, mengingat besaran penyaluran kepada kalurahan didasarkan pada capaian pendapatan daerah pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, baik Alokasi Dana Desa maupun bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah kembali mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan membaiknya kapassitas fiskal daerah serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan pendanaan bagi penyelenggaraan penerintah dan pembangunan ditingkat kalurahan. Sarana dan prasarana perkantoran kalurahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaraan penyelengaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan dan kondisi gedung kantor kalurahan yang memadai menjadi salah satu faktor penunjang efektifitas kinerja pemerintahan di tingkat kalurahan. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat gedung kantor kalurahan secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.103

Kondisi Kantor Kalurahan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kapanewon	Tahun 2025		
		Baik	Sedang	Rusak ringan
1	Temon	7	8	0
2	Wates	5	1	1
3	Panjatan	9	2	0
4	Galur	6	1	0
5	Lendah	6	0	0
6	Sentolo	6	2	0
7	Pengasih	6	1	0
8	Kokap	2	2	1
9	Girimulyo	4	0	0
10	Nanggulan	3	1	2

No.	Kapanewon	Tahun 2025		
		Baik	Sedang	Rusak ringan
11	Samigaluh	4	2	1
12	Kalibawang	3	1	0
	Jumlah	**61**	**21**	**5**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun 2025 kondisi gedung kantor kalurahan di kabupaten Kulon progo tercatat sebanyak 61 Kalurahan dalam kondisi baik 21 kalurahan dalam kondisi sedang. Dan 5 kalurahan dalam kondisi rusak ringan. Data tersebut menunjukan bahwa meskipun sebagaian besar kantor kalurahan telah berada dalam kondisi baik, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas sarana prasarana pada beberapa kalurahan guna mendukung optimalisasi pelayanan publik dan penyelengaraan pemerintahan.

Disisi lain mesikipun telah di tetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai landasan penyelenggraan pemerintahan kalurahan, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan kinerja pemerintahan kalurahan. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan penyelengaraan pemerintahan kalurahan yang dilakukan oleh aparat pengawasan kabupaten, yang menunjukan masih terdapat temuan administratrif maupun pengelolaan keuangan. Adapun hasil pelaksanaan pengawasan tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.104

Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Jenis Obyek Pemeriksaan	Pemeriksaan Penyelenggaraan PEMKAL
1.	2021	Jumlah Temuan	122
		Jumlah Rekomendasi	80
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	138
2.	2022	Jumlah Temuan	70
		Jumlah Rekomendasi	126
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
3.	2023	Jumlah Temuan	87
		Jumlah Rekomendasi	143
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
4.	2024	Jumlah Temuan	82
		Jumlah Rekomendasi	172
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
5.	2025	Jumlah Temuan	112
		Jumlah Rekomendasi	210
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan Laporan Hasil Review (LHR) masih terdapat banyak temuan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kalurahan. Jumlah temuan dan jumlah rekomendasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rata-rata kalurahan di Kabupaten Kulon Progo telah berada pada kategori Desa Maju berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi/lingkungan. Dimensi sosial meliputi indikator kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman. Dimensi ketahanan ekonomi mencakup keragaman produksi masyarakat, ketersediaan pusat perdagangan, akses distribusi/logistik, akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan, keberadaan lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah. Adapun dimensi ekologi meliputi kualitas lingkungan dan potensi maupun kerawanan bencana alam.

Indeks Desa Membangun tingkat kabupaten merupakan rata-rata capaian IDM seluruh kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. IDM menitikberatkan pada penguatan otonomi desa dan sejalan dengan kebijakan nasional dalam meningkatkan kualitas kehidupan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, serta komitmen pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai basis pembangunan.

Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2020 terdapat 4 desa berstatus Mandiri. Jumlah tersebut meningkat menjadi 13 desa Mandiri pada Tahun 2021, sementara desa berkembang menurun dari 26 desa pada Tahun 2021 menjadi 9 desa pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 tercatat 9 desa berkembang, 45 desa maju, dan 33 desa mandiri. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dengan 52 desa Mandiri dan 35 desa Maju serta tidak terdapat lagi desa berstatus berkembang. Pada Tahun 2024 jumlah desa Mandiri meningkat menjadi 72 desa dan desa Maju sebanyak 15 desa.

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah menetapkan Indeks Desa sebagai instrumen tunggal untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa sekaligus mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Indeks Desa ini secara bertahap menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur resmi yang diakui secara nasional dalam menentukan status perkembangan desa.

Pengukuran Indeks Desa dilakukan berdasarkan 6 dimensi, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, yang dijabarkan ke dalam 48 indikator. Setiap indikator diisi berdasarkan kondisi riil di lapangan guna menghasilkan pengukuran yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Implementasi Indeks Desa memberikan kepastian status kemandirian desa, mendukung penyelarasan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan dari tingkat pusat hingga desa, menyederhanakan birokrasi khususnya di tingkat desa, serta menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Selain itu, Indeks Desa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan kalurahan agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025, seluruh kalurahan di Kabupaten Kulon Progo telah berada pada kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, dengan rincian 83 kalurahan berstatus Mandiri dan 4 kalurahan berstatus Maju. Capaian ini menunjukkan tingkat kemandirian desa yang semakin kuat serta keberhasilan pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan dan

kemandirian desa secara berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan dukungan pembinaan pemerintah daerah terhadap penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan kalurahan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.105

Perkembangan Jumlah Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) / Indeks Desa (ID) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Kategori IDM / ID	2021	2022	2023	2024	2025
Mandiri	13	33	52	72	83
Maju	48	45	35	15	4
Berkembang	26	9	0	0	0

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas PMKal Dalduk & KB Kabupaten Kulon Progo, 2025

Terdapat 4 desa yang belum mencapai status Desa Mandiri terutama disebabkan karena pada Dimensi Ekonomi, yaitu terdapat NPL (*non perfoming loan*) yang sangat tinggi disebabkan kredit macet, desa-desa tersebut memiliki PADes yang relatif kecil untuk, disamping itu masih perlu ditingkatkan lagi kinerja pada Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa, hal ini ditunjukkan dengan kelembaaan yang tidak lengkap sehingga ada jabatan yg dirangkap, kesulitan dalam mencari direktur dan pengawas, di sisi lain diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengawas yang sudah ada.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dilaksanakan bekerjasama dengan TNI bertujuan untuk melakukan pembangunan desa secara terpadu antara TNI, aparat pemerintah dan masyarakat desa sehingga terwujud kemanunggalan TNI dengan masyarakat, terpenuhinya sarana prasarana desa serta terjaganya stabilitas keamanan di masyarakat. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (Sengkuyung) tahun 2025 tahap I dilaksanakan di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, tahap II di Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, tahap III di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, tahap IV di Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan. Nilai swadaya masyarakat cenderung fluktuatif namun mengalami penurunan di tahun 2025 baik dari persentase maupun dari nominal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.106

Swadaya Masyarakat Pembangunan Kalurahan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Dana (Rp.)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dana Program TMMD	875.000.000	875.000.000	1.835.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000
2.	Swadaya TMMD	514.388.500	331.200.000	880.775.000	382.868.000	406.580.000
3.	Persentase Swadaya Masyarakat	58,78%	37,85%	47,99%	37,17%	24,94%

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data diolah, 2025

Berdasarkan table di atas, kontribusi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program TMMD menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2021, swadaya masyarakat tercatat sebesar Rp514.388.500 atau 58,78 persen dari total Dana Program TMMD sebesar Rp875.000.000. Pada

Tahun 2022, kontribusi swadaya menurun menjadi Rp331.200.000 atau 37,85 persen dari total dana Rp875.000.000. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan nominal swadaya menjadi Rp880.775.000, namun secara persentase mencapai 47,99 persen dari total dana program yang meningkat signifikan menjadi Rp1.835.000.000.

Selanjutnya, pada Tahun 2024 swadaya masyarakat kembali menurun menjadi Rp382.868.000 atau 37,17 persen dari total dana Rp1.030.000.000. Pada Tahun 2025, nominal swadaya sedikit meningkat menjadi Rp405.580.000, namun secara persentase kembali menurun menjadi 24,04 persen. Penurunan persentase swadaya masyarakat dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya penurunan proporsi partisipasi masyarakat dibandingkan dengan total dukungan pendanaan program. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, perubahan pola partisipasi, maupun meningkatnya porsi pendanaan dari sumber pemerintah.

Secara umum, meskipun nilai nominal swadaya masih menunjukkan kontribusi yang signifikan, tren penurunan persentase partisipasi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan rasa memiliki terhadap program pembangunan, serta inovasi pola gotong royong menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Salah satu lembaga ekonomi kalurahan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian lokal adalah pasar desa. Keberadaan pasar desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah kalurahan melalui pengelolaan yang profesional dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi pasar desa terhadap perekonomian kalurahan, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan penguatan tata kelola pasar desa. Pembinaan tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelola, penataan administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset pasar agar mampu meningkatkan pendapatan asli kalurahan. Jumlah pasar desa yang telah mendapatkan pembinaan serta perkembangan lembaga ekonomi kalurahan di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.107

Jumlah Lembaga Ekonomi Kalurahan Tahun 2022-2025

No.	Uraian	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah BUMDes kondisi baik	53	52	56	56	56	56	58	39
2	Jumlah BUMDes seluruhnya	87	87	87	87	87	87	87	87
3	Pasar desa Kondisi baik	23	23	22	23	23	23	23	24
4	Pasar desa Seluruhnya	32	31	31	31	31	31	31	31

Sumber data : SIPD Ewalidata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2025.

Tabel 2.108

Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kapanewon		Kalurahan	Nama Pasar	Luas (m^2)	Jml Pedagang (orang)	Kondisi
1	Temon	1	Temon Kulon	Kaligondang	498	75	kurang
		2	Kulur	Cikli	1000	68	Baik
		3	Glagah	Glagah	500	80	kurang
2	Panjatan	4	Krembangan	Krembangan	3150	25	Baik
		5	Panjatan	Panjatan	323	34	Baik
3	Lendah	6	Gulu rejo	Gegulu	1.500	7	kurang
4	Sentolo	7	Tuksono	Nyonyol	2.520	186	Baik
		8	Srikayangan	Panjul	300	16	Kurang
		9	Salamrejo	Watu ombo	1.400	90	Baik
		10	Sentolo	Sentolo	5000	300	Baik
5	Pengasih	11	Kedungsari	Milir	1.588	90	Baik
		12	Margosari	Gunung Gondang	1306	44	Baik
		13	Sendangsari	Sanur	3.175	12	Baik
6	Kokap	14	Hargorejo	Kokap	1.700	95	Baik
		15	Hargorejo	Sidodadi	700	15	Kurang
		16	Kalirejo	Gunung Ijo	1455	0	off
7	Girimulyo	17	Jatimulyo	Cublak	1.000	57	Baik
		18	Jatimulyo	Jonggrangan	1.000	57	Baik
		19	Jatimulyo	Pringtali	1.000	32	Kurang
8	Nanggulan	20	Donomulyo	Mudal	2894	166	Baik
		21	Kembang	Kembang	2899	28	Baik
		22	Wijimulyo	Krambilan	850	200	Kurang
		23	Banyuroto	Gunung Gamping	1.000	82	Baik
9	Samigaluh	24	Banjarsari	Tuk Bujel	675	22	Baik
		25	Banjarsari	Bendo	1162	25	Baik
		26	Sidoharjo	Munggang Rejo	700	23	Baik
		27	Pagerharjo	Plono	1.600	200	Baik
10	Kalibawang	28	Banjararum	Degan	400	30	Baik
		29	Banjarasri	Boro	1.200	57	Baik
		30	Banjarharjo	Demangan	200	40	Baik
		31	Banjaroyo	Jagalan II	4000	83	Baik

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data sementara tahun 2025

Pembinaan BUMDes pada Tahun 2020 difokuskan pada penguatan aspek legalitas dan tata kelola, meliputi penyempurnaan status badan hukum, penataan kelembagaan dan kepengurusan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai fondasi dalam membangun BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

Selanjutnya pada Tahun 2021 hingga 2023, pembinaan diarahkan pada pengembangan dan diversifikasi unit usaha, khususnya dengan mendorong BUMDes untuk mengembangkan usaha

produktif di luar sektor jasa keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi penyusunan dan pengajuan proposal kepada kementerian terkait serta penguatan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pada Tahun 2025, pembinaan BUMDes difokuskan pada penguatan peran dalam mendukung program ketahanan pangan di tingkat kalurahan. Hingga Tahun 2025, seluruh BUMDes di Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 87 BUMDes telah memiliki status badan hukum. Kondisi ini menunjukkan capaian signifikan dalam aspek legalitas kelembagaan sebagai dasar penguatan usaha dan tata kelola BUMDes. Adapun jumlah dan perkembangan BUMDes dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.109

BUMDes se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
1	Temon	Jangkaran	Binangun Sejahtera
2		Sindutan	Binangun Sindutan
3		Palihan	Binangun Sempulur
4		Glagah	Perumdes Kalurahan Glagah
5		Kalidengen	Binangun Sejahtera
6		Plumbon	Binangun Lancar
7		Kedundang	Binangun Kartika Utama
8		Demen	Perumdes Kalurahan Demen
9		Kulur	Binangun Bangkit Mandiri
10		Kaligintung	Binangun Dina Karya
11		Temon Wetan	Binangun Sejahtera
12		Temon Kulon	Binangun Anugrah
13		Kebonrejo	Binangun Sejahtera
14		Janten	Binangun Sejahtera Utama
15		Karang wuluh	Binangun Manunggal sejahtera
16	Wates	Karangwuni	Binangun Mitra Sejahtera
17		Sogan	Binangun Sumrigah Sogan
18		Kulwaru	Binangun Lestari
19		Ngestiharjo	Binangun Artha Jaya
20		Bendungan	Binangun Mekar Asri
21		Triharjo	Binangun Asri
22		Giripeni	Perumdes Kalurahan Giripeni
23	Panjatan	Garongan	Binangun Barokah
24		Pleret	Binangun Lancar Pleret
25		Bugel	Binangun Karya Murti
26		Kanoman	Binangun Kanoman
27		Depok	Binangun Sejahtera
28		Bojong	Binangun Dana Raharja
29		Tayuban	Binangun Sido Ono
30		Gotakan	Binangun Karya Raharja
31		Panjatan	Binangun Mandiri
32		Cerme	Binangun Sejahtera
33		Krembangan	Binangun Artha Mandiri
34	Galur	Banaran	Binangun migunani

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
35		Kranggan	Binangun Makaryo
36		Nomporejo	Binangun Ngudi Makmur
37		Karangsewu	Binangun Berdikari
38		Tirto rahayu	Binangun Tirta arta Tirtorahayu
39		Pandowan	Binangun Sejahtera
40		Brosot	Perumdes Binangun Arta Kemuning
41	Lendah	Wahyu harjo	Binangun
42		Bumirejo	Bumi Rahayu
43		Jatirejo	Binangun Jati Unggul
44		Sidorejo	Binangun Dadi Maju
45		Gulu rejo	Binangun Murakabi
46		Ngentakrejo	Karya Binangun Jaya
47	Sentolo	Demangrejo	Binangun Lancar
48		Srikayangan	Binangun Mujur
49		Tuksono	Binangun Tuksono
50		Salamrejo	Binangun Dana Reja Mandiri
51		Sukoreno	Binangun Artha Guna Mandiri
52		Kaliagung	Binangun Mitra Agung
53		Sentolo	Mandiri Sejahtera Sentolo
54		Banguncipto	Binangun Cipta Mandiri
55	Pengasih	Tawangsari	Binangun Tawangsari
56		Karangsari	Binangun Karangsari
57		Kedungsari	Lestari Mandiri
58		Margosari	Binangun Lumintu
59		Pengasih	Binangun Berkah Asih
60		Sendangsari	Binangun Sendang Artha
61		Sidomulyo	Cipta Makmur
62	Kokap	Hargomulyo	Binangun Mulia Abadi
63		Hargorejo	Binangun Makmur Mandiri
64		Hargowilis	Binangun Lestari
65		Kalirejo	Binangun Sejahera Abadi
66		Hargotirto	Binangun Mulyo
67	Girimulyo	Jatimulyo	Binangun Mulyo Sejati
68		Giripurwo	Binangun Giripurwo
69		Pendoworejo	Binangun Dana Utama
70		Purwosari	Binangun Purwosari
71	Nanggulan	Banyuroto	Binangun Mekar Jaya
72		Donomulyo	Binangun Sejahtera Mulya
73		Wijimulyo	Binangun Mitra Sejahtera
74		Tanjungharjo	Binangun Sejahtera
75		Jatisarono	Binangun Jatimara
76		Kembang	Binangun Kusuma
77	Samigaluh	Kebonharjo	Babar Anyar

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
78		Banjarsari	Binangun Ajar
79		Purwoharjo	Binangun Maju
80		Sidoharjo	Binangun Mandiri
81		Gerbosari	Binangun Sejahtera
82		Ngargosari	Binangun Sejahtera
83		Pagerharjo	Binangun Pagerharjo
84	Kalibawang	Banjararum	Binangun Arta Arum
85		Banjarasri	Binangun Asri Sejahtera
86		Banjarharjo	Artha Sejahtera
87		Banjaroyo	Binangun Mitra Menoreh

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2025

BUMDes sebagai lembaga ekonomi kalurahan yang telah terbentuk di 87 kalurahan terus mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kapasitas pengurus, pendampingan dalam penyelesaian permasalahan kelembagaan dan unit usaha, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan BUMDes secara berkala.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi laporan keuangan, dapat diperoleh gambaran tingkat kesehatan BUMDes sebagai dasar dalam menentukan langkah pembinaan lanjutan. Meskipun laporan keuangan yang disampaikan masih bersifat unaudited, data tersebut tetap dapat digunakan sebagai informasi awal untuk menilai kondisi umum kinerja dan keberlanjutan usaha BUMDes. Perkembangan dan kondisi BUMDes Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

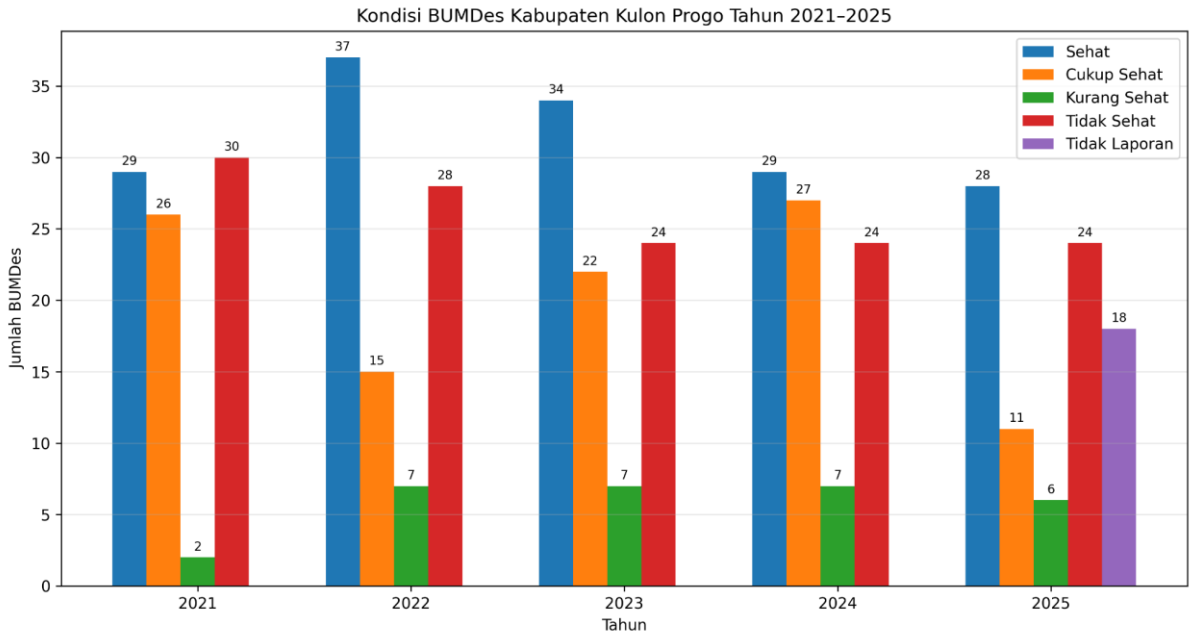

Sumber data : Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.37

Kondisi BUMDes Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tersebut, kondisi BUMDes di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika tingkat kesehatan usaha. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat BUMDes dengan kategori sehat yang relatif stabil, masih terdapat BUMDes dalam kategori kurang sehat dan tidak sehat, serta adanya BUMDes yang belum melaporkan kinerjanya. Kondisi ini menjadi perhatian dalam perencanaan pembinaan dan penguatan tata kelola BUMDes guna meningkatkan kinerja usaha dan akuntabilitas pengelolaan secara berkelanjutan, efektif, transparan, adaptif, dan berdaya saing.

Reformasi Kalurahan

Reformasi Kalurahan telah menjadi bagian dari Visi Misi yang tercantum di RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yakni "PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi". Dasar hukum dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan adalah Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2025 adalah telah diterbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 60/C/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Rencana strategi mendukung kegiatan/intervensi atas pelakasaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2025 berkaitan dengan pelaksanaan 9 (sembilan) kegiatan utama dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan dengan melibatkan OPD terkait serta dari Kapanewon dari unsur Kepala Jawatan Praja dan Kepala Jawatan Pelayanan dari 12 Kapanewon.

Hasil Assesment atau penilaian Tahunan 2025 oleh Kapanewon sudah dilaksanakan kemudian Rencana Aksi Kalurahan sudah disusun oleh Kalurahan dan sudah di input pada Aplikasi SINKAL. Tindaklanjut dari Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan utama pengembangan SAKIP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan menyusun Tabel Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Lurah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lurah Tahun 2025 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan. Sejumlah 87 Lurah dari 87 Kalurahan sudah membuat Perjanjian Kinerja Lurah Tahun 2025. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan sudah diundangkan.

Tindaklanjut pada kegiatan utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima yakni berkaitan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Jumlah reponden setiap Kalurahan : 20 (dua puluh) orang, dengan form kuesioner 9 (sembilan) indikator. Dan hasil yang didapatkan 12 Kalurahan berkategori Sangat Baik dan 75 Kalurahan berkategori Baik. Dengan nilai terendah 76,67 dan paling tinggi 95,97.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik telah ditetapkan. Dalam rangka implementasi Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima, Pemerintah Kalurahan selaku Penyelenggara Pelayanan Publik segera melakukan langkah langkah sebagai berikut: a. menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan; b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan. Rencana strategi mendukung kegiatan/intervensi atas pelakasaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2026 berkaitan dengan pelaksanaan 12

(duabelas) kegiatan utama dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Sedangkan di dalam Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) terdapat 5 (lima) kegiatan utama, yang mencakup: 1) Penguatan Kegiatan penanganan stunting; 2) Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; 3) Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan; 4) Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; dan 5) Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan.

Asesmen kegiatan RPMKal Tahun 2025 sudah dilakukan oleh seluruh Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Hasil dari Berita Acara Asesmen RPMKal tingkat Kapanewon Tahun 2025 menunjukkan bahwa 4 (empat) kalurahan memiliki nilai cukup, 61 (enam puluh satu) kalurahan dengan nilai baik, dan 22 (dua puluh dua) dengan nilai sangat baik.

Penggunaan dana BKK Reformasi Kalurahan (Rkal) Tahun 2026 untuk kegiatan RPMKal sebagian besar digunakan untuk kegiatan Penguatan Kegiatan penanganan stunting dan Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan. Sendangkan berdasarkan data Penerima Manfaat RPMKal terdapat beberapa kalurahan yang menganggarkan BKK RKal untuk Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan yaitu Hargomulyo, Hargotirto, Sidorejo, Donomulyo, Krembangan Sendangsari, Ngestiharjo, Giripeni yaitu untuk penyusunan Buku/Dokumen Profil Kebudayaan. Kalurahan yang menganggarkan untuk penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan antara lain Triharjo, Kranggan, Gulurejo, Donomulyo, dan Wijimulyo. Sedangkan, kalurahan yang menganggarkan kegiatan untuk Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian (BUMDes) adalah Giripeni, Nomporejo, Sidorejo, Banyuroto, Donomulyo, Wijimulyo, Jatisarono, dan Kembang.

Dalam penyusunan Rencana Aksi kegiatan RPMKal Tahun 2025 terddapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Penguatan Kegiatan penanganan stunting melalui Tenaga Ahli P3MD dalam kegiatan Pendampingan Rembug Stunting Kalurahan dan Pendampingan Musyawarah Kalurahan sebanyak 87 Kalurahan;
2. Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan dalam kegiatan Monitoring Pendampingan dan Latihan Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang dengan anggaran sebesar Rp 86.330.000 dari Dais;
3. Penguatan kegiatan untuk Pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan Pengembangan Kebudayaan melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan Monev menggunakan aplikasi Sikompas untuk pemantauan aktivitas Kelompok Pengelola Sampah setiap bulan;
4. Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian (BUMDes) melalui DPMKal Dalduk KB dalam kegiatan Monitoring laporan BUMDesa bulanan dan tahunan untuk 87 Kalurahan dengan anggaran APBD Rp 9.250.000; dan
5. Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan melalui Bapperida Kulon Progo dalam kegiatan Monev Kegiatan Koordinasi TKPKD, Monev RAT, TKPK Award, LP2KD sebanyak 4 (empat) kali

Progres pencapaian indikator RPMKal yaitu :

1. Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kalurahannya terdapat 42 Kalurahan;

2. Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan anak stunting terdapat 40 kalurahan,
3. Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju ada 36 kalurahan;
4. Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi IDM dengan kategori Kelas 1 dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000 adalah sejumlah 46 Kalurahan, dan (5) Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan IDM dengan kategori Kelas 1 dengan kategori 1 (satu) dengan nilai 0,7778 - 1,0000 adalah sejumlah 37 Kalurahan (*tahun ini menggunakan data Indeks Desa).

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada awal Tahun 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penajaman kebijakan melalui rebranding Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Program Bangga Kencana diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, tenteram, mandiri, dan bahagia melalui strategi: (1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), (2) Pengaturan Kelahiran, (3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, (4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, serta (5) Pengelolaan Kependudukan.

Selain itu, untuk mengerucutkan ketercapaian program Bangga Kencana, maka per tahun 2025 BKKBN melakukan internalisasi 9 Indikator Bangga Kencana ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.110

9 Indikator Bangga Kencana

No	Indikator	Dokumen Perencanaan	Data Baseline 2024 (BKKBN)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate (TFR)	RPJMD sudah ada	1,98	1,99	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 Tahun	IKD	7,30	6,8	6,3	5,8	5,4	5	4,6
3	Kebutuhan KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*)	IKD	83,69	84,3	85	85,7	86,3	87	87,7
4	iBANGGA	IKD sudah ada	64,30	65,2	66,1	67,1	68	69	70
5	Indeks Lansia Berdaya	IKD	55,88	56,7	57,5	58,2	59	59,7	60,4
6	Indeks Pengasuhan Remaja	IKD	90,46	91	91,5	92	92,5	93	93,5
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	IKD	64,77	67,75	68,7	70,7	72,8	75	77,2
8	Kehamilan Tidak Diinginkan/Direncanakan (KTD)	IKD	8,60	8,5	8,4	8,2	8,1	8	7,9
9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	IKD	67,00	68	69	70	71	72	73

Sumber data : Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, 2025

TFR Kulon Progo Tahun 2025 adalah 1,94 yang berarti sudah berada dibawah tingkat Replacement Level 2,1. Angka ini harus distabilkan agar tidak semakin turun tetapi tidak kembali naik, salah satunya melalui kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan upaya pengaturan

kelahiran. Upaya pengaturan kelahiran melalui Program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun terus diperkuat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan. Kemudahan pelayanan diberikan antara lain melalui fasilitas antar jemput calon akseptor KB, perluasan jangkauan pelayanan bersama mitra kerja, serta terjaganya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Peningkatan kualitas dan akses layanan tersebut berdampak pada meningkatnya kepesertaan KB aktif, yang tercermin dari nilai prevalensi peserta KB yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan semakin tingginya kesadaran dan partisipasi pasangan usia subur dalam mendukung program pengendalian kelahiran.

Prevalensi KB Aktif pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah peserta KB Aktif tercatat sebanyak 38.068 PUS dari total 61.576 Pasangan Usia Subur (PUS), sehingga prevalensi mencapai 61,82 persen. Persentase tersebut kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 69,26 persen, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta KB Aktif menjadi 43.687 PUS dari total 63.079 PUS. Pada tahun 2024, prevalensi relatif stabil pada angka 68,24 persen, dengan jumlah peserta KB Aktif sebanyak 43.399 PUS dari 63.599 PUS. Selanjutnya, pada tahun 2025 prevalensi kembali mengalami penurunan menjadi 64,55 persen, dengan jumlah peserta KB Aktif sebanyak 39.553 PUS dari total 61.272 PUS. Penurunan pada tahun 2025 ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan KB aktif, sehingga diperlukan penguatan strategi pelayanan, peningkatan kualitas konseling, serta optimalisasi peran mitra kerja dan kader dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program Keluarga Berencana.

Tabel 2.111

Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	PUS peserta KB Aktif (PA)	45.329	38.068	43.687	43.399	39.553
2	Pasangan usia subur (PUS)	60.840	61.576	63.079	63.599	61.272
	Prevalensi	**74,51**	**61,82**	**69,26**	**68,24**	**64,55**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2025

Capaian Peserta KB Aktif (PA) pada tahun 2025 menurun menjadi sebesar 64,55%, di mana sebagian besar masih didominasi oleh KB wanita. Dari gambaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa minat dan kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB masih kurang, walaupun sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Peserta KB Baru (PB) Metode Operasi Pria (MOP) mencapai target 100 %, dimana dari 20 kuota MOP yang tersedia sudah terfasilitasi. Namun tercapainya target PB MOP ini tidak memberikan dampak signifikan pada persentase PA KB Pria dikarenakan Penambahan PB KB Pria MOP tidak sebanding dengan PA KB Pria yang sudah Dropout batas usia. Masih banyak minat calon akseptor MOP yang belum terakomodasi karena keterbatasan kuota reward, sehingga langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan reward bagi peserta KB pria MOP perlu ditingkatkan agar kuota dan kepesertaan PA KB pria semakin baik.

PUS bukan peserta KB yang belum terlayani (unmet need) merupakan potensi bagi calon peserta KB. Tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo terdapat unmet need sebesar 7,01%. Penyebab capaian ini antara lain PUS bukan peserta KB (unmet need) usia 45 tahun keatas sudah sulit diajak ber-

KB karena sudah merasa tidak produktif lagi padahal masih ada kemungkinan hamil. Sementara itu, penurunan jumlah peserta KB Aktif tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah pasangan usia subur dan peningkatan bukan peserta KB (unmet need), sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.112

PUS Bukan Peserta KB (*Unmet Need*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pasangan usia subur (PUS)	Pasangan	60.840	61.576	63.079	63.599	61.272
2	PUS bukan peserta KB *(Unmet Need)*	Orang	5.409	13.050	7.239	5.622	10.634
	-Ingin anak tunda (IAT)	Orang	2.406	8.934	1.809	1.374	1.165
	-Tidak ingin anak lagi (TIAL)	Orang	3.003	4.575	5.430	4.248	3.128
	Persentase	**Persen**	**8,89**	**21,19**	**11,48**	**8,90**	**7,01**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2025

Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 Tahun Kabupaten Kulon Progo berada pada angka 7,30 yang berarti jumlah kelahiran pada wanita usia 15 – 19 Tahun masih ditemukan. Hal ini terkait dengan kasus perkawinan usia dini yang berpotensi berdampak pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Dalam implementasinya di Kabupaten Kulon Progo, upaya sosialisasi dan edukasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dengan batas usia minimal perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penguatan intervensi program secara lebih terarah dan berkelanjutan. Data mengenai angka perkawinan usia dini di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum pada tabel berikut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi penanganan yang lebih efektif.

Tabel 2.113

Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Kapanewon	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini
Temon	264	11	280	4	296	1	150	9	126	6
Wates	176	2	186	3	147	9	287	2	251	8
Panjatan	263	7	225	0	212	8	194	4	179	6
Galur	195	4	197	1	171	5	158	0	141	4
Lendah	232	7	210	3	197	5	199	7	188	8
Sentolo	307	4	261	5	297	12	250	11	221	3
Pengasih	326	10	308	6	307	9	294	13	215	6
Kokap	251	1	208	2	208	5	173	2	174	9
Girimulyo	183	3	169	0	138	6	123	1	132	1
Nanggulan	132	4	143	4	174	3	146	5	136	3
Samigaluh	173	6	172	10	153	4	140	3	127	8
Kalibawang	170	6	144	3	130	5	135	5	122	5
Jumlah	**2.672**	**65**	**2.503**	**41**	**2.430**	**72**	**2.249**	**62**	**2012**	**67**

Sumber data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, 2025

Indikator iBangga, Indeks Lansia Berdaya, dan Indeks Pengasuhan Remaja dapat dimaksimalkan melalui upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK R) serta Satyagatra. Pembinaan kelompok bina keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.114

Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelompok UPPKA	Kelompok	450	360	330	339	339
2	Jumlah Anggota UPPKA	Orang	8.989	3.324	5.129	5.815	7.222
3	Kelompok BKB	Kelompok	291	290	290	310	313
4	Kelompok BKR	Kelompok	135	139	142	144	149
5	Kelompok BKL	Kelompok	137	149	155	165	173
6	PIK KRR	Kelompok	63	63	64	81	93

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2025

Cakupan kepesertaan keluarga yang mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL) sangat dinamis perkembangan tiap tahunnya menandakan kepesertaan anggota keluarga dalam mengikuti kegiatan tersebut juga dinamis. Selama masa pandemi covid kegiatan di kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA[PMD3.1] sempat berhenti beberapa kali, menyesuaikan kondisi saat itu, Namun seiring berjalannya waktu kegiatan dapat kembali berjalan dengan menerapkan prokes serta dalam kelompok kecil dan waktu yang singkat.

Dari tabel di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok UPPKA. Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan dengan mengeluarkan anggota yang sudah tua dan tidak aktif dalam kegiatan dari kelompok dan juga penurunan minat dari peserta KB aktif dalam mengikuti kelompok UPPKA. Demikian juga untuk data kelompok BKB, BKR, dan BKL. Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana) yaitu remaja yang dapat mempraktikan pola hidup sehat, seperti: terhindar dari resiko pergaulan bebas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, memiliki life skill atau keterampilan hidup dan remaja GenRe harus bisa dalam model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKA. Tujuan dibentuknya kelompok UPPKA untuk peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pembinaan kelompok UPPKA dengan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen pengelolaan kelompok serta mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit kencana dari Bank Pasar Kulon Progo, Kredit Asosiasi Kelompok UPPKA “AKU Sejahtera” dari Perwakilan BKKBN DIY, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta mengikuti pameran baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta pendampingan dalam pelatihan keterampilan.

Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKA semakin menurun baik jumlah maupun persentasenya. Hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya program dari sektor lain yang

turut menyasar keluarga. Namun demikian kualitas anggota UPPKA yang ada adalah yang terbaik, karena anggota kelompok yang sudah tidak aktif lagi akan dikeluarkan. Dengan demikian, yang terdaftar sebagai anggota adalah benar benar aktif sebagai anggota kelompok UPPKA.

Selain itu, upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dapat dilakukan melalui penilaian lomba. Lomba Capaian Kinerja Program Bangga Kencana, Lomba Apresiasi Tenaga Lini Lapanngan yang terdiri dari katergori Penyuluh KB ASN dan Kader IMP. Berbagai Workshop dan Advokasi Bangga Kencana juga harus tetap dilaksanakan untuk mendukung kualitas stakeholder/mitra kerja dalam Proses KIE Program Bangga Kencana.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan Kampung KB sebagai basis integrasi pelaksanaan program di tingkat pedukuhan/kalurahan. Kampung KB menjadi wahana strategis dalam pelaksanaan kegiatan Program Bangga Kencana secara komprehensif, meliputi 4 Seksi pada Pokja yang ada. Seksi tersebut terdiri atas seksi Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan yang mengurusi Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) dan perlindungan. Kedua, Seksi perubahan perilaku keluarga yang mengurusi kelompok kegiatan, dapur sehat atasi stunting (DASHAT), kelompok motivasi, agama, pendidikan, sosial budaya dan kasih sayang. Ketiga, seksi penignkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga yang mengurusi tim pendamping keluarga, kesehatan reproduksi dan ekonomi. Keempat, seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat yang mengurusi pelestarian lingkungan.

Sampai dengan Tahun 2018 telah terbentuk 23 Kampung KB, dimana 10 di antaranya berada pada lokus desa stunting. Pada Tahun 2019 dilakukan penambahan 3 Kampung KB, yaitu di Kalurahan Banjararum, Gulurejo, dan Sukoreno. Selanjutnya pada periode Tahun 2020-2022, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Kampung KB mengalami keterbatasan akibat pandemi Covid-19, sehingga belum terdapat penambahan lokasi baru.

Pada Tahun 2022 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap kalurahan/kelurahan membentuk Kampung KB sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui integrasi Program Bangga Kencana dan pembangunan lintas sektor. Pembentukan Kampung KB dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai wadah koordinasi dan penggerak pelaksanaan program di tingkat kalurahan.

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kampung KB, pada setiap lokasi telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung KB yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Kampung KB pertama, yaitu Kampung KB Tegiri 2, Kalurahan Hargowilis, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 102/A/2016. Selanjutnya, penguatan Pokja Kampung KB pada Tahun 2017 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 355/A/2017. Pada Tahun 2020 diterbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 362/A/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Kulon Progo sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 843.4/2879/SJ Tahun 2020 tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, nomenklatur Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) disesuaikan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

Menindaklanjuti Keputusan Bupati tersebut, pada tahun 2025 seluruh kalurahan/kelurahan di wilayah Kabupaten Kulon Progo sudah terbentuk Kampung Keluarga Berkualitas.

Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menekan angka unmet need, meningkatkan kepesertaan keluarga berencana, serta berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Selain pengembangan berbagai kegiatan Program Bangga Kencana dan sinergi lintas sektor, di Kampung Keluarga Berkualitas juga dikembangkan Rumah Data Kependudukan. Rumah Data Kependudukan berfungsi sebagai pusat data dan informasi serta basis perencanaan dan intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah. Rumah Data Kependudukan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Dataku” memiliki peran strategis dalam penyediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program di tingkat kampung. Sampai dengan Desember 2025, di Kabupaten Kulon Progo telah memiliki 72 Rumah Data Kependudukan.

Dalam rangka memperluas sosialisasi Program Bangga Kencana kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, telah dikembangkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan pada jenjang SMP dan SMA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai isu kependudukan, pembangunan keluarga, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak usia sekolah. Di Kabupaten Kulon Progo, terdapat 17 Lokus Sekolah Siaga Kependudukan yang terdiri dari 5 SSK tingkat SMP dan 12 SSK tingkat SMA/Sederajat. Pada masing-masing SSK, materi pendidikan kependudukan telah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan. Selain itu, beberapa SSK telah dibentuk Pojok Kependudukan sebagai sarana literasi dan pusat informasi kependudukan yang memanfaatkan ruang khusus di lingkungan sekolah.

Upaya sosialisasi Program Bangga Kencana juga dilaksanakan melalui pembinaan Saka Kencana Krida Kependudukan sebagai wadah pengembangan generasi muda dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana. Di Kabupaten Kulon Progo, pangkalan Saka Kencana berada di SMA Negeri 1 Pengasih.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun perkembangan kendaraan dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.115

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2021	2021	2022	2024	2025	
1.	**Sepeda Motor Roda 2 dan 3**	**166.478**	**172.974**	**177.063**	**182.188**	**184.926**	**Unit**
	a. Sepeda motor roda 2 (plat hitam)	164.883	171.380	175.527	180.718	184.528	Unit
	b. Sepeda motor roda 3 (plat hitam)	364	388	340	314	398	Unit

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2021	2021	2022	2024	2025	
	c. Sepeda motor roda 2 (plat merah)	1.202	1.184	1.167	1.127	1.127	Unit
	d. Sepeda motor roda 3 (plat merah)	29	22	29	29	29	Unit
2.	**Mobil Penumpang Bukan Umum (plat hitam)**	**16.695**	**17.686**	**18.234**	**18.987**	**19.260**	**unit**
	a. Sedan	1.717	1.739	1.652	1.578	1.613	unit
	b. Jeep	768	780	799	832	811	unit
	c. Minibus < 8	14.086	15.038	15.631	16.420	16.672	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	124	129	152	157	164	unit
	e. Bus > 30	-	-	-	-	-	unit
3.	**Mobil Barang Bukan Umum (plat hitam)**	**5.427**	**5.656**	**5.601**	**5.644**	**5.748**	**unit**
	a. Pick Up	4.058	4.267	4.236	4.310	4.401	unit
	b. Truck	1.369	1.389	1.365	1.334	1.347	unit
4.	**Mobil Penumpang Umum (plat kuning)**	**173**	**181**	**189**	**193**	**203**	**unit**
	a. Sedan	-	-	-	-	0	unit
	b. Jeep	-	-	-	-	0	unit
	c. Minibus < 8	31	33	38	39	43	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	133	137	137	134	138	unit
	e. Bus > 30	9	11	14	20	22	unit
5.	**Mobil Barang Bukan Umum (plat kuning)**	**394**	**407**	**384**	**403**	**420**	**unit**
	a. Pick Up	12	12	11	14	21	unit
	b. Truck	382	395	373	389	399	unit
6.	**Mobil Penumpang Umum (plat merah)**	**282**	**297**	**288**	**297**	**300**	**unit**
	a. Sedan	1	2	2	1	1	unit
	b. Jeep	9	8	4	8	5	unit
	c. Minibus < 8	262	273	269	272	276	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	10	9	9	10	12	unit
	e. Bus > 30	0	5	4	6	6	unit
7.	**Mobil Barang Umum (plat merah)**	**67**	**69**	**75**	**66**	**69**	**unit**
	a. Pick Up	44	43	51	41	44	unit
	b. Truck	23	26	24	25	25	unit
	JUMLAH	**189.516**	**197.270**	**201.834**	**207.778**	**210.926**	**unit**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Peningkatan kepadatan lalu lintas harian rerata (LHR) juga akan terjadi sebagai akibat beroperasinya Bandara YIA dan fasilitas pendukungnya. Hal ini perlu mendapat perhatian agar potensi ini tidak memperbesar angka kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo.

Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.37 di bawah. Lokasi kecelakaan yang paling sering terjadi di Ruas Jalan Jogja-Wates Km 19 – 20 Sukoreno Kapanewon Sentolo dan Jalan Wates – Purworejo Km 8 – 11 Kapanewon

Temon. Penyebab kecelakaan paling banyak didominasi oleh human error, minimnya keterampilan, kelelahan, rendahnya etika berkendara serta kurangnya pemahaman akan aturan berlalu lintas.

Tabel 2.116

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumah Kecelakaan	kejadian	615	958	877	870	844
2	Kerugian Materiil	rupiah	196.150.000	273.665.000	559.225.500	825.000.000	786.350.000
3	Jumlah Korban	orang	1.064	1.625	1.494	1.543	1.544
	- Meninggal	orang	68	89	62	74	77
	- Luka Berat	orang	3	0	1	2	4
	- Luka Ringan	orang	993	1.536	1.431	1.467	1.463

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan Polres Kulon Progo, 2026

Sementara itu terdapat titik-titik rawan kecelakaan lalu-lintas di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang harus diwaspadai. Pada lokasi tersebut tercatat sering terjadi kecelakaan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.117

Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo

No	Titik Rawan Kecelakaan
1.	Simpang 3 barat Jalan Bantar
2.	Simpang 3 utara SMPN 2 Sentolo
3.	Simpang 3 arah Perumahan Pongangan s/d S3 Ngeseng, Sentolo
4.	Depan SMPN 1 Sentolo
5.	Simpang 3 Dudukan Sukoreno Sentolo
6.	Simpang 3 Lapangan Sukoreno Sentolo
7.	Wora-wari, Kalimenur, Sentolo
8.	Depan SPBE Sentolo
9.	Depan SPBU Kalimenur, Sentolo
10.	Depan SMPN 2 Pengasih, Kedungsari, Pengasih
11.	SPBU Ngramang Pengasih
12.	BBVet s.d. SAMSAT baru Wates
13.	Simpang 3 Gadingan Wates
14.	SPBU Wates
15.	SMPN 5 Wates s.d. Kantor KPPN Wates
16.	Simpang 3 Dalangan
17.	Pasar Temon, Depan Kantor Kecamatan Temon
18.	Simpang 3 Mlangsen Temon
19.	Simpang 3 Pos PJR Congot
20.	Simpang 3 Sogan Wates (sudah dipasang APILL)
21.	Depan Bandara YIA Temon (sudah dipasang APILL)
22.	Jln Daendeles (Letter S Garongan)

No	Titik Rawan Kecelakaan
23.	Jln Daendeles (Simpang 3 Ngremang)
24.	Jln Kepek-Kalimanggis
25.	Simpang 4 Boro, Galur

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau Volume Capacity Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Dari 30 ruas jalan kabupaten yang diukur VC Rationya rata-ratanya adalah 0,10. Angka VC Ratio semakin kecil berarti semakin tinggi tingkat pelayanan jalannya. 30 ruas jalan kabupaten yang diukur terletak di Kapanewon Wates, Galur, Kokap, Panjatan, Lendah, Temon, dan Pengasih tersebut memiliki tingkat pelayanan jalan rata-rata A. Tingkat pelayanan jalan didasarkan pada faktor-faktor: kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, dan keamanan. Nilai A berarti: arus bebas, volume rendah, dan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki, sedangkan nilai B berarti: arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, volume menggunakan jalur untuk luar kota, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.118

VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
I	**Kapanewon Wates**		
1.	Jl. Tunjungan	0,14	A
2.	Jl. Kulwaru-Kuwirun	0,09	A
3.	Jl. Toyan-Granti	0,13	A
4.	Jl. Perwakilan II	0.306	B
5.	Jl. Mandung II	0,338	B
6.	Jl.Mandung I	0,369	B
7.	Jl. Terbah I	0,084	A
8.	Jl. Terbah II	0.123	A
9.	Jl. Suparman II	0,246	B
10.	Jl. Terbah Tunjungan	0,104	A
11.	Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati I	0.029	A
12.	Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati II	0,025	A
13.	Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati III	0,15	A
II.	**Kapanewon Galur**		
1.	Tegal Buret-Pasar Sewu Galur	0,15	A
2.	Cangakan-Ngremang	0,16	A
3.	Tirtorahayu-Karangsewu	0,10	A
4.	Prembulan-Boro	0,14	A
5.	Karangsewu-Pathuk	0,09	A
6.	Kalibuntung-Kepanjen	0.012	A

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
7.	Kranggan - Pulopete I	0,039	A
III.	**Kapanewon Kokap**		
1.	Hargorejo-Gunung Pentul	0,06	A
2.	Klepu-Anjir	0,07	A
3.	Pripih-Jurangkah	0,12	A
4.	Kokap-Pripih	0,08	A
5.	Pripih - Tangkisan	0,041	A
6.	Sindon - Anjir	0,030	A
IV.	**Kapanewon Panjatan**		
1.	Cicikan-Pantai Bugel	0,08	A
2.	Bugel-Karangwuni	0,10	A
3.	Cerme-Demangan	0,09	A
4.	Gotakan-Cerme	0,11	A
5.	Ngepos -Depok	0,023	A
6.	Beran - Ngepos	0,015	A
V.	**Kapanewon Lendah**		
1.	Botokan-Bangeran	0,09	A
2.	Sidorejo-Sumur Muling	0,08	A
3.	Diran-Karangasem	0,06	A
4.	Sedan-Diran	0,06	A
5.	Sudo-Kasihan	0,07	A
6.	Brosot - Botokan	0,147	A
7.	Prembulan- Jimatan	0,050	A
8.	Gulrejo - Kradenan		
9..	Cbubg - Botokan	0,018	A
10.	Sumberejo- Jatirejo	0,015	A
VI	**Kapanewon Temon**		
1.	Jangkaran-Pantai Congot	0,12	A
2.	Demen-Girigondo	0,10	A
3.	Palihan-Glaheng	0,09	A
4.	Weton-Dumpoh	0,08	A
5.	Pripih-Sangon	0,08	A
6.	Girigondo - Tonobakal	0,125	A
7.	Sindutan - Karangwuluh	0,037	A
8.	Sinduutan- Sambi	0,148	A
VII	**Kapanewon Pengasih**		
1.	Kalinongko-Cerme	0,13	A
2.	Clereng-Girinyono	0,14	A
3.	Milir-Krembangan	0,16	A
4.	Margosari-Kepek	0,15	A
5.	Dayakan-Pengasih	0,060	A

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
6.	Tambak- Kulur	0,236	B
VIII.	**Kapanewon Samiigaluh**		
1.	Plono - Nglinggo	0,030	A
2.	Nglinggo- Tritis	0,014	A
3.	Nglinggo- Suroloyo	0.015	A
IX.	**Kapanewon Girimulyo**		
1.	Watu Murah - Giripurwo	0,018	A
2.	Watu Murah - Nogosari	0,027	A
X.	**Kapanewon Kalibawang**		
1,	Degan -Nogosari	0,079	A
2.	Kepiton- Boro	0,088	A
3.	Bendo - Bolon	0,074	A
4.	Bogo - Boro	0,086	A
XI.	**Kapanewon Nanggulan**		
1.	Tanggulangin- Turus	0,123	A
2.	Nanggulan- Girimulyo	0.162	A
3.	Janti- Tegalsari	0,047	A
XII.	**Kapanewon Sentolo**		
1.	Kalipapah- Donomulyo	0,058	A
2.	Srikayangan- Kradenan	0.093	A

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.119

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2025		2025
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	1.134	1.196	1.270	1.392	1440	4.352	buah	33,50
2	Cermin Tikungan	40	60	72	111	110	200	Unit	55

No.	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2025		2025
3	Traffic Light (APILL)	23	23	24	1	26	38	Unit	68,42
4	Warning Light	1	1	15	5	1	72	Unit	1,38
5	Guard Rail (Pagar Pengaman)	3.672	3.872	4.192	4.192	4.912	30.998	meter	15,85
6	Lampu Penerangan Jalan Umum	2.840	3.447	3.542	3.687	3.997	19.122	Ttik	20,90

Sumber data : SIPD Ewalidata, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan (desa) yang menjadi kewenangan kalurahan belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan kalurahan juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan Kalurahan bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Beberapa upaya yang dicoba dikembangkan adalah menginisiasi kemungkinan penyelenggaraan pelayanan LPJU dengan mekanisme KPBU. Namun hingga saat ini penyelenggaraan pelayanan LPJU melalui mekanisme KPBU tersebut belum terealisir karena masih dalam tahap kajian.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo secara topografis merupakan wilayah yang banyak memiliki perbukitan sehingga kontur jalan yang ada juga mengikuti kondisi tersebut sehingga terdapat banyak tanjakan maupun tikungan. Cermin tikungan sangat dibutuhkan pada kondisi jalan yang berkelok untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Gap antara kebutuhan akan marka dan marka yang ada secara eksisting masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pemenuhannya.

Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraannya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL). Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan,tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak

secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati hati.

Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kabupaten Kulon Progo yang sebagian besar berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (Guardrail) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing / jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan yang ada masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena baru tersedia sekitar 15% dari jumlah kebutuhan.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah Terminal Penumpang Tipe C yang saat ini jumlahnya ada lima. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Untuk menunjang keselamatan lalu lintas jalan terutama pada malam hari dibutuhkan lampu penerang jalan umum (LPJU). Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan yang menjadi kewenangan kalurahan belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU dari Dinas Perhubungan. Kebutuhan LPJU yang merupakan kewenangan kalurahan (PJU Lingkungan) dilakukan pemenuhannya dengan menggunakan alokasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

Secara umum, perlengkapan dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain dari alokasi anggaran APBD Kabupaten Kulon Progo juga diharapkan dapat dipenuhi dari sumber pendanaan yang lain seperti Dana Keistimewaan, APBD DIY, juga dari APBN melalui satker Kementerian Perhubungan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Jumlah penumpang angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Moda	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penumpang AKDP	orang/th	106.538	12.070	10.107	25.935	1.170
2	Penumpang AKAP	orang/th	14.271	287.878	262.345	184.744	12.982
3	Penumpang Angkutan Pedesaan	orang/th	92.968	82.525	73.560	61.220	14.729
	Jumlah	**orang/th**	**213.777**	**382.473**	**346.012**	**271.899**	**28.881**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2026, diolah

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penumpang angkutan umum, baik AKAP, AKDP, maupun angkutan perdesaan, menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kendaraan umum yang beroperasi sehingga mengakibatkan menurunnya pergerakan masyarakat. Rendahnya tingkat penggunaan angkutan umum oleh masyarakat juga berdampak pada menurunnya aktivitas dan kinerja usaha angkutan umum. Gambaran pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2021	2022	2023	2024	2025
1	A 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen- Pangkalan/Congot-Jangkaran-PP (Kop. Manunggal, Kop. Harapan)	20	30	34	32	28
2	2	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret-Karangwuni-Glagah-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
3	3	Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen-Glagah-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
4	4	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Kulwaru-Jetis-PP	-	-	-	-	
5	B 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
6	2	Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung-Cangakan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-PP	-	-	-	-	
7	3	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Degolan-Lendah-PP	-	-	-	-	
8	4	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-Ngentakrejo-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
9	C 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kutogiri-Plelen PP (Kop.Adhikarta,)	-	-	-	-	
10	2	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kalibiru/Kalingiwo-PP (Kop. Adhikarta) √	-	-	-	-	
11	3	Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-Kedungrejo-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
12	D 1	Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwok-Temon-Mlangsen-Pripih-Sangon-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
13	2	Term.Wates-Tambak-Jombokan-Kulur-Girigondo-Kebonrejo-PP (Kop. Menoreh, Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
14	3	Term.Wates-Dalangan-Jombokan-Kokap-PP	-	-	-	-	
15	4	Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-Kokap-PP (Kop. Mandiri)	6	12	13	13-	13
16	5	Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP (Kop. Yosawa)	-	-	-	-	
17	6	Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo-Sidowayah-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
18	7	Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
19	E 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
20	2	Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP (Kop. Menoreh)	2	-	-	-	

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2021	2022	2023	2024	2025
21	3	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-Girimulyo-Gua Kiskendo-PP (Perorangan)	-	-	-	-	
22	4	Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP (Kop. Yosawa)	-	-	-	-	
23	F 1	Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
24	2	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP (Kop. Adhikarta)	6	11	88	8	8
25	3	Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP (Kop. Asri)	-	-	-	-	
26	4	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-Gorolangu-PP	-	-	-	-	
27	5	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-Gorolangu-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	
28	6	Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono-PP/Perintis (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
29	7	Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP	-	-	-	-	
30	8	Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP	-	-	-	-	
31	9	Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-Bendungan-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	
32	10	Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen-Pripih-Tangkisan-PP(Kop. Manunggal)	-	-	-	-	
33		Sentolo-Brosot-PP (Kop. Tugu Potlot)	-	-	-	-	
		Jumlah	**34**	**53**	**56**	**54**	**49**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Selain trayek di atas, terdapat trayek pendukung Bandara berupa Shuttle Damri. Adapun rute dan pelayan shuttle Damri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122

Rute Layanan *Shuttle* Damri Pendukung Bandara Internasional Yogyakarta

Layanan Shuttle Bandara	
1	Imogiri – Terminal Palbapang - YIA
2	Stasiun Wojo - YIA
3	Grand Inna Hotel, Jogja - YIA
4	Hotel Sahid Jaya - YIA
5	Terminal Condong Catur - YIA
Pool Damri Yogyakarta - YIA	
1	Ambarketawang – YIA

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Dalam rangka memenuhi prasarana perhubungan maka diperlukan terminal yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).

Tabel 2.123

Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo

No.	Terminal	Fungsi	Luas	Kondisi
1	Wates	Tipe B	7.910	Telah menjadi kewenangan DIY
2	Brosot	Tipe C	700	Baik
3	Sentolo	Tipe C	1.000	Cukup baik
4	Kenteng	Tipe C	1.664	Cukup baik
5	Jagalan	Tipe C	1.000	Baik
6	Jangkaran	-	-	Ditutup

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Mengenai kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang yaitu fasilitas utama dan penunjang, prosentase jumlah fasilitas yang ada masih jauh dibawah jumlah fasilitas yang ideal dimana semua Terminal Tipe C memerlukan rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu. Untuk terminal Tipe C Kenteng, selain rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu juga diperlukan rehabilitasi Pos TPR.

Dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo, khususnya terkait jaringan transportasi darat, nampak jelas bahwa wilayah kabupaten dilintasi oleh jaringan rel kereta api. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, hingga tahun 2024, terdapat 27 perlintasan sebidang antara jaringan jalan dan rel kereta api. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 lokasi telah ditutup, 3 lokasi dijaga dinas perhubungan, 2 lokasi dijaga PT KAI sedangkan sisanya tidak dijaga. Upaya penutupan perlintasan sebidang terus dilakukan, yang terakhir pada tahun 2024 penutupan dilakukan di Hargorejo, Kokap yang merupakan perlintasan jalur kereta api dengan ruas jalan kampung.

Perlintasan sebidang Teteg Wetan telah dilakukan penutupan pada tahun 2022 dan telah dilakukan akses pengganti yaitu Underpass Kemiri. Sedangkan untuk perlitasan Teteg Kulon (Jln Moh Dawam) akan dilakukan sekaligus dengan perlintasan di Dukuh Karangsari, setelah selesai pembangunan flyover Triharjo- RSU Wates yang saat ini sedang dalam proses review DED dan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah disusun. Rencana pembiayaannya akan diusulkan untuk dapat didanai dari dana keistimewaan DIY, sebagai perwujudan dari SRS Pusat Kota Wates.

Tabel 2.124

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025

No.	Jenis	Satuan	Jumlah				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Angkutan Barang	unit	5.983	5.871	5.413	5.146	4.816
2	Angkutan Penumpang	unit	370	334	413	343	435

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Selain faktor sarana dan prasarana jalan, kendaraan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran lalu lintas jalan. Dalam rangka meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas, kelaikan kendaraan terutama kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang perlu untuk diuji secara berkala dengan tepat waktu. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian

kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, saat ini UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan migrasi dari penggunaan buku hasil uji manual menjadi penggunaan smart card yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian Perhubungan. Mulai tahun 2024 pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak dipungut biaya sesuai yang diamanatkan Undang-undang no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari Tabel Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025 diketahui bahwa jumlah kendaraan yang diuji mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya untuk angkutan barang, dan untuk angkutan penumpang. Penurunan jumlah kendaraan yang diuji disebabkan antara lain karena: kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang yang masih kurang akan keselamatan angkutan disamping itu kegiatan pemeliharaan gedung pelayanan pada akhir tahun 2024 sehingga menyebabkan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan tutup selama 20 hari, hal ini tentu mengurangi jumlah kendaraan yang akan diuji.

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya tersedianyan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Cakupan layanan menara telekomunikasi pada tahun 2021–2025 belum memenuhi zona *cell plan*. Hal tersebut diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125

Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah zona terisi dalam *cell plan* menara telekomunikasi	72	98	98	99	100
Jumlah zona seharusnya dalam *cell plan* menara telekomunikasi	118	140	140	140	140
Persentase (%)	61,02	70	70	70,71	71,43

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat calon lokasi menara oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan di lapangan. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan

mudah dijangkau. Tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Kecepatan akses informasi masih terkendala dengan keterbatasan ketersedian bandwidth. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo kapasitas bandwidth mengalami peningkatan, pada Tahun 2021 kapasitas bandwidth telah mencapai 2.000 Mbps. Pada tahun 2022 berhasil dipertahankan pada 2.000 Mbps. Sejak tahun 2023 kapasitas Bandwidth meningkat menjadi 2.200 Mbps, dan sampai dengan tahun 2025 kapasitas Bandwidth masih tetap 2.200 Mbps.

Tabel 2.126

Kapasitas *Bandwith* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	Kapasitas *Bandwidth* (Mbps)
2021	2.000
2022	2.000
2023	2.200
2024	2.200
2025	2.200

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dengan kondisi yang ada dan melihat adanya kebutuhan pelayanan internal maupun kepada masyarakat, maka direncanakan untuk secara bertahap akan dipenuhi dengan pengadaan jaringan Fiber Optik maupun peningkatan kapasitas *Bandwidth*.

Tabel 2.127

Cakupan Jaringan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan Distribusi	Kepemilikan Aset
1	Sekretariat Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2	Sekretariat DPRD	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
3	Inspektorat Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
7	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit 2	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
8	Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
9	Rumah Sakit Umum Daerah Wates - Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
10	RSUD Nyi Ageng Serang - Dinas Kesehatan	Metrolink Fiber Optik	ISP
11	Puskesmas Panjatan 1 - Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
12	Puskesmas Kokap 1 - Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan Distribusi	Kepemilikan Aset
13	Puskesmas Girimulyo 1 - Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
14	Puskesmas Samigaluh 2 - Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
15	Puskesmas Kalibawang - Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
16	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
18	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
19	UPT PPPA - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
21	Dinas Tenaga Kerja	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
22	UPT BLK - Dinas Tenaga Kerja	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
24	Dinas Pertanian dan Pangan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
25	Dinas Lingkungan Hidup	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
26	Dinas Perhubungan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
27	UPT PKB - Dinas Perhubungan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
29	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
30	Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (PLUT) - Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Fiber Optik	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
33	Depo Arsip 1 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
34	Depo Arsip 2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
35	Dinas Pariwisata	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
37	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan Distribusi	Kepemilikan Aset
40	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
41	UPT Taman Budaya - Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Fiber Optik	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
42	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
43	Dinas Perdagangan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
44	Kapanewon Wates	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
45	Kalurahan Wates - Kapanewon Wates	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY
46	Kapanewon Panjatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
47	Kapanewon Galur	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
48	Kapanewon Lendah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
49	Kapanewon Pengasih	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
50	Kapanewon Kokap	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY
51	Kapanewon Samigaluh	Tunneling Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY
52	Kapanewon Kalibawang	Metrolink Fiber Optik	ISP
53	Kapanewon Girimulyo	Metrolink Fiber Optik	ISP
54	Kapanewon Nanggulan	Metrolink Fiber Optik	ISP
55	Kapanewon Temon	Metrolink Fiber Optik	ISP
56	Kapanewon Sentolo	Metrolink Fiber Optik	ISP
57	Rumah Dinas Bupati	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
58	Rumah Dinas Wakil Bupati	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.128

Cakupan Jaringan Internet Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Jumlah Kalurahan	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
1.	29	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2.	34	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY
3.	24	Wireless	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2025

Untuk infrastruktur jaringan internet sudah terpenuhi di seluruh perangkat daerah meskipun belum maksimal. Jaringan internet di perangkat daerah lingkup kabupaten sudah menggunakan infrastruktur jaringan fiber optik, akan tetapi ada juga yang masih berupa Metrolink Fiber Optik dengan kapasitas terbatas, yaitu di RSUD Nyi Ageng Serang dan enam kapanewon.

Jaringan internet desa sudah menjangkau seluruh kalurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kominfo DIY memfasilitasi 58 kalurahan, dimana 34 kalurahan sudah terhubung menggunakan jaringan fiber optik, sedangkan 24 kalurahan masih memanfaatkan teknologi wireless. Sedangkan sisanya, 29 kalurahan dan 1 kelurahan sudah terhubung jaringan intra pemerintah daerah berbasis fiber optik dari Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo.

Selain ketersediaan bandwith, kecepatan dan kelancaran akes informasi pada perangkat daerah juga sangat dipengaruhi oleh perangkat jaringan Local Area Network (LAN) perangkat daerah, dimana banyak yang belum memenuhi spesifikasi minimal sehingga masih diperlukan upgrade perangkat jaringan internet.

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Untuk Tahun 2025 dilaksanakan Evaluasi Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Indeks Evaluasi Mandiri 4,19 (Sangat Baik)

Tabel 2.129

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2025

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	2022	2023	2024	2025
	3.45	4,08	3,91	4,19
	(Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)
Nama Indeks	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**
SPBE	3.45	4,08	3,91	4,19
Domain Kebijakan SPBE	3.6	4,20	4,40	4,70
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.6	4,20	4,40	4,70
Domain Tata Kelola SPBE	3.9	4,30	3,80	4,10
Perencanaan Strategis SPBE	3.25	3,25	3,50	3,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.5	5,00	4,00	4,75
Penyelenggara SPBE	4	5,00	4,00	4,00
Domain Manajemen SPBE	1.45	3,55	3,27	3,55
Penerapan Manajemen SPBE	1.13	3,75	3,38	3,75
Audit TIK	2.33	3,00	3,00	3,00
Domain Layanan SPBE	3.88	4,13	4,06	4,32
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.7	4,10	4,10	4,20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.17	4,17	4,00	4,50

Sumber data : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2025.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	
Indeks SPBE	**4.19**
Predikat SPBE	Baik
Domain Kebijakan SPBE	**4.70**
→ Kebijakan Tata Kelola	4.70
Domain Tata Kelola SPBE	**4.10**
→ Perencanaan Strategis SPBE	3.50
→ TIK	4.75
→ Penyelenggara	4.00
Domain Manajemen SPBE	**3.55**
→ Penerapan Manajemen	3.75
→ Pelaksanaan Audit TIK	3.00
Domain Layanan SPBE	**4.32**
→ Layanan Admin Pemerintahan	4.20
→ Layanan Publik	4.50

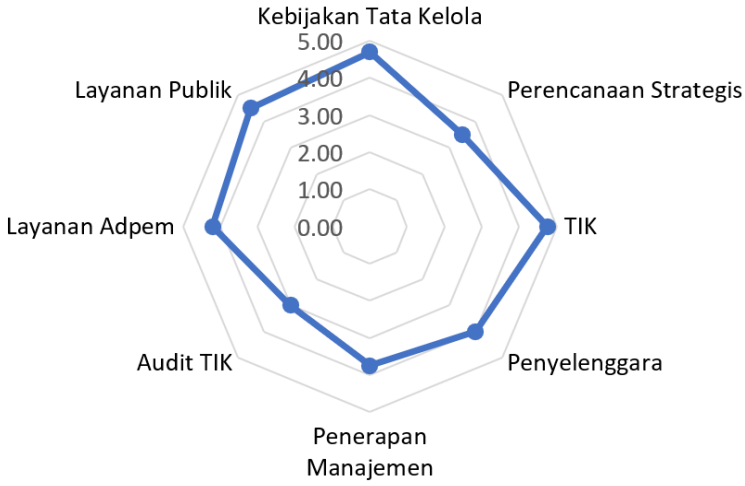

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.38

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Evaluasi SPBE Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

1. Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 4.70
2. Domain Tata Kelola SPBE dengan nilai 4.10 yang terdiri dari 3 aspek :
   a. Perencanaan Strategis SPBE dengan nilai 3,50
   b. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nilai 4,75
   c. Penyelenggaraan SPBE dengan nilai 4,00
3. Domain Manajemen SPBE dengan nilai 3,55, terdiri dari 2 aspek :
   a. Penerapan Manajemen SPBE dengan nilai 3,75
   b. Audit TIK dengan nilai 3,00
4. Domain Layanan SPBE dengan nilai 4,32 yang terdiri dari 2 aspek :
   a. Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik dengan nilai 4,20
   b. Layanan Publik berbasis elektronik dengan nilai 4,50

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri SPBE sebagaimana tabel diatas, untuk domain Audit TIK masih memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan domain lainnya. Domain Manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek penilaian yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Adapun indikator yang dinilai masih kurang/ lemah dari aspek Penerapan Manajemen SPBE yaitu masih kurangnya perencanaan dan pengaturan dalam kebijakan internal dalam Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Perubahan. Sedangkan untuk aspek Audit TIK, indikator yang dinilai masih kurang/ lemah yaitu belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi

PPID mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta regulasi lain yang menjadi pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik.

PPID Kabupaten Kulon Progo memiliki peran strategis dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, dan sederhana. Selain memberikan pelayanan permohonan informasi publik, PPID juga berperan dalam mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, PPID Kabupaten Kulon Progo selaku PPID Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 42 PPID pelaksana yang terdiri dari 30 Dinas dan Badan serta 12 kapanewon. Selain itu juga mengampu PPID pelaksana milik kalurahan yang terdiri 87 kalurahan se- Kulon Progo.

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025 mendapatkan predikitat “Informatif” untuk PPID Utama dengan nilai 91,3 memperoleh urutan ke-3 dari 5 kabupaten/kota di DIY. Nilai tersebut naik 1,3 dibanding tahun 2024 yang memperoleh nilai 90. Selain itu, predikat “Informatif” juga diperoleh oleh 4 perangkat daerah yang naik 50% dari 2 perangkat daerah tahun 2024. Sedangkan untuk perangkat daerah yang mendapat predikat “Tidak Informatif” tahun 2025 semakin sedikit dari 7 perangkat daerah pada tahun 2024 menjadi 1 perangkat daerah di tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi monev dari KID DIY, menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo menunjukkan akselerasi paling impresif dengan kenaikan tertinggi dengan skor kenaikan +10.45 poin.

Gambar 2.39

Presentasi Hasil Evaluasi Monev KID Tahun 2025

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui berbagai kanal layanan, baik secara langsung pada Desk Layanan PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, surat, surat elektronik (e-mail), website PPID, maupun media layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Seluruh permohonan informasi dilayani sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme dan unit yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap berkoordinasi untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik. Aduan melalui pelayanan langsung, media sosial maupun dengan kanal resmi dengan menggunakan aplikasi SP4N Lapor! (www.lapor.go.id) dan E-Lapor DIY.

PPID Utama Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan penilaian PPID Award tahun 2025. Kegiatan tersebut sebagai sarana untuk melihat dan menilai pelaksanakaan PPID yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga PPID utama (Dinas Kominfo) mampu memberikan masukkan dan arahan terkait dengan pelaksanaan PPID yang berjalan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo. Melalui koordinasi dengan seluruh PPID Pelaksana, PPID Utama memastikan terselenggaranya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkualitas sebagai wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam perjalanannya di tahun 2025, PPID Kabupaten Kulon Progo mendapatkan dan melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Penganugerahan Terbaik III Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik “Informatif” Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.
2. Melaksanakan Lomba “PPID Award Tahun 2025” Tingkat Dinas/Badan/Kapanewon/Kalurahan Tahun 2025
3. Melaksanakan Lomba KIM Award Tahun 2025 untuk 40 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kulon Progo
4. Pembinaan kegiatan PPID dengan melaksanakan desk dan konsultasi langsung
5. Pelatihan pengelolaan Aduan untuk perangkat daerah
6. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota KIM tahun 2025
7. Melakukan seleksi dan memberikan apresiasi kepada anggota KIM yang menulis berita/artikel dan diterbitkan dalam website Kominfo.

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan koperasi pada tahun 2025 mengalami pertambahan yang cukup signifikan, dari jumlah koperasi tahun 2024 sebanyak 286 koperasi menjadi 379 koperasi pada tahun 2025 atau bertambah sebanyak 93 koperasi. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih melahirkan sebanyak 88 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kulon Progo. Berdiri pula 3 koperasi konsumen 1 koperasi jasa dan 1 koperasi pemasaran pada tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah anggota, jumlah simpanan jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, volume usaha, jumlah SHU dan jumlah aset mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi yang keluar dikarenakan pensiun serta mutasi dan tidak ada penggantian anggota baru. Banyaknya anggota koperasi yang keluar maka simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi juga menjadi berkurang karena dikembalikan kepada anggota koperasi yang keluar. Selain banyaknya anggota koperasi yang keluar, pada tahun 2024 terbit Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024

tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi dimana dalam Peraturan Menteri Koperasi tersebut terdapat ketentuan penurunan suku bunga pinjaman oleh koperasi sehingga berdampak pada penurunan volume usaha koperasi.

Tabel 2.130

Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah koperasi	Unit	276	282	284	286	379
2	Jumlah anggota	Orang	76.984	72.284	75.771	74.856	70.839
3	Jumlah simpanan	Rp.000	175.264.813	179.451.455	185,320,806	187.215.525	115.350.162
4	Jumlah modal sendiri	Rp.000	147.979.434	156.278.704	161,022,926	158.017.002	153.431.950
5	Jumlah modal luar	Rp.000	232.937.212	238.505.273	248,402,799	247.156.506	185.001.165
6	Volume usaha	Rp.000	268.172.376	255.777.326	335,433,161	320.299.848	304.981.920
7	Jumlah SHU	Rp.000	5.885.049	6.278.332	6,114,797	5.173.002	7.119.399
8	Jumlah aset	Rp.000	380.768.255	394.253.546	408,610,440	405.173.509	365.571.213

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Pada persebaran koperasi berdasarkan Kapanewon, jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kapanewon Wates sebanyak 77 koperasi dan jumlah koperasi paling sedikit berada di Kapanewon Girimulyo sebanyak 13 koperasi. Berdasarkan keaktifannya, Kapanewon Samigaluh memiliki persentase koperasi aktif paling besar yaitu 88,00 % sedangkan Kapanewon Sentolo memiliki persentase koperasi aktif paling rendah sebanyak 71,42 %. Koperasi bisa dikatakan aktif apabila melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2025 persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan sebesar 78,89 % atau 299 koperasi aktif dari total 379 koperasi, nilai tersebut lebih besar dari tahun 2024 dengan persentase koperasi aktif sebesar 72,03 % atau 206 koperasi aktif dari 286 koperasi.

Tabel 2.131

Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Kecamatan/ Kapanewon	2021			2022			2023			2024			2025		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1	Temon	23	27	85,19	20	28	71,43	20	28	71,43	20	28	71,43	37	45	82
2	Wates	60	67	89,55	49	66	74,24	50	67	74,63	47	68	69,12	56	77	72,72
3	Panjatan	8	11	72,73	7	12	58,33	7	12	58,33	7	12	58,33	19	24	79,16
4	Galur	12	17	70,59	13	18	72,22	13	18	72,22	12	18	66,67	19	25	76
5	Lendah	14	15	93,33	11	15	73,33	11	15	73,33	12	15	80,-	18	21	85,71
6	Sentolo	20	23	86,96	15	22	68,18	15	22	68,18	13	21	61,9	20	28	71,42
7	Pengasih	38	40	95	32	41	78,05	32	41	78,05	31	42	73,81	40	51	78,43
8	Kokap	22	22	100	23	25	92	24	26	92,31	21	26	80,77	26	31	83,87
9	Girimulyo	8	10	80	6	9	66,67	6	9	66,67	6	9	66,67	10	13	76,92
10	Nanggulan	12	14	85,71	12	15	80	12	15	80	12	15	80	17	20	85
11	Kalibawang	12	13	92,31	9	14	6429	9	14	64,29	10	14	71,43	15	19	78,94
12	Samigaluh	15	17	88,24	13	17	7646	13	17	76,47	15	18	83,33	22	25	88
Jumlah		244	276	88,41	210	282	74,47	212	284	74,65	206	286	72,03	299	379	78,89

Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Persentase koperasi aktif memiliki tren menurun atau cenderung tidak berkembang dari 2021-2025, meskipun pada tahun 2025 terjadi lonjakan persentase koperasi aktif, namun lonjakan tersebut

disebabkan oleh adanya koperasi baru. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan koperasi aktif tersebut antara lain lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia yang berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian, proses regenerasi pengurus yang lambat, dan ketertarikan generasi muda terhadap koperasi yang semakin menurun.

Tabel 2.132

Data UMKM Non Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kategori Usaha	2025
1.	Pertambangan dan Penggalian	9
2.	Industri Pengolahan	11.264
3.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	33
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	45
5.	Konstruksi	39
6.	Pengangkutan dan Pergudangan	285
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	18.353
8.	Informasi dan Komunikasi	296
9.	Real Estate	76
10.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5.396
11.	Pendidikan	102
12.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	194
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	43
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	417
15.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	21
16.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	74
17.	Aktivitas Jasa Lainnya	2.609
	Jumlah	**39.256**

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Penyajian data UMKM tahun 2025 di atas menggunakan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Tahun 2022 yang pendataan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai basis data awal (*baseline*) dalam rangka pembaharuan dan pemutakhiran data UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Pemutakhiran data akan dilakukan secara bertahap melalui Forum Komunikasi UMKM tingkat kabupaten dengan melibatkan pendataan pada setiap kalurahan/ kelurahan guna memperoleh kondisi riil UMKM di lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan verifikasi status keberadaan dan keaktifan UMKM yang telah terdata sebelumnya, sekaligus mengakomodasi penambahan data UMKM baru yang belum tercantum dalam basis data SIDT Tahun 2022.

Tabel 2.133

Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi	Pertumbuhan (%)	Jumlah Omzet UMKM yang mendapat fasilitasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	3.223	37,27	64.655.000.000	17,66

Tahun	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi	Pertumbuhan (%)	Jumlah Omzet UMKM yang mendapat fasilitasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2022	5.859	81,79	77.570.000.000	19,97
2023	8.236	40,57	100.552.671.111	29,63
2024	9.985	21,39	117.012.999.696	16,37
2025	12.021	20,39	182.040.000.000	55,57

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2026

Jumlah omzet UMKM yang mendapatkan fasilitasi mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2021-2025. Hal tersebut didukung dengan pendampingan terhadap UMKM yang lebih intensif melalui APBD dan Dana Keistimewaan disertai oleh adanya daya dorong pemerintah daerah, antara lain dengan penerapan kebijakan yang memihak UMKM, fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan dan BUMN, fasilitasi pemasaran produk UMKM baik secara online maupun offline penumbuhan wirausaha baru untuk pengentasan kemiskinan serta pendampingan terhadap UMKM baik oleh Perangkat Daerah, konsultan PLUT, dan berbagai pihak terkait.

Tabel 2.134

Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (TOMIRA)

Menurut Kapanewon Tahun 2021-2025

No.	Kapanewon	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Temon	6	6	6	8	8
2.	Wates	16	16	16	16	19
3.	Panjatan	-	-	-	-	-
4.	Galur	3	3	3	3	3
5.	Lendah	-	-	-	-	2
6.	Sentolo	2	2	2	2	3
7.	Pengasih	2	2	2	4	6
8.	Kokap	-	-	-	-	3
9.	Girimulyo	1	1	1	1	1
10.	Nanggulan	2	2	2	2	2
11.	Kalibawang	-	-	-	-	2
12.	Samigaluh	1	1	1	1	1
	Jumlah Total	**33**	**33**	**33**	**37**	**50**

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2026

ToMiRa atau Toko Milik Rakyat merupakan kebijakan Pemerintah Kulon Progo dalam mendukung produk-produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk di swalayan. Sampai dengan tahun 2026 terdapat 50 ToMiRa yang tersebar di 12 Kapanewon dengan persebaran terbanyak berada di Kapanewon Wates sebanyak 19 Toko.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi sampai dengan Tahun 2025 mencapai Rp 566.856 juta rupiah yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 15.705 juta rupiah (2,8%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 551.151 juta rupiah (97,2%).

Tabel 2.135

Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)

Nilai investasi PMA/PMDN	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi	441.961	450.842	309.780	354.783	566.856
PMA	*18.198*	*21.161*	*37.405*	*34.552*	*15.705*
PMDN	*423.763*	*429.681*	*272.375*	*320.231*	*551.151*

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2026

Nilai investasi Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Triwulan IV untuk modal dari Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor sektor Jasa lainnya dan kedua dari sektor Perhotelan dan Restoran.

Tabel 2.136

Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sektor Tahun 2025 (Juta Rupiah)

Sektor Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Persentase (%)
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	6.122.807.958	38,99
Perdagangan dan Reparasi	4.821.040.800	30,70
Pertambangan	2.981.711.932	18,99
Industri Kertas dan Percetakan	1.377.000.000	8,77
Industri barang dari Kulit dan Alas Kaki	352.628.113	2,25
Industri Kayu	50.000.000	0,32
PMA	**15.705.188.803**	
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	429.907.812.598	78,00
Jasa Lainnya	36.042.844.672	6,54
Perhotelan dan Restoran	28.798.788.968	5,23
Konstruksi	18.370.732.153	3,33
Perdagangan dan Reparasi	17.795.176.621	3,23
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	9.684.301.949	1,76
Industri Kimia dan Farmasi	3.642.406.160	0,66
Pertambangan	2.196.800.000	0,40
Industri Karet dan Plastik	1.570.000.000	0,28
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1.219.089.550	0,22
Industri Makanan	641.000.000	0,12
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	671.532.585	0,12
Industri Lainnya	610.734.605	0,11
PMDN	**551.151.219.861**	

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2026

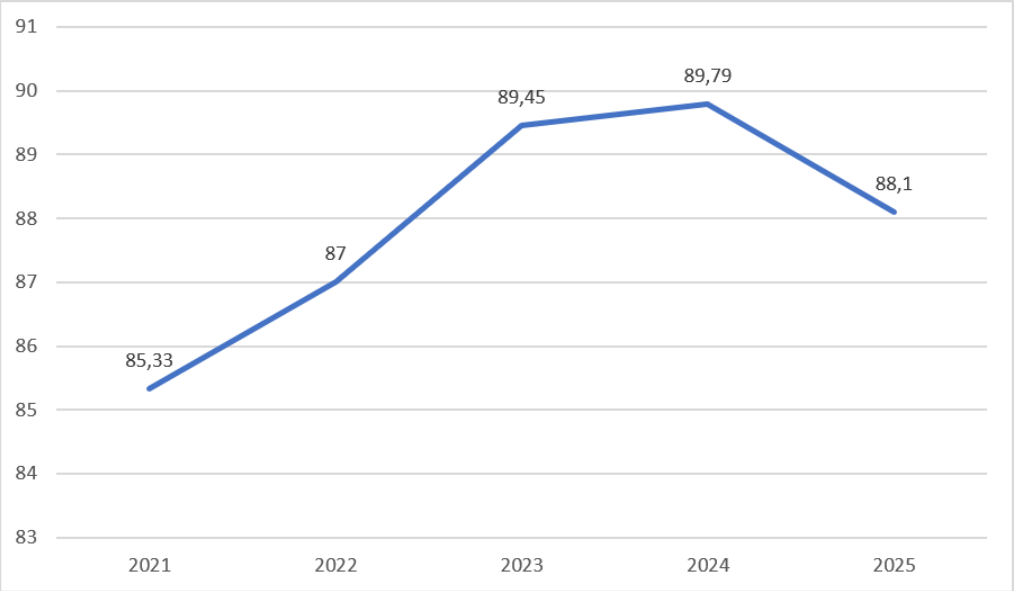

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2026

Gambar 2.40

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2019-2024 memiliki tren peningkatan yang positif, sedangkan di tahun 2025 menurun tetapi masih dalam kategori BAIK. Penurunan ini di sebabkan antara lain oleh adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diundangkan 5 Juni 2025, menggantikan PP 5/2021 untuk memperkuat sistem *Online Single Submission* (OSS), menyederhanakan proses, dan memberikan kepastian hukum. PP ini mengatur perizinan berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi), mengintegrasikan fasilitas penanaman modal, serta mempertegas persyaratan dasar seperti KKPR, lingkungan, dan bangunan Gedung. Adanya PP ini menyebabkan beberapa gangguan dalam proses perizinan.

Tabel 2.137

Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Izin	2700	6526
3	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasisi risiko terintegrasi secara elektronik	aduan	10	10
5	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	survei	215	455

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2026

Pada tahun 2025 terdapat 6526 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan. Apabila dilihat dari sektor kegiatan atau proyek yang diajukan, terdapat 9246 izin yang diterbitkan yang terdiri

dari 7807 perizinan berusaha yang diajukan melalui OSS RBA, 1209 perizinan non berusaha yang diajukan melalui Si Cantik dan 230 perizinan non berusaha yang diajukan melalui SimBG.

Perizinan berusaha melalui OSS terdiri dari 78 % perizinan resiko rendah, 11 % menengah rendah, 8 % resiko menengah tinggi dan 3 % adalah resiko tinggi. Sedangkan berdasarkan skala usaha terdiri dari 89,7% usaha mikro, 8,7% usaha kecil, 0,8 % usaha menengah dan 0,8 % usaha besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 sebagian besar izin yang masuk bergerak pada usaha mikro dan hanya beberapa investor dengan skala usaha besar.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan.Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Seleksi Potensi Pemuda Daerah, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga.

Tabel 2.138

Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Organisasi pemuda	16	19	19	19	19
2	Organisasi Olahraga	45	45	46	46	46
3	Klub Olahraga	280	148	173	173	173
4	Kegiatan Pemuda	4	4	2	7	8
5	Kegiatan Olahraga	6	8	10	10	9

Sumber: SIPD Ewalidata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.139

Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	45	45	46	46	46
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	21	32	28	28	28
3	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Cabor	28	32	22	22	22
4	Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi	Cabor	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2024 cukup membanggakan. Sebagai catatan tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan Porda DIY karena masih kondisi Pandemi Covid-19. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah yang dilaksanakan tiap dua tahun sekali, ditunjukkan pada tabel di bawah ini. PORDA DIY dilaksanakan setiap dua tahun sekali, di tahun gasal. Namun karena pandemi covid, porda tahun 2021 dilaksanakan mundur di tahun 2022. sehingga tahun 2023 tidak dilaksanakan. Selanjutnya PORDA akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Tabel 2.140

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi

No.	PORDA/PORPROV	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	PORDA 2005	45	39	63
2.	PORDA 2007	18	42	84
3.	PORPROV 2009	26	37	61
4.	PORPROV 2011	22	25	62
5.	PORDA DIY 2013	20	27	66
6.	PORDA DIY 2015	23	39	74
7.	PORDA DIY 2017	32	28	74
8.	PORDA DIY 2019	40	28	65
9.	PORDA DIY 2022	31	46	91
10	PORDA DIY 2025	45	38	97

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.141

Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Orang	16	17	9	14	17
2	Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional	Orang	8	15	9	14	12

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2025

Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Di tahun 2024 pengiriman pemuda yaitu 14 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi sampai tingkat nasional. Tahun 2025, penentuan prestasi pemuda mengalami sedikit perubahan definisi, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Tahun 2025, jumlah pemuda berprestasi sebanyak 12 orang dari 17 orang pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan. Selain pengiriman, pembinaan terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo bekerja

sama dengan kalurahan melakukan seleksi pemuda berprestasi, melalui Karang Taruna, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan.

2.1.3.2.13 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya jeda ketersediaan data statistik. Data yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan umumnya memerlukan proyeksi hingga periode n+2, sedangkan data statistik yang tersedia umumnya baru mencapai periode n-1. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Analisis Makro Ekonomi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, pengelolaan Portal Satu Data Kulon Progo serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS. Pelaksanaan urusan Statistik di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam rangka penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah disusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 537/C/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026. Kemudian juga telah dibentuk Tim Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 78/A/2026 tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dengan Bapperida selaku koordinator, BPS Kabupaten Kulon Progo selaku pembina data sektoral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku pembina data geospasial dan Dinas Kominfo selaku walidata sektoral serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku walidata geospasial.

Sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral telah pula disusun Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kulon Progo dan dilanjutkan dengan Surat Edaran Bupati Nomor 050/2269 tanggal 4 Juli 2023 tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik. Capaian urusan Statistik sampai dengan akhir tahun

2025 telah tersusun 5 rekomendasi statistik, dan 50 metadata kegiatan dari 26 instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Capaian jumlah metadata ini belum mencakup seluruh elemen data sektoral dari Perangkat Daerah secara menyeluruh.

Rekomendasi Statistik dan metadata kegiatan merupakan salah satu unsur penilaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sosial (EPSS) yang hasilnya adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024 IPS Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai 2,44 dengan predikat Cukup. Capaian IPS Tahun 2024 ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 2,00. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut menunjukkan kualitas penyelenggaraan statistic sektoral masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Ketugasan Dinas Kominfo selaku walidata pada Aplikasi SIPD Ewalidata telah dilaksanakan tahun 2025 untuk keterisian data tahun 2024, dimulai dari tahapan perencanaan data yaitu identifikasi elemen data bersama dengan perangkat daerah produsen data beserta pengampu Bapperida kemudian melakukan pengumpulan data yaitu input data setelah itu dilaksanakan pemeriksaan data oleh walidata Dinas Kominfo dan pembina data yaitu BPS Kabupaten Kulon Progo dan dilanjutkan dengan publikasi data yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 297/A/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Kulon Progo dalam SIPD Ewalidata. Selanjutnya pada tahun 2026 ini akan dilanjutkan lagi pengisian data untuk tahapan perencanaan sampai dengan publikasi untuk data tahun 2025. Sistem portal data daerah saat ini telah terintegrasi dengan portal provinsi (Dataku DIY) dan portal data nasional (data.go.id), namun proses penginputan SIPD Ewalidata masih dilakukan secara terpisah atau manual karena integrasi belum terbangun.

2.1.3.2.14 Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, urusan persandian tidak lagi hanya berfokus pada penggunaan sandi untuk komunikasi rahasia, tetapi telah berkembang menjadi upaya menyeluruh dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan persandian di pemerintah daerah secara teknis berpedoman pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan persandian meliputi:

1. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi.
2. Pengelolaan sumber daya keamanan informasi.
3. Pengamanan sistem elektronik dan informasi non-elektronik.
4. Penyediaan layanan keamanan informasi.
5. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Urusan Persandian dilaksanakan pada Program Persandian yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring meningkatnya transformasi digital pemerintahan, kebutuhan terhadap pengamanan informasi juga semakin meningkat. Berbagai layanan publik, aplikasi pemerintahan, website perangkat daerah, sistem surat menyurat elektronik, layanan email dinas, serta infrastruktur

jaringan menjadi objek yang harus mendapatkan perlindungan keamanan informasi secara berkelanjutan.

Secara umum, pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Kulon Progo telah diarahkan pada beberapa kegiatan utama, antara lain:

- Pengamanan informasi dan dokumen elektronik pemerintah daerah.
- Pengelolaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik.
- Monitoring keamanan website dan aplikasi pemerintah daerah.
- Koordinasi penanganan insiden siber.
- Pendampingan penerapan keamanan informasi pada perangkat daerah.
- Pelaksanaan asesmen keamanan informasi dan evaluasi SPBE.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang keamanan informasi dan persandian

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara bertahap.

Dalam pengamanan informasi, khususnya pada website pemerintahan dan aplikasi, Tim keamanan informasi dan persandian mengacu pada NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 serta Secure Software Development Life Cycle (Secure SDLC) atau siklus hidup pengembangan aplikasi yang aman. Pendekatan ini memastikan bahwa keamanan informasi tidak hanya diterapkan ketika aplikasi telah selesai dibangun, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi sejak tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, operasional, hingga penghentian layanan. Dengan demikian, setiap website dan aplikasi pemerintah mampu menjaga aspek kerahasiaan (*Confidentiality*), keutuhan (*Integrity*), dan ketersediaan (*Availability*) informasi yang dikelolanya.

Langkah penerapan *framework* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Govern* (Tata Kelola)
2. *Identify* (Identifikasi Risiko)
3. *Protect* (Proteksi/*Hardening*)
4. *Detect* (Deteksi)
5. *Respond* (Respon Insiden)
6. *Recover* (Pemulihan)

Sebagai contoh aplikasi Monev, langkah awal pengamanan adalah dengan:

1. Membuat tatakelola keamanan informasi aplikasi monevku (identifikasi aset informasi, pembinaan kesadaran keamanan informasi kepada pengelola aplikasi);
2. Identifikasi kerentanan dan uji penetrasi;
3. Melakukan hardening atau menambah proteksi sebagai tindak lanjut temuan kerentanan;;
4. Melakukan monitoring dan deteksi dini apabila ada indikasi insiden siber pada aplikasi monevku (misal terkena sisipan promosi judi online);
5. Merespon hasil temuan insiden (bisa dengan takedown sementara untuk menjaga reputasi domain);

6. Melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden yang terjadi yaitu dengan melakukan perbaikan celah keamanan).

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Kabupaten Kulon Progo memiliki kekayaan budaya yang beragam, meliputi bahasa, sastra, sejarah, seni pertunjukan, tradisi, dan warisan budaya tak benda. Kekayaan ini menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat, sekaligus sumber nilai filosofi, budi pekerti, dan kearifan lokal yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk melestarikan, mengembangkan, dan menghidupkan kebudayaan daerah melalui berbagai aktivitas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pelestarian bahasa, sastra, dan sejarah daerah diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas yang melibatkan generasi muda secara langsung. Tahun 2025 dilaksanakan aktivitas Macapat yang ditujukan bagi peserta didik jenjang sekolah dasar di 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya menanamkan nilai filosofi, budi pekerti, dan kecintaan terhadap budaya sejak usia dini. Selain Macapat, aktivitas Alih Aksara dilakukan untuk menjaga keberlanjutan literasi aksara Jawa. Aktivitas Maca Cerkak sebagai upaya menumbuhkan apresiasi terhadap sastra daerah melalui kemampuan membaca dan menghayati cerita. Upaya ini diperkuat melalui kunjungan ke museum yang berada di wilayah DIY untuk mengenalkan sejarah secara langsung, lomba cerdas cermat sejarah guna meningkatkan wawasan dan daya saing pengetahuan, peringatan hari besar sejarah sebagai penguatan nilai nasionalisme, serta penyusunan buku sejarah lokal sebagai dokumentasi dan sumber pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dengan rangkaian aktivitas ini, bahasa, sastra, dan sejarah tidak hanya dilestarikan, tetapi dihidupkan dan diwariskan kepada generasi penerus.

Pelestarian warisan budaya juga dilakukan melalui penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya Kabuapten Kulon Progo. Pada tahun 2025, Kabupaten Kulon Progo menerima sertifikat penetapan Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk Upacara Adat Ledekan Clapar. Pengakuan ini menjadi capaian penting dalam menjaga dan memperkuat eksistensi tradisi yang hidup di tengapernikahanh masyarakat. Selain itu tahun 2025, melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo, telah ditetapkan 12 Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai bukti komitmen perlindungan terhadap tinggalan sejarah dan nilai penting yang dikandungnya. Langkah ini menjamin bahwa warisan budaya tidak hanya mendapat pengakuan formal, tetapi juga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Pengembangan seni dan budaya juga dilakukan melalui pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo sebagai ruang strategis untuk berkreasi dan berkolaborasi. Taman Budaya dilengkapi dengan panggung pertunjukan, ruang latihan, ruang pamer, area terbuka, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga menjadi wadah representatif bagi komunitas seni. Aktivitas rutin yang dilaksanakan tahun 2025 seperti pentas Jathilan tidak hanya melestarikan seni tradisi, tetapi juga memberikan ruang tampil bagi pelaku seni lokal sekaligus menjadi tontonan edukatif bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan lain seperti Pekan Kebudayaan menghadirkan beragam kesenian dan budaya lokal sebagai ruang apresiasi dan promosi karya seniman daerah, sementara festival musik menjadi wadah ekspresi komunitas musik lokal. Pentas teater dan ketoprak diselenggarakan sebagai upaya pelestarian seni pertunjukan sekaligus sarana edukasi dan penguatan karakter generasi muda. Melalui rangkaian

kegiatan ini, Taman Budaya Kulon Progo berfungsi sebagai pusat penguatan identitas dan keberlanjutan budaya Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mendorong penguatan tradisi di tingkat Kalurahan melalui pendampingan dan fasilitasi bagi Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang agar dapat naik kelas menjadi Kalurahan Budaya yang mandiri. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana budaya, fasilitasi pelaksanaan upacara adat, pentas seni dan budaya, hingga penguatan kesenian khas kalurahan. Selain itu pelaksanaan gelar potensi Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang menjadi ajang apresiasi untuk menampilkan identitas, kreativitas, dan kearifan lokal masing-masing Kalurahan. Dengan pendekatan ini, tradisi tetap terjaga, berkembang secara berkelanjutan, dan semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Berikut data Kalurahan Mandiri Budaya, Kalurahan Budaya dan Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang sampai dengan Tahun 2025:

Tabel 2.142

Data Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
1.	Pagerharjo	Samigaluh	Kalurahan Mandiri Budaya
2.	Jatimulyo	Girimulyo	Kalurahan Mandiri Budaya
3.	Glagah	Temon	Kalurahan Mandiri Budaya
4.	Hargomulyo	Kokap	Kalurahan Mandiri Budaya
5.	Tuksono	Sentolo	Kalurahan Mandiri Budaya
6.	Tanjungharjo	Nanggulan	Kalurahan Mandiri Budaya
7.	Banjarharjo	Kalibawang	Kalurahan Mandiri Budaya
8.	Sendangsari	Pengasih	Kalurahan Mandiri Budaya
9.	Sidorejo	Lendah	Kalurahan Mandiri Budaya
10.	Sukoreno	Sentolo	Kalurahan Budaya
11.	Kalirejo	Kokap	Kalurahan Budaya
12.	Bugel	Panjatan	Kalurahan Budaya
13.	Sogan	Wates	Kalurahan Budaya
14.	Tayuban	Panjatan	Kalurahan Budaya
15.	Brosot	Galur	Kalurahan Budaya
16.	Kaliagung	Sentolo	Kalurahan Budaya
17.	Giripeni	Wates	Kalurahan Budaya
18.	Salamrejo	Sentolo	Kalurahan Budaya
19.	Ngargosari	Samigaluh	Kalurahan Budaya
20.	Hargorejo	Kokap	Kalurahan Budaya
21.	Sentolo	Sentolo	Kalurahan Budaya
22.	Gerbosari	Samigaluh	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
23.	Banjararum	Kalibawang	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
24.	Pendoworejo	Girimulyo	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
25.	Jatisarono	Nanggulan	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
26.	Purwosari	Girimulyo	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
27.	Tirtorahayu	Galur	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
28.	Pengasih	Pengasih	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
29.	Gulurejo	Lendah	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
30.	Kaligintung	Temon	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
31.	Giripurwo	Girimulyo	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
32.	Hargotirto	Kokap	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
33.	Hargowilis	Kokap	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
34.	Jatirejo	Lendah	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
35.	Depok	Panjatan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
36.	Tawangsari	Pengasih	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
37.	Purwoharjo	Samigaluh	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
38.	Banguncipto	Sentolo	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
39.	Demangrejo	Sentolo	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
40.	Kebonharjo	Samigaluh	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
41.	Ngentakrejo	Lendah	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
42.	Banjarasri	Kalibawang	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
43.	Banjaroya	Kalibawang	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
44.	Wates	Wates	Kelurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
45.	Bumirejo	Lendah	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
46.	Donomulyo	Nanggulan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
47.	Cerme	Panjatan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
48.	Gotakan	Panjatan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
49.	Kedungsari	Pengasih	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
50.	Banjarsari	Samigaluh	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
51.	Srikayangan	Sentolo	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
52.	Margosari	Pengasih	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
53.	Panjatan	Panjatan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
54.	Kulwaru	Wates	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
55.	Karangwuni	Wates	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
56.	Krembangan	Panjatan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
57.	Sidoharjo	Samigaluh	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
58.	Karangsewu	Galur	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
59.	Banaran	Galur	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
60.	Sidomulyo	Pengasih	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
61.	Karangsari	Pengasih	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
62.	Wijimulyo	Nanggulan	Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Dalam pengembangan kebudayaan terhadap desa/ kalurahan, yang semula Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya kategori tumbuh meningkat menjadi di Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang. Selanjutnya dengan pendampingan yang lebih intensif, Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang meningkat menjadi Desa/ Kalurahan Budaya yang ditetapkan oleh Gubernur DIY. Berikut data perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang dan Desa/ Kalurahan Budaya .

Tabel 2.143

Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021-2025

Kategori	Kondisi pada tahun-				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rintisan Desa/ kalurahan budaya kategori berkembang	30	35	31	36	41
Desa/ kalurahan budaya	16	16	21	21	21
Total	**46**	**51**	**52**	**57**	**62**

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025;

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya memastikan bahwa bahasa, sastra, sejarah, seni, tradisi, dan warisan budaya tak benda tidak hanya dilindungi, tetapi juga dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Upaya pelestarian budaya ini juga mencakup penguatan Kalurahan Rintisan Budaya Tumbuh dan Berkembang agar dapat naik kelas menjadi Kalurahan Budaya yang mandiri dan berdaya, sehingga tradisi lokal semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan terus memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas generasi muda melalui pembinaan dan pendampingan budaya dan seni, memperluas pengakuan warisan budaya, serta memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai sarana promosi dan pelestarian. Melalui langkah-langkah tersebut, budaya Kabupaten Kulon Progo akan tetap menjadi identitas yang dijaga sekaligus menjadi sumber kekuatan sosial, edukatif, dan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta terjangkau.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.144

Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kunjungan perpustakaan	102.822	299.127	180.902	218.832	222.912

Sumber data : SIPD Ewalidata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah pengunjung perpustakaan secara umum fluktuatif. Peningkatan kunjungan disebabkan kegiatan yang melibatkan masyarakat, makin gencarnya promosi melalui bazar dan penambahan jumlah pengunjung secara daring (melalui internet). Perlu diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan juga diperhitungkan melalui layanan perpustakaan keliling. Pada tahun 2025, pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan 1,86%. Kenaikan dikarenakan adanya kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik, dimana seluruh kegiatan dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Lomba bertutur tingkat SD; Bimtek membaca nyaring untuk guru, pustakawan, pegiat literasi, orang tua; Bimtek literasi informasi untuk pustakawan, guru, dan pegiat literasi; Bimtek kepenulisan berbasis konten budaya lokal; Lokakarya literasi digital; Bedah buku koleksi perpustakaan daerah; Lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan; Lomba video konten literasi; Lomba perpustakaan desa terbaik serta Festival literasi (pameran produk literasi, gelar wicara literasi, penampilan karya literasi).

Salah satu faktor yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah buku dari tahun 2021 hingga tahun 2023 selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 6.013 eksemplar. Penurunan jumlah buku berdasarkan hasil sensus barang, Sedangkan pada tahun 2025 jumlah buku tercatat 56.655 eksemplar dengan pengadaan tahun 2025 sejumlah 610 eksemplar. Secara rinci jumlah buku perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.145

Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2021-2025

No	Judul/Kelompok	Jumlah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umum	3.759	3.695	3.831	3.503	3.922
2	Filsafat	2.868	2.882	2.903	2.587	2.822
3.	Agama	6.951	6.977	6.996	6.172	6.684
4.	Ilmu–ilmu Politik	9.421	9.627	9.805	8.777	10.065
5.	Bahasa	1.845	1.858	1.858	1.633	1.647
6.	Ilmu Murni	3.772	3.581	3.786	3.352	3.067
7.	Ilmu Terapan	10.991	10.957	11.029	9.720	10.236
8.	Kesenian	3.029	2.988	3.102	2.779	2.963
9.	Sastra	11.213	11.159	11.392	10.354	9.817
10.	Sejarah dan Geografi	2.800	2.915	2.973	2.601	2.745
11.	Non Buku (Peta)	75	75	75	75	75
12.	Non Buku (Globe)	3	3	3	3	3
13.	Non Buku (*E-Book*)	2.480	2.605	2.705	2.775	2.609

No	Judul/Kelompok	Jumlah				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah	**59.207**	**59.322**	**60.422**	**54.331**	**56.655**

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2025

Hal yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat baca masyarakat adalah keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar juga berpengaruh terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 sebanyak 588 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan umum 102 perpustakaan, perpustakaan sekolah 454, perpustakaan khusus 31 dan perpustakaan perguruan tinggi 1 perpustakaan. Namun yang menjadi perpustakaan binaan sejumlah 465 perpustakaan, karena MI dan MTs bukan binaan perpustakaan umum kabupaten sejumlah 122 perpustakaan. Dari 465 perpustakaan yang telah terakreditasi berjumlah 215 perpustakaan.

Jumlah Pustakawan yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2023. Seluruh tenaga tersebut tidak hanya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kulon Progo tetapi juga membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.146

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Tahun 2021-2025

No	Indikator	Capaian kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pustakawan	13	12	12	13	13
2	Jumlah tenaga teknis	4	5	5	5	6
3	Jumlah penilai bersertifikat	2	2	2	3	3

Sumber data : SIPD Ewalidata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3.2.17 Kearsipan

Arsip merupakan aset strategis yang menjadi bukti autentik kinerja dan memori kolektif bangsa. Komitmen terhadap transparansi dan tertib administrasi diwujudkan secara nyata melalui penyelenggaraan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI). ASKI merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi sejauh mana perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan standar kearsipan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan upaya berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan arsip, pemeringkatan indeks reformasi birokrasi dan proteksi hukum dan aset. Capaian kinerja pengelolaan kearsipan melalui audit sistem kearsipan internal dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.147

Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2025

No.	Uraian	Capaian Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	69,27	85,25	86,07	86,53

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.148

SDM Pengelola Arsip Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Capaian kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tenaga Arsiparis	14	13	13	24	25
2	Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	213	132	312	342	342

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kearsipan dari tahun 2023 ke 2024 jumlahnya meningkat cukup signifikan. Untuk Tenaga Arsiparis (jabatan fungsional) tahun 2025 terdapat peningkatan 1 orang dari tahun sebelumnya dari 24 personil menjadi 25 personil, dengan perincian 17 orang di perangkat daerah dan 8 orang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) telah melaksanakan pembinaan maupun pendampingan pengelolaan kearsipan termasuk implementasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yaitu digitalisasi dalam pengarsipan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan pada seluruh Perangkat Daerah.

Akuisisi arsip merupakan proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilakukan melalui penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Pada tahun 2025 akuisisi arsip dilaksanakan ke UPTD PAUD dan Dikdas Kapanewon Panjatan, Temon, Galur, Samigaluh, Kalibawang dan Kokap.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021-2025 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.149

Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025

No.	Kondisi	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi ikan budidaya (ton)	16.699	16.714	16.803,44	16.968,63	16.989,005
2.	Produksi ikan tangkap (ton)	2.190,06	2.190,35	2.183,85	2.190,03	2.198,208
	Total produksi (ton)	18.889	18.905	18.987,00	19.158,66	19.187,213
	Target (ton)	17.154	17.614	18.813,00	18.995,03	19.184
	Persentase (%)	110,11	107,33	100,93	100,86	100,02

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Total produksi ikan pada tahun 2025 tercapai sebesar 19.187,213 ton atau 100,02 persen dari target kinerja daerah sebesar 19.184 ton. Capaian tersebut meningkat sebesar 0,15 persen dibandingkan produksi ikan tahun 2024 yang mencapai 19.158,66 ton. Total produksi tersebut terdiri atas produksi perikanan budidaya sebesar 16.989,005 ton atau meningkat 0,12 persen dibandingkan

tahun 2024 sebesar 16.968,63 ton, serta produksi perikanan tangkap sebesar 2.198,208 ton atau meningkat 0,37 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 2.190,03 ton.

Produksi perikanan budidaya tahun 2025 terealisasi sebesar 100 persen dari target sebesar 16.989 ton. Produksi tersebut didominasi oleh budidaya ikan di kolam sebesar 16.716,991 ton atau berkontribusi sebesar 98,40 persen, sedangkan produksi dari tambak mencapai 272,014 ton atau sebesar 1,60 persen dari total produksi budidaya. Peningkatan produksi budidaya didukung oleh penguatan kelembagaan pembudidaya melalui penumbuhan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang hingga tahun 2025 telah mencapai 495 kelompok, serta dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sarana produksi seperti pembangunan kolam, bantuan benih, pakan, dan sarana pendukung lainnya.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap tahun 2025 mencapai 2.198,208 ton atau 100,15 persen dari target sebesar 2.195 ton. Produksi perikanan tangkap didominasi oleh hasil tangkap perairan umum sebesar 1.313,234 ton atau berkontribusi sebesar 59,74 persen, sedangkan hasil tangkap laut mencapai 884,974 ton atau sebesar 40,26 persen.

Pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.150

Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2021-2025

No.	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Lahan Budidaya Ikan	Hektar	22.759	22.759	22.759	22.759	22.759
2.	Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan	Hektar	138,19	138,51	137,06	137,18	137,25
3.	Persentase Pemanfaatan	Persen	0,607	0,601	0,601	0,603	0,603

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Pada tahun 2025, luas lahan budidaya ikan yang dimanfaatkan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 137,25 hektar atau sebesar 0,603 persen dari total potensi lahan budidaya seluas 22.759 hektar. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 137,18 hektar. Peningkatan tersebut didukung oleh implementasi Program Ngulir Budi (Ngupaya Ulu Ilir Mbudidaya Iwak) di Kapanewon Sentolo yang mengintegrasikan kegiatan budidaya ikan dari hulu hingga hilir yang meliputi pembenihan, pembesaran hingga pemasaran. Selain itu, adanya penambahan kolam budidaya di Kapanewon Kokap dan Kalibawang juga turut berkontribusi dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya. Meskipun demikian, optimalisasi pemanfaatan potensi lahan budidaya masih perlu terus didorong melalui pengembangan sarana prasarana, penguatan kelembagaan pembudidaya, serta peningkatan ketersediaan sumber air untuk budidaya.

Tabel 2.151

Kondisi Produksi Ikan, Konsumsi Ikan, Pembinaan Nelayan, dan Proporsi Tangkapan Ikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Capaian Produksi Ikan terhadap target(%)	110,11	107,33	100,93	100,86	100,02
	Jumlah Produksi Ikan(Ton)	18.889,00	18.905	18.987	19.158,66	19.187,213
	Target Daerah(Ton)	17.154,00	17.614	18.813	18.995,03	19.184

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
2	Capaian Konsumsi Ikan terhadap target(%)	102,79	102,00	100,00	99,39	-
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	28,78	30,60	31,01	31,44	33,18
	Target Daerah (Kg/Kap/Tahun)	28,00	30,00	31,00	31,2	-
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	12,9	35,48	23,68	4,17	0
	Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pemda Tahun n	4	11	9	2	0
	Jumlah kelompok nelayan	31	31	38	48	54
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	4,89	3,86	4,48	4,53	4,61
	Jumlah produksi Ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	923,87	729,67	850,53	860,26	884,974
	Jumlah produksi ikan didaerah	18.889,00	18.905	18987,29	18.995,03	19.187,213
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	0,099	0,079	0,092	0,093	0,095
	Jumlah tangkapan ikan	923,87	729,67	850,53	860,26	884,974
	80% dari tangkapan maksimum lestari (WPP573)	929.330,00	929.330,00	929.330,00	929.330,00	929.330,00

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Berdasarkan data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021–2025, tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan tren yang relatif meningkat dan stabil. Pada tahun 2021, konsumsi ikan masyarakat tercatat sebesar 28,78 kg/kapita/tahun, kemudian meningkat menjadi 30,60 kg/kapita/tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2023 konsumsi ikan kembali meningkat menjadi 31,01 kg/kapita/tahun , mencapai 31,44 kg/kapita/tahun pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 mencapai 33,18. Peningkatan konsumsi ikan tersebut menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein yang sehat dan bergizi. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong budaya gemar makan ikan melalui kegiatan edukasi, promosi, dan peningkatan akses masyarakat terhadap produk perikanan.

Sejalan dengan perubahan indikator dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, istilah Angka Konsumsi Ikan (AKI) telah diganti menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM). Penghitungan KIM menggunakan pendekatan konsumsi ikan rumah tangga berdasarkan serapan ikan tertimbang secara utuh dan segar. Pada tahun 2025, nilai Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 10,23 kg/kapita/tahun. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran dengan metode baru sesuai RPJMN 2025–2029, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI). Oleh karena itu, capaian tahun 2025 digunakan sebagai data dasar (baseline) dalam pengukuran KIM dan menjadi acuan evaluasi kinerja peningkatan konsumsi ikan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan, di Kabupaten Kulon Progo juga dikembangkan desa maritim. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Nomor 188/00466 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Maritim, di Kabupaten Kulon Progo

terdapat 10 Desa/ Kalurahan Maritim yang tersebar di 4 kapanewon, yaitu di Kapanewon Galur (2 kalurahan: Banaran dan Karangsewu), Kapanewon Panjatan (3 kalurahan: Bugel, Pleret, Garongan), Kapanewon Wates (1 kalurahan: Karangwuni), dan Kapanewon Temon (4 kalurahan: Glagah, Sindutan, Palihan, dan Jangkaran). Penetapan desa/kalurahan maritim ini adalah untuk pemberdayaan dan peningkatan potensi desa di wilayah pesisir pantai termasuk masyarakatnya yang bergerak di Bidang Kelautan dan Perikanan melalui dana BKK Dana Keistimewaan DIY.

Prioritas penggunaan BKK Desa/Kalurahan Maritim adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dengan usaha kelautan dan perikanan seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, dan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya

Tabel 2.152

Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pantai Glagah	352.010	606.500	682.322	567.036	544.317
2	Pantai Congot	48.725	78.873	115.075	113.714	101.696
3	Pantai Trisik	6.901	12.234	23.133	3.303	2.659
4	Waduk Sermo	76.034	101.340	75.799	33.753	28.107
5	Goa Kiskendo	4.166	7.474	6.998	2.696	2.402
6	Puncak Suroloyo	7.484	9.461	10.649	8.300	7.792
7	WA Nglinggo	44.568	25.934	200	n.a.	393
8	WA Tritis	3.496	2.329	641	2.600	2.532
9	Kawasan Menoreh Barat	7.103	6.698	5.733	461	n.a
10	Kawasan Jatimulyo	28.734	41.793	22.817	1.167	24.700
	Jumlah	**579.221**	**892.636**	**943.367**	**733.032**	**714.598**

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2026

Jumlah kunjungan wisata pada destinasi yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 tercatat sebanyak 579.221 orang, masih menurun cukup signifikan sebesar 33,38 persen dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak pandemi Covid-19, pembatasan mobilitas masyarakat, dan penutupan sementara obyek wisata. Seiring dibukanya kembali obyek wisata secara

terbatas, kunjungan mulai pulih dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 892.636 orang atau naik 54,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan mencapai 943.367 orang, meningkat 5,68 persen dibandingkan tahun 2022.

Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah kunjungan menurun cukup signifikan menjadi 733.032 orang atau turun sekitar 22,30 persen, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 714.598 orang atau turun 2,51 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata belum sepenuhnya stabil dan masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan daya tarik wisata baru, aksesibilitas menuju destinasi, sarana prasarana pendukung, promosi, serta persaingan dengan destinasi daerah sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan daya tarik wisata melalui perbaikan akses jalan, penataan lokasi TPR pada obyek wisata baru, pemenuhan sarana prasarana pendukung, penguatan promosi, penyelenggaraan event wisata, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata.

Selanjutnya perkembangan pendapatan daerah dari retribusi pariwisata tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.153

Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Pendapatan Per Tahun (Rp.000)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan Retribusi Pariwisata	3.304.329	5.126.499	5.581.290	7.593.476	6.974.745
2	Lain-lain PAD yang Sah	4.800	5.000	6.000	6.000	6.000
	Total Pendapatan Retribusi Pariwisata	**3.304.329**	**5.131.499**	**5.587.290**	**7.599.476**	**6.980.745**
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**103.828.354**	**308.158.513**	**324.058.666**	**358.092.879**	**413.597.654**
	Persentase (%)	**3,18**	**1,66**	**1,72**	**2,12**	**1,68**

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2026

Pada tahun 2021, meskipun secara total PAD daerah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi pendapatan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD tercatat sebesar 3,18 persen. Pada tahun 2022, pendapatan retribusi pariwisata meningkat menjadi Rp5.131.499.000,00, dengan penyumbang terbesar berasal dari retribusi wisata Pantai Glagah sebesar Rp3.639.402.000,00 atau 70,92 persen dari total pendapatan retribusi pariwisata. Selanjutnya pada tahun 2023, pendapatan retribusi pariwisata kembali meningkat menjadi Rp5.587.290.000,00 atau naik 8,88 persen dibandingkan tahun 2022, dengan kontribusi terhadap PAD meningkat dari 1,66 persen menjadi 1,72 persen. Pada tahun 2024, adanya kenaikan tarif retribusi mendorong peningkatan pendapatan yang cukup signifikan menjadi Rp7.599.476.000,00 atau naik sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2025, pendapatan retribusi pariwisata menurun menjadi Rp6.980.745.000,00, sehingga kontribusinya terhadap PAD juga turun menjadi 1,68 persen.

Berikut data kunjungan wisatawan pada 5 kabupaten/kota se DIY pada tahun 2021-2025:

Tabel 2.154

Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota Se-DIY

(Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/ Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Kulon Progo	9	906,292	2,014	1,559,424	11.459	1.912.147	7.992	1.918.059	7.999	1.928.477
2.	Bantul	57	2,819,691	129	5,419,499	2.360	5.772.527	n.a.	n.a.	128	3.461.020
3.	Gunung Kidul	42	1,937,627	709	3,106,063	4.680	3.713.142	3.978	3.286.940	4.283	3.294.109
4.	Sleman	41	5,162	65,302	7,105,769	179.543	7.826.400	n.a	n.a	228.414	8.384.107
5.	Yogyakarta	26	827	62,261	2,658,606	n/a	n/a	3555.333	10.583.877	316.063	10.761.549
	Total	175	5,669,599	130,415	19,849,361	198,042	19,224,217	3.567.303	15.788.876	556.887	27.829.262

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2026

Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, dari 1.561.438 orang menjadi 1.923.606 orang. Kenaikan terbesar terjadi pada wisatawan mancanegara, dari 2.014 orang menjadi 11.459 orang atau meningkat sekitar 468,97%. Hal ini menunjukkan pemulihan sektor pariwisata semakin kuat, didukung atraksi wisata budaya, promosi destinasi, serta inovasi paket wisata berbasis masyarakat pada desa wisata.

Pada tahun 2024, kunjungan kembali meningkat menjadi 1.926.051 orang, meskipun kenaikannya relatif kecil, yaitu 2.445 orang. Peningkatan terutama berasal dari wisatawan nusantara, sementara wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Pada tahun 2025, jumlah kunjungan naik menjadi 1.936.476 orang, meningkat 10.425 orang dibanding tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan pariwisata Kulon Progo tetap tumbuh, terutama ditopang wisatawan nusantara.

Selain obyek wisata yang beretribusi, di Kabupaten Kulon Progo juga berkembang wisata non retribusi, yaitu desa wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan wisata non retribusi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam dan budaya setempat. Desa wisata di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 30 desa wisata. Berikut data beberapa potensi desa wisata di Kulon Progo:

Tabel 2.155

Data Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Kapanewon	Desa Wisata	Daya Tarik
1	Girimulyo	Jatimulyo	Caving Goa Kiskendo dan Sumitro, Bird Watching, Kuliner Kopi Sulingan, Agro Salak
	`	Purwosari	Goa Kidang Kencana, Air Terjun, budaya, agro
		Pendoworejo	Pronosutan View, Bendung Kayangan
2	Kalibawang	Banjarasri	Sport Tourism (paralayang wisata), live in Dolan Deso, Wisata Religi Sendangsono
		Banjaroya	Ritual, Ziarah, Makam Kyai Krapyak, Makam Pengikut P. Diponegoro, Kesenian Strek, Embung Banjaroya, Agrowisata Durian
		Banjararum (Dekso)	River Tubbing
		Banjarharjo	Wisata Edukasi Cokelat, Wisata Arung jeram, Wisata Ziarah Makam Nyi Ageng Serang, wisata edukasi pertanian dan peternakan
3	Kokap	Kalibiru	Hutan Wisata Kalibiru, Alam Perbukitan Menoreh, Outbond
		Sermo-Hargowilis	Waduk Sermo, Alam Perbukitan Menoreh
		Hargomulyo	Sendang Pengilon, kesenian angguk

No	Kapanewon	Desa Wisata	Daya Tarik
		Hargotirto (Segajih)	Live In, Tracking, Susur Sungai, Pembuatan Gula Merah
		Hargorejo	Ex Tambang Mangaan Kliripan (geosite)
4	Lendah	Sidorejo	Bendungan Sapon, Budaya, Batik, Blangkon, Kerajinan Kembang Kering, Outbound di Tepi Sungai Progo
		Gulurejo	Sentra Industri Batik
		Jatirejo	Bukit Cubung, Wisata Religi Makam Kyai Landoh
5	Panjatan	Pleret/ Sawah Surjan	Wisata Edukasi Sawah Surjan, Pantai Mlarangan Asri
		Krembangan	Wisata Goa Kebon, Edukasi Wayang, Wisata Outbound, Wisata Sejarah dan Budaya
6	Samigaluh	Nglinggo - Pagerharjo	Treking, Menyadap Nira Aren, Lengger Tapeng, Petilasan Linggo Manik, Gagak Roban, Dalem Tunu, Buto Sinjang/Offroad
		Sidoharjo/ Menoreh	Panorama Menoreh, Grojogan/Curug Sidoharjo, Coffee Tour
		Purwoharjo / Tinalah	Goa, Latar Belakang Sejarah Diponegoro, Budaya, Wisata Edukasi, Camping Ground
		Widosari (Ngargosari)	Puncak Widosari, Pemandangan Alam di Ketinggian, Melihat Sunset dan Sunrise
		Gerbosari	Puncak Suroloyo, Agrowisata Krisan
7	Sentolo	Sukoreno	Sentra kerajinan serat alam, wisata kuliner
		Tuksono	Sentra kerajinan serat alam, wisata kuliner
8	Temon	Glagah	YIA, Pantai Glagah,
		Jangkaran	Mangrove, Pantai Congot
9	Galur	Banaran	Pantai Trisik, Konservasi Penyu, Batik Alam
10	Pengasih	Sendangsari	Wellness tourism, taman herbal
		Pengasih	Wisata Edukasi, Wisata Sejarah dan Budaya
11	Nanggulan	Tanjungharjo	Wisata Kuliner, Wisata Edukasi Serat Alam dan Pertanian

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2026.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata adalah dengan menyelenggarakan Lomba Gelar Potensi Desa Wisata. Kegiatan ini salah satunya agar desa wisata memiliki daya saing yang kompetitif, baik dari paket wisata yang dijual maupun pengembangan kelembagaannya. Hal ini terbukti efektif untuk mendorong pengembangan desa wisata menjadi lebih baik dan tentu saja berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa/kalurahan. Selain itu dampak diadakannya lomba gelar potensi desa wisata adalah diraihnya penghargaan tiga kali berturut-turut dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu Desa Wisata Tinalah (2021), Desa Wisata Widosari (2022) , Desa Wisata Hargotirto (2023) dan Desa Wisata Jatimulyo (2024).

Perkembangan jumlah pengunjung pada desa wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola masyarakat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.156

Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Beretribusi

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Desa Wisata	-	97.746	140.587	381.206	374.350
2	Non Desa Wisata	330.680	571.056	839.652	811.813	847.528
	Jumlah	**330.680**	**668.802**	**980.239**	**1.193.019**	**1.221.878**

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2026

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata non retribusi yang dikelola masyarakat menunjukkan tren meningkat selama tahun 2021–2025. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan mencapai 1.193.019 orang, meningkat 21,70 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 980.239 orang. Selanjutnya pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 1.221.878 orang atau naik 2,42 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa destinasi wisata berbasis masyarakat, baik desa wisata maupun non desa wisata, memiliki kontribusi penting dalam memperluas daya tarik pariwisata Kulon Progo melalui pengembangan paket wisata, pemanfaatan potensi alam, kearifan lokal, seni budaya, serta adat tradisi masyarakat setempat.

Meskipun demikian, peningkatan kunjungan tersebut perlu diikuti dengan penguatan kualitas pelayanan wisata agar manfaat ekonomi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Pemandu wisata menjadi salah satu ujung tombak pelayanan karena berperan langsung dalam memberikan informasi, pengalaman, dan kesan kepada wisatawan. Oleh karena itu, arah kebijakan perlu menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata, penguatan kelembagaan desa wisata, serta peningkatan promosi dan kualitas paket wisata agar destinasi yang dikelola masyarakat semakin berdaya saing dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata menjadi prioritas di setiap obyek wisata yang dikelola masyarakat. Usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan dengan memberikan pelatihan pemandu melalui sertifikasi pemandu wisata. Berikut data pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.157

Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Pemandu Wisata	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pemandu Wisata Bersertifikat (orang)	91	90	90	90	110
2	Pemandu Wisata Non Sertifikat (orang)	39	40	40	40	22
	Total	**130**	**130**	**130**	**130**	**132**

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2026

Jumlah pemandu wisata bersertifikat di Kulon Progo tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah melakukan sertifikasi untuk pemandu outbound sejumlah 18 orang dan pemandu wisata sejumlah 2 orang. Perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kulon Progo sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri pariwisata maupun usaha jasa pariwisata. Ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo terus tumbuh dan berkembang. Dari 17 sub sektor ekonomi kreatif di Kulon Progo, kuliner, kriya dan fashion merupakan sektor yang sudah berkembang baik dan mendukung pariwisata di Kulon Progo, dengan kuliner menjadi sub sektor unggulan. Kuliner khususnya kopi berkembang pesat di kawasan menoreh, fashion melalui industri batik dan kriya berupa kerajinan dari serat alam. Sedangkan untuk sub sektor lain, beberapa sudah ada embrio yang muncul antara lain : film, musik, dan seni pertunjukan. Sebagai upaya mendukung perkembangan ekonomi kreatif setiap tahun dilaksankaan pembinaan, penguatan, pelatihan dan setifikasi bagi pelaku ekraf antara lain sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata dan setifikasi profesi (cookery, barista, dll) untuk mengembangkan kompetensi SDM ekonomi kreatif.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha, salah satunya sektor pariwisata, dengan penghapusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Untuk perizinan berbasis risiko tersebut dilakukan penilaian Tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, sehingga dikategorikan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berikut data Usaha Jasa Pariwisata yang ber-NIB tahun 2025 :

Tabel 2.158

Usaha Jasa Pariwisata ber-NIB Tahun 2025

No.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	2025
1	49425 (Angkutan Darat Wisata)	4
2	55110 (Hotel Bintang)	1
3	55120 (Hotel Melati)	2
4	55130 (Pondok Wisata)	5
5	55191 (Penginapan Remaja/Youth Hostel)	2
6	55192 (Bumi Perkemahan, Perisinggahan Karavan, dan Taman Karavan)	2
7	55193 (Villa)	7
8	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya)	9
9	55900 (Penyediaan Akomodasi Lainnya)	24
10	56101 (Restoran)	22
11	56102 (Rumah/Warung Makan)	184
12	56103 (Kedai Makanan)	515
13	56104 (Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap)	71
14	56109 (Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya)	4
15	56210 (Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu(Event Catering))	23
16	56290 (Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu)	43
17	56303 (Rumah Minum/ Kafe)	13
18	56304 (Kedai Minuman)	36
19	56306 (Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap)	10
20	68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus)	1
21	79111 (Aktivitas Agen Perjalanan Wisata)	15
22	79119 (Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya)	6
23	79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata)	17
24	79129 (Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya)	3
25	79911 (Jasa Informasi Pariwisata)	3
26	79921 (Jasa Pramuwisata)	1
27	79990 (Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL)	2
28	82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice))	6
29	82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event))	12
30	93114 (Fasilitas Lapangan)	2
31	93116 (Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center)	1
32	93119 (Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya)	3

No.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	2025
33	93224 (Wisata Pantai)	1
34	93229 (Daya Tarik Wisata Alam Lainnya)	1
35	93231 (Wisata Agro)	3
36	93239 (Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya)	3
37	93241 (Arung Jeram)	1
38	93244 (Kolam Pemancingan)	2
39	93249 (Wisata Tirta Lainnya)	1
40	93292 (Karaoke)	8
41	93293 (Usaha Arena Permainan)	2
42	96121 (Rumah Pijat)	4
43	96122 (Aktivitas SPA / Sante Par Aqua)	1
44	96129 (Aktivitas Kebugaran Lainnya)	1

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) yang telah memiliki NIB, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.526 usaha, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.077 usaha. Dengan demikian, terjadi penurunan sebanyak 449 usaha dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, struktur usaha jasa pariwisata pada kedua tahun masih didominasi oleh usaha jasa pariwisata kuliner, khususnya Kedai Makanan dan Rumah/Warung Makan, yang menjadi kontributor terbesar jumlah pelaku usaha ber-NIB. Selain itu, usaha jasa pariwisata akomodasi, biro perjalanan wisata, serta jasa boga juga tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total usaha jasa pariwisata yang terdaftar.

Penurunan jumlah usaha ber-NIB pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, penyesuaian klasifikasi KBLI, maupun adanya usaha yang sudah tidak aktif beroperasi. Meskipun demikian, jumlah 1.077 usaha jasa pariwisata ber-NIB menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo masih memiliki basis usaha yang cukup kuat dan beragam sebagai pendukung pengembangan destinasi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.3.3 Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian Tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.159

Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 - 2025

No.	Kondisi	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Padi dan Palawija (ton)	205.435,67	199.904,88	204.988,50	192.674,39	166.441
2	Produksi Sayuran dan Buah-buahan semusim (ton)	76.851,69	78.642,78	92.609,80	100.132,40	72.479,093
3	Produksi Buah-buahan dan sayuran tahunan (ton)	101.906,11	103.548,8	99.872,40	169.649,20	211.704,995

No.	Kondisi	2021	2022	2023	2024	2025
4	Produksi Biofarmaka (ton)	13.962,57	15.224,02	14.961,99	15.390,04	9.698,47
5	Produksi Perkebunan (ton)	139.997,02	107.181,32	97.797,80	94.550,54	160.063,58
6.	Populasi ternak besar (ekor)	55.865	55.106	55.252	56.102	58.058
7.	Populasi ternak kecil (ekor)	151,545	169.112	203.873	194.391	197.289
8.	Populasi unggas (ekor)	6.159.278	5.759.630	5.777.612	5.677.597	5.689.793
9.	Produksi daging (kg)	13,315,067	12.765.210	16.041.420	16.866.636	14.676.000
10.	Produksi telur (kg)	11.995.213	11.468.959	15.255.870	17.904.616	17.610.000
11.	Konsumsi protein hewani (gr/kap/hari)	17,0	17,6	15,6	14,6	21,9

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pada tahun 2025, 4 dari 11 indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengalami peningkatan dibanding tahun 2024, sedangkan ada 7 indikator yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Produksi padi dan palawija pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12.314,11 ton dibanding Tahun 2024. Penurunan produksi komoditas tanaman pangan sebesar terutama pada komoditas jagung karena banyak petani yang memanen muda pertanaman jagung untuk dijadikan pakan ternak dan pada saat menjelang panen terjadi hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas jagung, selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Kalibawang selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan terhambatnya produksi tanaman jagung. Produksi padi mengalami kenaikan 15,71% dibandingkan dengan tahun 2024, kenaikan ini karena pada di MT I 2025 terdapat peningkatan luas panen karena program Luas Tambah Tanam. Kebutuhan air untuk budidaya padi tercukupi dari saluran irigasi. Intensifikasi pemupukan seimbang oleh petani yang didampingi penyuluh pertanian dan terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman pada tanaman padi karena Dinas Pertanian dan Pangan bersama dengan Regu Pengendali Tanaman (RPT) rutin melakukan gerakan pengendalian hama (Gerdal). Kondisi Iklim juga sangat mendukung budidaya padi, curah hujan yang tinggi karena efek anomali iklim La Nina membantu penyediaan air untuk budidaya padi.

Produksi tanaman buah sayuran semusim mengalami penurunan karena beberapa faktor antara lain fenomena iklim La Nina yang menyebabkan curah hujan lebih tinggi daripada musim biasanya sehingga menyebabkan banyak lahan budidaya sayur tidak dapat ditanami karena kebanjiran dan juga curah hujan tinggi membuat penurunan kualitas dan kuantitas sayur dan buah semusim karena meningkatnya serangan hama dan penyakit.

Produksi tanaman buah dan sayuran tahunan mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Peningkatan produksi signifikan pada komoditas buah tahunan banyak dipengaruhi oleh ketersedian air yang melimpah pada musim kemarau dikarenakan La Nina sehingga mendorong peningkatan panen komoditas buah tahunan. Komoditas perkebunan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dengan alasan yang kurang lebih sama dengan faktor yang menyebabkan kenaikan produksi tanaman tahunan yaitu curah hujan yang melimpah di musim kering atau kemarau.

Populasi ternak besar mengalami peningkatan, sedangkan ternak kecil dan unggas mengalami penurunan. Kondisi peternakan yang sudah mulai stabil dan penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD (Lumpy Skin Diseases) sudah terkendali, sehingga peternak kembali bersemangat untuk membudidayakan ternaknya.

Tabel 2.160

Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kapanewon

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025

No.	Kapanewon	Jumlah Penyakit per Kapanewon				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Samigaluh	171	531	549	367	292
2	Kalibawang	285	331	378	359	349
3	Nanggulan	130	238	615	267	427
4	Girimulyo	315	291	530	521	459
5	Sentolo	128	357	934	293	322
6	Pengasih	398	900	1.250	474	585
7	Kokap	376	358	364	1.075	577
8	Lendah	204	563	607	370	428
9	Wates	179	246	952	1.555	3.185
10	Temon	144	236	2.052	236	246
11	Panjatan	193	1.035	4.862	1.413	2.115
12	Galur	496	894	513	644	309
	Jumlah	**3.019**	**5.981**	**13.606**	**7.248**	**9.294**

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Penyakit hewan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Pada Tahun 2025 jumlah penyakit hewan sejumlah 9.294 penyakit sedangkan tahun 2024 sejumlah 7.248 atau meningkat sebanyak 2.046 penyakit. Sebaran penyakit hewan tertinggi ada di Kapanewon Wates, Panjatan dan Pengasih. Peningkatan jumlah kasus penyakit hewan mengalami peningkatan karena tingkat kunjungan Medik Veteriner ke Kelompok Tani dan peternak mengalami peningkatan sehingga kasus penyakit pada hewan yang tercatat juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah kasus penyakit juga karena peningkatan signifikan populasi kambing, pada tahun 2024 populasi kambing sebanyak 97.538 ekor dan pada tahun 2025 sebanyak 137.528 ekor. Curah hujan pada tahun 2025 meningkat sebanyak 120% dibanding tahun 2024 memicu kelembaban tanah meningkat sehingga bertahan lebih lama di tanah dan rumput saat curah hujan tinggi Telur dan larva cacing (misalnya *Strongylidae, Haemonchus*) bertahan lebih lama di tanah dan rumput saat curah hujan tinggi memperbesar peluang ternak menelan larva saat merumput. Kenaikan kasus bisa jadi bukan tanda kegagalan, melainkan indikator keberhasilan deteksi. Dengan kunjungan aktif, data menjadi lebih transparan dan nyata, sehingga terlihat ada peningkatan kasus dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.161

Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2023-2025

Keterangan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
Produktivitas Padi	69,22 ku/ha	68,41 ku/ha	67,76 ku/ha

Keterangan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
Produktivitas Jagung	67,86 ku/ha	68,65 ku/ha	54,13 ku/ha
Produktivitas Kedelai	16,35 ku/ha	15,78 ku/ha	16,32 ku/ha
Produktivitas Ubi Kayu	211,74 ku/ha	210,69 ku/ha	212 ku/ha
Produktivitas Kacang Tanah	15,23 ku/ha	15,21 ku/ha	15,32 ku/ha

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan kedelai, kacang tanah dan ubi kayu mengalami kenaikan produktivitas, sedangkan padi dan jagung mengalami penurunan produktivitas karena adanya kemarau/musim panas dan dengan adanya wabah wereng batang coklat yang mengakibatkan puso penurunan produktivitas padi. Pengendalian hama penyakit tanaman dengan gerakan pengendalian yang rutin telah dilaksanakan sehingga hama penyakit tidak berkembang biak yang dapat menurunkan produksi. Produktivitas jagung menurun karena adanya hujan dengan intensitas tinggi pada musim panen sehingga terjadi kerusakan pada jagung yang sudah akan panen yang menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi jagung juga menurun.

Untuk meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya, Pemerintah daerah memberikan dukungan/ fasilitasi sarana produksi berupa bibit dan pupuk, serta penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Sarana prasarana pertanian berupa rehabilitasi jaringan irigasi, cetak sawah baru untuk komoditas tanaman pangan, alat dan mesin budidaya tanaman pangan seperti traktor roda empat dan dua, pompa air, cultivator, combine harvester dan power theser. Dengan adanya peningkatan produksi dan produktivitas pangan, maka ketahanan pangan daerah juga akan meningkat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pelestarian pertanian Lahan Surjan yang tersebar di wilayah Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Pengasih dan Kokap. Pertanian pada Lahan Surjan merupakan sistem pertanian tradisional di mana lahan pertanian dibuat bertingkat, bagian bawah untuk menanam padi dan bagian atas untuk menanam palawija/sayuran. Lahan pertanian yang demikian apabila dilihat dari atas tampak bergaris-garis seperti surjan, pakaian tradisional yang biasa dipakai orang Jawa. Garis-garis tersebut terbentuk dari alur-alur tinggi dan rendah. Alur yang rendah atau bagian bawah yang bersifat aquatic ditanami padi, sedangkan bagian alur yang lebih tinggi yang bersifat kering ditanami palawija atau sayuran. Sistem ini merupakan adaptasi terhadap topografi rendah dan mudah tergenang air. Lahan surjan diharapkan dibuat memanjang ke arah barat-timur dengan tujuan tanaman yang dibudidayakan mendapatkan penyinaran matahari yang cukup.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Nilai usaha perdagangan adalah jumlah omzet seluruh pelaku usaha perdagangan dalam waktu 1 tahun, baik omzet perdagangan di dalam pasar, di luar pasar, maupun perdagangan luar daerah (ekspor). Perkembangan sektor perdagangan sampai dengan tahun 2025 memiliki tren pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.162

Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Rakyat Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Penerbitan			Total
	Kios	Los	Bango	
2021	664	5.043	991	6.878
2022	647	4.882	1.561	7.090
2023	567	3.947	2.682	7.196
2024	559	3.905	2.834	7.298
2025	733	3.891	2.140	6.764

Sumberdata: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2026

Penerbitan perizinan di pasar rakyat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7,32% dibandingkan tahun 2024. Untuk jumlah pedagang yang menempati kios mengalami kenaikan sebesar 31,13%. Sementara untuk pedagang yang menempati los dan arakan/dasaran/ bango mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,36% dan 24,49%.

Tabel 2.163

Data Ekspor Bersih Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Net Ekspor
2021	177.883.276.496	33.992.938.023	143.890.338.473
2022	374.531.845.396	49.380.832.117	325.151.013.279
2023	236.113.493.009	26.013.900.180	210.099.592.829
2024	247.563.011.770	13.546.541.537	234.016.470.233
2025	259.977.453.179	24.160.957.374	235.816.495.805

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai ekspor tahun 2025 mencapai Rp 259.977.453.179 sedangkan nilai impor sebesar Rp 24.160.957.374 sehingga nilai net ekspor tahun 2025 sebesar Rp 235.816.495.805. Nilai net ekspor pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.800.025.572 dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor.

Tabel 2.164

Jenis Komoditi dan Negata Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Komoditi	2024	2025
1	Arang Briket	Saudi Arabia, Korea Selatan, New Zealand, Jerman, Belanda, Uni Emirat Arab, Lebanon	Saudi Arabia, Korea Selatan, New Zealand, Turki
2	Kerajinan Serat Alam	Amerika Serikat, Kanada, Inggris	Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Australia, Belgia, Italia, Hong Kong, Singapura, Belanda, Argentina, Uruguay
3	*Synthetic Wigs*	Amerika Serikat	Amerika Serikat
4	Gula Kristal	Amerika Serikat, Prancis, Australia, New Zealand, Jerman, Belanda, Jepang, Vietnam, Peru,	Amerika Serikat, Prancis, Australia, New Zealand, Jerman, Belanda, Jepang, Vietnam, Peru, China, Korea Selatan,

No	Jenis Komoditi	2024	2025
		China	Kanada, Malaysia
5	Kerajinan Kayu	Prancis, Belanda	Prancis, Belanda
6	Traktor Tangan	Timor Leste, Brunei Darussalam, Panama, Nigeria, Uganda	Timor Leste, Nigeria, Cook Island, Malaysia
7	Sarung Tangan	Korea Selatan	Korea Selatan
8	Kerajinan Bambu	Australia, New Zealand, Polandia, Uni Emirat Arab	Australia, Uni Emirat Arab

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2026

Pada tahun 2025 terdapat beberapa komoditas ekspor mengalami perubahan tujuan negara ekspor seperti Arang Briket, Kerajinan Serat Alam, Gula Kristal, Traktor Tangan dan Kerajinan Bambu. Arang Briket mengalami penurunan jumlah negara tujuan ekspor dari 7 Negara menjadi 4 Negara tujuan.Hal ini juga terjadi pada komoditas Traktor Tangan yang semula mengekspor ke 5 Negara menjadi 4 Negara serta Kerajinan Bambu yang semula mengekspor ke 5 negara menjadi 2 negara..

Komoditas yang mengalami penambahan negara tujuan ekspor adalah Kerajinan Serat Alam dan Gula Kristal. Kerajinan Serat Alam pada tahun 2025 memiliki 12 negara tujuan ekspor yang semula pada tahun 2024 hanya 3 negara. Sedangkan Gula Kristal mengalami penambahan dari 10 negara tujuan menjadi 13 negara pada tahun 2025.

Tabel 2.165

Perkembangan Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Mata Dagangan	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
			Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD
1	Arang Briket	Kg	152.460	151.918	2.431.916	985.845	1.488.516	1.064.580,2	868.576	594.633,5	8601.800	550.766
2	Kerajinan serat alam	Pcs	35.250	208.830	142.466	2.403.198	256.756	825.284,2	210.090	1.146.426,2	283.108	1.396.840
3	Kerajinan Kayu	Pcs	285	11.933	315	13.190	330	13.018,9	216	25.148,8	1.781	64.494
4	The Mahkota Dewa	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gula Kristal	Ton	1.565.173	2.617.529	779.960	1.344.759	1.607.032,8	2.893.705,4	1.583.819	2.830.480,1	2.195.078	4.048.914
6	Synthetic wigs	Pcs	703.368	8.371.919	1.567.601	20.108.220	798.143	9.681.145	638.588	9.011.111	600.611	7.631.926
7	Sabut Kelapa	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Traktor Tangan	Unit	5.751	316.444	5.851	323.537	111	235.480,4	255	451.390,4	123	274.144
9	Sarung Tangan	Pcs	1.624.331	620.013	1.532.372	651.035	1.233.558	633.495,7	2.963.232	1.306.744,7	2.601.924	874.770
10	Kerajinan Bambu	Pcs	13.464	96.645	14.964	103.928	21.009	192.853,1	21.375	191.690,5	36.180	294.781
				12.395.231		**25.933.712**		**15.539.563**		**15.557.625**		**15.136.635**

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 jumlah nilai ekspor mencapai US$15.136.635. Realisasi lebih rendah dari pada tahun 2024 yaitu sebesar US$15.557.625. Penurunan tersebut terjadi karena pada beberapa komoditas ekspor mengalami penurunan nilai ekspor yaitu komoditas Arang Briket,, Synthetic Wigs, Traktor Tangan, dan Sarung Tangan.

Tabel 2.166

Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat dan Jumlah Pedagang Tahun 2023-2025

No	Nama Pasar Rakyat	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang
1	Pasar Wates	Baik	1.123	Baik	1322	Baik	995
2	Pasar Brosot	Sedang	303	Sedang	303	Sedang	165
3	Pasar Kasihan	Sedang	136	Baik	136	Baik	400
4	Pasar Dekso	Baik	474	Baik	427	Baik	474
5	Pasar Bendungan	Baik	753	Baik	753	Baik	520
6	Pasar Kranggan	Sedang	527	Sedang	527	Baik	527
7	Pasar Pripih	Sedang	206	Sedang	206	Sedang	183
8	Pasar Jombokan	Sedang	306	Baik	306	Baik	342
9	Pasar Bangeran	Sedang	135	Sedang	135	Sedang	85
10	Pasar Percontohan Sentolo	Baik	231	Baik	231	Baik	260
11	Pasar Kenteng	Sedang	622	Sedang	572	Sedang	582
12	Pasar Samigaluh	Baik	169	Baik	169	Baik	175
13	Pasar Jagalan	Baik	242	Baik	242	Baik	281
14	Pasar Niten	Sedang	128	Sedang	128	Sedang	75
15	Pasar Glaeng	Sedang	146	Sedang	146	Sedang	104
16	Pasar Temon	Sedang	186	Sedang	186	Sedang	144
17	Pasar Kelapa	Sedang	83	Sedang	83	Sedang	80
18	Pasar Sewugalur	Sedang	267	Sedang	267	Sedang	409
19	Pasar Potrogaten	Sedang	261	Sedang	261	Sedang	180
20	Pasar Nanggulan	Baik	179	Baik	179	Baik	112
21	Pasar Ngaglik	Sedang	161	Sedang	161	Sedang	204
22	Pasar Panjatan	Kurang	36	Kurang	36	Kurang	30
23	Pasar Gejlik	Kurang	88	-	-	-	-
24	Pasar Nganggrung	Sedang	99	Sedang	99	Sedang	101

No	Nama Pasar Rakyat	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang
25	Pasar Clereng	Kurang	245	Kurang	245	Kurang	287
26	Pasar Menguri	Kurang	90	Kurang	90	Kurang	49
27	Pasar Ngebung	-	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2026

Tabel 2.167

Rekapitulasi Kondisi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2021-2025

Tahun	Kondisi			Jumlah
	Baik	Sedang	Kurang	
2021	20	4	3	27
2022	25	0	2	27
2023	25	0	1	26
2024	9	13	3	25
2025	10	12	3	25

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2026

Pasar Rakyat dengan sarana dan prasarana kondisi baik pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 9 pasar menjadi 10 pasar. Penambahan 1 pasar yang kondisinya meningkat dari sedang menjadi baik adalah Pasar Kranggan yang direhab pada tahun anggaran 2025.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pedagang pasar rakyat yang menggunakan sarana perdagangan berupa kios, los dan bango. Pada tahun 2023 jumlah pedagang pasar rakyat mencapai 7.196 atau mengalami kenaikan sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.168

Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Berdasarkan Sarana Perdagangan Yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tahun	Pedagang			Jumlah
	Kios	Los	Bango/Pelataran	
2021	671	5.005	3.206	8.882
2022	647	4.882	1.561	7.090
2023	567	3.941	2.682	7.196
2024	559	3.905	2.834	7.298
2025	723	3.786	1.795	6.764

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.169

Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Rakyat Tahun 2021 – 2025

No.	Rincian Pendapatan	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	PelayananPersampahan / Kebersihan	439.787.800	424.136.200	426.580.000	77.846.100	-
2	Retribusi Pelayanan Pasar	1.021.544.150	1.228.041.600	1.207.037.900	1.609.118.950	1.981.905.750
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	19.046.500	19.390.000	21.300.000	-	-
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	106.078.600	123.755.400	139.165.000	22.212.000	-
5	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	-	-	-	123.343.000	225.880.000
6	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	26.728.650	24.189.200	22.649.440	9.039.350	-
	Jumlah	**1.613.185.700**	**1.819.512.400**	**1.816.732.340**	**1.841.559.400**	**2.207.785.750**

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2026

Pendapatan sektor perdagangan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 19,89% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 366.226.350,00. Kenaikan meliputi retribusi pelayana pasar maupun retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Untuk retribusi persampahan kebersihan maupun hasil pemanfaatan kekayaan daerah sudah bukan wewenang Dinas Perdagangan lagi.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2025 diperlihatkan di tabel berikut.

Tabel 2.170

Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon ProgoTahun 2021-2025

No.	Kriteria	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sentra	34	34	34	34	34
2.	Unit Usaha	15.589	15.847	15.962	16.092	16.262
3.	Tenaga Kerja (orang)	37.907	60.071	61.342	61.975	62.371
4.	Nilai Investasi (Rp.)	105.478.783	193.461.832.000	198.274.678.562	202.315.149.000	240.153.693.000
5.	Nilai Produksi (Rp.)	908.242.475.000	2.542.338.689.000	2.637.962.355.375	2.730.916.038.000	3.005.292.167.000
6.	Nilai Bahan baku/ Penolong (Rp.)	498.726.007.000	967.556.070.000	970.670.479.201	972.324.264.000	693.653.671.000
7.	Upah Tenaga Kerja (Rp.)	141.660.659.000	410.940.995.000	425.644.825.409	440.544.894.000	420.740.903.000
8.	Nilai Tambah (Rp.)	267.855.956.000	1.368.022.407.000	2.210.785.078.851	2.288.779.851.000	2.311.638.496.000

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, 2026

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor industri di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan terhadap tahun sebelumnya. Terdapat penambahan usaha industri baru di tahun 2025

sebanyak 170 unit usaha, dari 16.092 unit usaha pada tahun 2024 menjadi 16.262 unit usaha pada tahun 2025. Peningkatan jumlah unit usaha ini diikuti dengan peningkatan nilai investasi, nilai produksi dan peningkatan nilai tambah. Untuk nilai bahan baku/ penolong dan upah tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2025 yang disebabkan oleh hilangnya atau ditutupnya beberapa industri sehingga berpengaruh besar terhadap pengurangan bahan baku dan penurunan jumlah tenaga kerja. Sedangkan penambahan industri baru lebih banyak berupa industri olahan makanan minuman rumah tangga.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi pada periode 2021–2025 secara konsisten memberangkatkan 2 KK ke setiap lokasi transmigrasi. Namun, pada tahun 2021 tidak dilakukan pengiriman transmigran karena adanya kendala akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2025, lokasi tujuan transmigrasi berada di Torire, Poso, Sulawesi Tengah, sebanyak 5 kepala keluarga dengan total bantuan modal yang diberikan sebesar Rp14.000.000,00 untuk masing-masing kpala keluarga.

Tabel 2.171

Penempatan Dan Bantuan Modal Transmigrasi Tahun 2021 – 2025

Tahun	Alokasi		Realisasi		Bantuan Modal
	KK	Lokasi	KK	Lokasi	
2021	-	-	-	-	-
2022	2	1	2	1	Rp16.000.000
2023	2	1	2	1	Rp20.000.000
2024	2	1	2	1	Rp28.000.000
2025	5	1	5	1	Rp70.000.000

Sumber data: SIPD Ewalidata, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, 2026

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah. Berikut ini memperlihatkan produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Tabel 2.172

Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2020-2025

No.	Produk Hukum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peraturan Daerah	12	15	14	9	11	12
2.	Peraturan Bupati	59	84	53	84	63	53
3.	Keputusan Bupati	406	511	528	518	532	448
4.	Instruksi Bupati	0	34	29	1	6	2
	Jumlah	**477**	**644**	**624**	**612**	**612**	**515**

Sumber data: SIPD Ewalidata, Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo, 2026

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas, pada tahun 2025 terdapat pengundangan 12 Peraturan Daerah dan 53 Peraturan Bupati, serta penetapan 448 Keputusan Bupati dan 2 Instruksi Bupati.

Adapun hal ini selaras dan memenuhi target pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2025 yakni 7 Raperda Eksekutif, 3 Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kumulatif Terbuka), dan 2 Raperda Inisiatif (Legislatif).

Pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada pedoman Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

; bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Salah satu dinamisasi lingkungan adalah adanya peraturan baru yang bersifat khusus seperti halnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi ini memberikan amanah lima bidang kewenangan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dalam implementasinya Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengalirkan urusan keistimewaan khususnya bidang kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Bertambahnya kewenangan pada hakikatnya menjadikan penambahan fungsi dan beban kerja yang perlu diwadahi dalam sebuah lembaga yang proporsional, tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, dan 12 Kapanewon. Rincian perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.173

Daftar Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	RUMPUN PD	PD / UNIT ORGANISASI
A	SEKRETARIAT DAERAH	Tipe B
B	SEKRETARIAT DPRD	Tipe B
C	INSPEKTORAT DAERAH	Tipe B
D	DINAS DAERAH	1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A 2. Dinas Kesehatan Tipe A 3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A 4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 6. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tipe B 8. Dinas Tenaga Kerja Tipe B 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 10. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B 11. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B 12. Dinas Pariwisata Tipe B 13. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B 17. Dinas Perdagangan Tipe C 18. Dinas Perhubungan Tipe C

NO.	RUMPUN PD	PD / UNIT ORGANISASI
		19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C 20. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C
E	BADAN DAERAH	1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A
F	KAPANEWON	1. Kapanewon Temon Tipe A 2. Kapanewon Wates Tipe A 3. Kapanewon Panjatan Tipe A 4. Kapanewon Galur Tipe A 5. Kapanewon Lendah Tipe A 6. Kapanewon Sentolo Tipe A 7. Kapanewon Pengasih Tipe A 8. Kapanewon Kokap Tipe A 9. Kapanewon Girimulyo Tipe A 10. Kapanewon Nanggulan Tipe A 11. Kapanewon Samigaluh Tipe A 12. Kapanewon Kalibawang Tipe A
JUMLAH PERANGKAT DAERAH		**40**

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab Kulon Progo, 2026

Penetapan tipe Perangkat Daerah di atas sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kapanewon dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada analisis beban kerja masing-masing urusan pemerintahan. Disamping itu, juga memperhatikan asas-asas dalam penentuan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Analisis beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%. Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1.000.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 mendasar kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi RB tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,71 dengan komponen penilaian RB General sebesar 77,52 dan RB Tematik sebesar 8,19. Indeks RB tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 (perolehan Indeks RB 87,04). Penilaian Indeks RB tahun 2025 menggunakan 34 komponen, yang terdiri atas 24 komponen RB General dan 10 komponen RB Tematik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPANRB, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Reformasi Birokrasi agar lebih berorientasi pada hasil. Beberapa indikator strategis seperti Pembangunan Zona Integritas, Maturitas SPIP, Indeks SPBE, Sistem Merit, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR), serta Indeks Pembangunan Statistik belum mencapai target optimal dan sebagian masih menunjukkan capaian yang stagnan. Selain itu, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan risiko, penguatan integritas, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterkaitan antara rencana aksi dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Pada aspek Reformasi Birokrasi Tematik, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya rencana aksi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dalam penanganan stunting, dan pengendalian inflasi. Sebagian rencana aksi masih berorientasi pada aktivitas administratif dan belum menunjukkan inovasi maupun dampak yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan strategis daerah.

Untuk meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat kualitas perencanaan berbasis analisis kesenjangan, menyusun target yang lebih progresif, meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian korupsi, mempercepat transformasi digital melalui SPBE, mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta memastikan seluruh rencana aksi tematik berfokus pada penyelesaian masalah prioritas daerah dan menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Terkait dengan Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK terkait dengan integritas di Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Secara umum, pelaksanaan tugas di Kabupaten Kulon Progo ini menghadapi beberapa risiko yang sangat rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor, konfilk kepentingan maupun risiko atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian, risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
2. Instansi Kabupaten Kulon Progo telah dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian risiko ketiadaan objektivitas tetap perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan.
3. Sistem Pengawasan Internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik, meskipun demikian risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi, terutama pada area-area rawan seperti perizinan, rekrutmen pegawai, penentuan pemenang tender, dan lain sebagainya.
4. Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo dan termasuk di atas rata-rata nasional, akan tetapi sosialisasi antikorupsi tetap perlu dirancang agar lebih efektif.
5. Upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Kulon Progo sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi.
6. Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberikan kepastian bahwa laporan akan ditindaklanjuti

Perkembangan jumlah lembaga keuangan bank cenderung mengalami penurunan dan lembaga keuangan non bank serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih stabil. Di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 jumlah lembaga keuangan perbankan mengalami penurunan karena adanya transformasi digital (peralihan ke mobile/internet banking, dapat juga sebagai salah satu strategi efisiensi biaya operasional serta adanya akuisisi untuk memperkuat modal.

BUMD dengan unit-unit usahanya di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari PT. BPR Bank Kulon Progo, PT. Selo Adikarto, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, dan Perumda Air Minum Tirta Binangun. Pada Tahun 2025, setoran PAD atas tahun buku 2024 hanya dilakukan oleh PT. BPR Bank Kulon Progo dan Perumda Air Minum Tirta Binangun. Sedangkan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo tidak dapat melakukan penyetoran PAD karena mengalami kerugian dan begitu pula dengan PT. Selo Adikarto tidak dapat melakukan penyetoran PAD karena bagian laba digunakan untuk menutup kerugian pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.174

Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2025

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Lembaga keuangan, perbankan						
	a. Bank Pemerintah	40	38	36	35	33	a. PT Bank BRI : 25 Unit b. Bank Syariah Indonesia : 1 unit c. PT Bank BTN : 1 unit d. PT Bank Mandiri : 4 unit e. PT BNI : 2 unit
	b. Bank Milik Daerah	37	38	37	36	34	a. PT Bank BPD DIY : - 1 unit kantor cabang - 16 unit kantor cabang pembantu - 1 unit kantor BPD Syariah; b. PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) : - 1 Unit kantor pusat - 14 unit kantor kas - 1 unit payment point
	c. Bank Swasta	3	4	4	3	2	a. PT BCA : 1 unit

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
							b. PT Bank Woori Saudara Indonesia : 1 unit
	d. BPR/ BPRS	18	18	19	18	13	unit (di luar Perumda BPR Bank Kulon Progo): a. PT BPR Bank Shinta Putra : 1 unit b. PT BPR Bhakti Daya Ekonomi : 1 unit c. PT BPR Shinta Daya : 1 unit d. PT BPR Nusamba Temon : 5 unit e. PT BPR Ukabima Lestari : 1 unit f. 4 unit BPRS
	e. BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)	14	14	14	14	14	unit (lokasi ada di setiap kapanewon, Kapanewon Pengasih dan Kapanewon kokap masing-masing memiliki 2 unit)
	f. Pegadaian	6	6	6	6	6	unit
2	Jumlah Unit Usaha Daerah						
	a. Jumlah BUMD	4	4	4	4	4	unit (Perumda Air Minum Tirta Binangun, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, PT Selo Adikarto, PT BPR Bank Kulon Progo
	b. Jumlah Perumda	3	3	3	3	2	unit (Bidang Usaha Perdagangan, Jasa, Industri, Unit PDAM)
	c. Jumlah PT	1	1	1	1	2	Unit (Bidang Usaha Asphalt Mixing Plant, Jasa keuangan)

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
	d. Jumlah BPR	1	1	1	1	1	unit
	e. Jumlah PDAM	1	1	1	1	1	unit (terdapat 10 unit pelayanan PDAM yang berlokasi di kapanewon)
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (PAD)						
	a. PT BPR Bank Kulon Progo (Perserodan)	1.444.824.324	2.200.759.322	2.400.000.000	2.593.388.679	2.782.673.817	Rp.
	b. Perumda Air Minum Tirta Binangun	2.287.779.886	686.853.143	1.264.209.811	2.033.064.066	1.352.444.773	Rp.
	c. BUKP DIY	112.877.552	86.261.771	132.140.175	97.088.341	22.886.174	Rp.
	d. PT Selo Adikarto	-	268.170.001	151.811.387	-	-	Rp.
	e. Perumda Aneka Usaha	300.000.000	198.588.612	8.569.254	72.332.777	-	Rp.

Sumber data: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Jumlah lembaga keuangan bank dan non bank pada tahun 2024 adalah sebanyak 502 unit, terdiri dari 58 unit Bank Umum Konvensional, 1 unit Bank Umum Syariah, 30 unit Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, 3 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 11 Industri Keuangan Non Bank Konvensional, 397 unit lembaga keuangan lainnya. Dilihat dari lokasi sebaran per wilayah kapanewon, Wates merupakan wilayah dengan jumlah lembaga keuangan terbanyak, yaitu 115 lembaga keuangan. Sedangkan Girimulyo merupakan wilayah Kapanewon dengan jumlah lembaga keuangan paling sedikit yaitu 18 lembaga keuangan. Dengan adanya persebaran lembaga keuangan di masing-masing kapanewon maka literasi keuangan masyarakat Kulon Progo akan semakin meningkat. Masyarakat menjadi lebih melek lagi terhadap perbankan dan juga tidak perlu jauh dari masing-masing tempat tinggal karena sudah tersebar di masing-masing kapanewon. Dengan peningkatan literasi perbankan di masyarakat maka akan meningkat kegiatan ekonomi masyarakat karena akses kredit ataupun transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan baik lagi. Pihak perbankan juga akan memperoleh pangsa pasar baru dengan membuka cabang di masing-masing kapanewon. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikutnya dimana setiap tahun posisi simpanan masyarakat dan juga penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat.

Tabel 2.175

Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan

Tahun 2023

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	7	0	3	0	1	0	44	55
2	Wates	20	1	10	2	6	0	76	115
3	Panjatan	3	0	1	0	0	0	25	29
4	Galur	3	0	3	0	2	0	27	35
5	Lendah	3	0	1	0	0	0	23	27
6	Sentolo	9	0	2	0	1	0	32	44
7	Pengasih	3	0	3	1	0	0	52	59
8	Kokap	3	0	1	1	0	0	34	38
9	Nanggulan	2	0	3	0	0	0	23	28
10	Girimulyo	2	0	1	0	0	0	15	18
11	Samigaluh	2	0	1	0	0	0	26	29
12	Kalibawang	3	0	3	2	1	0	20	27
	JUMLAH	**60**	**1**	**32**	**3**	**11**	**0**	**397**	**504**

Tabel 2.176

Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan

Tahun 2024

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	7		3		1		44	35
2	Wates	19	1	9	2	7		78	18
3	Panjatan	3		1		0		25	27
4	Galur	3		3		2		27	38
5	Lendah	3		1		0		23	27
6	Sentolo	8		2		1		30	27
7	Pengasih	3		3	1	0		52	29
8	Kokap	3		1		0		34	59
9	Nanggulan	2		2		0		23	30
10	Girimulyo	2		1		0		15	41
11	Samigaluh	2		1		0		27	55
12	Kalibawang	3		3		1		20	116
	JUMLAH	**58**	**1**	**30**	**3**	**12**	**0**	**398**	**502**

Tabel 2.177

Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan Tahun 2025

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	6	0	2	0	1	0	62	71
2	Wates	16	2	9	3	4	0	86	120
3	Panjatan	3	0	1	0	0	0	37	41
4	Galur	3	0	2	0	2	0	34	41
5	Lendah	3	0	1	0	0	0	31	35
6	Sentolo	5	0	2	0	1	0	38	46
7	Pengasih	3	0	3	0	1	0	61	68
8	Kokap	3	0	1	0	1	0	39	44
9	Nanggulan	2	0	1	0	1	0	28	32
10	Girimulyo	2	0	1	0	0	0	19	22
11	Samigaluh	2	0	1	0	0	0	34	37
12	Kalibawang	3	0	2	0	2	0	25	32
	JUMLAH	51	2	26	3	13	0	494	589

Tabel 2.178

Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)

No	Jenis Simpanan	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Giro	315.375	275.562	256.190	242.310	262.751
2	Simpanan Berjangka	923.480	755.719	974.881	949.594	945.284
3	Tabungan	3.240.665	3.152.570	3.528.498	3.541.696	3.550.154
	JUMLAH	**4.479.519**	**4.183.850**	**4.759.569**	**4.733.592**	**4.758.189**

Sumber data: Bank Indonesia, 2025

Tabel 2.179

Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (juta Rupiah)

No.	Kriteria Usaha	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Mikro	961.329	1.486.383	1.631.194	1.574.382	1.410.998
2	Kecil	595.747	569.272	516.014	567.991	575.943
3	Menengah	162.553	85.999	80.181	69.599	79.546
	JUMLAH	**1.719.629**	**2.141.654**	**2.227.390**	**2.184.972**	**2.066.487**

Sumber data: Bank Indonesia, 2025

Tabel 2.180

Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025
1	Jumlah BUMD	Unit	4	4	4	4	4
2	Jumlah Unit Usaha	Unit	7	7	7	7	7
3	Penyertaan Modal (Akumulasi)	Rp.	149.105.572.972	166.711.945.315	177.585.137.718	227.075.039.734	228.427.484.507
4	Modal Sendiri	Rp.	146.268.535.430	162.579.421.093	174.429.343.128	211.434.607.927	204.983.165.742
5	Volume Usaha (Omzet)	Rp.	179.856.352.471	181.999.877.996	209.012.938.594	219.081.162.493	179.132.529.575
6	Laba Bersih Tahun Berjalan (EAT)	Rp.	6.244.020.629	7.171.577.216	9.316.868.303	7.862.397.587	4.917.539.746
7	Laba yang disetor (PAD)	Rp.	4.032.604.210	3.354.371.078	3.824.590.452	4.698.785.522	4.134.118.590
8	Aset	Rp.	660.179.909.045	713.990.931.274	741.202.974.579	817.226.865.774	805.027.560.977

Sumber data : Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Data di atas merupakan data gabungan dari 4 (empat) BUMD Kabupaten Kulon Progo, yaitu PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bergerak di sektor jasa keuangan/perbankan, PT. Selo Adikarto yang bergerak di bidang produksi dan penjualan Asphalt Mixing Plant (AMP), Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bergerak di sektor usaha perdagangan (SPBU/BBM), industri dan jasa (perbengkelan), dan Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bergerak di bidang penyedia air bersih. Data yang digunakan untuk tahun 2025 adalah data atas laporan keuangan audited pada PT. BPR Bank Kulon Progo, Perumda Air Minum Tirta Binangun, Perumda Aneka Usaha dan data atas laporan keuangan unaudit pada PT. Selo Adikarto.

Akumulasi Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah ke BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dengan mekanisme reinvestasi, PT. BPR Bank Kulon Progo tidak dilakukan penyertaan modal karena kondisi keuangan daerah sedangkan pada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan PT. Selo Adikarto tidak ada penyertaan modal karena ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modalnya telah terpenuhi pada tahun sebelumnya.

Modal sendiri pada BUMD rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah berupa uang maupun aset serta adanya perubahan pada nilai ekuitas pada masing-masing BUMD, pada tahun 2025 mengalami penurunan karena adanya penyertaan modal berupa aset sehingga berpengaruh terhadap beban penyusutan.

Secara keseluruhan akumulasi omset pada BUMD mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024, pada tahun 2025 mengalami penurunan karena adanya kebijakan penghentian sementara untuk

kegiatan bisnis dan operasional pada PT. Selo Adikarto sehingga berpengaruh terhadap akumulasi omset BUMD.

Pada tahun 2021 Perumda Air Minum Tirta Binangun pertama kali melakukan penyetoran Bagian Laba Yang diberikan kepada Pemerintah daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD atas laba tahun 2019 dan 2020. Nilai akumulasi PAD BUMD mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun. Kenaikan PAD sebagai dampak dari naiknya kinerja BUMD diantaranya kenaikan kredit yang disalurkan oleh PT. BPR Bank Kulon Progo dan bertambahnya layanan sambungan rumah serta pembayaran denda pada Perumda Air Minum Tirta Binangun serta penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang optimal. Penurunan PAD disebabkan adanya penambahan penyertaan modal berupa aset, terdapat BUMD yang tidak dapat melakukan penyetoran PAD karena mengalami kerugian ataupun untuk menutup kerugian usaha tahun sebelumnya, penutupan unit usaha pada BUMD yang berdampak adanya beban penyusutan yang menjadi beban perusahaan yang cukup signifikan.

Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penyertaan modal berupa barang kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun dan tidak adanya setoran PAD dari BUMD yang mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya gambaran kinerja BUMD Tahun 2021 - 2025, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

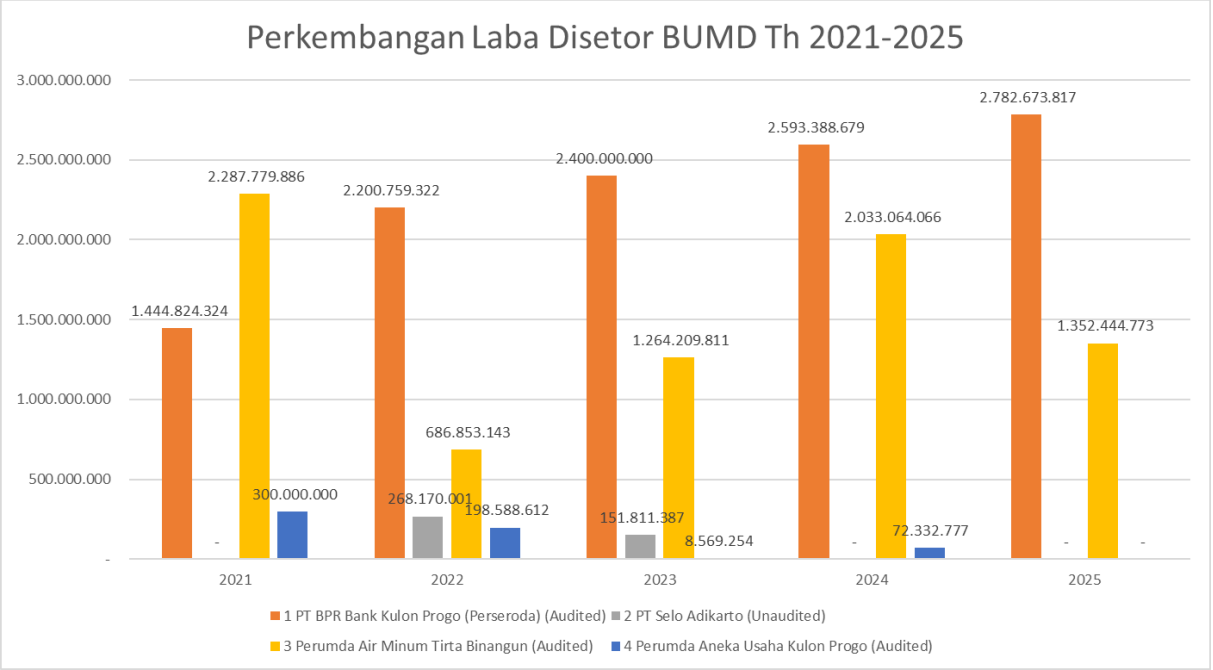

Sumber data : Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Gambar 2.41

Perkembangan Laba Disetor oleh BUMD Tahun 2021-2025

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laba disetor oleh BUMD paling besar diberikan oleh PD. BPR Bank Kulon Progo meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Selengkapnya perkembangan Lembaga BUMD pada Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.181

Lembaga BUMD Tahun 2025

No	BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Modal (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
1	PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda)	1	65.000.000.000	84.526.131.530	56.201.144.206	5.352.239.975	2.782.673.817	653.173.927.712
2	PT Selo Adikarto (Unaudited)	1	32.156.467.725	(16.363.760.811)	3.787.352.182	(3.412.256.796)	0	10.769.950.359
3	Perumda Air Minum Tirta Binangun	1	121.271.016.782	126.128.605.823	55.119.957.470	2.750.301.152	1.352.444.773	129.696.727.144
4	Perumda Aneka Usaha	4	10.000.000.000	10.692.189.200	64.024.075.717	227.255.415	0	11.386.955.762
	JUMLAH	**7**	**228.427.484.507**	**204.983.165.742**	**179.132.529.575**	**4.917.539.746**	**4.135.118.590**	**805.027.560.977**

Sumber data : Bagian Perekonomian & SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

2.1.3.4.2 Pengawasan

Guna menjamin keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tata peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka fungsi pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo menjadi sangat penting. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 2.182

Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2021-2025

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	2021			2022			2023			2024			2025		
		Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Berkala / Reguler	40	19	34	28	13	17	35	23	30	42	15	27	17	8	10
2	Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan OPD	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pemeriksaan Khusus / Kasus	-	-	-	5	5	5	0	0	0	7	-	-	13	0	0

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	2021			2022			2023			2024			2025		
		Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR, LHM)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	-	-	-	5	5	5	15	0	15	12	-	-	14	0	0
5	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	122	80	138	87	70	126	87	87	143	87	82	172	87	106	200
6	Pemeriksaan LKM Binangun & BUMdes	-	-	-	0	0	0	0	0	0	5	-	-	87	0	0
7	Reviu Laporan Keuangan OPD	42	-	-	42	42	42	42	0	0	42	-	-	40	0	0
8	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	1	1	1	0	0	1	-	-	1	0	0
9	Evaluasi SPIP	42	-	-	42	42	42	42	0	0	42	-	-	40	0	0
10	Evaluasi LkjIP	1	-	-	0	0	0	42	0	0	42	-	-	9	0	0
11	Reviu RKA	48	-	-	84	84	84	84	0	0	84	-	-	80	0	0
12	Reviu RKPD	2	-	-	2	2	2	2	0	0	1	-	-	2	0	0
13	Reviu Perubahan RPJMD	-	-	-	1	1	1	0	0	0	1	-	-	1	0	0
13	Reviu Perubahan Renstra OPD	-	-	-	42	42	42	42	0	0	0	0	0	40	0	0
14	Reviu DAK Fisik & DAU	27	--	-	27	27	27	27	0	0	96	-	-	77	0	0
15	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	42	-	-	42	42	42	42	0	0	42	-	-	42	0	0
	JUMLAH	**251**	**99**	**172**	**408**	**376**	**436**	**461**	**110**	**188**	**485**	**97**	**199**	**550**	**114**	**210**

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi, ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Pada tahun 2024, Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sejumlah 485. Akan tetapi jumlah temuan menurun dibandingkan tahun 2023, yaitu sejumlah 97. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dokumen-dokumen yang disusun dan menjadi obyek pemeriksaan sehingga jumlah temuan menurun. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemeriksaan reguler karena jumlah objek pemeriksaan yang paling banyak yaitu kalurahan dan perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pendampingan terhadap pemerintah kalurahan dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa tahapan penyelenggaran SPIP di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di tahun 2024, Kulon Progo mencapai nilai maturitas SPIP sebesar 3,21. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,152. Berikut ini adalah hasil penilaian SPIP dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo yang diwujudkan dalam Indeks Maturitas SPIP.

Tabel 2.183

Nilai SPIP Untuk Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	OPD	Verifikasi Tim
		Struktur dan Proses
1	Sekretariat Daerah	2,89
2	Sekretariat DPRD	2,61
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Perm	2,74
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2,88
5	Dinas Perhubungan	2,38
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,99
7	Dinas Kesehatan	2,74
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3,09
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,61
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,96
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,55
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,86
13	Dinas Pertanian dan Pangan	2,69
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,73
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,81
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2,43
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2,53
18	Dinas Kebudayaan	2,62
19	Dinas Lingkungan Hidup	2,59
20	Dinas Pariwisata	2,64
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,59
22	Inspektorat Daerah	2,77
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,79
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2,94
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,91
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,76
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,82

No.	OPD	Verifikasi Tim
		Struktur dan Proses
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2,82
29	Kapanewon Wates	2,75
30	Kapanewon Temon	2,83
31	Kapanewon Panjatan	2,56
32	Kapanewon Galur	2,77
33	Kapanewon Sentolo	2,82
34	Kapanewon Lendah	2,56
35	Kapanewon Pengasih	2,77
36	Kapanewon Kokap	2,54
37	Kapanewon Nanggulan	2,56
38	Kapanewon Girimulyo	2,63
39	Kapanewon Samigaluh	2,79
40	Kapanewon Kalibawang	2,86

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh OPD di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai level maturitas “Berkembang” yakni memiliki rentang skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)). Merujuk pada indikator penilaian SPIP pada tahun 2023, terdapat perbedaan dengan penilaian pada tahun 2025, yakni pada komponen penetapan tujuan dan pencapaian tujuan tidak menjadi komponen penilaian Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan dua komponen tersebut berada pada tingkat Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Maka dari itu penilaian maturitas SPIP pada tahun 2025 hanya menggunakan komponen berupa struktur proses.

Pada tingkat ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Tabel 2.184

Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah SAKIP yang nilainya meningkat (dari LKJIP ke SPIP baru diganti 2025)	PD	30	25	34	10	-
2	Jumlah perangkat daerah	PD	42	42	42	42	42
3	Jumlah obrik yang tidak ada temuan keuangan	Obrik	79	56	53	59	127
4	Jumlah obrik	Obrik	162	115	122	129	129
5	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rekom	134	117	145	168	90

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
6	Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	Rekom	250	172	173	208	110

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Rasio obrik yang tidak ada temuan keuangan pada tahun 2025 sebesar 98,44%. Sedangkan pada tindak lanjut hasil pengawasan internal, 90 rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 110 rekomendasi yang dihasilkan, atau sebesar 81,81%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan sudah semakin membaik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan.

2.1.3.4.3 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator ketercapaian program yang diukur setiap tahunnya, ketercapaian program di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 202-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

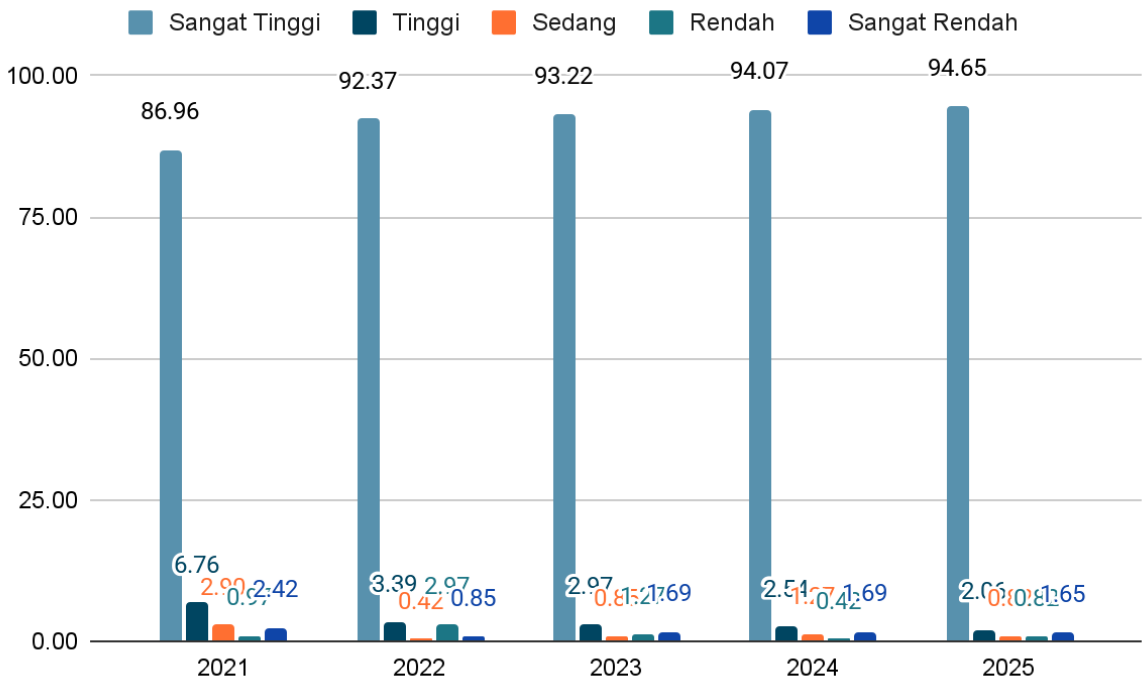

Sumber data: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

*Keterangan: Kriteria Sangat Tinggi: 91%≤100%, Tinggi: 76%≤90%, Sedang: 66%≤75%, Rendah: 51%≤65%, Sangat Rendah: ≤50%. (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Gambar 2.42

Tingkat Capaian Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Tingkat ketercapaian program diukur dengan membandingkan target dengan capaian program, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketercapaian program pada tahun 2021-2025 mengalami peningkatan pada kriteria sangat tinggi. Hal tersebut berarti kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian outcome semakin bagus di setiap tahunnya.

2.1.3.4.4 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu tahun 2020-2025 semakin menurun. Kebutuhan ASN pada tahun 2025 sebesar 8.027. Kebutuhan ASN dihitung berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan pada tanggal 12 November 2025 telah dilakukan penyesuaian jumlah kebutuhan ASN di Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 420/A/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 557/C/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.

Tabel 2.185

Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah ASN	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1	2021	5.870	10.149	-4.279	57,84%

No.	Tahun	Jumlah ASN	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
2	2022	5.660	9.591	-3.931	59,01%
3	2023	6.132	9.591	-3.459	63,93%
4	2024	6.130	9.591	-3.461	63,91%
5	2025	6.079	8.027	-1.948	75,73%

Sumber data : BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai pada tahun 2025 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan rasio riil ASN terjadi karena penyesuaian jumlah kebutuhan ASN dan bukan dikarenakan adanya peningkatan pemenuhan jumlah ASN. Apabila dilihat dari jumlah ASN terjadi penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini disebabkan jumlah formasi pengadaan CASN tidak dapat mengimbangi jumlah ASN yang pensiun. Jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2025 sebanyak 332 ASN, sedangkan pengangkatan CPNS tahun 2025 sebanyak 83 CPNS dan pengangkatan PPPK Tahap I sejumlah 168 orang dan PPPK Tahap II sejumlah 34 orang. Pengurangan personil terjadi secara kontinyu melalui pensiun, mutasi keluar dan meninggal dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CASN yang sangat dibatasi oleh kuota formasi pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang signifikan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada tanggal 11 Desember 2025. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kulon Progo kepada 2.018 orang PPPK Paruh Waktu. Surat Perintah Melaksanakan Tugas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian status kepegawaian dan melaksanakan amanat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Tabel 2.186

Pelatihan Kepemimpinan ASN Tahun 2021-2025

No.	Tahun	PKN/ Diklatpim II		PKA/ Diklatpim III		PKP/ Diklatpim IV	
		Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim	Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim	Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim
1	2021	11	6	48	24	87	60
2	2022	11	4	47	10	74	28
3	2023	13	7	63	23	99	58
4	2024	7	3	21	21	39	19
5	2025	7	3	19	19	30	18

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, 2025

Data di atas menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi pejabat struktural terutama dalam unsur pemenuhan Diklatpim. Sampai akhir 2025 diperhitungkan sejumlah 4 pejabat eselon II belum melaksanakan Diklatpim II atau yang sekarang disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, pejabat eselon III telah melaksanakan Diklatpim III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) seluruhnya dan 12 pejabat eselon IV belum melaksanakan Diklatpim IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Jumlah pejabat eselon yang belum melaksanakan Diklatpim semakin menurun di tahun 2025.

Tabel 2.187

Data ASN Menurut Jabatan Tahun 2021-2025

No.	Jabatan	Jumlah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	32	32	30	32	33
2.	Administrator (Eselon III)	155	153	151	137	152
3.	Pengawas (Eselon IV)	277	273	270	260	265
4.	Pelaksana (JFU)	1.135	1.117	1.029	947	1053
	- PNS	1.135	1.117	1.029	947	922
	- PPPK	0	0	0	0	131
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	4.168	3.954	4.652	4.754	4.576
	-PNS	4.084	3.412	4.293	4.393	4.505
	-PPPK	84	542	359	361	71
	Jumlah	**5.769**	**5.529**	**6.132**	**6130**	**6079**

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, 2025

Data di atas menunjukkan jumlah pejabat struktural dari eselon II sampai eselon IV dan jabatan fungsional umum dan tertentu dalam 5 tahun terakhir. Jumlah riil pejabat struktural tersebut masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya ada. Untuk eselon II dari kebutuhan 35 pejabat, per 31 desember 2024 sudah terpenuhi seluruhnya sebanyak 33 pejabat. Untuk eselon III dari kebutuhan sebanyak 155 pejabat juga sudah terisi 152 pejabat. Sedangkan untuk eselon IV yang seharusnya sesuai kebutuhan sebanyak 275 pejabat baru terisi 265 pejabat. Untuk Jabatan JFU mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya pengangkatan CPNS. Pejabat JFT mengalami tren peningkatan mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2025, hal ini disebabkan adanya tambahan PPPK pada tahun 2025.

2.1.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, bukti, dan kebutuhan riil masyarakat. Melalui kegiatan penelitian, kajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Selain sebagai dasar penyusunan kebijakan, kegiatan penelitian dan pengembangan juga berperan dalam

mengidentifikasi potensi daerah, menjawab berbagai permasalahan pembangunan, serta mendorong pemanfaatan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan dukungan sangat besar untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis riset dan IPTEK. Untuk itu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan perlu mendorong peningkatan SDM produktif. Sebuah pepatah mengatakan bahwa anda tidak akan pernah menjadi besar kalau anda tidak tahu betapa besar potensi yang anda miliki. Kulon Progo menyimpan banyak potensi yang memiliki nilai ekonomis strategis jika diolah secara baik. Secara umum kualitas keberhasilan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola berbagai potensi lokalnya. Banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar global, seperti produk berbasis kreativitas, seni, dan budaya. Pengolahan sumber daya lokal dengan nilai tambah (added chain) menjadi komoditas unggulan daerah dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan. Pemberian nilai tambah produk harus dapat meningkatkan kualitas produk supaya dapat diterima secara berkelanjutan, dan mengikuti tren pasar, sehingga pemerintah harus mampu bersikap responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman serta kondusif untuk berkreasi dan berinovasi.

Pengembangan IPTEK dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk menghasilkan kajian yang aplikatif dan dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Hasil kajian tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, tetapi juga menjadi dasar pengembangan berbagai inovasi daerah yang mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta daya saing Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, fungsi penelitian dan pengembangan tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi, melainkan menjadi fondasi bagi terciptanya inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai langkah penguatan karakter produk lokal berbasis masyarakat tersebut diwujudkan kegiatan berupa Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah apresiasi terhadap hasil karya dan teknologi tepat guna yang berpotensi memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Selain itu juga selaras dengan tujuan penerapan IPTEK dan Inovasi di Kabupaten Kulon Progo yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk lokal yang berdaya saing. Animo masyarakat untuk mengikuti Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

Sumber data: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.43

Perkembangan Jumlah Peserta Anugerah Iptek Kreanova Menoreh Tahun 2021-2025 (orang)

2.1.3.4.6 Inovasi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Selain pelaksanaan Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh memotivasi masyarakat dan pelajar mengembangkan inovasinya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk mendorong inovasi pemerintahan maupun pelayanan publik, telah ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengertian inovasi daerah, tujuan inovasi, kriteria inovasi, inisiator, mekanisme pengusulan dan penetapan inovasi daerah.

Salah satu pengukuran kinerja inovasi pemerintahan adalah Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA). Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Innovative Government Award pada tahun 2019 merupakan capaian ini paling baik selama 7 tahun terakhir, yaitu menduduki peringkat nasional ke-2 dengan predikat Sangat Inovatif. Akan tetapi mulai tahun 2020, indeks inovasi daerah semakin menurun. Pada tahun 2020, indeks inovasi Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Sangat Inovatif ke-25. Pada tahun 2021, menjadi kabupaten inovatif pada urutan ke-37, pada tahun 2022 menjadi urutan ke-72, pada tahun 2023 menjadi urutan ke-46, dan di tahun 2024 menjadi urutan ke-126 dan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi urutan 49 dari 415 Kabupaten se-Indonesia. indeks inovasi daerah ini perlu menjadi perhatian bersama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncurkan Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo (Gema Indahku) sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan mendorong budaya inovasi di seluruh perangkat daerah. Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui

penetapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah, Kapanewon, BUMD, BLUD RSUD, dan Puskesmas mengusulkan minimal satu inovasi setiap dua tahun anggaran, serta pembentukan Klinik Inovasi sebagai wadah konsultasi dan pematangan inovasi. Penguatan ekosistem inovasi ini berkontribusi signifikan terhadap capaian Kabupaten Kulon Progo pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, dengan predikat "Kabupaten Sangat Inovatif". Capaian tersebut menandai kebangkitan kinerja inovasi daerah setelah sebelumnya pada tahun 2019 meraih peringkat ke-2 nasional, kemudian mengalami penurunan hingga peringkat 126 kategori "Inovatif" pada tahun 2024, kemudian mengalami peningkatan signifikan di tahun 2025 hingga peringkat 49. Pada IGA 2025, Kulon Progo mengirimkan 91 inovasi dari total 162 inovasi yang dihimpun, mencerminkan konsolidasi data, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi internal yang lebih sistematis. Prestasi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi inovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2025, satuan inovasi yang berhasil diidentifikasikan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 323 satuan inovasi. Satuan inovasi ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 490/A/2025 tentang Satuan Inovasi Daerah Tahun 2025. Adapun Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mendapatkan nilai 70,12 dengan predikat Kabupaten Sangat Inovatif peringkat ke-49 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025.

Adapun data capaian kinerja Kabupaten Kulon Progo dalam Innovative Government Award, dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.188

Capaian Pemkab Kulon Progo dalam Innovative Government Award

No	Tahun	Skor Indeks Inovasi Daerah	Peringkat Nasional	Predikat
1	2021	56,64	37	Inovatif
2	2022	55,87	72	Inovatif
3	2023	58,44	46	Inovatif
4	2024	54,68	126	Inovatif
5	2025	70,12	49	Sangat Inovatif

Sumber data : Bapperida, 2026

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menempatkan inovasi daerah sebagai salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Inovasi daerah dikembangkan sebagai upaya pembaruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik Kabupaten Kulon Progo.

Pengembangan inovasi daerah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan mendorong peran aktif perangkat daerah, pemerintah kalurahan, dan badan usaha milik daerah. Melalui inovasi, diharapkan tercipta berbagai terobosan yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun daftar inovasi unggulan Kabupaten Kulon Progo selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.189

Inovasi Kabupaten Kulon Progo

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	SIMPEL CABAI (Sistem Pasar Lelang Digital Cabai)	Gagasan pasar lelang digital cabai merupakan inovasi dalam sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, khususnya komoditas cabai, yang memiliki ciri khas fluktuasi harga tinggi, daya tahan produk rendah, dan ketergantungan tinggi pada tengkulak. Output yang diharapkan dengan pasar lelang digital adalah kenaikan harga jual petani dan jumlah pembeli pasar lelang bertambah. Harga cabai di pasar lelang lebih tinggi dibanding dengan harga cabai di luar pasar lelang. Pasar lelang digital cabai dengan berbagai manfaat seperti transparansi harga, efisiensi transaksi, memperluas pasar dan peningkatan daya saing petani, model ini dapat diadaptasi untuk mendukung sektor pertanian di wilayah lain di DIY maupun di luar DIY karena dapat dilakukan di lokasi lain untuk memperkuat kelembagaan pemasaran komoditas pertanian secara umum.
2	KOPIRORO (Kopi Roda Loro)	Inovasi KOPIRORO adalah pemberdayaan usaha kepada warga miskin Kulon Progo terseleksi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan konsep ekonomi kreatif berupa bantuan usaha kopi mobile atau kopi keliling yang menyajikan sekaligus mengangkat dan mengenalkan Kopi Menoreh khas Kulon Progo kepada masyarakat luas. Outcome yang diharapkan adalah tersedianya kopi mobile yang menyajikan minuman premium Kopi Menoreh khas Kulon Progo yang mudah diakses masyarakat dan peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi mobile tersebut Output yang ditargetkan antara lain: 1. Inovasi kopi mobile KOPIRORO ini mendukung pengentasan kemiskinan karena menciptakan lapangan kerja baru 2. Pelaku usaha kopi mobile mengalami peningkatan pendapatan 100% per bulan Dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan usaha. 3. Peningkatkan citra usaha khususnya produk Kopi Menoreh khas Kulon Progo yang selama ini hanya dikenal berupa produk kemasan kopi dan kedai atau kafe tradisional menjadi dikenal dengan konsep dengan penjualan minuman Kopi Menoreh secara mobile. Konsep ini menjangkau lokasi-lokasi strategis karena adanya bantuan kendaraan dan peralatan. 4. Peningkatan kualitas olahan produk Kopi Menoreh khas Kulon Progo dengan varian dan rasa yang mengikuti perkembangan zaman dan selera pasar
3	Posbindu Sentosa	Posbindu SENTOSA merupakan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan yang dikembangkan oleh Puskesmas Sentolo I, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan pelayanan terpadu, holistik, berbasis masyarakat, serta berorientasi pada pemberdayaan. Inovasi ini secara resmi tercantum dalam daftar inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan akronim **SENTOSA (Semua Penyandang Disabilitas Mendapatkan Pelayanan Terpadu, Holistik, Sehat, dan Aman)**

No	Nama Inovasi	Keterangan
		Tujuan Inovasi ini adalah meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan mengurangi hambatan dan tantangan terhadap akses perawatan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan disabilitas, memastikan jalur rujukan yang jelas, informasi layanan kesehatan khusus, memberikan perawatan berbasis komunitas dan bermitra dengan lembaga masyarakat. Program kesehatan yang holistik dan komprehensif agar penyandang disabilitas tetap sehat, aktif dan produktif menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Sasaran inovasi ini adalah penyandang disabilitas, tenaga kesehatan dari berbagai profesi di puskesmas, kader kesehatan, LSM yang bergerak di bidang pelayanan disabilitas, pemerintah melalui dukungan anggaran operasional yang berasal dari dana operasional puskesmas untuk perbaikan sarana prasarana, Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan, Dana Desa, Dana Keistimewaan DIY, keterlibatan akademisi sebagai pendamping inovasi serta Dunia Usaha melalui dana CSR. Semua yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ramah disabilitas dan meningkatkan kemandirian usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan.
4	Gema IndahKu (Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo)	Gema IndahKu (Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo) merupakan gerakan kolaboratif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan membangun budaya inovasi secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, perguruan tinggi, dunia usaha, pelajar, komunitas, dan masyarakat. Gerakan ini menjadi wadah untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan kreatif, riset terapan, serta inovasi yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari inovasi Gema Indahku adalah : 1. Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam melakukan inovasi 2. Meningkatkan kompetensi pelaksana inovasi di perangkat daerah 3. Meningkatkan kematangan inovasi perangkat daerah dengan penyiapan data dukung yang baik 4. Sebagai sarana untuk meningkatkan indeks inovasi daerah kabupaten kulon progo
5	SIBAKU (Siaga Berjibaku Melawan Sampah Kulon Progo)	SIBAKU (Siaga Berjibaku Melawan Sampah Kulon Progo) merupakan inovasi daerah yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya timbulan sampah serta perlunya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumber melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). SIBAKU mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, kelompok pengelola sampah, bank sampah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun budaya peduli lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi sampah. Tujuan utama awal dibuatnya aplikasi SIBAKU adalah memberikan kemudahan akses informasi baik untuk pengelola bank sampah maupun nasabah/warga disekitar wilayah operasional bank sampah. Selain itu dengan adanya SIBAKU diharapkan semua informasi dalam pengelolaan bank sampah dapat dipantau secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga laporan kinerja bank sampah yang saat ini menjadi kendala dalam rangka evaluasi kegiatan pengelolaan bank sampah dapat teratasi. Tujuan awal lain inovasi SIBAKU adalah sebagai media pembelajaran pengelolaan sampah bagi masyarakat luas khususnya "generasi milenial" melalui penyediaan semua informasi pengelolaan bank sampah di Kulon Progo. SIBAKU menghubungkan antara pengelola bank sampah dengan nasabah bank sampah untuk melakukan pengumpulan sampah yang sudah dipilah. Kemudian hasil dari pengumpulan sampah tersebut akan dikelola oleh sistem seperti tabungan seperti biasanya, sehingga saldo dari masing-masing nasabah akan berubah-ubah sesuai transaksi yang dilakukan dalam sistem ini. Dalam Sistem ini juga

No	Nama Inovasi	Keterangan
		disediakan katalog kerajinan yang bertujuan untuk mempromosikan produk dari pengrajin yang dihasilkan dari sampah-sampah bekas tersebut. Melalui SIBAKU, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo telah merangkul semaksimal mungkin stakeholders terkait pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan aksi nyata pengelolaan sampah di masyarakat mulai dari lembaga pengelola sampah seperti bank sampah dan KSM hingga komunitas penggiat lingkungan lain seperti SAKA Kalpataru, Sekolah Adiwiyata dan penggiat Kalpataru. Gerakan SIBAKU sangat selaras dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo yang diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kulon Progo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Upaya-upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo meliputi: 1. Melakukan pengolahan sampah di sumber dalam rangka mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Kulon Progo. 2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan. 3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta 4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan
6	e-SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik)	e-SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Kabupaten Kulon Progo merupakan inovasi digital pelayanan perpajakan daerah yang dikembangkan untuk mempermudah penyampaian informasi besaran pajak terutang kepada wajib pajak secara cepat, mudah, dan efisien melalui media elektronik. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mengakses, melihat, mengunduh, serta mencetak SPPT PBB-P2 secara mandiri tanpa harus menunggu distribusi dokumen fisik, sehingga pelayanan perpajakan menjadi lebih praktis dan dapat diakses kapan saja serta dari mana saja. Tujuan Inovasi : 1. Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang SPPT PBB. 2. Memberikan pelayanan berbasis online sehingga lebih flexible, tidak terikat waktu dan tempat. 3. Memudahkan dalam monitoring penyampaian SPPT. 4. Memudahkan pembayaran SPPT PBB secara kolektif. 5. Memudahkan proses monitoring target penerimaan dan tunggakan PBB-P2. 6. Memudahkan Perangkat Daerah dalam mencetak Salinan SPPT PBB. 7. Dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SISMIOP/MY-PBB) yang telah berjalan.
7	Bus SekolahKU (Bus Sekolah Kulon Progo)	Bus SekolahKu di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu alternative terbaik dalam mengoptimalkan tingkat pelayanan angkutan umum serta mengurangi tingkat kemacetan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Pengembangan fasilitas angkutan umum dengan mengintegrasikan angkutan umum perkotaan dengan angkutan umum pedesaan. Berdasar hasil pengamatan, banyak pelajar yang bersekolah di kota Wates berasal dari Kecamatan terdekat. Jarak tempuh masing-masing armada bus (Bus SekolahKu) adalah kurang lebih 25 km satu trip perjalanan. Tujuan Inovasi : 1. Menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan di kalangan pelajar 2. Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya 3. Memudahkan para pelajar untuk berangkat dan pulang sekolah dalam menuntut ilmunya. 4. Memberikan rasa kenyamanan bagi pelajar sekolah sekaligus meminimalisir terjadinya tawuran atau pertikaian antar sekolah

No	Nama Inovasi	Keterangan
		5. Mengubah perilaku perjalanan siswa yang tidak efisien yaitu penggunaan kendaraan pribadi baik roda empat atau sepeda motor 6. Melatih kemandirian pelajar atau siswa didik
8	SEDATI (Sekali Datang Dapat Tiga)	SEDATI (Sekali Datang Dapat Tiga) merupakan inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan administrasi kepada masyarakat melalui integrasi beberapa jenis layanan dalam satu proses pelayanan. Melalui konsep Sekali Datang Dapat Tiga, masyarakat cukup melakukan satu kali pengajuan untuk memperoleh tiga dokumen atau layanan yang saling berkaitan, sehingga mampu mengurangi waktu, biaya, dan beban administratif yang harus dikeluarkan. Melalui pelayanan Sedati ini, pemohon/perangkat kalurahan yang melaporkan kematian akan mendapatkan pelayanan terintegrasi yakni akta kematian, Kartu Keluarga yang sudah menghilangkan nama yang meninggal serta KTP-el bagi pasangannya. Pelayanan penerbitan akta kematian melalui inovasi Sedati ini akan menghasilkan data kependudukan yang valid dan akurat, sehingga pelayanan publik lainnya dapat terselenggara dengan optimal. Untuk implementasi inovasi Sedati, Dinas Dukcapil telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, agar kalurahan berperan aktif dalam melaporkan peristiwa kematian warganya. Pelayanan Sedati ini didukung dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pelayanan Sedati yang terintegrasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Melalui Sedati ini penduduk akan mendapatkan pelayanan untuk pemenuhan kepemelikan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat. Kalurahan/Kelurahan diharapkan berperan aktif untuk melaporkan peristiwa kematian warganya, dimana peran aktif ini akan meningkatkan kualitas pelayanan di Kalurahan/Kelurahan. Inovasi Sedati bertujuan untuk : a. Memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, akuntabel dan transparan, b. Mewujudkan data kependudukan yang berkualitas, c. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dimulai dari tertib pelaporan perceraian.

2.1.3.4.7 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai 2013 sampai dengan 2025 Kulon Progo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. Realisasi kinerja ini telah berimbang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY.

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dari target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2021-2025

Tabel 2.190

Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah realisasi pendapatan (milyar rupiah)	1.533,84	1.530,33	1.695,99	1.755,011	1.660,466
2.	Jumlah target pendapatan (milyar rupiah)	1.570,80	1.503,68	1.699,95	1.761,55	1.676,064
3.	Persentase realisasi pendapatan terhadap target	97,65	101,77	99,79	99,63	99,06
4.	Jumlah realisasi pendapatan asli daerah (milyar rupiah)	307,15	308,15	324,05	358,09	413,597
5.	Jumlah target pendapatan asli daerah (milyar rupiah)	246,60	265,27	308,44	351,58	422,983
6.	Jumlah realisasi belanja (milyar rupiah)	1.404,81	1.532,66	1.694,77	1.778,56	1.633,573
7.	Jumlah anggaran belanja (milyar rupiah)	1.657,35	1.669,93	1.818,99	1.874,71	1.759,814
8.	Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD) tepat waktu	8	8	14	14	14
9.	Jumlah dokumen keuangan daerah	8	8	14	14	14
10.	Jumlah PD tertib administrasi aset	42	42	40	40	40
11.	Jumlah PD	42	42	40	40	40

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Lampiran II.05 PSAP 04 disebutkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan tingkat efektivitas yang diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks pengukuran efektivitas pendapatan, hasil adalah realisasi pendapatan, sedangkan target adalah anggaran pendapatan. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka/persentase mendekati 100% maka disimpulkan semakin efektif. Dari Tabel 2.76 tampak bahwa Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai tingkat efektivitas sebesar 97.78%, Pendapatan Transfer efektivitas sebesar 99,45% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat efektivitas sebesar 105,58%.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ditentukan dari tingkat efektivitas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Untuk Pajak Daerah tingkat efektivitas mencapai 89,56%. Untuk Pendapatan Retribusi Daerah berhasil mencapai tingkat efektivitas sebesar 101,21%. Untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai tingkat efektivitas 99,27%. Untuk Lain-lain PAD yang Sah tingkat efektivitas mencapai 140,76%.

Tabel 2.191

Jumlah SILPA Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) (Rp)	216.357.696.129,17	163.810.144.445,24	120.467.732.132,50	89.601.683.220,35	115.130.574.518,96
2	Jumlah Total APBD (Rp)	1.657.347.485.069,21	1.669.930.685.519,17	1.818.996.970.903	1.874.718.088.900	1.759.814.071.786,52
3	Persentase SILPA terhadap APBD	13,05	9,81	6,62	4,78	6,54

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Dari data di atas menunjukkan persentase SILPA setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.192

Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Belanja Urusan Pendidikan (Rp)	382.979.334.074	331.449.330.514	510.387.915.163	524.157.265.965	448.085.876.791
2	Jumlah Belanja Pembagi (Rp)	1.712.529.104.848	1.214.553.641.788	1.818.996.970.903	1.874.718.088.900	1.633.573.999.641,76
3	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD	31,46	27,29	28,06	27,96	27,43

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Alokasi belanja pendidikan di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah memenuhi ketentuan tersebut bahkan lebih. Hal ini didukung oleh adanya belanja yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik. Khususnya DAK Non Fisik terdapat belanja BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, dimana alokasi dana BOS tersebut ditentukan berdasarkan jumlah siswa di setiap Satuan Pendidikan Negeri.

Tabel 2.193

Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Belanja Urusan Kesehatan (Rp)	241.612.935.618	246.402.011.584	414.475.092.824	436.448.506.340	424.932.453.073
2	Jumlah Belanja Pembagi (Rp)	541.382.970.040	630.712.895.176	1.378.289.032.677	1.412.314.431.374	1.633.573.999.641,76

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD	44,63	39,07	30,07	30,90	26,01

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji. Alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah memenuhi ketentuan tersebut bahkan lebih. Hal ini didukung oleh adanya belanja yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik

Tabel 2.194

Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (Rp)	115.109.449.264	123.150.854.639	404.783.645.177	379.048.616.991	517.820.006.789,50
2	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	25,03	20,45	24,80	22,52	32,95

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pemerintah mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum minimal sebesar 40% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat tersedianya layanan publik di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah tahun 2021-2025 di atas dapat dilihat bahwa persentase Belanja Infrastruktur Daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.195

Perbandingan Kelompok Belanja Tahun 2021-2025 (Rp)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
I	BELANJA	1.499.994.321.770,05	1.532.665.350.605,25	1.694.770.096.247,73	1.778.569.823.070,68	1.633.573.999.641,76
1	Belanja Operasi	1.115.704.992.163,05	1.215.554.395.271,25	1.290.493.325.958,73	1.399.220.075.937,45	1.335.933.729.904,76
2	Belanja Modal	202.257.018.228,00	147.226.457.660,00	219.397.654.552,00	188.155.116.808,23	112.066.357.277
3	Belanja Tak Terduga	3.432.978.345,00	3.047.005.849,00	1.092.325.768,00	2.536.789.038	826.671.925
II	TRANSFER	178.599.333.034,00	166.837.491.825,00	183.786.789.969,00	188.657.841.287	184.747.240.535
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.402.009.234,00	11.778.750.925,00	10.289.880.760,00	10.938.793.287	13.436.410.855

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
2	Transfer Bantuan Keuangan	167.197.323.800,00	155.058.740.900,00	173.496.909.200,00	177.719.048.000	171.310.829.680

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Tabel 2.196

Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan (Rp)	11.402.009.234	11.778.950.925	10.289.880.769	10.938.793.287	13.436.410.855
2	Jumlah Total APBD (Rp)	1.657.347.485.069,21	1.669.930.685.519,17	1.818.996.970.903	1.874.718.088.900	1.759.814.071.786
3	Persentase belanja bagi hasil ke Kalurahan terhadap APBD	0,66	0,66	0,57	0,58	0,76

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2026

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah telah mengkoordinasikan semua perangkat daerah yang mengampu pajak dan retribusi terdiri dari :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Nyi Ageng Serang
4. RSUD Wates
5. DPUPKP
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kominfo
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Kebudayaan
10. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
11. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
12. Dinas Pertanian dan Pangan
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Dinas Perdagangan

Dalam penyusunannya selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (*existing*), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain:

a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital
b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital
c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital
d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Kabupaten Kulon menindaklanjutinya dengan membuat peta jalan rencana aksi.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut efisiensi berbasis data, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara progresif mengintegrasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendasar dan strategis. Implementasi ETPD dimaksudkan untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi digital, menciptakan ekosistem fiskal yang transparan, akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

ETPD bukan sekadar digitalisasi administratif, tetapi sebuah kerangka transformasional yang mengintervensi secara sistemik terhadap seluruh siklus anggaran—baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Transformasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan kanal transaksi nontunai yang aman, cepat, dan terdokumentasi secara real-time, mencakup: QRIS, virtual account, e-wallet, e-SPTPD, SP2D Online, Cash Management System (CMS), serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Sejak pendirian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo secara bertahap menunjukkan tren peningkatan integrasi kanal digital dalam sistem keuangan publik. Pada tahun 2025, IETPD (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) mencapai 98% yang memposisikan Kulon Progo di peringkat 20 nasional. Hal ini menegaskan peran ETPD sebagai tulang punggung dalam realisasi prinsip value for money dan integritas fiskal daerah.

2.1.3.4.8 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah unsur supporting kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo yang bertugas membantu Bupati untuk pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi, dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Berikut ini jumlah produk hukum DPRD yang dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2025

Tabel 2.197

Produk Hukum DPRD

No.	Produk Hukum	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peraturan Daerah (Raperda yang telah disetujui bersama dengan Keputusan Bersama)	15	14	9	11	12
2	Peraturan DPRD	0	1	0	3	0
3	Keputusan DPRD	40	36	35	39	26
4	Keputusan Pimpinan DPRD	12	14	10	9	7

Sumber Data : SIPD Ewalidata, Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, 2026

Adapun dokumen kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pada setiap tahunnya adalah 5 dokumen, meliputi :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo
4. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo

Berkaitan fungsi pengawasan, jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2025 pada setiap tahunnya sebanyak 12 dokumen. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan sebagai implementasi Fungsi Pengawasan DPRD, dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, dihasilkan pula Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap LKPJ Bupati dan LHP BPK RI.

2.1.3.5 Fokus Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp55.687.146.731,00. Pelaksanaan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan pada 4 (empat) urusan yaitu Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang.

Total pagu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 55.687.146.731,00 dan realisasi SP2D sebesar Rp54.808.681.703,90 atau sebesar 98,42% dan sebesar Rp54.563.358.258,00 realisasi Fungsional atau setara 97,98% dan capaian fisik sebesar 98,45%.

Tabel 2.198

Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No.	Program	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1.	Kelembagaan	2.022.107.300	3.438.368.500	3.088.691.400	4.721.781.160	6.132.851.100
2.	Kebudayaan	39.232.907.187	53.537.121.889	78.148.581.431	70.053.652.777	34.850.298.294
3.	Pertanahan	2.283.952.800	3.071.831.000	2.389.841.700	2.339.490.100	2.244.497.700
4.	Tata Ruang	545.590.500	2.572.796.375	15.206.257.238	23.963.281.837	12.459.499.637
	Jumlah	**44.084.557.787**	**62.620.117.764**	**98.833.371.769**	**101.077.205.874**	**55.687.146.731**

2.1.3.5.1 Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah diampu oleh 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu dan Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 12 Kapanewon dan 5 Puskesmas. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dan terperinci menjadi 7 (tujuh) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp6.132.851.100,00 dan terealisasi sebesar Rp5.988.672.758,00 (SP2D) atau setara 97,65% dan sebesar Rp5.924.307.566,00 (Fungsional) atau setara 96,60%. Capaian fisik sebesar 100% terhadap target satu tahun.

Tabel 2.199

URUSAN KELEMBAGAAN

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
URUSAN KELEMBAGAAN							**100**	**6.132.851.100,00**	**5.988.672.758,00**	**97,65**	**5.924.307.566,00**	**96,60**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							**100**	**6.132.851.100,00**	**5.988.672.758,00**	**97,65**	**5.924.307.566,00**	**96,60**
1	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. KULON PROGO**						**100**	**238.010.400,00**	**238.010.400,00**	**100**	**236.605.802,00**	**99,41**
A	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**						**100**	**238.010.400,00**	**238.010.400,00**	**100**	**236.605.802,00**	**99,41**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						100	238.010.400,00	238.010.400,00	100	236.605.802,00	99,41
		1.Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan = 87 orang	87	orang	87	orang	100					
		2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
2	**BAPPERIDA KAB. KULON PROGO**							**247.398.500,00**	**242.256.005,00**	**98**	**242.456.005,00**	**98**
A	**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN**						**100**	**247.398.500,00**	**242.256.005,00**	**98**	**242.456.005,00**	**98**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						100	76.459.000,00	72.713.781,00	95,10	72.713.781,00	95,10
		1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 = 2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100					
		2.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		3. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan							**40.209.400,00**	**39.212.280,00**	**97,52**	**39.212.280,00**	**97,52**
		1. Laporan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2024 Tahap Akhir = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100					
		2. Laporan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 per tahapan = 3 laporan	3	laporan	3	laporan	100					
	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang							**130.730.100,00**	**130.529.944,00**	**100**	**130.529.944,00**	**99,85**
		1. Fasilitasi Forum Geoharitage Kabupaten Kulon Progo = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100					
		2. Laporan Monitoring dan Evaluasi = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100					
		3. Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Geopark Jogja di Kabupaten Kulon Progo = 1 Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
3	**BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KULON PROGO**							**91.040.000,00**	**80.511.110,00**	**88,43**	**80.511.110,00**	**88,43**
A	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**							**78.790.000,00**	**68.261.110,00**	**86,64**	**68.261.110,00**	**86,64**

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota							78.790.000,00	68.261.110,00	86,64	68.261.110,00	86,64
		1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
B	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**							**12,250.000,00**	**12.250.000,00**	**100**	**12.250.000,00**	**100**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota							12,250.000,00	12.250.000,00	100	12.250.000,00	100
		1. ASN yang memahami tentang Budaya Pemerintahan = 83 orang	83	orang	83	orang	100					
		2. Jumlah Kapanewon yang berkinerja baik = 35 PD/UPT	35	PD/UPT	35	PD/UPT	100					
4	**BKPSDM KAB. KULON PROGO**						**100**	**189.378.000,00**	**189.378.000,00**	**100**	**182.210.997,00**	**96,22**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**189.378.000,00**	**189.378.000,00**	**100**	**182.210.997,00**	**96,22**
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota						100	189.378.000,00	189.378.000,00	100	182.210.997,00	96,22
		1. Jumlah ASN Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti internalisasi keistimewaan = 30 orang	30	orang	30	orang	100					
5	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KULON PROGO**						**100**	**3.850.635.900,00**	**3.731.209.900,00**	**96,90**	**3.699.823.086,00**	**96,08**
A	**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**						**100**	**3.850.635.900,00**	**3.731.209.900,00**	**96,90**	**3.699.823.086,00**	**96,08**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						100	3.850.635.900,00	3.731.209.900,00	96,90	3.699.823.086,00	96,08
		1. Pendataan Sosial Ekonomi di 10 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
6	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KAB. KULON PROGO**						**100**	**20.487.300,00**	**19.995.898,00**	**97,60**	**19.754.846,00**	**96.42**
A	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**						**100**	**20.487.300,00**	**19.995.898,00**	**97,60**	**19.754.846,00**	**96.42**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						100	20.487.300,00	19.995.898,00	97,60	19.754.846,00	96.42
		1. Jumlah Kapanewon berkinerja baik = 12 Kapanewon	12	Kapanewon	12	Kapanewon	100					
7	**KAPANEWON KAB. KULON PROGO (12 Kapanewon)**						**100**	**346.442.500,00**	**345.622.625,00**	**99.76**	**343.556.485,00**	**99,17**
	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						**100**	**346.442.500,00**	**345.622.625,00**	**99.76**	**343.556.485,00**	**99,17**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						100	346.442.500,00	345.622.625,00	99.76	343.556.485,00	99,17
	Kapanewon Temon						100	22.200.000,00	422.200.000,00	100.	21.873.444,00	98,53
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan Kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Wates						100	120.165.000,00	120.165.000,00	100	119.206.409,00	99,20
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		4. Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Wates = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Panjatan						100	15.660.800,00	15.660.800,00	100	15.685.300,00	99,52
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Galur						100	23.040.000,00	23.040.000,00	100	23.018.240,00	99,91
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Lendah						100	22.095.000,00	21.925.000,00	99,23	21.667.100,00	98,06
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Sentolo						100	21.524.000,00	21.479.814.00	99.79	21.479.814,00	99,79
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Pengasih						100	22.093.100,00	22.093.100,00	100	22.066.854,00	99,88
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Kokap						100	18.225.000,00	18.225.000,00	100	17.835.731,00	97,86
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Girimulyo						100	22.415.000,00	21.899.624,00	97,70	21.889.306,00	97,65

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Nanggulan						100	20.184.600,00	20.094.287,00	99.55	20.094.287,00	99.55
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Samigaluh						100	21.050.000,00	21.050.000,00	100	21.050.000,00	100
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2027 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
	Kapanewon Kalibawang						100	17.790.000,00	17.790.000,00	100	17.790.000,00	100
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100					
8	**DPMPTSP**						**100**	**79.507.400,00**	**79.507.400,00**	**100**	**78.592.292,00**	**99**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**79.507.400,00**	**79.507.400,00**	**100**	**78.592.292,00**	**99**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100	79.507.400,00	79.507.400,00	100	78.592.292,00	99
		1. Inovasi Pelayanan Publik Si Peri Manis Kapanewon = 12 Kapanewon	12	kapanewon	12	kapanewon	100					
		2. Sosialisasi dan Pelayanan Perizinan Berusaha = 150 pelaku usaha	150	Pelaku usaha	150	Pelaku usaha						
		3. Vidio Panduan Inovasi Si Peri Manis Kapanewon = 1 vidio	1	vidio	1	vidio						
9	**PUSKESMAS SENTOLO I**						**100**	**478.564.500,00**	**478.564.500,00**	**100**	**477.518.389,00**	**99,78**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**478.564.500,00**	**478.564.500,00**	**100**	**477.518.389,00**	**99,78**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100	478.564.500,00	478.564.500,00	100	477.518.389,00	99,78
		1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Sentosa = 4 Kalurahan	4	kalurahan	4	kalurahan	100					
10	**PUSKESMAS SENTOLO II**						**100**	**239.280.000,00**	**239.280.000,00**	**100**	**234.744.722,00**	**98,10**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**239.280.000,00**	**239.280.000,00**	**100**	**234.744.722,00**	**98,10**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100	239.280.000,00	239.280.000,00	100	234.744.722,00	98,10
		1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu	1	kalurahan	1	kalurahan	100					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		Disabilitas Cahaya Difa = 1 Kalurahan										
11	**PUSKESMAS TEMON I**						**100**	**119.575.800,00**	**119.575.800,00**	**100**	**113.270.319,00**	**94,73**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**119.575.800,00**	**119.575.800,00**	**100**	**113.270.319,00**	**94,73**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100	119.575.800,00	119.575.800,00	100	113.270.319,00	94,73
		1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Sinergi Berdaya = 1 Kalurahan	1	kalurahan	1	kalurahan	100					
12	**PUSKESMAS TEMON II**						**100**	**132.563.800,00**	**132.563.500,00**	**100**	**124.729.013,00**	**94,09**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**132.563.800,00**	**132.563.500,00**	**100**	**124.729.013,00**	**94,09**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100	132.563.800,00	132.563.500,00	100	124.729.013,00	94,09
		1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Ceria = 1 Kalurahan	1	kalurahan	1	kalurahan	100					
13	**PUSKESMAS GIRIMULYO I**						**100**	**99.967.000,00**	**91.997.620,00**	**92,03**	**90.534.500,00**	**90,56**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						**100**	**99.967.000,00**	**91.997.620,00**	**92,03**	**90.534.500,00**	**90,56**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100	99.967.000,00	91.997.620,00	92,03	90.534.500,00	90,56
		1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Estu Mandiri = 1 Kalurahan	1	kalurahan	1	kalurahan	100					

2.1.3.5.1 Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diampu oleh 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, serta 12 Kapanewon. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan terperinci menjadi 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp34.850.298.294,00, dan terealisasi sebesar Rp34.185.467.855,90 (SP2D) atau setara 98,09% dan realisasi sebesar Rp34.137.940.702,00 atau setara 97,96% (Fungsional). Capaian fisik sebesar 98,07% terhadap target satu tahun.

Tabel 2.200

URUSAN KEBUDAYAAN

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
URUSAN KEBUDAYAAN							**98,07**	**34.850.298.294,00**	**34.185.467.855,90**	**98,09**	**34.137.940.702,00**	**97,96**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						**98,07**	**34.850.298.294,00**	**34.185.467.855,90**	**98,09**	**34.137.940.702,00**	**97,96**
1	**DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**14.361.078.100,00**	**14.272.421.383,00**	**99,38**	**14.262.293.807,00**	**99,31**
A	**KEGIATAN SEJARAH BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN**						**100.00**	**1.168.136.400,00**	**1.165.304.955,00**	**99,76**	**1.165.079.955,00**	**99,74**
i	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						100.00	217.536.000,00	217.416.636,00	99,95	217.416.636,00	99,95
		1. Peringatan Hari Besar Sejarah = 2 kali	2	kali	2	kali	100.00					
		2. Penulisan Buku Sejarah Lokal = 1 dokumen	1	dokumen	2	dokumen	100.00					
ii	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				0		100.00	748.775.400,00	746.134.959,00	99,65	746.134.959,00	99,65
		1. Kompetisi Bahasa dan Sastra = 1 kali 8 jenis lomba: - Alih Aksara - Macapat - Geguritan - Maca Cerkak - Stand Up Comedy - Sesorah - Pranata Adicara - Mendongen	1	kali	1	kali	100.00					
		2. Macapat = 12 kali	12	kali	12	kali	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
iii	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				0		100.00	201.825.000,00	201.753.360,00	99,96	201.528.360,00	99,85
		1. LCC Museum = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Wajib Kunjung Museum = 50 orang	50	orang	50	orang	100.00					
B	**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**				**0**		**100.00**	**367.851.500,00**	**367.401.377,00**	**99,88**	**367.401.377,00**	**99,88**
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				0		100.00	**367.851.500,00**	**367.401.377,00**	**99,88**	**367.401.377,00**	99,88
		1. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) = 20 naskah	20	naskah	20	naskah	100.00					
		2. Pemeliharaan Cagar Budaya = 1 cagar budaya	1	Cagar budaya	1	Cagar budaya	100.00					
C	**PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA**				**0**		**100.00**	**2.329.801.000,00**	**2.286.954.727,00**	**98.16**	**2.286.954.727,00**	**98.16**
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				*0*		*100.00*	2.329.801.000,00	2.286.954.727,00	98.16	2.286.954.727,00	98.16
		1. Pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo = 12 bulan	12	bulan	12	bulan	100.00					
		2. Pemeliharaan Gedung Taman Budaya Kulon Progo = 1 paket	1	paket	1	paket	#DIV/0!					
		3. Pentas Seni Tradisi = 12 kali	12	kali	12	kali	100.00					
		4. Art For Children = 50 peserta	50	peserta	50	peserta	100.00					
		5. Pentas Kethoprak = 2 kali	2	kali	2	kali	100.00					
		6. Pentas teater = 2 kali	2	kali	2	kali	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		7. Kulon Progo Manekawarna = 1 event	*1*	*event*	1	event	100.00					
D	**SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**				***0***		***100.00***	***318.439.800,00***	***311.677.313,00***	***98***	***311.677.313,000***	***97,88***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				0		100.00	*318.439.800,00*	*311.677.313,00*	*98*	*311.677.313,000*	*97,88*
		1. Alat Musik Religi = 5 paket	1	paket	1	paket	100.00					
		2. Gamelan besi = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
E	**ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**0**		**100.00**	**10.176.849.400,00**	**10.141.083.011,00**	**99.65**	**10.131.180.435,00**	**99.55**
i	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya				0		100.00	650.199.500,00	650.084.881,00	99,98	650.084.881,00	99,98
		1. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh = 13 Kalurahan	13	Kalurahan	13	Kalurahan	100.00					
		2. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang = 15 Kalurahan	15	Kalurahan	15	Kalurahan	100.00					
ii	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				0		100.00	589.344.000,00	589.206.709,00	99.98	586.885.997,00	99.58
		1. Pameran Seni Rupa = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		2. Fasilitasi Film = 1 event	1	kali	1	kali	100.00					
iii	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				0		100.00	750.000.000,00	738.979.983,00	98,53	737.772.203,00	98,37
		1. Pesona Budaya Nusantara = 1 event	1	event	1	event	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		2. Misi Kebudayaan Gelar Seni Budaya Yogyakarta = 1 event	1	event	1	event	100.00					
iv	Penghargaan Seniman dan Budayawan				0		100.00	300,000,000.00	299.979.636,.00	99,99	299.979.636,00	99,99
		1. Penerimaan Penghargaan Budaya = 5 kategori	5	kategori	5	kategori	100.00					
v	Festival Kebudayaan Yogyakarta				0		100.00	449.879.200,00	449.879.200,00	100	449.696.754,00	99,96
		1. Pentas FKY = 2 event	2	event	2	event	100.00					
		2. Pawai FKY= 1 event	*1*	event	*1*	event	100.00					
		3. Pasar Seni FKY = 2 event	2	event	2	event	100.00					
vi	Gelar Budaya Jogja				0		100.00	1.960.229.500,00	1.949.277.130,00	99,44	1.949.271.110,00	99.44
		1. Festival Kethoprak = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Festival sendratari = 1 event	1	event	*1*	event	100.00					
		3. Festival Karawitan = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		4. Menoreh Art Festival = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		5. Lomba Lukis DIY-Kyoto = 150 orang	150	orang	1	orang	100.00					
vii	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				0		100.00	130.057.500,00	128.063.952,00	98,47	128.063.952,00	98,47
		1. Siaran Media Elektronik = 1 Kali	1	kali	1	kali	100.00					
		2. Kaleidoskop Kebudayaan = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
viii	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				0		100.00	464.497.000,00	464.226.403,00	99,94	458.200.171,00	98,64
		1. Nyadran Agung = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00					
		2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan = 2 kali	1	kali	1	kali	100.00					
ix	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				0		100.00	970.606.200,00	967.471.361,00	99,68	967.432.961,00	99,67
		1. Pembinaan Dhalang Wayang Kulit dan Wayang Golek Anak dan Remaja = 3 event	3	event	3	event	100.00					
		2. Perayaan Gelar Potensi WBTB = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		3. Kajian WBTB = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		4. Fasilitasi DKKP = 12 bulan	12	bulan	12	bulan	100.00					
		5. Pergelaran Wayang Gagrag Ngayogyakarta = 1 event	1	event	1	event	100.00					
x	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				0		100.00	615.877.500,00	615.811.109,00	99,99	615.811.109,00	99,99
		1. Fasilitasi Upacara Adat = 40 kali	40	kali	40	kali	100.00					
		2. Pentas Gadon = 4 kali	4	kali	4	kali	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
xi	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni				0		100.00	3.296.159.000,00	3.288.102.647,00	99,76	3.287.981.661,00	99,75
		1. Pentas Fasilitasi Seni Budaya = 200 kali	200	kali	200	kali	100.00					
		2. Parade Budaya Perbatasan = 2 kali	2	kali	2	kali	100.00					
		3. Sambang Rowang = 2 kali	2	event	2	event	100.00					
		4. Sigro Mentas = 2 kali	2	kali	2	kali	100.00					
2	**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**						**100.00**	**206.270.000,00**	**189.821.531,00**	**92,03**	**188.033.205,00**	**91,16**
A	**PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA**						**100.00**	**206.270.000,00**	**189.821.531,00**	**92,03**	**188.033.205,00**	**91,16**
i	Pembinaan Muatan Lokal						*100.00*	*206.270.000,00*	*189.821.531,00*	*92,03*	*188.033.205,00*	*91,16*
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal = 2 jenjang	2	jenjang	2	jenjang	100.00					
3	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**1.657.668.610,00**	**1.583.955.057,00**	**99,55**	**1.563.754.668,00**	**94,33**
A	**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**						***100.00***	***236.910.658,00***	***236.230.658,00***	***99,71***	***232.316.253,00***	***98,06***
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						100.00	236.910.658,00	236.230.658,00	99,71	232.316.253,00	98,06
		1. Bantuan Saprodi dan Alat Pengendali OPT Pengembangan Bawang Merah = 3 kelompok	3	Kelompok	3	kelompok	100.00					
B	**PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**											
	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional						100.00	1.420.757.952,00	1.347.724.399,00	94,86	1.331.438.415,00	93,71
		1. Pembangunan Retaining	1	Paket	1	Paket	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		Wall/Talud penahan longsoran di Kawasan Saemaul (Jamur Tiram) = 1 paket										
		2. Integrated Farming Budidaya Pisang dan Ternak = 1 Kelompok	1	paket	1	paket	100.00					
		3. Pembangunan Retaining Wall/Talud penahan longsoran di Kawasan Saemaul (Jamur Tiram) SEGMEN III = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
4	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**215.954.800,00**	**215.424.532,00**	**99,75**	**215.424.532,00**	**99,75**
A	**ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**						**100.00**	**215.954.800,00**	**215.424.532,00**	**99,75**	**215.424.532,00**	**99,75**
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						*100.00*	*215.954.800,00*	*215.424.532,00*	*99,75*	*215.424.532,00*	*99,75*
		1. Pengelolaan sampah ditingkat Kalurahan (Pengadaan TPS3R) = 1 Kalurahan	1	Kalurahan	1	Kalurahan	100.00					
5	**DINAS KOPERASI DAN UKM**						**100.00**	**374.524.700,00**	**372.742.822,00**	**99,52**	**361.853.132,00**	**96,62**
A	**PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**						**100.00**	**374.524.700,00**	**372.742.822,00**	**99,52**	**361.853.132,00**	**96,62**
i	Pengembangan Industri Kreatif						*100.00*	**374.524.700,00**	**372.742.822,00**	**99,52**	**361.853.132,00**	**96,62**
		1. Pameran Gereget UMKM = 125 UMKM	125	UMKM	125	UMKM	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		2. Pelatihan UMKM = 135 UMKM	135	UMKM	135	UMKM	100.00					
		3. Usaha Angkringan Kopi Kulon Progo (Usaha Kopi Mobile) = 2 UMKM	2	UMKM	2	UMKM	100.00					
8	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				***0***		***100.00***	***859.350.405,00***	***859.350.405,00***	***100***	***858.829.748,00***	***99.94***
A	**KEGIATAN PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				**0**		**100.00**	***859.350.405,00***	***859.350.405,00***	***100***	***858.829.748,00***	***99.94***
i	Pengembangan Budaya Bahari				0		100.00	*859.350.405,00*	*859.350.405,00*	*100*	*858.829.748,00*	*99.94*
		1. Festival Gerbang Segoro = 12 kapanewon	12	kapanewon	12	kapanewon	100.00					
		2. Jaga KaliKu = 1 even	1	even	1	even	100.00					
		3. Pemberdayaan Pokmaswas = 12 kelompok	*1*	unit	*1*	unit	100.00					
		4. Mulir Budi (Mewujudkan hulu hilir budidaya ikan/integrated fish farming) = 1 kelompok	1	kelompok	1	kelompok	100.00					
		5. Mancing Plesiran = 1 even	1	even		even	100.00					
		6. Pemberdayaan Poklahsar Wanita = 2 kelompok	2	kelompok	2	kelompok	100.00					
9	**DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO**						**96,00**	**16.815.451.679,00**	**16.331.796.129,90**	**97,12**	**16.328.718.129,00**	**97,11**
A	**PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**						**89,03**	**6.131.180.979,00**	**5.689.391.929,00**	**92,79**	**5.688.991.929,00**	**92,79**
i	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						89,03	**6.131.180.979,00**	5.689.391.929,00	92,79	5.688.991.929,00	92,79

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		1. Pembangunan Lanjutan Revitalisasi Amphitheater Kiskendha = 1 paket	1	paket	0,7	paket	70,00					
		2. Karya seni Instalasi Wisata = 6 paket	6	paket	6	paket	100.00					
		3. Gerakan Sambanggo = 10 kali	10	kali	10	kali	100.00					
		4. Pembangunan Lanjutan Kawasan Paralayang Banjarasri = 1 paket	*1*	paket	*1*	paket	100.00					
B	**ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**						**100.00**	**10.684.270.700,00**	**10.642.404.200,00**	**99,61**	**10.639.726.200,00**	**99,58**
i	Publikasi Seni dan Budaya Daerah						100.00	2.126.760.000,00	2.122.514.680,00	99,80	2.122.274.680,00	99,79
		1. Promosi melalui Media Luar Ruang = 2 paket	2	paket	2	paket						
		2. Promosi melalui media elektronik = 6 paket	6	paket	6	paket						
		3. Fam trip Difabel = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan						
		4. Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan						
		5. Wayang Wisata Istimewa = 8 kali	8	kali	8	kali						
		6. Safari Pariwisata = 1 kali	1	kali	1	kali						
ii	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur						100	1.099.500.000,00	1.097.960.900,00		1.097.710.900	

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
	dalam Masyarakat											
		1. Lomba Gelar Potensi Desa Wisata = 1 event	1	even	1	even						
		2. Menoreh Food Festival = 1 event	1	even	1	even	100.00					
iii	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						100	7.458.010.700,00				
		1. Kiskendha Mrahaswara = 1 even	1	even	1	even						
		2. Menoleh ke Menoreh = 1 even	1	even	1	even						
		3. Romansa Pansela = 1 even	1	even	1	even						
		5. Pentas Atraksi Wisata Budaya = 25 kali	25	kali	25	kali						
		6. Glagah Lagoon Festival = 1 even	1	even	1	even						
		7. Sepekan Bendung Khayangan = 1 even	1	even	1	even						
		8. Jemparing Wisata = 1 even	1	even	1	even						
		9. Nglarak Blarak Wisata = 1 even	1	even	1	even						
		10. Rambanan Festival = 1 even	1	even	1	even						
		11. Arung Progo Festival = 1 even	1	even	1	even						
		12. Bendrongan = 3 even	3	even	3	even						

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		13. Sport Tourism = 1 even	1	even	1	even						
10	**KAPANEWON KAB. KULON PROGO (12 kapanewon)**						**100.00**	**360.000.000,00**	**359.955.996,00**	**99,99**	**359.033.481,00**	**99.73**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**360.000.000,00**	**359.955.996,00**	**99,99**	**359.033.481,00**	**99.73**
i	**KAPANEWON TEMON**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**29.882.543,00**	**99,61**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**29.882.543,00**	**99,61**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.882.543,00	99,61
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
ii	**KAPANEWON WATES**						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.976.339,00**	**99,92**	**29.976.339,00**	**99,92**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.976.339,00**	**99,92**	**29.976.339,00**	**99,92**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	29.976.339,00	99,92	29.976.339,00	99,92
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
iii	**KAPANEWON PANJATAN**						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.999.500,00**	**100**	**29.816.050,00**	**99,39**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.999.500,00**	**100**	**29.816.050,00**	**99,39**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	29.999.500,00	100	29.816.050,00	99,39
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
iv	**KAPANEWON GALUR**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.620.877,00**	**98,74**

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.620.877,00**	**98,74**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	29.620.877,00	98,74
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
v	**KAPANEWON LENDAH**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.836.000,00**	**99,45**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.836.000,00**	**99,45**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	29.836.000,00	99,45
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
vi	**KAPANEWON SENTOLO**						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.983.999,00**	**99,95**	**29.983.999,00**	**99,95**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.983.999,00**	**99,95**	**29.983.999,00**	**99,95**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	29.983.999,00	99,95	29.983.999,00	99,95
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
vii	**KAPANEWON PENGASIH**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.968.380,00**	**99,89**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.968.380,00**	**99,89**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	29.968.380,00	99,89
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
viii	**KAPANEWON KOKAP**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.996.523,00**	**99,99**

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.996.523,00**	**99,99**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	29.996.523,00	99,99
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
ix	**KAPANEWON GIRIMULYO**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.956.612,00**	**99,86**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**29.956.612,00**	**99,86**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	29.956.612,00	99,86
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
x	**KAPANEWON NANGGULAN**						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.996.158,00**	**100**	**29.996.158,00**	**99,99**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**29.996.158,00**	**100**	**29.996.158,00**	**99,99**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	29.996.158,00	100	29.996.158,00	99,99
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
xi	**KAPANEWON KALIBAWANG**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**30.000.000,00**	**100**
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**30.000.000,00**	**100**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					
xii	**KAPANEWON SAMIGALUH**						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**30.000.000,00**	**100**

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						**100.00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100**	**30.000.000,00**	**100**
	Gelar Budaya Jogja						100.00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan = 1 even	1	event	1	event	100.00					

2.1.3.5.1 Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan diampu oleh 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dan terperinci menjadi 4 (empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp2.244.497.700,00, dan terealisasi sebesar Rp2.197.486.272,00 (SP2D) atau sebesar 97,91% dan realisasi sebesar Rp2.073.325.446,00 (Fungsional) atau setara 92,37%. Capaian fisik sebesar 91,90% terhadap target satu tahun.

Realisasi fisik untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak sesuai target disebabkan target sasaran obyek pendaftaran kegiatan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sampai tahun 2025 adalah tanah wedi kengser, sedangkan tanah wedi kengser dari tahun 2023 masih dalam pembahasan dengan kanwil Pertanahan dan kementerian Agraria, sehingga obyek pendaftaran dari tahun 2024 ini mengidentifikasi tanah tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang bukan Wedi Kengser. Sedangkan obyek pendaftaran di luar Wedi Kengser sudah habis dan tinggal menyisakan yang masih ada permasalahan. Selain itu untuk TUK pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan belum ada realisasi disebabkan masih menunggu kesiapan menu pada aplikasi dari Kantah.

Tabel 2.201

Kondisi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

No	Status Tanah	2024			2025		
		Total Bidang	Proses Di Daftarkan	Sudah Terbit Sertifikat	Total Bidang	Proses Di Daftarkan	Sudah Terbit Sertifikat
1	Kasultanan	3.124	3.039	2.931	3..124	3.066	2.950
2	Kadipaten	1.007	995	963	1.007	995	963
	JUMLAH	4.131	4.034	3.894	4.131	4.061	3.913

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2025

Tabel 2.202

URUSAN PERTANAHAN

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
URUSAN PERTANAHAN							**91,90**	**2.244.497.700,00**	**2.197.486.272,00**	**97,91**	**2.073.325.446,00**	**92,37**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN							**91,90**	**2.244.497.700,00**	**2.197.486.272,00**	**97,91**	**2.073.325.446,00**	**92,37**
1. 1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO**							**2.066.668.300.00**	**2.019.656.872,00**	**97,73**	**1.897.889.846,00**	**91,83**
A	**SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN**							**23.850.000**	**23.410.500,00**	**98,16**	**23.410.500,00**	**98,16**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksana keistimewaan urusan pertanahan											
		Tersedianaya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan	**2**	**unit**	**2**	**unit**	**100,00**					
B	**PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**						**71.88**	**918.700.100.00**	**758.516.779.00**	**82,56**	**758.516.779.00**	**82,56**
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						70.00	852.995.800.00	693.451.105.00	81,30	693.451.105.00	81,30
		1. Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan	624	sertipikat	512	sertipikat	82,00					
		2. Pendaftaran tanah kasultanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	50	bidang	27	bidang	54,00					
		3. Identifikasi Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	3	dokumen	3	dokumen	100,00					
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah	30	Dokumen	30	Dokumen	100.00	65.704.300.00	65.065.674.00	99,03	65.065.674.00	99,03

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo = 30 Dokumen										
B	**PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**						**100.00**	**1.124.118.200.00**	**1.122.738.397,00**	**99,27**	**1.115.962.567.00**	**99,27**
	Penyiapan Bahan Petimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						100.00	87.187.100.00	86.693.198,00	99.43	86.688.878.00	99.43
		Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo = 20 dokumen	20	dokumen	20	dokumen	100.00	0.00				
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						100.00	1.036.931.100.00	1.036.045.199,00	99,91	1.029.273.689.00	99,26
		Fasilitasi rekomendasi Bupati/Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah kalurahan = 80 Berita Acara	80	Berita Acara	80	Berita Acara	100.00	0.00				
2	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**177.829.400,00**	**177.829.400,00**	**100**	**175.435.600,00**	**98,65**
A	**PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**						**100.00**	**177.829.400,00**	**177.829.400,00**	**100**	**175.435.600,00**	**98,65**
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						100.00	177.829.400,00	177.829.400,00	100	175.435.600,00	98,65

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		a. Penyusunan Data Spasial 3 Kapanewon (Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan) b. Rancangan Perbup (Kapanewon (Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan) = 3 dokumen.	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00					
		Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Penegasan Batas Wilayah di 1 Kapanewon = 1 Rancangan Peraturan Bupati	1	Rancangan Peraturan Bupati	1	Rancangan Peraturan Bupati	100.00					

2.1.3.5.2 Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang diampu oleh 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pekerjaan Umum dan PKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dan terperinci menjadi 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp12.459.499.637,00, alokasi dan terealisasi sebesar Rp12.473.054.818,00 (SP2D) atau sebesar 99,82% dan terealisasi sebesar Rp12.427.784.544,00 (Fungsional) atau setara 99,75%. Capaian fisik sebesar 99,94% terhadap target satu tahun.

Berikut ini progres penyusunan Dokumen Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan/kadipaten:

Tabel 2.203
Progres Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan

No	Jenis Dokumen Rencana Tata Ruang	Uraian	Alasan/Urgensi	Keterangan
1	Rencana Induk	SRS Kota Wates	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Belum disusun
		SRS Perbukitan Menoreh	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Disusun tahun 2020
		SRS Pantai Selatan	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Belum disusun
		SRS Makam Girigondo	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Disusun tahun 2021
2	RTBL Kawasan SRS Kota Wates	Kawasan Bulu Pengasih	Penataan kawasan cagar budaya	Disusun tahun 2015
3	RTBL Kawasan SRS Perbukitan Menoreh	Banjaroya	Kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi perbatasan	Belum disusun
		Tonogoro	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2015
		Nglinggo-Tritis	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2018
		Jatimulyo	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun

No	Jenis Dokumen Rencana Tata Ruang	Uraian	Alasan/Urgensi	Keterangan
		Hargorejo	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Sermo	Kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2017
4	RTBL Kawasan SRS Pantai Selatan	Karangwuni	Kawasan strategis ekonomi pelabuhan	Belum disusun
		Glagah	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Jangkaran	Kawasan strategis ekonomi	Belum disusun
		Banaran (Sekitar Trisik)	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Bugel	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
5	RTBL Kawasan SRS Makam Girigondo	Girigondo	Penataan kawasan cagar budaya	Disusun tahun 2017

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang(Kundha Niti Mandhala lan Niti Sasana) Kab. Kulon Progo, 2021.

Tabel 2.204

URUSAN **TATA RUANG**

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
URUSAN TATA RUANG							**100**	**12.459.999.637.00**	**12.437.054.818,00**	**99,82**	**12.427.784.544.00**	**99,75**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							**100**	**12.459.499.637.00**	**12.437.054.818,00**	**99,82**	**12.427.784.544.00**	**99,75**
1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PKP KABUPATEN KULON PROGO**						**100**	**9.749.221.644.00**	**9.749.120.484,00**	**100**	**9.749.120.484,00**	**100**
A	**PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**						**100**	**9.749.221.644.00**	**9.749.120.484,00**	**100**	**9.749.120.484,00**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						100	7.069.197.000.00	7.069.118.153,00	100	7.069.118.153,00	100
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Kalurahan Ngargosari, Samigaluh = 100 SR	100	SR	100	SR	100		-		-	
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Banjaroyo = 80 SR	80	SR	80	SR	100		-		-	
		Perluasan layanan air bersih masyarakat Desa Kalirejo = 91 SR	91	SR	91	SR	100		-		-	
		Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari - Kebonharjo = 1,3 Km	1,3	Km	1,3	Km	100		-		-	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo						100	2.680.024.644,00	2.680.002.331,00	100	2.680.002.331,00	100
		Pembangunan Jalan Makam Girigondo segmen 4 = 800 meter	800	m	800	m	100	822,852,112.00	-		-	
2	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**1.792.065.272,00**	**1.775.439.895,00**	**99,07**	**1.766.367.423,00**	**98,57**
A	**PEMANFAATAN RUANG SATUAN STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**						**100.00**	**1.792.065.272,00**	**1.775.439.895,00**	**99,07**	**1.766.367.423,00**	**98,57**

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						100.00	1.792.065.272,00	1.775.439.895,00	99,07	1.766.367.423,00	98,57
		1. Pengembangan Kawasan Durian Tonogoro = 4 aktivitas							-		-	
		a. Sewa Tanah Tonogoro = 210.000 m2	24	kali	24	kali	100.00		-		-	
		b. Pengembangan Kawasan Durian Penyangga Tonogoro = 6 KT	6	KT	2	kelompok	100.00		-		-	
		c. Pengembangan Ternak Kambing Bligon di Kawasan Penyangga Tonogoro = 2 Kelompok @ 22 Kambing	2	kelompok	5	kali	100.00		-		-	
		d. Upaya Peningkatan Produksi dan Kualitas Durian = 100 pohon durian meningkat produksinya:	*100*	*Pohon*	*100*	*pohon*	*100,00*		-		-	
		2. Pengembangan Kawasan Durian Embung Kleco = 2 aktivitas	2	aktivitas	2	aktivitas	100.00		-		-	
		a. Pemeliharaan Kebun Durian di Kawasan Embung Kleco = 3 Kelompok Tani	3	kelompok	3	kelompok	100.00		-		-	
		b. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Embung Kleco = Perbaikan Membran	1	paket	1	paket	100.00		-		-	
		3. Pengembangan Agroeduwisata Hargowilis = 1 aktivitas							-		-	
		a. Pemeliharaan Kelapa Genjah (Pupuk Organis) = 1200 Pohon	1200	pohon	1200	pohon	100.00		-		-	
		4. Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh =1 paket	1	paket	1	paket	100.00		-		-	

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		a. Bantuan Sarana Prasana Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh dan Bimtek Pengolahan Hijauan Pakan Ternak pada Pengembangan Kambing PE = 25 orang	25	orang	25	orang	100,00					
		5. Pengembangan Kopi Menoreh = 1 aktivitas	1	aktivitas	1	aktivitas	100.00		-		-	
		a. Festival Kopi = 1 event	1	event	1	event	100.00		-		-	
		6. Heboh Buah = 1 Event	1	event	1	event	100.00		-		-	
3	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**300.121.000.00**	**294.407.838.00**	**98,10**	**294.407.838.00**	**98,10**
A	**PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**						**100.00**	**300.121.000,00**	**294.407.838.00**	**98,10**	**294.407.838.00**	**98,10**
	Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang						100.00	**300.121.000,00**	**294.407.838.00**	**98,10**	**294.407.838.00**	**98,10**
		1. Persetujuan Substansi dan ranperbup Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Selatan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Tengah = 2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen t	100.00	**0**	-		-	
4	**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO**						**100.00**	**618.091.721,00**	**618.086.601,00**	**98.47**	**617.888.799,00**	**98.47**
A	**PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**						**100.00**	**618.091.721,00**	**618.086.601,00**	**98.47**	**617.888.799.00**	**98.47**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						100.00	123.504.570,00	123.502.010,00	97.67	123.425.628.00	97.66
		Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya = 5 unit	5	unit	5	unit	100.00	-	-		-	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Kiskendo - Sermo - Wates						100.00	494.587.151,00	494.584.591,00	98.85	494.463.171.00	98.85

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2025				
			TARGET		CAPAIAN							
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%	PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
		Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya = 20 unit	20	unit	20	unit	100.00	-	-		-	

Pelaksanaan Dana Keistimewaan (Danais) pada Kabupaten Kulon Progo terdiri 4 urusan keistimewaan, yaitu urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. Pelaksanaan kegiatan Danais telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pembangunan yaitu:

- **Pembangunan Infrastuktur**
  Danais digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti Peningkatan jalan Ruas Tegalsari - Kebonharjo, Pembangunan jalan makam Girigondo segmen 4, Peningkatan dan Pengembangan layanan air bersih bagi masyarakat Kalurahan Ngargosari Samigaluh, Banjaroyo Kalibawang, Kalirejo Kokap, Pengadaan dan pemasangan APJ Pintar bernuansa budaya.
- **Pelestarian dan Pengembangan Budaya**
  Danais mendukung pelestarian warisan budaya, pengembangan seni dan budaya serta pendidikan
- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**
  Digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk Implementasi Budaya Pemerintahan pada Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Sentosa pada Puskesmas Sentolo I, Puskesmas Sentolo II, Puskesmas Temon I, Puskesmas Temon II, Puskesmas Girimulyo dan Pelayanan Si Peri Manis Kapanewon pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- **Penguatan Sektor Ekonomi**
  Dana Keistimewaan berperan dalam mendukung sektor ekonomi terutama di bidang pariwisata dan budaya. Dengan terlaksananya event – event tersebut terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pada sector usaha terjadi peningkatan omzet bagi UMKM dan pedagang kaki lima (PKL), lonjakan pendapatan dari sektor parkir dan jasa transportasi lokal, usaha kuliner serta jasa lainnya sehingga terjadi perputaran ekonomi. Selain itu juga terjadi penyerapan tenaga kerja yang terdiri dari petugas kebersihan, keamanan, vendor, EO dan Pemandu.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, fasilitas wilayah dan iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut**.**

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi

daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2025 untuk bahan makanan sebesar 46,06 persen, angka tersebut lebih rendah dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan, persentasenya juga menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 43,66 persen. Adapun komposisi tingkat pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Makanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (persen)

No	Kelompok Makanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-padian	6,74	5,54	5,91	6,60	6,23
2	Umbi-umbian	0,70	0,57	0,56	0,41	0,53
3	Ikan/udang/cumi/kerang	1,69	1,83	1,30	1,29	1,33
4	Daging	2,16	2,48	2,42	2,34	2,05
5	Telur dan Susu	3,11	2,88	2,95	2,66	2,88
6	Sayur-sayuran	4,50	3,69	3,66	3,93	4,09
7	Kacang-kacangan	1,42	1,28	1,60	1,51	1,44
8	Buah-buahan	2,23	2,87	2,28	2,73	3,24
9	Minyak dan kelapa	1,52	1,75	1,34	1,41	1,49
10	Bahan Minuman	2,14	1,84	1,72	1,92	1,99
11	Bumbu-bumbuan	0,91	0,93	0,79	0,89	0,84
12	Bahan makanan lainnya	0,96	1,00	0,96	0,89	0,93
13	Makanan dan Minuman Jadi	15,66	14,76	13,75	14,84	14,36
14	Rokok dan Tembakau	4,26	4,71	4,42	5,05	4,65
	Jumlah / Total	**48,01**	**46,13**	**43,66**	**46,47**	**46,06**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti oleh kelompok padi-padian, kelompok rokok dan tembakau, kelompok sayuran, dan kelompok telur dan susu. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kulon Progo pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun sudah ada perda masalah rokok tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu 4,65 persen walaupun terus menurun dari tahun ke tahun.

Sementara itu untuk konsumsi ikan masih sangat rendah, hanya berkisar 1,33 persen mengalami penurunan dibandingkan konsumsi ikan di tahun 2024.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

Pengeluaran konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 53,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan dapat dilhat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.206

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kelompok Bukan Makanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	25,45	24,61	25,99	26,93	26,11
2	Aneka Barang dan Jasa	12,12	13,18	11,65	12,66	13,19
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	2,18	2,04	2,11	2,24	2,23
4	Barang Tahan Lama	7,08	7,04	9,67	4,42	5,41
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	4,05	4,99	4,54	4,86	4,91
6	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	1,11	2,01	2,38	2,41	2,09
	Jumlah	**51,99**	**53,87**	**56,34**	**53,53**	**53,94**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tingkat pengeluaran tertinggi tahun 2025 pada Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 26,11 persen dan dikuti oleh Kelompok Aneka Barang dan Jasa sebesar 13,19 persen, sedangkan pengeluaran terendah pada Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri.

Apabila dilihat rasio pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kulon Progo nilainya berfluktuatif, pada periode 2021-2025 rasio tertinggi dicapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,563. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.207

Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran non pangan rata-rata per kapita sebulan	515.169	458.427	575.926	705.666	616.794
2	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan	940.502	881.689	1.069.000	1.252.450	1.152.288
3	Rasio	0,548	0,520	0,538	0,563	0,535

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2025 kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar 88,61%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada

regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang. Nilai kesesuaian ruang merupakan perpaduan keterwujudan dan keselarasan pemanfaatan ruang yang setidaknya terdiri atas aspek struktur ruang dan pola ruang. Nilai tersebut merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang pada Lampiran II, nilai kesesuaian tata ruang Kabupaten Kulon Progo berada pada klasifikasi I yang merupakan tingkatan tertinggi dengan klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW. Rekomendasi berupa saran kebijakan dan Strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTRW.

Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tercantum dalam Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.208

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2025

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025*
1.	Struktur ruang	87,00	87.22	87,33	87,36	87,36
2.	Pola ruang	89,58	89.88	89,78	89,86	89,86
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,29	88.55	88,56	88,61	88,61

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo, 2025.

**angka sementara*

Dengan adanya beberapa proyek strategis nasional berupa pembangunan bandara, kereta bandara, jalan bebas hambatan serta penetapan kawasan strategis pariwisata nasional, konstelasi penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo sudah semestinya dilakukan penyesuaian. Proses perubahan Perda 1/2012 telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan telah dilakukan peninjauan kembali. Pada Tahun 2024 ini RTRW masih dalam proses pra loket dalam rangka persiapan untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kemeterian ATR/BPN. Revisi RTRW beserta penataan ruang turunannya sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kulon Progo yang dengan adanya beberapa kegiatan strategis menjadi sangat pesat dan dinamis.

b. Kawasan peruntukan industri.

Kawasan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri dengan harapan adanya badan usaha pengelola kawasan yang menaungi dan menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatan usaha yang akan melakukan usaha nya pada kawasan tersebut. Kawasan peruntukan industri telah direncanakan kurang lebih 10 tahun. Beberapa instrumen pendukungnya seperti peningkatan akses jalan dan regulasi kemudahan serta insentif penanaman modal telah dikeluarkan. Beberapa kegiatan industri dari berbagai sektor telah mulai berdiri namun hingga kini belum ada badan hukum yang menjadi pengelola kawasan. Kawasan peruntukan industri tersebut adalah:

a) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Lendah.
b) Kawasan Industri Temon di Kapanewon Temon berupa industri bahari dengan luas kurang lebih 500 Ha.
c) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kapanewon Nanggulan dengan luas 700 Ha
d) Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kapanewon.

c. Jumlah orang yang terangkut di terminal

Jumlah kendaraan yang masuk dalam terminal bus AKAP sangat fluktuatif demikian pula untuk AKDP. Pada Tahun 2021, dengan kondisi Pandemi Covid-19 terlihat penurunan yang sangat siginifikan baik mobilitas angkutan umum AKAP maupun AKDP serta pengguna layanan. Penurunan ini juga erat kaitanya dengan adanya upaya pembatasan pergerakan guna pencegahan penyebaran Virus Covid-19 terutama pada saat lonjakan mudik lebaran maupun saat liburan. Adapun data mengenai jumlah angkutan dan orang yang terangkut di terminal tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.209

Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2021-2025

TAHUN	Bus (unit)		Penumpang Bus (orang)	
	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP
2020	29.620	14.883	110.506	15.966
2021	9.775	19.146	72.074	107.168
2022	31.400	10.846	287.878	12.070
2023	33.093	11.888	262.346	10.107
2024	31.958	11.090	184.744	25.935

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

d. Kondisi Jalan

Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2025 untuk kondisi baik 43,27% sedangkan untuk kondisi sedang 31,03%. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.210

Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	Km	%	km	%	Km	%	
1.	Nasional*	34.761	73,68	11.172	23,68	1.247	2,64	-	-	47.180
2.	Provinsi	79.802	51,67	35.773	23,16	31.163	20,18	7.702	4,99	154.440
3.	Kabupaten	419.241	51,90	137.135	16,98	57.022	7,06	194.360	24,06	807.758

*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan. Dalam rangka untuk mendukung keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) serta untuk menangkap peluang dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan jalan yang menghubungkan BIY dengan KSPN Borobodur (Jalur Bedah Menoreh). Jalur ini juga diharapkan bisa menurunkan ketimpangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan membuka akses menuju potensi wisata serta kawasan produk unggulan Kulon Progo. Terbangunnya Jalan Bedah Menoreh diharapkan akan meningkatkan akses jalan menuju kawasan dengan potensi wisata yang terdapat di sepanjang jalur Bedah Menoreh. Selain itu dengan terbukanya akses jalan di Perbukitan Menoreh diharapkan dapat memperlancar distribusi produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kulon Progo.

e. Infrastruktur Strategis di Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa infrastruktur strategis yang diharapkan mampu mengembangkan wilayah secara signifikan. Bendung Kamijoro merupakan infrastruktur penyediaan air baku yang telah diresmikan pada Desember 2019 untuk antisipasi kebutuhan air baku bagi Kulon Progo khususnya kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yang juga telah diresmikan pada Agustus 2020. Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta selanjutnya didukung dengan peningkatan Rumah Sakit Wates bertaraf internasional, integrasi kereta bandara yang saat ini sedang dibangun dan rencana jalan tol Yogyakarta-Bandara Internasional Yogyakarta-Cilacap. Sebagai penunjang pariwisata, Badan Otorita Borobudur mengembangkan wisata di perbatasan Kulon Progo dengan basis wisata alam dengan pintu masuk utama dari Kulon Progo dan telah dibangun gerbang masuk di kawasan Klangon dengan nama Samudra Raksa. Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dari berbagai kawasan tersebut telah dirintis trayek armada angkutan dari DAMRI

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklimm kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas

Kejadian kejahatan dari tahun 2021 hingga 2025 cenderung fluktuatif. Data menunjukkan kejadian tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun demikian kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian kejahatan justru meningkat. Meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan kurang tertibnya masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal kekerasan secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.211

Jumlah Kejadian Kejahatan Kabupaten Kulon Progo 2021-2025

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pencurian biasa	26	41	31	26	18
2.	Jumlah pencurian hewan	10	n.a.	1	2	1
3.	Jumlah pencurian dengan kekerasan	-	n.a.	1	-	7
4.	Jumlah lainnya	79	n.a.	312	251	223
	Jumlah kejadian total	**115**	n.a.	345	**279**	**249**
	Jumlah kerugian (Rp)	**1.815.025.000**	**n.a.**	**8.632.794,99**	**26.743.406.329**	**477.770.210.662**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2025

Apabila menggunakan angka Crime Rate, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, dari 123,25 pada tahun 2020 menurun menjadi 67,04 pada tahun 2025, hal ini menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Kulon Progo yang semakin kondusif. Crime Rate diukur jumlah kejahatan yang terjadi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun) yang dihitung per 100.000 penduduk.

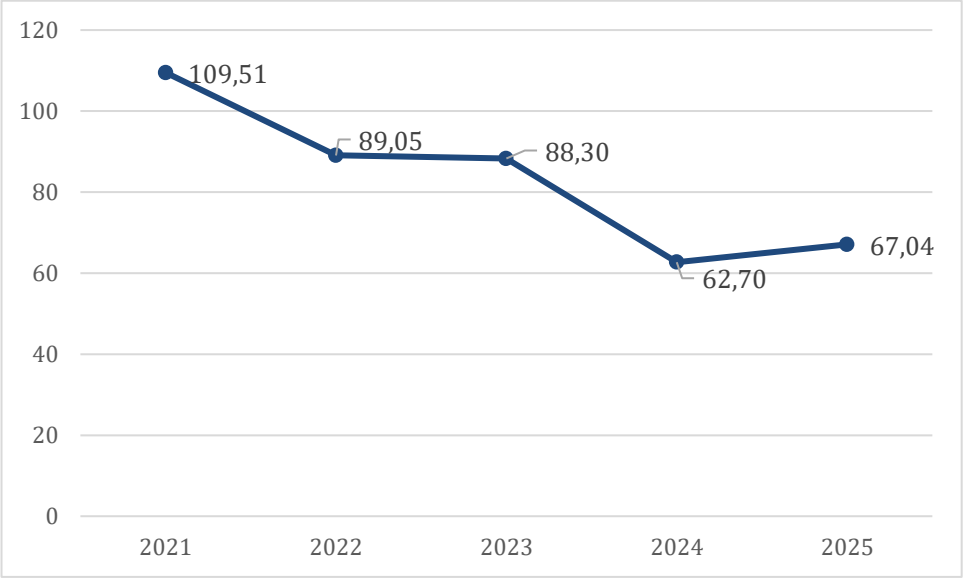

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026. *Diolah*.

Gambar 2.44

Crime Rate di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025

Terkait dengan kejadian kejahatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 selain kasus pencurian (pencurian biasa, pencurian hewan, dan pencurian dengan kekerasan), juga terdapat juga kejadian kejahatan lainnya. Berdasarkan data BPS, adapun kejadian kejahatan lain yang dimaksud meliputi kasus perjudian, kasus penipuan, kasus penadahan, kasus penggelapan, kasus kesusilaan, kasus narkotika, kasus perampokan, kasus penganiayaan, kasus penculikan dan lain-lain.

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2025 didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Pada tahun 2023 terjadi demonstrasi sebanyak 9 kali terkait dengan politik, ekonomi, dan agama. Pada tahun 2024 tidak ada kejadian demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo meskipun tahun 2024 merupakan tahun politik (tahun pelaksanaan Pemilu dan Pilkada). Pada tahun 2025 terjadi demonstrasi ekonomi sebanyak 4 kali, diantaranya adalah kejadian demo terkait permasalahan PT Selo Adi Karta.

Tabel 2.212

Jumlah Demo Tahun 2021 - 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Demonstrasi politik	1	0	2	0	0
2	Demonstrasi ekonomi	1	1	5	0	4
3	Demonstrasi mogok kerja	0	0	0	0	0
4	Demonstrasi agama	0	0	2	0	0
	Jumlah	**2**	**1**	**9**	**0**	**4**

Sumber data : Bakesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2026

Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo dapat terkendali dengan baik atas koordinasi kerjasama berbagai unsur lintas sektoral. Upaya untuk mengendalikan kejadian demonstrasi adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kulon Progo diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

Tabel 2.213
Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2021-2025

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 14 tahun	89.212	89.988	88.117	83.304	80.592
15 - 64 tahun	297.076	302.018	296.615	302.719	302.950
65 +	56.995	59.336	58.321	58.971	61.776
Angka Beban Ketergantungan (%)	**49,21**	**49,44**	**49,37**	**46,99**	**47,00**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Besarnya angka ketergantungan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun, nilai dibawah 50 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo telah mencapai bonus demografi. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Pada Tahun 2023, angka ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 49,37% menurun dari tahun 2022 yang sebesar 49,44%. Sedangkan kondisi tahun 2024 angka ketergantungan turun lagi menjadi 46,99%. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Namun demikian besarnya jumlah usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif di Kabupaten Kulon Progo ini belum dibarengi dengan peningkatan tingkat konsumsi yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian.

2.1.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam kerangka pembangunan daerah, capaian SPM menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kinerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan gambaran mengenai efektivitas penyelenggaraan pelayanan dasar pada masing-masing bidang urusan. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. SPM Bidang Sosial.

Evaluasi terhadap capaian SPM perlu dilakukan secara periodik dengan melihat perkembangan realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis terhadap realisasi selama tiga tahun terakhir dimaksudkan untuk mengidentifikasi perkembangan capaian, kecenderungan

peningkatan atau penurunan kinerja, tingkat kesenjangan antara target dan realisasi, serta bidang pelayanan dasar yang masih memerlukan intervensi dan penguatan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, serta penyusunan program dan kegiatan yang lebih terarah dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Capaian SPM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari enam bidang penerapan SPM disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pemenuhan pelayanan dasar daerah serta menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan dan tindak lanjut pada periode perencanaan berikutnya.

2.1.5.1 Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023-2025 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.214

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	16.056	16.056	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	35.250	35.250	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	230	230	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah*.

Tabel 2.215

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	16.056	16.056	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	53.498	53.498	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	230	230	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Tabel 2.216

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8.220	8.220	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	46.789	46.789	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	750	750	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal. Pada seluruh jenis pelayanan dasar, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, realisasi capaian tercatat sebesar 100 persen pada setiap tahun dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100

persen. Dengan demikian, tidak terdapat kesenjangan antara target dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan selama periode tersebut.

Dari sisi jumlah sasaran pendidikan dasar tercatat sebanyak 35.250 orang pada tahun 2023, meningkat menjadi 53.498 orang pada tahun 2024, kemudian menjadi 46.789 orang pada tahun 2025. Pada pendidikan kesetaraan, jumlah sasaran meningkat dari 230 orang pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 750 orang pada tahun 2025. Sementara itu, sasaran PAUD tercatat 16.056 orang pada tahun 2023 dan 2024, kemudian menjadi 8.220 orang pada tahun 2025. Meskipun jumlah sasaran mengalami perubahan, seluruh sasaran pada masing-masing tahun tetap tercatat memperoleh pelayanan sebesar 100 persen. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan SPM bidang pendidikan selama tiga tahun terakhir telah berjalan sesuai target. Tantangan ke depan memastikan akurasi pendataan sasaran, pemerataan akses, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan sehingga capaian SPM secara kuantitatif dapat diikuti dengan peningkatan mutu layanan.

2.1.5.2 Kesehatan

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 98 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal berikut capaian penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2023-2025:

Tabel 2.217

Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2023			2024		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.952	3.881	98,20	3.673	3.353	91,29
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.952	3.937	99,62	3.411	3.406	99,85
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	4.085	3.891	95,25	3.418	3.374	98,71
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19.904	19.194	96,43	20.314	19.291	94,96

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2023			2024		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	52.918	47.643	90,03	53.366	51.454	96,42
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	69.531	66.964	96,31	75.449	73.939	98,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	53.429	50.049	93,67	67.249	60.928	90,60
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	10.491	10.447	99,58	13.666	12.946	94,73
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.954	3.934	99,49	4.966	4.870	98,07
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1.562	1.410	90,27	1.516	1.418	93,54
11	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis	Orang	4.779	4.078	85,33	4.628	4.318	93,30

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2023			2024		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	dengan TB	yang mendapatkan layanan kesehatan							
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5.202	4.877	93,75	6.008	5.671	94,39

Tabel 2.218

Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Indikator	Uraian	Satuan	2025		
				Target	Capaian	%
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.464	3.410	98,44%
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.420	3.410	99,71%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	3.408	3.351	98,33%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19.711	19.341	98,12%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	54.558	53.752	98,52%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	74.000	84.457	114,13%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	61.004	63.328	103,81%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	12.946	13.373	103,30%

No	Indikator	Uraian	Satuan	2025		
				Target	Capaian	%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.870	5.695	116,94%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1.465	1.455	99,32%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.318	7.290	168,83%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5.690	5.966	104,85%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang beragam antarjenis pelayanan. Pada tahun 2023, sebagian besar indikator telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan capaian tertinggi terdapat pada pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 99,62 persen, hipertensi sebesar 99,58 persen, dan diabetes melitus sebesar 99,49 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan capaian relatif rendah, terutama pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 85,33 persen dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 90,03 persen.

Perkembangan pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator, antara lain pelayanan kesehatan orang dengan TB yang meningkat menjadi 93,30 persen, pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat dari 90,27 persen menjadi 93,54 persen, serta pelayanan usia pendidikan dasar yang meningkat menjadi 92,79 persen. Namun, beberapa indikator mengalami penurunan, terutama pelayanan kesehatan ibu hamil yang turun menjadi 91,29 persen, pelayanan balita menjadi 94,96 persen, dan pelayanan usia produktif yang pada tabel tahun 2023–2024 tercatat sebesar 26,77 persen.

Indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2025 yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil tercapai 98,44 persen, pelayanan kesehatan ibu bersalin 99,71 persen, pelayanan kesehatan bayi baru lahir tercapai 98,33 persen, pelayanan kesehatan balita 98,12 persen, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 98,52 persen, pelayanan kesehatan pada usia produktif 114,13 persen, pelayanan kesehatan pada usia lanjut 103,81 persen, pelayanan kesehatan penderita hipertensi 103,30 persen, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 116,94 persen, pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 99,32 persen, pelayanan kesehatan TB 168,83 persen dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tercapai 104,85 persen. Beberapa kendala dalam pencapaian SPM antara lain:

1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil baru mencapai 3.410 orang dari target 3.464 orang. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain: migrasi masuk keluar daerah, kunjungan

dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati).

2. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 3.410 orang masih belum mampu mencapai target SPM sebanyak 3.420. Target tidak tercapai akibat kelahiran terjadi saat ibu hamil masih di rumah atau pada saat menuju fasilitas pelayanan kesehatan (brojol).
3. Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar masih belum mampu mencapai target SPM 100 persen. Pelayanan bayi baru lahir mengalami kendala terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah yang dilakukan penundaan pemberian imunisasi dan inisiasi menyusui dini. Kendala utama pada pelayanan kesehatan balita adalah balita yang tidak datang pada posyandu karena tidak ada yang mengantar. Kendala pada pelayanan kesehatan usia dasar adalah banyaknya jumlah anak sekolah dan tersebarnya lokasi sekolah, sedangkan pelayanan hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan tidak dapat didelegasikan kepada kader
4. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) sudah mencapai 114,13 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran usia produktif telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi skrining kesehatan, pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular, serta edukasi perilaku hidup sehat.
5. Pelayanan Kesehatan pada kelompok usia lanjut sudah mencapai 103,81 persen. Hal ini menunjukkan tingginya cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia, meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan penyakit tidak menular, serta pemberian edukasi kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar sudah mencapai target yaitu 103,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, seperti pemeriksaan tekanan darah secara rutin, pemantauan kondisi kesehatan, serta edukasi mengenai pengendalian faktor risiko dan pola hidup sehat.
7. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar sudah mencapai 116,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penderita DM telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, seperti pemeriksaan kadar gula darah, pemantauan kondisi kesehatan secara berkala, serta edukasi mengenai pengelolaan penyakit dan penerapan pola hidup sehat.
8. Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standar baru mencapai 1.455 orang dari target 1.465 orang. Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.
9. Pelayanan kesehatan TB sudah mencapai 168,83 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penemuan, pemeriksaan, serta penatalaksanaan penderita TB telah berjalan secara optimal. Pelayanan yang diberikan meliputi deteksi dini, pemeriksaan penunjang, pengobatan sesuai standar, serta pemantauan kepatuhan minum obat.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai 104,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penjangkauan, pemeriksaan, serta pemberian layanan kesehatan kepada kelompok berisiko telah berjalan secara optimal. Pelayanan yang diberikan meliputi skrining atau tes HIV, konseling, serta edukasi mengenai pencegahan penularan HIV.

11. Secara umum, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan, dimana 6 dari 12 indikator SPM telah mencapai lebih dari 100% dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Solusi dan tindak lanjut:

1. Pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WA grup Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sektor terkait penanganan ibu hamil KTD.
2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.
3. Memperkuat pelayanan antenatal care (ANC) yang berkualitas, pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko lebih diperkuat, melaksanakan skrining layak hamil dan penguatan kesiapan ibu dari sejak calon pengantin.
4. Pendampingan kader untuk melakukan penjadwalan dan monitoring pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang (SDIDTK) sesuai umur, melakukan edukasi ke ibu balita pentingnya deteksi dini tumbuh kembang.
5. Menyusun strategi bagi Puskesmas dengan jumlah sasaran banyak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal tahun, sehingga di akhir tahun semua sasaran sudah dilakukan pemeriksaan.
6. Mendata dan melakukan kunjungan bersama petugas ke rumah lansia yang terbatas pergerakannya, melakukan sosialisasi pentingnya skrining bagi lansia, melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan lansia.
7. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi dan DM ke fasyankes swasta dapat terlaporkan ke Puskesmas.
8. Membuat kartu pemantauan minum obat bagi ODGJ, melakukan Perawatan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Nursing (PHN), melakukan pendampingan pada ODGJ dan keluarganya serta melatih kader kesehatan jiwa.

2.1.5.3 Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, pelaksanaan SPM di Kabupaten Kulon Progo untuk Bidang Pekerjaan Umum selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.219

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
Presentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian**
1. Jumlah yang harus dilayani	1.610	3.110	+1.500	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.610	3.110	+1.500	100%
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1.610	3.110	+1.500	100%
3	Jaringan perpipaan	1.610	3.110	+1.500	100%
4	Jaringan bukan perpipaan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik				
Presentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani	447	447	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	447	447	0	100%
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	447	447	0	100%
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	447	447	0	100%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah*

Tabel 2.220

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
Presentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian**
1. Jumlah yang harus dilayani	2.060	2.060	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	515	515	0	100%
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	515	515	0	100%
3	Jaringan perpipaan	515	515	0	100%
4	Jaringan bukan perpipaan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik				
Presentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani	1.892	1.892	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	173	173	0	100%
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	300	300	0	100%
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	173	173	0	100%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Tabel 2.221

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
Presentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian**
1. Jumlah yang harus dilayani	5.832	5.832	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1.	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.458	1.458	0	100%
2.	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1.458	1.458	0	100%
3	Jaringan perpipaan	1.458	1.458	0	100%
4	Jaringan bukan perpipaan	0.	0	0.	100%.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik				
Presentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani	1.448	1.448	0	100%

Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**

1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	82	82	0	100%
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	362	362	0	100%
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	82	82	0	100%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh indikator pelayanan dasar, baik penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari maupun pelayanan pengolahan air limbah domestik, secara konsisten mencapai realisasi sebesar 100 persen setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan dasar telah memperoleh layanan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun persentase capaian relatif tetap, jumlah sasaran pelayanan menunjukkan dinamika selama tiga tahun terakhir. Pada pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, jumlah masyarakat yang menjadi sasaran meningkat dari 1.610 jiwa pada tahun 2023, menjadi 2.060 jiwa pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 5.832 jiwa pada tahun 2025.

Pada aspek mutu pelayanan penyediaan air minum, seluruh indikator yang meliputi kuantitas kebutuhan pokok minimal, kualitas air, dan pelayanan melalui jaringan perpipaan secara konsisten mencapai 100 persen selama periode 2023–2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi target jumlah penerima layanan, tetapi juga telah memenuhi standar mutu pelayanan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SPM.

Pada pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaian pelayanan dasar juga menunjukkan kinerja yang konsisten dengan realisasi 100 persen setiap tahun. Jumlah sasaran pelayanan mengalami fluktuasi, yaitu 447 jiwa pada tahun 2023, meningkat menjadi 1.892 jiwa pada tahun 2024, kemudian menjadi 1.448 jiwa pada tahun 2025. Perubahan jumlah sasaran tersebut menunjukkan adanya dinamika kebutuhan pelayanan sanitasi di masyarakat, namun tidak memengaruhi tingkat pemenuhan pelayanan karena seluruh sasaran tetap memperoleh layanan sesuai standar yang ditetapkan. Di samping itu, seluruh indikator mutu pelayanan pengolahan air limbah domestik juga mempertahankan capaian 100 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum selama tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mampu mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar pada sektor air minum dan sanitasi sesuai dengan standar pelayanan minimal.

2.1.5.4 Perumahan Rakyat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, berikut disampaikan Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023-2025 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 2.222

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		3	3	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
3	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/ Relokasi bagi Korban Bencana	3	3	0	100%
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		1	1	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%
2	Subsidi Uang Sewa	0	0	0	100%
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	1	1	0	100%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Tabel 2.223

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		3	3	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**

1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	0	100%
3	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/ Relokasi bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		1	1	0	100%
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%
2	Subsidi Uang Sewa	0	0	0	100%
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	1	1	0	100%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah*

Tabel 2.224

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		3	3	0	100%
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	1	0	100%
2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	5	5	0	100%
3	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/ Relokasi bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
Persentase Penerima Layanan Dasar	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani	0	0	0	100%

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kulon Progo selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Seluruh indikator pelayanan dasar pada dua jenis layanan, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, secara konsisten mencapai realisasi 100 persen setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan telah memperoleh layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, pelayanan lebih banyak diarahkan pada pembangunan baru di lokasi relokasi bagi korban bencana, sedangkan pada tahun 2024 fokus pelayanan bergeser pada pembangunan kembali rumah bagi korban bencana. Selanjutnya pada tahun 2025, kebutuhan pelayanan didominasi oleh pembangunan kembali rumah korban bencana yang meningkat menjadi lima unit serta rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak satu unit. Perubahan komposisi layanan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan perumahan dipengaruhi oleh karakteristik dan tingkat kerusakan akibat bencana yang terjadi pada masing-masing tahun.

Pada pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, jumlah sasaran relatif terbatas. Tahun 2023 dan 2024 masing-masing terdapat satu sasaran yang seluruhnya telah memperoleh pelayanan, sedangkan pada tahun 2025 tidak terdapat masyarakat yang menjadi sasaran relokasi sehingga tidak terdapat kebutuhan pelayanan pada jenis layanan tersebut.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2023–2025 kebutuhan pelayanan dasar pada bidang perumahan sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke depan, tantangan penyelenggaraan SPM tidak hanya mempertahankan capaian 100 persen, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan dalam menangani kebutuhan perumahan akibat bencana maupun relokasi melalui penyediaan anggaran yang memadai, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemutakhiran data sasaran agar pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.5.5 Trantibumlinmas

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi kedaruratan. Evaluasi capaian SPM selama periode 2023–2025 diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan, tingkat pemenuhan target, serta efektivitas

penyelenggaraan pelayanan dasar sebagai dasar penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Tabel 2.225

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	99,72
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96,79

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah***.**

Tabel 2.226

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100

Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Tabel 2.227

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Capaian SPM bidang Trantibumlinmas menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, dari lima jenis pelayanan dasar, tiga indikator telah mencapai 100 persen, yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sementara itu, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 99,72 persen dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran mencapai 96,79 persen.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kinerja, ditandai dengan seluruh lima jenis pelayanan dasar mencapai realisasi 100 persen. Capaian tersebut dipertahankan pada tahun 2025, di mana seluruh indikator kembali mencapai 100 persen. Dengan demikian, terdapat perbaikan dari kondisi tahun 2023 ketika masih terdapat dua indikator yang belum mencapai target penuh, menjadi seluruh indikator mencapai target pada tahun 2024 dan 2025.

2.1.5.6 Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Peraturan teknis terkait sub urusan kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun pencapaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dari Tahun 2023 sampai Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.228

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	SPM/Standar nasional	Target Nasional			Realisasi Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	*Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) (km2)*	-	496	496	496	200	200	200
	Luas Kabupaten (km2)	*586,28*	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/Kota (%)	80	80	80	80	34,12	34,12	34,12
2	*Jumlah kasus kebakaran yang tertangani*	-	-	-	-	118	104	46
	Jumlah kasus kebakaran	-	-	-	-	118	104	46
	Tingkat waktu tanggap *(Response Time Rate)*	75	75	80	80	100	100	100
3	*Jumlah Satgas Damkar yang memiliki standar kualifikasi*	-	-	-	-	4	4	3
	Jumlah Satgas Damkar keseluruhan	-	-	-	-	28	27	39
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)	85	85	85	85	14,29	14,81	7,69
4	*Jumlah WMK yang memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai (3000-5000 L)*	-	-	1	1	2	2	2
	Jumlah WMK dalam lingkungan/kawasan berpotensi kebakaran	-	-	1	1	2	2	2
	Jumlah Mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	90	90	90	90	100	100	100

Sumber data: Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah*

Kinerja pelayanan sub urusan kebakaran Kabupaten Kulon Progo selama periode 2023–2025 menunjukkan capaian yang beragam pada masing-masing indikator. Pada indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran, capaian selama tiga tahun terakhir tercatat sebesar 34,12 persen pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelayanan belum mengalami peningkatan selama periode tersebut dan masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen, sehingga masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam jangkauan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Sementara itu, indikator tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian 100 persen secara konsisten pada tahun 2023–2025, sehingga telah memenuhi dan melampaui target yang tercantum dalam dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kecepatan respons terhadap kejadian kebakaran, pelayanan telah berjalan secara optimal.

Berbeda dengan capaian waktu tanggap, indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi menunjukkan kecenderungan menurun. Capaian tercatat sebesar 14,29 persen pada tahun 2023, menurun menjadi 14,81 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 7,69 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut masih sangat jauh di bawah target nasional sebesar 85 persen. Terdapat penurunan Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dikarenakan terdapat anggota Satgas Damkar bersertifikat yang meninggal dunia,

sementara jumlah Satgas Damkar keseluruhan mengalami peningkatan. Di sisi lain, indikator ketersediaan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran laik pakai pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menunjukkan capaian 100 persen secara konsisten selama tahun 2023–2025, yang berarti aspek ketersediaan sarana kendaraan pemadam kebakaran telah memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.5.7 Sosial

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025 selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.229

Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social diluar panti	100	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah***.**

Tabel 2.230

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	5.347	100	100
2.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	1.202	100	100
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	3.233	100	100
4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.	44	100	100
5.	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.	267	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Tabel 2.231

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	467	100	100
2.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	440	100	100
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	1.000	100	100
4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.	40	100	100
5.	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.	160	100	100

Sumber data : Laporan Penerapan SPM Kab. Kulon Progo, 2024-2026 *diolah.*

Capaian SPM bidang sosial selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dengan seluruh indikator mencapai realisasi 100 persen setiap tahun. Jenis pelayanan yang diberikan mencakup rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana.

Meskipun persentase capaian tetap 100 persen, jumlah sasaran mengalami perubahan antar-tahun. Pada tahun 2024, misalnya, sasaran penyandang disabilitas tercatat 5.347 orang, anak terlantar 1.202 orang, lanjut usia terlantar 3.233 orang, gelandangan dan pengemis 44 orang, serta korban bencana 267 orang. Pada tahun 2025 jumlah sasaran masing-masing tercatat 467, 440, 1.000, 40, dan 160 orang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika jumlah sasaran pelayanan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan target dan perencanaan intervensi sosial. Secara keseluruhan, capaian 100 persen selama tiga tahun menunjukkan bahwa pemenuhan SPM bidang sosial telah memenuhi target secara konsisten.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2025

Angka-angka realisasi masing-masing indikator tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.232

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 RPJMD RKPD-P	Realisasi 2025 RPJMD RKPD-P	Persentase RPJMD RKPD-P	Predikat Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,00-76,23	76,97	100,97	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS DIY, Berita Resmi Statistik No.70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025. Realisasi 2025.
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,50-79,75	75,71	100	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS DIY, Berita Resmi Statistik No.70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025. Realisasi 2025.
		Meningkatnya KUalitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63-15,72	14,55	99,45	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS DIY, Berita Resmi Statistik No.70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025. Realisasi 2025.
2	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo		Tingkat Kemiskinan	%	14,12-15,12	14,53	100	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS Kulon Progo, Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025, 27 November 2025. Katalog : 3205020.3401 Realisasi 2025.
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	10732,40-11732,40 11.232	11.499	100 102,38	Sangat Tinggi Sangat Tinggi	Sumber data : BPS DIY, Berita Resmi Statistik No.70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025. Realisasi 2025.
3	Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	64,00-66,00 66,24-67,50	63,31	98,92 95,58	Sangat Tinggi Sangat Tinggi	Sumber data : Bapperida, Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, Juni 2025 Realisasi 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 RPJMD RKPD-P	Realisasi 2025 RPJMD RKPD-P	Persentase RPJMD RKPD-P	Predikat Kinerja	Keterangan
		Meningkatnya Peran Keberagaman dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	60,00-61,00 66,25-67,50	58,91	98,18 88,92	Sangat Tinggi Tinggi	Sumber data : Bapperida, Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, Juni 2025 Realisasi 2024
4	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78-5,38	4,36	91,21	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS Kulon Progo: Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2026. Katalog :1102001.3401, 27 Februari 2026 Realisasi 2025
		Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	% PDRB	41,02-42,22	40,63	99,05	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2026, 27 Februari 2026 Katalog : 1102001.3401 Diolah Realisasi 2025
			PDRB per Kapita	Ribu Rupiah	40.043-40.272	40.069,34	100,07	Sangat tinggi	Sumber data : BPS DIY Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2026, 27 Februari 2026 Katalog : 1102001.34 Realisasi 2025
			Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB)	Miliar Rupiah	684,46-1.228,98	728,16	106,38	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS Kulon Progo: Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2026. Katalog :1102001.3401, 27 Februari 2026 Realisasi 2025
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	1.892,11-1.984,03	1.852,33	97,90	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS Kulon Progo: Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2026. Katalog :1102001.3401, 27 Februari 2026 Realisasi 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 RPJMD RKPD-P	Realisasi 2025 RPJMD RKPD-P	Persentase RPJMD RKPD-P	Predikat Kinerja	Keterangan
5	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah		Rasio Gini	Nilai	0,372-0,402	0,351	112,69	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS DIY, Tabel Dinamis Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota Realisasi 2025
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,95-2,55	2,14	100	Sangat Tinggi	Sumber data : BPS Kulon Progo, Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo 2025, 12 Desember 2025. Katalog : 2301033.3401 Realisasi 2025.
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,50	85,71	97,95	Sangat Tinggi	Sumber data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/255/RB.06/2026, 10 April 2026, Realisasi 2025.
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	4,11-4,61	4,19	100	Sangat Tinggi	Sumber data : Dinas Kominfo, Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Realisasi 2025
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A(84,2)	A(83,87)	99,61	Sangat Tinggi	Sumber data : KemenPanRB Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor B/629/AA.05/2025) Realisasi 2025
			Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	Sumber data : BPK Opini atas Laporan Keuangan 2024
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,85 86,847	86,856	100,01 100,01	Sangat Tinggi Sangat Tinggi	Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kulon Progo Realisasi 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 RPJMD RKPD-P	Realisasi 2025 RPJMD RKPD-P	Persentase RPJMD RKPD-P	Predikat Kinerja	Keterangan
			Indeks Maturitas SPIP	NIlai	3,22 3,221	N/A	N/A N/A	N/A N/A	Sumber data : BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyellenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 (Kabupakten Kulon Progo tidak dilakukan evaluasi)
7	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis		Crime Rate	Kejahatan per 100.000 penduduk	62,00	67,04	97,81	Sangat Tinggi	Sumber data :POLRES Kulon Progo diolah Realisasi 2025
		Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Nilai	7,38	6,99	94,72	Sangat Tinggi	Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) Realisasi 2025
			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Sumber data : SATPOLPP Kabupaten Kulon Progo, Realisasi 2025
8	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,70	88,70	100	Sangat Tinggi	Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Realisasi 2025
		Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,90	89,90	100	Sangat Tinggi	Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Realisasi 2025
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Angka	49,28	49,54	100,53	Sangat Tinggi	Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan kawasan Permukiman Realisasi 2025
			Tingkat Pelayanan Jalan (level of service/LOS)	Kategori	A/Arus Bebas (0-0,2)	A (0,09)	100	Sangat Tinggi	Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Realisasi 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 RPJMD RKPD-P	Realisasi 2025 RPJMD RKPD-P	Persentase RPJMD RKPD-P	Predikat Kinerja	Keterangan
9	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana		Indeks Resiko Bencana	Nilai	136,71-141,71	107,52	124,13	Sangat Tinggi	Sumber data : BNPB Nomor B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Hal:Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di DIY Realisasi 2025
		Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,75	75,46	108,19	Sangat Tinggi	Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Realisasi 2025
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,65	0,67	103,08	Sangat Tinggi	Sumber data : Sumber data : BNPB Nomor B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Hal:Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di DIY Realisasi 2025

2.2.1 Capaian Kinerja Tujuan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Atau dengan kata lain, IPM merupakan indeks komposit hasil turunan indikator-indikator sosial berupa Angka Harapan Hidup saat lahir, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta indikator ekonomi berupa Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mencapai 76,97 atau 100,97 persen dari target 76,00-76,23 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Usia Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah.

Dibanding dengan tahun 2024, IPM Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,79 poin atau tumbuh 1,04 persen yaitu dari 76,18 pada tahun 2024 menjadi 76,97 pada tahun 2025. Pencapaian target IPM ini dikarenakan semua indikator-indikator penyusun IPM mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi ada pada Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan yaitu mencapai 4,63 persen, kemudian disusul Rata-Rata Lama sekolah yang mengalami kenaikan 1,41 persen. Kemudian Harapan Lama Sekolah mengalami pertumbuhan/ kenaikan sebesar 0,41 persen dan terakhir, Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen dibandingkan capaian tahun 2024.

Tabel 2.233

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	76,18	76,97	0,79 (1,04%)

Terhadap Capaian Nasional: Kabupaten Kulon Progo secara konsisten mampu menjaga posisi di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2025, terdapat selisih positif sebesar 1,07 poin antara IPM Kulon Progo (76,97) dengan IPM Nasional (75,90). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kulon Progo masih lebih baik dibandingkan rata-rata di tingkat pusat.

Terhadap Capaian Provinsi (DIY): Meskipun masih berada di bawah angka IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (82,48), Kulon Progo terus berupaya memperkecil kesenjangan (gap) pertumbuhan. Perlu dicatat bahwa angka IPM DIY merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

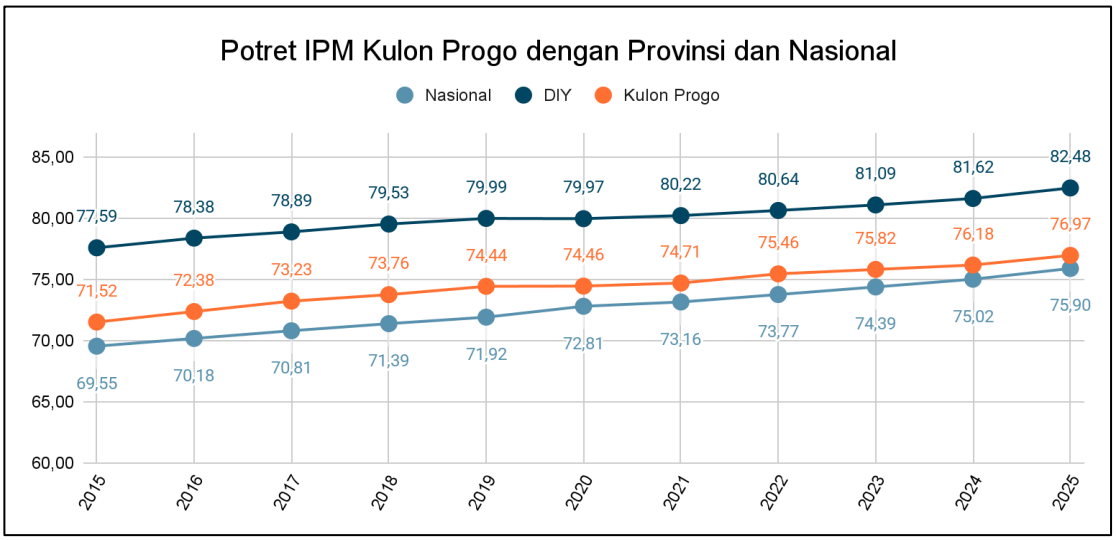

Gambar 2.45

Potret IPM Kulon progo dengan Provinsi dan Nasional

Dalam periode 2015–2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari angka 71,52 hingga mencapai 76,97 pada tahun 2025. Secara komparatif di tingkat Provinsi DIY, performa Kulon Progo terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan tetap mengungguli Kabupaten Gunungkidul yang berada pada angka 73,13, meskipun secara peringkat masih berada di bawah Kabupaten Bantul (83,03), Kabupaten Sleman (86,35), dan Kota Yogyakarta (89,53). Konsistensi kenaikan ini merefleksikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan dasar dan meningkatkan standar hidup masyarakat, sekaligus menjadi modal penting untuk terus memperkecil kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah di DIY.

Selama periode 10 tahun terakhir, Kulon Progo mencatatkan kenaikan sebesar 5,45 poin. Angka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi kedua di DIY setelah Kabupaten Gunungkidul (+5,72 poin). Meskipun secara peringkat berada di posisi keempat di DIY, laju pertumbuhan Kulon Progo lebih progresif dibandingkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan kualitas pembangunan manusia.

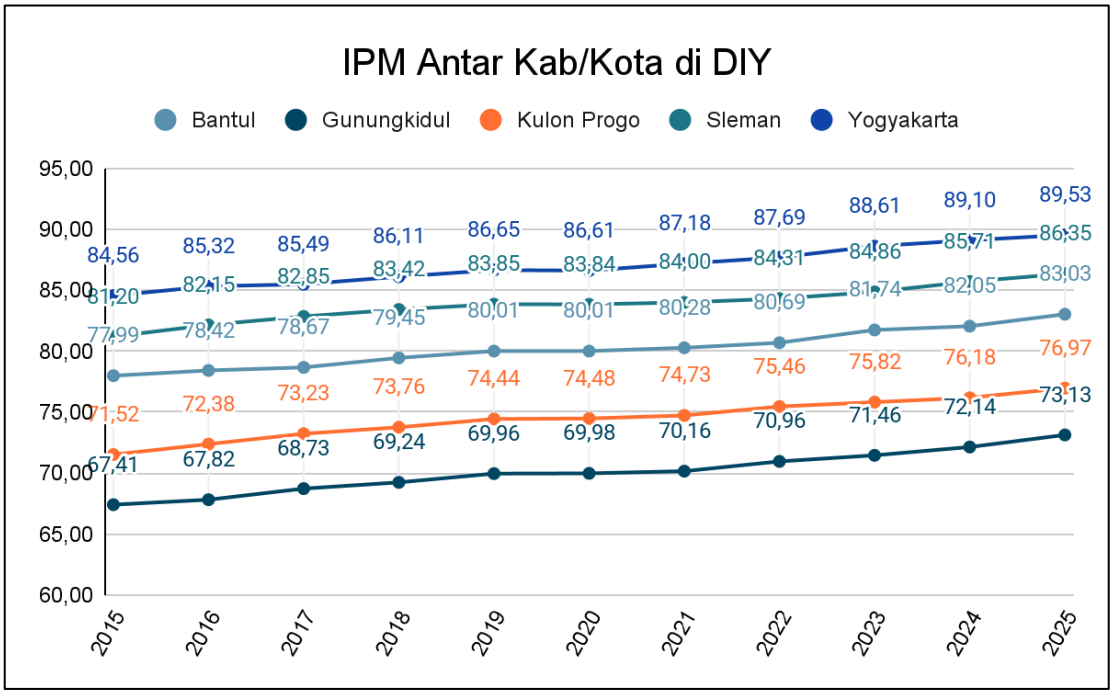

Gambar 2.46

IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY

Peningkatan IPM Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses layanan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Faktor penghambat utama meliputi masih adanya kemiskinan, ketimpangan kualitas pendidikan dan kesehatan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya transformasi ekonomi. Di sisi lain, kendala berupa keterbatasan fiskal, koordinasi lintas sektor, kesenjangan wilayah, dan kerentanan terhadap bencana memperlambat peningkatan IPM. Oleh karena itu, strategi peningkatan IPM perlu difokuskan pada pembangunan yang inklusif, penguatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja produktif, pemerataan layanan dasar, dan percepatan transformasi ekonomi agar peningkatan IPM berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen dalam memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan akses pendidikan, pemerintah daerah secara berkelanjutan mengimplementasikan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, untuk memastikan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu, program KuliahKe (beasiswa kuliah) telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang pada tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,41% dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai angka di atas 98,92%, memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar tanpa kendala finansial. Upaya ini diperkuat melalui inovasi layanan spesifik untuk menekan angka kematian ibu dan anak melalui program BumilKu (Bumil Kulon Progo), serta program MatahatiKu yang berfokus pada deteksi dini dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Inovasi-inovasi ini merupakan langkah konkret dalam menjaga kualitas hidup masyarakat dan mendukung peningkatan komponen Usia Harapan Hidup (UHH) yang tumbuh sebesar 0,29% pada tahun 2025.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan, sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Angka Kemiskinan (P_0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mencapai 14,53 persen atau mencapai 100 persen dari target 14,12-15,12 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan, dimana pada tahun 2025 mencapai 100 persen dari target 10.732,40-11.732,40 ribu rupiah.

Dibanding tahun 2024, Tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin atau turun 6,98 persen yaitu dari 15,62 persen pada tahun 2024 menjadi 14,53 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.234

Angka Kemiskinan (P_o) Kabupaten Kulon Progo (%), Tahun 2024-2025 (persen)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	15,62	14,53	-1,09 (-6,98%)

Sumber : Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025, BPS Kulon Progo, diolah

Jika ditarik dari kondisi tahun 2010 yang mencapai 23,15%, Kabupaten Kulon Progo secara konsisten mampu menekan angka kemiskinan hingga mencapai titik terendah dalam 15 tahun terakhir. Meskipun capaian ini masih berada di atas rata-rata Provinsi DIY (10,23%) dan Nasional (8,47%) pada tahun 2025, tren penurunan yang persisten ini menunjukkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial dan intervensi ekonomi daerah yang terus bergerak mendekati rata-rata provinsi maupun nasional.

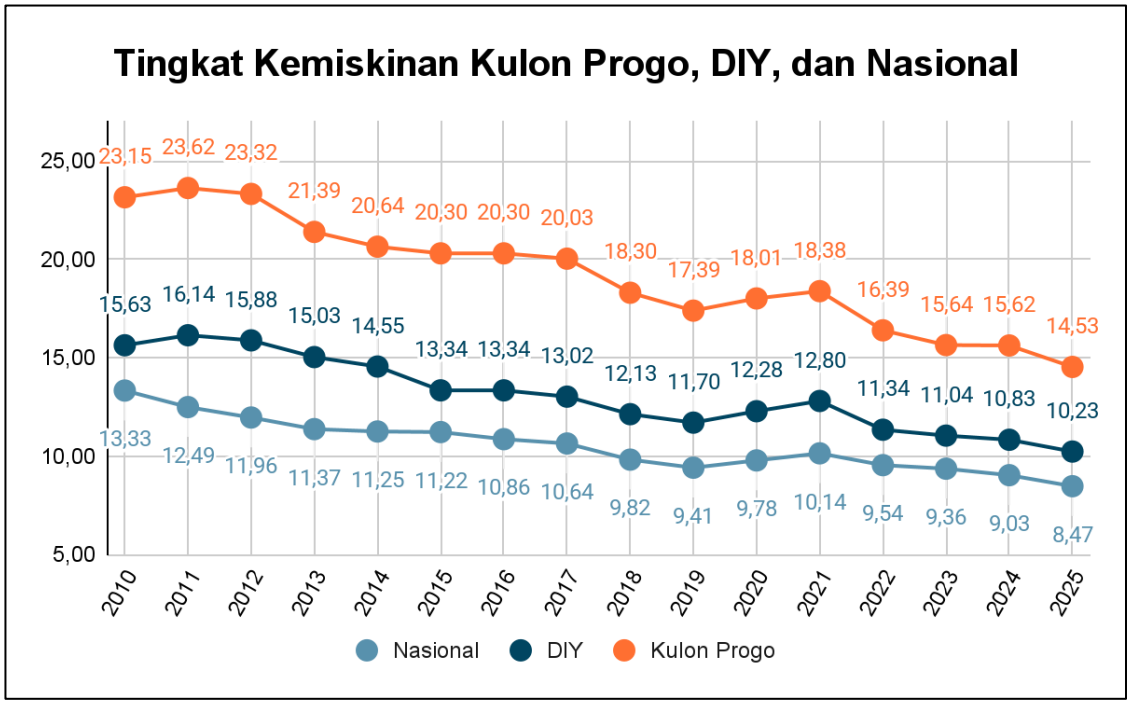

Gambar 2.47

Tingkat Kemiskinan Kulon progo, DIY, dan Nasional

Selain itu, apabila melihat Kabupaten/Kota lain di DIY Kabupaten Kulon Progo berhasil menunjukkan performa positif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025 dengan menekan angka kemiskinan menjadi 14,53%, turun signifikan sebesar 1,09% dari tahun 2024. Berdasarkan analisis perbandingan antar wilayah di DIY, meskipun Kulon Progo secara persentase masih menempati posisi tertinggi, tren penurunan yang dihasilkan bersifat konsisten dan berhasil memperkecil jarak dengan Kabupaten Gunungkidul yang berada pada angka 14,15%.

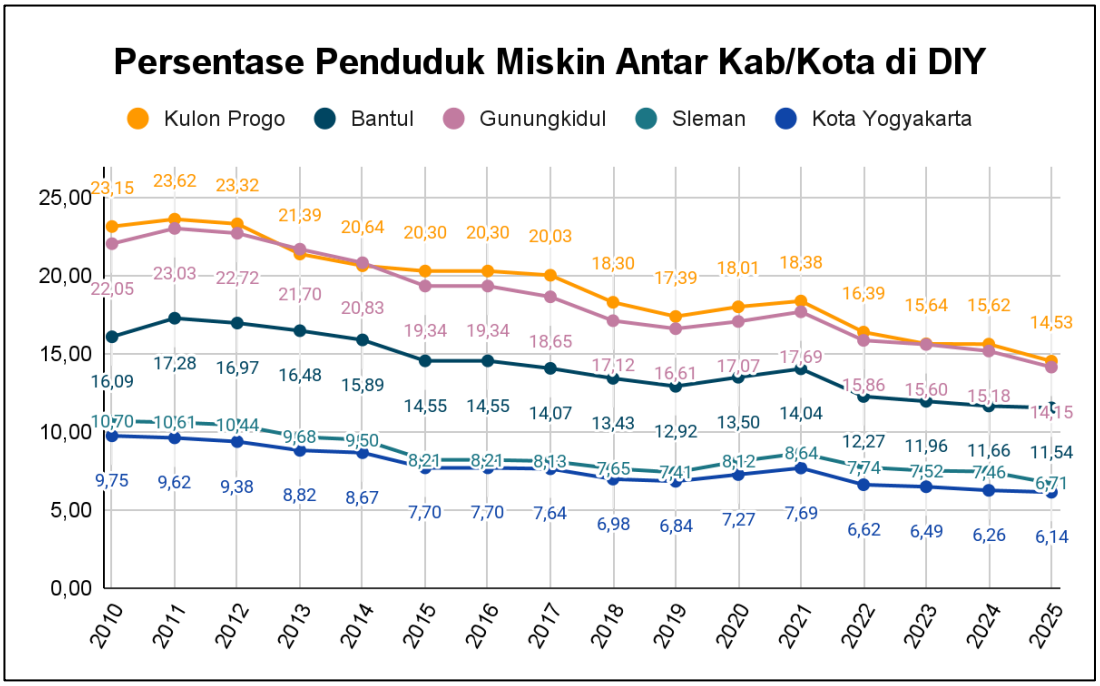

Gambar 2.48

Persentase Penduduk Miskin Antar Kab/Kota di DIY

Secara kuantitas (jumlah absolut), efektivitas kebijakan daerah terlihat jelas di mana Kulon Progo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah kedua di DIY sebanyak 67,25 ribu jiwa, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan Kabupaten Bantul (127,25 ribu jiwa), Kabupaten Gunungkidul (113,48 ribu jiwa), dan Kabupaten Sleman (89,28 ribu jiwa). Penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4,23 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir (dari 71,48 ribu pada 2024 menjadi 67,25 ribu pada 2025) menegaskan bahwa intervensi pembangunan ekonomi di Kulon Progo memberikan dampak nyata secara struktural.

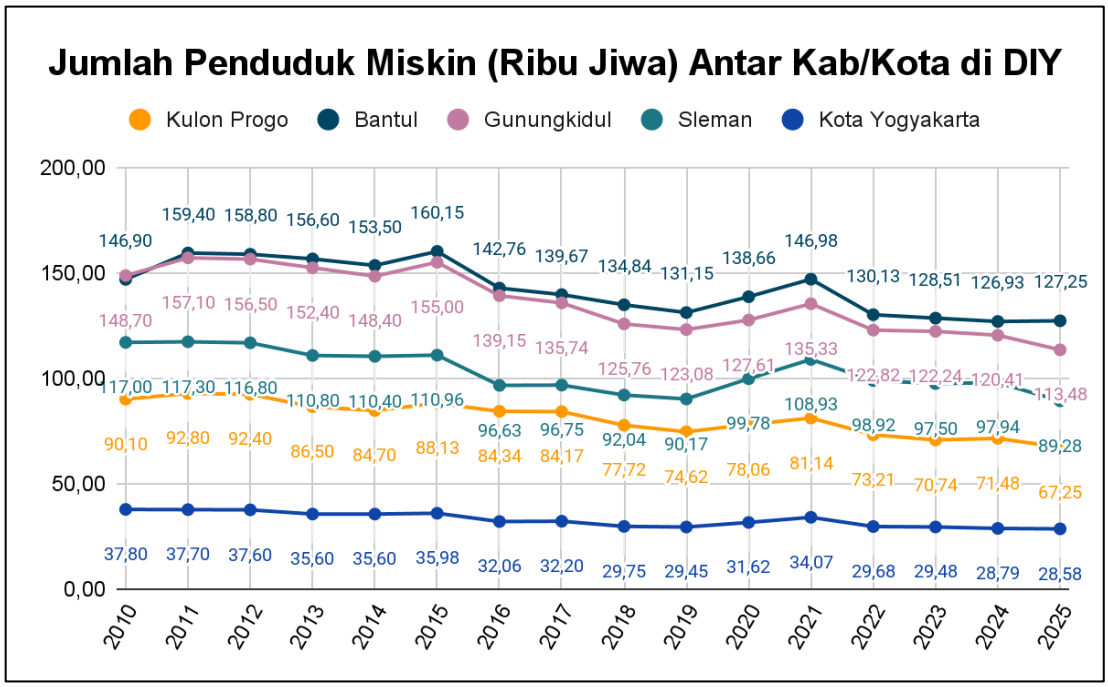

Gambar 2.49

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Antar Kab/Kota di DIY

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, multidimensional, dan saling berkaitan. Meskipun tren angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, laju penurunannya belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik kemiskinan yang tersisa didominasi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga memerlukan intervensi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat utama penurunan angka kemiskinan antara lain masih terbatasnya kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan, rendahnya produktivitas sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama sebagian masyarakat, tingginya proporsi pekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap permodalan, pengembangan usaha, dan perluasan pasar. Di samping itu, dinamika inflasi, kerentanan terhadap guncangan ekonomi, perubahan iklim, serta belum optimalnya integrasi data dan sinergi pelaksanaan program antar pemangku kepentingan turut mempengaruhi efektivitas upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, penguatan daya saing UMKM, hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan investasi daerah agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, penyempurnaan basis data kemiskinan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Penurunan kemiskinan sebesar 1,09% poin ini mengindikasikan efektivitas intervensi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Namun, mengingat perkembangan Kulon Progo dan pergeseran fungsi lahan, penurunan ini masih menghadapi risiko kerentanan ekonomi bagi rumah tangga petani terdampak. Hal tersebut memerlukan transisi kebijakan dari perlindungan sosial murni menuju pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan profil tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo.

2.2.1.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja kebudayaan, diharapkan dapat memberikan Gambaran Pembangunan kebudayaan secara lebih holistic dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni :

1) Dimensi ekonomi budaya;
2) Dimensi Pendidikan;
3) Dimensi ketahanan sosial budaya;
4) Dimensi warisan budaya;
5) Dimensi ekspresi budaya;
6) Dimensi budaya literasi; dan
7) Dimensi kesetaraan gender.

Cara perhitungan indeks Pembangunan Kebudayaan yaitu dengan rumus IPK =j=7Wj x indeks Dj; dimana :

IPK = indeks Pembangunan Kebudayaan

Wj = Bobot dimensi ke -j; Dj = Dimensi ke-j.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 realisasi masih menggunakan angka realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 63,31 atau mencapai 98,92 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 64,00-66,00 atau sebesar 95,58 persen dari target yang ditetapkan dalam RKPD-P sebesar 66,24-67,50 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Rata-rata indeks dimensi ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya pada indeks Pembangunan kebudayaan.

Perbandingan IPK tahun 2024 dengan 2025 belum bisa dibandingkan, karena realisasi 2025 masih menggunakan angka capaian 2024.

Tabel 2.235

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	63,31	63,31*	-

*: angka realisasi 2024

Beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan IPK antara lain:

1. Penguatan tata kelola kebudayaan berbasis data dan digitalisasi.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya
3. Regenerasi pelaku seni melalui pendidikan dan pembinaan generasi muda.
4. Integrasi Pembangunan kebudayaan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Pengembangan desa budaya sebagai pusat pelestarian dan pemberdayaan masyarakat.
6. Digitalisasi arsip, warisan budaya, dan promosi budaya lokal.
7. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, dunia usaha, dan media.
8. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan serta kelembagaan pelaku budaya.
9. Penguatan literasi budaya di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
10. Optimalisasi pemanfaatan budaya sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Secara umum, tantangan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo tidak terletak pada kurangnya potensi budaya, melainkan pada aspek pengelolaan, pendanaan, regenerasi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan memperkuat tata kelola berbasis data, meningkatkan investasi pada sektor kebudayaan, mengintegrasikan budaya dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Kulon Progo memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian IPK sekaligus memperkuat identitas budaya sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat ekosistem kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara berkelanjutan mengintervensi melalui Program Keistimewaan. Pemerintah daerah menjalankan program pembinaan seni dan budaya yang terstruktur untuk menjamin keberlangsungan regenerasi pelaku seni, khususnya dalam menanamkan nilai kearifan lokal kepada generasi muda melalui jalur pendidikan formal dan komunitas. Intervensi tidak berhenti pada aspek pelestarian, melainkan diarahkan pada upaya menjadikan sektor kebudayaan sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi pelaku seni dan budaya. Melalui optimalisasi Dana Keistimewaan, pemerintah memfasilitasi ruang kreasi, apresiasi, serta akses pasar, sehingga kegiatan seni budaya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Upaya penguatan IPK dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan kebudayaan ke dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan desa budaya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Langkah ini sekaligus merupakan bentuk digitalisasi pelestarian arsip dan promosi budaya lokal agar lebih dikenal secara luas.

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan laju pertumbuhan PDRB. PDRB Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) pada tahun 2025 menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mencapai 4,36 persen atau 91,21 persen dari target yang sebesar 4,78-5,38 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo ini didukung oleh indikator sasaran daerah antara lain Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), PDRB per Kapita, Nilai PDRB sektor Akomodasi Makan Minum, dan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan.

Dibanding tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2025 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,41 poin atau mengalami penurunan 8,54 persen yaitu dari 4,77 persen pada tahun 2024 menjadi 4,36 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.236

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo (%) Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	4,77	4,36	-0,41 (-8,54%)

Jika dilihat per sektor / lapangan usahanya, pada tahun 2025 semua sektor tetap mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi (tumbuh negative). Kemudian dari semua sektor yang mengalami pertumbuhan positif, ada sektor-sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2024, yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Kostruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 2.237

Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo menurut Kategori 2024-2025, Perubahan, serta Andil Pertumbuhan Tahun 2025 (persen)

No.	Lapangan Usaha	2024*	2025**	Perubahan 2024-2025	Andil Pertumbuhan 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,84	5,87	5,03	0,73
2	Pertambangan dan Penggalian	0,69	7,22	6,53	0,09
3	Industri Pengolahan	4,33	5,05	0,72	0,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,41	3,40	-7,01	0,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,76	-1,33	-6,09	0,00
6	Konstruksi	6,68	0,51	-6,17	0,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	5,59	0,37	0,69
8	Transportasi dan Pergudangan	5,73	2,27	-3,46	0,28

No.	Lapangan Usaha	2024*	2025**	Perubahan 2024-2025	Andil Pertumbuhan 2025
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,72	7,32	0,60	0,28
10	Informasi dan Komunikasi	4,11	4,93	0,82	0,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,28	1,20	-6,08	0,03
12	*Real Estate*	4,06	4,18	0,12	0,13
13	Jasa Perusahaan	5,55	4,87	-0,68	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,33	6,24	-0,09	0,39
15	Jasa Pendidikan	4,81	6,04	1,23	0,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,92	7,23	1,31	0,12
17	Jasa lainnya	3,21	7,20	3,99	0,27
	PDRB	**4,77**	**4,36**	**-0,41**	**4,36**

Pada tahun 2025 ada beberapa sektor yang mengalami perubahan pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun 2024. Sektor yang cukup signifikan mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2024 diantaranya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, yang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,69 persen kemudian pada tahun 2025 mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu menjadi sebesar 7,22 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2024 pertumbuhannya sebesar 0,84 persen sedangkan pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,87 persen. Disusul oleh sektor Jasa Lainnya, pada tahun 2024 sektor jasa lainnya tumbuh 3,21 persen dan pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 7,20 persen.

Peran masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Masing-masing lapangan usaha/sektor memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kulon Progo pada tahun 2025. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil pertumbuhan terbesar pada tahun 2025 yaitu sebesar 0,73 persen. Kemudian disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,69 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 0,53 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo memiliki prospek yang baik karena didukung keberadaan infrastruktur strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta, jalan nasional, dan potensi sektor pariwisata serta pertanian. Namun, optimalisasi laju pertumbuhan PDRB masih menghadapi tantangan berupa struktur ekonomi yang didominasi sektor primer, produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, hilirisasi industri yang terbatas, kapasitas UMKM yang masih rendah, serta belum maksimalnya dampak investasi terhadap perekonomian lokal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan investasi produktif, pengembangan industri pengolahan, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

2.2.1.5 Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio Gini bernilai menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Angka Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2026 mencapai 0,351 atau mencapai 105,65 persen dari target 0,372-0,402 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2025 mencapai 100 persen dari target 1,95-2,55.

Dibanding tahun 2024, Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 0,022 poin atau turun 5,90 persen yaitu dari 0,373 pada tahun 2024 menjadi 0,351 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.238

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	0,373	0,351	0,022

Penurunan Gini Rasio di Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Permasalahan utama bukan hanya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, strategi penurunan Gini Rasio perlu diarahkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan UMKM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan investasi antar wilayah, perluasan akses terhadap aset produktif dan pembiayaan, serta sinergi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

2.2.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran “terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” serta “terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penjumlahan Nilai RB General ditambah Nilai RB Tematik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mendasarkan pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/255/RB.06/2026 mencapai

sebesar 85,71 atau mencapai 97,95 persen dari target 87,50 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) yang pada tahun 2025 tercapai 100 persen; Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) ; Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK); Indeks Kepuasan Masyarakat; dan Indeks Maturitas SPIP.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi adalah :

a. Masih terdapat indikator yang belum memenuhi kategori “Baik”, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Maturitas SPIP, serta target tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)
b. Terdapat indikator yang mengalami penurunan, yaitu Pembangunan Zona Integritas dan Survei Penilaian Integritas, yang menunjukkan belum optimalnya strategi penguatan integritas.
c. Beberapa indikator stagnan tanpa peningkatan, seperti Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Pembangunan Statistik, dan Indeks Sistem Merit.
d. Sejumlah indikator hanya mengalami kenaikan yang sangat minimal dan belum menunjukkan lompatan kategori, seperti Indeks SPBE, Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.239

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	87,04	85,71	-1,33

Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo dari 87,04 pada tahun 2024 menjadi 85,71 pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa tantangan utama tidak lagi berada pada pemenuhan aspek administratif, melainkan pada kemampuan mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi Tematik, ketidakselarasan perencanaan dan penganggaran, belum meratanya kualitas manajemen kinerja ASN, transformasi digital yang belum terintegrasi, variasi kualitas pelayanan publik, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta semakin ketatnya standar evaluasi nasional menjadi penyebab utama belum mampu dipertahankannya capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025. Oleh karena itu, peningkatan indeks pada tahun-tahun berikutnya memerlukan penguatan tata kelola berbasis hasil, percepatan transformasi digital, peningkatan kapasitas ASN, penguatan budaya kerja adaptif, serta kolaborasi lintas perangkat daerah yang lebih efektif sehingga Reformasi Birokrasi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.2.1.7 Crime Rate

Crime Rate atau Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Adalah angka yang menggambarkan risiko terjadinya sejumlah tindak kejahatan pada setiap 100.000 orang penduduk.

Rumus untuk menghitung Crime Rate adalah Jumlah peristiwa kejahatan tahun t dibagi jumlah penduduk dikali 100.000.

Angka Crime Rate Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah sebesar 67,04 atau mencapai 91,87 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu 62,00 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Angka capaian Crime Rate sebesar 67,04 artinya bahwa telah terjadi kejadian kejahatan sejumlah 67 pada setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Kulon Progo. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang tercapai 94,72 persen dan Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA yang tercapai 100 persen.

Dibanding tahun 2024, Crime Rate Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 4,34 poin atau naik 6,92 persen yaitu dari 62,70 pada tahun 2024 menjadi 67,04 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.240

Crime Rate Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	62,70	67,04	4,34 (6,92%)

Upaya penurunan angka crime rate dihadapkan pada berbagai faktor penghambat dan tantangan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan penurunan tingkat kriminalitas apabila tidak diantisipasi secara komprehensif. Berbagai faktor, seperti meningkatnya mobilitas penduduk akibat perkembangan kawasan strategis, dinamika sosial ekonomi masyarakat, perubahan pola dan modus kejahatan berbasis teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kalurahan, serta unsur masyarakat masih menjadi kebutuhan untuk mewujudkan sistem pencegahan kriminalitas yang lebih efektif.

Oleh karena itu, keberhasilan dalam menurunkan angka **crime rate** tidak hanya bergantung pada upaya penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemanfaatan teknologi keamanan, serta peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung terciptanya iklim pembangunan, investasi, dan pelayanan publik yang aman, kondusif, serta berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif. Salah satu instrumen utama yang diimplementasikan adalah pembentukan dan penguatan kelompok Jaga Warga di tingkat Padukuhan. Kelompok ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, mediasi konflik sosial, serta penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri dan sistematis.

2.2.1.8 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang yang berjalan terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan.

Perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang adalah rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian struktur ruang ditambah persentase kesesuaian polar uang.

Capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2025 adalah sebesar 88,70 atau mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 88,70 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah Persentase Kesesuaian Pola Ruang; Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan Tingkat Pelayanan Jalan (level of service/LOS)

Dibanding tahun 2024, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,09 poin atau naik 0,10 persen yaitu dari 88,61 persen pada tahun 2024 menjadi 88,70 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.241

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo (%), Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	88,61	88,70	0,09 (0,10%)

Pencapaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan, ketersediaan data spasial, dinamika pembangunan wilayah, serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tata ruang. Percepatan pertumbuhan investasi dan pembangunan kawasan strategis telah meningkatkan tekanan terhadap pemanfaatan ruang sehingga memerlukan sistem pengendalian yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, peningkatan capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang memerlukan penguatan implementasi RDTR, optimalisasi sistem informasi geospasial yang terintegrasi, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan edukasi dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penataan ruang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo dapat berlangsung secara lebih tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan wilayah yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah proaktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional (MRPN) dan mempertahankan LP2B, Pemkab Kulon Progo menjalankan program **pencetakan sawah baru** sebagai upaya substitusi (pengganti) terhadap lahan pertanian yang terdampak alih fungsi. Kebijakan ini memastikan bahwa luas lahan produktif tetap terjaga meskipun terjadi transformasi spasial di wilayah aerotropolis

2.2.1.9 Indeks Risiko Bencana (IRB)

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan Tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Capaian Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 adalah sebesar 107,52 atau mencapai 124,13 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 136,71-141,71 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Mengingat bahwa semakin kecil nilai IRB menunjukkan semakin rendah tingkat risiko bencana suatu daerah, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Kulon Progo berada lebih baik dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan pemerintah daerah telah memberikan hasil yang positif.

Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tercapai 108,19 persen dan Indeks Ketahanan Daerah yang tercapai 103,08 persen.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, pada tahun 2025 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 45,13 poin atau 29,56 persen.

Tabel 2.242

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	152,65	107,52	-45,13(-29,56)

Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan yang kompleks karena dipengaruhi oleh tingginya ancaman alam, kerentanan sosial ekonomi, serta keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Faktor geografis yang didominasi kawasan perbukitan dan pesisir menyebabkan ancaman bencana tidak dapat dihilangkan, melainkan harus dikelola melalui pengurangan risiko secara sistematis. Di sisi lain, perubahan iklim, alih fungsi lahan, keterbatasan pendanaan, belum meratanya kapasitas masyarakat, serta belum optimalnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan menjadi faktor utama yang menghambat penurunan IRB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan infrastruktur mitigasi, pemanfaatan tata ruang berbasis risiko, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kualitas data kebencanaan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat risiko bencana secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana di masa mendatang.

Dalam upaya mencapai kemandirian mitigasi dan penanganan bencana lokal, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengedepankan strategi berbasis komunitas melalui pembinaan Desa Tangguh Bencana (Destana). Pemerintah Daerah membekali masyarakat dengan kemampuan deteksi dini, pemetaan risiko mandiri, dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana lokal. Hal ini berhasil meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mencapai 0,67 pada tahun 2025. Program Destana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan infrastruktur mitigasi sederhana dan pemanfaatan tata ruang berbasis risiko sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah.

2.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka usia harapan hidup dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 sebesar 75,71 atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan yaitu 75,50-79,75 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding dengan tahun 2024, usia harapan hidup Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,22 tahun atau naik 0,29 persen yaitu dari 75,49 pada tahun 2024 menjadi 75,71 pada tahun 2025.

Tabel 2.243

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (tahun)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	75,49	75,71	0,22 (0,29%)

2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang Pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 sebesar 14,55 tahun atau mencapai 99,45 persen dari target yang ditetapkan yaitu 14,63-15,72 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding dengan tahun 2024, harapan lama sekolah Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,06 tahun atau naik 0,41 persen yaitu dari 14,49 pada tahun 2024 menjadi 14,55 pada tahun 2025.

Tabel 2.244

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (tahun)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	14,49	14,55	0,06 (0,41%)

2.2.2.3 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebesar 11.499 ribu rupiah/orang/tahun atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 10.732,40-11.732,40 ribu rupiah/orang/tahun atau mencapai 102,38 persen dari target yang ditetapkan pada RKPD Perubahan sebesar 11.232 ribu rupiah dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding dengan tahun 2024, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 509 ribu rupiah atau naik 4,63 persen yaitu dari 10.990 ribu rupiah/orang/tahun menjadi 11.499 ribu rupiah/orang/tahun.

Tabel 2.245

Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025 (ribu rupiah/orang/tahun)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	10.990	11.499	509 (4,63%)

2.2.2.4 Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan

Penjelasan terkait keempat dimensi adalah sebagai berikut :

Dimensi Ekonomi Budaya menunjukkan bagaimana sektor budaya berkontribusi pada ekonomi suatu negara atau wilayah;

Dimensi Ketahanan Sosial menyoroti kemampuan suatu kebudayaan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan dengan dukungan kondisi sosial Masyarakat;

Dimensi Ekspresi Budaya didefinisikan sebagai sarana untuk melestarikan keberagaman budaya global seraya mendorong kreativitas Masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka;

Dimensi Warisan Budaya merujuk pada Upaya pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan benda dan praktik budaya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu Masyarakat.

Capaian Rata-rata indeks dimensi ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya pada indeks Pembangunan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 realisasi masih menggunakan angka realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 58,91 atau mencapai 98,18 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 60,00-61,00 dengan predikat kinerja sangat tinggi atau mencapai 88,92 persen dari target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan sebesar 66,25-67,50 dengan predikat kinerja tinggi.

Perbandingan capaian tahun 2024 dengan 2025 tidak bisa dibandingkan karena angka tahun 2025 masih menggunakan angka realisasi 2024.

Tabel 2.246

Rata-rata indeks dimensi ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	58,91	58,91*	-

*: angka realisasi 2024

2.2.2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara,

serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 mencapai 40,63 persen PDRB atau mencapai 99,05 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu 41,02-42,22 persen PDRB dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding dengan tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,35 persen poin atau turun 3,22 persen yaitu dari 41,98 persen PDRB menjadi 40,63 persen PDRB.

Tabel 2.247

Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025(% PDRB)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	41,98	40,63	-1,35

2.2.2.6 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Capaian PDRB perkapita tahun 2025 sebesar 40.069,34 ribu rupiah atau mencapai 100,07 persen dari target yang ditetapkan sebesar 40.043-40.272 ribu rupiah dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, PDRB per Kapita Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.092,66 ribu rupiah atau 5,51 persen yaitu dari 37.976,68 ribu rupiah pada tahun 2024 menjadi 40.096,34 ribu rupiah pada tahun 2025.

Tabel 2.248

PDRB per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (ribu rupiah)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	37.976,68	40.069,34	2.092,66 (5,51%)

2.2.2.7 Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah jumlah nilai tambah dari aktivitas terkait pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum di Kulon Progo.

Capaian Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum tahun 2025 sebesar 728,16 miliar rupiah atau mencapai 106,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar 684,46-1.228,98 miliar rupiah dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 72,61 miliar rupiah atau 11,08 persen yaitu dari 655,55 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 728,16 miliar rupiah pada tahun 2025.

Tabel 2.249

Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	655,55	728,16	72,61 (11,08%)

2.2.2.8 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, nilai PDRB sektor industri pengolahan adalah jumlah nilai tambah dari aktivitas terkait industri pengolahan di Kulon Progo.

Capaian nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun 2025 yaitu sebesar 1.852,33 miliar rupiah atau mencapai 97,90 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1.892,11-1.984,03 miliar rupiah dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, nilai PDRB sektor industry pengolahan mengalami peningkatan sebesar 143,18 miliar rupiah atau 8,38 persen yaitu dari 1.709,15 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.852,33 miliar rupiah pada tahun 2025.

Tabel 2.250

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kulon Progo Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	1.709,15	1.852,33	143,18 (8,38%)

2.2.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja Adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 2,14 persen atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,95-2,55 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,13 poin atau naik 6,47 persen yaitu dari 2,01 persen pada tahun 2024 menjadi 2,14 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.251

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (%)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	2,01	2,14	0,13 (6,47%)

2.2.2.10 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)

Indeks SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan Tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mendasarkan hasil penilaian evaluasi mandiri mencapai sebesar 4,19 atau mencapai 100 persen dari target 4,11-4,61 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin atau naik 7,16 persen yaitu dari 3,91 pada tahun 2024 menjadi 4,19 pada tahun 2025.

Tabel 2.252

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	3,91	4,19	0,28 (7,16%)

2.2.2.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mendasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 mencapai sebesar A(83,87) atau mencapai 99,61 persen dari target A(84,2) dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Kulon Progo sebesar 83,87 dengan predikat "A" menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Nilai AKIP tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin atau 0,14 persen.

Tabel 2.253

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	A (83,75)	A(83,87)	0,12 (0,14%)

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.254

Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

Komponen	2024	2025	Perubahan
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	26,63	27,00	0,37 (1,39%)

Komponen	2024	2025	Perubahan
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	25,48	25,53	0,05 (0,20%)
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	12,69	12,69	0 (0%)
Nilai Komponen Evaluasi Internal	18,65	18,65	0 (0%)
TOTAL	**83,75**	**83,87**	**0,12 (0,14%)**

Catatan dan Rekomendasi evaluasi AKIP Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

A. Catatan

1) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Pohon Kinerja namun belum sesuai dengan prinsip yang ada pada Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan Pohon Kinerja tersebut sudah dikaitkan terlebih dahulu dengan komponen perencanaan dalam proses perumusannya sehingga belum disusun secara ideal;
2) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun dan menetapkan IKU namun belum disertai dengan definisi operasional dan sumber data untuk mengukur ketercapaian kinerja;
3) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini terlihat dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah belum menginformasikan analisis efisiensi sumber daya dan beberapa Laporan Kinerja PD belum menginformasikan perbandingan capaian nasional dan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja;
4) Evaluasi Internal yang dilakukan oleh APIP belum menggambarkan kondisi sesungguhnya atas kualitas SAKIP di perangkat daerah. Selain itu, belum terlihat bagaimana upaya pengawalan tindak lanjut hasil evaluasi kepada perangkat daerah.

B. Rekomendasi

1) Menyempurnakan kualitas *Critical Success Factor (CSF)* pada pohon kinerja level Pemerintah Daerah agar lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan relevan mendorong tercapainya *ultimate outcome*;
2) Menyusun dokumen manual IKU terbaru level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara lengkap;
3) Melakukan reviu dan perbaikan terhadap laporan kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 menyesuaikan ketentuan penyajian data/informasi sesuai kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014;
4) Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal agar lebih dalam memotret kekurangan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Selain itu, LHE AKIP Internal agar memberikan catatan tidak hanya yang terkait pemenuhan, tetapi juga kualitas dan pemanfaatan sehingga catatan tersebut dapat menjadi dasar perbaikan implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah secara lebih optimal.

2.2.2.12 Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)

Opini BPK atas akuntabilitas pengelola keuangan daerah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Akuntabilitas pengelola keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai WTP atau mencapai 100 persen dari target WTP dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Tabel 2.255

Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	WTP	WTP	-

2.2.2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari survey kepuasan masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 86,856 atau mencapai 100,01 persen dari target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu 86,85 dengan predikat kinerja sangat tinggi atau mencapai 100,01 persen dari target RKPD-P yaitu 86,847 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, indeks kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0,059 poin atau naik/turun 0,07 persen yaitu dari 86,797 pada tahun 2024 menjadi 86,856 pada tahun 2025.

Tabel 2.256

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025.

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	86,797	86,856	0,059 (0,07%)

2.2.2.14 Indeks Maturitas SPIP

Indeks Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indeks maturitas SPIP Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 sehingga capaian menggunakan N/A.

Perbandingan Indeks Maturitas SPIP tahun 2024 dengan tahun 2025 tidak bisa dilakukan karena tahun 2025 data tidak tersedia (tidak dilakukan evaluasi).

Tabel 2.257

Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025.

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	3,195	N/A	-

2.2.2.15 Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dikembangkan sebagai sistem pengukuran yang bertujuan untuk mengukur Tingkat harmoni sosial.

Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 6,99 atau mencapai 94,72 persen dari yang ditetapkan sebesar 7,38 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan 0,33 poin atau turun 4,51 persen yaitu dari 7,32 pada tahun 2024 menjadi 6,99 pada tahun 2025.

Tabel 2.258

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kulon Progo, Tahun 2024-2025.

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	7,32	6,99	-0,33 (-4,51%)

2.2.2.16 Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA

Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda digunakan untuk mengukur penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda. Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 100 atau mencapai 100 persen dari yang ditetapkan sebesar 100 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, Persentase penanganan gangguan TRANTIBUM dan pelanggaran PERDA Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 tetap mencapai 100 persen.

Tabel 2.259

Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (%)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	100	100	0

2.2.2.17 Persentase Kesesuaian Pola Ruang

Persentase kesesuaian pola ruang adalah Tingkat kesesuaian lokasi dan program perwujudan pola ruang (kawasan peruntukan/ zonasi lindung dan budi daya) dalam rencana pembangunan daerah dengan indikasi lokasi dan program perwujudan pola ruang (kawasan peruntukan/zonasi lindung dan budi daya) dalam RTRW.

Persentase kesesuaian pola ruang Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mencapai 89,90 atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 89,90 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, persentase kesesuaian pola ruang Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin atau naik 0,04 persen yaitu dari 89,86 persen pada tahun 2024 menjadi 89,90 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.260

Persentase Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 (%)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	89,86	89,90	0,04 (0,04%)

2.2.2.18 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum digunakan untuk mengukur kondisi infrastruktur pekerjaan umum di suatu wilayah, mencakup berbagai aspek seperti jalan, irigasi, drainase, permukiman, dan sarana prasarana perhubungan.

Indeks infrastruktur pekerjaan umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 49,54 atau mencapai 100,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar 49,28 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, indeks infrastruktur pekerjaan umum Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 1,14 poin atau naik 2,36 persen yaitu dari 48,40 pada tahun 2024 menjadi 49,54 pada tahun 2025.

Tabel 2.261

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	48,40	49,54	1,14 (2,36%)

2.2.2.19 Tingkat Pelayanan Jalan (level of service/LOS)

LOS adalah ukuran kinerja ruas jalan atau simpang yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas, kecepatan, kepadatan, dan hambatan yang terjadi.

Tingkat Pelayanan Jalan (level of service/LOS) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai A(0,09) atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar A/Arus Bebas (0-0,2) dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, Tingkat pelayanan jalan (LOS) Kabupaten Kulon Progo mengalami perubahan tipis sebesar 0,01 poin atau 10 persen yaitu dari A (0,10) pada tahun 2024 menjadi A (0,09) pada tahun 2025, menunjukkan kondisi lalu lintas yang baik, ruas jalan lancar.

Tabel 2.262

Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025 (Level of Service/LOS)

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	A (0,10)	A (0,09)	-0,01 (-10%)

2.2.2.20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan hasil pemantauan kualitas lingkungan terutama untuk mengendalikan dan mengurangi beban pencemaran yang dibuang ke lingkungan yang berasal dari sektor industri dan kegiatan masyarakat. Pengukuran IKLH dilakukan dengan metode dari Kementerian Kehutanan dan

Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahun. Komponen IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 75,46 atau mencapai 108,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar 69,75 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,46 diperoleh dari Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 75,46, Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 81,94 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 63,84.

Dibanding tahun 2024, indeks kualitas lingkungan hidup mengalami kenaikan sebesar 10 poin atau naik 15,28 persen yaitu dari 65,46 pada tahun 2024 menjadi 75,46 pada tahun 2025.

Tabel 2.263

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	65,46	75,46	10 (15,28%)

2.2.2.21 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. BNPB melakukan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator yang terkelompokan dalam 7 program prioritas, yaitu:

(1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;

(2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;

(3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;

(4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;

(5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

(6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan

(7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 0,67 atau mencapai 103,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,65 dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dibanding tahun 2024, indeks ketahanan daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin atau naik 4,69 persen yaitu dari 0,64 pada tahun 2024 menjadi 0,67 pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, perencanaan, kesiapsiagaan, maupun partisipasi masyarakat. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketangguhan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.264
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024-2025

Wilayah	2024	2025	Perubahan
Kabupaten Kulon Progo	0,64	0,67	0,03 (4,69%)

2.2.3 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Capaian Kinerja RKPD Triwulan IV Tahun 2025 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD Tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2025, sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada Tahun 2025:

a. Jumlah Program : 242 program
b. Jumlah Kegiatan : 568 kegiatan
c. Jumlah Subkegiatan : 1.184 subkegiatan
d. Jumlah OPD : 40 OPD
e. Pagu Belanja Daerah :
   - Pagu Belanja Daerah Murni : Rp1.737.355.803.868,00
   - Pagu Belanja Pergeseran I : Rp1.648.569.564.138,00
   - Pagu Belanja Pergeseran II : Rp1.648.569.564.138,00
   - Pagu Belanja Pergeseran III : Rp1.648.569.564.138,00
   - Pagu Belanja Pergeseran IV : Rp1.648.569.564.138,00
   - Pagu Belanja Daerah Perubahan : Rp1.750.207.065.164,35
   - Pagu Belanja Pergeseran I : Rp1.750.207.065.164,35
   - Pagu Belanja Pergeseran II : Rp1.760.353.999.344,35
   - Pagu Belanja Pergeseran III : Rp1.758.518.184.486,52
   - Pagu Belanja Pergeseran IV : Rp1.760.157.658.486,52
   - Pagu Belanja Pergeseran V : Rp1.759.814.071.786,52

2.2.3.1 Capaian Kinerja Program

Tingkat capaian rata-rata kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 97,61%. Adapun kinerja program dalam RKPD Triwulan IV Tahun 2025, dari 243 Program yang direncanakan dilaksanakan pada tahun pertama (2025) RPJMD Kulon Progo 2025-2029, terdapat 2 program yang tidak terlaksana yaitu:

1. Program Akreditasi Pelayanan. Program ini merupakan program baru pada RPJMD 2025-2029 dan pada saat proses perencanaan & penganggaran Perubahan RKPD maupun APBD, nomenklatur program tersebut belum tercantum pada sistem informasi pendukungnya yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sehingga pelaksanaan aktivitas-aktivitas pada program tersebut dimasukkan ke program lain yang masih berhubungan.
2. Program Perlindungan Anak (Dinsos) tidak mendapatkan alokasi pagu anggaran.

Dari 243 Program terdapat 230 program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 5 program dengan predikat kinerja Tinggi (T), 2 program dengan predikat Sedang (S), 2 program dengan predikat Rendah (R), dan ada 4 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Predikat kinerja program RKPD Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.265

Predikat Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Program	Predikat Kinerja	Jumlah Program	Persentase (%)
1	91% - 100%	Sangat Tinggi	230	94,65
2	76% - 90%	Tinggi	5	2,06
3	66% - 75%	Sedang	2	0,82
4	51% - 65%	Rendah	2	0,82
5	≤ 50%	Sangat Rendah	4	1,65
JUMLAH			**243**	**100**

2.2.3.2 Capaian Kinerja Fisik

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 99,83% dan kinerja anggaran sebesar 92,83%. Kinerja fisik memiliki predikat Sangat Tinggi dan kinerja anggaran memiliki predikat Sangat Tinggi. Data capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.266

Capaian Kinerja Fisik RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Triwulan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)		Predikat*)	
	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
Triwulan I	28,48	25,29	25,40	12,81	89,18	50,65	T	R
Triwulan II	54,23	58,49	53,95	42,77	99,48	73,12	ST	S
Triwulan III	81,13	77,83	80,60	65,07	99,35	83,60	ST	T
Triwulan IV	100	100	99,83	92,83	99,83	92,83	ST	ST

*) Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

2.2.3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan dari anggaran belanja daerah Triwulan IV Tahun 2025 adalah Rp1.633.573.999.641,76 atau sebesar 92,83% dari pagu anggaran dan sebesar 100% dari target (anggaran kas) s.d. Triwulan IV. Secara lengkap anggaran dan realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.267

Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Daerah s.d Triwulan IV Tahun 2025

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2025 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
s.d. 31 Des 2025	BELANJA OPERASI	1.442.020.571.796,50	1.442.020.571.796,50	100	1.335.933.729.904,76	92,64	
	Belanja Pegawai	815.593.550.804,00	815.593.550.804,00	100	737.833.085.143,41	90,47	● Gaji 13 dan THR untuk TPG dan Tamsil baru salur ke Kasda tgl 30 Des 2025
	Belanja Barang dan Jasa	529.232.252.919,50	529.232.252.919,50	100	503.640.614.499,35	95,16	● Pembayaran Premi JKN menyesuaikan tagihan BPJS ● Belanja Barjas BLUD RSUD NAS ● Amdal Sekolah Rakyat menunggu dokumen Andalalin
	Belanja Subsidi	1.394.108.250,00	1.394.108.250,00	100	1.132.148.250,00	81,21	Sesuai dengan permohonan subsidi kredit KerisKu
	Belanja Hibah	78.562.859.323,00	78.562.859.323,00	100	76.574.041.901,00	97,47	Belanja Hibah Barang Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri (DLH) tidak dilaksanakan karena menunggu terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang saat ini sedang dimohonkan oleh Penerima Hibah (Koperasi Ngudi Mugi Mulia Plampang II, Koperasi Produsen Ngudi Rejeki Sangon, dan Koperasi Produsen Ngudi Makmur Sangon)
	Belanja Bantuan Sosial	17.237.800.500,00	17.237.800.500,00	100	16.753.840.111,00	97,19	● Bansos BPNT APBD Bulan Desember banyak yang tidak tersalur karena dobel dengan Bantuan Langsung Tunai
	BELANJA MODAL	120.867.941.509,00	120.867.941.509,00	100	112.066.357.277,00	92,72	● Belanja Modal Tanah di Dikpora ditangguhkan karena karena ada penolakan dari masyarakat terkait calon lokasi pengganti SD N Kaliandong, Nanggulan ● Sisa Tender Pembangunan SD & SMP

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2025 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.649.056.439,02	8.649.056.439,02	100	826.671.925,00	9,56	Disesuaikan dengan kebutuhan darurat dan mendesak
	BELANJA TRANSFER	188.276.502.042,00	188.276.502.042,00	100	184.747.240.535,00	98,13	Belanja bagi hasil disesuaikan dengan realisasi transfer Pemerintah Pusat serta realisasi pendapatan pajak dan retribusi.
	TOTAL	**1.759.814.071.786,52**	**1.759.814.071.786,52**	100	**1.633.573.999.641,76**	**92,83**	**gap (-7,17)**

**Data Sementara BKAD per 31 Desember 2025*

Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 antara lain:

1. Beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tidak tercapai sesuai dengan target;
2. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat dan penyelarasan langkah-langkah di Pemerintah Kabupaten membutuhkan waktu;
3. Terdapat paket tidak terselesaikan 100% & tidak jadi dilaksanakan;

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian pekerjaan menggunakan mekanisme Tender Dini terutama untuk paket yang perencanaan & konstruksinya di tahun anggaran yang sama;
3. Meningkatkan / mengoptimalkan koordinasi dengan K/L terkait kebijakan-kebijakan baru yang muncul dan menyusun antisipasi/tindak lanjut-nya di Pemerintah Kabupaten.

2.2.3.4 Capaian Realisasi SPM 2023-2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penerapan SPM melalui aplikasi.

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) merupakan angka atau nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerapkan dan memenuhi standar pelayanan dasar bagi warganya. IP SPM dihitung dengan menggabungkan dua variabel utama menggunakan pembobotan sebagai berikut:

IP SPM = (Capaian Penerima Layanan x 80%) + (Capaian Mutu Layanan x 20%)

Tabel 2.268

IP SPM Kabupaten Kulon Progo (semua bidang)

Wilayah	2023	2024	2025
Kabupaten Kulon Progo	98,47%	98,90%	99,70%

Tabel 2.269

Persentase Realisasi Capaian SPM Kabupaten Kulon Progo (per bidang)

Bidang	2023	2024	2025
Pendidikan	98,10%	98,89%	100%
Kesehatan	93,79%	94,50%	98,39%
Pekerjaan Umum	100%	100%	100%
Perumahan Rakyat	100%	100%	100%
Trantibumlinmas	98,90%	100%	99,78%
Sosial	100%	100%	100%
Rata-Rata	**98,47%**	**98,90%**	**99,70%**

Meskipun capaian IP SPM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir belum mencapai 100%, namun dari tren capaian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Perangkat daerah pelaksana Penerapan SPM agar melakukan pendataan secara periodik untuk mengetahui jumlah warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
2. Perangkat daerah pelaksana Penerapan SPM agar melakukan perhitungan kebutuhan (kapasitas, sarana/prasarana, serta anggaran yang diperlukan;

3. Perangkat daerah pelaksana Penerapan SPM agar melakukan penyusunan rencana yang diintegrasikan dalam program dan alokasi anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah;
4. Perangkat daerah pelaksana Penerapan SPM merealisasikan program layanan dasar kepada warga negara, sehingga mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.2.4 Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut**:**

Tabel 2.270
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo
Sampai Dengan Triwulan IV 2025

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	SEKRETARIAT DAERAH			1.008.245.104	0	0		189.378.000		0		0		182.210.997		0		182.210.997		182.210.997			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian Program		1.008.245.104	0	0		189.378.000		0		0		182.210.997		0		182.210.997		182.210.997		18,07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3			Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada Urusan Kelembagaan Berkinerja Sangat Tinggi					100						100		100		100		100		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4			Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	100																		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		Peningkatan Budaya Pemerintahan			1.008.245.104	0	0		189.378.000		0		0		182.210.997		0		182.210.997		182.210.997			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	12	1.008.245.104	0	0	2	189.378.000	0	0	0	0	2	182.210.997	0	0	2	182.210.997	2	182.210.997	16,67	18,07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7		KEPEGAWAIAN			876.262.485.347	0	0		142.591.228.774		25.482.501.551		35.627.031.379		31.194.944.811		39.784.129.127		132.088.606.868		132.088.606.868			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	857.694.750.883	0	0	100	139.399.199.574		25.264.142.510		34.783.348.137		29.912.616.937	100	39.263.619.910	100	129.223.727.494	100	129.223.727.494	100	15,07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157.558.300	0	0		18.523.500		4.147.848		7.206.986		3.815.585		663.868		15.834.287		15.834.287			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	79.809.600	0	0	3	11.586.800	0	1.627.241	0	5.833.916	3	1.975.134	0	331.934	3	9.768.225	3	9.768.225	23,08	12,24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	77.748.700	0	0	21	6.936.700	0	2.520.607	4	1.373.070	5	1.840.451	4	331.934	13	6.066.062	13	6.066.062	16,05	7,8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			854.419.032.557	0	0		138.951.474.046		25.183.790.897		34.709.770.434		29.769.674.811		39.149.338.123		128.812.574.265		128.812.574.265			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.912	854.021.501.957	0	0	12	138.894.183.646	0	25.169.411.768	0	34.694.573.487	0	29.757.674.811	12	39.134.440.153	12	128.756.100.219	12	128.756.100.219	0,1	15,08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	330.250.000	0	0	12	50.850.000	0	12.000.000	3	13.425.000	3	12.000.000	3	13.425.000	9	50.850.000	9	50.850.000	52,94	15,4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	67.280.600	0	0	14	6.440.400	0	2.379.129	4	1.771.947	3	0	4	1.472.970	11	5.624.046	11	5.624.046	13,1	8,36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.000.000	0	0		6.000.000		0		0		6.000.000		0		6.000.000		6.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	6.000.000	0	0	3	6.000.000	0	0	0	0	3	6.000.000	0	0	3	6.000.000	3	6.000.000	300	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18		Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.894.800	0	0		62.822.400		6.168.289		7.578.889		32.145.754		15.136.489		61.029.421		61.029.421			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	97.493.800	0	0	5	11.971.900	0	3.894.337	1	3.081.749	2	1.903.994	1	1.391.241	4	10.271.321	4	10.271.321	26,67	10,54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	373.401.000	0	0	12	50.850.500	0	2.273.952	3	4.497.140	3	30.241.760	3	13.745.248	9	50.758.100	9	50.758.100	52,94	13,59	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			449.696.100	0	0		59.696.100		0		0		21.590.999		35.637.000		57.227.999		57.227.999			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73	449.696.100	0	0	7	59.696.100	0	0	0	0	7	21.590.999	0	35.637.000	7	57.227.999	7	57.227.999	9,59	12,73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.323.173.176	0	0		198.406.978		54.579.511		43.401.726		39.366.113		38.549.830		175.897.180		175.897.180			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	454.689.144	0	0	12	70.214.962	0	15.505.007	3	13.858.722	3	14.691.443	3	16.392.577	9	60.447.749	9	60.447.749	52,94	13,29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	868.484.032	0	0	12	128.192.016	0	39.074.504	3	29.543.004	3	24.674.670	3	22.157.253	9	115.449.431	9	115.449.431	52,94	13,29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			868.395.950	0	0		102.276.550		15.455.965		15.390.102		40.023.675		24.294.600		95.164.342		95.164.342			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	468.490.950	0	0	10	69.251.250	0	11.685.039	0	10.455.000	3	19.878.800	2	20.794.600	5	62.813.439	5	62.813.439	8,33	13,41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	251.585.000	0	0	1	15.600.000	0	0	0	0	1	15.543.779	0	0	1	15.543.779	1	15.543.779	16,67	6,18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	97	148.320.000	0	0	15	17.425.300	0	3.770.926	4	4.935.102	5	4.601.096	2	3.500.000	11	16.807.124	11	16.807.124	11,34	11,33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Capaian Program		18.567.734.464	0	0		3.192.029.200		218.359.041		843.683.242		1.282.327.874		520.509.217		2.864.879.374		2.864.879.374		15,43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31			Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	80,37				77,35						76,59		90,82		90,82		90,82		113		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32			Persentase Kedisiplinan ASN	99,88				99,8						99,95		99,9		99,9		99,9		100,02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33			Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi	267				242						230		242		242		242		90,64		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			6.022.578.824	0	0		685.417.700		58.265.311		179.538.097		107.494.027		134.940.034		480.237.469		480.237.469			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12	4.663.599.124	0	0	1	575.847.100	0	43.213.827	0	155.069.667	0	70.905.326	1	111.974.177	1	381.162.997	1	381.162.997	8,33	8,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6	868.244.600	0	0	1	78.297.300	0	9.486.970	0	23.189.030	0	23.663.025	1	14.982.150	1	71.321.175	1	71.321.175	16,67	8,21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	6	490.735.100	0	0	1	31.273.300	0	5.564.514	0	1.279.400	0	12.925.676	1	7.983.707	1	27.753.297	1	27.753.297	16,67	5,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38		Mutasi dan Promosi ASN			3.058.476.200	0	0		449.075.600		26.910.639		29.583.469		214.415.597		164.452.209		435.361.914		435.361.914			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1.527	379.616.500	0	0	242	36.229.400	0	860.958	7	7.679.005	168	16.895.963	35	6.682.483	210	32.118.409	210	32.118.409	13,75	8,46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3.300	404.259.900	0	0	700	41.671.300	0	3.123.828	301	8.842.780	156	16.103.450	207	8.763.102	664	36.833.160	664	36.833.160	20,12	9,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	30	2.274.599.800	0	0	5	371.174.900	0	22.925.853	1	13.061.684	2	181.416.184	3	149.006.624	6	366.410.345	6	366.410.345	20	16,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42		Pengembangan Kompetensi ASN			8.974.538.240	0	0		1.975.651.600		128.705.029		613.100.784		942.756.247		195.654.428		1.880.216.488		1.880.216.488			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
43		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	280	115.461.800	0	0	70	14.531.000	0	0	0	462.259	2	12.493.080	70	0	72	12.955.339	72	12.955.339	25,71	11,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	266	333.397.200	0	0	61	53.848.600	0	1.874.490	0	0	0	1.770.142	61	31.399.340	61	35.043.972	61	35.043.972	22,93	10,51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
45		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	8	8.183.569.440	0	0	3	1.878.745.300	0	124.034.424	0	610.593.565	0	911.153.138	3	161.516.780	3	1.807.297.907	3	1.807.297.907	37,5	22,08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
46		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	600	342.109.800	0	0	100	28.526.700	0	2.796.115	0	2.044.960	80	17.339.887	0	2.738.308	80	24.919.270	80	24.919.270	13,33	7,28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
47		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			512.141.200	0	0		81.884.300		4.478.062		21.460.892		17.662.003		25.462.546		69.063.503		69.063.503			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
48		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	14.427.400	0	0	27	14.427.400	0	0	0	0	0	234.876	27	12.871.573	27	13.106.449	27	13.106.449	######	90,84	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30	497.713.800	0	0	5	67.456.900	0	4.478.062	1	21.460.892	1	17.427.127	4	12.590.973	6	55.957.054	6	55.957.054	20	11,24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4.087.390.075	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
51		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi	49,39	4.087.390.075	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
52		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			4.087.390.075	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
53		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	4.087.390.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
54	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			30.491.738.474	0	0		4.861.273.269		659.052.739		1.772.601.060		1.372.733.783		924.847.641		4.729.235.223		4.729.235.223			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
55		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	11.219.806.308	0	0	100	1.822.212.737		471.778.899		490.666.579		364.467.773	100	384.146.906	100	1.711.060.157	100	1.711.060.157	100	15,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
56		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99.845.456	0	0		14.225.500		4.371.844		2.328.780		5.406.205		1.369.962		13.476.791		13.476.791			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
57		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	53.999.388	0	0	4	10.185.400	0	4.012.204	1	1.799.310	2	3.402.307	1	470.862	4	9.684.683	4	9.684.683	28,57	17,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
58		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	45.846.068	0	0	21	4.040.100	0	359.640	5	529.470	4	2.003.898	8	899.100	17	3.792.108	17	3.792.108	13,49	8,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.204.828.049	0	0		1.573.568.260		420.355.556		429.472.579		307.595.889		329.956.284		1.487.380.308		1.487.380.308			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126	8.969.444.149	0	0	21	1.533.688.260	0	412.480.556	0	420.097.579	0	296.999.985	21	320.931.684	21	1.450.509.804	21	1.450.509.804	16,67	16,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
61		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	185.500.000	0	0	12	37.500.000	0	7.875.000	3	9.375.000	3	8.625.000	3	8.625.000	9	34.500.000	9	34.500.000	12,5	18,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
62		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	49.883.900	0	0	14	2.380.000	0	0	3	0	4	1.970.904	4	399.600	11	2.370.504	11	2.370.504	13,1	4,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
63		Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.285.700	0	0		23.247.100		7.022.846		2.441.545		7.982.082		3.976.294		21.422.767		21.422.767			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
64		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	73.872.900	0	0	4	9.134.100	0	2.295.446	1	1.242.745	1	2.789.796	1	1.367.794	3	7.695.781	3	7.695.781	12,5	10,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
65		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	151.412.800	0	0	12	14.113.000	0	4.727.400	3	1.198.800	3	5.192.286	3	2.608.500	9	13.726.986	9	13.726.986	12,5	9,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
66		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			429.762.620	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
67		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
68		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		134.762.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
69		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
70		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			602.120.883	0	0		103.327.377		27.249.539		23.589.875		15.225.790		17.328.366		83.393.570		83.393.570			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
71		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	178.177.899	0	0	12	31.547.073	0	7.060.037	3	5.968.373	3	4.498.488	3	6.629.532	9	24.156.430	9	24.156.430	12,5	13,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
72		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	423.942.984	0	0	12	71.780.304	0	20.189.502	3	17.621.502	2	10.727.302	4	10.698.834	9	59.237.140	9	59.237.140	12,5	13,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
73		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			657.963.600	0	0		107.844.500		12.779.114		32.833.800		28.257.807		31.516.000		105.386.721		105.386.721			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
74		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72	573.618.200	0	0	7	90.123.900	0	8.951.000	2	26.003.600	1	23.679.700	2	30.056.000	5	88.690.300	5	88.690.300	6,94	15,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
75		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		83.345.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
76		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
77		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	25	17.720.600	0	3.828.114	9	6.830.200	7	4.578.107	3	1.460.000	19	16.696.421	19	16.696.421	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
78		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	96,32	7.126.707.984	0	0	90	1.130.776.336		70.882.413		145.169.560	0	855.656.728	81,71	50.084.500	81,71	1.121.793.201	81,71	1.121.793.201	84,84	15,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
79		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			7.126.707.984	0	0		1.130.776.336		70.882.413		145.169.560		855.656.728		50.084.500		1.121.793.201		1.121.793.201			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
80		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	554	2.577.494.384	0	0	150	1.130.776.336	0	70.882.413	30	145.169.560	60	855.656.728	60	50.084.500	150	1.121.793.201	150	1.121.793.201	27,08	43,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
81		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	276	4.549.213.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
82		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Siswa yang Menggunakan Hak Pilih dalam PEMILOS	80	8.293.459.454	0	0	60	1.357.481.496		18.785.310		983.797.696	78,8	30.342.667	78,8	319.052.888	78,8	1.351.978.561	78,8	1.351.978.561	98,5	16,3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
83		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			8.293.459.454	0	0		1.357.481.496		18.785.310		983.797.696		30.342.667		319.052.888		1.351.978.561		1.351.978.561			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
84		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	440	7.601.961.114	0	0	370	1.357.481.496	0	18.785.310	60	983.797.696	180	30.342.667	130	319.052.888	370	1.351.978.561	370	1.351.978.561	84,09	17,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
85		Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	6	691.498.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
86		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	816.158.461	0	0	79,87	119.707.200		17.940.744		37.649.620	78,43	23.862.205	84,97	38.980.467	84,97	118.433.036	84,97	118.433.036	84,97	14,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
87		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			816.158.461	0	0		119.707.200		17.940.744		37.649.620		23.862.205		38.980.467		118.433.036		118.433.036			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
88		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	816.158.461	0	0	2	119.707.200	0	17.940.744	0	37.649.620	1	23.862.205	1	38.980.467	2	118.433.036	2	118.433.036	16,67	14,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
89		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Hasil Penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti	100	833.984.257	0	0	17,39	86.775.600		17.346.342		24.358.550	8,7	20.714.590	17,39	24.225.279	17,39	86.644.761	17,39	86.644.761	17,39	10,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
90		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			833.984.257	0	0		86.775.600		17.346.342		24.358.550		20.714.590		24.225.279		86.644.761		86.644.761			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
91		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	833.984.257	0	0	12	86.775.600	0	17.346.342	3	24.358.550	3	20.714.590	4	24.225.279	10	86.644.761	10	86.644.761	166,67	10,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
92		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial	100	2.201.622.010	0	0	100	344.319.900		62.319.031		90.959.055	50	77.689.820	100	108.357.601	100	339.325.507	100	339.325.507	100	15,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
93		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.201.622.010	0	0		344.319.900		62.319.031		90.959.055		77.689.820		108.357.601		339.325.507		339.325.507			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
94		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120	846.285.192	0	0	20	135.703.700	0	18.567.488	6	33.349.200	6	34.905.599	4	47.391.751	16	134.214.038	16	134.214.038	13,33	15,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
95		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	78	673.421.142	0	0	32	102.643.400	0	18.322.620	9	33.868.500	9	21.253.721	8	27.682.100	26	101.126.941	26	101.126.941	33,33	15,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
96		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	36	681.915.676	0	0	4	105.972.800	0	25.428.923	0	23.741.355	0	21.530.500	2	33.283.750	2	103.984.528	2	103.984.528	5,56	15,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
97	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	KEUANGAN			##############	0	0		230.415.529.791		29.255.821.263		27.550.814.642		30.330.029.066		126.760.521.207		213.897.186.178		213.897.186.178			Badan Keuangan dan Aset Daerah
98		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	195.465.794.110	0	0	100	27.511.494.110		4.878.049.891		5.615.744.564		5.640.609.793	97,62	6.829.640.282	97,62	22.964.044.530	97,62	22.964.044.530	97,62	11,75	Badan Keuangan dan Aset Daerah
99		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			240.536.200	0	0		39.016.200		9.659.760		7.527.500		12.720.079		8.223.840		38.131.179		38.131.179			Badan Keuangan dan Aset Daerah
100		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	214.323.200	0	0	3	35.323.200	0	9.659.760	0	7.527.500	2	9.916.379	1	7.644.420	3	34.748.059	3	34.748.059	25	16,21	Badan Keuangan dan Aset Daerah
101		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	26.213.000	0	0	21	3.693.000	0	0	7	0	4	2.803.700	5	579.420	16	3.383.120	16	3.383.120	12,7	12,91	Badan Keuangan dan Aset Daerah
102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			187.344.240.525	0	0		26.244.520.525		4.726.173.530		5.452.160.027		5.343.558.186		6.371.557.158		21.893.448.901		21.893.448.901			Badan Keuangan dan Aset Daerah
103		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456	186.447.057.725	0	0	76	26.118.237.725	0	4.700.243.542	0	5.422.801.519	0	5.315.874.051	76	6.334.692.158	76	21.773.611.270	76	21.773.611.270	16,67	11,68	Badan Keuangan dan Aset Daerah
104		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	621.691.100	0	0	12	87.501.100	0	13.532.567	3	19.650.000	3	19.650.000	3	29.800.000	9	82.632.567	9	82.632.567	150	13,29	Badan Keuangan dan Aset Daerah
105		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	26.235.800	0	0	12	3.695.800	0	0	3	2.643.508	3	296.370	3	0	9	2.939.878	9	2.939.878	12,5	11,21	Badan Keuangan dan Aset Daerah
106		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	249.255.900	0	0	12	35.085.900	0	12.397.421	3	7.065.000	3	7.737.765	3	7.065.000	9	34.265.186	9	34.265.186	10,71	13,75	Badan Keuangan dan Aset Daerah
107		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			87.210.000	0	0		12.280.000		0		0		0		0		0		0			Badan Keuangan dan Aset Daerah
108		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	12.620.000	0	0	1	1.780.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	16,67	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
109		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	74.590.000	0	0	3	10.500.000	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	25	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
110		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.382.964.814	0	0		192.894.814		8.191.054		7.568.375		58.333.927		56.528.616		130.621.972		130.621.972			Badan Keuangan dan Aset Daerah
111		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	188.352.600	0	0	4	26.512.600	0	3.711.114	1	2.256.375	1	14.106.346	1	3.886.799	3	23.960.634	3	23.960.634	8,33	12,72	Badan Keuangan dan Aset Daerah
112		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	1.194.612.214	0	0	12	166.382.214	0	4.479.940	3	5.312.000	3	44.227.581	2	52.641.817	8	106.661.338	8	106.661.338	11,11	8,93	Badan Keuangan dan Aset Daerah
113		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			852.669.000	0	0		175.009.000		0		0		72.707.727		99.990.000		172.697.727		172.697.727			Badan Keuangan dan Aset Daerah
114		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	852.669.000	0	0	4	175.009.000	0	0	0	0	1	72.707.727	3	99.990.000	4	172.697.727	4	172.697.727	13,33	20,25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
115		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.058.835.821	0	0		434.795.821		97.751.347		84.692.249		84.907.725		128.083.298		395.434.619		395.434.619			Badan Keuangan dan Aset Daerah
116		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	1.083.336.929	0	0	12	152.476.929	0	17.076.424	3	18.516.026	3	15.236.904	3	63.661.828	9	114.491.182	9	114.491.182	12,5	10,57	Badan Keuangan dan Aset Daerah
117		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.975.498.892	0	0	12	282.318.892	0	80.674.923	3	66.176.223	3	69.670.821	3	64.421.470	9	280.943.437	9	280.943.437	12,5	14,22	Badan Keuangan dan Aset Daerah
118		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.499.337.750	0	0		412.977.750		36.274.200		63.796.413		68.382.149		165.257.370		333.710.132		333.710.132			Badan Keuangan dan Aset Daerah
119		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	234	1.677.291.150	0	0	39	236.071.150	0	34.324.200	9	43.483.400	9	37.488.200	12	58.097.500	30	173.393.300	30	173.393.300	12,82	10,34	Badan Keuangan dan Aset Daerah
120		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	175.830.000	0	0	2	94.350.000	0	0	2	7.147.000	0	0	0	77.367.550	2	84.514.550	2	84.514.550	16,67	48,07	Badan Keuangan dan Aset Daerah
121		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	642	646.216.600	0	0	12	82.556.600	0	1.950.000	4	13.166.013	4	30.893.949	2	29.792.320	10	75.802.282	10	75.802.282	1,56	11,73	Badan Keuangan dan Aset Daerah
122		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Program	100	##############	0	0		197.630.324.681		23.724.953.684		20.918.333.092		23.781.605.220		117.795.932.450		186.220.824.446		186.220.824.446		13,6	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
123			Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100				100						66,67		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
124			Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100				100						100		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
125			Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar	90,32				80						100		100		100		100		110,71		Badan Keuangan dan Aset Daerah
126		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2.877.085.000	0	0		403.325.000		34.493.818		19.529.427		167.958.230		153.661.097		375.642.572		375.642.572			Badan Keuangan dan Aset Daerah
127		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	24	432.051.400	0	0	4	60.811.400	0	13.621.283	0	7.065.000	4	20.279.848	0	12.484.031	4	53.450.162	4	53.450.162	16,67	12,37	Badan Keuangan dan Aset Daerah
128		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	510	208.823.500	0	0	85	29.393.500	0	4.003.851	4	2.907.867	40	8.808.937	1	9.760.897	45	25.481.552	45	25.481.552	8,82	12,2	Badan Keuangan dan Aset Daerah
129		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	72	1.484.111.000	0	0	12	207.261.000	0	16.868.684	0	8.792.598	8	39.366.025	2	129.392.084	10	194.419.391	10	194.419.391	13,89	13,1	Badan Keuangan dan Aset Daerah
130		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	752.099.100	0	0	1	105.859.100	0	0	0	763.962	0	99.503.420	1	2.024.085	1	102.291.467	1	102.291.467	16,67	13,6	Badan Keuangan dan Aset Daerah
131		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.631.212.900	0	0		229.592.900		58.856.379		29.526.850		62.410.035		50.343.553		201.136.817		201.136.817			Badan Keuangan dan Aset Daerah
132		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	660	356.310.300	0	0	110	50.150.300	0	15.578.504	26	8.331.850	27	13.207.317	30	9.628.157	83	46.745.828	83	46.745.828	12,58	13,12	Badan Keuangan dan Aset Daerah
133		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	72	87.893.400	0	0	2	12.373.400	0	1.892.937	0	0	1	2.850.723	0	5.554.440	1	10.298.100	1	10.298.100	1,39	11,72	Badan Keuangan dan Aset Daerah
134		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	67.106.800	0	0	2	9.446.800	0	1.612.141	0	0	1	2.442.699	0	1.269.840	1	5.324.680	1	5.324.680	8,33	7,93	Badan Keuangan dan Aset Daerah
135		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	252	1.119.902.400	0	0	42	157.622.400	0	39.772.797	42	21.195.000	0	43.909.296	0	33.891.116	42	138.768.209	42	138.768.209	16,67	12,39	Badan Keuangan dan Aset Daerah
136		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			510.398.300	0	0		71.848.300		10.208.389		51.483.779		2.697.300		5.743.129		70.132.597		70.132.597			Badan Keuangan dan Aset Daerah
137		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.008	55.727.200	0	0	168	7.847.200	0	2.307.445	42	2.205.869	42	1.098.900	42	1.698.300	126	7.310.514	126	7.310.514	12,5	13,12	Badan Keuangan dan Aset Daerah
138		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	102	21.020.500	0	0	17	2.960.500	0	1.003.884	4	0	6	0	3	1.798.200	13	2.802.084	13	2.802.084	12,75	13,33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
139		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3.024	51.234.000	0	0	504	7.214.000	0	2.937.060	126	284.160	126	1.598.400	126	2.246.629	378	7.066.249	378	7.066.249	12,5	13,79	Badan Keuangan dan Aset Daerah
140		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12	382.416.600	0	0	2	53.826.600	0	3.960.000	0	48.993.750	2	0	0	0	2	52.953.750	2	52.953.750	16,67	13,85	Badan Keuangan dan Aset Daerah
141		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			##############	0	0		196.925.558.481		23.621.395.098		20.817.793.036		23.548.539.655		117.586.184.671		185.573.912.460		185.573.912.460			Badan Keuangan dan Aset Daerah
142		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	72	##############	0	0	1	171.617.615.400	0	22.421.493.922	0	18.152.477.470	0	17.008.641.539	1	113.728.216.749	1	171.310.829.680	1	171.310.829.680	1,39	14,05	Badan Keuangan dan Aset Daerah
143		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	29.468.106.029	0	0	1	8.649.056.439	0	0	0	0	0	661.022.026	1	165.649.899	1	826.671.925	1	826.671.925	8,33	2,81	Badan Keuangan dan Aset Daerah
144		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	115.152.796.642	0	0	12	16.658.886.642	0	1.199.901.176	3	2.665.315.566	3	5.878.876.090	3	3.692.318.023	9	13.436.410.855	9	13.436.410.855	75	11,67	Badan Keuangan dan Aset Daerah
145		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	1.525.361.700	0	0	100	258.231.700		7.624.270		16.942.933	100	18.147.965	100	202.470.213	100	245.185.381	100	245.185.381	100	16,07	Badan Keuangan dan Aset Daerah
146		Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.525.361.700	0	0		258.231.700		7.624.270		16.942.933		18.147.965		202.470.213		245.185.381		245.185.381			Badan Keuangan dan Aset Daerah
147		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	12	654.592.900	0	0	2	92.132.900	0	0	1	279.720	1	2.160.282	0	87.199.488	2	89.639.490	2	89.639.490	16,67	13,69	Badan Keuangan dan Aset Daerah
148		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	18	45.695.800	0	0	2	6.435.800	0	2.697.300	0	0	1	1.682.557	0	1.156.558	1	5.536.415	1	5.536.415	5,56	12,12	Badan Keuangan dan Aset Daerah
149		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	145.154.700	0	0	2	20.434.700	0	1.898.100	0	10.007.715	1	1.498.500	1	5.883.888	2	19.288.203	2	19.288.203	16,67	13,29	Badan Keuangan dan Aset Daerah
150		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36	220.919.800	0	0	6	74.059.800	0	3.028.870	1	4.493.884	2	5.793.646	2	53.392.233	5	66.708.633	5	66.708.633	13,89	30,2	Badan Keuangan dan Aset Daerah
151		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	24	458.998.500	0	0	4	65.168.500	0	0	0	2.161.614	2	7.012.980	2	54.838.046	4	64.012.640	4	64.012.640	16,67	13,95	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
152		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Program	100	35.336.759.300	0	0		5.015.479.300		645.193.418		999.794.053		889.666.088		1.932.478.262		4.467.131.821		4.467.131.821		12,64	Badan Keuangan dan Aset Daerah
153			Jumlah Wajib Pajak Daerah	######				######						######		######		######		######		95,06		Badan Keuangan dan Aset Daerah
154			Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah	######				######						######		######		######		######		94,22		Badan Keuangan dan Aset Daerah
155		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			35.336.759.300	0	0		5.015.479.300		645.193.418		999.794.053		889.666.088		1.932.478.262		4.467.131.821		4.467.131.821			Badan Keuangan dan Aset Daerah
156		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12	135.340.700	0	0	2	19.050.700	0	2.418.642	0	0	1	2.913.084	1	7.741.872	2	13.073.598	2	13.073.598	16,67	9,66	Badan Keuangan dan Aset Daerah
157		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24	219.101.100	0	0	3	30.841.100	0	4.467.204	0	2.142.214	0	9.557.568	0	13.853.880	0	30.020.866	0	30.020.866	0	13,7	Badan Keuangan dan Aset Daerah
158		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	48	15.826.814.400	0	0	8	2.180.934.400	0	423.584.220	1	550.310.382	0	465.152.791	4	591.033.856	5	2.030.081.249	5	2.030.081.249	10,42	12,83	Badan Keuangan dan Aset Daerah
159		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	72	12.938.662.000	0	0	12	1.790.032.000	0	104.653.313	3	286.748.238	2	166.161.094	3	1.036.756.415	8	1.594.319.060	8	1.594.319.060	11,11	12,32	Badan Keuangan dan Aset Daerah
160		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	174	3.364.893.500	0	0	29	467.523.500	0	30.528.612	9	104.639.768	6	84.142.122	9	167.567.397	24	386.877.899	24	386.877.899	13,79	11,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
161		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	72	2.213.883.000	0	0	12	311.593.000	0	53.284.814	3	35.049.560	3	125.305.503	3	96.194.001	9	309.833.878	9	309.833.878	12,5	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah
162		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	447.539.000	0	0	29	128.409.000	0	3.066.468	9	866.125	9	17.576.933	6	8.059.943	24	29.569.469	24	29.569.469	200	6,61	Badan Keuangan dan Aset Daerah
163		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	75.969.900	0	0	12	70.969.900	0	22.329.229	3	15.129.166	3	13.775.750	3	7.065.000	9	58.299.145	9	58.299.145	75	76,74	Badan Keuangan dan Aset Daerah
164		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6	114.555.700	0	0	2	16.125.700	0	860.916	1	4.908.600	0	5.081.243	1	4.205.898	2	15.056.657	2	15.056.657	33,33	13,14	Badan Keuangan dan Aset Daerah
165	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25.194.984.065	0	0		3.996.044.065		840.870.114		879.179.620		813.340.533		1.120.936.085		3.654.326.352		3.654.326.352			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
166		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	14.791.237.365	0	0	100	2.353.027.365		486.048.763		545.933.239		465.185.122	100	565.856.934	100	2.063.024.058	100	2.063.024.058	100	13,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
167		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.821.600	0	0		12.821.600		1.762.353		6.298.598		1.930.401		1.958.040		11.949.392		11.949.392			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
168		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126	25.183.400	0	0	3	10.183.400	0	1.538.793	0	4.765.000	1	1.530.801	2	1.618.380	3	9.452.974	3	9.452.974	2,38	37,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
169		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	31.638.200	0	0	21	2.638.200	0	223.560	4	1.533.598	5	399.600	6	339.660	15	2.496.418	15	2.496.418	107,14	7,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
170		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.369.593.165	0	0		1.875.883.165		404.632.686		433.232.029		359.410.570		397.275.404		1.594.550.689		1.594.550.689			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
171		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	11.098.148.765	0	0	24	1.841.438.765	0	395.435.222	0	426.029.871	0	350.995.561	24	388.792.842	24	1.561.253.496	24	1.561.253.496	16,67	14,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
172		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84	257.396.800	0	0	14	32.396.800	0	8.344.612	3	6.900.000	4	8.015.409	4	8.082.962	11	31.342.983	11	31.342.983	13,1	12,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
173		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	14.047.600	0	0	14	2.047.600	0	852.852	4	302.158	3	399.600	4	399.600	11	1.954.210	11	1.954.210	15,28	13,91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
174		Administrasi Umum Perangkat Daerah			113.266.200	0	0		16.266.200		599.400		2.173.780		8.817.606		4.506.300		16.097.086		16.097.086			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
175		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	113.266.200	0	0	1	16.266.200	0	599.400	0	2.173.780	0	8.817.606	1	4.506.300	1	16.097.086	1	16.097.086	16,67	14,21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
176		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			707.609.700	0	0		7.609.700		0		7.579.384		0		0		7.579.384		7.579.384			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
177		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	707.609.700	0	0	1	7.609.700	0	0	0	7.579.384	1	0	0	0	1	7.579.384	1	7.579.384	25	1,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
178		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.328.149.872	0	0		214.649.872		54.714.224		42.544.346		56.279.545		55.459.946		208.998.061		208.998.061			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
179		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	347.969.012	0	0	12	64.469.012	0	15.780.704	3	11.157.936	3	16.312.611	3	20.025.630	9	63.276.881	9	63.276.881	12,5	18,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
180		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	35.067.200	0	0	1	5.067.200	0	324.000	0	1.638.050	0	1.427.007	1	1.492.800	1	4.881.857	1	4.881.857	16,67	13,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
181		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	945.113.660	0	0	1	145.113.660	0	38.609.520	0	29.748.360	0	38.539.927	1	33.941.516	1	140.839.323	1	140.839.323	16,67	14,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
182		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.215.796.828	0	0		225.796.828		24.340.100		54.105.102		38.747.000		106.657.244		223.849.446		223.849.446			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
183		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132	1.081.070.028	0	0	21	201.070.028	0	23.890.100	0	51.948.300	0	29.792.500	0	93.801.244	0	199.432.144	0	199.432.144	0	18,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
184		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	134.726.800	0	0	21	24.726.800	0	450.000	3	2.156.802	7	8.954.500	8	12.856.000	18	24.417.302	18	24.417.302	15	18,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
185		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Program	100	5.581.961.800	0	0		871.261.800		165.209.953		164.225.101		186.892.297		327.710.259		844.037.610		844.037.610		15,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
186			Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana	100				100						100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
187			Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana	100				100						100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
188		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			209.511.400	0	0		25.011.400		0		12.311.907		11.763.260		699.700		24.774.867		24.774.867			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
189		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2.000	209.511.400	0	0	200	25.011.400	0	0	100	12.311.907	100	11.763.260	0	699.700	200	24.774.867	200	24.774.867	10	11,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
190		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.404.537.800	0	0		226.537.800		1.099.400		19.847.974		19.448.941		185.432.800		225.829.115		225.829.115			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
191		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	120	209.022.500	0	0	12	49.022.500	0	0	0	13.863.498	2	0	10	35.101.250	12	48.964.748	12	48.964.748	10	23,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
192		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.800	294.786.900	0	0	200	46.786.900	0	0	0	0	0	148.518	200	46.565.600	200	46.714.118	200	46.714.118	11,11	15,85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
193		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	6	597.641.800	0	0	1	102.641.800	0	0	0	0	0	899.544	1	101.555.950	1	102.455.494	1	102.455.494	16,67	17,14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
194		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300	303.086.600	0	0	2	28.086.600	0	1.099.400	0	5.984.476	2	18.400.879	0	2.210.000	2	27.694.755	2	27.694.755	0,67	9,14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
195		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			3.266.582.000	0	0		572.382.000		162.460.587		125.611.264		145.399.379		113.625.000		547.096.230		547.096.230			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
196		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6	3.048.753.300	0	0	1	536.553.300	0	162.460.587	0	125.551.879	0	118.394.000	1	106.275.000	1	512.681.466	1	512.681.466	16,67	16,82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
197		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600	217.828.700	0	0	100	35.828.700	0	0	0	59.385	0	27.005.379	100	7.350.000	100	34.414.764	100	34.414.764	16,67	15,8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
198		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			701.330.600	0	0		47.330.600		1.649.966		6.453.956		10.280.717		27.952.759		46.337.398		46.337.398			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
199		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	5.586.000	0	0	1	5.586.000	0	561.112	0	2.597.576	0	1.776.680	1	400.000	1	5.335.368	1	5.335.368	25	95,51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
200		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	31.609.200	0	0	1	31.609.200	0	689.254	0	1.476.980	0	2.489.100	1	26.444.300	1	31.099.634	1	31.099.634	100	98,39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
201		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	100	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
202		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	6	109.135.400	0	0	1	10.135.400	0	399.600	0	2.379.400	0	6.014.937	1	1.108.459	1	9.902.396	1	9.902.396	16,67	9,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
203		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5	345.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
204		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Capaian Program	100	4.821.784.900	0	0		771.754.900		189.611.398		169.021.280		161.263.114		227.368.892		747.264.684		747.264.684		15,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
205			Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran	100				100						100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
206			Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran	100				100						100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
207		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.545.006.000	0	0		724.976.000		189.206.304		167.233.847		140.030.038		204.418.778		700.888.967		700.888.967			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
208		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6	3.790.444.000	0	0	1	627.414.000	0	188.607.459	0	144.213.528	0	139.230.038	1	131.625.758	1	603.676.783	1	603.676.783	16,67	15,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	6	34.994.800	0	0	1	2.494.800	0	207.459	0	0	0	800.000	1	1.449.400	1	2.456.859	1	2.456.859	16,67	7,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
210		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
211		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	90	219.567.200	0	0	33	95.067.200	0	391.386	0	23.020.319	18	0	15	71.343.620	33	94.755.325	33	94.755.325	36,67	43,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
212		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			23.427.200	0	0		23.427.200		405.094		0		1.139.200		21.773.500		23.317.794		23.317.794			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
213		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	23.427.200	0	0	1	23.427.200	0	405.094	0	0	0	1.139.200	1	21.773.500	1	23.317.794	1	23.317.794	50	99,53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
214		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			253.351.700	0	0		23.351.700		0		1.787.433		20.093.876		1.176.614		23.057.923		23.057.923			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
215		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	524	170.519.400	0	0	100	15.519.400	0	0	50	1.787.433	50	12.933.918	0	599.400	100	15.320.751	100	15.320.751	19,08	8,98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
216		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	30	82.832.300	0	0	5	7.832.300	0	0	0	0	5	7.159.958	0	577.214	5	7.737.172	5	7.737.172	16,67	9,34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
217	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	SEKRETARIAT DAERAH			865.133.051	0	0		247.398.500		0		10.300.500		62.416.351		169.739.154		242.456.005		242.456.005			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
218		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	865.133.051	0	0	100	247.398.500		0		10.300.500		62.416.351	100	169.739.154	100	242.456.005	100	242.456.005	100	28,03	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
219		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			382.861.808	0	0		130.730.100		0		2.750.000		13.473.098		114.306.846		130.529.944		130.529.944			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
220		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	6	382.861.808	0	0	3	130.730.100	0	0	0	2.750.000	0	13.473.098	3	114.306.846	3	130.529.944	3	130.529.944	50	34,09	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
221		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			482.271.243	0	0		116.668.400		0		7.550.500		48.943.253		55.432.308		111.926.061		111.926.061			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
222		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6	348.098.632	0	0	4	76.459.000	0	0	0	4.551.800	0	40.401.551	4	27.760.430	4	72.713.781	4	72.713.781	66,67	20,89	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
223		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	6	134.172.611	0	0	4	40.209.400	0	0	1	2.998.700	0	8.541.702	2	27.671.878	3	39.212.280	3	39.212.280	50	29,23	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
224		PERENCANAAN			37.002.291.550	0	0		6.098.979.380		1.378.353.484		1.596.506.422		1.303.609.428		1.430.234.740		5.708.704.074		5.708.704.074			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
225		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	28.941.795.599	0	0	100	4.601.384.180		1.110.829.840		1.216.393.222		989.776.903	100	1.002.342.736	100	4.319.342.701	100	4.319.342.701	100	14,92	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
226		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.872.406	0	0		16.030.700		0		8.337.262		1.299.155		4.151.373		13.787.790		13.787.790			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
227		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	49.493.100	0	0	3	11.091.700	0	0	0	5.916.496	0	837.395	3	2.709.013	3	9.462.904	3	9.462.904	20	19,12	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
228		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	31.379.306	0	0	21	4.939.000	0	0	5	2.420.766	4	461.760	5	1.442.360	14	4.324.886	14	4.324.886	17,28	13,78	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
229		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.904.022.961	0	0		3.918.740.066		1.034.518.678		1.062.938.368		809.289.312		791.728.039		3.698.474.397		3.698.474.397			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
230		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312	23.410.658.103	0	0	52	3.835.794.466	0	1.014.008.678	0	1.043.089.174	0	785.544.764	52	773.129.149	52	3.615.771.765	52	3.615.771.765	16,67	15,44	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
231		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	272.425.102	0	0	1	48.171.000	0	10.650.000	0	10.885.764	0	15.418.425	1	11.203.890	1	48.158.079	1	48.158.079	16,67	17,68	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
232		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	220.939.756	0	0	14	34.774.600	0	9.860.000	3	8.963.430	4	8.326.123	3	7.395.000	10	34.544.553	10	34.544.553	11,9	15,64	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
233		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			169.558.521	0	0		28.212.900		0		399.600		774.960		25.855.476		27.030.036		27.030.036			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
234		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0	0	1	1.525.400	0	0	0	399.600	0	774.960	1	299.700	1	1.474.260	1	1.474.260	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
235		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	257	169.558.521	0	0	57	26.687.500	0	0	0	0	0	0	57	25.555.776	57	25.555.776	57	25.555.776	22,18	15,07	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
236		Administrasi Umum Perangkat Daerah			924.980.340	0	0		125.350.200		4.074.778		7.037.280		47.777.001		49.872.757		108.761.816		108.761.816			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
237		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	133.949.752	0	0	6	19.005.700	0	1.137.718	2	324.000	2	7.900.962	2	6.926.614	6	16.289.294	6	16.289.294	54,55	12,16	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
238		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	791.030.588	0	0	12	106.344.500	0	2.937.060	3	6.713.280	3	39.876.039	3	42.946.143	9	92.472.522	9	92.472.522	52,94	11,69	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
239		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			578.851.820	0	0		3.337.100		0		0		0		3.337.100		3.337.100		3.337.100			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
240		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56	578.851.820	0	0	1	3.337.100	0	0	0	0	0	0	1	3.337.100	1	3.337.100	1	3.337.100	1,79	0,58	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
241		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.917.600.290	0	0		302.153.064		51.922.984		81.838.012		75.619.175		71.349.671		280.729.842		280.729.842			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
242		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	603.855.409	0	0	12	95.043.240	0	19.610.678	3	18.928.988	3	18.033.089	3	18.992.395	9	75.565.150	9	75.565.150	52,94	12,51	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
243		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	1.313.744.881	0	0	12	207.109.824	0	32.312.306	3	62.909.024	3	57.586.086	3	52.357.276	9	205.164.692	9	205.164.692	52,94	15,62	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
244		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.365.909.261	0	0		207.560.150		20.313.400		55.842.700		55.017.300		56.048.320		187.221.720		187.221.720			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
245		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	849.200.041	0	0	28	160.011.650	0	20.313.400	8	36.317.600	7	42.847.300	7	41.565.820	22	141.044.120	22	141.044.120	13,1	16,61	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
246		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	168.397.465	0	0	1	18.500.000	0	0	1	13.914.100	0	0	0	4.180.000	1	18.094.100	1	18.094.100	16,67	10,74	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
247		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	451	348.311.755	0	0	78	29.048.500	0	0	44	5.611.000	19	12.170.000	15	10.302.500	78	28.083.500	78	28.083.500	17,29	8,06	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
248		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Program	100	4.652.695.534	0	0		810.880.300		195.951.280		225.425.207		200.993.707		109.268.931		731.639.125		731.639.125		15,73	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
249			Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100				100						85,71		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
250			Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	99,9				99,87						99,35		99,83		99,83		99,83		99,93		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
251		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3.088.101.753	0	0		597.066.400		178.398.340		191.600.207		145.497.092		24.865.152		540.360.791		540.360.791			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
252		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	18	162.502.544	0	0	3	24.668.700	0	659.340	0	2.151.318	0	2.418.260	3	7.102.117	3	12.331.035	3	12.331.035	16,67	7,59	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
253		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	16	2.925.599.209	0	0	3	572.397.700	0	177.739.000	0	189.448.889	0	143.078.832	0	17.763.035	0	528.029.756	0	528.029.756	0	18,05	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
254		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			236.482.355	0	0		35.986.600		1.038.960		11.721.363		6.182.825		13.356.960		32.300.108		32.300.108			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
255		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	21	236.482.355	0	0	3	35.986.600	0	1.038.960	1	11.721.363	1	6.182.825	1	13.356.960	3	32.300.108	3	32.300.108	14,29	13,66	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
256		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.328.111.426	0	0		177.827.300		16.513.980		22.103.637		49.313.790		71.046.819		158.978.226		158.978.226			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
257		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	60	1.046.918.028	0	0	10	139.487.900	0	14.995.500	2	19.276.939	2	25.171.491	2	63.847.856	6	123.291.786	6	123.291.786	10	11,78	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
258		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	56	281.193.398	0	0	12	38.339.400	0	1.518.480	3	2.826.698	3	24.142.299	3	7.198.963	9	35.686.440	9	35.686.440	16,07	12,69	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
259		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Program	100	3.407.800.417	0	0		686.714.900		71.572.364		154.687.993		112.838.818		318.623.073		657.722.248		657.722.248		19,3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
260			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu	100				100						100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
261			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu	100				100						100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
262			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu	100				100						100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
263		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.500.085.435	0	0		239.263.900		30.852.780		73.490.657		57.108.828		60.190.730		221.642.995		221.642.995			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
264		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	318.133.373	0	0	7	48.367.200	0	4.322.484	1	17.658.547	4	13.756.451	1	12.150.500	6	47.887.982	6	47.887.982	16,67	15,05	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
265		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48	778.005.977	0	0	8	118.393.100	0	12.743.300	2	31.105.232	4	24.595.563	1	34.274.500	7	102.718.595	7	102.718.595	14,58	13,2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
266		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36	403.946.085	0	0	7	72.503.600	0	13.786.996	2	24.726.878	3	18.756.814	1	13.765.730	6	71.036.418	6	71.036.418	16,67	17,59	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
267		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			705.318.119	0	0		175.115.900		15.266.164		35.224.877		19.758.531		103.091.999		173.341.571		173.341.571			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
268		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36	179.014.697	0	0	7	26.505.600	0	1.998.324	2	11.926.906	3	5.479.046	1	6.711.616	6	26.115.892	6	26.115.892	16,67	14,59	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
269		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36	526.303.422	0	0	8	148.610.300	0	13.267.840	2	23.297.971	3	14.279.485	2	96.380.383	7	147.225.679	7	147.225.679	19,44	27,97	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
270		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.202.396.863	0	0		272.335.100		25.453.420		45.972.459		35.971.459		155.340.344		262.737.682		262.737.682			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
271		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36	534.586.455	0	0	7	81.350.500	0	12.649.000	2	21.854.708	4	18.331.774	0	23.030.769	6	75.866.251	6	75.866.251	16,67	14,19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
272		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36	667.810.408	0	0	8	190.984.600	0	12.804.420	2	24.117.751	3	17.639.685	2	132.309.575	7	186.871.431	7	186.871.431	19,44	27,98	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
273		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.193.297.225	0	0		406.337.800		819.180		12.972.246		22.984.660		340.797.914		377.574.000		377.574.000			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
274		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Inovasi Daerah	214	1.188.297.225	0	0	209	406.337.800		819.180		12.972.246	209	22.984.660	324	340.797.914	324	377.574.000	324	377.574.000	151,4	31,77	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
275		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1.188.297.225	0	0		406.337.800		819.180		12.972.246		22.984.660		340.797.914		377.574.000		377.574.000			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
276		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6	911.056.981	0	0	5	363.327.900	0	399.600	0	7.146.442	1	7.360.150	3	321.840.314	4	336.746.506	4	336.746.506	66,67	36,96	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6	277.240.244	0	0	18	43.009.900	0	419.580	5	5.825.804	8	15.624.510	0	18.957.600	13	40.827.494	13	40.827.494	216,67	14,73	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
278		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Capaian Riset Daerah	100	5.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
279		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			5.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
280		Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
281	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			161.729.069.421	0	0		19.643.072.937		1.606.213.060		2.018.680.036		8.102.828.176		7.296.295.169		19.024.016.441		19.024.016.441			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
282		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	20.952.750.960	0	0	100	3.985.892.837		899.668.288		878.962.626		899.572.876	96,77	817.719.710	96,77	3.495.923.500	96,77	3.495.923.500	96,77	16,68	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
283		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			216.964.672	0	0		16.042.800		0		10.227.253		599.400		4.095.900		14.922.553		14.922.553			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
284		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72	99.864.862	0	0	4	10.532.800	0	0	2	6.484.710	0	599.400	2	2.697.300	4	9.781.410	4	9.781.410	5,56	9,79	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
285		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	117.099.810	0	0	21	5.510.000	0	0	3	3.742.543	5	0	7	1.398.600	15	5.141.143	15	5.141.143	20,83	4,39	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
286		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.924.234.857	0	0		3.144.238.451		747.818.238		748.723.578		578.543.892		647.408.751		2.722.494.459		2.722.494.459			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
287		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245	3.376.409.351	0	0	37	3.069.575.851	0	731.093.238	0	728.584.853	0	561.818.892	37	626.454.951	37	2.647.951.934	37	2.647.951.934	15,1	78,43	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
288		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	12.517.380.181	0	0	12	69.671.300	0	16.725.000	3	17.653.515	3	16.725.000	3	18.525.000	9	69.628.515	9	69.628.515	150	0,56	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
289		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0	14	4.991.300	0	0	4	2.485.210	3	0	4	2.428.800	11	4.914.010	11	4.914.010	0	0	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
290		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	30.445.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
291		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
292		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
293		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
294		Administrasi Umum Perangkat Daerah			366.572.798	0	0		48.923.295		3.160.000		4.622.472		27.965.130		11.221.515		46.969.117		46.969.117			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
295		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	101.327.145	0	0	2	16.611.295	0	0	0	2.059.272	2	12.247.630	0	1.308.135	2	15.615.037	2	15.615.037	28,57	15,41	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
296		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	265.245.653	0	0	12	32.312.000	0	3.160.000	3	2.563.200	3	15.717.500	3	9.913.380	9	31.354.080	9	31.354.080	52,94	11,82	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
297		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			107.197.924	0	0		10.088.600		0		4.018.200		0		6.060.600		10.078.800		10.078.800			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
298		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22	107.197.924	0	0	2	10.088.600	0	0	1	4.018.200	1	0	0	6.060.600	2	10.078.800	2	10.078.800	9,09	9,4	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
299		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.680.413.162	0	0		273.402.235		66.998.223		56.654.909		67.036.342		65.150.008		255.839.482		255.839.482			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
300		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	480.978.672	0	0	12	78.849.891	0	15.934.548	3	14.741.720	3	14.547.207	3	19.270.140	9	64.493.615	9	64.493.615	52,94	13,41	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
301		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	1.199.434.490	0	0	12	194.552.344	0	51.063.675	3	41.913.189	3	52.489.135	3	45.879.868	9	191.345.867	9	191.345.867	52,94	15,95	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
302		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.623.367.547	0	0		493.197.456		81.691.827		54.716.214		225.428.112		83.782.936		445.619.089		445.619.089			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
303		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	530.633.762	0	0	17	86.990.150	0	11.819.800	7	15.501.400	3	20.754.000	5	29.551.100	15	77.626.300	15	77.626.300	14,71	14,63	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
304		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1.461.590.920	0	0	1	145.794.800	0	689.949	1	1.590.657	0	140.922.606	0	1.083.600	1	144.286.812	1	144.286.812	16,67	9,87	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
305		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	379.152.360	0	0	15	8.422.000	0	730.000	5	4.235.000	2	1.420.000	4	1.965.000	11	8.350.000	11	8.350.000	55	2,2	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
306		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	251.990.506	0	0	1	251.990.506	0	68.452.078	0	33.389.157	0	62.331.506	1	51.183.236	1	215.355.977	1	215.355.977	16,67	85,46	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
307		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya	######	8.204.549.675	0	0	######	1.296.102.000		0		0	######	790.916.534	######	474.882.600	######	1.265.799.134	######	1.265.799.134	95,48	15,43	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
308		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.204.549.675	0	0		1.296.102.000		0		0		790.916.534		474.882.600		1.265.799.134		1.265.799.134			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
309		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	16	8.204.549.675	0	0	1	1.296.102.000	0	0	0	0	0	790.916.534	1	474.882.600	1	1.265.799.134	1	1.265.799.134	6,25	15,43	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
310		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Program	100	132.571.768.786	0	0		14.361.078.100		706.544.772		1.139.717.410		6.412.338.766		6.003.692.859		14.262.293.807		14.262.293.807		10,76	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
311			Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	10				7						7		7		7		7		70		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
312			Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	267				225						216		229		229		229		85,77		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
313			Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	72				62						57		62		62		62		86,11		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
314			Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	88,01				81,2						79,84		81,74		81,74		81,74		92,88		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
315		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			29.340.584.882	0	0		1.168.136.400		163.984.408		75.521.431		705.782.916		219.791.200		1.165.079.955		1.165.079.955			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
316		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	17	1.764.717.590	0	0	2	217.536.000	0	53.731.620	0	0	0	156.129.516	1	7.555.500	1	217.416.636	1	217.416.636	5,88	12,32	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
317		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	22	5.422.498.417	0	0	2	748.775.400	0	11.296.659	0	46.874.000	0	480.886.600	2	207.077.700	2	746.134.959	2	746.134.959	9,09	13,76	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
318		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	6	22.153.368.875	0	0	1	201.825.000	0	98.956.129	0	28.647.431	0	68.766.800	1	5.158.000	1	201.528.360	1	201.528.360	16,67	0,91	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
319		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			17.912.992.943	0	0		367.851.500		84.415.231		54.118.869		171.283.645		57.583.632		367.401.377		367.401.377			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
320		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	10	14.466.917.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
321		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	81	2.503.660.581	0	0	21	367.851.500	0	84.415.231	0	54.118.869	0	171.283.645	21	57.583.632	21	367.401.377	21	367.401.377	25,93	14,67	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
322		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	10	942.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
323		Pengelolaan Taman Budaya			14.075.085.861	0	0		2.329.801.000		280.751.740		220.879.788		1.076.380.058		708.943.141		2.286.954.727		2.286.954.727			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
324		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	6	14.075.085.861	0	0	1	2.329.801.000	0	280.751.740	0	220.879.788	0	1.076.380.058	1	708.943.141	1	2.286.954.727	1	2.286.954.727	16,67	16,25	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
325		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			2.625.635.179	0	0		318.439.800		0		0		0		311.677.313		311.677.313		311.677.313			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
326		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	81	2.625.635.179	0	0	6	318.439.800	0	0	0	0	0	0	6	311.677.313	6	311.677.313	6	311.677.313	7,41	11,87	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
327		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			68.617.469.922	0	0		10.176.849.400		177.393.393		789.197.322		4.458.892.147		4.705.697.573		10.131.180.435		10.131.180.435			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
328		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	12	4.677.401.408	0	0	2	650.199.500	0	0	0	0	0	650.084.881	2	0	2	650.084.881	2	650.084.881	16,67	13,9	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
329		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	11	4.127.250.000	0	0	2	589.344.000	0	3.917.079	0	0	0	0	1	582.968.918	1	586.885.997	1	586.885.997	9,09	14,22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
330		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	17	5.083.183.000	0	0	2	750.000.000	0	0	0	8.635.483	0	592.144.220	2	136.992.500	2	737.772.203	2	737.772.203	11,76	14,51	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
331		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	30	1.881.500.000	0	0	5	300.000.000	0	0	0	0	0	0	5	299.979.636	5	299.979.636	5	299.979.636	16,67	15,94	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
332		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	18	2.796.633.316	0	0	3	449.879.200	0	0	0	0	0	0	3	449.696.754	3	449.696.754	3	449.696.754	16,67	16,08	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
333		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	35	16.526.663.478	0	0	5	1.960.229.500	0	14.355.180	0	9.027.000	1	334.713.500	0	1.591.175.430	1	1.949.271.110	1	1.949.271.110	2,86	11,79	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
334		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	16	867.172.450	0	0	2	130.057.500	0	0	0	62.296.452	0	0	2	65.767.500	2	128.063.952	2	128.063.952	12,5	14,77	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
335		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	450	2.892.840.965	0	0	75	464.497.000	0	70.610.125	0	0	75	387.590.046	0	0	75	458.200.171	75	458.200.171	16,67	15,84	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
336		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	31	7.093.204.321	0	0	5	970.606.200	0	0	0	413.224.300	0	385.530.540	5	168.678.121	5	967.432.961	5	967.432.961	16,13	13,64	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
337		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni Seni	17	16.724.513.590	0	0	4	3.296.159.000	0	0	0	237.268.947	0	1.650.590.000	1	1.400.122.714	1	3.287.981.661	1	3.287.981.661	5,88	19,66	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
338		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	27	5.947.107.395	0	0	2	615.877.500	0	88.511.009	0	58.745.140	0	458.238.960	2	10.316.000	2	615.811.109	2	615.811.109	7,41	10,35	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
339	Meningkatnya Kemandirian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			9.861.377.486	0	0		859.350.405		0		0		683.149.689		175.680.059		858.829.748		858.829.748			Dinas Kelautan dan Perikanan
340		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Program	100	9.861.377.486	0	0		859.350.405		0		0		683.149.689		175.680.059		858.829.748		858.829.748		8,71	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
341			Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	72,69				67,46						70,5		70,15		70,15		70,15		96,5		Dinas Kelautan dan Perikanan
342			Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	100				50						50		50		50		50		50		Dinas Kelautan dan Perikanan
343		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			9.861.377.486	0	0		859.350.405		0		0		683.149.689		175.680.059		858.829.748		858.829.748			Dinas Kelautan dan Perikanan
344		Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	59	9.861.377.486	0	0	6	859.350.405	0	0	2	0	2	683.149.689	2	175.680.059	6	858.829.748	6	858.829.748	10,17	8,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
345		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			23.792.196.057	0	0		4.028.626.873		826.340.591		1.276.619.762		798.016.048		934.923.762		3.835.900.163		3.835.900.163			Dinas Kelautan dan Perikanan
346		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	19.985.336.778	0	0	100	3.071.647.101		784.273.951		865.123.808		671.669.149	100	646.098.237	100	2.967.165.145	100	2.967.165.145	100	14,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
347		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			61.643.450	0	0		13.361.800		599.400		9.287.968		493.950		1.361.500		11.742.818		11.742.818			Dinas Kelautan dan Perikanan
348		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	31.920.100	0	0	4	8.767.200	0	299.700	0	6.214.251	2	493.950	2	862.000	4	7.869.901	4	7.869.901	26,67	24,66	Dinas Kelautan dan Perikanan
349		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	29.723.350	0	0	21	4.594.600	0	299.700	3	3.073.717	7	0	5	499.500	15	3.872.917	15	3.872.917	11,9	13,03	Dinas Kelautan dan Perikanan
350		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.751.062.596	0	0		2.708.034.046		735.563.111		764.343.822		569.869.986		543.275.003		2.613.051.922		2.613.051.922			Dinas Kelautan dan Perikanan
351		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.623	16.431.255.796	0	0	33	2.654.126.046	0	729.163.111	0	746.639.339	0	556.480.326	33	532.025.003	33	2.564.307.779	33	2.564.307.779	1,26	15,61	Dinas Kelautan dan Perikanan
352		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	304.700.000	0	0	1	51.450.000	0	6.400.000	0	15.825.000	0	13.050.000	1	11.250.000	1	46.525.000	1	46.525.000	16,67	15,27	Dinas Kelautan dan Perikanan
353		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	15.106.800	0	0	14	2.458.000	0	0	4	1.879.483	4	339.660	4	0	12	2.219.143	12	2.219.143	14,29	14,69	Dinas Kelautan dan Perikanan
354		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32.981.600	0	0		3.216.000		0		2.000.000		1.162.747		0		3.162.747		3.162.747			Dinas Kelautan dan Perikanan
355		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	7.981.600	0	0	1	1.216.000	0	0	0	0	0	1.162.747	1	0	1	1.162.747	1	1.162.747	16,67	14,57	Dinas Kelautan dan Perikanan
356		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	25.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	12,5	8	Dinas Kelautan dan Perikanan
357		Administrasi Umum Perangkat Daerah			387.266.250	0	0		29.475.000		5.324.160		6.891.373		8.484.606		7.777.312		28.477.451		28.477.451			Dinas Kelautan dan Perikanan
358		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	69.244.500	0	0	15	11.272.500	0	495.000	15	3.321.453	0	4.127.030	0	3.044.732	15	10.988.215	15	10.988.215	20,83	15,87	Dinas Kelautan dan Perikanan
359		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	318.021.750	0	0	12	18.202.500	0	4.829.160	2	3.569.920	4	4.357.576	3	4.732.580	9	17.489.236	9	17.489.236	52,94	5,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
360		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			452.087.027	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kelautan dan Perikanan
361		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	452.087.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
362		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.285.336.199	0	0		201.830.655		28.800.680		45.812.314		49.676.160		71.555.372		195.844.526		195.844.526			Dinas Kelautan dan Perikanan
363		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	385.575.799	0	0	12	55.096.255	0	8.740.718	2	10.874.703	4	14.506.409	3	17.218.861	9	51.340.691	9	51.340.691	52,94	13,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
364		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	899.760.400	0	0	12	146.734.400	0	20.059.962	3	34.937.611	3	35.169.751	3	54.336.511	9	144.503.835	9	144.503.835	52,94	16,06	Dinas Kelautan dan Perikanan
365		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.014.959.656	0	0		115.729.600		13.986.600		36.788.331		41.981.700		22.129.050		114.885.681		114.885.681			Dinas Kelautan dan Perikanan
366		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	282	778.896.000	0	0	47	102.724.500	0	12.536.600	2	32.776.300	8	35.258.700	31	22.129.050	41	102.700.650	41	102.700.650	14,54	13,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
367		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	156.089.656	0	0	1	5.016.900	0	0	1	2.410.000	0	1.900.000	0	0	1	4.310.000	1	4.310.000	8,33	2,76	Dinas Kelautan dan Perikanan
368		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82	79.974.000	0	0	11	7.988.200	0	1.450.000	6	1.602.031	0	4.823.000	0	0	6	7.875.031	6	7.875.031	7,32	9,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
369		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	######	957.569.267	0	0	######	109.238.572		16.794.536		26.281.117	######	38.256.831	######	17.667.076	######	98.999.560	######	98.999.560	99,02	10,34	Dinas Kelautan dan Perikanan
370		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			321.795.423	0	0		15.216.500		0		1.057.830		8.101.380		1.626.480		10.785.690		10.785.690			Dinas Kelautan dan Perikanan
371		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	56	321.795.423	0	0	8	15.216.500	0	0	0	1.057.830	8	8.101.380	0	1.626.480	8	10.785.690	8	10.785.690	14,29	3,35	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
372		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			159.811.500	0	0		24.905.800		0		12.273.790		8.555.960		2.709.514		23.539.264		23.539.264			Dinas Kelautan dan Perikanan
373		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	450	159.811.500	0	0	75	24.905.800	0	0	75	12.273.790	0	8.555.960	0	2.709.514	75	23.539.264	75	23.539.264	16,67	14,73	Dinas Kelautan dan Perikanan
374		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			475.962.344	0	0		69.116.272		16.794.536		12.949.497		21.599.491		13.331.082		64.674.606		64.674.606			Dinas Kelautan dan Perikanan
375		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6	475.962.344	0	0	1	69.116.272	0	16.794.536	0	12.949.497	0	21.599.491	1	13.331.082	1	64.674.606	1	64.674.606	16,67	13,59	Dinas Kelautan dan Perikanan
376		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	######	2.448.805.603	0	0	######	728.041.800		24.783.500		317.773.222	######	60.582.508	######	256.514.200	######	659.653.430	######	659.653.430	97,84	26,94	Dinas Kelautan dan Perikanan
377		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			1.569.734.824	0	0		569.014.600		1.166.400		279.218.566		4.964.660		230.270.000		515.619.626		515.619.626			Dinas Kelautan dan Perikanan
378		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	34	1.569.734.824	0	0	10	569.014.600	0	1.166.400	9	279.218.566	0	4.964.660	1	230.270.000	10	515.619.626	10	515.619.626	29,41	32,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
379		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			879.070.779	0	0		159.027.200		23.617.100		38.554.656		55.617.848		26.244.200		144.033.804		144.033.804			Dinas Kelautan dan Perikanan
380		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	13	392.436.800	0	0	1	63.218.400	0	0	0	14.370.930	0	37.456.460	1	8.657.600	1	60.484.990	1	60.484.990	7,69	15,41	Dinas Kelautan dan Perikanan
381		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	354	486.633.979	0	0	59	95.808.800	0	23.617.100	0	24.183.726	0	18.161.388	59	17.586.600	59	83.548.814	59	83.548.814	16,67	17,17	Dinas Kelautan dan Perikanan
382		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	73	54.319.300	0	0	67	39.319.300		0		32.775.580		2.975.000	90	1.798.776	90	37.549.356	90	37.549.356	123,29	69,13	Dinas Kelautan dan Perikanan
383		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			54.319.300	0	0		39.319.300		0		32.775.580		2.975.000		1.798.776		37.549.356		37.549.356			Dinas Kelautan dan Perikanan
384		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
385		Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
386		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	180	44.319.300	0	0	30	39.319.300	0	0	30	32.775.580	0	2.975.000	0	1.798.776	30	37.549.356	30	37.549.356	16,67	84,72	Dinas Kelautan dan Perikanan
387		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Ikan	######	346.165.109	0	0	######	80.380.100		488.604		34.666.035	######	24.532.560	######	12.845.473	######	72.532.672	######	72.532.672	163,41	20,95	Dinas Kelautan dan Perikanan
388		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			0	0	0		41.417.300		488.604		12.112.716		16.832.700		5.381.173		34.815.193		34.815.193			Dinas Kelautan dan Perikanan
389		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			0	0	70	41.417.300	0	488.604	0	12.112.716	0	16.832.700	70	5.381.173	70	34.815.193	70	34.815.193	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
390		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			346.165.109	0	0		38.962.800		0		22.553.319		7.699.860		7.464.300		37.717.479		37.717.479			Dinas Kelautan dan Perikanan
391		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	120	346.165.109	0	0	20	38.962.800	0	0	4	22.553.319	6	7.699.860	8	7.464.300	18	37.717.479	18	37.717.479	15	10,9	Dinas Kelautan dan Perikanan
392	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			28.582.506.259	0	0		4.727.177.108		992.169.522		1.356.423.352		893.716.131		1.211.370.609		4.453.679.614		4.453.679.614			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
393		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	24.188.885.556	0	0	100	4.032.154.758		948.821.622		953.225.885		792.327.914	100	1.127.600.195	100	3.821.975.616	100	3.821.975.616	100	15,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
394		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.000.490	0	0		11.470.600		3.735.700		4.711.608		1.030.460		1.190.700		10.668.468		10.668.468			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
395		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	55.684.893	0	0	2	9.127.000	0	3.012.700	0	3.694.608	2	790.460	0	949.900	2	8.447.668	2	8.447.668	14,29	15,17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
396		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	57.315.597	0	0	21	2.343.600	0	723.000	4	1.017.000	5	240.000	4	240.800	13	2.220.800	13	2.220.800	16,05	3,87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
397		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.102.937.411	0	0		3.013.493.550		783.503.319		810.779.430		631.385.537		618.132.447		2.843.800.733		2.843.800.733			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
398		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	841	17.821.245.328	0	0	616	2.971.135.850	0	772.570.369	0	801.270.630	0	620.534.937	616	608.364.347	616	2.802.740.283	616	2.802.740.283	73,25	15,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
399		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	253.605.051	0	0	4	39.310.300	0	10.013.950	1	8.700.000	1	10.073.600	1	9.511.300	3	38.298.850	3	38.298.850	17,65	15,1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
400		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	28.087.032	0	0	14	3.047.400	0	919.000	3	808.800	4	777.000	3	256.800	10	2.761.600	10	2.761.600	11,9	9,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
401		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			31.223.600	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
402		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300	31.223.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
403		Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.366.055	0	0		18.196.000		0		264.600		2.341.880		7.429.020		10.035.500		10.035.500			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
404		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	95.300.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
405		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	128.066.000	0	0	4	18.196.000	0	0	2	264.600	1	2.341.880	1	7.429.020	4	10.035.500	4	10.035.500	16,67	7,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
406		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			709.984.500	0	0		83.573.458		0		240.870		15.831.325		66.116.640		82.188.835		82.188.835			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
407		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49	490.329.600	0	0	3	16.951.800	0	0	0	240.870	3	15.831.325	0	623.220	3	16.695.415	3	16.695.415	6,12	3,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
408		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	99.654.900	0	0	3	66.621.658	0	0	0	0	0	0	3	65.493.420	3	65.493.420	3	65.493.420	20	65,72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
409		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
410		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.614.651.563	0	0		560.007.800		151.149.980		118.693.793		124.655.672		140.043.038		534.542.483		534.542.483			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
411		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	673.137.624	0	0	12	109.987.944	0	23.146.217	3	22.757.701	3	24.250.611	3	25.487.343	9	95.641.872	9	95.641.872	52,94	14,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
412		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	15.777.400	0	0	13	19.474.400	0	1.374.000	3	1.311.250	3	3.000.377	4	10.175.267	10	15.860.894	10	15.860.894	76,92	100,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
413		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	2.925.736.539	0	0	12	430.545.456	0	126.629.763	3	94.624.842	3	97.404.684	3	104.380.428	9	423.039.717	9	423.039.717	50	14,46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
414		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.393.721.937	0	0		345.413.350		10.432.623		18.535.584		17.083.040		294.688.350		340.739.597		340.739.597			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
415		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	373.483.450	0	0	8	61.681.950	0	8.358.043	2	12.054.876	2	12.850.180	2	26.953.083	6	60.216.182	6	60.216.182	12,77	16,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
416		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	550.654.800	0	0	17	88.732.400	0	824.580	2	1.328.708	11	1.213.080	4	84.021.450	17	87.387.818	17	87.387.818	16,67	15,87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
417		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	427.585.887	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	1	219.780	0	173.019.517	1	173.239.297	1	173.239.297	20	40,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
418		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	84	41.997.800	0	0	17	19.999.000	0	1.250.000	5	5.152.000	5	2.800.000	3	10.694.300	13	19.896.300	13	19.896.300	15,48	47,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
419		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Memiliki Kartu Identitas	92,32	2.954.757.388	0	0	92,17	468.071.100		22.245.545		357.413.179	90,74	25.955.121	91,62	14.434.134	91,62	420.047.979	91,62	420.047.979	99,24	14,22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
420		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.954.757.388	0	0		468.071.100		22.245.545		357.413.179		25.955.121		14.434.134		420.047.979		420.047.979			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
421		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6	123.549.777	0	0	1	20.156.400	0	0	0	5.599.814	1	14.192.560	0	170.000	1	19.962.374	1	19.962.374	16,67	16,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
422		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	288.000	2.769.322.046	0	0	48000	437.655.300	0	22.245.545	17037	343.931.815	19121	11.082.561	21155	12.813.094	57.313	390.073.015	57.313	390.073.015	19,9	14,09	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
423		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.818	61.885.565	0	0	2303	10.259.400	0	0	1913	7.881.550	2742	680.000	2813	1.451.040	7.468	10.012.590	7.468	10.012.590	54,05	16,18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
424		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	99,75	730.470.997	0	0	99,5	117.790.000		9.315.465		28.167.920	99,61	27.057.228	99,65	39.304.290	99,65	103.844.903	99,65	103.844.903	99,9	14,22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
425		Pelayanan Pencatatan Sipil			524.550.600	0	0		87.368.400		9.315.465		21.628.465		4.895.068		38.166.440		74.005.438		74.005.438			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
426		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.000	211.416.000	0	0	5000	32.770.500	0	1.665.900	1488	17.129.210	1359	3.615.068	1405	2.522.500	4.252	24.932.678	4.252	24.932.678	14,17	11,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
427		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	31.000	313.134.600	0	0	6000	54.597.900	0	7.649.565	1336	4.499.255	1701	1.280.000	1693	35.643.940	4.730	49.072.760	4.730	49.072.760	15,26	15,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
428		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			205.920.397	0	0		30.421.600		0		6.539.455		22.162.160		1.137.850		29.839.465		29.839.465			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
429		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	810	205.920.397	0	0	135	30.421.600	0	0	32	6.539.455	38	22.162.160	40	1.137.850	110	29.839.465	110	29.839.465	13,58	14,49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
430		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Inovasi Pelayanan	2	556.541.138	0	0	2	86.055.400		11.786.890		17.416.568	2	26.289.448	2	29.228.990	2	84.721.896	2	84.721.896	100	15,22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
431		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			259.557.250	0	0		41.370.250		9.557.390		4.998.000		16.874.388		9.849.150		41.278.928		41.278.928			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
432		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	259.557.250	0	0	2	41.370.250	0	9.557.390	0	4.998.000	1	16.874.388	1	9.849.150	2	41.278.928	2	41.278.928	16,67	15,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
433		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			208.103.400	0	0		31.422.750		1.252.380		8.241.284		6.955.800		13.962.760		30.412.224		30.412.224			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
434		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	18	68.480.200	0	0	3	10.159.950	0	892.740	2	3.311.665	0	4.081.800	0	1.164.400	2	9.450.605	2	9.450.605	11,11	13,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
435		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18	139.623.200	0	0	3	21.262.800	0	359.640	0	4.929.619	2	2.874.000	0	12.798.360	2	20.961.619	2	20.961.619	11,11	15,01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
436		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			88.880.488	0	0		13.262.400		977.120		4.177.284		2.459.260		5.417.080		13.030.744		13.030.744			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
437		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	7	88.880.488	0	0	2	13.262.400	0	977.120	1	4.177.284	0	2.459.260	1	5.417.080	2	13.030.744	2	13.030.744	28,57	14,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
438		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	151.851.180	0	0	100	23.105.850		0		199.800	100	22.086.420	100	803.000	100	23.089.220	100	23.089.220	100	15,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
439		Penyusunan Profil Kependudukan			151.851.180	0	0		23.105.850		0		199.800		22.086.420		803.000		23.089.220		23.089.220			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
440		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	6	151.851.180	0	0	1	23.105.850	0	0	1	199.800	0	22.086.420	0	803.000	1	23.089.220	1	23.089.220	16,67	15,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
441	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			357.054.084.874	0	0		186.113.822.229		39.993.650.573		45.805.974.230		42.620.836.047		44.512.157.416		172.932.618.266		172.932.618.266			Dinas Kesehatan
442		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	116.860.305.121	0	0	100	148.341.783.648		34.287.719.277		37.395.238.706		33.003.551.667	100	36.073.425.348	100	140.759.934.998	100	140.759.934.998	100	120,45	Dinas Kesehatan
443		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.053.419.644	0	0		47.446.769		4.361.080		12.464.235		9.347.890		11.669.775		37.842.980		37.842.980			Dinas Kesehatan
444		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	1.448.979.398	0	0	4	32.502.769	0	3.764.920	0	8.731.410	0	6.329.410	0	5.122.175	0	23.947.915	0	23.947.915	0	1,65	Dinas Kesehatan
445		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46	604.440.246	0	0	21	14.944.000	0	596.160	0	3.732.825	0	3.018.480	21	6.547.600	21	13.895.065	21	13.895.065	45,65	2,3	Dinas Kesehatan
446		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			98.058.675.093	0	0		95.966.117.073		26.028.354.120		26.111.662.273		19.652.502.218		19.943.173.558		91.735.692.169		91.735.692.169			Dinas Kesehatan
447		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.530	95.703.138.673	0	0	755	95.703.138.673	0	26.023.819.377	0	26.046.112.776	0	19.586.953.418	755	19.817.477.017	755	91.474.362.588	755	91.474.362.588	16,67	95,58	Dinas Kesehatan
448		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	299	2.209.243.901	0	0	1	247.950.000	0	0	0	60.900.000	0	64.350.000	1	122.700.000	1	247.950.000	1	247.950.000	0,33	11,22	Dinas Kesehatan
449		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	146.292.519	0	0	12	15.028.400	0	4.534.743	3	4.649.497	3	1.198.800	2	2.996.541	8	13.379.581	8	13.379.581	40	9,15	Dinas Kesehatan
450		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			701.781.246	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kesehatan
451		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	409.987.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
452		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	291.793.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
453		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.995.113.712	0	0		132.153.400		20.877.653		17.126.137		16.551.169		21.247.007		75.801.966		75.801.966			Dinas Kesehatan
454		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	751.787.957	0	0	1	45.902.400	0	13.027.973	0	7.888.125	0	7.447.317	1	8.000.201	1	36.363.616	1	36.363.616	16,67	4,84	Dinas Kesehatan
455		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	1.243.325.755	0	0	1	86.251.000	0	7.849.680	0	9.238.012	0	9.103.852	1	13.246.806	1	39.438.350	1	39.438.350	16,67	3,17	Dinas Kesehatan
456		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.713.800	0	0		8.713.800		984.310		730.000		2.040.100		1.284.000		5.038.410		5.038.410			Dinas Kesehatan
457		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
458		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	8.713.800	0	0	61	8.713.800	0	984.310	0	730.000	0	2.040.100	61	1.284.000	61	5.038.410	61	5.038.410	338,89	57,82	Dinas Kesehatan
459		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.866.502.555	0	0		428.072.959		133.291.983		97.400.225		79.884.372		71.573.361		382.149.941		382.149.941			Dinas Kesehatan
460		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	3.309.726.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
461		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	3.556.776.444	0	0	1	428.072.959	0	133.291.983	0	97.400.225	0	79.884.372	1	71.573.361	1	382.149.941	1	382.149.941	16,67	10,74	Dinas Kesehatan
462		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.171.099.071	0	0		871.343.570		276.383.542		159.750.702		173.198.239		187.033.671		796.366.154		796.366.154			Dinas Kesehatan
463		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	2.920.903.716	0	0	39	301.971.350	0	72.044.101	2	62.352.607	6	69.186.759	20	82.536.087	28	286.119.554	28	286.119.554	116,67	9,8	Dinas Kesehatan
464		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	4.250.195.355	0	0	3	569.372.220	0	204.339.441	0	97.398.095	0	104.011.480	3	104.497.584	3	510.246.600	3	510.246.600	50	12,01	Dinas Kesehatan
465		Peningkatan Pelayanan BLUD			5.000.000	0	0		50.887.936.077		7.823.466.589		10.996.105.134		13.070.027.679		15.837.443.976		47.727.043.378		47.727.043.378			Dinas Kesehatan
466		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	126	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
467		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Galur I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.638.151.573	0	281.980.781	0	279.610.296	0	282.202.611	1	578.711.564	1	1.422.505.252	1	1.422.505.252	0	0	Dinas Kesehatan
468		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Galur I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	679.510.000	0	22.267.500	0	78.742.125	0	300.042.114	1	217.311.782	1	618.363.521	1	618.363.521	0	0	Dinas Kesehatan
469		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Galur II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.188.274.080	0	238.373.527	0	235.885.320	0	282.400.431	1	407.856.142	1	1.164.515.420	1	1.164.515.420	0	0	Dinas Kesehatan
470		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Galur II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	499.791.000	0	21.112.272	0	17.364.143	0	276.739.812	1	152.771.180	1	467.987.407	1	467.987.407	0	0	Dinas Kesehatan
471		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Girimulyo I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.102.197.056	0	191.202.841	0	223.086.273	0	195.692.144	1	310.350.122	1	920.331.380	1	920.331.380	0	0	Dinas Kesehatan
472		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Girimulyo I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	584.015.000	0	5.967.396	0	52.228.604	0	294.018.807	1	198.249.670	1	550.464.477	1	550.464.477	0	0	Dinas Kesehatan
473		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Girimulyo II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.533.973.896	0	212.918.975	0	304.743.918	0	409.799.211	1	402.421.920	1	1.329.884.024	1	1.329.884.024	0	0	Dinas Kesehatan
474		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Girimulyo II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	526.390.000	0	3.027.440	0	115.124.560	0	196.365.244	1	194.698.522	1	509.215.766	1	509.215.766	0	0	Dinas Kesehatan
475		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Kalibawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	2.810.506.146	0	587.661.373	0	603.825.699	0	660.729.166	1	932.543.837	1	2.784.760.075	1	2.784.760.075	0	0	Dinas Kesehatan
476		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Kalibawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	753.840.000	0	8.801.500	0	138.512.375	0	326.923.871	1	248.771.313	1	723.009.059	1	723.009.059	0	0	Dinas Kesehatan
477		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Kokap I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.640.631.840	0	374.768.739	0	310.206.076	0	389.067.752	1	471.644.489	1	1.545.687.056	1	1.545.687.056	0	0	Dinas Kesehatan
478		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Kokap I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	613.586.000	0	13.132.152	0	166.125.848	0	171.246.782	1	228.027.540	1	578.532.322	1	578.532.322	0	0	Dinas Kesehatan
479		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Kokap II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	986.624.960	0	171.247.931	0	217.308.871	0	237.196.013	1	304.616.577	1	930.369.392	1	930.369.392	0	0	Dinas Kesehatan
480		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Kokap II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	521.886.000	0	18.166.148	0	46.134.352	0	264.551.644	1	141.685.438	1	470.537.582	1	470.537.582	0	0	Dinas Kesehatan
481		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Lendah I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.314.859.795	0	307.332.082	0	246.980.408	0	322.150.157	1	404.551.987	1	1.281.014.634	1	1.281.014.634	0	0	Dinas Kesehatan
482		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Lendah I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	591.202.000	0	1.992.706	0	222.519.044	0	143.747.226	1	206.688.749	1	574.947.725	1	574.947.725	0	0	Dinas Kesehatan
483		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Lendah II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.722.568.448	0	344.014.262	0	379.795.407	0	354.104.841	1	463.072.840	1	1.540.987.350	1	1.540.987.350	0	0	Dinas Kesehatan
484		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Lendah II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	622.807.000	0	36.608.508	0	187.523.492	0	121.078.314	1	223.065.156	1	568.275.470	1	568.275.470	0	0	Dinas Kesehatan
485		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Nanggulan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	2.502.070.665	0	438.238.904	0	519.412.155	0	521.526.881	1	650.110.919	1	2.129.288.859	1	2.129.288.859	0	0	Dinas Kesehatan
486		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Nanggulan	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	756.785.000	0	16.682.250	0	257.781.126	0	216.162.356	1	244.405.897	1	735.031.629	1	735.031.629	0	0	Dinas Kesehatan
487		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Panjatan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.647.085.754	0	318.652.526	0	402.414.852	0	363.558.645	1	497.326.016	1	1.581.952.039	1	1.581.952.039	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
488		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Panjatan I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	666.490.000	0	4.944.983	0	177.089.184	0	167.370.151	1	291.029.773	1	640.434.091	1	640.434.091	0	0	Dinas Kesehatan
489		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Panjatan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.706.655.425	0	358.125.936	0	398.483.238	0	367.298.525	1	409.950.306	1	1.533.858.005	1	1.533.858.005	0	0	Dinas Kesehatan
490		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Panjatan II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	599.109.000	0	10.314.240	0	187.450.844	0	175.972.598	1	208.255.610	1	581.993.292	1	581.993.292	0	0	Dinas Kesehatan
491		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Pengasih I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.846.293.614	0	379.112.845	0	361.723.444	0	467.418.932	1	439.938.545	1	1.648.193.766	1	1.648.193.766	0	0	Dinas Kesehatan
492		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Pengasih I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	715.311.000	0	18.519.628	0	188.190.997	0	150.181.100	1	302.073.525	1	658.965.250	1	658.965.250	0	0	Dinas Kesehatan
493		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Pengasih II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.902.684.881	0	398.962.566	0	374.957.910	0	367.532.274	1	633.283.264	1	1.774.736.014	1	1.774.736.014	0	0	Dinas Kesehatan
494		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Pengasih II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	746.120.000	0	19.574.618	0	154.823.466	0	259.612.889	1	261.219.159	1	695.230.132	1	695.230.132	0	0	Dinas Kesehatan
495		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Samigaluh I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.803.995.123	0	326.799.371	0	389.212.496	0	417.400.631	1	572.621.304	1	1.706.033.802	1	1.706.033.802	0	0	Dinas Kesehatan
496		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Samigaluh I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	569.113.000	0	9.672.176	0	103.049.949	0	210.992.886	1	223.397.596	1	547.112.607	1	547.112.607	0	0	Dinas Kesehatan
497		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Samigaluh II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.263.598.718	0	236.462.157	0	273.386.890	0	365.527.471	1	385.159.341	1	1.260.535.859	1	1.260.535.859	0	0	Dinas Kesehatan
498		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Samigaluh II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	573.813.000	0	57.994.997	0	-8.063.497	0	278.591.387	1	192.305.375	1	520.828.262	1	520.828.262	0	0	Dinas Kesehatan
499		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Sentolo I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	2.721.437.643	0	597.121.874	0	613.785.202	0	695.964.195	1	788.776.104	1	2.695.647.375	1	2.695.647.375	0	0	Dinas Kesehatan
500		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Sentolo I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	698.315.800	0	11.519.630	0	270.156.370	0	139.092.794	1	263.329.404	1	684.098.198	1	684.098.198	0	0	Dinas Kesehatan
501		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Sentolo II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	1.668.529.789	0	324.867.712	0	363.349.403	0	360.972.747	1	497.709.430	1	1.546.899.292	1	1.546.899.292	0	0	Dinas Kesehatan
502		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Sentolo II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	673.078.000	0	4.671.540	0	179.162.627	0	157.326.366	1	291.207.360	1	632.367.893	1	632.367.893	0	0	Dinas Kesehatan
503		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Temon I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	2.283.746.629	0	447.928.764	0	578.973.378	0	539.550.695	1	693.195.944	1	2.259.648.781	1	2.259.648.781	0	0	Dinas Kesehatan
504		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Temon I	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	612.914.000	0	38.358.084	0	118.626.416	0	136.860.387	1	266.232.305	1	560.077.192	1	560.077.192	0	0	Dinas Kesehatan
505		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Temon II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	995.563.695	0	237.082.078	0	230.206.975	0	252.736.062	1	272.843.078	1	992.868.193	1	992.868.193	0	0	Dinas Kesehatan
506		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Temon II	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	673.620.000	0	5.349.972	0	92.494.653	0	276.775.618	1	257.893.207	1	632.513.450	1	632.513.450	0	0	Dinas Kesehatan
507		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas Wates	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0	0	1	3.052.286.547	0	703.552.201	0	676.941.024	0	686.252.880	1	808.604.181	1	2.875.350.286	1	2.875.350.286	0	0	Dinas Kesehatan
508		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di Puskesmas Wates	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskemas			0	0	1	878.504.000	0	18.381.404	0	266.779.221	0	267.293.069	1	299.537.505	1	851.991.199	1	851.991.199	0	0	Dinas Kesehatan
509		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Program	100	232.195.730.708	0	0		36.179.416.072		5.651.183.880		7.780.056.170		8.970.181.254		8.249.915.901		30.651.337.205		30.651.337.205		13,2	Dinas Kesehatan
510			Persentase FASYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	100				83,33						93,75		93,75		93,75		93,75		93,75		Dinas Kesehatan
511			Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan:																			0		Dinas Kesehatan
512			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100				100						100		98,44		98,44		98,44		98,44		Dinas Kesehatan
513			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100				100						100		99,71		99,71		99,71		99,71		Dinas Kesehatan
514			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100				100						100		98,33		98,33		98,33		98,33		Dinas Kesehatan
515			Pelayanan Kesehatan Balita	100				100						100		98,12		98,12		98,12		98,12		Dinas Kesehatan
516			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100				100						100		98,52		98,52		98,52		98,52		Dinas Kesehatan
517			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100				100						100		114,13		114,13		114,13		114,13		Dinas Kesehatan
518			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100				100						100		103,81		103,81		103,81		103,81		Dinas Kesehatan
519			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100				100						100		103,3		103,3		103,3		103,3		Dinas Kesehatan
520			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100				100						100		116,94		116,94		116,94		116,94		Dinas Kesehatan
521			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100				100						100		99,32		99,32		99,32		99,32		Dinas Kesehatan
522			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100				100						100		168,83		168,83		168,83		168,83		Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
523			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100				100						100		104,85		104,85		104,85		104,85		Dinas Kesehatan
524			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	95,02				90,23						100		88,93		88,93		88,93		93,58		Dinas Kesehatan
525			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	100				100						100		43,01		43,01		43,01		43,01		Dinas Kesehatan
526			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99,31				99,14						100		98,98		98,98		98,98		99,67		Dinas Kesehatan
527		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			155.294.996.724	0	0		11.533.862.892		201.456.662		2.328.411.380		4.894.144.554		3.421.982.834		10.845.995.430		10.845.995.430			Dinas Kesehatan
528		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6	1.476.443.400	0	0	4	1.476.443.400	0	0	0	3.490.059	4	1.440.376.500	0	0	4	1.443.866.559	4	1.443.866.559	66,67	97,79	Dinas Kesehatan
529		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6	101.471.695.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
530		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6	4.145.677.188	0	0	1	2.133.323.900	0	164.737.941	0	3.262.657	0	878.705.498	0	756.295.060	0	1.803.001.156	0	1.803.001.156	0	43,49	Dinas Kesehatan
531		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	33.085.757.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
532		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
533		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	6.755.715.217	0	0	30	991.695.700	0	0	0	353.188.921	0	621.465.169	0	1.200.000	0	975.854.090	0	975.854.090	0	14,44	Dinas Kesehatan
534		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6	6.850.733.392	0	0	1	6.845.733.392	0	10.919.840	0	1.949.720.079	0	1.932.833.195	1	2.647.164.430	1	6.540.637.544	1	6.540.637.544	16,67	95,47	Dinas Kesehatan
535		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	6	1.508.974.675	0	0	1	86.666.500	0	25.798.881	0	18.749.664	0	20.764.192	1	17.323.344	1	82.636.081	1	82.636.081	16,67	5,48	Dinas Kesehatan
536		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			76.592.128.836	0	0		24.624.747.180		5.448.581.058		5.450.071.662		4.069.696.908		4.824.362.523		19.792.712.151		19.792.712.151			Dinas Kesehatan
537		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.562	590.906.564	0	0	3981	42.670.400	0	559.440	604	0	1098	40.801.488	843	559.440	2.545	41.920.368	2.545	41.920.368	13,01	7,09	Dinas Kesehatan
538		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.333	329.702.167	0	0	4223	54.060.000	0	6.504.300	597	18.872.700	1154	13.508.600	874	10.984.300	2.625	49.869.900	2.625	49.869.900	13,58	15,13	Dinas Kesehatan
539		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.898	412.407.362	0	0	3981	3.690.000	0	1.349.200	580	559.440	1143	559.440	866	1.118.880	2.589	3.586.960	2.589	3.586.960	13,7	0,87	Dinas Kesehatan
540		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113.947	61.795.726	0	0	21680	12.357.600	0	559.440	3356	10.687.852	7457	359.640	5056	170.000	15.869	11.776.932	15.869	11.776.932	13,93	19,06	Dinas Kesehatan
541		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318.378	1.566.686.350	0	0	53366	13.927.900	0	0	0	2.721.665	0	7.240.500	0	3.316.120	0	13.278.285	0	13.278.285	0	0,85	Dinas Kesehatan
542		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560.120	164.607.378	0	0	66964	9.250.000	0	2.526.228	20518	3.703.140	16741	457.056	16741	2.537.460	54.000	9.223.884	54.000	9.223.884	9,64	5,6	Dinas Kesehatan
543		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380.497	1.178.086.689	0	0	65727	79.706.700	0	0	8394	20.381.155	21881	2.618.880	14631	54.840.000	44.906	77.840.035	44.906	77.840.035	11,8	6,61	Dinas Kesehatan
544		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78.396	140.249.875	0	0	10447	11.425.000	0	1.091.555	2612	5.037.990	2612	2.478.120	2611	759.540	7.835	9.367.205	7.835	9.367.205	9,99	6,68	Dinas Kesehatan
545		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.120	4.890.756.939	0	0	3934	63.114.000	0	457.056	984	92.400	983	58.014.000	983	1.673.700	2.950	60.237.156	2.950	60.237.156	9,48	1,23	Dinas Kesehatan
546		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.790	83.878.820	0	0	1410	5.220.000	0	459.540	352	1.613.560	352	1.277.484	354	1.463.860	1.058	4.814.444	1.058	4.814.444	12,04	5,74	Dinas Kesehatan
547		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.508	9.155.767.605	0	0	4691	86.615.000	0	13.829.380	2100	12.940.800	1682	13.444.000	0	42.011.349	3.782	82.225.529	3.782	82.225.529	15,43	0,9	Dinas Kesehatan
548		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34.380	1.414.201.305	0	0	4248	124.815.000	0	93.226.584	1309	10.621.256	1012	11.840.036	662	9.061.128	2.983	124.749.004	2.983	124.749.004	8,68	8,82	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
549		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6	405.604.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
550		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6	43.095.569	0	0	1	2.540.000	0	995.220	0	1.076.868	0	0	1	0	1	2.072.088	1	2.072.088	16,67	4,81	Dinas Kesehatan
551		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6	70.330.400	0	0	1	65.330.400	0	2.907.640	0	2.977.520	0	49.528.880	1	9.771.040	1	65.185.080	1	65.185.080	16,67	92,68	Dinas Kesehatan
552		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6	245.810.986	0	0	1	63.109.500	0	15.896.753	0	12.814.380	0	7.296.180	1	1.818.480	1	37.825.793	1	37.825.793	16,67	15,39	Dinas Kesehatan
553		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	8.327.744.793	0	0	1	507.760.500	0	25.177.302	0	221.282.200	0	47.052.100	1	209.423.300	1	502.934.902	1	502.934.902	16,67	6,04	Dinas Kesehatan
554		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	2.244.658.947	0	0	1	341.896.400	0	8.054.517	0	148.617.604	0	54.247.188	1	122.738.517	1	333.657.826	1	333.657.826	16,67	14,86	Dinas Kesehatan
555		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6	521.060.040	0	0	1	59.860.800	0	4.156.990	0	6.445.455	0	15.427.460	1	9.515.201	1	35.545.106	1	35.545.106	16,67	6,82	Dinas Kesehatan
556		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6	7.329.046.861	0	0	1	224.419.800	0	61.451.922	0	25.376.825	0	19.376.548	1	53.235.286	1	159.440.581	1	159.440.581	16,67	2,18	Dinas Kesehatan
557		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	20.963.200.000	0	0	1	20.958.200.000	0	4.823.451.420	0	4.572.367.100	0	3.337.696.180	1	3.859.486.730	1	16.593.001.430	1	16.593.001.430	16,67	79,15	Dinas Kesehatan
558		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0	0	1	269.375.000	0	1.784.000	0	1.181.000	0	16.842.000	1	104.573.000	1	124.380.000	1	124.380.000	0	0	Dinas Kesehatan
559		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6	276.824.564	0	0	1	17.872.500	0	5.409.309	0	2.148.600	0	3.298.200	1	1.749.000	1	12.605.109	1	12.605.109	16,67	4,55	Dinas Kesehatan
560		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6	135.729.751	0	0	21	5.945.000	0	0	0	0	0	1.589.760	21	1.092.960	21	2.682.720	21	2.682.720	350	1,98	Dinas Kesehatan
561		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6	3.996.138.447	0	0	1	57.044.300	0	3.201.444	0	7.824.711	0	9.878.946	1	16.367.072	1	37.272.173	1	37.272.173	16,67	0,93	Dinas Kesehatan
562		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	2.246.440.042	0	0	1	475.166.430	0	130.080.812	0	139.995.211	0	104.036.884	1	81.998.540	1	456.111.447	1	456.111.447	16,67	20,3	Dinas Kesehatan
563		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6	214.551.944	0	0	21	14.500.850	0	896.400	0	2.454.734	21	3.714.836	0	1.892.710	21	8.958.680	21	8.958.680	350	4,18	Dinas Kesehatan
564		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6	2.015.498.296	0	0	1	12.105.000	0	1.198.800	0	1.393.740	0	2.292.260	1	3.051.540	1	7.936.340	1	7.936.340	16,67	0,39	Dinas Kesehatan
565		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6	2.862.078.771	0	0	1	423.295.300	0	121.109.026	0	77.343.476	0	103.657.282	1	59.155.850	1	361.265.634	1	361.265.634	16,67	12,62	Dinas Kesehatan
566		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6	663.893.382	0	0	336	21.800.000	0	3.901.000	99	6.813.000	84	5.966.000	84	4.632.600	267	21.312.600	267	21.312.600	######	3,21	Dinas Kesehatan
567		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6	72.714.861	0	0	141	8.090.000	0	639.360	62	3.537.560	35	2.548.000	35	1.298.700	132	8.023.620	132	8.023.620	######	11,03	Dinas Kesehatan
568		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	6	3.686.614.701	0	0	11068	307.538.800	0	73.397.920	3149	74.597.220	2767	76.216.960	2767	79.092.220	8.683	303.304.320	8.683	303.304.320	######	8,23	Dinas Kesehatan
569		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
570		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6	282.045.000	0	0	1	282.045.000	0	44.308.500	0	54.592.500	0	56.432.000	1	74.974.000	1	230.307.000	1	230.307.000	16,67	81,66	Dinas Kesehatan
571		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			87.247.598	0	0		5.250.000		1.146.160		973.728		1.742.320		377.568		4.239.776		4.239.776			Dinas Kesehatan
572		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6	87.247.598	0	0	1	5.250.000	0	1.146.160	0	973.728	0	1.742.320	1	377.568	1	4.239.776	1	4.239.776	16,67	4,86	Dinas Kesehatan
573		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			221.357.550	0	0		15.556.000		0		599.400		4.597.472		3.192.976		8.389.848		8.389.848			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
574		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
575		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
576		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6	136.353.228	0	0	40	13.246.000	0	0	40	599.400	0	3.484.640	0	2.338.480	40	6.422.520	40	6.422.520	666,67	4,71	Dinas Kesehatan
577		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	85.004.322	0	0	1	2.310.000	0	0	0	0	0	1.112.832	1	854.496	1	1.967.328	1	1.967.328	16,67	2,31	Dinas Kesehatan
578		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial	97,81	5.168.063.449	0	0	97,59	903.996.309		11.463.606		463.063.444	97,02	378.307.811	99,67	37.315.919	99,67	890.150.780	99,67	890.150.780	101,91	17,22	Dinas Kesehatan
579		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			273.936.399	0	0		15.301.200		9.135.591		1.107.500		0		3.923.397		14.166.488		14.166.488			Dinas Kesehatan
580		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
581		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	273.936.399	0	0	1	15.301.200	0	9.135.591	0	1.107.500	0	0	1	3.923.397	1	14.166.488	1	14.166.488	16,67	5,17	Dinas Kesehatan
582		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.540.634.350	0	0		133.369.109		1.331.715		20.505.944		67.549.111		33.392.522		122.779.292		122.779.292			Dinas Kesehatan
583		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
584		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6	260.324.566	0	0	49	15.888.209	0	1.013.763	0	3.812.134	0	4.777.435	49	5.372.930	49	14.976.262	49	14.976.262	816,67	5,75	Dinas Kesehatan
585		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	1.280.309.784	0	0	1	117.480.900	0	317.952	0	16.693.810	0	62.771.676	1	28.019.592	1	107.803.030	1	107.803.030	16,67	8,42	Dinas Kesehatan
586		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.353.492.700	0	0		755.326.000		996.300		441.450.000		310.758.700		0		753.205.000		753.205.000			Dinas Kesehatan
587		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6	3.353.492.700	0	0	1	755.326.000	0	996.300	0	441.450.000	0	310.758.700	1	0	1	753.205.000	1	753.205.000	16,67	22,46	Dinas Kesehatan
588		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Capaian Program	100	1.699.550.505	0	0		596.993.350		41.287.740		132.601.660		242.523.315		126.249.728		542.662.443		542.662.443		31,93	Dinas Kesehatan
589			Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pendampingan	36,67				22,22						15		22,73		22,73		22,73		61,98		Dinas Kesehatan
590			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	24,65				6,16						5,88		8,4		8,4		8,4		34,09		Dinas Kesehatan
591		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			83.188.399	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kesehatan
592		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	83.188.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
593		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			456.549.338	0	0		392.513.350		0		104.737.660		155.486.075		89.419.460		349.643.195		349.643.195			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
594		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6	456.549.338	0	0	1	392.513.350	0	0	0	104.737.660	0	155.486.075	1	89.419.460	1	349.643.195	1	349.643.195	16,67	76,58	Dinas Kesehatan
595		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			0	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kesehatan
596		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
597		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			1.159.812.768	0	0		204.480.000		41.287.740		27.864.000		87.037.240		36.830.268		193.019.248		193.019.248			Dinas Kesehatan
598		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	6	1.159.812.768	0	0	56	204.480.000	0	41.287.740	0	27.864.000	0	87.037.240	56	36.830.268	56	193.019.248	56	193.019.248	933,33	16,64	Dinas Kesehatan
599		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kel/Kalurahan yang Menerapkan GERMAS	100	1.130.435.091	0	0	30,68	91.632.850		1.996.070		35.014.250	14,77	26.272.000	34,09	25.250.520	34,09	88.532.840	34,09	88.532.840	34,09	7,83	Dinas Kesehatan
600		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			358.932.509	0	0		7.796.250		1.496.070		1.951.950		2.397.600		1.917.460		7.763.080		7.763.080			Dinas Kesehatan
601		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	358.932.509	0	0	1	7.796.250	0	1.496.070	0	1.951.950	0	2.397.600	1	1.917.460	1	7.763.080	1	7.763.080	16,67	2,16	Dinas Kesehatan
602		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			405.604.701	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Kesehatan
603		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	405.604.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
604		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			365.897.881	0	0		83.836.600		500.000		33.062.300		23.874.400		23.333.060		80.769.760		80.769.760			Dinas Kesehatan
605		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6	365.897.881	0	0	1	83.836.600	0	500.000	0	33.062.300	0	23.874.400	0	23.333.060	0	80.769.760	0	80.769.760	0	22,07	Dinas Kesehatan
606		SEKRETARIAT DAERAH			0	0	0		1.069.951.100		13.957.120		103.334.880		127.398.442		796.106.501		1.040.796.943		1.040.796.943			Dinas Kesehatan
607		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	47,62	0	0	0	23,81	1.069.951.100		13.957.120		103.334.880	23,81	127.398.442	23,81	796.106.501	23,81	1.040.796.943	23,81	1.040.796.943	50	0	Dinas Kesehatan
608		Peningkatan Budaya Pemerintahan			0	0	0		1.069.951.100		13.957.120		103.334.880		127.398.442		796.106.501		1.040.796.943		1.040.796.943			Dinas Kesehatan
609		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Sentolo I	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0	0	1	478.564.500	0	13.957.120	0	11.301.880	0	31.181.525	1	421.077.864	1	477.518.389	1	477.518.389	0	0	Dinas Kesehatan
610		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Girimulyo I	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0	0	1	99.967.000	0	0	0	44.400.000	0	17.808.250	1	28.326.250	1	90.534.500	1	90.534.500	0	0	Dinas Kesehatan
611		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Sentolo II	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0	0	1	239.280.000	0	0	0	28.387.400	0	8.775.825	1	197.581.497	1	234.744.722	1	234.744.722	0	0	Dinas Kesehatan
612		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Temon I	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0	0	1	119.575.800	0	0	0	11.024.000	0	35.440.277	1	66.806.042	1	113.270.319	1	113.270.319	0	0	Dinas Kesehatan
613		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Temon II	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0	0	1	132.563.800	0	0	0	8.221.600	0	34.192.565	0	82.314.848	0	124.729.013	0	124.729.013	0	0	Dinas Kesehatan
614	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			54.375.295.671	0	0		8.607.266.816		1.486.494.475		1.708.209.441		1.967.804.501		2.919.551.458		8.082.059.875		8.082.059.875			Dinas Komunikasi dan Informatika
615		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	20.311.183.206	0	0	100	3.411.847.392		813.305.693		870.991.652		727.810.598	92,59	689.230.332	92,59	3.101.338.275	92,59	3.101.338.275	92,59	15,27	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
616		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			331.591.616	0	0		48.039.600		10.947.796		15.282.603		10.762.460		10.479.798		47.472.657		47.472.657			Dinas Komunikasi dan Informatika
617		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	95.463.292	0	0	3	10.460.500	0	647.796	1	6.488.033	1	1.077.144	1	1.806.858	3	10.019.831	3	10.019.831	12,5	10,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
618		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	236.128.324	0	0	21	37.579.100	0	10.300.000	5	8.794.570	4	9.685.316	6	8.672.940	15	37.452.826	15	37.452.826	11,9	15,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
619		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.515.691.513	0	0		3.019.174.688		754.296.267		764.031.923		585.614.769		625.834.452		2.729.777.411		2.729.777.411			Dinas Komunikasi dan Informatika
620		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	17.148.539.768	0	0	40	2.970.389.988	0	741.409.440	0	752.342.864	0	574.383.726	40	613.965.272	40	2.682.101.302	40	2.682.101.302	16,67	15,64	Dinas Komunikasi dan Informatika
621		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	328.257.015	0	0	12	44.552.000	0	11.975.000	3	10.917.156	3	10.275.000	3	10.507.046	9	43.674.202	9	43.674.202	12,5	13,3	Dinas Komunikasi dan Informatika
622		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	38.894.730	0	0	14	4.232.700	0	911.827	3	771.903	4	956.043	4	1.362.134	11	4.001.907	11	4.001.907	13,1	10,29	Dinas Komunikasi dan Informatika
623		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.795.346	0	0		22.320.000		269.230		599.800		20.759.240		679.320		22.307.590		22.307.590			Dinas Komunikasi dan Informatika
624		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	13.416.766	0	0	1	1.920.000	0	269.230	0	400.000	0	759.240	1	479.520	1	1.907.990	1	1.907.990	16,67	14,22	Dinas Komunikasi dan Informatika
625		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	147.378.580	0	0	4	20.400.000	0	0	0	199.800	4	20.000.000	0	199.800	4	20.399.600	4	20.399.600	11,11	13,84	Dinas Komunikasi dan Informatika
626		Administrasi Umum Perangkat Daerah			488.220.991	0	0		49.591.700		6.023.700		16.209.318		16.636.747		9.745.363		48.615.128		48.615.128			Dinas Komunikasi dan Informatika
627		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	147.483.789	0	0	1	19.025.700	0	4.124.640	0	5.652.191	0	4.432.609	1	4.736.583	1	18.946.023	1	18.946.023	16,67	12,85	Dinas Komunikasi dan Informatika
628		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	340.737.202	0	0	1	30.566.000	0	1.899.060	0	10.557.127	0	12.204.138	1	5.008.780	1	29.669.105	1	29.669.105	16,67	8,71	Dinas Komunikasi dan Informatika
629		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			139.958.925	0	0		7.202.300		0		7.200.001		0		0		7.200.001		7.200.001			Dinas Komunikasi dan Informatika
630		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	139.958.925	0	0	4	7.202.300	0	0	4	7.200.001	0	0	0	0	4	7.200.001	4	7.200.001	16,67	5,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
631		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			764.632.092	0	0		143.581.304		25.847.427		40.830.596		40.721.958		18.227.613		125.627.594		125.627.594			Dinas Komunikasi dan Informatika
632		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	126.011.324	0	0	12	18.205.000	0	3.994.448	3	3.825.305	3	3.408.405	3	2.900.215	9	14.128.373	9	14.128.373	12,5	11,21	Dinas Komunikasi dan Informatika
633		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	508.244.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
634		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	130.376.304	0	0	1	125.376.304	0	21.852.979	0	37.005.291	0	37.313.553	1	15.327.398	1	111.499.221	1	111.499.221	16,67	85,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
635		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			910.292.723	0	0		121.937.800		15.921.273		26.837.411		53.315.424		24.263.786		120.337.894		120.337.894			Dinas Komunikasi dan Informatika
636		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96	599.720.341	0	0	16	75.033.400	0	13.784.900	3	20.026.200	4	21.279.300	4	18.564.700	11	73.655.100	11	73.655.100	11,46	12,28	Dinas Komunikasi dan Informatika
637		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	168.166.712	0	0	1	27.106.000	0	0	1	0	0	26.958.000	0	0	1	26.958.000	1	26.958.000	16,67	16,03	Dinas Komunikasi dan Informatika
638		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174	142.405.670	0	0	29	19.798.400	0	2.136.373	9	6.811.211	6	5.078.124	7	5.699.086	22	19.724.794	22	19.724.794	12,64	13,85	Dinas Komunikasi dan Informatika
639		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Capaian Program	76,19	4.891.045.303	0	0		646.194.050		58.002.843		199.147.291		111.706.980		236.051.152		604.908.266		604.908.266		12,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
640			Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	49,32				24,11						24,11		24,11		24,11		24,11		48,89		Dinas Komunikasi dan Informatika
641			Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	100				20,45						20,45		22,73		22,73		22,73		22,73		Dinas Komunikasi dan Informatika
642		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.891.045.303	0	0		646.194.050		58.002.843		199.147.291		111.706.980		236.051.152		604.908.266		604.908.266			Dinas Komunikasi dan Informatika
643		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36	1.440.147.526	0	0	6	181.172.600	0	16.298.678	1	35.300.601	2	39.806.649	3	88.489.975	6	179.895.903	6	179.895.903	16,67	12,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
644		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	36	3.450.897.777	0	0	6	465.021.450	0	41.704.165	0	163.846.690	3	71.900.331	3	147.561.177	6	425.012.363	6	425.012.363	16,67	12,32	Dinas Komunikasi dan Informatika
645		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Capaian Program	100	29.173.067.162	0	0	100	4.549.225.374		615.185.939		638.070.498		1.128.286.923		1.994.269.974		4.375.813.334		4.375.813.334	0	15	Dinas Komunikasi dan Informatika
646		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			29.173.067.162	0	0		4.549.225.374		615.185.939		638.070.498		1.128.286.923		1.994.269.974		4.375.813.334		4.375.813.334			Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
647		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			0	0	1	94.993.400	0	757.329	0	7.758.640	0	74.417.300	1	8.228.120	1	91.161.389	1	91.161.389	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
648		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	6	3.363.777.470	0	0	1	481.098.300	0	553.395	0	2.007.789	0	16.966.496	1	457.904.768	1	477.432.448	1	477.432.448	16,67	14,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
649		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	12	701.934.852	0	0	1	75.398.600	0	25.000.000	0	10.354.532	0	599.500	1	38.115.775	1	74.069.807	1	74.069.807	8,33	10,55	Dinas Komunikasi dan Informatika
650		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6	886.633.169	0	0	1	127.865.900	0	1.408.800	0	14.563.754	0	102.090.410	1	8.320.180	1	126.383.144	1	126.383.144	16,67	14,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
651		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6	23.626.794.647	0	0	40	3.687.881.274	0	586.424.677	0	596.357.350	0	867.528.517	40	1.476.550.671	40	3.526.861.215	40	3.526.861.215	666,67	14,93	Dinas Komunikasi dan Informatika
652		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	6	593.927.024	0	0	1	81.987.900	0	1.041.738	0	7.028.433	0	66.684.700	1	5.150.460	1	79.905.331	1	79.905.331	16,67	13,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
653		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.123.366.077	0	0		150.436.500		26.153.435		16.269.205		77.785.200		22.949.938		143.157.778		143.157.778			Dinas Komunikasi dan Informatika
654		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata	100	1.123.366.077	0	0	61,9	150.436.500		26.153.435		16.269.205	47,62	77.785.200	61,9	22.949.938	61,9	143.157.778	61,9	143.157.778	61,9	12,74	Dinas Komunikasi dan Informatika
655		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1.123.366.077	0	0		150.436.500		26.153.435		16.269.205		77.785.200		22.949.938		143.157.778		143.157.778			Dinas Komunikasi dan Informatika
656		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	600	1.123.366.077	0	0	100	136.316.300	0	26.153.435	0	14.637.517	0	76.805.500	100	11.947.082	100	129.543.534	100	129.543.534	16,67	11,53	Dinas Komunikasi dan Informatika
657		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			0	0	1	14.120.200	0	0	0	1.631.688	0	979.700	1	11.002.856	1	13.614.244	1	13.614.244	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
658		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.057.577.626	0	0		303.514.700		10.950.460		12.846.750		152.962.103		121.087.248		297.846.561		297.846.561			Dinas Komunikasi dan Informatika
659		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	100	2.057.577.626	0	0	20,45	303.514.700		10.950.460		12.846.750	20,45	152.962.103	22,73	121.087.248	22,73	297.846.561	22,73	297.846.561	22,73	14,48	Dinas Komunikasi dan Informatika
660		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.057.577.626	0	0		286.513.700		10.667.410		10.661.025		150.585.927		110.269.008		282.183.370		282.183.370			Dinas Komunikasi dan Informatika
661		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	22	2.057.577.626	0	0	3	286.513.700	0	10.667.410	0	10.661.025	0	150.585.927	3	110.269.008	3	282.183.370	3	282.183.370	13,64	13,71	Dinas Komunikasi dan Informatika
662		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0		17.001.000		283.050		2.185.725		2.376.176		10.818.240		15.663.191		15.663.191			Dinas Komunikasi dan Informatika
663		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			0	0	42	17.001.000	0	283.050	0	2.185.725	0	2.376.176	42	10.818.240	42	15.663.191	42	15.663.191	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
664		SEKRETARIAT DAERAH			0	0	0		3.850.635.900		0		1.146.592.305		2.225.765.856		327.464.925		3.699.823.086		3.699.823.086			Dinas Komunikasi dan Informatika
665		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi		0	0	0	100	3.850.635.900		0		1.146.592.305	100	2.225.765.856	100	327.464.925	100	3.699.823.086	100	3.699.823.086	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
666		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			0	0	0		3.850.635.900		0		1.146.592.305		2.225.765.856		327.464.925		3.699.823.086		3.699.823.086			Dinas Komunikasi dan Informatika
667		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			0	0	1	3.850.635.900	0	0	0	1.146.592.305	0	2.225.765.856	1	327.464.925	1	3.699.823.086	1	3.699.823.086	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
668	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Lingkungan Hidup
669		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Capaian Program	14,83	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	Dinas Lingkungan Hidup
670			Persentase Penanganan Sampah	14,73										29,5		29,5		29,5		29,5		200,23		Dinas Lingkungan Hidup
671			Persentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	18,4										0								0		Dinas Lingkungan Hidup
672		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			0	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Lingkungan Hidup
673		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
674		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
675		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			78.676.320.148	0	0		13.818.023.111		2.098.956.789		3.173.237.690		2.665.290.198		4.272.453.808		12.209.938.485		12.209.938.485			Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
676		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	27.516.952.780	0	0	100	4.417.396.575		806.208.339		1.287.882.420		989.596.760	96,3	1.036.657.969	96,3	4.120.345.488	96,3	4.120.345.488	96,3	14,97	Dinas Lingkungan Hidup
677		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344.430.775	0	0		50.758.400		6.428.500		19.393.186		7.748.195		4.314.015		37.883.896		37.883.896			Dinas Lingkungan Hidup
678		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	280.686.690	0	0	3	41.342.800	0	5.329.600	0	16.391.746	3	5.072.796	0	1.793.760	3	28.587.902	3	28.587.902	21,43	10,18	Dinas Lingkungan Hidup
679		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	63.744.085	0	0	21	9.415.600	0	1.098.900	4	3.001.440	5	2.675.399	4	2.520.255	13	9.295.994	13	9.295.994	16,05	14,58	Dinas Lingkungan Hidup
680		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.467.894.373	0	0		2.957.880.672		667.191.943		761.847.317		626.736.930		742.696.437		2.798.472.627		2.798.472.627			Dinas Lingkungan Hidup
681		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280	18.048.932.373	0	0	40	2.892.699.672	0	667.191.943	0	730.295.909	0	610.807.747	40	725.659.747	40	2.733.955.346	40	2.733.955.346	14,29	15,15	Dinas Lingkungan Hidup
682		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	384.900.000	0	0	1	61.150.000	0	0	0	30.350.000	0	14.625.000	1	15.950.000	1	60.925.000	1	60.925.000	16,67	15,83	Dinas Lingkungan Hidup
683		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	34.062.000	0	0	14	4.031.000	0	0	3	1.201.408	4	1.304.183	4	1.086.690	11	3.592.281	11	3.592.281	13,1	10,55	Dinas Lingkungan Hidup
684		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			477.282.600	0	0		181.957.600		0		97.096.140		83.193.390		0		180.289.530		180.289.530			Dinas Lingkungan Hidup
685		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84	477.282.600	0	0	15	181.957.600	0	0	0	97.096.140	15	83.193.390	0	0	15	180.289.530	15	180.289.530	17,86	37,77	Dinas Lingkungan Hidup
686		Administrasi Umum Perangkat Daerah			508.129.100	0	0		89.185.400		16.112.325		17.176.109		26.150.572		26.852.563		86.291.569		86.291.569			Dinas Lingkungan Hidup
687		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	114.606.600	0	0	1	15.444.900	0	330.000	0	8.399.141	0	3.685.684	1	1.099.564	1	13.514.389	1	13.514.389	16,67	11,79	Dinas Lingkungan Hidup
688		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	393.522.500	0	0	12	73.740.500	0	15.782.325	3	8.776.968	3	22.464.888	3	25.752.999	9	72.777.180	9	72.777.180	12,5	18,49	Dinas Lingkungan Hidup
689		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.029.824.600	0	0		75.409.000		3.876.120		68.154.000		3.219.000		0		75.249.120		75.249.120			Dinas Lingkungan Hidup
690		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	690.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
691		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
692		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32	339.824.600	0	0	6	75.409.000	0	3.876.120	0	68.154.000	5	3.219.000	0	0	5	75.249.120	5	75.249.120	15,63	22,14	Dinas Lingkungan Hidup
693		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.652.193.803	0	0		584.609.103		92.393.251		133.646.068		112.446.173		145.152.354		483.637.846		483.637.846			Dinas Lingkungan Hidup
694		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	1.553.199.779	0	0	12	240.962.079	0	33.083.569	3	38.388.313	3	38.789.497	3	44.795.336	9	155.056.715	9	155.056.715	52,94	9,98	Dinas Lingkungan Hidup
695		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	2.098.994.024	0	0	12	343.647.024	0	59.309.682	3	95.257.755	3	73.656.676	3	100.357.018	9	328.581.131	9	328.581.131	52,94	15,65	Dinas Lingkungan Hidup
696		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.037.197.529	0	0		477.596.400		20.206.200		190.569.600		130.102.500		117.642.600		458.520.900		458.520.900			Dinas Lingkungan Hidup
697		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	199	2.497.702.600	0	0	31	423.494.400	0	19.014.700	1	148.653.400	8	124.114.800	11	112.669.000	20	404.451.900	20	404.451.900	10,05	16,19	Dinas Lingkungan Hidup
698		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	393.904.829	0	0	2	35.175.000	0	450.000	2	33.792.000	0	450.000	0	450.000	2	35.142.000	2	35.142.000	10	8,92	Dinas Lingkungan Hidup
699		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	182	145.590.100	0	0	34	18.927.000	0	741.500	10	8.124.200	6	5.537.700	5	4.523.600	21	18.927.000	21	18.927.000	11,54	13	Dinas Lingkungan Hidup
700		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	100	30.000.000	0	0	100	52.845.700		0		9.801.055	50	27.561.129	50	14.077.181	50	51.439.365	50	51.439.365	50	171,46	Dinas Lingkungan Hidup
701		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			0	0	0		52.845.700		0		9.801.055		27.561.129		14.077.181		51.439.365		51.439.365			Dinas Lingkungan Hidup
702		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			0	0	2	52.845.700	0	0	0	9.801.055	1	27.561.129	1	14.077.181	2	51.439.365	2	51.439.365	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
703		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			30.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Lingkungan Hidup
704		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
705		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	37	6.454.167.084	0	0	26	1.958.404.428		117.322.155		388.246.810	25	238.550.260	27	109.115.377	27	853.234.602	27	853.234.602	72,97	13,22	Dinas Lingkungan Hidup
706		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			5.068.161.644	0	0		784.264.228		117.022.455		383.562.949		174.821.112		84.660.243		760.066.759		760.066.759			Dinas Lingkungan Hidup
707		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12	2.288.682.004	0	0	2	238.966.500	0	66.007.201	0	68.093.666	0	46.809.649	2	44.797.093	2	225.707.609	2	225.707.609	16,67	9,86	Dinas Lingkungan Hidup
708		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	30	2.779.479.640	0	0	5	545.297.728	0	51.015.254	2	315.469.283	0	128.011.463	3	39.863.150	5	534.359.150	5	534.359.150	16,67	19,23	Dinas Lingkungan Hidup
709		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			1.386.005.440	0	0		1.174.140.200		299.700		4.683.861		63.729.148		24.455.134		93.167.843		93.167.843			Dinas Lingkungan Hidup
710		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	14	1.386.005.440	0	0	4	1.174.140.200	0	299.700	0	4.683.861	0	63.729.148	4	24.455.134	4	93.167.843	4	93.167.843	28,57	6,72	Dinas Lingkungan Hidup
711		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Program	100	10.120.293.386	0	0		2.376.296.900		300.790.000		411.771.210		288.126.819		1.335.446.909		2.336.134.938		2.336.134.938		23,08	Dinas Lingkungan Hidup
712			Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	100				41,51						28,3		28,3		28,3		28,3		28,3		Dinas Lingkungan Hidup
713			Persentase Taman Kondisi Baik	85,71				75,51						81,63		81,63		81,63		81,63		95,24		Dinas Lingkungan Hidup
714		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			10.120.293.386	0	0		2.376.296.900		300.790.000		411.771.210		288.126.819		1.335.446.909		2.336.134.938		2.336.134.938			Dinas Lingkungan Hidup
715		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	4	950.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
716		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	52	7.765.101.386	0	0	49	2.002.564.900	0	300.790.000	15	408.308.023	14	262.116.349	9	994.519.211	38	1.965.733.583	38	1.965.733.583	73,64	25,31	Dinas Lingkungan Hidup
717		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	7.263	1.405.192.000	0	0	1804	373.732.000	0	0	0	3.463.187	0	26.010.470	1804	340.927.698	1.804	370.401.355	1.804	370.401.355	24,84	26,36	Dinas Lingkungan Hidup
718		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	65,71	205.770.866	0	0	52,86	27.095.600		349.260		6.217.853	37,5	9.490.453	65	7.877.267	65	23.934.833	65	23.934.833	98,91	11,63	Dinas Lingkungan Hidup
719		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			205.770.866	0	0		27.095.600		349.260		6.217.853		9.490.453		7.877.267		23.934.833		23.934.833			Dinas Lingkungan Hidup
720		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	431	205.770.866	0	0	81	27.095.600	0	349.260	28	6.217.853	34	9.490.453	9	7.877.267	71	23.934.833	71	23.934.833	16,47	11,63	Dinas Lingkungan Hidup
721		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	78,16	271.513.412	0	0	76,83	125.431.000		9.002.925		41.493.123	87,8	28.649.200	100	45.496.743	100	124.641.991	100	124.641.991	127,94	45,91	Dinas Lingkungan Hidup
722		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			271.513.412	0	0		125.431.000		9.002.925		41.493.123		28.649.200		45.496.743		124.641.991		124.641.991			Dinas Lingkungan Hidup
723		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1.100	271.513.412	0	0	240	24.612.400	0	671.405	240	23.858.424	0	0	0	0	240	24.529.829	240	24.529.829	21,82	9,03	Dinas Lingkungan Hidup
724		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			0	0	10	100.818.600	0	8.331.520	0	17.634.699	0	28.649.200	10	45.496.743	10	100.112.162	10	100.112.162	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
725		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	108.017.665	0	0	100	22.874.500		917.000		5.532.612	100	8.703.531	100	7.250.453	100	22.403.596	100	22.403.596	100	20,74	Dinas Lingkungan Hidup
726		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			108.017.665	0	0		22.874.500		917.000		5.532.612		8.703.531		7.250.453		22.403.596		22.403.596			Dinas Lingkungan Hidup
727		#N/A	#N/A	141	108.017.665	0	0	15	22.874.500	0	917.000	4	5.532.612	5	8.703.531	4	7.250.453	13	22.403.596	13	22.403.596	9,22	20,74	Dinas Lingkungan Hidup
728		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	31,09	33.969.604.955	0	0	27	4.837.678.408		864.367.110		1.022.292.607	31,72	1.074.612.046	31,72	1.716.531.909	31,72	4.677.803.672	31,72	4.677.803.672	102,02	13,77	Dinas Lingkungan Hidup
729		Pengelolaan Sampah			33.969.604.955	0	0		4.837.678.408		864.367.110		1.022.292.607		1.074.612.046		1.716.531.909		4.677.803.672		4.677.803.672			Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
730		#N/A	#N/A	2	641.448.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
731		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	6	1.947.968.800	0	0	1	152.969.000	0	367.854	0	23.768.782	0	17.507.440	1	110.779.768	1	152.423.844	1	152.423.844	16,67	7,82	Dinas Lingkungan Hidup
732		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	72.120	31.080.187.430	0	0	12045	4.684.709.408	0	863.999.256	817558	998.523.825	3328,5	1.057.104.606	2970	1.605.752.141	823.856	4.525.379.828	823.856	4.525.379.828	######	14,56	Dinas Lingkungan Hidup
733		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			300.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Lingkungan Hidup
734		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	2	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
735		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.610.379.040	0	0		215.954.800		0		0		215.424.532		0		215.424.532		215.424.532			Dinas Lingkungan Hidup
736		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Persentase Pengurangan Sampah)		3.610.379.040	0	0	31,41	215.954.800		0		0	21,37	215.424.532	21,37	0	21,37	215.424.532	21,37	215.424.532	0	5,97	Dinas Lingkungan Hidup
737		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			3.610.379.040	0	0		215.954.800		0		0		215.424.532		0		215.424.532		215.424.532			Dinas Lingkungan Hidup
738		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	6	3.610.379.040	0	0	1	215.954.800	0	0	0	0	0	215.424.532	1	0	1	215.424.532	1	215.424.532	16,67	5,97	Dinas Lingkungan Hidup
739	Meningkatnya Kemandirian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			53.658.313.500	0	0		16.815.451.679		122.242.847		2.514.548.153		5.184.744.655		8.507.182.474		16.328.718.129		16.328.718.129			Dinas Pariwisata
740		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	######	53.658.313.500	0	0	######	16.815.451.679		122.242.847		2.514.548.153	######	5.184.744.655	######	8.507.182.474	######	16.328.718.129	######	16.328.718.129	246,86	30,43	Dinas Pariwisata
741		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			17.842.878.800	0	0		6.131.180.979		0		123.213.500		1.347.715.275		4.218.063.154		5.688.991.929		5.688.991.929			Dinas Pariwisata
742		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	180	17.842.878.800	0	0	30	6.131.180.979	0	0	11	123.213.500	0	1.347.715.275	19	4.218.063.154	30	5.688.991.929	30	5.688.991.929	16,67	31,88	Dinas Pariwisata
743		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			35.815.434.700	0	0		10.684.270.700		122.242.847		2.391.334.653		3.837.029.380		4.289.119.320		10.639.726.200		10.639.726.200			Dinas Pariwisata
744		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	60	14.734.105.000	0	0	10	2.126.760.000	0	8.300.000	0	434.298.000	0	1.276.619.880	7	403.056.800	7	2.122.274.680	7	2.122.274.680	11,67	14,4	Dinas Pariwisata
745		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	36	9.864.455.000	0	0	6	1.099.500.000	0	18.473.200	1	267.828.100	0	22.975.000	1	788.434.600	2	1.097.710.900	2	1.097.710.900	5,56	11,13	Dinas Pariwisata
746		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	72	11.216.874.700	0	0	12	7.458.010.700	0	95.469.647	0	1.689.208.553	0	2.537.434.500	10	3.097.627.920	10	7.419.740.620	10	7.419.740.620	13,89	66,15	Dinas Pariwisata
747		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			24.089.817.494	0	0		7.593.581.758		1.437.411.867		1.659.034.566		1.880.163.252		1.329.699.566		6.306.309.251		6.306.309.251			Dinas Pariwisata
748		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	9.672.721.859	0	0	100	3.151.449.754		733.775.843		777.110.930		587.168.746	40,91	636.339.506	40,91	2.734.395.025	40,91	2.734.395.025	40,91	28,27	Dinas Pariwisata
749		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			179.999.600	0	0		14.916.100		1.232.800		3.786.300		6.102.000		3.587.700		14.708.800		14.708.800			Dinas Pariwisata
750		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	63.478.200	0	0	4	10.579.700	0	390.000	0	3.230.900	3	4.504.400	1	2.356.400	4	10.481.700	4	10.481.700	16,67	16,51	Dinas Pariwisata
751		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	116.521.400	0	0	21	4.336.400	0	842.800	4	555.400	5	1.597.600	4	1.231.300	13	4.227.100	13	4.227.100	10,32	3,63	Dinas Pariwisata
752		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.868.929.926	0	0		2.523.829.366		642.158.554		635.476.841		466.195.457		528.389.814		2.272.220.666		2.272.220.666			Dinas Pariwisata
753		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186	3.598.022.726	0	0	31	2.465.452.666	0	627.722.054	0	620.934.541	0	451.881.857	31	513.444.614	31	2.213.983.066	31	2.213.983.066	16,67	61,53	Dinas Pariwisata
754		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	191.847.900	0	0	1	54.342.400	0	13.725.000	0	13.865.000	0	13.050.000	1	13.679.200	1	54.319.200	1	54.319.200	16,67	28,31	Dinas Pariwisata
755		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	79.059.300	0	0	14	4.034.300	0	711.500	4	677.300	4	1.263.600	2	1.266.000	10	3.918.400	10	3.918.400	11,9	4,96	Dinas Pariwisata
756		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.025.397.010	0	0		50.702.500		6.191.200		9.484.400		20.512.900		14.402.100		50.590.600		50.590.600			Dinas Pariwisata
757		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	160.780.500	0	0	4	28.217.500	0	4.391.200	1	8.324.400	1	6.778.400	1	8.619.100	3	28.113.100	3	28.113.100	12,5	17,49	Dinas Pariwisata
758		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	864.616.510	0	0	12	22.485.000	0	1.800.000	3	1.160.000	3	13.734.500	3	5.783.000	9	22.477.500	9	22.477.500	12,5	2,6	Dinas Pariwisata
759		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			561.157.600	0	0		6.157.600		6.120.000		0		0		0		6.120.000		6.120.000			Dinas Pariwisata
760		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	561.157.600	0	0	1	6.157.600	0	6.120.000	0	0	0	0	0	0	0	6.120.000	0	6.120.000	0	1,09	Dinas Pariwisata
761		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.582.540.873	0	0		448.898.088		65.295.589		100.156.589		61.825.989		61.882.992		289.161.159		289.161.159			Dinas Pariwisata
762		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	1.032.934.241	0	0	12	270.549.596	0	31.393.442	4	26.471.828	3	28.388.872	3	29.895.724	10	116.149.866	10	116.149.866	13,89	11,24	Dinas Pariwisata

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
763		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.549.606.632	0	0	12	178.348.492	0	33.902.147	3	73.684.761	3	33.437.117	3	31.987.268	9	173.011.293	9	173.011.293	12,5	11,16	Dinas Pariwisata
764		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.454.696.850	0	0		106.946.100		12.777.700		28.206.800		32.532.400		28.076.900		101.593.800		101.593.800			Dinas Pariwisata
765		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	1.253.822.850	0	0	15	73.467.100	0	9.539.700	4	19.063.800	6	19.487.700	3	20.763.400	13	68.854.600	13	68.854.600	14,44	5,49	Dinas Pariwisata
766		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	32.449.200	0	0	2	5.408.200	0	0	0	0	2	4.747.600	0	0	2	4.747.600	2	4.747.600	16,67	14,63	Dinas Pariwisata
767		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	604	168.424.800	0	0	69	28.070.800	0	3.238.000	24	9.143.000	16	8.297.100	20	7.313.500	60	27.991.600	60	27.991.600	9,93	16,62	Dinas Pariwisata
768		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Objek Pariwisata dalam Kondisi Baik	7	11.116.078.988	0	0	2	4.022.558.904		654.183.424		707.137.658	2	1.168.508.158	2	626.619.532	2	3.156.448.772	2	3.156.448.772	28,57	28,4	Dinas Pariwisata
769		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			9.694.990.776	0	0		3.943.488.004		651.647.524		702.063.040		1.099.917.252		624.326.505		3.077.954.321		3.077.954.321			Dinas Pariwisata
770		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	18	9.694.990.776	0	0	3	3.943.488.004	0	651.647.524	0	702.063.040	1	1.099.917.252	2	624.326.505	3	3.077.954.321	3	3.077.954.321	16,67	31,75	Dinas Pariwisata
771		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.421.088.212	0	0		79.070.900		2.535.900		5.074.618		68.590.906		2.293.027		78.494.451		78.494.451			Dinas Pariwisata
772		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	48	1.421.088.212	0	0	8	79.070.900	0	2.535.900	3	5.074.618	3	68.590.906	0	2.293.027	6	78.494.451	6	78.494.451	12,5	5,52	Dinas Pariwisata
773		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	######	1.713.102.755	0	0	######	235.517.000		48.864.000		87.180.300	######	40.505.388	######	56.451.568	######	233.001.256	######	233.001.256	85,48	13,6	Dinas Pariwisata
774		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.713.102.755	0	0		235.517.000		48.864.000		87.180.300		40.505.388		56.451.568		233.001.256		233.001.256			Dinas Pariwisata
775		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6	755.222.402	0	0	1	164.188.100	0	48.620.000	0	37.469.900	0	38.936.188	1	37.682.344	1	162.708.432	1	162.708.432	16,67	21,54	Dinas Pariwisata
776		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6	957.880.353	0	0	1	71.328.900	0	244.000	0	49.710.400	0	1.569.200	1	18.769.224	1	70.292.824	1	70.292.824	16,67	7,34	Dinas Pariwisata
777		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi	226	1.587.913.892	0	0	176	184.056.100		588.600		87.605.678	210	83.980.960	210	10.288.960	210	182.464.198	210	182.464.198	92,92	11,49	Dinas Pariwisata
778		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1.587.913.892	0	0		184.056.100		588.600		87.605.678		83.980.960		10.288.960		182.464.198		182.464.198			Dinas Pariwisata
779		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	360	690.169.417	0	0	60	96.226.300	0	261.600	0	35.647.470	0	52.272.000	60	7.475.000	60	95.656.070	60	95.656.070	16,67	13,86	Dinas Pariwisata
780		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	240	897.744.475	0	0	40	87.829.800	0	327.000	30	51.958.208	10	31.708.960	0	2.813.960	40	86.808.128	40	86.808.128	16,67	9,67	Dinas Pariwisata
781	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			507.063.807.705	0	0		65.416.843.513		4.249.291.063		8.284.906.696		17.718.414.812		33.467.753.260		63.720.365.831		63.720.365.831			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
782		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	42.599.704.914	0	0	100	6.698.832.945		1.698.996.183		1.780.486.515		1.358.509.040	80	1.384.603.112	80	6.222.594.850	80	6.222.594.850	80	14,61	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
783		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			214.210.151	0	0		51.693.000		4.398.570		9.629.200		10.346.496		25.119.065		49.493.331		49.493.331			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
784		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	122.828.445	0	0	3	35.100.600	0	3.599.370	0	4.484.780	2	7.580.376	1	18.200.785	3	33.865.311	3	33.865.311	25	27,57	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
785		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	91.381.706	0	0	21	16.592.400	0	799.200	5	5.144.420	5	2.766.120	6	6.918.280	16	15.628.020	16	15.628.020	12,7	17,1	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
786		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.157.851.598	0	0		5.433.773.523		1.515.518.418		1.475.487.180		1.033.932.267		1.008.440.773		5.033.378.638		5.033.378.638			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
787		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	479	33.340.764.438	0	0	92	5.321.735.823	0	1.494.419.757	0	1.438.397.687	0	1.016.850.667	92	973.035.649	92	4.922.703.760	92	4.922.703.760	19,21	14,76	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
788		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	696.310.210	0	0	12	98.100.000	0	19.996.209	4	31.095.160	2	15.350.000	4	30.848.019	10	97.289.388	10	97.289.388	13,89	13,97	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
789		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	120.776.950	0	0	14	13.937.700	0	1.102.452	5	5.994.333	4	1.731.600	3	4.557.105	12	13.385.490	12	13.385.490	14,29	11,08	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
790		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0		79.422.900		359.640		16.979.741		16.803.298		41.412.140		75.554.819		75.554.819			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
791		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0	12	79.422.900	0	359.640	3	16.979.741	3	16.803.298	3	41.412.140	9	75.554.819	9	75.554.819	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
792		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			309.680.057	0	0		44.303.300		0		38.194.000		0		5.675.000		43.869.000		43.869.000			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
793		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42	309.680.057	0	0	6	44.303.300	0	0	5	38.194.000	0	0	1	5.675.000	6	43.869.000	6	43.869.000	14,29	14,17	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
794		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.034.705.242	0	0		667.772.572		169.347.637		154.992.186		138.704.219		149.289.886		612.333.928		612.333.928			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
795		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	2.052.955.752	0	0	12	333.179.020	0	87.292.020	3	73.264.070	3	68.228.942	3	81.886.298	9	310.671.330	9	310.671.330	12,5	15,13	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
796		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	12	44.893.500	0	0	3	20.885.125	3	12.852.610	3	11.083.901	9	44.821.636	9	44.821.636	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
797		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.981.749.490	0	0	12	289.700.052	0	82.055.617	3	60.842.991	3	57.622.667	3	56.319.687	9	256.840.962	9	256.840.962	12,5	12,96	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
798		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.883.257.866	0	0		421.867.650		9.371.918		85.204.208		158.722.760		154.666.248		407.965.134		407.965.134			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
799		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162	2.474.564.060	0	0	20	368.848.450	0	8.941.918	4	69.513.121	5	141.209.041	5	135.386.504	14	355.050.584	14	355.050.584	8,64	14,35	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
800		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.036.379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
801		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	294	372.314.806	0	0	49	53.019.200	0	430.000	22	15.691.087	17	17.513.719	10	19.279.744	49	52.914.550	49	52.914.550	16,67	14,21	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
802		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	66,37	38.812.042.714	0	0	64,94	7.646.677.100		914.638.410		1.518.978.070	64,89	2.573.501.537	66,94	2.377.742.082	66,94	7.384.860.099	66,94	7.384.860.099	100,86	19,03	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
803		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.735.614.790	0	0		421.019.800		39.770.140		39.994.240		85.695.131		253.625.472		419.084.983		419.084.983			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
804		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1.830	643.750.367	0	0	12	119.256.600	0	30.350.140	0	29.787.120	0	35.006.548	12	24.101.315	12	119.245.123	12	119.245.123	0,66	18,52	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
805		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	30	2.091.864.422	0	0	5	301.763.200	0	9.420.000	0	10.207.120	0	50.688.583	5	229.524.157	5	299.839.860	5	299.839.860	16,67	14,33	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
806		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			36.076.427.925	0	0		7.225.657.300		874.868.270		1.478.983.830		2.487.806.406		2.124.116.610		6.965.775.116		6.965.775.116			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
807		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5	15.474.852.650	0	0	1	3.487.666.300	0	415.516.800	0	1.088.015.851	0	1.114.890.553	1	722.220.325	1	3.340.643.529	1	3.340.643.529	20,83	21,59	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
808		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	11	20.601.575.275	0	0	1	3.737.991.000	0	459.351.470	0	390.967.979	0	1.372.915.853	1	1.401.896.285	1	3.625.131.587	1	3.625.131.587	8,97	17,6	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
809		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian Akses Air Minum Layak	100	9.431.474.710	0	0	98,12	6.924.083.670		5.201.010		3.410.540.761	97,99	2.021.353.108	98,38	1.461.066.896	98,38	6.898.161.775	98,38	6.898.161.775	98,38	73,14	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
810		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			9.431.474.710	0	0		6.924.083.670		5.201.010		3.410.540.761		2.021.353.108		1.461.066.896		6.898.161.775		6.898.161.775			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
811		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	9	3.485.186.000	0	0	1,2	3.485.186.000	0	2.283.444	0	2.387.141.716	0	1.051.485.576	1,2	44.178.220	1	3.485.088.956	1	3.485.088.956	14,12	100	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
812		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.259	5.946.288.710	0	0	1,2	3.438.897.670	0	2.917.566	0	1.023.399.045	0	969.867.532	1,2	1.416.888.676	1	3.413.072.819	1	3.413.072.819	0,1	57,4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
813		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	9,29	1.472.203.600	0	0	8,34	1.134.426.200		54.880.610		670.003.697	8,09	312.090.087	8,35	95.933.630	8,35	1.132.908.024	8,35	1.132.908.024	89,85	76,95	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
814		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.472.203.600	0	0		1.134.426.200		54.880.610		670.003.697		312.090.087		95.933.630		1.132.908.024		1.132.908.024			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
815		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	1.472.203.600	0	0	1	240.083.600	0	52.200.730	0	74.122.475	0	46.040.687	1	66.328.131	1	238.692.023	1	238.692.023	20	16,21	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
816		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			0	0	173	894.342.600	0	2.679.880	0	595.881.222	0	266.049.400	173	29.605.499	173	894.216.001	173	894.216.001	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
817		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	58,93	49.129.419.518	0	0	58,77	1.641.095.200		27.363.700		40.154.133	58,73	101.452.903	58,73	1.280.367.941	58,73	1.449.338.677	58,73	1.449.338.677	99,66	2,95	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
818		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			49.129.419.518	0	0		1.641.095.200		27.363.700		40.154.133		101.452.903		1.280.367.941		1.449.338.677		1.449.338.677			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
819		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6	48.396.999.705	0	0	1	1.522.267.500	0	0	0	4.548.891	0	72.802.346	1	1.253.304.531	1	1.330.655.768	1	1.330.655.768	16,67	2,75	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
820		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.080	732.419.813	0	0	180	118.827.700	0	27.363.700	62	35.605.242	90	28.650.557	38	27.063.410	190	118.682.909	190	118.682.909	17,59	16,2	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
821		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Penanganan Jalan	8,69	229.010.941.723	0	0	7,93	31.088.782.100		1.538.182.500		644.226.110	4,95	4.599.068.865	8,44	23.583.956.643	8,44	30.365.434.118	8,44	30.365.434.118	97,1	13,26	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
822		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			229.010.941.723	0	0		31.088.782.100		1.538.182.500		644.226.110		4.599.068.865		23.583.956.643		30.365.434.118		30.365.434.118			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
823		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	31	4.131.367.800	0	0	7	1.703.959.300	0	0	0	1.818.735	0	312.326.900	7	1.369.375.293	7	1.683.520.928	7	1.683.520.928	22,58	40,75	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
824		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	11.832.719.600	0	0	0,25	1.432.719.600	0	0	0	9.276.353	0	509.183.533	0,25	874.776.759	0	1.393.236.645	0	1.393.236.645	13,16	11,77	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
825		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	32	115.788.955.200	0	0	3135	10.552.701.500	0	37.680.000	0	43.621.506	0	912.665.136	3135	9.286.103.191	3.135	10.280.069.833	3.135	10.280.069.833	######	8,88	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
826		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4	13.203.651.500	0	0	6855	1.578.016.300	0	9.420.000	0	15.276.000	0	39.335.491	6855	1.476.569.090	6.855	1.540.600.581	6.855	1.540.600.581	######	11,67	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
827		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	236	7.090.766.000	0	0	30	1.095.783.300	0	279.791.100	0	72.403.029	0	12.634.020	30	688.516.047	30	1.053.344.196	30	1.053.344.196	12,71	14,86	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
828		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1	6.696.983.400	0	0	1	6.696.983.400	0	0	0	14.275.534	0	573.209.364	1	5.951.646.261	1	6.539.131.159	1	6.539.131.159	100	97,64	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
829		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	4.065	2.841.010.000	0	0	807	620.737.000	0	0	0	9.475.000	0	2.782.585	807	602.212.503	807	614.470.088	807	614.470.088	19,85	21,63	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
830		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360	67.425.488.223	0	0	36	7.407.881.700	0	1.211.291.400	0	478.079.953	0	2.236.931.836	36	3.334.757.499	36	7.261.060.688	36	7.261.060.688	10,01	10,77	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
831		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Capaian Program	100	3.733.109.989	0	0		533.724.654		10.028.650		185.333.713		115.766.259		206.819.182		517.947.804		517.947.804		13,87	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
832			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
833			Persentase Keterisian Hunian	48,12				46,99						47,37		46,99		46,99		46,99		97,66		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
834		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			874.793.608	0	0		133.396.804		1.298.700		96.307.662		11.370.660		24.251.322		133.228.344		133.228.344			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
835		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	475	874.793.608	0	0	75	133.396.804	0	1.298.700	75	96.307.662	0	11.370.660	0	24.251.322	75	133.228.344	75	133.228.344	15,79	15,23	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
836		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			2.858.316.381	0	0		400.327.850		8.729.950		89.026.051		104.395.599		182.567.860		384.719.460		384.719.460			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
837		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	770	2.858.316.381	0	0	100	400.327.850	0	8.729.950	43	89.026.051	100	104.395.599	77	182.567.860	220	384.719.460	220	384.719.460	28,57	13,46	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
838		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	100	132.874.910.537	0	0	50	9.749.221.644		0		35.183.697	55,95	6.636.673.013	100	3.077.263.774	100	9.749.120.484	100	9.749.120.484	100	7,34	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
839		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			132.874.910.537	0	0		9.749.221.644		0		35.183.697		6.636.673.013		3.077.263.774		9.749.120.484		9.749.120.484			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
840		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	34	28.073.281.000	0	0	4	7.069.197.000	0	0	0	20.712.063	0	4.926.521.958	4	2.121.884.132	4	7.069.118.153	4	7.069.118.153	11,76	25,18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
841		Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	11	56.846.339.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
842		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	5	29.375.948.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
843		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	16	18.579.341.808	0	0	1	2.680.024.644	0	0	0	14.471.634	0	1.710.151.055	1	955.379.642	1	2.680.002.331	1	2.680.002.331	6,25	14,42	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
844		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			127.921.593.887	0	0		22.040.933.500		121.953.604		3.720.082.420		841.228.318		17.153.823.361		21.837.087.703		21.837.087.703			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
845		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Keterisian Hunian	48,12	8.120.403.368	0	0	46,99	1.228.865.100		106.970.070		283.067.655	47,37	225.478.505	46,99	598.453.413	46,99	1.213.969.643	46,99	1.213.969.643	97,66	14,95	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
846		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			413.662.400	0	0		63.662.400		701.742		249.900		62.453.500		0		63.405.142		63.405.142			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
847		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5	413.662.400	0	0	1	63.662.400	0	701.742	0	249.900	1	62.453.500	0	0	1	63.405.142	1	63.405.142	20	15,33	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
848		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			843.638.400	0	0		165.638.600		2.009.988		150.779.800		8.272.620		4.524.020		165.586.428		165.586.428			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
849		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	19	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
850		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3	165.638.600	0	0	4	165.638.600	0	2.009.988	0	150.779.800	0	8.272.620	4	4.524.020	4	165.586.428	4	165.586.428	133,33	99,97	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
851		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	227.999.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
852		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			6.863.102.568	0	0		999.564.100		104.258.340		132.037.955		154.752.385		593.929.393		984.978.073		984.978.073			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
853		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	18	6.863.102.568	0	0	3	999.564.100	0	104.258.340	0	132.037.955	0	154.752.385	3	593.929.393	3	984.978.073	3	984.978.073	16,67	14,35	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
854		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Capaian Program		26.479.066.806	0	0		3.725.238.000		10.899.400		3.319.522.119		79.658.720		302.250.000		3.712.330.239		3.712.330.239		14,02	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
855			Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani pada tahun n					4,1						5,63		6,6		6,6		6,6		0		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
856			Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani sampai tahun n	43,59																		0		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
857		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			26.479.066.806	0	0		3.725.238.000		10.899.400		3.319.522.119		79.658.720		302.250.000		3.712.330.239		3.712.330.239			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
858		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.212	26.479.066.806	0	0	172	3.725.238.000	0	10.899.400	0	3.319.522.119	0	79.658.720	172	302.250.000	172	3.712.330.239	172	3.712.330.239	14,19	14,02	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
859		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Capaian Program	100	93.322.123.713	0	0		17.086.830.400		4.084.134		117.492.646		536.091.093		16.253.119.948		16.910.787.821		16.910.787.821		18,12	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
860			Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani sampai tahun n	43,59																		0		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
861			Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	15,66				2,24						0		2,34		2,34		2,34		14,96		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
862		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			93.322.123.713	0	0		17.086.830.400		4.084.134		117.492.646		536.091.093		16.253.119.948		16.910.787.821		16.910.787.821			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
863		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	441	92.739.404.514	0	0	72	16.993.111.200	0	4.084.134	0	115.570.647	0	519.906.093	72	16.177.796.948	72	16.817.357.822	72	16.817.357.822	16,33	18,13	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
864		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	18	582.719.199	0	0	3	93.719.200	0	0	0	1.921.999	0	16.185.000	3	75.323.000	3	93.429.999	3	93.429.999	16,67	16,03	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
865	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel serta Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			0	0	0		177.829.400		0		2.627.173		151.987.640		20.820.787		175.435.600		175.435.600			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
866		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi	100	0	0	0	38,64	177.829.400		0		2.627.173	38,64	151.987.640	38,64	20.820.787	38,64	175.435.600	38,64	175.435.600	38,64	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
867		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			0	0	0		177.829.400		0		2.627.173		151.987.640		20.820.787		175.435.600		175.435.600			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
868		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			0	0	2	177.829.400	0	0	0	2.627.173	0	151.987.640	2	20.820.787	2	175.435.600	2	175.435.600	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
869		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			50.960.689.891	0	0		7.925.407.463		1.632.555.335		1.687.340.742		1.429.944.386		2.518.347.708		7.268.188.171		7.268.188.171			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
870		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	22.888.857.688	0	0	100	3.630.869.969		808.757.321		866.610.735		688.835.861	100	658.792.696	100	3.022.996.613	100	3.022.996.613	100	13,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
871		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			209.345.072	0	0		11.143.000		0		5.080.640		3.081.947		1.418.969		9.581.556		9.581.556			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
872		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	168.327.772	0	0	4	6.756.300	0	0	0	3.902.180	0	399.600	3	1.418.969	3	5.720.749	3	5.720.749	21,43	3,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
873		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	41.017.300	0	0	21	4.386.700	0	0	5	1.178.460	6	2.682.347	5	0	16	3.860.807	16	3.860.807	19,75	9,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
874		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.356.306.699	0	0		3.132.181.031		750.047.766		755.575.987		569.376.801		557.912.627		2.632.913.181		2.632.913.181			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
875		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	19.075.080.058	0	0	38	3.087.522.131	0	750.047.766	0	741.987.002	0	559.326.801	38	537.062.627	38	2.588.424.196	38	2.588.424.196	15,97	13,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
876		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	262.231.210	0	0	12	43.992.200	0	0	3	12.958.616	3	10.050.000	3	20.850.000	9	43.858.616	9	43.858.616	12,5	16,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
877		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	18.995.431	0	0	2	666.700	0	0	1	630.369	0	0	1	0	2	630.369	2	630.369	2,78	3,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
878		Administrasi Umum Perangkat Daerah			194.649.318	0	0		9.224.000		0		1.983.506		0		2.740.501		4.724.007		4.724.007			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
879		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	93.531.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
880		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	101.117.965	0	0	12	9.224.000	0	0	4	1.983.506	3	0	3	2.740.501	10	4.724.007	10	4.724.007	37,04	4,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
881		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			81.012.300	0	0		6.012.300		0		5.860.000		0		0		5.860.000		5.860.000			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
882		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	81.012.300	0	0	1	6.012.300	0	0	1	5.860.000	0	0	0	0	1	5.860.000	1	5.860.000	20	7,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
883		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.044.309.008	0	0		338.592.738		58.370.355		67.191.339		55.521.313		60.455.699		241.538.706		241.538.706			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
884		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	865.140.431	0	0	12	125.093.762	0	23.483.049	4	19.411.242	3	19.740.828	3	23.862.381	10	86.497.500	10	86.497.500	13,89	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
885		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	13.902.300	0	0	12	13.902.300	0	100.000	4	7.258.873	3	300.000	3	4.514.617	10	12.173.490	10	12.173.490	83,33	87,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
886		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.165.266.277	0	0	12	199.596.676	0	34.787.306	4	40.521.224	3	35.480.485	3	32.078.701	10	142.867.716	10	142.867.716	13,89	12,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
887		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.003.235.291	0	0		133.716.900		339.200		30.919.263		60.855.800		36.264.900		128.379.163		128.379.163			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
888		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	410	727.004.458	0	0	12	113.540.200	0	189.200	4	19.730.600	4	56.413.800	2	32.087.900	10	108.421.500	10	108.421.500	2,44	14,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
889		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	87	276.230.833	0	0	12	20.176.700	0	150.000	4	11.188.663	3	4.442.000	3	4.177.000	10	19.957.663	10	19.957.663	11,49	7,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
890		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Capaian Program	100	12.781.916.007	0	0		3.187.253.194		440.238.741		563.109.011		480.143.539		1.657.044.683		3.140.535.974		3.140.535.974		24,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
891			Persentase Kalurahan Kategori TDD	57,47				45,98						43,68		50,57		50,57		50,57		88		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
892			Persentase BUMDes Kategori Maju	29,89				18,39						41,38		41,38		41,38		41,38		138,46		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
893		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			12.781.916.007	0	0		3.187.253.194		440.238.741		563.109.011		480.143.539		1.657.044.683		3.140.535.974		3.140.535.974			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
894		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	522	176.103.569	0	0	87	22.914.400	0	0	0	3.379.051	0	5.073.900	87	14.170.536	87	22.623.487	87	22.623.487	16,67	12,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
895		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	522	107.409.980	0	0	87	16.996.500	0	0	0	2.672.835	0	1.343.100	87	12.687.453	87	16.703.388	87	16.703.388	16,67	15,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
896		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	522	11.308.681.055	0	0	87	1.804.393.644	0	430.787.136	0	465.444.743	0	438.751.915	87	443.188.324	87	1.778.172.118	87	1.778.172.118	16,67	15,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
897		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	522	140.158.278	0	0	87	17.821.300	0	0	14	8.050.962	28	4.838.398	17	4.725.700	59	17.615.060	59	17.615.060	11,3	12,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
898		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	60	121.489.775	0	0	4	11.076.600	0	0	2	1.598.011	1	0	1	9.072.060	4	10.670.071	4	10.670.071	6,67	8,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
899		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7	259.272.064	0	0	1	1.214.347.950	0	7.725.000	0	9.106.894	0	7.667.480	1	1.172.021.110	1	1.196.520.484	1	1.196.520.484	14,29	461,49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
900		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	522	146.594.373	0	0	87	19.353.100	0	0	0	4.249.252	87	14.846.346	0	0	87	19.095.598	87	19.095.598	16,67	13,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
901		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18	522.206.913	0	0	13	80.349.700	0	1.726.605	13	68.607.263	0	7.622.400	0	1.179.500	13	79.135.768	13	79.135.768	72,22	15,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
902		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti	22	15.289.916.196	0	0	12	1.107.284.300		383.559.273		257.620.996	19,44	260.964.986	19,44	202.510.329	19,44	1.104.655.584	19,44	1.104.655.584	88,34	7,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
903		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.289.916.196	0	0		1.107.284.300		383.559.273		257.620.996		260.964.986		202.510.329		1.104.655.584		1.104.655.584			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
904		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	5.872.140.655	0	0	3	266.511.900	0	201.059.273	0	3.094.586	2	56.387.086	0	4.487.580	2	265.028.525	2	265.028.525	11,11	4,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
905		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	96	9.417.775.541	0	0	16	840.772.400	0	182.500.000	13	254.526.410	1	204.577.900	1	198.022.749	15	839.627.059	15	839.627.059	15,63	8,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
906		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1.799.016.972	0	0		9.563.053.300		339.132.717		2.042.315.394		2.359.866.826		4.620.658.802		9.361.973.739		9.361.973.739			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
907		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	87,5	564.378.529	0	0	81,82	406.167.500		50.143.867		118.760.777	81,82	123.036.612	81,82	109.499.899	81,82	401.441.155	81,82	401.441.155	93,51	71,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
908		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			564.378.529	0	0		406.167.500		50.143.867		118.760.777		123.036.612		109.499.899		401.441.155		401.441.155			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
909		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			0	0	1	96.000.000	0	25.760.867	0	12.113.181	0	24.088.280	1	29.586.923	1	91.549.251	1	91.549.251	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
910		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6	286.050.090	0	0	1	131.221.700	0	5.000.000	0	50.107.332	0	54.933.280	1	21.039.360	1	131.079.972	1	131.079.972	16,67	45,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
911		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			0	0	1	144.000.000	0	11.988.000	0	47.979.820	0	35.980.692	1	47.974.256	1	143.922.768	1	143.922.768	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
912		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	17	278.328.439	0	0	12	34.945.800	0	7.395.000	4	8.560.444	3	8.034.360	3	10.899.360	10	34.889.164	10	34.889.164	58,82	12,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
913		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Capaian Program	100	1.234.638.443	0	0		6.901.887.400		237.307.850		1.106.989.124		1.572.124.688		3.811.359.503		6.727.781.165		6.727.781.165		544,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
914			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	64,09				59,24						66,47		64,55		64,55		64,55		100,72		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
915			Persentase Unmet Need	12,54				15						7,05		7,01		7,01		7,01		55,88		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
916		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			641.055.550	0	0		1.223.462.200		99.887.592		361.774.935		460.906.785		288.776.614		1.211.345.926		1.211.345.926			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
917		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			0	0	1	586.800.000	0	75.894.312	0	156.544.967	0	190.003.488	1	155.494.624	1	577.937.391	1	577.937.391	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
918		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			0	0	1	240.000.000	0	23.993.280	0	95.973.120	0	71.979.840	1	47.986.560	1	239.932.800	1	239.932.800	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
919		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			0	0	1	110.000.000	0	0	0	44.768.720	0	62.133.600	1	2.707.440	1	109.609.760	1	109.609.760	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
920		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			0	0	2	15.000.000	0	0	0	0	2	15.000.000	0	0	2	15.000.000	2	15.000.000	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
921		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31	641.055.550	0	0	6	271.662.200	0	0	4	64.488.128	0	121.789.857	2	82.587.990	6	268.865.975	6	268.865.975	19,35	41,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
922		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			0	0	0		2.032.269.400		26.400.000		112.649.160		549.176.787		1.323.006.695		2.011.232.642		2.011.232.642			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
923		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			0	0	88	264.000.000	0	26.400.000	0	105.600.000	0	79.200.000	0	52.800.000	0	264.000.000	0	264.000.000	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
924		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			0	0	1	1.768.269.400	0	0	0	7.049.160	0	469.976.787	1	1.270.206.695	1	1.747.232.642	1	1.747.232.642	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
925		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			593.582.893	0	0		3.299.436.600		111.020.258		460.286.069		474.926.684		2.112.611.834		3.158.844.845		3.158.844.845			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
926		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			0	0	1	45.000.000	0	2.050.000	0	11.100.000	0	8.900.000	1	11.500.000	1	33.550.000	1	33.550.000	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
927		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			0	0	4396	3.128.291.400	0	90.429.920	1093	417.409.185	1335	423.944.636	1195	2.067.637.880	3.623	2.999.421.621	3.623	2.999.421.621	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
928		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	6	233.176.561	0	0	1	32.785.200	0	7.065.000	0	8.279.584	0	7.065.000	1	10.119.300	1	32.528.884	1	32.528.884	16,67	13,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
929		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6	360.406.332	0	0	1	93.360.000	0	11.475.338	0	23.497.300	0	35.017.048	1	23.354.654	1	93.344.340	1	93.344.340	16,67	25,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
930		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			0	0	0		346.719.200		0		172.278.960		87.114.432		86.964.360		346.357.752		346.357.752			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
931		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			0	0	1	5.119.200	0	0	0	1.649.760	0	1.799.832	1	1.649.760	1	5.099.352	1	5.099.352	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
932		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			0	0	61	341.600.000	0	0	0	170.629.200	0	85.314.600	61	85.314.600	61	341.258.400	61	341.258.400	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
933		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera	7,38	0	0	0	6,07	2.254.998.400		51.681.000		816.565.493	6,14	664.705.526	7,11	699.799.400	7,11	2.232.751.419	7,11	2.232.751.419	96,3	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
934		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0	0	0		743.598.400		51.681.000		222.997.493		219.529.526		227.891.492		722.099.511		722.099.511			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
935		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			0	0	1	28.474.000	0	0	0	0	0	28.269.998	1	100.000	1	28.369.998	1	28.369.998	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
936		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			0	0	1	96.000.000	0	0	0	37.800.000	0	37.800.000	1	20.400.000	1	96.000.000	1	96.000.000	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
937		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0	0	1	489.124.400	0	51.681.000	0	185.197.493	0	153.459.528	1	98.212.000	1	488.550.021	1	488.550.021	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
938		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			0	0	10	130.000.000	0	0	0	0	0	0	10	109.179.492	10	109.179.492	10	109.179.492	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
939		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0	0	0		1.511.400.000		0		593.568.000		445.176.000		471.907.908		1.510.651.908		1.510.651.908			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
940		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			0	0	1	687.000.000	0	0	0	263.808.000	0	197.856.000	1	224.587.908	1	686.251.908	1	686.251.908	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
941		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			0	0	1	824.400.000	0	0	0	329.760.000	0	247.320.000	1	247.320.000	1	824.400.000	1	824.400.000	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
942		SEKRETARIAT DAERAH			1.191.726.882	0	0		238.010.400		0		12.757.568		211.204.674		12.643.560		236.605.802		236.605.802			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
943		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	19,54	1.191.726.882	0	0	8,05	238.010.400		0		12.757.568	0	211.204.674	0	12.643.560	0	236.605.802	0	236.605.802	0	19,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
944		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			1.191.726.882	0	0		238.010.400		0		12.757.568		211.204.674		12.643.560		236.605.802		236.605.802			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
945		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
946		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		1.191.726.882	0	0	2	238.010.400	0	0	0	12.757.568	0	211.204.674	2	12.643.560	2	236.605.802	2	236.605.802	0	19,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
947	Meningkatnya Kemandirian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			23.541.322.755	0	0		3.216.400.855		816.076.553		760.915.873		716.854.287		728.409.078		3.022.255.791		3.022.255.791			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
948		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	18.971.882.755	0	0	100	2.722.632.755		695.368.696		673.286.473		550.241.117	100	635.114.019	100	2.554.010.305	100	2.554.010.305	100	13,46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
949		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			116.323.000	0	0		11.323.000		3.694.582		3.176.418		3.392.318		899.100		11.162.418		11.162.418			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
950		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	64.976.200	0	0	4	7.476.200	0	2.145.356	1	2.577.018	1	2.304.618	0	299.700	2	7.326.692	2	7.326.692	14,29	11,28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
951		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	51.346.800	0	0	21	3.846.800	0	1.549.226	4	599.400	5	1.087.700	6	599.400	15	3.835.726	15	3.835.726	18,52	7,47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
952		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.956.175.979	0	0		1.982.925.979		535.806.733		528.143.479		404.017.008		395.366.040		1.863.333.260		1.863.333.260			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
953		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	12.696.595.979	0	0	30	1.946.595.979	0	527.036.018	0	518.863.868	0	394.437.697	30	386.760.529	30	1.827.098.112	30	1.827.098.112	16,67	14,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
954		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	198.900.000	0	0	12	33.150.000	0	7.800.000	3	8.775.000	3	8.775.000	3	7.800.000	9	33.150.000	9	33.150.000	150	16,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
955		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	60.680.000	0	0	14	3.180.000	0	970.715	4	504.611	3	804.311	4	805.511	11	3.085.148	11	3.085.148	13,1	5,08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
956		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			170.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
957		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
958		Administrasi Umum Perangkat Daerah			857.824.400	0	0		57.824.400		11.613.259		11.456.060		18.164.438		14.603.400		55.837.157		55.837.157			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
959		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	347.444.400	0	0	5	22.444.400	0	9.615.259	1	3.980.160	2	5.188.638	0	1.703.000	3	20.487.057	3	20.487.057	50	5,9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
960		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	510.380.000	0	0	12	35.380.000	0	1.998.000	3	7.475.900	3	12.975.800	3	12.900.400	9	35.350.100	9	35.350.100	12,5	6,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
961		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			260.203.400	0	0		9.203.400		0		9.200.000		0		0		9.200.000		9.200.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
962		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	260.203.400	0	0	1	9.203.400	0	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	9.200.000	0	9.200.000	0	3,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
963		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.032.212.151	0	0		432.212.151		111.577.062		90.856.882		91.501.950		96.914.666		390.850.560		390.850.560			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
964		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	1.062.588.295	0	0	12	162.588.295	0	32.541.598	3	30.771.418	3	30.389.220	3	34.507.604	9	128.209.840	9	128.209.840	52,94	12,07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
965		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	1.969.623.856	0	0	12	269.623.856	0	79.035.464	3	60.085.464	3	61.112.730	3	62.407.062	9	262.640.720	9	262.640.720	150	13,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
966		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.579.143.825	0	0		229.143.825		32.677.060		30.453.634		33.165.403		127.330.813		223.626.910		223.626.910			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
967		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	670.827.700	0	0	16	70.827.700	0	16.950.400	4	16.103.400	3	18.709.000	3	18.290.300	10	70.053.100	10	70.053.100	11,11	10,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
968		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	402.040.925	0	0	1	102.040.925	0	0	0	0	0	0	1	98.180.571	1	98.180.571	1	98.180.571	16,67	24,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
969		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	390	506.275.200	0	0	38	56.275.200	0	15.726.660	10	14.350.234	10	14.456.403	9	10.859.942	29	55.393.239	29	55.393.239	7,44	10,94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
970		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peta Potensi yang Tersusun		923.746.500	0	0	100	103.746.500		3.759.439		6.610.400	100	90.071.570	100	2.563.160	100	103.004.569	100	103.004.569	0	11,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
971		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			923.746.500	0	0		103.746.500		3.759.439		6.610.400		90.071.570		2.563.160		103.004.569		103.004.569			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
972		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
973		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6	803.746.500	0	0	1	103.746.500	0	3.759.439	0	6.610.400	1	90.071.570	0	2.563.160	1	103.004.569	1	103.004.569	16,67	12,82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
974		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal	50	1.080.377.100	0	0	35	65.377.100		15.039.956		8.267.400	31,25	12.410.900	33,33	29.634.200	33,33	65.352.456	33,33	65.352.456	66,67	6,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
975		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.080.377.100	0	0		65.377.100		15.039.956		8.267.400		12.410.900		29.634.200		65.352.456		65.352.456			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
976		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	18	1.080.377.100	0	0	3	65.377.100	0	15.039.956	0	8.267.400	1	12.410.900	1	29.634.200	2	65.352.456	2	65.352.456	11,11	6,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
977		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Pelayanan dan Perizinan		1.991.126.200	0	0		275.536.200		85.719.167		62.556.900	88	52.525.900	88,1	50.002.899	88,1	250.804.866	88,1	250.804.866	0	12,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
978		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			1.991.126.200	0	0		275.536.200		85.719.167		62.556.900		52.525.900		50.002.899		250.804.866		250.804.866			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
979		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.350	1.692.215.100	0	0	2700	261.625.100	0	81.532.599	1705	58.053.300	1831	49.574.700	1598	48.063.699	5.134	237.224.298	5.134	237.224.298	31,4	14,02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
980		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	60	79.071.200	0	0	10	4.071.200	0	1.297.704	7	1.594.000	0	674.400	1	399.600	8	3.965.704	8	3.965.704	13,33	5,02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
981		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.850	219.839.900	0	0	215	9.839.900	0	2.888.864	124	2.909.600	22	2.276.800	14	1.539.600	160	9.614.864	160	9.614.864	5,61	4,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
982		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	91,43	288.167.500	0	0	85,71	13.167.500		2.443.514		2.799.700	100	4.209.800	100	3.699.800	100	13.152.814	100	13.152.814	109,38	4,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
983		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			288.167.500	0	0		13.167.500		2.443.514		2.799.700		4.209.800		3.699.800		13.152.814		13.152.814			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
984		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120	288.167.500	0	0	50	13.167.500	0	2.443.514	17	2.799.700	13	4.209.800	7	3.699.800	37	13.152.814	37	13.152.814	30,83	4,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
985		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan	100	286.022.700	0	0	100	35.940.800		13.745.781		7.395.000	25	7.395.000	100	7.395.000	100	35.930.781	100	35.930.781	100	12,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
986		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			286.022.700	0	0		35.940.800		13.745.781		7.395.000		7.395.000		7.395.000		35.930.781		35.930.781			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
987		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	24	286.022.700	0	0	2	35.940.800	0	13.745.781	1	7.395.000	0	7.395.000	1	7.395.000	2	35.930.781	2	35.930.781	8,33	12,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
988		SEKRETARIAT DAERAH			0	0	0		79.507.400		0		16.878.992		61.713.300		0		78.592.292		78.592.292			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
989		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100	0	0	0	100	79.507.400		0		16.878.992	100	61.713.300	100	0	100	78.592.292	100	78.592.292	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
990		Peningkatan Budaya Pemerintahan			0	0	0		79.507.400		0		16.878.992		61.713.300		0		78.592.292		78.592.292			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
991		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			0	0	1	79.507.400	0	0	0	16.878.992	0	61.713.300	1	0	1	78.592.292	1	78.592.292	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
992	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			##############	0	0		501.778.876.499		75.922.884.842		100.545.639.954		54.781.530.093		216.835.821.908		448.085.876.797		448.085.876.797			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
993		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	##############	0	0	100	399.170.008.089		72.661.465.221		63.118.280.101		48.082.674.926	90,41	166.743.573.661	90,41	350.605.993.909	90,41	350.605.993.909	90,41	16,45	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
994		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.114.176.485	0	0		226.181.507		40.545.379		30.168.794		96.042.488		45.381.320		212.137.981		212.137.981			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
995		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	68.703.059	0	0	4	15.078.400	0	8.542.871	0	4.901.700	4	1.197.504	0	359.640	4	15.001.715	4	15.001.715	28,57	21,84	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
996		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	1.045.473.426	0	0	21	211.103.107	0	32.002.508	6	25.267.094	6	94.844.984	5	45.021.680	17	197.136.266	17	197.136.266	20,99	18,86	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
997		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			##############	0	0		394.132.005.328		72.191.542.352		62.631.771.203		47.513.901.669		166.148.164.545		348.485.379.769		348.485.379.769			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
998		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.264	##############	0	0	3414	392.659.663.728	0	72.178.531.897	0	62.270.797.914	0	47.139.383.304	3414	165.454.721.862	3.414	347.043.434.977	3.414	347.043.434.977	17,72	16,5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
999		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	9.112.756.265	0	0	12	1.420.008.900	0	0	3	352.402.234	3	359.627.500	6	688.305.000	12	1.400.334.734	12	1.400.334.734	200	15,37	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	375.766.137	0	0	14	52.332.700	0	13.010.455	3	8.571.055	3	14.890.865	4	5.137.683	10	41.610.058	10	41.610.058	11,9	11,07	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1001		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			54.699.172	0	0		17.086.000		1.091.907		0		1.898.100		4.789.688		7.779.695		7.779.695			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1002		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	50.499.172	0	0	1	12.886.000	0	1.091.907	0	0	0	1.898.100	1	1.809.288	1	4.799.295	1	4.799.295	16,67	9,5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1003		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	4.200.000	0	0	30	4.200.000	0	0	0	0	0	0	30	2.980.400	30	2.980.400	30	2.980.400	100	70,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1004		Administrasi Umum Perangkat Daerah			730.650.676	0	0		115.933.000		23.448.339		18.753.810		37.312.937		29.652.080		109.167.166		109.167.166			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1005		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	322.228.525	0	0	5	40.443.000	0	17.825.019	0	7.097.910	0	10.591.877	5	2.673.000	5	38.187.806	5	38.187.806	83,33	11,85	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1006		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	408.422.151	0	0	12	75.490.000	0	5.623.320	3	11.655.900	3	26.721.060	3	26.979.080	9	70.979.360	9	70.979.360	12,5	17,38	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.891.000.000	0	0		2.696.000.000		0		599.400		0		9.802.159		10.401.559		10.401.559			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1008		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2.891.000.000	0	0	1	2.696.000.000	0	0	0	599.400	1	0	0	9.802.159	1	10.401.559	1	10.401.559	50	0,36	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1009		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.107.704.430	0	0		1.626.718.004		353.152.688		358.903.135		360.051.261		368.061.568		1.440.168.652		1.440.168.652			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1010		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	2.053.139.413	0	0	12	343.199.912	0	75.870.240	3	70.570.229	3	70.723.033	3	83.915.221	9	301.078.723	9	301.078.723	12,5	14,66	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1011		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	8.054.565.017	0	0	12	1.283.518.092	0	277.282.448	3	288.332.906	3	289.328.228	3	284.146.347	9	1.139.089.929	9	1.139.089.929	12,5	14,14	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1012		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.626.194.211	0	0		356.084.250		51.684.556		78.083.759		73.468.471		137.722.301		340.959.087		340.959.087			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1013		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	234	1.357.961.015	0	0	39	212.536.350	0	31.674.023	2	43.806.994	7	57.039.413	9	69.015.920	18	201.536.350	18	201.536.350	7,69	14,84	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1014		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	2.558.600.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1015		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.439	709.633.190	0	0	1	8.734.000	0	8.680.000	0	0	0	0	0	0	0	8.680.000	0	8.680.000	0	1,22	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1016		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	240	134.813.900	0	11.330.533	60	34.276.765	60	16.429.058	60	68.706.381	180	130.742.737	180	130.742.737	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1017		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Program	100	619.768.382.081	0	0		102.608.868.410		3.261.419.621		37.427.359.853		6.698.855.167		50.092.248.247		97.479.882.888		97.479.882.888		15,73	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1018			Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak	73,97				73,45						78,06		73,45		73,45		73,45		99,3		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1019			Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1020			Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	84,83				84,33						85,12		85,12		85,12		85,12		100,35		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1021			Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	58,64				56,96						59,07		57,23		57,23		57,23		97,59		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1022		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			307.501.236.630	0	0		54.471.661.910		1.971.244.390		19.559.467.415		2.966.117.388		26.977.085.577		51.473.914.770		51.473.914.770			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1023		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	21.788.304.225	0	0	335	5.625.196.100	0	7.639.045	0	74.924.428	0	528.000.811	335	3.571.256.725	335	4.181.821.009	335	4.181.821.009	######	19,19	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1024		Pengadaan Mebel Sekolah Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	3.283.626.635	0	0	7	1.316.501.910	0	0	0	0	0	0	7	1.311.327.493	7	1.311.327.493	7	1.311.327.493	116,67	39,94	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15.500	1.813.745.000	0	0	3000	298.084.700	0	34.938.360	0	2.457.540	0	239.730.848	6000	15.475.695	6.000	292.602.443	6.000	292.602.443	38,71	16,13	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.834	39.535.223.206	0	0	13	6.132.782.300	0	1.779.002.757	3	1.293.375.385	3	1.268.649.295	3	1.236.702.732	9	5.577.730.169	9	5.577.730.169	0,32	14,11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7.194	786.920.329	0	0	450	120.529.200	0	915.517	275	91.027.981	100	4.370.172	50	1.698.300	425	98.011.970	425	98.011.970	5,91	12,46	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2.010	879.501.421	0	0	335	74.417.500	0	0	0	0	0	28.622.089	335	31.508.433	335	60.130.522	335	60.130.522	16,67	6,84	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2.010	182.311.146.617	0	0	335	31.293.180.000	0	0	0	16.445.340.000	0	0	335	14.669.009.964	335	31.114.349.964	335	31.114.349.964	16,67	17,07	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.919	862.611.559	0	0	649	247.608.800	0	39.300.243	0	1.500.000	0	50.493.628	649	155.829.519	649	247.123.390	649	247.123.390	10,96	28,65	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1031		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	510	350.325.625	0	0	241	14.220.000	0	0	0	0	0	0	241	13.099.380	241	13.099.380	241	13.099.380	47,25	3,74	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1032		Pengembangan konten digital untuk pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	230	191.137.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1033		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	5	227.272.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1034		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	790.597.875	0	0	241	12.645.000	0	0	0	0	0	1.671.460	241	10.561.880	241	12.233.340	241	12.233.340	######	1,55	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1035		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6	232.704.560	0	0	241	10.900.000	0	0	0	799.200	0	1.598.400	241	8.492.400	241	10.890.000	241	10.890.000	######	4,68	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1036		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12	418.121.655	0	0	2	49.109.800	0	0	0	0	0	2.592.904	2	43.614.172	2	46.207.076	2	46.207.076	16,67	11,05	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1037		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6	412.452.688	0	0	335	43.418.000	0	28.291.500	0	0	0	0	335	0	335	28.291.500	335	28.291.500	######	6,86	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1038		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24	22.598.388.368	0	0	9	3.477.558.600	0	0	0	3.631.352	0	219.500.079	9	2.735.419.867	9	2.958.551.298	9	2.958.551.298	37,5	13,09	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2.075	1.888.577.643	0	0	450	281.901.000	0	22.703.833	55	35.086.429	285	169.563.314	0	198.191	340	227.551.767	340	227.551.767	16,39	12,05	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1040		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.010	3.779.199.494	0	0	335	630.711.800	0	37.917.802	0	300.013.920	0	157.420.688	335	70.219.150	335	565.571.560	335	565.571.560	16,67	14,97	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1041		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	198.200	20.478.727.300	0	0	35200	3.146.216.800	0	20.535.333	0	1.311.311.180	0	293.903.700	35200	1.475.752.930	35.200	3.101.503.143	35.200	3.101.503.143	17,76	15,14	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1042		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8	4.872.652.900	0	0	4	1.696.680.400	0	0	0	0	0	0	4	1.626.918.746	4	1.626.918.746	4	1.626.918.746	50	33,39	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1043		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			196.883.914.287	0	0		31.653.890.500		315.688.153		11.439.784.041		2.603.392.771		15.511.138.807		29.870.003.772		29.870.003.772			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1044		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	26.131.064.550	0	0	1	5.350.947.800	0	9.030.635	0	87.418.257	0	1.143.356.005	1	3.090.988.190	1	4.330.793.087	1	4.330.793.087	16,67	16,57	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1045		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	21.123.845.608	0	0	3	2.352.854.100	0	989.454	0	136.980.157	0	235.664.883	3	1.578.471.906	3	1.952.106.400	3	1.952.106.400	25	9,24	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1046		Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6	1.672.081.400	0	0	1	210.801.200	0	0	0	1.453.212	0	0	1	205.741.175	1	207.194.387	1	207.194.387	16,67	12,39	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1047		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110.093	16.914.652.050	0	0	18853	2.495.793.500	0	14.863.721	0	1.140.233.142	0	389.831.544	18853	925.286.872	18.853	2.470.215.279	18.853	2.470.215.279	17,12	14,6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1048		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18.000	2.301.813.675	0	0	3700	398.150.000	0	2.465.254	0	40.522.390	3700	277.703.302	0	74.160.445	3.700	394.851.391	3.700	394.851.391	20,56	17,15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1049		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.680	6.931.769.299	0	0	900	976.796.500	0	279.511.371	244	208.198.500	219	170.961.600	219	161.094.174	682	819.765.645	682	819.765.645	14,57	11,83	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1050		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5.232	643.420.041	0	0	872	98.592.800	0	671.827	105	0	567	7.324.960	120	74.577.253	792	82.574.040	792	82.574.040	15,14	12,83	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1051		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	402	368.682.475	0	0	67	23.391.200	0	0	0	1.228.884	0	4.337.280	67	4.980.480	67	10.546.644	67	10.546.644	16,67	2,86	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1052		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	402	111.873.672.651	0	0	67	18.891.860.000	0	0	0	9.762.180.000	0	0	67	9.044.125.783	67	18.806.305.783	67	18.806.305.783	16,67	16,81	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1053		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	960	169.917.438	0	0	160	25.389.000	0	3.153.621	0	7.413.380	0	1.578.420	160	6.371.656	160	18.517.077	160	18.517.077	16,67	10,9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1054		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	387	235.506.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1055		Pengembangan konten digital untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18	368.909.375	0	0	3	22.600.000	0	0	0	12.360.660	0	4.799.700	3	0	3	17.160.360	3	17.160.360	16,67	4,65	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1056		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	454	253.381.250	0	0	67	17.875.000	0	0	0	0	0	0	67	17.816.440	67	17.816.440	67	17.816.440	14,76	7,03	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1057		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5	170.854.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1058		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6	218.955.625	0	0	1	12.500.000	0	0	0	0	0	12.060.960	1	0	1	12.060.960	1	12.060.960	16,67	5,51	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1059		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12	388.542.975	0	0	2	32.633.600	0	0	0	0	0	0	2	30.270.011	2	30.270.011	2	30.270.011	16,67	7,79	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1060		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6	289.756.875	0	0	1	27.700.000	0	0	0	0	0	20.836.560	1	2.197.800	1	23.034.360	1	23.034.360	16,67	7,95	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1061		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	402	3.660.485.700	0	0	67	256.250.000	0	4.702.570	0	16.871.760	0	188.479.365	67	35.752.408	67	245.806.103	67	245.806.103	16,67	6,72	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1062		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	440	1.406.635.175	0	0	637	196.755.800	0	299.700	117	18.365.417	520	135.984.359	0	17.946.343	637	172.595.819	637	172.595.819	144,77	12,27	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1063		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7	1.759.967.500	0	0	4	263.000.000	0	0	0	6.558.282	4	10.473.833	0	241.357.871	4	258.389.986	4	258.389.986	57,14	14,68	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1064		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			106.360.160.836	0	0		15.645.715.000		946.397.463		6.030.494.505		1.096.156.474		7.315.451.839		15.388.500.281		15.388.500.281			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1065		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.252	2.638.068.432	0	0	372	48.850.000	0	2.726.118	0	33.300.000	0	659.340	372	11.917.748	372	48.603.206	372	48.603.206	16,52	1,84	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1066		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	9.654	19.472.744.987	0	0	1459	2.990.505.300	0	852.432.799	0	676.167.320	0	665.252.810	1459	660.610.222	1.459	2.854.463.151	1.459	2.854.463.151	15,11	14,66	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1067		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.980	441.289.075	0	0	330	58.029.700	0	28.895.274	0	1.635.900	0	1.438.560	330	6.219.330	330	38.189.064	330	38.189.064	16,67	8,65	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1068		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			0	0	825	90.178.500	0	299.700	0	4.547.061	0	40.024.445	825	45.053.592	825	89.924.798	825	89.924.798	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1069		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	4.958	59.615.646.576	0	0	825	10.130.500.000	0	0	0	5.161.200.000	0	0	825	4.956.672.451	825	10.117.872.451	825	10.117.872.451	16,64	16,97	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1070		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.958	1.069.975.150	0	0	825	157.013.200	0	15.288.810	0	1.002.536	0	73.588.059	825	66.884.081	825	156.763.486	825	156.763.486	16,64	14,65	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1071		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	427.952.175	0	0	100	29.625.000	0	0	0	23.056.080	0	0	100	6.111.580	100	29.167.660	100	29.167.660	######	6,82	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1072		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6	206.225.625	0	0	50	4.955.000	0	0	0	4.941.760	0	0	50	0	50	4.941.760	50	4.941.760	833,33	2,4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1073		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	6	269.730.250	0	0	1	29.224.000	0	0	0	0	0	22.032.782	1	0	1	22.032.782	1	22.032.782	16,67	8,17	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1074		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi PAUD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5	116.165.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1075		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2.100	1.402.997.719	0	0	350	214.987.000	0	0	0	299.160	0	111.537.648	350	64.382.045	350	176.218.853	350	176.218.853	16,67	12,56	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1076		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	10.406.531.550	0	0	4	77.737.800	0	1.156.065	1	27.053.603	3	1.863.030	0	47.193.855	4	77.266.553	4	77.266.553	22,22	0,74	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1077		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	49	8.265.653.647	0	0	29	1.495.875.000	0	3.955.587	0	3.099.700	29	18.590.079	0	1.445.408.135	29	1.471.053.501	29	1.471.053.501	59,18	17,8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1078		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4.958	2.027.179.925	0	0	825	318.234.500	0	41.643.110	0	94.191.385	0	161.169.721	825	4.998.800	825	302.003.016	825	302.003.016	16,64	14,9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1079		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9.023.070.328	0	0		837.601.000		28.089.615		397.613.892		33.188.534		288.572.024		747.464.065		747.464.065			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1080		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.460	3.623.480.718	0	0	230	202.567.700	0	0	151	124.852.294	0	1.881.400	0	1.999.200	151	128.732.894	151	128.732.894	6,14	3,55	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1081		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138	488.868.750	0	0	23	77.504.000	0	22.840.000	0	17.130.000	0	17.429.700	23	17.573.971	23	74.973.671	23	74.973.671	16,67	15,34	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1082		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	126.227.125	0	0	10	9.224.000	0	0	0	0	0	0	10	8.121.800	10	8.121.800	10	8.121.800	16,67	6,43	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1083		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	72	512.533.950	0	0	11	61.472.700	0	699.300	7	3.092.218	4	9.512.877	0	46.496.884	11	59.801.279	11	59.801.279	15,28	11,67	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1084		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	72	3.151.663.122	0	0	12	439.140.000	0	0	0	219.570.000	0	0	12	213.181.369	12	432.751.369	12	432.751.369	16,67	13,73	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1085		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	80	177.487.075	0	0	11	15.132.700	0	4.550.315	0	967.043	11	3.964.957	0	1.198.800	11	10.681.115	11	10.681.115	13,75	6,02	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1086		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5	335.259.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1087		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5	91.202.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1088		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5	48.101.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1089		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5	80.427.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1090		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500	387.819.275	0	0	30	32.559.900	0	0	30	32.002.337	0	399.600	0	0	30	32.401.937	30	32.401.937	6	8,35	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1091		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	4	400.533.047	0	0		0		0		0	1	0	1	0	1	0	1	0	25	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1092		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			400.533.047	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1093		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	5	400.533.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1094		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik	47,65	440.186.425	0	0		0		0		0	50,47	0	41,61	0	41,61	0	41,61	0	87,32	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1095		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			440.186.425	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1096		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	303.186.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1097		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1098		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			104.207.867.410	0	0		13.836.018.506		211.856.518		4.365.753.511		884.847.626		8.176.814.200		13.639.271.855		13.639.271.855			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1099		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha	39,14	7.047.077.804	0	0	35,66	919.322.100		0		378.552.635	33,8	359.339.677	37,76	180.187.205	37,76	918.079.517	37,76	918.079.517	96,49	13,03	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1100		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.131.825.720	0	0		99.435.100		0		11.991.696		68.149.513		18.707.803		98.849.012		98.849.012			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1101		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	835	608.444.320	0	0	80	50.244.400	0	0	0	0	80	49.904.606	0	0	80	49.904.606	80	49.904.606	9,58	8,2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1102		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6	284.325.400	0	0	1	37.162.700	0	0	0	0	0	18.244.907	1	18.707.803	1	36.952.710	1	36.952.710	16,67	13	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1103		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30	239.056.000	0	0	5	12.028.000	0	0	0	11.991.696	5	0	0	0	5	11.991.696	5	11.991.696	16,67	5,02	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1104		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.915.252.084	0	0		819.887.000		0		366.560.939		291.190.164		161.479.402		819.230.505		819.230.505			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1105		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	6	5.582.312.000	0	0	1	819.887.000	0	0	0	366.560.939	0	291.190.164	1	161.479.402	1	819.230.505	1	819.230.505	16,67	14,68	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1106		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	200	332.940.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1107		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.	56,72	97.160.789.606	0	0	55,58	12.916.696.406		211.856.518		3.987.200.876		525.507.949	55,76	7.996.626.995	55,76	12.721.192.338	55,76	12.721.192.338	98,3	13,09	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1108		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			41.931.940.820	0	0		1.548.597.620		132.492.118		188.540.188		317.391.706		780.870.527		1.419.294.539		1.419.294.539			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1109		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	18	41.931.940.820	0	0	3	1.548.597.620	0	132.492.118	0	188.540.188	0	317.391.706	3	780.870.527	3	1.419.294.539	3	1.419.294.539	16,67	3,38	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1110		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			55.228.848.786	0	0		11.368.098.786		79.364.400		3.798.660.688		208.116.243		7.215.756.468		11.301.897.799		11.301.897.799			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1111		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	5.082	35.218.848.786	0	0	744	11.368.098.786	0	79.364.400	0	3.798.660.688	704	208.116.243	45	7.215.756.468	749	11.301.897.799	749	11.301.897.799	14,74	32,09	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1112		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	400	20.010.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1113		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			823.687.558	0	0		206.270.000		0		0		62.776.931		125.256.274		188.033.205		188.033.205			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1114		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya	56,72	823.687.558	0	0	26,87	206.270.000		0		0	26,62	62.776.931	27,09	125.256.274	27,09	188.033.205	27,09	188.033.205	47,77	22,83	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1115		Pendidikan Berbasis Budaya			823.687.558	0	0		206.270.000		0		0		62.776.931		125.256.274		188.033.205		188.033.205			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1116		Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	6	823.687.558	0	0	1	206.270.000	0	0	0	0	1	62.776.931	0	125.256.274	1	188.033.205	1	188.033.205	16,67	22,83	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1117	Meningkatnya Kemandirian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			16.228.437.052	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perdagangan
1118		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	16.228.437.052	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	Dinas Perdagangan
1119		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			6.000.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perdagangan
1120		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	3	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1121		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			10.228.437.052	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perdagangan
1122		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	10.228.437.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1123		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			84.068.959.461	0	0		8.338.009.384		1.487.279.917		2.039.975.486		2.227.596.921		1.945.004.918		7.699.857.242		7.699.857.242			Dinas Perdagangan
1124		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	25.913.337.406	0	0	100	4.372.095.884		1.078.894.886		1.079.498.800		824.730.414	100	993.905.130	100	3.977.029.230	100	3.977.029.230	100	15,35	Dinas Perdagangan
1125		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.746.600	0	0		14.568.600		700.000		8.026.905		3.922.600		343.028		12.992.533		12.992.533			Dinas Perdagangan
1126		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	44.060.900	0	0	3	9.282.900	0	300.000	0	4.928.559	3	3.552.600	0	-804.928	3	7.976.231	3	7.976.231	23,08	18,1	Dinas Perdagangan
1127		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	43.685.700	0	0	21	5.285.700	0	400.000	4	3.098.346	5	370.000	4	1.147.956	13	5.016.302	13	5.016.302	16,05	11,48	Dinas Perdagangan
1128		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.982.310.295	0	0		3.816.072.855		987.422.608		954.393.264		696.602.311		811.685.404		3.450.103.587		3.450.103.587			Dinas Perdagangan
1129		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	955	21.512.805.495	0	0	720	3.750.838.055	0	973.774.528	0	936.171.886	0	682.638.413	720	795.484.316	720	3.388.069.143	720	3.388.069.143	75,39	15,75	Dinas Perdagangan
1130		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	348.750.000	0	0	1	55.750.000	0	13.350.000	0	13.800.000	0	12.600.000	1	13.775.000	1	53.525.000	1	53.525.000	16,67	15,35	Dinas Perdagangan
1131		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	120.754.800	0	0	14	9.484.800	0	298.080	3	4.421.378	4	1.363.898	4	2.426.088	11	8.509.444	11	8.509.444	13,1	7,05	Dinas Perdagangan
1132		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perdagangan
1133		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1134		Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.324.300	0	0		30.056.300		2.305.300		8.307.335		5.390.100		12.993.628		28.996.363		28.996.363			Dinas Perdagangan
1135		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	106.730.300	0	0	5	14.452.300	0	1.905.300	1	5.532.335	1	3.790.100	2	2.260.500	4	13.488.235	4	13.488.235	44,44	12,64	Dinas Perdagangan
1136		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	118.594.000	0	0	2	15.604.000	0	400.000	0	2.775.000	0	1.600.000	2	10.733.128	2	15.508.128	2	15.508.128	11,76	13,08	Dinas Perdagangan
1137		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			159.996.206	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perdagangan
1138		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	98.252.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1139		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	61.743.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1140		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.080.166.754	0	0		346.949.829		81.465.631		63.006.135		76.803.790		100.389.319		321.664.875		321.664.875			Dinas Perdagangan
1141		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	1.033.196.454	0	0	12	172.199.409	0	40.747.210	3	34.113.582	3	38.689.927	3	46.149.685	9	159.700.404	9	159.700.404	52,94	15,46	Dinas Perdagangan
1142		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	1.046.970.300	0	0	12	174.750.420	0	40.718.421	3	28.892.553	3	38.113.863	2	54.239.634	8	161.964.471	8	161.964.471	47,06	15,47	Dinas Perdagangan
1143		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.327.793.251	0	0		164.448.300		7.001.347		45.765.161		42.011.613		68.493.751		163.271.872		163.271.872			Dinas Perdagangan
1144		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130	863.120.000	0	0	25	138.439.000	0	6.701.347	4	33.252.061	9	37.759.313	7	59.620.650	20	137.333.371	20	137.333.371	15,38	15,91	Dinas Perdagangan
1145		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	308.400.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1146		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81	156.272.800	0	0	11	26.009.300	0	300.000	3	12.513.100	3	4.252.300	1	8.873.101	7	25.938.501	7	25.938.501	8,64	16,6	Dinas Perdagangan
1147		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik	48	53.658.112.458	0	0	40	3.049.799.700		371.716.955		695.409.314	36	1.173.097.244	40	706.293.064	40	2.946.516.577	40	2.946.516.577	83,33	5,49	Dinas Perdagangan
1148		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			50.473.035.658	0	0		2.587.411.300		284.505.960		581.541.684		1.043.072.769		580.012.612		2.489.133.025		2.489.133.025			Dinas Perdagangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1149		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17	35.528.713.658	0	0	1	291.275.200	0	298.080	0	39.310.792	1	235.333.785	0	11.542.664	1	286.485.321	1	286.485.321	5,88	0,81	Dinas Perdagangan
1150		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	150	14.944.322.000	0	0	25	2.296.136.100	0	284.207.880	6	542.230.892	7	807.738.984	6	568.469.948	19	2.202.647.704	19	2.202.647.704	12,67	14,74	Dinas Perdagangan
1151		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			3.185.076.800	0	0		462.388.400		87.210.995		113.867.630		130.024.475		126.280.452		457.383.552		457.383.552			Dinas Perdagangan
1152		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17.026	1.510.545.800	0	0	2738	217.772.900	0	48.595.555	734	63.808.391	683	58.158.876	757	46.612.544	2.174	217.175.366	2.174	217.175.366	12,77	14,38	Dinas Perdagangan
1153		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	24.932	1.674.531.000	0	0	4026	244.615.500	0	38.615.440	900	50.059.239	900	71.865.599	1326	79.667.908	3.126	240.208.186	3.126	240.208.186	12,54	14,34	Dinas Perdagangan
1154		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu	5,67	2.497.136.491	0	0	5,92	625.310.000		4.737.783		228.718.617	5,99	186.609.850	5,23	73.433.213	5,23	493.499.463	5,23	493.499.463	92,24	19,76	Dinas Perdagangan
1155		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			710.875.691	0	0		299.449.200		198.720		14.174.649		180.359.850		3.082.922		197.816.141		197.816.141			Dinas Perdagangan
1156		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15	710.875.691	0	0	3	299.449.200	0	198.720	0	14.174.649	0	180.359.850	3	3.082.922	3	197.816.141	3	197.816.141	20	27,83	Dinas Perdagangan
1157		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.786.260.800	0	0		325.860.800		4.539.063		214.543.968		6.250.000		70.350.291		295.683.322		295.683.322			Dinas Perdagangan
1158		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	74	766.260.800	0	0	13	325.860.800	0	4.539.063	4	214.543.968	3	6.250.000	4	70.350.291	11	295.683.322	11	295.683.322	14,86	38,59	Dinas Perdagangan
1159		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	1.020.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1160		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	27	1.082.879.999	0	0	12	151.197.000		0		2.302.425	9	3.903.990	12	139.537.171	12	145.743.586	12	145.743.586	44,44	13,46	Dinas Perdagangan
1161		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.082.879.999	0	0		151.197.000		0		2.302.425		3.903.990		139.537.171		145.743.586		145.743.586			Dinas Perdagangan
1162		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8	530.368.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1163		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1164		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3	56.117.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
1165		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	730	376.394.000	0	0	110	151.197.000	0	0	0	2.302.425	60	3.903.990	50	139.537.171	110	145.743.586	110	145.743.586	15,07	38,72	Dinas Perdagangan
1166		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	95,88	917.493.107	0	0	90,5	139.606.800		31.930.293		34.046.330	73,95	39.255.423	90,58	31.836.340	90,58	137.068.386	90,58	137.068.386	94,47	14,94	Dinas Perdagangan
1167		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			917.493.107	0	0		139.606.800		31.930.293		34.046.330		39.255.423		31.836.340		137.068.386		137.068.386			Dinas Perdagangan
1168		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	36.870	917.493.107	0	0	6000	139.606.800	0	31.930.293	1476	34.046.330	1377	39.255.423	1683	31.836.340	4.536	137.068.386	4.536	137.068.386	12,3	14,94	Dinas Perdagangan
1169	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0	0	0		618.091.721		0		27.335.919		590.552.880		0		617.888.799		617.888.799			Dinas Perhubungan
1170		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	18,6	0	0	0	16,96	618.091.721		0		27.335.919	16,96	590.552.880	16,96	0	16,96	617.888.799	16,96	617.888.799	91,17	0	Dinas Perhubungan
1171		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			0	0	0		618.091.721		0		27.335.919		590.552.880		0		617.888.799		617.888.799			Dinas Perhubungan
1172		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			0	0	1	123.504.570	0	0	0	5.614.188	1	117.811.440	0	0	1	123.425.628	1	123.425.628	0	0	Dinas Perhubungan
1173		Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates			0	0	1	494.587.151	0	0	0	21.721.731	1	472.741.440	0	0	1	494.463.171	1	494.463.171	0	0	Dinas Perhubungan
1174		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			112.352.224.035	0	0		15.580.454.166		2.888.148.045		3.638.414.586		5.418.844.921		3.074.263.476		15.019.671.028		15.019.671.028			Dinas Perhubungan
1175		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	36.751.468.022	0	0	100	4.117.085.991		972.960.937		1.094.750.533		827.210.934	96,15	862.303.287	96,15	3.757.225.691	96,15	3.757.225.691	96,15	10,22	Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1176		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			219.184.100	0	0		21.634.700		8.217.887		7.963.772		3.795.368		1.426.905		21.403.932		21.403.932			Dinas Perhubungan
1177		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	92.019.900	0	0	3	12.013.500	0	4.626.913	0	5.541.379	1	1.732.253	0	0	1	11.900.545	1	11.900.545	7,69	12,93	Dinas Perhubungan
1178		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108	127.164.200	0	0	18	9.621.200	0	3.590.974	4	2.422.393	4	2.063.115	4	1.426.905	12	9.503.387	12	9.503.387	11,11	7,47	Dinas Perhubungan
1179		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.747.880.765	0	0		3.355.372.695		839.843.937		862.541.991		662.945.548		677.648.037		3.042.979.513		3.042.979.513			Dinas Perhubungan
1180		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288	20.254.224.365	0	0	48	3.295.731.495	0	824.073.056	0	847.250.126	0	648.399.199	48	663.792.856	48	2.983.515.237	48	2.983.515.237	16,67	14,73	Dinas Perhubungan
1181		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	386.107.200	0	0	2	50.473.800	0	13.637.259	1	11.746.470	0	13.273.845	1	11.757.079	2	50.414.653	2	50.414.653	2,78	13,06	Dinas Perhubungan
1182		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	107.549.200	0	0	14	9.167.400	0	2.133.622	4	3.545.395	3	1.272.504	4	2.098.102	11	9.049.623	11	9.049.623	13,1	8,41	Dinas Perhubungan
1183		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.202.700	0	0		1.202.700		0		0		692.091		386.730		1.078.821		1.078.821			Dinas Perhubungan
1184		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30	12.202.700	0	0	5	1.202.700	0	0	0	0	0	692.091	0	386.730	0	1.078.821	0	1.078.821	0	8,84	Dinas Perhubungan
1185		Administrasi Umum Perangkat Daerah			454.102.000	0	0		46.024.500		10.957.853		14.212.382		2.870.520		17.107.095		45.147.850		45.147.850			Dinas Perhubungan
1186		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	172.336.000	0	0	1	19.966.500	0	9.368.093	0	7.230.022	0	475.000	1	2.609.057	1	19.682.172	1	19.682.172	16,67	11,42	Dinas Perhubungan
1187		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	281.766.000	0	0	12	26.058.000	0	1.589.760	3	6.982.360	3	2.395.520	3	14.498.038	9	25.465.678	9	25.465.678	12,5	9,04	Dinas Perhubungan
1188		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.656.269.100	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perhubungan
1189		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	76	10.656.269.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
1190		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.132.526.957	0	0		348.930.096		83.977.951		73.755.424		73.712.508		75.808.513		307.254.396		307.254.396			Dinas Perhubungan
1191		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	1.150.326.900	0	0	4	185.054.400	0	36.264.778	0	35.579.156	0	35.983.884	4	38.507.557	4	146.335.375	4	146.335.375	16,67	12,72	Dinas Perhubungan
1192		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	982.200.057	0	0	2	163.875.696	0	47.713.173	0	38.176.268	0	37.728.624	2	37.300.956	2	160.919.021	2	160.919.021	16,67	16,38	Dinas Perhubungan
1193		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.529.302.400	0	0		343.921.300		29.963.309		136.276.964		83.194.899		89.926.007		339.361.179		339.361.179			Dinas Perhubungan
1194		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204	2.034.210.400	0	0	36	282.287.800	0	25.763.200	11	117.018.825	7	55.471.400	14	80.072.680	32	278.326.105	32	278.326.105	15,69	13,68	Dinas Perhubungan
1195		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	414	495.092.000	0	0	30	61.633.500	0	4.200.109	8	19.258.139	9	27.723.499	6	9.853.327	23	61.035.074	23	61.035.074	5,56	12,33	Dinas Perhubungan
1196		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Capaian Program		75.600.756.013	0	0	100	11.463.368.175		1.915.187.108		2.543.664.053		4.591.633.987		2.211.960.189		11.262.445.337		11.262.445.337	#DIV/0!	14,9	Dinas Perhubungan
1197		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			61.198.480.463	0	0		9.139.405.525		1.400.798.634		1.954.873.476		4.084.585.613		1.544.656.478		8.984.914.201		8.984.914.201			Dinas Perhubungan
1198		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1.116	18.049.282.938	0	0	152	2.400.015.100	0	3.473.689	0	107.369.426	152	2.281.553.362	0	735.264	152	2.393.131.741	152	2.393.131.741	13,62	13,26	Dinas Perhubungan
1199		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	462	3.663.090.500	0	0	50	438.885.500	0	4.232.859	50	32.372.165	0	337.432.585	0	0	50	374.037.609	50	374.037.609	10,82	10,21	Dinas Perhubungan
1200		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21.288	2.437.594.200	0	0	3548	448.558.200	0	30.404.136	921	240.309.173	976	29.496.980	958	126.364.134	2.855	426.574.423	2.855	426.574.423	13,41	17,5	Dinas Perhubungan
1201		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	19.012	37.048.512.825	0	0	212	5.851.946.725	0	1.362.687.950	0	1.574.822.712	210	1.436.102.686	2	1.417.557.080	212	5.791.170.428	212	5.791.170.428	1,12	15,63	Dinas Perhubungan
1202		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.160.357.200	0	0		425.131.900		102.061.368		174.496.843		75.399.408		70.650.000		422.607.619		422.607.619			Dinas Perhubungan
1203		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	24	2.160.357.200	0	0	4	425.131.900	0	102.061.368	4	174.496.843	0	75.399.408	0	70.650.000	4	422.607.619	4	422.607.619	16,67	19,56	Dinas Perhubungan
1204		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			3.148.450.900	0	0		509.785.900		100.234.897		51.807.692		140.727.999		215.884.880		508.655.468		508.655.468			Dinas Perhubungan
1205		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24	3.148.450.900	0	0	4	509.785.900	0	100.234.897	1	51.807.692	1	140.727.999	1	215.884.880	3	508.655.468	3	508.655.468	12,5	16,16	Dinas Perhubungan
1206		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.085.998.700	0	0		367.767.600		110.803.834		35.012.370		106.841.920		100.543.784		353.201.908		353.201.908			Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1207		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	33.934	1.361.181.600	0	0	8530	264.681.600	0	110.384.254	975	13.063.614	1631	106.241.920	1022	21.869.640	3.628	251.559.428	3.628	251.559.428	10,69	18,48	Dinas Perhubungan
1208		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	126	724.817.100	0	0	21	103.086.000	0	419.580	0	21.948.756	0	600.000	21	78.674.144	21	101.642.480	21	101.642.480	16,67	14,02	Dinas Perhubungan
1209		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.111.937.400	0	0		630.582.400		153.019.416		195.477.936		89.917.907		179.907.466		618.322.725		618.322.725			Dinas Perhubungan
1210		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18	1.838.198.300	0	0	5	265.798.300	0	59.680.766	0	87.097.216	0	32.640.928	5	86.132.146	5	265.551.056	5	265.551.056	27,78	14,45	Dinas Perhubungan
1211		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	24	2.273.739.100	0	0	4	364.784.100	0	93.338.650	0	108.380.720	0	57.276.979	4	93.775.320	4	352.771.669	4	352.771.669	16,67	15,52	Dinas Perhubungan
1212		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			135.829.900	0	0		13.129.900		3.960.825		3.130.516		2.889.760		3.080.258		13.061.359		13.061.359			Dinas Perhubungan
1213		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12	135.829.900	0	0	2	13.129.900	0	3.960.825	0	3.130.516	0	2.889.760	2	3.080.258	2	13.061.359	2	13.061.359	16,67	9,62	Dinas Perhubungan
1214		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.759.701.450	0	0		377.564.950		44.308.134		128.865.220		91.271.380		97.237.323		361.682.057		361.682.057			Dinas Perhubungan
1215		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18	2.759.701.450	0	0	3	377.564.950	0	44.308.134	1	128.865.220	0	91.271.380	2	97.237.323	3	361.682.057	3	361.682.057	16,67	13,11	Dinas Perhubungan
1216	Meningkatnya Daya Saing Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			25.413.256.310	0	0		7.415.102.884		1.020.880.825		2.214.740.644		1.661.410.636		1.446.186.269		6.343.218.374		6.343.218.374			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1217		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	19.669.612.981	0	0	100	4.963.764.283		990.299.939		1.482.376.571		1.092.793.130	95,65	628.834.422	95,65	4.194.304.062	95,65	4.194.304.062	95,65	21,32	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1218		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.838.614	0	0		14.753.300		2.454.475		6.286.030		2.479.061		2.245.402		13.464.968		13.464.968			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1219		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	41.078.113	0	0	4	9.660.400	0	1.153.980	0	4.737.220	3	1.261.210	1	1.739.962	4	8.892.372	4	8.892.372	28,57	21,65	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1220		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	32.760.501	0	0	21	5.092.900	0	1.300.495	4	1.548.810	5	1.217.851	4	505.440	13	4.572.596	13	4.572.596	16,05	13,96	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1221		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.221.086.187	0	0		2.501.452.801		565.381.731		621.724.813		487.426.594		478.820.384		2.153.353.522		2.153.353.522			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1222		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	558	15.965.990.873	0	0	408	2.461.263.401	0	554.539.929	0	611.357.213	0	478.358.894	408	469.441.084	408	2.113.697.120	408	2.113.697.120	73,12	13,24	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1223		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	214.711.750	0	0	12	34.350.000	0	9.075.000	3	9.075.000	3	8.100.000	3	8.100.000	9	34.350.000	9	34.350.000	52,94	16	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1224		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	89	40.383.564	0	0	19	5.839.400	0	1.766.802	4	1.292.600	5	967.700	7	1.279.300	16	5.306.402	16	5.306.402	17,98	13,14	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1225		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1226		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1227		Administrasi Umum Perangkat Daerah			256.647.003	0	0		30.168.600		2.534.580		4.720.820		11.614.955		9.102.260		27.972.615		27.972.615			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1228		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	109.158.267	0	0	5	11.269.100	0	648.900	0	3.962.660	1	1.891.900	4	3.908.900	5	10.412.360	5	10.412.360	50	9,54	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1229		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	147.488.736	0	0	12	18.899.500	0	1.885.680	3	758.160	3	9.723.055	3	5.193.360	9	17.560.255	9	17.560.255	52,94	11,91	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1230		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.930.281.989	0	0		2.050.741.318		362.207.151		789.258.669		520.400.837		58.024.345		1.729.891.002		1.729.891.002			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1231		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	1.830.741.318	0	0	1	1.800.741.318	0	362.207.151	0	541.195.169	1	520.400.837	0	58.024.345	1	1.481.827.502	1	1.481.827.502	50	80,94	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1232		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	99.540.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1233		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	1	250.000.000	0	0	1	248.063.500	0	0	0	0	1	248.063.500	1	248.063.500	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1234		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			721.894.973	0	0		285.503.414		50.405.302		42.908.639		45.164.893		55.581.592		194.060.426		194.060.426			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1235		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61	188.674.654	0	0	12	183.674.654	0	25.030.386	3	26.931.329	3	33.850.334	3	33.505.312	9	119.317.361	9	119.317.361	14,75	63,24	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1236		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61	533.220.319	0	0	12	101.828.760	0	25.374.916	3	15.977.310	3	11.314.559	3	22.076.280	9	74.743.065	9	74.743.065	14,75	14,02	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1237		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460.864.215	0	0		81.144.850		7.316.700		17.477.600		25.706.790		25.060.439		75.561.529		75.561.529			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1238		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96	405.640.215	0	0	16	66.920.850	0	5.891.700	4	12.405.300	4	22.275.990	4	20.818.089	12	61.391.079	12	61.391.079	12,5	15,13	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1239		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	293	55.224.000	0	0	17	14.224.000	0	1.425.000	6	5.072.300	3	3.430.800	5	4.242.350	14	14.170.450	14	14.170.450	4,78	25,66	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1240		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	51,89	1.458.121.193	0	0	12,08	324.595.400		2.168.091		279.843.465	6,04	32.539.038	6,35	8.529.240	6,35	323.079.834	6,35	323.079.834	12,25	22,16	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1241		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.458.121.193	0	0		324.595.400		2.168.091		279.843.465		32.539.038		8.529.240		323.079.834		323.079.834			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1242		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	664	1.082.070.118	0	0	60	6.706.100	0	934.881	30	2.030.944	30	2.352.706	13	320.000	73	5.638.531	73	5.638.531	10,99	0,52	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1243		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	613	376.051.075	0	0	93	317.889.300	0	1.233.210	1	277.812.521	89	30.186.332	1	8.209.240	91	317.441.303	91	317.441.303	14,85	84,41	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1244		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan kualitas SDM Koperasi yang dilatih		63.278.400	0	0	97,31	63.278.400		0		9.509.000	100	18.538.605	100	20.178.200	100	48.225.805	100	48.225.805	0	76,21	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1245		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			63.278.400	0	0		63.278.400		0		9.509.000		18.538.605		20.178.200		48.225.805		48.225.805			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1246		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	24	63.278.400	0	0	24	63.278.400	0	0	0	9.509.000	24	18.538.605	0	20.178.200	24	48.225.805	24	48.225.805	100	76,21	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1247		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Mempunyai Legalitas	71,99	2.907.806.300	0	0	42,35	1.607.021.050		6.499.893		356.539.855	48,43	385.496.727	48,76	592.525.914	48,76	1.341.062.389	48,76	1.341.062.389	67,74	46,12	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1248		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.907.806.300	0	0		1.607.021.050		6.499.893		356.539.855		385.496.727		592.525.914		1.341.062.389		1.341.062.389			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1249		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1.617	2.337.281.895	0	0	668	1.405.797.650	0	2.700.623	167	353.618.205	167	339.855.915	167	447.140.370	501	1.143.315.113	501	1.143.315.113	30,98	48,92	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1250		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	940	524.245.986	0	0	55	197.204.500	0	2.849.980	0	799.600	0	45.271.012	55	144.985.744	55	193.906.336	55	193.906.336	5,85	36,99	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1251		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	315.964	46.278.419	0	0	57335	4.018.900	0	949.290	1500	2.122.050	1500	369.800	42408	399.800	45.408	3.840.940	45.408	3.840.940	14,37	8,3	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1252		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1253		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Omzet Usaha Mikro	######	1.314.437.436	0	0	######	456.443.751		21.912.902		86.471.753	######	132.043.136	######	196.118.493	######	436.546.284	######	436.546.284	90,3	33,21	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1254		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.314.437.436	0	0		456.443.751		21.912.902		86.471.753		132.043.136		196.118.493		436.546.284		436.546.284			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1255		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	680	1.314.437.436	0	0	100	456.443.751	0	21.912.902	40	86.471.753	40	132.043.136	20	196.118.493	100	436.546.284	100	436.546.284	14,71	33,21	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1256		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			19.322.998.773	0	0		374.524.700		0		164.669.513		98.404.421		98.779.198		361.853.132		361.853.132			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1257		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	10	19.322.998.773	0	0	2	374.524.700		0		164.669.513	2	98.404.421	2	98.779.198	2	361.853.132	2	361.853.132	20	1,87	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1258		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			19.322.998.773	0	0		374.524.700		0		164.669.513		98.404.421		98.779.198		361.853.132		361.853.132			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1259		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	2.002	19.322.998.773	0	0	262	374.524.700	0	0	50	164.669.513	60	98.404.421	150	98.779.198	260	361.853.132	260	361.853.132	12,99	1,87	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1260		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0	0	0		729.706.700		79.056.510		114.698.137		244.800.937		259.982.368		698.537.952		698.537.952			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1261		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun ke-n	######	0	0	0	######	729.706.700		79.056.510		114.698.137	######	244.800.937	######	259.982.368	######	698.537.952	######	698.537.952	95,4	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1262		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			0	0	0		729.706.700		79.056.510		114.698.137		244.800.937		259.982.368		698.537.952		698.537.952			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1263		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0	0	1	67.601.900	0	150.000	0	19.537.836	1	39.437.588	0	3.367.184	1	62.492.608	1	62.492.608	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1264		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			0	0	6	144.409.800	0	16.009.590	0	43.760.416	0	30.162.232	6	51.671.640	6	141.603.878	6	141.603.878	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1265		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			0	0	5	517.695.000	0	62.896.920	1	51.399.885	2	175.201.117	2	204.943.544	5	494.441.466	5	494.441.466	0	0	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1266	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			28.687.479.598	0	0		4.770.798.723		1.163.516.655		1.446.242.697		1.046.606.431		1.003.733.684		4.660.099.467		4.660.099.467			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1267		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	23.204.569.330	0	0	100	3.704.866.803		968.675.480		1.081.164.079		779.367.200	96,3	771.329.993	96,3	3.600.536.752	96,3	3.600.536.752	96,3	15,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1268		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.783.600	0	0		11.083.800		2.436.198		5.342.940		1.858.140		1.379.020		11.016.298		11.016.298			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1269		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	25.263.000	0	0	3	7.397.000	0	1.635.696	0	4.224.060	2	965.034	1	515.884	3	7.340.674	3	7.340.674	23,08	29,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1270		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	22.520.600	0	0	21	3.686.800	0	800.502	4	1.118.880	5	893.106	4	863.136	13	3.675.624	13	3.675.624	16,05	16,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1271		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.107.407.728	0	0		2.947.368.477		803.858.838		809.082.537		614.217.840		624.319.699		2.851.478.914		2.851.478.914			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1272		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234	17.908.129.728	0	0	39	2.910.986.477	0	793.153.840	0	801.432.537	0	605.753.655	39	614.851.091	39	2.815.191.123	39	2.815.191.123	16,67	15,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1273		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	175.013.800	0	0	1	32.397.400	0	8.713.517	0	7.650.000	0	7.650.000	1	8.372.106	1	32.385.623	1	32.385.623	16,67	18,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1274		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	24.264.200	0	0	14	3.984.600	0	1.991.481	3	0	4	814.185	4	1.096.502	11	3.902.168	11	3.902.168	13,1	16,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1275		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.413.800	0	0		7.413.800		1.874.152		239.760		5.000.000		259.000		7.372.912		7.372.912			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1276		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	2.413.800	0	0	1	2.413.800	0	1.874.152	0	239.760	0	0	1	259.000	1	2.372.912	1	2.372.912	16,67	98,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1277		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	55.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	1	0	0	5.000.000	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	10	9,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1278		Administrasi Umum Perangkat Daerah			332.328.800	0	0		44.722.800		16.231.208		5.109.150		19.722.594		3.066.000		44.128.952		44.128.952			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1279		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	134.665.800	0	0	5	19.568.800	0	8.558.614	2	3.670.590	1	4.336.394	1	2.881.000	4	19.446.598	4	19.446.598	40	14,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1280		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	197.663.000	0	0	12	25.154.000	0	7.672.594	3	1.438.560	3	15.386.200	3	185.000	9	24.682.354	9	24.682.354	52,94	12,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1281		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			621.335.500	0	0		128.145.500		0		124.000.756		0		0		124.000.756		124.000.756			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1282		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21	621.335.500	0	0	1	128.145.500	0	0	3	124.000.756	0	0	-2	0	1	124.000.756	1	124.000.756	4,76	19,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1283		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.242.698.002	0	0		380.736.276		116.619.341		82.934.535		87.793.477		90.845.924		378.193.277		378.193.277			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1284		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61	661.953.614	0	0	12	121.706.832	0	35.192.342	3	23.842.989	3	28.701.931	3	31.754.378	9	119.491.640	9	119.491.640	14,75	18,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1285		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61	1.580.744.388	0	0	12	259.029.444	0	81.426.999	3	59.091.546	3	59.091.546	3	59.091.546	9	258.701.637	9	258.701.637	14,75	16,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1286		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.795.601.900	0	0		185.396.150		27.655.743		54.454.401		50.775.149		51.460.350		184.345.643		184.345.643			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1287		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	695.808.300	0	0	9	114.049.150	0	19.103.900	3	30.259.500	2	39.898.100	2	23.927.850	7	113.189.350	7	113.189.350	12,5	16,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1288		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	836.808.700	0	0	1	29.999.000	0	0	1	5.082.449	0	4.897.049	0	19.999.000	1	29.978.498	1	29.978.498	5,56	3,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1289		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	252	262.984.900	0	0	35	41.348.000	0	8.551.843	9	19.112.452	9	5.980.000	11	7.533.500	29	41.177.795	29	41.177.795	11,51	15,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1290		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	######	5.063.912.969	0	0	######	992.946.120		190.502.230		337.684.518	######	228.306.033	######	230.203.691	######	986.696.472	######	986.696.472	101,59	19,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1291		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.218.358.069	0	0		499.471.220		68.881.459		229.626.526		162.187.707		35.152.601		495.848.293		495.848.293			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1292		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24	102.212.400	0	0	6	12.371.600	0	10.083.465	0	878.676	0	199.800	6	0	6	11.161.941	6	11.161.941	25	10,92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1293		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	6	829.088.369	0	0	1	99.929.700	0	30.149.171	0	13.532.568	1	27.198.416	0	28.918.721	1	99.798.876	1	99.798.876	16,67	12,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1294		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5	53.088.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1295		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	180.700	33.698.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1296		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	5	193.296.000	0	0	1	38.659.200	0	19.984.042	0	8.414.296	1	9.689.139	0	400.000	1	38.487.477	1	38.487.477	20	19,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1297		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	8.600	589.608.500	0	0	1100	65.037.500	0	1.598.800	170	559.440	530	55.857.488	400	5.833.880	1.100	63.849.608	1.100	63.849.608	12,79	10,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1298		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300	1.417.366.100	0	0	100	283.473.220	0	7.065.981	0	206.241.546	100	69.242.864	0	0	100	282.550.391	100	282.550.391	33,33	19,93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1299		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.845.554.900	0	0		493.474.900		121.620.771		108.057.992		66.118.326		195.051.090		490.848.179		490.848.179			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1300		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	18	229.408.400	0	0	1	25.489.200	0	21.741.135	0	2.618.460	0	1.000.000	0	0	0	25.359.595	0	25.359.595	0	11,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1301		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	209.748.500	0	0	1	41.949.700	0	11.930.000	0	0	0	30.000.000	1	19.600	1	41.949.600	1	41.949.600	33,33	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1302		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18	1.235.455.500	0	0	6	259.093.500	0	5.460.493	6	24.595.207	0	32.418.326	0	195.031.490	6	257.505.516	6	257.505.516	33,33	20,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1303		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	3	170.942.500	0	0	1	166.942.500	0	82.489.143	1	80.844.325	0	2.700.000	0	0	1	166.033.468	1	166.033.468	33,33	97,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1304		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Naskah Kuno yang Terdata	16	418.997.299	0	0	11	72.985.800		4.338.945		27.394.100	11	38.933.198	11	2.200.000	11	72.866.243	11	72.866.243	68,75	17,39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1305		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			418.997.299	0	0		72.985.800		4.338.945		27.394.100		38.933.198		2.200.000		72.866.243		72.866.243			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1306		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	300	366.184.200	0	0	1	72.985.800	0	4.338.945	0	27.394.100	1	38.933.198	0	2.200.000	1	72.866.243	1	72.866.243	0,33	19,9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1307		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5	52.813.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1308		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1.700.602.352	0	0		274.372.700		73.351.481		43.867.846		66.085.475		79.167.212		262.472.014		262.472.014			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1309		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai ASKI Perangkat Daerah	89	1.700.602.352	0	0	86,5	274.372.700		73.351.481		43.867.846	86,47	66.085.475		79.167.212		262.472.014		262.472.014	0	15,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1310		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			1.299.717.252	0	0		213.517.000		69.168.335		22.899.311		41.739.926		69.318.112		203.125.684		203.125.684			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1311		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	112.800	1.057.910.852	0	0	18700	176.817.900	0	67.518.487	6000	13.378.061	6000	25.699.039	4700	60.476.234	16.700	167.071.821	16.700	167.071.821	14,8	15,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1312		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25	241.806.400	0	0	5	36.699.100	0	1.649.848	0	9.521.250	5	16.040.887	0	8.841.878	5	36.053.863	5	36.053.863	20	14,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1313		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			343.032.200	0	0		60.855.700		4.183.146		20.968.535		24.345.549		9.849.100		59.346.330		59.346.330			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1314		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	91.500	343.032.200	0	0	14000	60.855.700	0	4.183.146	6400	20.968.535	5173	24.345.549	2985	9.849.100	14.558	59.346.330	14.558	59.346.330	15,91	17,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1315		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			57.852.900	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1316		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	500	57.852.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1317	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			30.216.966.795	0	0		4.731.072.286		852.383.603		1.153.451.502		1.131.726.379		1.362.752.376		4.500.313.860		4.500.313.860			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1318		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	21.554.023.443	0	0	100	3.084.769.736		754.263.149		881.428.314		630.179.604	100	630.452.254	100	2.896.323.321	100	2.896.323.321	100	13,44	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1319		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137.456.200	0	0		17.662.600		8.845.521		5.652.809		499.500		2.358.417		17.356.247		17.356.247			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1320		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	90.237.800	0	0	4	11.293.900	0	6.172.860	0	3.643.590	1	0	1	1.299.477	2	11.115.927	2	11.115.927	14,29	12,32	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1321		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	47.218.400	0	0	21	6.368.700	0	2.672.661	4	2.009.219	5	499.500	6	1.058.940	15	6.240.320	15	6.240.320	11,9	13,22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1322		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.556.181.992	0	0		2.591.948.504		672.384.603		676.737.065		550.214.747		512.537.246		2.411.873.661		2.411.873.661			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1323		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234	16.763.211.917	0	0	34	2.486.444.404	0	641.612.490	0	660.837.065	0	507.342.491	34	496.637.246	34	2.306.429.292	34	2.306.429.292	14,53	13,76	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1324		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	528.861.050	0	0	12	70.427.400	0	17.425.917	4	15.900.000	2	21.150.000	4	15.900.000	10	70.375.917	10	70.375.917	58,82	13,31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1325		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	264.109.025	0	0	14	35.076.700	0	13.346.196	4	0	3	21.722.256	4	0	11	35.068.452	11	35.068.452	13,1	13,28	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1326		Administrasi Umum Perangkat Daerah			347.769.125	0	0		37.068.500		3.637.160		5.241.500		10.576.620		17.215.800		36.671.080		36.671.080			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1327		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	347.769.125	0	0	1	37.068.500	0	3.637.160	0	5.241.500	0	10.576.620	1	17.215.800	1	36.671.080	1	36.671.080	16,67	10,54	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1328		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			892.500.590	0	0		140.500.832		42.086.144		23.104.291		31.951.760		40.790.882		137.933.077		137.933.077			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1329		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	892.500.590	0	0	12	140.500.832	0	42.086.144	3	23.104.291	3	31.951.760	3	40.790.882	9	137.933.077	9	137.933.077	150	15,45	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1330		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.620.115.536	0	0		297.589.300		27.309.721		170.692.649		36.936.977		57.549.909		292.489.256		292.489.256			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1331		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85	1.074.740.650	0	0	18	153.127.500	0	21.712.792	2	48.152.959	2	27.101.763	6	51.826.860	10	148.794.374	10	148.794.374	11,76	13,84	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1332		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	857.999.324	0	0	1	119.650.000	0	0	1	118.900.000	0	0	0	0	1	118.900.000	1	118.900.000	2,08	13,86	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1333		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106	687.375.562	0	0	28	24.811.800	0	5.596.929	1	3.639.690	3	9.835.214	14	5.723.049	18	24.794.882	18	24.794.882	16,98	3,61	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1334		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Capaian Program	100	8.362.822.352	0	0		1.346.181.550		98.120.454		201.075.822		397.694.303		612.692.122		1.309.582.701		1.309.582.701		15,66	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1335			Persentase Perencanaan Penataan Ruang	100				57,14						28,57		28,57		28,57		28,57		28,57		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1336			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1337		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			3.707.625.517	0	0		666.686.650		24.604.578		76.829.587		275.637.032		271.661.306		648.732.503		648.732.503			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1338		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	8	2.018.630.055	0	0	2	417.273.400	0	12.487.677	0	15.071.348	0	248.824.102	2	138.541.146	2	414.924.273	2	414.924.273	25	20,55	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1339		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	6	1.221.691.419	0	0	1	177.802.700	0	12.116.901	0	56.414.288	0	23.511.640	1	72.898.160	1	164.940.989	1	164.940.989	16,67	13,5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1340		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	6	467.304.043	0	0	1	71.610.550	0	0	0	5.343.951	0	3.301.290	1	60.222.000	1	68.867.241	1	68.867.241	16,67	14,74	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1341		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			3.692.617.328	0	0		509.321.500		56.365.369		115.080.196		109.188.725		215.656.479		496.290.769		496.290.769			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1342		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	845	1.886.446.950	0	0	345	291.833.200	0	25.905.369	21	100.669.620	34	57.595.512	60	104.519.291	115	288.689.792	115	288.689.792	13,61	15,3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1343		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	10	1.806.170.378	0	0	1	217.488.300	0	30.460.000	0	14.410.576	0	51.593.213	1	111.137.188	1	207.600.977	1	207.600.977	10	11,49	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1344		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			962.579.507	0	0		170.173.400		17.150.507		9.166.039		12.868.546		125.374.337		164.559.429		164.559.429			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1345		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	30	114.334.280	0	0	5	17.520.800	0	0	0	4.116.379	0	1.038.960	5	12.051.239	5	17.206.578	5	17.206.578	16,67	15,05	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1346		Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.875	357.361.119	0	0	375	53.451.400	0	17.150.507	63	5.049.660	132	9.818.600	50	18.139.998	245	50.158.765	245	50.158.765	13,07	14,04	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1347		Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	6	490.884.108	0	0	1	99.201.200	0	0	0	0	0	2.010.986	1	95.183.100	1	97.194.086	1	97.194.086	16,67	19,8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1348		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Capaian Program	88,75	300.121.000	0	0		300.121.000		0		70.947.366		103.852.472		119.608.000		294.407.838		294.407.838		98,1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1349			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	100				12,5						6,25		16,67		16,67		16,67		16,67		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1350			Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	57,5																		0		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1351		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			300.121.000	0	0		300.121.000		0		70.947.366		103.852.472		119.608.000		294.407.838		294.407.838			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1352		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7	300.121.000	0	0	2	300.121.000	0	0	0	70.947.366	2	103.852.472	0	119.608.000	2	294.407.838	2	294.407.838	28,57	98,1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1353		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1354		Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1355		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			15.394.521.860	0	0		5.194.876.233		57.692.256		893.563.362		2.704.120.195		1.182.638.993		4.838.014.806		4.838.014.806			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1356		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	1.440.086.609	0	0	100	162.198.253		28.221.983		71.225.146		25.807.279	100	21.540.533	100	146.794.941	100	146.794.941	100	10,19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1357		Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.425.495	0	0		38.402.900		8.919.879		17.543.941		9.116.097		2.810.909		38.390.826		38.390.826			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1358		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	232.425.495	0	0	12	38.402.900	0	8.919.879	6	17.543.941	2	9.116.097	0	2.810.909	8	38.390.826	8	38.390.826	133,33	16,52	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1359		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			644.156.347	0	0		36.600.000		0		36.564.000		0		0		36.564.000		36.564.000			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1360		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	120	644.156.347	0	0	1	36.600.000	0	0	0	36.564.000	1	0	0	0	1	36.564.000	1	36.564.000	0,83	5,68	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1361		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			563.504.767	0	0		87.195.353		19.302.104		17.117.205		16.691.182		18.729.624		71.840.115		71.840.115			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1362		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	563.504.767	0	0	12	87.195.353	0	19.302.104	3	17.117.205	3	16.691.182	3	18.729.624	9	71.840.115	9	71.840.115	32,14	12,75	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1363		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	100	192.271.593	0	0	100	30.068.700		0		21.536.360	100	4.499.498	100	2.946.384	100	28.982.242	100	28.982.242	100	15,07	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1364		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			192.271.593	0	0		30.068.700		0		21.536.360		4.499.498		2.946.384		28.982.242		28.982.242			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1365		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	192.271.593	0	0	10	30.068.700	0	0	3	21.536.360	3	4.499.498	4	2.946.384	10	28.982.242	10	28.982.242	16,67	15,07	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1366		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan	100	10.624.743.662	0	0	100	2.431.231.180		847.120		10.533.368	95,65	1.855.880.956	100	539.111.535	100	2.406.372.979	100	2.406.372.979	100	22,65	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1367		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.624.743.662	0	0		2.431.231.180		847.120		10.533.368		1.855.880.956		539.111.535		2.406.372.979		2.406.372.979			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1368		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.610	10.624.743.662	0	0	398	2.431.231.180	0	847.120	0	10.533.368	0	1.855.880.956	398	539.111.535	398	2.406.372.979	398	2.406.372.979	24,72	22,65	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1369		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Ketersediaan Dokumen Inventarisasi Tanah PEMDA		0	0	0	100	54.118.100		13.846.995		8.276.480	100	6.350.000	100	10.702.679	100	39.176.154	100	39.176.154	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1370		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0		54.118.100		13.846.995		8.276.480		6.350.000		10.702.679		39.176.154		39.176.154			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1371		Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1372		Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			0	0	3	54.118.100	0	13.846.995	0	8.276.480	0	6.350.000	3	10.702.679	3	39.176.154	3	39.176.154	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1373		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA	76,47	3.137.419.996	0	0	73,5	450.591.700		14.776.158		182.387.382	43,44	93.035.160	115,6	28.599.944	115,6	318.798.644	115,6	318.798.644	151,17	10,16	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1374		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			3.137.419.996	0	0		450.591.700		14.776.158		182.387.382		93.035.160		28.599.944		318.798.644		318.798.644			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1375		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	809.070.000	0	0	1	127.431.200	0	3.265.760	0	6.189.382	0	2.737.760	1	14.959.520	1	27.152.422	1	27.152.422	16,67	3,36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1376		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.230	2.328.349.996	0	0	720	323.160.500	0	11.510.398	240	176.198.000	239	90.297.400	0	13.640.424	479	291.646.222	479	291.646.222	21,48	12,53	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1377		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Capaian Program	100	0	0	0		2.066.668.300		0		599.604.626		718.547.302		579.737.918		1.897.889.846		1.897.889.846		0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1378			Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	78,17				63,98						59,53		64,18		64,18		64,18		82,11		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1379			Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	100				22,1						19,57		22,1		22,1		22,1		22,1		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1380		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			0	0	0		918.700.100		0		175.199.733		380.882.123		202.434.923		758.516.779		758.516.779			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1381		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			0	0	1	852.995.800	0	0	0	160.877.022	0	349.500.812	1	183.073.271	1	693.451.105	1	693.451.105	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1382		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa			0	0	30	65.704.300	0	0	0	14.322.711	0	31.381.311	30	19.361.652	30	65.065.674	30	65.065.674	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1383		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			0	0	0		1.124.118.200		0		424.404.893		314.254.679		377.302.995		1.115.962.567		1.115.962.567			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1384		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			0	0	20	87.187.100	0	0	0	38.157.302	0	29.532.339	20	18.999.237	20	86.688.878	20	86.688.878	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1385		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			0	0	80	1.036.931.100	0	0	0	386.247.591	0	284.722.340	80	358.303.758	80	1.029.273.689	80	1.029.273.689	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1386		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			0	0	0		23.850.000		0		0		23.410.500		0		23.410.500		23.410.500			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1387		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)			0	0	2	23.850.000	0	0	0	0	0	23.410.500	2	0	2	23.410.500	2	23.410.500	0	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
1388	Meningkatnya Kemandirian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			7.343.926.925	0	0		1.792.065.272		182.396.890		112.704.525		579.486.949		891.779.059		1.766.367.423		1.766.367.423			Dinas Pertanian dan Pangan
1389		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	105	7.343.926.925	0	0	80	1.792.065.272		182.396.890		112.704.525	80	579.486.949	80	891.779.059	80	1.766.367.423	80	1.766.367.423	76,19	24,05	Dinas Pertanian dan Pangan
1390		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			7.343.926.925	0	0		1.792.065.272		182.396.890		112.704.525		579.486.949		891.779.059		1.766.367.423		1.766.367.423			Dinas Pertanian dan Pangan
1391		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6	7.343.926.925	0	0	1	1.792.065.272	0	182.396.890	0	112.704.525	0	579.486.949	1	891.779.059	1	1.766.367.423	1	1.766.367.423	16,67	24,05	Dinas Pertanian dan Pangan
1392		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8.622.212.625	0	0		1.324.668.900		9.289.927		539.738.357		438.010.720		214.546.970		1.201.585.974		1.201.585.974			Dinas Pertanian dan Pangan
1393		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Program	100	8.283.685.200	0	0		1.283.685.200		5.175.474		528.802.398		427.033.000		207.834.350		1.168.845.222		1.168.845.222		14,11	Dinas Pertanian dan Pangan
1394			Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari	######				######								######		######		######		109,46		Dinas Pertanian dan Pangan
1395			Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari	######				######								######		######		######		91,57		Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1396		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			4.133.996.300	0	0		1.133.996.300		3.259.681		395.890.261		418.587.200		204.860.650		1.022.597.792		1.022.597.792			Dinas Pertanian dan Pangan
1397		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	600	4.133.996.300	0	0	4	133.996.300	0	3.259.681	0	3.796.200	0	600.000	4	121.598.650	4	129.254.531	4	129.254.531	0,67	3,13	Dinas Pertanian dan Pangan
1398		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0	0	100	1.000.000.000	0	0	0	392.094.061	0	417.987.200	322	83.262.000	322	893.343.261	322	893.343.261	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1399		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			4.149.688.900	0	0		149.688.900		1.915.793		132.912.137		8.445.800		2.973.700		146.247.430		146.247.430			Dinas Pertanian dan Pangan
1400		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	600	4.149.688.900	0	0	2	149.688.900	0	1.915.793	0	132.912.137	0	8.445.800	2	2.973.700	2	146.247.430	2	146.247.430	0,33	3,52	Dinas Pertanian dan Pangan
1401		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Kategori Tahan dan Sangat Tahan Pangan	34,09	132.884.896	0	0	22,73	21.445.300		1.569.684		2.010.960	22,73	4.995.600	22,73	6.322.620	22,73	14.898.864	22,73	14.898.864	66,67	11,21	Dinas Pertanian dan Pangan
1402		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			132.884.896	0	0		21.445.300		1.569.684		2.010.960		4.995.600		6.322.620		14.898.864		14.898.864			Dinas Pertanian dan Pangan
1403		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12	132.884.896	0	0	4	21.445.300	0	1.569.684	0	2.010.960	0	4.995.600	4	6.322.620	4	14.898.864	4	14.898.864	33,33	11,21	Dinas Pertanian dan Pangan
1404		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	95,83	205.642.529	0	0	91,67	19.538.400		2.544.769		8.924.999	98,94	5.982.120	91,67	390.000	91,67	17.841.888	91,67	17.841.888	95,65	8,68	Dinas Pertanian dan Pangan
1405		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			205.642.529	0	0		19.538.400		2.544.769		8.924.999		5.982.120		390.000		17.841.888		17.841.888			Dinas Pertanian dan Pangan
1406		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6	205.642.529	0	0	1	19.538.400	0	2.544.769	0	8.924.999	0	5.982.120	1	390.000	1	17.841.888	1	17.841.888	16,67	8,68	Dinas Pertanian dan Pangan
1407		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			9.823.937.495	0	0		1.657.668.610		1.694.200		5.337.880		593.736.817		962.985.771		1.563.754.668		1.563.754.668			Dinas Pertanian dan Pangan
1408		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas kelompok tani lahan surjan dan kelompok wanita tani lumbung mataraman yang terfasilitasi	42,81	9.823.937.495	0	0	25,68	1.657.668.610		1.694.200		5.337.880	25,68	593.736.817	25,68	962.985.771	25,68	1.563.754.668	25,68	1.563.754.668	60	15,92	Dinas Pertanian dan Pangan
1409		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			4.271.899.800	0	0		236.910.658		933.509		1.828.200		225.875.044		3.679.500		232.316.253		232.316.253			Dinas Pertanian dan Pangan
1410		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	600	4.271.899.800	0	0	1	236.910.658	0	933.509	0	1.828.200	0	225.875.044	1	3.679.500	1	232.316.253	1	232.316.253	0,17	5,44	Dinas Pertanian dan Pangan
1411		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			5.552.037.695	0	0		1.420.757.952		760.691		3.509.680		367.861.773		959.306.271		1.331.438.415		1.331.438.415			Dinas Pertanian dan Pangan
1412		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	600	5.552.037.695	0	0	1	1.420.757.952	0	760.691	0	3.509.680	0	367.861.773	1	959.306.271	1	1.331.438.415	1	1.331.438.415	0,17	23,98	Dinas Pertanian dan Pangan
1413		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			90.361.422.454	0	0		23.456.885.751		3.894.708.702		5.613.883.185		6.463.797.948		5.692.497.443		21.664.887.278		21.664.887.278			Dinas Pertanian dan Pangan
1414		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	83.715.448.154	0	0	100	13.372.079.171		3.516.804.085		3.444.975.657		2.673.213.730	88,37	2.775.007.650	88,37	12.410.001.122	88,37	12.410.001.122	88,37	14,82	Dinas Pertanian dan Pangan
1415		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			425.516.300	0	0		65.516.300		17.627.851		14.940.080		15.926.494		14.595.000		63.089.425		63.089.425			Dinas Pertanian dan Pangan
1416		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	106.859.800	0	0	4	16.859.800	0	4.644.945	1	5.199.320	1	4.652.736	2	1.100.000	4	15.597.001	4	15.597.001	30,77	14,6	Dinas Pertanian dan Pangan
1417		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114	318.656.500	0	0	22	48.656.500	0	12.982.906	4	9.740.760	4	11.273.758	4	13.495.000	12	47.492.424	12	47.492.424	10,53	14,9	Dinas Pertanian dan Pangan
1418		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73.232.203.635	0	0		12.023.922.527		3.211.160.387		3.180.109.592		2.350.709.414		2.380.542.238		11.122.521.631		11.122.521.631			Dinas Pertanian dan Pangan
1419		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.028	72.681.279.735	0	0	2338	11.947.998.627	0	3.192.942.954	0	3.163.834.592	0	2.328.272.894	2338	2.362.510.038	2.338	11.047.560.478	2.338	11.047.560.478	16,67	15,2	Dinas Pertanian dan Pangan
1420		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	480.600.000	0	0	12	69.600.000	0	16.275.000	3	16.275.000	3	20.100.000	3	16.275.000	9	68.925.000	9	68.925.000	150	14,34	Dinas Pertanian dan Pangan
1421		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	70.323.900	0	0	14	6.323.900	0	1.942.433	3	0	3	2.336.520	5	1.757.200	11	6.036.153	11	6.036.153	13,1	8,58	Dinas Pertanian dan Pangan
1422		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.474.575	0	0		9.236.700		695.520		0		685.741		7.000.000		8.381.261		8.381.261			Dinas Pertanian dan Pangan
1423		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72	18.474.575	0	0	12	2.236.700	0	695.520	3	0	3	685.741	3	0	9	1.381.261	9	1.381.261	12,5	7,48	Dinas Pertanian dan Pangan
1424		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	51.000.000	0	0	2	7.000.000	0	0	0	0	0	0	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	16,67	13,73	Dinas Pertanian dan Pangan
1425		Administrasi Umum Perangkat Daerah			569.269.900	0	0		60.269.900		11.324.515		5.152.980		24.673.956		13.127.586		54.279.037		54.279.037			Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1426		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	215.848.400	0	0	1	27.848.400	0	8.027.275	0	619.680	0	12.364.819	0	2.720.286	0	23.732.060	0	23.732.060	0	10,99	Dinas Pertanian dan Pangan
1427		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	353.421.500	0	0	12	32.421.500	0	3.297.240	3	4.533.300	3	12.309.137	3	10.407.300	9	30.546.977	9	30.546.977	12,5	8,64	Dinas Pertanian dan Pangan
1428		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			185.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Pertanian dan Pangan
1429		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1430		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.353.877.894	0	0		861.399.144		243.732.979		195.099.174		197.362.451		194.330.599		830.525.203		830.525.203			Dinas Pertanian dan Pangan
1431		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	1.279.479.116	0	0	12	196.954.116	0	43.416.246	3	44.735.433	3	45.039.987	3	48.539.679	9	181.731.345	9	181.731.345	12,5	14,2	Dinas Pertanian dan Pangan
1432		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	4.074.398.778	0	0	12	664.445.028	0	200.316.733	3	150.363.741	3	152.322.464	3	145.790.920	9	648.793.858	9	648.793.858	12,5	15,92	Dinas Pertanian dan Pangan
1433		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.880.105.850	0	0		351.734.600		32.262.833		49.673.831		83.855.674		165.412.227		331.204.565		331.204.565			Dinas Pertanian dan Pangan
1434		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	810	1.896.120.400	0	0	138	272.332.900	0	24.875.565	37	42.977.336	30	62.498.908	46	125.874.377	113	256.226.186	113	256.226.186	13,95	13,51	Dinas Pertanian dan Pangan
1435		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.536.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	9.948.000	1	9.948.000	1	9.948.000	8,33	0,65	Dinas Pertanian dan Pangan
1436		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	447.985.450	0	0	63	69.401.700	0	7.387.268	24	6.696.495	10	21.356.766	19	29.589.850	53	65.030.379	53	65.030.379	44,17	14,52	Dinas Pertanian dan Pangan
1437		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian Program	100	0	0	0		2.913.222.880		92.661.470		577.128.614		854.937.965		1.051.805.299		2.576.533.348		2.576.533.348		0	Dinas Pertanian dan Pangan
1438			Produktivitas Padi	73,48				69,91						66,96		62,05		62,05		62,05		84,44		Dinas Pertanian dan Pangan
1439			Produktivitas Jagung	71,48				68,01						48,5		54,13		54,13		54,13		75,73		Dinas Pertanian dan Pangan
1440			Produktivitas Cabai	61,2				58,3						56,6		80,4		80,4		80,4		131,37		Dinas Pertanian dan Pangan
1441			Produktivitas Bawang Merah	133,7				127,2						99,3		100,6		100,6		100,6		75,24		Dinas Pertanian dan Pangan
1442			Populasi Ternak	######				######						######		######		######		######		99,05		Dinas Pertanian dan Pangan
1443			Persentase Sarana Pertanian yang digunakan dan Kondisinya Baik	76,06				75,17						74,63		74,63		74,63		74,63		98,13		Dinas Pertanian dan Pangan
1444		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			0	0	0		328.485.900		4.022.435		15.386.343		217.072.160		59.956.341		296.437.279		296.437.279			Dinas Pertanian dan Pangan
1445		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			0	0	2	328.485.900	0	4.022.435	0	15.386.343	0	217.072.160	2	59.956.341	2	296.437.279	2	296.437.279	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1446		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	0		2.079.094.480		87.075.874		550.834.214		341.209.565		810.733.721		1.789.853.374		1.789.853.374			Dinas Pertanian dan Pangan
1447		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			0	0	1	1.936.655.280	0	63.942.402	0	531.831.512	0	314.329.065	1	769.574.066	1	1.679.677.045	1	1.679.677.045	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1448		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			0	0	4	142.439.200	0	23.133.472	0	19.002.702	0	26.880.500	0	41.159.655	0	110.176.329	0	110.176.329	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1449		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			0	0	0		505.642.500		1.563.161		10.908.057		296.656.240		181.115.237		490.242.695		490.242.695			Dinas Pertanian dan Pangan
1450		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			0	0	55	505.642.500	0	1.563.161	0	10.908.057	44	296.656.240	11	181.115.237	55	490.242.695	55	490.242.695	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1451		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Capaian Program	100	6.247.471.400	0	0		1.301.416.500		21.248.805		297.183.103		936.717.441		33.744.520		1.288.893.869		1.288.893.869		20,63	Dinas Pertanian dan Pangan
1452			Persentase Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian					28,09						28,21		28,21		28,21		28,21		0		Dinas Pertanian dan Pangan
1453			Persentase Lahan yang Terfasilitasi Irigasi	9,21				8,69						8,62		8,67		8,67		8,67		94,13		Dinas Pertanian dan Pangan
1454		Pengembangan Prasarana Pertanian			0	0	0		322.903.500		20.134.112		267.344.329		15.437.999		15.239.335		318.155.775		318.155.775			Dinas Pertanian dan Pangan
1455		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1456		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			0	0	1	322.903.500	0	20.134.112	0	267.344.329	0	15.437.999	1	15.239.335	1	318.155.775	1	318.155.775	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1457		Pembangunan Prasarana Pertanian			6.247.471.400	0	0		978.513.000		1.114.693		29.838.774		921.279.442		18.505.185		970.738.094		970.738.094			Dinas Pertanian dan Pangan
1458		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	31	6.247.471.400	0	0	4	647.471.400	0	738.238	0	1.347.920	0	624.730.950	4	14.578.185	4	641.395.293	4	641.395.293	12,9	10,27	Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1459		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1460		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1461		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			0	0	1	331.041.600	0	376.455	0	28.490.854	0	296.548.492	1	3.927.000	1	329.342.801	1	329.342.801	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1462		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1463		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Capaian Program	100	398.502.900	0	0		3.118.877.300		165.558.682		752.524.657		839.705.093		973.723.015		2.731.511.447		2.731.511.447		685,44	Dinas Pertanian dan Pangan
1464			Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	91,08				90,16						92,43		92,38		92,38		92,38		101,43		Dinas Pertanian dan Pangan
1465			Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Hewan	98,8				98,61						99,46		99,53		99,53		99,53		100,73		Dinas Pertanian dan Pangan
1466		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			0	0	0		330.291.740		125.325.051		63.696.218		52.602.049		46.880.240		288.503.558		288.503.558			Dinas Pertanian dan Pangan
1467		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			0	0	1	97.112.140	0	69.999.782	0	349.650	0	2.569.650	1	2.336.000	1	75.255.082	1	75.255.082	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1468		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			0	0	4	233.179.600	0	55.325.269	1	63.346.568	1	50.032.399	1	44.544.240	3	213.248.476	3	213.248.476	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1469		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0		236.820.260		21.420.598		10.991.408		101.215.245		73.539.033		207.166.284		207.166.284			Dinas Pertanian dan Pangan
1470		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM			0	0	1	140.459.500	0	21.420.598	0	6.840.000	0	35.656.242	1	65.169.077	1	129.085.917	1	129.085.917	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1471		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			0	0	1	96.360.760	0	0	0	4.151.408	0	65.559.003	1	8.369.956	1	78.080.367	1	78.080.367	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1472		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0		2.341.268.800		10.112.154		629.775.262		653.199.999		739.415.850		2.032.503.265		2.032.503.265			Dinas Pertanian dan Pangan
1473		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			0	0	4	2.341.268.800	0	10.112.154	1	629.775.262	1	653.199.999	1	739.415.850	3	2.032.503.265	3	2.032.503.265	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1474		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			398.502.900	0	0		210.496.500		8.700.879		48.061.769		32.687.800		113.887.892		203.338.340		203.338.340			Dinas Pertanian dan Pangan
1475		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6	398.502.900	0	0	3	46.102.900	0	4.729.849	1	29.681.513	1	7.280.000	1	2.437.600	3	44.128.962	3	44.128.962	50	11,07	Dinas Pertanian dan Pangan
1476		Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan			0	0	1	164.393.600	0	3.971.030	0	18.380.256	0	25.407.800	1	111.450.292	1	159.209.378	1	159.209.378	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1477		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditangani	96,38	0	0	0	95,46	85.919.400		352.630		13.312.678	93,78	58.846.510	98,77	9.651.240	98,77	82.163.058	98,77	82.163.058	102,48	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1478		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			0	0	0		85.919.400		352.630		13.312.678		58.846.510		9.651.240		82.163.058		82.163.058			Dinas Pertanian dan Pangan
1479		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			0	0	926	85.919.400	0	352.630	255	13.312.678	255	58.846.510	246	9.651.240	756	82.163.058	756	82.163.058	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1480		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penerapan Teknologi yang dianjurkan	76,13	0	0	0	75,68	2.665.370.500		98.083.030		528.758.476	75,3	1.100.377.209	75,68	848.565.719	75,68	2.575.784.434	75,68	2.575.784.434	99,41	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1481		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			0	0	0		2.665.370.500		98.083.030		528.758.476		1.100.377.209		848.565.719		2.575.784.434		2.575.784.434			Dinas Pertanian dan Pangan
1482		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0	0	12	2.302.923.000	0	95.675.875	0	393.007.292	0	981.947.776	12	758.057.310	12	2.228.688.253	12	2.228.688.253	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1483		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0	0	96	362.447.500	0	2.407.155	0	135.751.184	0	118.429.433	96	90.508.409	96	347.096.181	96	347.096.181	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan
1484	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			72.080.174.569	0	0		19.031.905.803		4.276.380.079		4.177.854.835		4.439.842.168		4.642.910.065		17.536.987.147		17.536.987.147			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1485		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	21.352.077.469	0	0	100	3.855.768.303		953.616.742		941.115.139		915.174.642	96,97	843.118.877	96,97	3.653.025.400	96,97	3.653.025.400	96,97	17,11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1486		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.695.800	0	0		24.065.800		5.144.654		7.992.576		4.662.193		4.029.927		21.829.350		21.829.350			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1487		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	108.484.300	0	0	4	16.754.300	0	3.482.335	0	6.804.405	1	2.586.188	1	2.589.286	2	15.462.214	2	15.462.214	16,67	14,25	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1488		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	47.211.500	0	0	21	7.311.500	0	1.662.319	1	1.188.171	4	2.076.005	6	1.440.641	11	6.367.136	11	6.367.136	15,28	13,49	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1489		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.594.414.669	0	0		2.919.484.669		801.675.796		778.724.241		590.340.487		587.863.775		2.758.604.299		2.758.604.299			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1490		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	261	17.306.392.769	0	0	41	2.866.642.769	0	787.230.118	0	767.628.689	0	580.925.873	41	571.293.673	41	2.707.078.353	41	2.707.078.353	15,71	15,64	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1491		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	226.065.000	0	0	12	42.905.000	0	12.394.398	3	9.609.840	3	6.459.840	3	13.524.750	9	41.988.828	9	41.988.828	150	18,57	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1492		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	61.956.900	0	0	14	9.936.900	0	2.051.280	3	1.485.712	4	2.954.774	4	3.045.352	11	9.537.118	11	9.537.118	15,28	15,39	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1493		Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.715.000	0	0		55.915.000		1.037.106		4.591.544		17.724.008		12.031.998		35.384.656		35.384.656			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1494		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	38.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1495		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	197.925.000	0	0	12	55.915.000	0	1.037.106	3	4.591.544	3	17.724.008	3	12.031.998	9	35.384.656	9	35.384.656	12,5	17,88	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1496		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			382.170.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1497		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19	382.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1498		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.350.170.000	0	0		405.686.884		116.356.872		96.232.824		76.374.323		112.578.827		401.542.846		401.542.846			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1499		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	338.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1500		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	12	405.686.884	0	116.356.872	3	96.232.824	3	76.374.323	3	112.578.827	9	401.542.846	9	401.542.846	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1501		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	2.011.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1502		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			632.912.000	0	0		450.615.950		29.402.314		53.573.954		226.073.631		126.614.350		435.664.249		435.664.249			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1503		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	551.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1504		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	37	450.615.950	0	29.402.314	9	53.573.954	9	226.073.631	10	126.614.350	28	435.664.249	28	435.664.249	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1505		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102	81.712.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1506		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	485.570.800	0	0	42,62	70.794.900		4.273.600		4.861.600	50,82	39.120.706	67,21	17.849.688	67,21	66.105.594	67,21	66.105.594	67,21	13,61	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1507		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			49.480.000	0	0		4.321.600		0		0		523.035		2.678.820		3.201.855		3.201.855			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1508		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			0	0	1	4.321.600	0	0	0	0	0	523.035	1	2.678.820	1	3.201.855	1	3.201.855	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1509		#N/A	#N/A	6	49.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1510		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			436.090.800	0	0		66.473.300		4.273.600		4.861.600		38.597.671		15.170.868		62.903.739		62.903.739			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1511		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	30	9.796.000	0	0	15	0	0	9.106.656	0	664.848	15	9.771.504	15	9.771.504	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1512		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	12	7.316.500	0	388.800	0	1.091.200	0	4.398.997	0	800.000	0	6.678.997	0	6.678.997	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1513		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	53	163.310.800	0	0	7	49.360.800	0	3.884.800	2	3.770.400	3	25.092.018	0	13.706.020	5	46.453.238	5	46.453.238	9,43	28,44	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1514		#N/A	#N/A	375	272.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1515		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Capaian Program	100	4.364.603.300	0	0		1.301.753.300		1.580.000		29.457.217		292.958.281		276.038.440		600.033.938		600.033.938		13,75	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1516			Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1517			Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1518			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1519			Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100				100						100		100		100		100		100		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1520		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			3.546.783.100	0	0		550.673.100		1.580.000		29.457.217		292.717.720		176.768.640		500.523.577		500.523.577			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1521		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.772	2.553.550.000	0	0	462	425.160.000	0	600.000	462	467.865	0	261.678.060	0	120.400.000	462	383.145.925	462	383.145.925	16,67	15	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1522		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	180	176.876.000	0	0	30	21.876.000	0	0	0	453.437	0	5.018.517	30	11.554.000	30	17.025.954	30	17.025.954	16,67	9,63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1523		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.445	278.540.300	0	0	250	38.630.300	0	300.000	170	18.505.163	30	7.366.470	30	11.423.720	230	37.595.353	230	37.595.353	15,92	13,5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1524		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	360	121.970.600	0	0	250	11.000.600	0	0	75	2.048.950	75	3.983.284	65	4.928.000	215	10.960.234	215	10.960.234	59,72	8,99	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1525		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	144	76.740.000	0	0	24	12.000.000	0	0	24	0	0	0	0	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000	16,67	15,64	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1526		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	90	121.125.700	0	0	24	14.175.700	0	0	6	0	6	5.018.789	6	8.400.000	18	13.418.789	18	13.418.789	20	11,08	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1527		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	96	217.980.500	0	0	120	27.830.500	0	680.000	30	7.981.802	30	9.652.600	30	8.062.920	90	26.377.322	90	26.377.322	93,75	12,1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1528		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			817.820.200	0	0		751.080.200		0		0		240.561		99.269.800		99.510.361		99.510.361			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1529		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	30	817.820.200	0	0	7	751.080.200	0	0	1	0	2	240.561	4	99.269.800	7	99.510.361	7	99.510.361	23,33	12,17	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1530		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial	27,38	44.088.096.800	0	0	29,94	13.610.493.100		3.308.573.217		3.140.178.841	31,66	3.143.569.959	31,98	3.445.302.242	31,98	13.037.624.259	31,98	13.037.624.259	116,8	29,57	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1531		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			44.088.096.800	0	0		13.610.493.100		3.308.573.217		3.140.178.841		3.143.569.959		3.445.302.242		13.037.624.259		13.037.624.259			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1532		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	60.000	553.358.400	0	0	18400	72.778.400	0	1.953.494	0	5.669.892	0	11.753.209	37724	21.801.880	37.724	41.178.475	37.724	41.178.475	62,87	7,44	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1533		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota"	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	185.500	456.498.400	0	0	40000	80.078.400	0	12.511.296	0	2.243.160	0	14.642.140	46781	9.200.710	46.781	38.597.306	46.781	38.597.306	25,22	8,46	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1534		#N/A	#N/A	12.426	43.078.240.000	0	0	12	13.457.636.300	0	3.294.108.427	3	3.132.265.789	3	3.117.174.610	3	3.414.299.652	9	12.957.848.478	9	12.957.848.478	0,07	30,08	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1535		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	100	1.323.208.200	0	0	100	150.848.200		8.336.520		62.242.038	100	39.351.480	100	35.683.842	100	145.613.880	100	145.613.880	100	11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1536		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			356.210.000	0	0		32.120.000		0		15.047.160		15.047.160		39.960		30.134.280		30.134.280			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1537		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	960	356.210.000	0	0	160	32.120.000	0	0	65	15.047.160	30	15.047.160	45	39.960	140	30.134.280	140	30.134.280	14,58	8,46	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1538		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			966.998.200	0	0		118.728.200		8.336.520		47.194.878		24.304.320		35.643.882		115.479.600		115.479.600			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1539		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	102	110.019.600	0	0	40	3.489.600	0	0	40	2.518.280	0	79.920	0	657.942	40	3.256.142	40	3.256.142	39,22	2,96	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1540		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	400	856.978.600	0	0	100	115.238.600	0	8.336.520	100	44.676.598	0	24.224.400	0	34.985.940	100	112.223.458	100	112.223.458	25	13,1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1541		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	466.618.000	0	0	100	42.248.000		0		0	100	9.667.100	100	24.916.976	100	34.584.076	100	34.584.076	100	7,41	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1542		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			466.618.000	0	0		42.248.000		0		0		9.667.100		24.916.976		34.584.076		34.584.076			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1543		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6	466.618.000	0	0	1	42.248.000	0	0	0	0	1	9.667.100	0	24.916.976	1	34.584.076	1	34.584.076	16,67	7,41	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1544		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.429.147.700	0	0		833.811.150		132.403.652		189.658.882		236.069.396		230.305.905		788.437.835		788.437.835			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1545		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	71,74	600.347.700	0	0	71,69	98.878.500		12.492.467		24.430.794	70,6	17.354.518	70,6	43.241.065	70,6	97.518.844	70,6	97.518.844	98,41	16,24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1546		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			287.987.700	0	0		44.277.700		10.689.818		13.712.394		7.558.821		11.660.008		43.621.041		43.621.041			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1547		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37	287.987.700	0	0	7	44.277.700	0	10.689.818	2	13.712.394	1	7.558.821	3	11.660.008	6	43.621.041	6	43.621.041	16,22	15,15	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1548		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			312.360.000	0	0		54.600.800		1.802.649		10.718.400		9.795.697		31.581.057		53.897.803		53.897.803			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1549		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			0	0	1	20.251.400	0	0	0	0	0	839.160	1	19.296.107	1	20.135.267	1	20.135.267	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1550		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			0	0	4	34.349.400	0	1.802.649	1	10.718.400	1	8.956.537	2	12.284.950	4	33.762.536	4	33.762.536	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1551		#N/A	#N/A	191	312.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1552		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan)	4,9	3.153.850.000	0	0	12,69	628.631.350		118.433.616		134.254.834	8,46	153.887.278	19,59	182.772.120	19,59	589.347.848	19,59	589.347.848	400,11	18,69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1553		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			896.190.000	0	0		556.254.350		118.433.616		134.254.834		145.005.636		120.472.120		518.166.206		518.166.206			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1554		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	3	198.919.500	0	39.785.371	0	60.545.083	1	65.811.226	2	25.393.520	3	191.535.200	3	191.535.200	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1555		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	2	357.334.850	0	78.648.245	0	73.709.751	0	79.194.410	0	95.078.600	0	326.631.006	0	326.631.006	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1556		#N/A	#N/A	11	896.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1557		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.256.850.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1558		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1559		#N/A	#N/A	355	1.256.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1560		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.000.810.000	0	0		72.377.000		0		0		8.881.642		62.300.000		71.181.642		71.181.642			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1561		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			0	0	5	72.377.000	0	0	0	0	5	8.881.642	0	62.300.000	5	71.181.642	5	71.181.642	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1562		#N/A	#N/A	855	1.000.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1563		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak	20,69	593.250.000	0	0	9,2	106.301.300		1.477.569		30.973.254	6,9	64.827.600	24,14	4.292.720	24,14	101.571.143	24,14	101.571.143	116,67	17,12	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1564		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			593.250.000	0	0		106.301.300		1.477.569		30.973.254		64.827.600		4.292.720		101.571.143		101.571.143			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1565		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	9	106.301.300	0	1.477.569	3	30.973.254	3	64.827.600	2	4.292.720	8	101.571.143	8	101.571.143	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1566		#N/A	#N/A	260	593.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1567		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	0,01	81.700.000	0	0	0,03	0		0		0	0,03	0	0,04	0	0,04	0	0,04	0	374,69	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1568		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			81.700.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1569		#N/A	#N/A	122	81.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1570		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			364.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1571		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan	0,05	364.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1572		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			364.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1573		Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	190	364.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1574	Menurunnya Pengangguran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			76.117.569.272	0	0		9.086.654.736		1.285.197.882		4.366.012.824		1.622.903.043		1.508.159.436		8.782.273.185		8.782.273.185			Dinas Tenaga Kerja
1575		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	22.869.831.417	0	0	100	4.508.846.936		1.059.239.836		1.063.320.254		948.278.604	92,59	1.193.226.855	92,59	4.264.065.549	92,59	4.264.065.549	92,59	18,64	Dinas Tenaga Kerja
1576		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.735.326	0	0		16.791.600		3.817.500		6.862.115		2.322.800		3.586.600		16.589.015		16.589.015			Dinas Tenaga Kerja
1577		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	41.603.106	0	0	4	11.315.400	0	1.700.000	1	5.713.775	2	1.282.800	1	2.420.600	4	11.117.175	4	11.117.175	30,77	26,72	Dinas Tenaga Kerja
1578		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	36.132.220	0	0	21	5.476.200	0	2.117.500	4	1.148.340	4	1.040.000	5	1.166.000	13	5.471.840	13	5.471.840	18,06	15,14	Dinas Tenaga Kerja
1579		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.263.647.611	0	0		2.968.554.106		793.955.922		776.754.304		599.756.012		632.823.161		2.803.289.399		2.803.289.399			Dinas Tenaga Kerja
1580		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190	17.963.106.186	0	0	38	2.914.966.106	0	784.630.922	0	761.368.630	0	585.606.012	38	619.607.361	38	2.751.212.925	38	2.751.212.925	20	15,32	Dinas Tenaga Kerja
1581		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	264.394.915	0	0	12	48.046.500	0	8.925.000	3	12.934.860	3	13.050.000	3	11.636.200	9	46.546.060	9	46.546.060	180	17,6	Dinas Tenaga Kerja
1582		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	36.146.510	0	0	14	5.541.500	0	400.000	3	2.450.814	4	1.100.000	3	1.579.600	10	5.530.414	10	5.530.414	14,29	15,3	Dinas Tenaga Kerja
1583		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21.361.400	0	0		1.361.400		0		950.582		0		400.000		1.350.582		1.350.582			Dinas Tenaga Kerja
1584		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.361.400	0	0	1	1.361.400	0	0	0	950.582	0	0	1	400.000	1	1.350.582	1	1.350.582	0	99,21	Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1585		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1586		Administrasi Umum Perangkat Daerah			429.195.674	0	0		68.117.975		10.095.580		10.746.775		33.747.800		13.402.228		67.992.383		67.992.383			Dinas Tenaga Kerja
1587		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	157.084.540	0	0	5	25.220.500	0	3.781.270	1	5.416.775	1	11.045.024	2	4.952.228	4	25.195.297	4	25.195.297	40	16,04	Dinas Tenaga Kerja
1588		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	272.111.134	0	0	12	42.897.475	0	6.314.310	3	5.330.000	4	22.702.776	3	8.450.000	10	42.797.086	10	42.797.086	13,89	15,73	Dinas Tenaga Kerja
1589		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42.221.295	0	0		15.298.700		15.298.700		0		0		0		15.298.700		15.298.700			Dinas Tenaga Kerja
1590		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	42.221.295	0	0	1	15.298.700	0	15.298.700	0	0	0	0	0	0	0	15.298.700	0	15.298.700	0	36,23	Dinas Tenaga Kerja
1591		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.723.481.984	0	0		968.410.505		217.721.534		205.004.078		242.594.292		227.973.866		893.293.770		893.293.770			Dinas Tenaga Kerja
1592		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	1.136.805.867	0	0	12	191.457.400	0	36.996.818	3	36.160.757	3	37.728.179	3	42.045.460	9	152.931.214	9	152.931.214	52,94	13,45	Dinas Tenaga Kerja
1593		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	1.586.676.118	0	0	12	776.953.105	0	180.724.716	3	168.843.321	3	204.866.113	3	185.928.406	9	740.362.556	9	740.362.556	52,94	46,66	Dinas Tenaga Kerja
1594		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.312.188.127	0	0		470.312.650		18.350.600		63.002.400		69.857.700		315.041.000		466.251.700		466.251.700			Dinas Tenaga Kerja
1595		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	828.181.413	0	0	20	139.511.050	0	17.250.600	6	37.054.400	4	54.745.000	7	28.428.400	17	137.478.400	17	137.478.400	14,17	16,6	Dinas Tenaga Kerja
1596		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	300.765.000	0	0	1	300.765.000	0	0	0	14.278.500	0	7.494.100	0	276.980.200	0	298.752.800	0	298.752.800	0	99,33	Dinas Tenaga Kerja
1597		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	156	183.241.714	0	0	26	30.036.600	0	1.100.000	6	11.669.500	3	7.618.600	9	9.632.400	18	30.020.500	18	30.020.500	11,54	16,38	Dinas Tenaga Kerja
1598		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	100	810.496.549	0	0	100	159.625.200		160.000		35.592.479	0	38.697.290	100	84.036.400	100	158.486.169	100	158.486.169	100	19,55	Dinas Tenaga Kerja
1599		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			810.496.549	0	0		159.625.200		160.000		35.592.479		38.697.290		84.036.400		158.486.169		158.486.169			Dinas Tenaga Kerja
1600		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	16	742.081.196	0	0	1	150.343.600	0	160.000	0	35.312.115	0	30.095.600	1	83.736.400	1	149.304.115	1	149.304.115	6,25	20,12	Dinas Tenaga Kerja
1601		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30	68.415.353	0	0	5	9.281.600	0	0	0	280.364	0	8.601.690	5	300.000	5	9.182.054	5	9.182.054	16,67	13,42	Dinas Tenaga Kerja
1602		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Sertifikasi	95,83	7.848.926.607	0	0	93,75	1.068.101.000		164.101.237		241.662.496	100	489.583.004	100	129.841.504	100	1.025.188.241	100	1.025.188.241	104,35	13,06	Dinas Tenaga Kerja
1603		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			7.095.253.695	0	0		941.318.200		154.481.237		227.597.103		409.109.000		119.487.544		910.674.884		910.674.884			Dinas Tenaga Kerja
1604		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	976	6.809.671.149	0	0	190	882.811.800	0	151.020.437	0	223.869.103	142	381.185.794	16	97.518.124	158	853.593.458	158	853.593.458	16,19	12,54	Dinas Tenaga Kerja
1605		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12	64.425.839	0	0	2	9.175.900	0	0	0	0	0	5.190.206	2	2.829.120	2	8.019.326	2	8.019.326	16,67	12,45	Dinas Tenaga Kerja
1606		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	45	221.156.708	0	0	3	49.330.500	0	3.460.800	3	3.728.000	0	22.733.000	0	19.140.300	3	49.062.100	3	49.062.100	6,67	22,18	Dinas Tenaga Kerja
1607		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			698.699.712	0	0		117.578.300		9.620.000		13.510.591		79.945.000		2.286.160		105.361.751		105.361.751			Dinas Tenaga Kerja
1608		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta"	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60	698.699.712	0	0	1	117.578.300	0	9.620.000	0	13.510.591	1	79.945.000	0	2.286.160	1	105.361.751	1	105.361.751	1,67	15,08	Dinas Tenaga Kerja
1609		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			54.973.200	0	0		9.204.500		0		554.802		529.004		8.067.800		9.151.606		9.151.606			Dinas Tenaga Kerja
1610		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6	54.973.200	0	0	1	9.204.500	0	0	0	554.802	0	529.004	1	8.067.800	1	9.151.606	1	9.151.606	16,67	16,65	Dinas Tenaga Kerja
1611		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	80,21	40.975.524.027	0	0	79,92	3.257.068.600		47.881.289		2.995.167.795	73,95	130.966.682	79,95	68.474.677	79,95	3.242.490.443	79,95	3.242.490.443	99,68	7,91	Dinas Tenaga Kerja
1612		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			40.768.620.517	0	0		3.185.190.800		36.805.000		2.986.111.026		87.209.410		60.509.677		3.170.635.113		3.170.635.113			Dinas Tenaga Kerja
1613		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	11.553	685.672.715	0	0	1590	79.715.800	0	13.465.000	485	34.728.187	700	12.603.980	139	18.410.400	1.324	79.207.567	1.324	79.207.567	11,46	11,55	Dinas Tenaga Kerja
1614		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	90	691.659.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1615		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	4.815	39.391.288.353	0	0	785	3.105.475.000	0	23.340.000	785	2.951.382.839	30	74.605.430	10	42.099.277	825	3.091.427.546	825	3.091.427.546	17,13	7,85	Dinas Tenaga Kerja
1616		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			0	0	0		71.877.800		11.076.289		9.056.769		43.757.272		7.965.000		71.855.330		71.855.330			Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1617		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			0	0	4390	71.877.800	0	11.076.289	921	9.056.769	1422	43.757.272	1190	7.965.000	3.533	71.855.330	3.533	71.855.330	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1618		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			206.903.510	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Dinas Tenaga Kerja
1619		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	80	206.903.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1620		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	61,76	3.612.790.672	0	0	38,69	93.013.000		13.815.520		30.269.800	36,31	15.377.463	48,36	32.580.000	48,36	92.042.783	48,36	92.042.783	78,3	2,55	Dinas Tenaga Kerja
1621		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			396.619.403	0	0		67.096.400		11.991.744		10.515.000		12.642.519		31.110.000		66.259.263		66.259.263			Dinas Tenaga Kerja
1622		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	35	396.619.403	0	0	6	67.096.400	0	11.991.744	0	10.515.000	0	12.642.519	6	31.110.000	6	66.259.263	6	66.259.263	17,14	16,71	Dinas Tenaga Kerja
1623		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			3.216.171.269	0	0		25.916.600		1.823.776		19.754.800		2.734.944		1.470.000		25.783.520		25.783.520			Dinas Tenaga Kerja
1624		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			0	0	2	22.177.400	0	1.673.376	0	17.340.000	0	2.193.200	8	840.000	8	22.046.576	8	22.046.576	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1625		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12	191.712.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1626		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	82	19.239.200	0	0	7	3.739.200	0	150.400	0	2.414.800	0	541.744	7	630.000	7	3.736.944	7	3.736.944	8,54	19,42	Dinas Tenaga Kerja
1627		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5	31.756.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1628		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13.370	2.973.462.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1629		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			762.096.328	0	0		212.095.900		10.319.455		13.005.000		20.915.300		140.346.856		184.586.611		184.586.611			Dinas Tenaga Kerja
1630		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Program		762.096.328	0	0		212.095.900		10.319.455		13.005.000		20.915.300		140.346.856		184.586.611		184.586.611		24,22	Dinas Tenaga Kerja
1631			Persentase Kerjasama antar Daerah Tujuan Transmigrasi					100						0		100		100		100		0		Dinas Tenaga Kerja
1632			Persentase Transmigran yang Bertahan Selama 5 Tahun Terakhir	76,47																		0		Dinas Tenaga Kerja
1633		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			762.096.328	0	0		212.095.900		10.319.455		13.005.000		20.915.300		140.346.856		184.586.611		184.586.611			Dinas Tenaga Kerja
1634		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	12	673.596.328	0	0	2	212.095.900	0	10.319.455	0	13.005.000	0	20.915.300	5	140.346.856	5	184.586.611	5	184.586.611	41,67	27,4	Dinas Tenaga Kerja
1635		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	525	88.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
1636	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	INSPEKTORAT DAERAH			63.227.479.800	0	0		11.753.843.594		2.266.544.155		2.739.139.202		2.532.292.080		3.616.275.608		11.154.251.045		11.154.251.045			Inspektorat Daerah
1637		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	61.975.606.090	0	0	100	11.538.731.494		2.256.212.417		2.696.862.370		2.464.602.724	100	3.557.274.518	100	10.974.952.029	100	10.974.952.029	100	17,71	Inspektorat Daerah
1638		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			149.280.100	0	0		31.119.900		11.838.590		8.443.274		8.472.500		1.440.000		30.194.364		30.194.364			Inspektorat Daerah
1639		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	22.817.100	0	0	4	6.848.900	0	814.000	1	3.213.574	2	2.016.000	1	200.000	4	6.243.574	4	6.243.574	26,67	27,36	Inspektorat Daerah
1640		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	126.463.000	0	0	16	24.271.000	0	11.024.590	6	5.229.700	5	6.456.500	1	1.240.000	12	23.950.790	12	23.950.790	14,81	18,94	Inspektorat Daerah
1641		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			56.196.500.630	0	0		10.589.636.618		2.149.328.407		2.589.658.894		2.329.543.738		2.979.131.970		10.047.663.009		10.047.663.009			Inspektorat Daerah
1642		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	55.880.593.730	0	0	12	10.538.234.118	0	2.136.758.587	0	2.577.702.767	0	2.316.479.038	12	2.965.706.970	12	9.996.647.362	12	9.996.647.362	16,67	17,89	Inspektorat Daerah
1643		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	285.900.000	0	0	12	47.100.000	0	12.150.000	3	11.025.000	3	11.025.000	3	12.525.000	9	46.725.000	9	46.725.000	12,5	16,34	Inspektorat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1644		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	30.006.900	0	0	14	4.302.500	0	419.820	5	931.127	4	2.039.700	1	900.000	10	4.290.647	10	4.290.647	13,89	14,3	Inspektorat Daerah
1645		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			242.432.829	0	0		45.235.000		0		0		1.020.000		39.384.200		40.404.200		40.404.200			Inspektorat Daerah
1646		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	242.432.829	0	0	4	45.235.000	0	0	2	0	2	1.020.000	0	39.384.200	4	40.404.200	4	40.404.200	66,67	16,67	Inspektorat Daerah
1647		Administrasi Umum Perangkat Daerah			620.742.000	0	0		85.917.500		8.110.880		22.299.594		23.900.988		29.574.111		83.885.573		83.885.573			Inspektorat Daerah
1648		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	118.477.000	0	0	5	19.600.500	0	4.962.950	1	5.096.631	1	7.859.758	1	1.635.000	3	19.554.339	3	19.554.339	50	16,5	Inspektorat Daerah
1649		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	502.265.000	0	0	12	66.317.000	0	3.147.930	3	17.202.963	3	16.041.230	3	27.939.111	9	64.331.234	9	64.331.234	150	12,81	Inspektorat Daerah
1650		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.215.804.500	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Inspektorat Daerah
1651		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	2.215.804.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Daerah
1652		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			841.013.779	0	0		162.709.848		56.297.358		35.384.560		41.945.172		24.291.876		157.918.966		157.918.966			Inspektorat Daerah
1653		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	527.245.879	0	0	12	69.099.900	0	17.003.773	3	14.925.823	3	17.209.097	3	16.906.125	9	66.044.818	9	66.044.818	150	12,53	Inspektorat Daerah
1654		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	313.767.900	0	0	12	93.609.948	0	39.293.585	3	20.458.737	3	24.736.075	3	7.385.751	9	91.874.148	9	91.874.148	150	29,28	Inspektorat Daerah
1655		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.709.832.252	0	0		624.112.628		30.637.182		41.076.048		59.720.326		483.452.361		614.885.917		614.885.917			Inspektorat Daerah
1656		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	945.644.300	0	0	19	157.812.800	0	27.019.932	5	30.238.647	6	26.544.874	4	72.638.371	15	156.441.824	15	156.441.824	250	16,54	Inspektorat Daerah
1657		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	550.690.352	0	0	3	426.751.728	0	0	3	0	0	20.589.550	0	399.483.450	3	420.073.000	3	420.073.000	50	76,28	Inspektorat Daerah
1658		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	213.497.600	0	0	178	39.548.100	0	3.617.250	40	10.837.401	79	12.585.902	26	11.330.540	145	38.371.093	145	38.371.093	######	17,97	Inspektorat Daerah
1659		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	99,33	738.387.183	0	0	84,71	134.361.700		9.352.290		27.319.767	67,2	29.154.336	80	42.828.033	80	108.654.426	80	108.654.426	80,54	14,72	Inspektorat Daerah
1660		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			611.478.853	0	0		92.149.200		6.937.440		22.289.969		25.972.092		33.546.533		88.746.034		88.746.034			Inspektorat Daerah
1661		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	59.983.800	0	0	42	9.997.300	0	519.480	9	2.415.545	16	2.897.378	6	3.090.000	31	8.922.403	31	8.922.403	516,67	14,87	Inspektorat Daerah
1662		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6	81.609.807	0	0	113	11.626.500	0	579.820	8	4.131.590	48	2.683.200	14	3.267.540	70	10.662.150	70	10.662.150	######	13,06	Inspektorat Daerah
1663		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	84.155.600	0	0	295	14.026.100	0	557.220	75	4.537.800	155	7.598.070	15	1.299.760	245	13.992.850	245	13.992.850	######	16,63	Inspektorat Daerah
1664		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	71.233.800	0	0	184	11.872.300	0	1.713.840	20	4.573.950	103	2.757.100	15	1.858.140	138	10.903.030	138	10.903.030	######	15,31	Inspektorat Daerah
1665		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6	124.979.036	0	0	87	19.517.100	0	2.568.080	0	4.909.172	0	7.637.644	0	4.389.460	0	19.504.356	0	19.504.356	0	15,61	Inspektorat Daerah
1666		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6	44.601.776	0	0	5	4.202.300	0	0	1	341.172	1	0	2	3.817.000	4	4.158.172	4	4.158.172	66,67	9,32	Inspektorat Daerah
1667		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	144.915.034	0	0	5	20.907.600	0	999.000	2	1.380.740	0	2.398.700	3	15.824.633	5	20.603.073	5	20.603.073	83,33	14,22	Inspektorat Daerah
1668		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			126.908.330	0	0		42.212.500		2.414.850		5.029.798		3.182.244		9.281.500		19.908.392		19.908.392			Inspektorat Daerah
1669		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6	43.982.230	0	0	5	6.657.900	0	1.615.350	1	1.017.196	1	1.125.000	2	1.641.500	4	5.399.046	4	5.399.046	66,67	12,28	Inspektorat Daerah
1670		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	82.926.100	0	0	15	35.554.600	0	799.500	4	4.012.602	3	2.057.244	5	7.640.000	12	14.509.346	12	14.509.346	200	17,5	Inspektorat Daerah
1671		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100	513.486.527	0	0	100	80.750.400		979.448		14.957.065	100	38.535.020	100	16.173.057	100	70.644.590	100	70.644.590	100	13,76	Inspektorat Daerah
1672		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			53.507.138	0	0		6.469.300		956.448		1.021.050		834.120		2.541.080		5.352.698		5.352.698			Inspektorat Daerah
1673		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	53.507.138	0	0	2	6.469.300	0	956.448	1	1.021.050	0	834.120	1	2.541.080	2	5.352.698	2	5.352.698	33,33	10	Inspektorat Daerah
1674		Pendampingan dan Asistensi			459.979.389	0	0		74.281.100		23.000		13.936.015		37.700.900		13.631.977		65.291.892		65.291.892			Inspektorat Daerah
1675		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	54.642.526	0	0	42	2.986.300	0	0	12	1.195.592	12	709.800	10	1.069.660	34	2.975.052	34	2.975.052	566,67	5,44	Inspektorat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1676		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	54.079.900	0	0	133	8.369.600	0	23.000	34	351.870	33	1.116.100	33	6.057.117	100	7.548.087	100	7.548.087	######	13,96	Inspektorat Daerah
1677		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	129.395.100	0	0	5	23.904.600	0	0	1	1.898.340	1	8.285.000	2	6.205.200	4	16.388.540	4	16.388.540	66,67	12,67	Inspektorat Daerah
1678		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	221.861.863	0	0	86	39.020.600	0	0	21	10.490.213	22	27.590.000	21	300.000	64	38.380.213	64	38.380.213	######	17,3	Inspektorat Daerah
1679	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			223.757.086	0	0		30.000.000		0		0		29.620.877		0		29.620.877		29.620.877			Kapanewon Galur
1680		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	223.757.086	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.620.877	100	0	100	29.620.877	100	29.620.877	100	13,24	Kapanewon Galur
1681		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			223.757.086	0	0		30.000.000		0		0		29.620.877		0		29.620.877		29.620.877			Kapanewon Galur
1682		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	223.757.086	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.620.877	0	0	1	29.620.877	1	29.620.877	16,67	13,24	Kapanewon Galur
1683		SEKRETARIAT DAERAH			87.633.130	0	0		23.040.000		0		4.467.150		10.996.580		7.554.510		23.018.240		23.018.240			Kapanewon Galur
1684		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	87.633.130	0	0	100	23.040.000		0		4.467.150	100	10.996.580	100	7.554.510	100	23.018.240	100	23.018.240	100	26,27	Kapanewon Galur
1685		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			87.633.130	0	0		23.040.000		0		4.467.150		10.996.580		7.554.510		23.018.240		23.018.240			Kapanewon Galur
1686		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	18	87.633.130	0	0	2	23.040.000	0	0	0	4.467.150	0	10.996.580	2	7.554.510	2	23.018.240	2	23.018.240	11,11	26,27	Kapanewon Galur
1687		KECAMATAN			10.893.004.279	0	0		1.802.276.051		486.802.993		481.973.975		434.882.410		389.700.240		1.793.359.618		1.793.359.618			Kapanewon Galur
1688		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	10.047.268.740	0	0	100	1.701.468.551		462.013.311		463.285.764		383.612.206	100	385.803.590	100	1.694.714.871	100	1.694.714.871	100	16,87	Kapanewon Galur
1689		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.340.947	0	0		10.363.900		2.425.794		4.274.420		1.851.036		1.688.711		10.239.961		10.239.961			Kapanewon Galur
1690		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	28.571.604	0	0	4	7.751.600	0	1.558.551	1	4.274.420	0	742.701	3	1.089.111	4	7.664.783	4	7.664.783	30,77	26,83	Kapanewon Galur
1691		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	15.769.343	0	0	21	2.612.300	0	867.243	5	0	5	1.108.335	6	599.600	16	2.575.178	16	2.575.178	19,75	16,33	Kapanewon Galur
1692		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.389.723.747	0	0		1.391.378.674		396.366.074		393.386.063		292.691.922		307.058.483		1.389.502.542		1.389.502.542			Kapanewon Galur
1693		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	8.218.691.874	0	0	20	1.360.843.774	0	387.540.764	0	386.177.738	0	285.486.897	20	300.255.883	20	1.359.461.282	20	1.359.461.282	16,67	16,54	Kapanewon Galur
1694		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	155.444.625	0	0	12	27.669.500	0	8.025.000	3	6.366.750	3	6.526.260	3	6.295.000	9	27.213.010	9	27.213.010	52,94	17,51	Kapanewon Galur
1695		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	15.587.248	0	0	14	2.865.400	0	800.310	3	841.575	4	678.765	4	507.600	11	2.828.250	11	2.828.250	13,1	18,14	Kapanewon Galur
1696		Administrasi Umum Perangkat Daerah			218.222.495	0	0		36.764.500		8.863.764		6.851.038		13.066.955		6.777.013		35.558.770		35.558.770			Kapanewon Galur
1697		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	54.928.109	0	0	4	10.864.500	0	3.931.620	1	1.153.498	2	4.571.135	1	568.093	4	10.224.346	4	10.224.346	44,44	18,61	Kapanewon Galur
1698		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	163.294.386	0	0	12	25.900.000	0	4.932.144	5	5.697.540	3	8.495.820	3	6.208.920	11	25.334.424	11	25.334.424	64,71	15,51	Kapanewon Galur
1699		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			53.589.205	0	0		33.287.200		0		10.298.398		10.298.398		12.286.602		32.883.398		32.883.398			Kapanewon Galur
1700		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	53.589.205	0	0	2	33.287.200	0	0	3	10.298.398	0	10.298.398	0	12.286.602	3	32.883.398	3	32.883.398	27,27	61,36	Kapanewon Galur
1701		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			865.922.823	0	0		142.640.177		42.311.281		22.602.513		33.016.577		43.761.559		141.691.930		141.691.930			Kapanewon Galur
1702		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	199.386.063	0	0	12	32.899.912	0	8.632.891	5	7.831.011	3	7.663.371	3	7.826.649	11	31.953.922	11	31.953.922	64,71	16,03	Kapanewon Galur
1703		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	666.536.760	0	0	12	109.740.265	0	33.678.390	4	14.771.502	2	25.353.206	4	35.934.910	10	109.738.008	10	109.738.008	58,82	16,46	Kapanewon Galur
1704		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			475.469.523	0	0		87.034.100		12.046.398		25.873.332		32.687.318		14.231.222		84.838.270		84.838.270			Kapanewon Galur
1705		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	343.493.444	0	0	7	58.540.700	0	11.308.398	3	20.986.245	2	11.559.818	1	13.506.222	6	57.360.683	6	57.360.683	14,29	16,7	Kapanewon Galur

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1706		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	56.316.587	0	0	2	16.055.000	0	0	2	0	0	15.891.000	0	0	2	15.891.000	2	15.891.000	16,67	28,22	Kapanewon Galur
1707		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	167	75.659.492	0	0	28	12.438.400	0	738.000	2	4.887.087	22	5.236.500	1	725.000	25	11.586.587	25	11.586.587	14,97	15,31	Kapanewon Galur
1708		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	321.594.820	0	0	100	23.452.100		6.433.559		6.280.894	100	5.393.979	100	3.730.695	100	21.839.127	100	21.839.127	100	6,79	Kapanewon Galur
1709		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			288.474.440	0	0		17.951.500		5.149.400		4.063.761		4.649.724		2.653.340		16.516.225		16.516.225			Kapanewon Galur
1710		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37	197.290.648	0	0	6	3.786.000	0	333.406	3	1.267.125	3	657.930	0	1.512.620	6	3.771.081	6	3.771.081	16,22	1,91	Kapanewon Galur
1711		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	91.183.792	0	0	8	14.165.500	0	4.815.994	3	2.796.636	2	3.991.794	1	1.140.720	6	12.745.144	6	12.745.144	12,5	13,98	Kapanewon Galur
1712		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			33.120.380	0	0		5.500.600		1.284.159		2.217.133		744.255		1.077.355		5.322.902		5.322.902			Kapanewon Galur
1713		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	67	33.120.380	0	0	12	5.500.600	0	1.284.159	3	2.217.133	3	744.255	3	1.077.355	9	5.322.902	9	5.322.902	13,43	16,07	Kapanewon Galur
1714		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	105.348.835	0	0	100	16.030.000		7.402.781		3.188.225	50	3.879.955	100	1.524.295	100	15.995.256	100	15.995.256	100	15,18	Kapanewon Galur
1715		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			105.348.835	0	0		16.030.000		7.402.781		3.188.225		3.879.955		1.524.295		15.995.256		15.995.256			Kapanewon Galur
1716		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41	105.348.835	0	0	7	16.030.000	0	7.402.781	0	3.188.225	0	3.879.955	0	1.524.295	0	15.995.256	0	15.995.256	0	15,18	Kapanewon Galur
1717		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	343.779.957	0	0	100	49.911.500		7.411.470		8.399.592	100	38.080.394	100	-4.465.726	100	49.425.730	100	49.425.730	100	14,38	Kapanewon Galur
1718		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			343.779.957	0	0		49.911.500		7.411.470		8.399.592		38.080.394		-4.465.726		49.425.730		49.425.730			Kapanewon Galur
1719		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	425	141.329.676	0	0	160	18.584.600	0	0	0	323.787	150	31.533.244	10	-13.335.122	160	18.521.909	160	18.521.909	37,65	13,11	Kapanewon Galur
1720		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	202.450.281	0	0	6	31.326.900	0	7.411.470	2	8.075.805	2	6.547.150	2	8.869.396	6	30.903.821	6	30.903.821	37,5	15,26	Kapanewon Galur
1721		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	75.011.927	0	0	100	11.413.900		3.541.872		819.500	100	3.915.876	100	3.107.386	100	11.384.634	100	11.384.634	100	15,18	Kapanewon Galur
1722		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			75.011.927	0	0		11.413.900		3.541.872		819.500		3.915.876		3.107.386		11.384.634		11.384.634			Kapanewon Galur
1723		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36	75.011.927	0	0	6	11.413.900	0	3.541.872	0	819.500	0	3.915.876	6	3.107.386	6	11.384.634	6	11.384.634	16,67	15,18	Kapanewon Galur
1724	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.956.612		0		29.956.612		29.956.612			Kapanewon Girimulyo
1725		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.956.612	100	0	100	29.956.612	100	29.956.612	100	13,24	Kapanewon Girimulyo
1726		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.956.612		0		29.956.612		29.956.612			Kapanewon Girimulyo
1727		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.956.612	0	0	1	29.956.612	1	29.956.612	16,67	13,24	Kapanewon Girimulyo
1728		SEKRETARIAT DAERAH			64.544.083	0	0		22.415.000		0		1.118.307		12.599.209		8.171.790		21.889.306		21.889.306			Kapanewon Girimulyo
1729		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	64.544.083	0	0	100	22.415.000		0		1.118.307	0	12.599.209	100	8.171.790	100	21.889.306	100	21.889.306	100	33,91	Kapanewon Girimulyo
1730		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			64.544.083	0	0		22.415.000		0		1.118.307		12.599.209		8.171.790		21.889.306		21.889.306			Kapanewon Girimulyo
1731		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	18	64.544.083	0	0	3	22.415.000	0	0	0	1.118.307	0	12.599.209	3	8.171.790	3	21.889.306	3	21.889.306	16,67	33,91	Kapanewon Girimulyo
1732		KECAMATAN			12.136.269.149	0	0		1.867.984.109		438.756.084		454.185.740		415.995.845		345.112.775		1.654.050.444		1.654.050.444			Kapanewon Girimulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1733		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	10.769.640.468	0	0	100	1.752.041.609		416.131.018		428.924.737		366.845.308	100	328.541.445	100	1.540.442.508	100	1.540.442.508	100	14,3	Kapanewon Girimulyo
1734		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106.240.590	0	0		10.361.000		2.385.607		4.170.939		2.129.329		1.222.700		9.908.575		9.908.575			Kapanewon Girimulyo
1735		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	60.462.095	0	0	4	8.251.300	0	1.461.510	1	3.990.939	2	1.440.745	1	924.620	4	7.817.814	4	7.817.814	22,22	12,93	Kapanewon Girimulyo
1736		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	45.778.495	0	0	21	2.109.700	0	924.097	5	180.000	6	688.584	6	298.080	17	2.090.761	17	2.090.761	13,49	4,57	Kapanewon Girimulyo
1737		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.520.420.781	0	0		1.497.120.611		355.812.479		370.183.442		284.641.742		280.191.097		1.290.828.760		1.290.828.760			Kapanewon Girimulyo
1738		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126	8.276.324.291	0	0	21	1.466.791.211	0	347.200.470	0	363.523.802	0	276.705.335	21	273.572.297	21	1.261.001.904	21	1.261.001.904	16,67	15,24	Kapanewon Girimulyo
1739		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	194.987.295	0	0	12	27.750.000	0	7.361.727	3	6.300.000	3	7.200.000	3	6.436.800	9	27.298.527	9	27.298.527	12,5	14	Kapanewon Girimulyo
1740		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	49.109.195	0	0	14	2.579.400	0	1.250.282	3	359.640	4	736.407	4	182.000	11	2.528.329	11	2.528.329	13,1	5,15	Kapanewon Girimulyo
1741		Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.172.390	0	0		33.994.300		6.610.632		8.371.315		10.996.388		6.700.609		32.678.944		32.678.944			Kapanewon Girimulyo
1742		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	93.635.095	0	0	5	9.194.300	0	330.000	2	3.223.171	0	2.851.592	2	1.545.769	4	7.950.532	4	7.950.532	16,67	8,49	Kapanewon Girimulyo
1743		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	131.537.295	0	0	12	24.800.000	0	6.280.632	3	5.148.144	3	8.144.796	3	5.154.840	9	24.728.412	9	24.728.412	12,5	18,8	Kapanewon Girimulyo
1744		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			155.802.534	0	0		18.988.300		219.780		-219.780		18.964.000		0		18.964.000		18.964.000			Kapanewon Girimulyo
1745		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	600	155.802.534	0	0	1	18.988.300	0	219.780	0	-219.780	1	18.964.000	0	0	1	18.964.000	1	18.964.000	0,17	12,17	Kapanewon Girimulyo
1746		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			749.500.438	0	0		121.345.548		34.355.320		27.296.776		28.077.612		28.617.656		118.347.364		118.347.364			Kapanewon Girimulyo
1747		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	161.599.071	0	0	12	25.651.536	0	5.133.067	3	5.139.523	3	5.920.359	3	6.460.403	9	22.653.352	9	22.653.352	12,5	14,02	Kapanewon Girimulyo
1748		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	587.901.367	0	0	12	95.694.012	0	29.222.253	3	22.157.253	3	22.157.253	3	22.157.253	9	95.694.012	9	95.694.012	12,5	16,28	Kapanewon Girimulyo
1749		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.012.503.735	0	0		70.231.850		16.747.200		19.122.045		22.036.237		11.809.383		69.714.865		69.714.865			Kapanewon Girimulyo
1750		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	600	421.929.745	0	0	12	63.368.450	0	16.091.700	3	17.008.000	4	19.347.800	3	10.787.250	10	63.234.750	10	63.234.750	1,67	14,99	Kapanewon Girimulyo
1751		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600	509.477.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Girimulyo
1752		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600	81.096.695	0	0	12	6.863.400	0	655.500	4	2.114.045	3	2.688.437	3	1.022.133	10	6.480.115	10	6.480.115	1,67	7,99	Kapanewon Girimulyo
1753		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	459.462.390	0	0	100	30.353.300		7.901.920		7.879.050	100	10.385.092	126,18	2.736.160	126,18	28.902.222	126,18	28.902.222	126,18	6,29	Kapanewon Girimulyo
1754		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			397.093.460	0	0		25.506.400		6.806.961		6.631.380		8.948.700		1.742.560		24.129.601		24.129.601			Kapanewon Girimulyo
1755		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	600	295.317.330	0	0	1	12.613.300	0	1.605.951	0	3.287.180	0	6.171.800	1	1.095.120	1	12.160.051	1	12.160.051	0,17	4,12	Kapanewon Girimulyo
1756		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	600	101.776.130	0	0	2	12.893.100	0	5.201.010	0	3.344.200	0	2.776.900	2	647.440	2	11.969.550	2	11.969.550	0,33	11,76	Kapanewon Girimulyo
1757		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			62.368.930	0	0		4.846.900		1.094.959		1.247.670		1.436.392		993.600		4.772.621		4.772.621			Kapanewon Girimulyo
1758		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600	62.368.930	0	0	12	4.846.900	0	1.094.959	3	1.247.670	3	1.436.392	3	993.600	9	4.772.621	9	4.772.621	1,5	7,65	Kapanewon Girimulyo
1759		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	181.640.149	0	0	100	20.325.200		5.886.425		5.135.275	100	4.589.906	100	4.371.800	100	19.983.406	100	19.983.406	100	11	Kapanewon Girimulyo
1760		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			181.640.149	0	0		20.325.200		5.886.425		5.135.275		4.589.906		4.371.800		19.983.406		19.983.406			Kapanewon Girimulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1761		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600	181.640.149	0	0	6	20.325.200	0	5.886.425	1	5.135.275	0	4.589.906	3	4.371.800	4	19.983.406	4	19.983.406	0,67	11	Kapanewon Girimulyo
1762		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	557.996.802	0	0	100	53.471.500		7.094.010		5.550.000	66,67	33.387.098	100	7.288.800	100	53.319.908	100	53.319.908	100	9,56	Kapanewon Girimulyo
1763		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			557.996.802	0	0		53.471.500		7.094.010		5.550.000		33.387.098		7.288.800		53.319.908		53.319.908			Kapanewon Girimulyo
1764		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	600	197.259.700	0	0	37	21.748.700	0	0	0	0	37	20.859.822	0	794.880	37	21.654.702	37	21.654.702	6,17	10,98	Kapanewon Girimulyo
1765		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36	360.737.102	0	0	4	31.722.800	0	7.094.010	1	5.550.000	1	12.527.276	1	6.493.920	3	31.665.206	3	31.665.206	8,33	8,78	Kapanewon Girimulyo
1766		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	167.529.340	0	0	100	11.792.500		1.742.711		6.696.678	80	788.441	100	2.174.570	100	11.402.400	100	11.402.400	100	6,81	Kapanewon Girimulyo
1767		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			167.529.340	0	0		11.792.500		1.742.711		6.696.678		788.441		2.174.570		11.402.400		11.402.400			Kapanewon Girimulyo
1768		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36	167.529.340	0	0	5	11.792.500	0	1.742.711	3	6.696.678	0	788.441	1	2.174.570	4	11.402.400	4	11.402.400	11,11	6,81	Kapanewon Girimulyo
1769	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		30.000.000		0		30.000.000		30.000.000			Kapanewon Kalibawang
1770		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	30.000.000	100	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	13,26	Kapanewon Kalibawang
1771		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		30.000.000		0		30.000.000		30.000.000			Kapanewon Kalibawang
1772		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	16,67	13,26	Kapanewon Kalibawang
1773		SEKRETARIAT DAERAH			73.351.313	0	0		17.790.000		1.684.800		1.560.000		7.994.000		6.551.200		17.790.000		17.790.000			Kapanewon Kalibawang
1774		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	73.351.313	0	0	100	17.790.000		1.684.800		1.560.000	33,33	7.994.000	100	6.551.200	100	17.790.000	100	17.790.000	100	24,25	Kapanewon Kalibawang
1775		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			73.351.313	0	0		17.790.000		1.684.800		1.560.000		7.994.000		6.551.200		17.790.000		17.790.000			Kapanewon Kalibawang
1776		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	18	73.351.313	0	0	3	17.790.000	0	1.684.800	1	1.560.000	0	7.994.000	2	6.551.200	3	17.790.000	3	17.790.000	16,67	24,25	Kapanewon Kalibawang
1777		KECAMATAN			12.127.575.616	0	0		1.990.121.498		505.841.161		683.525.074		330.429.237		400.648.097		1.920.443.569		1.920.443.569			Kapanewon Kalibawang
1778		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	11.118.566.718	0	0	100	1.864.909.698		477.003.352		657.002.704		287.017.677	100	374.607.520	100	1.795.631.253	100	1.795.631.253	100	16,15	Kapanewon Kalibawang
1779		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.089.694	0	0		14.589.694		3.627.629		5.562.580		3.894.184		1.263.500		14.347.893		14.347.893			Kapanewon Kalibawang
1780		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	47.589.694	0	0	4	10.589.694	0	2.600.784	0	5.562.580	4	2.192.318	0	0	4	10.355.682	4	10.355.682	28,57	21,76	Kapanewon Kalibawang
1781		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	26.500.000	0	0	21	4.000.000	0	1.026.845	5	0	4	1.701.866	8	1.263.500	17	3.992.211	17	3.992.211	20,99	15,06	Kapanewon Kalibawang
1782		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.144.216.274	0	0		1.510.835.299		393.296.722		525.433.799		214.649.514		310.786.598		1.444.166.633		1.444.166.633			Kapanewon Kalibawang
1783		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	8.939.840.574	0	0	19	1.477.659.599	0	382.825.746	0	518.359.199	0	206.447.252	19	303.373.678	19	1.411.005.875	19	1.411.005.875	15,32	15,78	Kapanewon Kalibawang
1784		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	178.175.700	0	0	12	29.175.700	0	9.147.888	3	6.675.000	3	6.675.000	3	6.675.000	9	29.172.888	9	29.172.888	52,94	16,37	Kapanewon Kalibawang
1785		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	26.200.000	0	0	14	4.000.000	0	1.323.088	4	399.600	3	1.527.262	4	737.920	11	3.987.870	11	3.987.870	13,1	15,22	Kapanewon Kalibawang
1786		Administrasi Umum Perangkat Daerah			224.893.800	0	0		31.139.800		9.452.281		5.194.160		11.350.575		5.134.160		31.131.176		31.131.176			Kapanewon Kalibawang
1787		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	47.218.800	0	0	4	7.464.800	0	4.198.521	0	0	2	3.261.415	0	0	2	7.459.936	2	7.459.936	22,22	15,8	Kapanewon Kalibawang
1788		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	177.675.000	0	0	12	23.675.000	0	5.253.760	3	5.194.160	3	8.089.160	3	5.134.160	9	23.671.240	9	23.671.240	52,94	13,32	Kapanewon Kalibawang
1789		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			119.603.511	0	0		61.471.836		8.460.700		52.402.536		0		0		60.863.236		60.863.236			Kapanewon Kalibawang

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1790		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	119.603.511	0	0	5	61.471.836	0	8.460.700	2	52.402.536	0	0	0	0	2	60.863.236	2	60.863.236	16,67	50,89	Kapanewon Kalibawang
1791		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			966.695.939	0	0		149.456.569		43.377.253		34.155.229		34.750.254		35.654.479		147.937.215		147.937.215			Kapanewon Kalibawang
1792		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	156.413.631	0	0	12	26.867.851	0	6.153.895	3	6.142.355	3	6.737.381	3	6.991.607	9	26.025.238	9	26.025.238	150	16,64	Kapanewon Kalibawang
1793		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	810.282.308	0	0	12	122.588.718	0	37.223.358	3	28.012.874	3	28.012.873	3	28.662.872	9	121.911.977	9	121.911.977	52,94	15,05	Kapanewon Kalibawang
1794		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			589.067.500	0	0		97.416.500		18.788.767		34.254.400		22.373.150		21.768.783		97.185.100		97.185.100			Kapanewon Kalibawang
1795		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	456.080.000	0	0	8	72.680.000	0	14.782.167	2	22.396.400	2	16.467.850	2	18.806.183	6	72.452.600	6	72.452.600	12,5	15,89	Kapanewon Kalibawang
1796		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	42.121.300	0	0	1	7.394.800	0	0	1	7.394.800	0	0	0	0	1	7.394.800	1	7.394.800	16,67	17,56	Kapanewon Kalibawang
1797		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90	90.866.200	0	0	15	17.341.700	0	4.006.600	3	4.463.200	4	5.905.300	4	2.962.600	11	17.337.700	11	17.337.700	12,22	19,08	Kapanewon Kalibawang
1798		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	348.457.328	0	0	100	27.586.500		9.283.100		7.655.138	100	7.992.301	100	2.448.450	100	27.378.989	100	27.378.989	100	7,86	Kapanewon Kalibawang
1799		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			304.184.928	0	0		21.580.100		6.870.951		6.755.638		5.709.697		2.048.850		21.385.136		21.385.136			Kapanewon Kalibawang
1800		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30	208.272.289	0	0	5	7.653.300	0	2.224.351	2	1.599.000	1	2.423.941	0	1.399.500	3	7.646.792	3	7.646.792	10	3,67	Kapanewon Kalibawang
1801		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	95.912.639	0	0	6	13.926.800	0	4.646.600	2	5.156.638	2	3.285.756	1	649.350	5	13.738.344	5	13.738.344	13,89	14,32	Kapanewon Kalibawang
1802		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			44.272.400	0	0		6.006.400		2.412.149		899.500		2.282.604		399.600		5.993.853		5.993.853			Kapanewon Kalibawang
1803		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72	44.272.400	0	0	12	6.006.400	0	2.412.149	3	899.500	3	2.282.604	3	399.600	9	5.993.853	9	5.993.853	12,5	13,54	Kapanewon Kalibawang
1804		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	135.445.220	0	0	100	20.609.500		8.460.592		2.099.520	50	2.867.682	100	7.170.880	100	20.598.674	100	20.598.674	100	15,21	Kapanewon Kalibawang
1805		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			135.445.220	0	0		20.609.500		8.460.592		2.099.520		2.867.682		7.170.880		20.598.674		20.598.674			Kapanewon Kalibawang
1806		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21	135.445.220	0	0	8	20.609.500	0	8.460.592	2	2.099.520	0	2.867.682	4	7.170.880	6	20.598.674	6	20.598.674	28,57	15,21	Kapanewon Kalibawang
1807		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	421.499.088	0	0	100	61.250.800		8.608.661		12.419.176	100	29.354.777	100	10.821.176	100	61.203.790	100	61.203.790	100	14,52	Kapanewon Kalibawang
1808		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			421.499.088	0	0		61.250.800		8.608.661		12.419.176		29.354.777		10.821.176		61.203.790		61.203.790			Kapanewon Kalibawang
1809		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	478	223.992.100	0	0	35	32.031.900	0	2.090.203	3	3.808.940	23	23.670.777	6	2.421.840	32	31.991.760	32	31.991.760	6,69	14,28	Kapanewon Kalibawang
1810		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36	197.506.988	0	0	6	29.218.900	0	6.518.458	2	8.610.236	0	5.684.000	3	8.399.336	5	29.212.030	5	29.212.030	13,89	14,79	Kapanewon Kalibawang
1811		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	103.607.262	0	0	100	15.765.000		2.485.456		4.348.536	60	3.196.800	100	5.600.071	100	15.630.863	100	15.630.863	100	15,09	Kapanewon Kalibawang
1812		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			103.607.262	0	0		15.765.000		2.485.456		4.348.536		3.196.800		5.600.071		15.630.863		15.630.863			Kapanewon Kalibawang
1813		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	34	103.607.262	0	0	7	15.765.000	0	2.485.456	3	4.348.536	2	3.196.800	2	5.600.071	7	15.630.863	7	15.630.863	20,59	15,09	Kapanewon Kalibawang
1814	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.996.523		0		29.996.523		29.996.523			Kapanewon Kokap
1815		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.996.523	100	0	100	29.996.523	100	29.996.523	100	13,25	Kapanewon Kokap

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1816		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.996.523		0		29.996.523		29.996.523			Kapanewon Kokap
1817		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.996.523	0	0	1	29.996.523	1	29.996.523	8,33	13,25	Kapanewon Kokap
1818		SEKRETARIAT DAERAH			55.104.467	0	0		18.225.000		0		2.950.437		11.411.554		3.473.740		17.835.731		17.835.731			Kapanewon Kokap
1819		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	55.104.467	0	0	100	18.225.000		0		2.950.437	33,33	11.411.554	100	3.473.740	100	17.835.731	100	17.835.731	100	32,37	Kapanewon Kokap
1820		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			55.104.467	0	0		18.225.000		0		2.950.437		11.411.554		3.473.740		17.835.731		17.835.731			Kapanewon Kokap
1821		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		55.104.467	0	0	3	18.225.000	0	0	0	2.950.437	0	11.411.554	3	3.473.740	3	17.835.731	3	17.835.731	0	32,37	Kapanewon Kokap
1822		KECAMATAN			10.285.060.920	0	0		1.841.386.982		468.126.510		530.839.717		409.989.472		353.880.112		1.762.835.811		1.762.835.811			Kapanewon Kokap
1823		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	9.497.065.876	0	0	100	1.753.070.886		451.901.583		509.296.778		371.677.237	100	341.939.712	100	1.674.815.310	100	1.674.815.310	100	17,64	Kapanewon Kokap
1824		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.315.173	0	0		12.537.400		1.572.444		6.473.254		3.813.734		499.500		12.358.932		12.358.932			Kapanewon Kokap
1825		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	42.192.373	0	0	4	9.976.000	0	0	2	5.990.404	0	3.330.884	2	499.500	4	9.820.788	4	9.820.788	33,33	23,28	Kapanewon Kokap
1826		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	23.122.800	0	0	21	2.561.400	0	1.572.444	0	482.850	7	482.850	7	0	14	2.538.144	14	2.538.144	11,11	10,98	Kapanewon Kokap
1827		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.932.324.750	0	0		1.472.412.631		391.204.245		421.810.559		292.851.082		291.032.761		1.396.898.647		1.396.898.647			Kapanewon Kokap
1828		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	7.758.017.516	0	0	20	1.442.221.731	0	386.689.993	0	411.019.326	0	284.358.076	20	284.682.961	20	1.366.750.356	20	1.366.750.356	16,67	17,62	Kapanewon Kokap
1829		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	147.150.674	0	0	12	27.532.900	0	4.100.000	4	9.834.955	3	7.435.728	3	6.150.000	10	27.520.683	10	27.520.683	13,89	18,7	Kapanewon Kokap
1830		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	27.156.560	0	0	14	2.658.000	0	414.252	3	956.278	4	1.057.278	3	199.800	10	2.627.608	10	2.627.608	11,9	9,68	Kapanewon Kokap
1831		Administrasi Umum Perangkat Daerah			181.459.778	0	0		34.434.800		7.380.882		9.152.384		11.126.853		6.671.160		34.331.279		34.331.279			Kapanewon Kokap
1832		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	32.258.800	0	0	3	4.709.800	0	709.722	1	2.481.224	1	1.432.233	1	0	3	4.623.179	3	4.623.179	15,79	14,33	Kapanewon Kokap
1833		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	149.200.978	0	0	12	29.725.000	0	6.671.160	3	6.671.160	3	9.694.620	3	6.671.160	9	29.708.100	9	29.708.100	12,5	19,91	Kapanewon Kokap
1834		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			145.214.067	0	0		45.087.100		0		27.783.300		17.085.720		0		44.869.020		44.869.020			Kapanewon Kokap
1835		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	145.214.067	0	0	35	45.087.100	0	0	33	27.783.300	2	17.085.720	0	0	35	44.869.020	35	44.869.020	72,92	30,9	Kapanewon Kokap
1836		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			746.493.883	0	0		123.617.555		35.448.555		27.858.545		28.223.238		30.157.591		121.687.929		121.687.929			Kapanewon Kokap
1837		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	169.041.023	0	0	12	27.923.543	0	6.226.302	3	5.701.292	3	6.065.985	3	8.000.338	9	25.993.917	9	25.993.917	12,5	15,38	Kapanewon Kokap
1838		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	577.452.860	0	0	12	95.694.012	0	29.222.253	3	22.157.253	3	22.157.253	3	22.157.253	9	95.694.012	9	95.694.012	12,5	16,57	Kapanewon Kokap
1839		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			426.258.225	0	0		64.981.400		16.295.457		16.218.736		18.576.610		13.578.700		64.669.503		64.669.503			Kapanewon Kokap
1840		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	340.149.700	0	0	9	57.526.700	0	13.838.700	3	14.772.850	2	16.328.050	2	12.448.700	7	57.388.300	7	57.388.300	11,86	16,87	Kapanewon Kokap
1841		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	38.682.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Kokap
1842		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	138	47.426.525	0	0	7	7.454.700	0	2.456.757	2	1.445.886	2	2.248.560	1	1.130.000	5	7.281.203	5	7.281.203	3,62	15,35	Kapanewon Kokap
1843		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	335.715.156	0	0	100	20.585.696		3.265.595		10.626.410	100	5.296.354	100	1.333.300	100	20.521.659	100	20.521.659	100	6,11	Kapanewon Kokap
1844		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			293.385.877	0	0		16.173.096		2.430.660		8.689.360		4.003.750		1.034.900		16.158.670		16.158.670			Kapanewon Kokap
1845		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60	223.466.800	0	0	6	6.942.400	0	725.347	3	4.458.160	2	1.594.910	0	158.400	5	6.936.817	5	6.936.817	8,33	3,1	Kapanewon Kokap

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1846		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132	69.919.077	0	0	12	9.230.696	0	1.705.313	4	4.231.200	4	2.408.840	2	876.500	10	9.221.853	10	9.221.853	7,58	13,19	Kapanewon Kokap
1847		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			42.329.279	0	0		4.412.600		834.935		1.937.050		1.292.604		298.400		4.362.989		4.362.989			Kapanewon Kokap
1848		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72	42.329.279	0	0	12	4.412.600	0	834.935	3	1.937.050	3	1.292.604	3	298.400	9	4.362.989	9	4.362.989	12,5	10,31	Kapanewon Kokap
1849		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	86.530.778	0	0	100	14.862.300		6.427.079		2.408.101	50	3.351.980	100	2.659.500	100	14.846.660	100	14.846.660	100	17,16	Kapanewon Kokap
1850		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			86.530.778	0	0		14.862.300		6.427.079		2.408.101		3.351.980		2.659.500		14.846.660		14.846.660			Kapanewon Kokap
1851		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66	86.530.778	0	0	7	14.862.300	0	6.427.079	3	2.408.101	1	3.351.980	1	2.659.500	5	14.846.660	5	14.846.660	7,58	17,16	Kapanewon Kokap
1852		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	314.217.054	0	0	100	46.722.600		5.672.586		7.209.228	100	27.105.461	100	6.648.900	100	46.636.175	100	46.636.175	100	14,84	Kapanewon Kokap
1853		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			314.217.054	0	0		46.722.600		5.672.586		7.209.228		27.105.461		6.648.900		46.636.175		46.636.175			Kapanewon Kokap
1854		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.200	144.703.450	0	0	45	20.090.700	0	0	0	0	0	20.072.945	45	0	45	20.072.945	45	20.072.945	3,75	13,87	Kapanewon Kokap
1855		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	169.513.604	0	0	4	26.631.900	0	5.672.586	1	7.209.228	1	7.032.516	1	6.648.900	3	26.563.230	3	26.563.230	12,5	15,67	Kapanewon Kokap
1856		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	51.532.056	0	0	100	6.145.500		859.667		1.299.200	80	2.558.440	100	1.298.700	100	6.016.007	100	6.016.007	100	11,67	Kapanewon Kokap
1857		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			51.532.056	0	0		6.145.500		859.667		1.299.200		2.558.440		1.298.700		6.016.007		6.016.007			Kapanewon Kokap
1858		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48	51.532.056	0	0	5	6.145.500	0	859.667	1	1.299.200	1	2.558.440	2	1.298.700	4	6.016.007	4	6.016.007	8,33	11,67	Kapanewon Kokap
1859	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.836.000		0		29.836.000		29.836.000			Kapanewon Lendah
1860		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.836.000	100	0	100	29.836.000	100	29.836.000	100	13,18	Kapanewon Lendah
1861		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.836.000		0		29.836.000		29.836.000			Kapanewon Lendah
1862		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.836.000	0	0	1	29.836.000	1	29.836.000	16,67	13,18	Kapanewon Lendah
1863		SEKRETARIAT DAERAH			84.233.040	0	0		22.095.000		1.741.800		3.768.880		12.320.620		3.835.800		21.667.100		21.667.100			Kapanewon Lendah
1864		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	84.233.040	0	0	100	22.095.000		1.741.800		3.768.880	33,33	12.320.620	100	3.835.800	100	21.667.100	100	21.667.100	100	25,72	Kapanewon Lendah
1865		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			84.233.040	0	0		22.095.000		1.741.800		3.768.880		12.320.620		3.835.800		21.667.100		21.667.100			Kapanewon Lendah
1866		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	18	84.233.040	0	0	3	22.095.000	0	1.741.800	0	3.768.880	0	12.320.620	3	3.835.800	3	21.667.100	3	21.667.100	16,67	25,72	Kapanewon Lendah
1867		KECAMATAN			11.839.217.345	0	0		1.917.703.384		459.831.854		492.133.867		413.934.361		406.960.915		1.772.860.997		1.772.860.997			Kapanewon Lendah
1868		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	10.862.701.138	0	0	100	1.794.075.784		437.419.674		455.492.947		376.300.121	100	383.257.775	100	1.652.470.517	100	1.652.470.517	100	15,21	Kapanewon Lendah
1869		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.280.400	0	0		10.713.400		899.100		3.147.800		4.491.900		1.905.200		10.444.000		10.444.000			Kapanewon Lendah
1870		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	46.726.200	0	0	4	7.787.700	0	599.400	1	2.848.100	2	4.192.200	1	0	4	7.639.700	4	7.639.700	30,77	16,35	Kapanewon Lendah
1871		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	17.554.200	0	0	21	2.925.700	0	299.700	5	299.700	4	299.700	6	1.905.200	15	2.804.300	15	2.804.300	18,52	15,98	Kapanewon Lendah
1872		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.145.186.042	0	0		1.507.823.268		358.924.515		387.481.635		297.449.108		323.421.333		1.367.276.591		1.367.276.591			Kapanewon Lendah
1873		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	8.940.766.042	0	0	20	1.478.753.268	0	353.691.515	0	382.204.235	0	290.287.808	20	315.348.633	20	1.341.532.191	20	1.341.532.191	16,67	15	Kapanewon Lendah
1874		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	186.466.200	0	0	12	26.077.700	0	5.233.000	3	5.277.400	3	5.425.000	3	6.852.800	9	22.788.200	9	22.788.200	52,94	12,22	Kapanewon Lendah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1875		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	17.953.800	0	0	14	2.992.300	0	0	4	0	3	1.736.300	4	1.219.900	11	2.956.200	11	2.956.200	13,1	16,47	Kapanewon Lendah
1876		Administrasi Umum Perangkat Daerah			186.781.200	0	0		31.130.200		8.769.320		8.007.960		10.763.060		3.248.840		30.789.180		30.789.180			Kapanewon Lendah
1877		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	89.641.200	0	0	4	14.940.200	0	4.940.000	1	3.890.000	1	4.495.100	1	1.330.200	3	14.655.300	3	14.655.300	33,33	16,35	Kapanewon Lendah
1878		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	97.140.000	0	0	12	16.190.000	0	3.829.320	4	4.117.960	3	6.267.960	3	1.918.640	10	16.133.880	10	16.133.880	58,82	16,61	Kapanewon Lendah
1879		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.002.000	0	0		3.667.000		3.666.999		0		0		0		3.666.999		3.666.999			Kapanewon Lendah
1880		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	22.002.000	0	0	4	3.667.000	0	3.666.999	0	0	0	0	0	0	0	3.666.999	0	3.666.999	0	16,67	Kapanewon Lendah
1881		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			966.811.296	0	0		161.135.216		47.317.540		37.702.752		38.210.053		37.886.402		161.116.747		161.116.747			Kapanewon Lendah
1882		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	201.259.200	0	0	12	33.543.200	0	8.166.136	3	8.159.748	3	8.667.049	3	8.531.798	9	33.524.731	9	33.524.731	52,94	16,66	Kapanewon Lendah
1883		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	765.552.096	0	0	12	127.592.016	0	39.151.404	3	29.543.004	3	29.543.004	3	29.354.604	9	127.592.016	9	127.592.016	52,94	16,67	Kapanewon Lendah
1884		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			477.640.200	0	0		79.606.700		17.842.200		19.152.800		25.386.000		16.796.000		79.177.000		79.177.000			Kapanewon Lendah
1885		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	366.671.400	0	0	9	61.111.900	0	12.962.200	2	15.881.800	2	17.461.500	3	14.441.000	7	60.746.500	7	60.746.500	16,67	16,57	Kapanewon Lendah
1886		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	32.652.600	0	0	2	5.442.100	0	0	0	0	2	5.405.500	0	0	2	5.405.500	2	5.405.500	18,18	16,55	Kapanewon Lendah
1887		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	167	78.316.200	0	0	7	13.052.700	0	4.880.000	3	3.271.000	2	2.519.000	2	2.355.000	7	13.025.000	7	13.025.000	4,19	16,63	Kapanewon Lendah
1888		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	413.000.745	0	0	100	37.407.500		6.295.240		15.718.760	100	9.981.220	100	4.872.580	100	36.867.800	100	36.867.800	100	8,93	Kapanewon Lendah
1889		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			357.245.145	0	0		31.651.900		4.581.200		13.913.220		8.800.680		3.857.440		31.152.540		31.152.540			Kapanewon Lendah
1890		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37	213.108.345	0	0	7	9.515.100	0	944.500	6	4.223.000	1	2.899.600	0	1.293.000	7	9.360.100	7	9.360.100	18,92	4,39	Kapanewon Lendah
1891		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	144.136.800	0	0	6	22.136.800	0	3.636.700	3	9.690.220	2	5.901.080	1	2.564.440	6	21.792.440	6	21.792.440	12,5	15,12	Kapanewon Lendah
1892		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			55.755.600	0	0		5.755.600		1.714.040		1.805.540		1.180.540		1.015.140		5.715.260		5.715.260			Kapanewon Lendah
1893		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	67	55.755.600	0	0	12	5.755.600	0	1.714.040	3	1.805.540	3	1.180.540	3	1.015.140	9	5.715.260	9	5.715.260	13,43	10,25	Kapanewon Lendah
1894		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	114.901.869	0	0	100	17.483.600		5.999.000		2.321.700	100	3.300.000	100	5.609.000	100	17.229.700	100	17.229.700	100	15	Kapanewon Lendah
1895		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			114.901.869	0	0		17.483.600		5.999.000		2.321.700		3.300.000		5.609.000		17.229.700		17.229.700			Kapanewon Lendah
1896		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41	114.901.869	0	0	8	17.483.600	0	5.999.000	3	2.321.700	1	3.300.000	1	5.609.000	5	17.229.700	5	17.229.700	12,2	15	Kapanewon Lendah
1897		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	325.753.649	0	0	100	49.567.200		5.498.740		13.081.060	100	19.072.320	100	9.565.100	100	47.217.220	100	47.217.220	100	14,49	Kapanewon Lendah
1898		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			325.753.649	0	0		49.567.200		5.498.740		13.081.060		19.072.320		9.565.100		47.217.220		47.217.220			Kapanewon Lendah
1899		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	425	129.669.200	0	0	80	18.584.600	0	0	33	4.992.000	45	12.085.600	2	700.000	80	17.777.600	80	17.777.600	18,82	13,71	Kapanewon Lendah
1900		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	196.084.449	0	0	5	30.982.600	0	5.498.740	1	8.089.060	1	6.986.720	3	8.865.100	5	29.439.620	5	29.439.620	31,25	15,01	Kapanewon Lendah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1901		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	122.859.944	0	0	100	19.169.300		4.619.200		5.519.400	100	5.280.700	100	3.656.460	100	19.075.760	100	19.075.760	100	15,53	Kapanewon Lendah
1902		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			122.859.944	0	0		19.169.300		4.619.200		5.519.400		5.280.700		3.656.460		19.075.760		19.075.760			Kapanewon Lendah
1903		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36	122.859.944	0	0	3	19.169.300	0	4.619.200	0	5.519.400	0	5.280.700	3	3.656.460	3	19.075.760	3	19.075.760	8,33	15,53	Kapanewon Lendah
1904	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.996.158		0		29.996.158		29.996.158			Kapanewon Nanggulan
1905		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.996.158	100	0	100	29.996.158	100	29.996.158	100	13,25	Kapanewon Nanggulan
1906		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.996.158		0		29.996.158		29.996.158			Kapanewon Nanggulan
1907		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	29.996.158	1	0	1	29.996.158	1	29.996.158	100	13,25	Kapanewon Nanggulan
1908		SEKRETARIAT DAERAH			81.268.729	0	0		20.184.600		0		4.045.879		10.744.556		5.303.852		20.094.287		20.094.287			Kapanewon Nanggulan
1909		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	81.268.729	0	0	100	20.184.600		0		4.045.879	100	10.744.556	100	5.303.852	100	20.094.287	100	20.094.287	100	24,73	Kapanewon Nanggulan
1910		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			81.268.729	0	0		20.184.600		0		4.045.879		10.744.556		5.303.852		20.094.287		20.094.287			Kapanewon Nanggulan
1911		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	6	81.268.729	0	0	3	20.184.600	0	0	0	4.045.879	0	10.744.556	3	5.303.852	3	20.094.287	3	20.094.287	50	24,73	Kapanewon Nanggulan
1912		KECAMATAN			12.952.258.155	0	0		2.122.654.659		490.099.469		539.003.881		398.613.306		377.975.237		1.805.691.893		1.805.691.893			Kapanewon Nanggulan
1913		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	12.149.550.967	0	0	100	2.014.196.259		470.853.027		500.472.508		369.004.806	95,24	358.926.529	95,24	1.699.256.870	95,24	1.699.256.870	95,24	13,99	Kapanewon Nanggulan
1914		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.873.399	0	0		10.386.499		2.025.963		6.549.985		1.469.450		199.800		10.245.198		10.245.198			Kapanewon Nanggulan
1915		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	29.087.199	0	0	4	6.596.499	0	1.826.163	1	4.355.150	2	283.050	1	0	4	6.464.363	4	6.464.363	30,77	22,22	Kapanewon Nanggulan
1916		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	22.786.200	0	0	21	3.790.000	0	199.800	5	2.194.835	4	1.186.400	6	199.800	15	3.780.835	15	3.780.835	11,9	16,59	Kapanewon Nanggulan
1917		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.913.794.732	0	0		1.797.696.732		410.483.705		442.016.357		320.442.267		313.918.215		1.486.860.544		1.486.860.544			Kapanewon Nanggulan
1918		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126	10.727.709.432	0	0	21	1.764.025.432	0	403.060.319	0	431.068.757	0	312.969.667	21	306.101.815	21	1.453.200.558	21	1.453.200.558	16,67	13,55	Kapanewon Nanggulan
1919		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	167.640.600	0	0	12	30.656.900	0	6.030.424	3	10.525.000	3	7.050.000	2	7.050.000	8	30.655.424	8	30.655.424	11,11	18,29	Kapanewon Nanggulan
1920		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	18.444.700	0	0	14	3.014.400	0	1.392.962	3	422.600	4	422.600	3	766.400	10	3.004.562	10	3.004.562	11,9	16,29	Kapanewon Nanggulan
1921		Administrasi Umum Perangkat Daerah			208.466.700	0	0		25.354.800		6.487.796		6.288.261		5.143.005		7.328.100		25.247.162		25.247.162			Kapanewon Nanggulan
1922		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	56.176.700	0	0	5	8.964.800	0	2.939.996	1	2.531.861	1	1.986.165	1	1.410.900	3	8.868.922	3	8.868.922	12,5	15,79	Kapanewon Nanggulan
1923		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	152.290.000	0	0	12	16.390.000	0	3.547.800	3	3.756.400	3	3.156.840	2	5.917.200	8	16.378.240	8	16.378.240	11,11	10,75	Kapanewon Nanggulan
1924		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			102.760.900	0	0		2.471.900		2.449.999		0		0		0		2.449.999		2.449.999			Kapanewon Nanggulan
1925		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	102.760.900	0	0	1	2.471.900	0	2.449.999	0	0	0	0	0	0	0	2.449.999	0	2.449.999	0	2,38	Kapanewon Nanggulan
1926		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			497.773.154	0	0		115.690.378		32.246.364		27.261.705		26.186.684		26.455.864		112.150.617		112.150.617			Kapanewon Nanggulan
1927		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	108.782.382	0	0	12	19.996.366	0	3.306.711	3	4.821.852	3	4.029.431	3	4.298.611	9	16.456.605	9	16.456.605	12,5	15,13	Kapanewon Nanggulan
1928		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	388.990.772	0	0	12	95.694.012	0	28.939.653	3	22.439.853	3	22.157.253	2	22.157.253	8	95.694.012	8	95.694.012	11,11	24,6	Kapanewon Nanggulan
1929		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374.882.082	0	0		62.595.950		17.159.200		18.356.200		15.763.400		11.024.550		62.303.350		62.303.350			Kapanewon Nanggulan
1930		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54	248.610.582	0	0	12	47.027.550	0	9.974.300	4	15.573.700	3	12.427.200	3	8.759.750	10	46.734.950	10	46.734.950	18,52	18,8	Kapanewon Nanggulan
1931		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	54.969.800	0	0	2	3.499.900	0	3.499.900	0	0	0	0	0	0	0	3.499.900	0	3.499.900	0	6,37	Kapanewon Nanggulan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1932		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43	71.301.700	0	0	11	12.068.500	0	3.685.000	3	2.782.500	3	3.336.200	2	2.264.800	8	12.068.500	8	12.068.500	18,6	16,93	Kapanewon Nanggulan
1933		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	332.367.640	0	0	100	35.243.800		6.626.158		12.784.431	100	10.300.712	100	3.543.428	100	33.254.729	100	33.254.729	100	10,01	Kapanewon Nanggulan
1934		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			289.315.840	0	0		28.678.900		5.544.976		8.658.324		10.300.712		2.718.848		27.222.860		27.222.860			Kapanewon Nanggulan
1935		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36	206.278.340	0	0	4	11.238.900	0	5.305.216	1	1.099.440	2	4.297.620	0	0	3	10.702.276	3	10.702.276	8,33	5,19	Kapanewon Nanggulan
1936		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	83.037.500	0	0	8	17.440.000	0	239.760	3	7.558.884	1	6.003.092	1	2.718.848	5	16.520.584	5	16.520.584	10,42	19,9	Kapanewon Nanggulan
1937		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			43.051.800	0	0		6.564.900		1.081.182		4.126.107		0		824.580		6.031.869		6.031.869			Kapanewon Nanggulan
1938		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42	43.051.800	0	0	12	6.564.900	0	1.081.182	3	4.126.107	3	0	2	824.580	8	6.031.869	8	6.031.869	19,05	14,01	Kapanewon Nanggulan
1939		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	148.815.318	0	0	100	17.845.000		7.303.394		5.321.700	100	2.323.620	100	2.883.780	100	17.832.494	100	17.832.494	100	11,98	Kapanewon Nanggulan
1940		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			74.407.659	0	0		17.845.000		7.303.394		5.321.700		2.323.620		2.883.780		17.832.494		17.832.494			Kapanewon Nanggulan
1941		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	74.407.659	0	0	8	17.845.000	0	7.303.394	3	5.321.700	1	2.323.620	2	2.883.780	6	17.832.494	6	17.832.494	120	23,97	Kapanewon Nanggulan
1942		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			74.407.659	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Kapanewon Nanggulan
1943		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	74.407.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Nanggulan
1944		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	247.694.300	0	0	60	41.329.800		3.700.000		13.728.490	90	14.290.540	100	9.598.040	100	41.317.070	100	41.317.070	100	16,68	Kapanewon Nanggulan
1945		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			247.694.300	0	0		41.329.800		3.700.000		13.728.490		14.290.540		9.598.040		41.317.070		41.317.070			Kapanewon Nanggulan
1946		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	425	54.377.900	0	0	91	7.926.600	0	0	0	80.863	51	7.441.300	20	399.600	71	7.921.763	71	7.921.763	16,71	14,57	Kapanewon Nanggulan
1947		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36	193.316.400	0	0	6	33.403.200	0	3.700.000	1	13.647.627	2	6.849.240	2	9.198.440	5	33.395.307	5	33.395.307	13,89	17,27	Kapanewon Nanggulan
1948		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	73.829.930	0	0	100	14.039.800		1.616.890		6.696.752	100	2.693.628	100	3.023.460	100	14.030.730	100	14.030.730	100	19	Kapanewon Nanggulan
1949		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			73.829.930	0	0		14.039.800		1.616.890		6.696.752		2.693.628		3.023.460		14.030.730		14.030.730			Kapanewon Nanggulan
1950		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36	73.829.930	0	0	5	14.039.800	0	1.616.890	1	6.696.752	2	2.693.628	0	3.023.460	3	14.030.730	3	14.030.730	8,33	19	Kapanewon Nanggulan
1951	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.816.050		0		29.816.050		29.816.050			Kapanewon Panjatan
1952		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.816.050	100	0	100	29.816.050	100	29.816.050	100	13,18	Kapanewon Panjatan
1953		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.816.050		0		29.816.050		29.816.050			Kapanewon Panjatan
1954		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	16	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.816.050	0	0	1	29.816.050	1	29.816.050	6,25	13,18	Kapanewon Panjatan
1955		SEKRETARIAT DAERAH			71.027.660	0	0		15.660.800		0		0		10.979.390		4.605.910		15.585.300		15.585.300			Kapanewon Panjatan
1956		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	71.027.660	0	0	100	15.660.800		0		0	33,33	10.979.390	100	4.605.910	100	15.585.300	100	15.585.300	100	21,94	Kapanewon Panjatan
1957		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			71.027.660	0	0		15.660.800		0		0		10.979.390		4.605.910		15.585.300		15.585.300			Kapanewon Panjatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1958		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	13	71.027.660	0	0	3	15.660.800	0	0	2	0	0	10.979.390	1	4.605.910	3	15.585.300	3	15.585.300	23,08	21,94	Kapanewon Panjatan
1959		KECAMATAN			6.384.438.796	0	0		2.060.061.800		422.776.397		438.161.805		350.632.375		353.335.242		1.564.905.819		1.564.905.819			Kapanewon Panjatan
1960		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	5.494.490.171	0	0	100	1.921.899.400		394.194.065		399.470.835		310.748.853	100	325.912.972	100	1.430.326.725	100	1.430.326.725	100	26,03	Kapanewon Panjatan
1961		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.225.400	0	0		9.281.300		2.755.090		4.837.660		880.000		679.600		9.152.350		9.152.350			Kapanewon Panjatan
1962		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	14.578.200	0	0	4	6.790.200	0	1.600.880	1	3.918.060	2	880.000	1	280.000	4	6.678.940	4	6.678.940	30,77	45,81	Kapanewon Panjatan
1963		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	8.647.200	0	0	21	2.491.100	0	1.154.210	4	919.600	6	0	5	399.600	15	2.473.410	15	2.473.410	11,9	28,6	Kapanewon Panjatan
1964		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.909.196.734	0	0		1.622.702.576		318.215.267		311.234.298		238.232.836		273.355.024		1.141.037.425		1.141.037.425			Kapanewon Panjatan
1965		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.694	4.808.802.632	0	0	294	1.592.409.976	0	309.759.817	0	304.221.458	0	231.511.716	294	266.621.504	294	1.112.114.495	294	1.112.114.495	17,36	23,13	Kapanewon Panjatan
1966		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	90.674.402	0	0	12	27.427.600	0	7.401.400	3	6.225.000	3	6.225.000	3	6.225.000	9	26.076.400	9	26.076.400	12,5	28,76	Kapanewon Panjatan
1967		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	82	9.719.700	0	0	12	2.865.000	0	1.054.050	3	787.840	3	496.120	3	508.520	9	2.846.530	9	2.846.530	10,98	29,29	Kapanewon Panjatan
1968		Administrasi Umum Perangkat Daerah			92.358.326	0	0		31.725.900		7.723.208		5.774.186		11.533.070		5.948.880		30.979.344		30.979.344			Kapanewon Panjatan
1969		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	25.021.884	0	0	4	8.355.900	0	2.542.408	1	2.192.906	1	3.137.150	1	0	3	7.872.464	3	7.872.464	8,82	31,46	Kapanewon Panjatan
1970		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	67.336.442	0	0	12	23.370.000	0	5.180.800	3	3.581.280	3	8.395.920	3	5.948.880	9	23.106.880	9	23.106.880	12,5	34,32	Kapanewon Panjatan
1971		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.398.900	0	0		20.398.900		0		19.972.556		0		0		19.972.556		19.972.556			Kapanewon Panjatan
1972		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	20.398.900	0	0	5	20.398.900	0	0	5	19.972.556	0	0	0	0	5	19.972.556	5	19.972.556	100	97,91	Kapanewon Panjatan
1973		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			222.048.711	0	0		158.879.424		45.157.202		35.399.461		35.116.326		35.826.368		151.499.357		151.499.357			Kapanewon Panjatan
1974		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	89.456.695	0	0	12	31.287.408	0	6.195.998	3	5.858.262	3	5.575.122	3	6.285.168	9	23.914.550	9	23.914.550	12,5	26,73	Kapanewon Panjatan
1975		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	132.592.016	0	0	12	127.592.016	0	38.961.204	3	29.541.199	3	29.541.204	2	29.541.200	8	127.584.807	8	127.584.807	11,11	96,22	Kapanewon Panjatan
1976		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			227.262.100	0	0		78.911.300		20.343.298		22.252.674		24.986.621		10.103.100		77.685.693		77.685.693			Kapanewon Panjatan
1977		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	187.926.900	0	0	11	62.344.900	0	15.207.798	3	17.854.774	3	18.649.821	2	10.103.100	8	61.815.493	8	61.815.493	12,12	32,89	Kapanewon Panjatan
1978		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	34.335.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Panjatan
1979		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	15	16.566.400	0	5.135.500	7	4.397.900	3	6.336.800	1	0	11	15.870.200	11	15.870.200	0	0	Kapanewon Panjatan
1980		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Panjatan
1981		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	369.094.819	0	0	100	33.582.500		9.254.331		13.732.320	100	4.402.130	100	5.295.510	100	32.684.291	100	32.684.291	100	8,86	Kapanewon Panjatan
1982		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			314.721.039	0	0		27.068.200		7.282.110		10.580.360		3.587.660		4.886.960		26.337.090		26.337.090			Kapanewon Panjatan
1983		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60	219.213.654	0	0	10	10.279.800	0	3.076.350	3	2.847.220	3	1.498.600	3	2.685.400	9	10.107.570	9	10.107.570	15	4,61	Kapanewon Panjatan
1984		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37	95.507.385	0	0	6	16.788.400	0	4.205.760	2	7.733.140	1	2.089.060	2	2.201.560	5	16.229.520	5	16.229.520	13,51	16,99	Kapanewon Panjatan
1985		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			54.373.780	0	0		6.514.300		1.972.221		3.151.960		814.470		408.550		6.347.201		6.347.201			Kapanewon Panjatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1986		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72	54.373.780	0	0	12	6.514.300	0	1.972.221	3	3.151.960	3	814.470	3	408.550	9	6.347.201	9	6.347.201	12,5	11,67	Kapanewon Panjatan
1987		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	5.000.000	0	0	100	26.140.500		8.887.345		7.196.270	50	5.090.640	100	4.243.600	100	25.417.855	100	25.417.855	100	508,36	Kapanewon Panjatan
1988		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0	0	0		26.140.500		8.887.345		7.196.270		5.090.640		4.243.600		25.417.855		25.417.855			Kapanewon Panjatan
1989		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0	7	26.140.500	0	8.887.345	1	7.196.270	0	5.090.640	4	4.243.600	5	25.417.855	5	25.417.855	0	0	Kapanewon Panjatan
1990		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			5.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Kapanewon Panjatan
1991		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Panjatan
1992		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	394.528.746	0	0	100	60.032.200		8.835.503		12.447.440	100	27.899.610	100	9.745.800	100	58.928.353	100	58.928.353	100	14,94	Kapanewon Panjatan
1993		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			394.528.746	0	0		60.032.200		8.835.503		12.447.440		27.899.610		9.745.800		58.928.353		58.928.353			Kapanewon Panjatan
1994		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81	134.247.180	0	0	76	19.001.300	0	0	0	0	60	17.978.040	16	999.000	76	18.977.040	76	18.977.040	93,83	14,14	Kapanewon Panjatan
1995		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	260.281.566	0	0	4	41.030.900	0	8.835.503	1	12.447.440	1	9.921.570	1	8.746.800	3	39.951.313	3	39.951.313	12,5	15,35	Kapanewon Panjatan
1996		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	121.325.060	0	0	100	18.407.200		1.605.153		5.314.940	100	2.491.142	100	8.137.360	100	17.548.595	100	17.548.595	100	14,46	Kapanewon Panjatan
1997		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			121.325.060	0	0		18.407.200		1.605.153		5.314.940		2.491.142		8.137.360		17.548.595		17.548.595			Kapanewon Panjatan
1998		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36	121.325.060	0	0	6	18.407.200	0	1.605.153	2	5.314.940	0	2.491.142	3	8.137.360	5	17.548.595	5	17.548.595	13,89	14,46	Kapanewon Panjatan
1999	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.968.380		0		29.968.380		29.968.380			Kapanewon Pengasih
2000		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.968.380	100	0	100	29.968.380	100	29.968.380	100	13,24	Kapanewon Pengasih
2001		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		29.968.380		0		29.968.380		29.968.380			Kapanewon Pengasih
2002		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	29.968.380	1	0	1	29.968.380	1	29.968.380	16,67	13,24	Kapanewon Pengasih
2003		SEKRETARIAT DAERAH			82.731.451	0	0		22.093.100		0		2.748.600		13.595.494		5.722.760		22.066.854		22.066.854			Kapanewon Pengasih
2004		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	82.731.451	0	0	100	22.093.100		0		2.748.600	33,33	13.595.494	100	5.722.760	100	22.066.854	100	22.066.854	100	26,67	Kapanewon Pengasih
2005		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			82.731.451	0	0		22.093.100		0		2.748.600		13.595.494		5.722.760		22.066.854		22.066.854			Kapanewon Pengasih
2006		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	6	82.731.451	0	0	3	22.093.100	0	0	0	2.748.600	0	13.595.494	2	5.722.760	2	22.066.854	2	22.066.854	33,33	26,67	Kapanewon Pengasih
2007		KECAMATAN			11.161.713.172	0	0		1.768.384.793		475.723.824		492.374.564		396.659.873		373.114.672		1.737.872.933		1.737.872.933			Kapanewon Pengasih
2008		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	10.204.263.195	0	0	100	1.649.239.193		452.619.833		453.854.528		360.305.057	84,21	352.767.266	84,21	1.619.546.684	84,21	1.619.546.684	84,21	15,87	Kapanewon Pengasih
2009		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.590.840	0	0		6.480.150		1.276.100		3.217.170		840.982		674.800		6.009.052		6.009.052			Kapanewon Pengasih
2010		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34	20.967.753	0	0	4	5.598.250	0	1.176.100	1	3.217.170	0	419.580	2	327.600	3	5.140.450	3	5.140.450	8,82	24,52	Kapanewon Pengasih
2011		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	11.623.087	0	0	21	881.900	0	100.000	5	0	5	421.402	6	347.200	16	868.602	16	868.602	22,22	7,47	Kapanewon Pengasih
2012		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.629.503.182	0	0		1.408.141.601		393.736.951		395.721.679		302.530.153		294.219.612		1.386.208.395		1.386.208.395			Kapanewon Pengasih
2013		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	8.458.936.717	0	0	20	1.374.965.001	0	384.629.351	0	386.513.452	0	295.195.993	20	287.394.612	20	1.353.733.408	20	1.353.733.408	16,67	16	Kapanewon Pengasih
2014		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	158.872.070	0	0	12	31.350.000	0	8.400.000	3	8.400.000	3	7.050.000	3	6.825.000	9	30.675.000	9	30.675.000	150	19,31	Kapanewon Pengasih

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2015		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	11.694.395	0	0	14	1.826.600	0	707.600	4	808.227	3	284.160	4	0	11	1.799.987	11	1.799.987	13,1	15,39	Kapanewon Pengasih
2016		Administrasi Umum Perangkat Daerah			238.792.526	0	0		34.345.400		6.943.813		6.254.089		11.843.169		9.130.720		34.171.791		34.171.791			Kapanewon Pengasih
2017		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	43.107.534	0	0	12	7.045.400	0	1.576.653	3	1.517.509	3	2.127.089	3	1.665.760	9	6.887.011	9	6.887.011	180	15,98	Kapanewon Pengasih
2018		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	195.684.992	0	0	12	27.300.000	0	5.367.160	3	4.736.580	3	9.716.080	3	7.464.960	9	27.284.780	9	27.284.780	180	13,94	Kapanewon Pengasih
2019		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.057.995	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Kapanewon Pengasih
2020		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	46.057.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Pengasih
2021		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			802.907.524	0	0		126.059.042		34.687.071		27.182.202		22.406.178		36.916.736		121.192.187		121.192.187			Kapanewon Pengasih
2022		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	151.827.686	0	0	12	24.927.781	0	5.466.171	3	5.024.949	3	5.172.759	3	6.970.622	9	22.634.501	9	22.634.501	180	14,91	Kapanewon Pengasih
2023		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	651.079.838	0	0	12	101.131.261	0	29.220.900	3	22.157.253	3	17.233.419	3	29.946.114	9	98.557.686	9	98.557.686	180	15,14	Kapanewon Pengasih
2024		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			454.411.128	0	0		74.213.000		15.975.898		21.479.388		22.684.575		11.825.398		71.965.259		71.965.259			Kapanewon Pengasih
2025		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	382.658.981	0	0	10	62.440.000	0	12.856.776	3	18.042.797	3	18.518.027	1	10.853.640	7	60.271.240	7	60.271.240	15,56	15,75	Kapanewon Pengasih
2026		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	71.752.147	0	0	8	11.773.000	0	3.119.122	3	3.436.591	2	4.166.548	2	971.758	7	11.694.019	7	11.694.019	17,5	16,3	Kapanewon Pengasih
2027		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	384.287.661	0	0	100	31.157.300		8.186.011		12.897.852	100	5.402.008	100	4.354.572	100	30.840.443	100	30.840.443	100	8,03	Kapanewon Pengasih
2028		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			342.131.634	0	0		25.158.200		8.186.011		8.386.416		4.724.020		3.574.020		24.870.467		24.870.467			Kapanewon Pengasih
2029		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38	240.124.277	0	0	7	9.521.900	0	3.814.845	1,5	4.622.900	1,5	250.000	2,5	800.000	6	9.487.745	6	9.487.745	14,47	3,95	Kapanewon Pengasih
2030		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31	102.007.357	0	0	8	15.636.300	0	4.371.166	1,5	3.763.516	2	4.474.020	3	2.774.020	7	15.382.722	7	15.382.722	20,97	15,08	Kapanewon Pengasih
2031		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			42.156.027	0	0		5.999.100		0		4.511.436		677.988		780.552		5.969.976		5.969.976			Kapanewon Pengasih
2032		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	60	42.156.027	0	0	12	5.999.100	0	0	3	4.511.436	3	677.988	3	780.552	9	5.969.976	9	5.969.976	15	14,16	Kapanewon Pengasih
2033		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	110.200.103	0	0	100	15.720.500		1.665.332		6.833.596	50	5.782.896	100	1.356.880	100	15.638.704	100	15.638.704	100	14,19	Kapanewon Pengasih
2034		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			110.200.103	0	0		15.720.500		1.665.332		6.833.596		5.782.896		1.356.880		15.638.704		15.638.704			Kapanewon Pengasih
2035		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	110.200.103	0	0	8	15.720.500	0	1.665.332	1	6.833.596	2	5.782.896	4	1.356.880	7	15.638.704	7	15.638.704	58,33	14,19	Kapanewon Pengasih
2036		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	354.018.217	0	0	100	54.153.200		6.500.648		16.514.832	100	20.064.740	100	10.785.634	100	53.865.854	100	53.865.854	100	15,22	Kapanewon Pengasih
2037		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			354.018.217	0	0		54.153.200		6.500.648		16.514.832		20.064.740		10.785.634		53.865.854		53.865.854			Kapanewon Pengasih
2038		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450	108.089.688	0	0	13	15.252.600	0	6.260.648	4	-4.098.048	5	11.243.700	1	1.839.800	10	15.246.100	10	15.246.100	2,22	14,11	Kapanewon Pengasih
2039		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25	245.928.529	0	0	35	38.900.600	0	240.000	10	20.612.880	6	8.821.040	12	8.945.834	28	38.619.754	28	38.619.754	112	15,7	Kapanewon Pengasih
2040		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	108.943.996	0	0	100	18.114.600		6.752.000		2.273.756	80	5.105.172	100	3.850.320	100	17.981.248	100	17.981.248	100	16,51	Kapanewon Pengasih

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2041		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			108.943.996	0	0		18.114.600		6.752.000		2.273.756		5.105.172		3.850.320		17.981.248		17.981.248			Kapanewon Pengasih
2042		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30	108.943.996	0	0	6	18.114.600	0	6.752.000	3	2.273.756	0	5.105.172	2	3.850.320	5	17.981.248	5	17.981.248	16,67	16,51	Kapanewon Pengasih
2043	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		30.000.000		0		30.000.000		30.000.000			Kapanewon Samigaluh
2044		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.325	0	0	100	30.000.000		0		0	100	30.000.000	100	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	13,26	Kapanewon Samigaluh
2045		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.325	0	0		30.000.000		0		0		30.000.000		0		30.000.000		30.000.000			Kapanewon Samigaluh
2046		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	226.305.325	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	16,67	13,26	Kapanewon Samigaluh
2047		SEKRETARIAT DAERAH			57.678.670	0	0		21.050.000		0		5.850.000		9.250.000		5.950.000		21.050.000		21.050.000			Kapanewon Samigaluh
2048		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	57.678.670	0	0	100	21.050.000		0		5.850.000	66,67	9.250.000	100	5.950.000	100	21.050.000	100	21.050.000	100	36,5	Kapanewon Samigaluh
2049		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			57.678.670	0	0		21.050.000		0		5.850.000		9.250.000		5.950.000		21.050.000		21.050.000			Kapanewon Samigaluh
2050		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	18	57.678.670	0	0	3	21.050.000	0	0	0	5.850.000	0	9.250.000	3	5.950.000	3	21.050.000	3	21.050.000	16,67	36,5	Kapanewon Samigaluh
2051		KECAMATAN			12.138.101.741	0	0		2.102.586.884		480.677.703		543.187.895		571.853.475		401.352.431		1.997.071.504		1.997.071.504			Kapanewon Samigaluh
2052		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	11.110.300.931	0	0	100	1.969.628.184		452.911.348		504.075.876		533.324.232	100	374.705.507	100	1.865.016.963	100	1.865.016.963	100	16,79	Kapanewon Samigaluh
2053		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.418.300	0	0		11.027.000		3.145.530		4.025.029		2.843.204		822.761		10.836.524		10.836.524			Kapanewon Samigaluh
2054		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	50.397.000	0	0	4	8.156.200	0	1.698.290	0	3.606.259	2	2.477.434	0	242.591	2	8.024.574	2	8.024.574	14,29	15,92	Kapanewon Samigaluh
2055		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91	30.021.300	0	0	21	2.870.800	0	1.447.240	4	418.770	5	365.770	7	580.170	16	2.811.950	16	2.811.950	17,58	9,37	Kapanewon Samigaluh
2056		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.150.297.900	0	0		1.487.633.900		382.123.001		412.887.337		295.859.209		300.437.104		1.391.306.651		1.391.306.651			Kapanewon Samigaluh
2057		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	8.953.159.786	0	0	21	1.455.321.500	0	372.737.528	0	404.851.563	0	288.679.435	21	293.286.930	21	1.359.555.456	21	1.359.555.456	15,56	15,19	Kapanewon Samigaluh
2058		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	172.829.270	0	0	12	28.328.000	0	7.759.736	3	7.275.000	3	6.418.600	3	6.419.000	9	27.872.336	9	27.872.336	52,94	16,13	Kapanewon Samigaluh
2059		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	24.308.844	0	0	14	3.984.400	0	1.625.737	3	760.774	4	761.174	4	731.174	11	3.878.859	11	3.878.859	13,1	15,96	Kapanewon Samigaluh
2060		Administrasi Umum Perangkat Daerah			168.657.755	0	0		22.606.800		8.034.053		2.901.078		8.293.251		2.909.078		22.137.460		22.137.460			Kapanewon Samigaluh
2061		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	67.488.097	0	0	1	11.061.800	0	5.402.201	0	954.000	0	3.583.231	1	962.000	1	10.901.432	1	10.901.432	10	16,15	Kapanewon Samigaluh
2062		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	101.169.658	0	0	12	11.545.000	0	2.631.852	3	1.947.078	3	4.710.020	3	1.947.078	9	11.236.028	9	11.236.028	52,94	11,11	Kapanewon Samigaluh
2063		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.000.000	0	0		200.000.000		0		16.617.810		181.998.760		0		198.616.570		198.616.570			Kapanewon Samigaluh
2064		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	16.617.810	1	181.998.760	0	0	1	198.616.570	1	198.616.570	20	99,31	Kapanewon Samigaluh
2065		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			867.388.071	0	0		129.511.065		24.116.205		42.160.982		14.508.977		47.082.286		127.868.450		127.868.450			Kapanewon Samigaluh
2066		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	119.818.976	0	0	12	19.770.800	0	4.635.606	3	4.650.383	3	4.661.912	3	4.651.687	9	18.599.588	9	18.599.588	52,94	15,52	Kapanewon Samigaluh
2067		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	747.569.095	0	0	12	109.740.265	0	19.480.599	3	37.510.599	3	9.847.065	3	42.430.599	9	109.268.862	9	109.268.862	52,94	14,62	Kapanewon Samigaluh
2068		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			643.538.905	0	0		118.849.419		35.492.559		25.483.640		29.820.831		23.454.278		114.251.308		114.251.308			Kapanewon Samigaluh
2069		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	576.952.948	0	0	8	94.076.919	0	19.299.964	1	24.768.640	1	23.249.254	2	23.454.278	4	90.772.136	4	90.772.136	8,33	15,73	Kapanewon Samigaluh
2070		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	47.583.957	0	0	1	10.770.500	0	10.164.900	1	0	0	0	0	0	1	10.164.900	1	10.164.900	16,67	21,36	Kapanewon Samigaluh

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2071		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	19.002.000	0	0	12	14.002.000	0	6.027.695	4	715.000	8	6.571.577	0	0	12	13.314.272	12	13.314.272	16,67	70,07	Kapanewon Samigaluh
2072		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	387.699.242	0	0	100	34.318.400		5.564.827		15.491.380	100,11	8.421.397	100	4.658.580	100	34.136.184	100	34.136.184	100	8,8	Kapanewon Samigaluh
2073		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			367.309.543	0	0		30.635.100		4.149.169		14.432.180		7.239.447		4.658.580		30.479.376		30.479.376			Kapanewon Samigaluh
2074		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42	246.019.694	0	0	3	10.938.200	0	1.511.013	0	1.627.600	0	4.771.847	2	2.931.060	2	10.841.520	2	10.841.520	4,76	4,41	Kapanewon Samigaluh
2075		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32	121.289.849	0	0	7	19.696.900	0	2.638.156	3	12.804.580	1	2.467.600	1	1.727.520	5	19.637.856	5	19.637.856	15,63	16,19	Kapanewon Samigaluh
2076		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.389.699	0	0		3.683.300		1.415.658		1.059.200		1.181.950		0		3.656.808		3.656.808			Kapanewon Samigaluh
2077		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	17	20.389.699	0	0	12	3.683.300	0	1.415.658	3	1.059.200	3	1.181.950	3	0	9	3.656.808	9	3.656.808	52,94	17,93	Kapanewon Samigaluh
2078		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	145.324.974	0	0	100	22.895.000		9.163.680		3.689.042	50	3.455.302	100	6.408.000	100	22.716.024	100	22.716.024	100	15,63	Kapanewon Samigaluh
2079		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			145.324.974	0	0		22.895.000		9.163.680		3.689.042		3.455.302		6.408.000		22.716.024		22.716.024			Kapanewon Samigaluh
2080		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	145.324.974	0	0	5	22.895.000	0	9.163.680	1	3.689.042	0	3.455.302	1	6.408.000	2	22.716.024	2	22.716.024	5,56	15,63	Kapanewon Samigaluh
2081		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	369.173.856	0	0	100	56.630.400		9.176.855		15.436.308	100	23.431.424	100	8.349.456	100	56.394.043	100	56.394.043	100	15,28	Kapanewon Samigaluh
2082		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			369.173.856	0	0		56.630.400		9.176.855		15.436.308		23.431.424		8.349.456		56.394.043		56.394.043			Kapanewon Samigaluh
2083		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	270	178.102.121	0	0	45	25.066.800	0	0	0	7.280.000	45	16.366.392	0	1.355.400	45	25.001.792	45	25.001.792	16,67	14,04	Kapanewon Samigaluh
2084		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30	191.071.735	0	0	5	31.563.600	0	9.176.855	1	8.156.308	1	7.065.032	2	6.994.056	4	31.392.251	4	31.392.251	13,33	16,43	Kapanewon Samigaluh
2085		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	125.602.738	0	0	100	19.114.900		3.860.993		4.495.289	80	3.221.120	100	7.230.888	100	18.808.290	100	18.808.290	100	14,97	Kapanewon Samigaluh
2086		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			125.602.738	0	0		19.114.900		3.860.993		4.495.289		3.221.120		7.230.888		18.808.290		18.808.290			Kapanewon Samigaluh
2087		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30	125.602.738	0	0	5	19.114.900	0	3.860.993	2	4.495.289	2	3.221.120	1	7.230.888	5	18.808.290	5	18.808.290	16,67	14,97	Kapanewon Samigaluh
2088	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			398.511.825	0	0		30.000.000		0		0		29.983.999		0		29.983.999		29.983.999			Kapanewon Sentolo
2089		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	398.511.825	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.983.999	100	0	100	29.983.999	100	29.983.999	100	7,52	Kapanewon Sentolo
2090		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			398.511.825	0	0		30.000.000		0		0		29.983.999		0		29.983.999		29.983.999			Kapanewon Sentolo
2091		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	10	398.511.825	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.983.999	0	0	1	29.983.999	1	29.983.999	10	7,52	Kapanewon Sentolo
2092		SEKRETARIAT DAERAH			290.148.000	0	0		21.524.000		789.374		3.358.544		9.715.668		7.616.228		21.479.814		21.479.814			Kapanewon Sentolo
2093		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	290.148.000	0	0	100	21.524.000		789.374		3.358.544	0	9.715.668	100	7.616.228	100	21.479.814	100	21.479.814	100	7,4	Kapanewon Sentolo
2094		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			290.148.000	0	0		21.524.000		789.374		3.358.544		9.715.668		7.616.228		21.479.814		21.479.814			Kapanewon Sentolo
2095		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	30	290.148.000	0	0	3	21.524.000	0	789.374	0	3.358.544	0	9.715.668	3	7.616.228	3	21.479.814	3	21.479.814	10	7,4	Kapanewon Sentolo
2096		KECAMATAN			12.179.884.447	0	0		1.748.773.642		416.065.258		442.346.147		465.541.890		371.993.815		1.695.947.110		1.695.947.110			Kapanewon Sentolo
2097		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	10.958.519.717	0	0	100	1.607.431.842		389.566.200		404.704.228		423.614.199	100	338.353.227	100	1.556.237.854	100	1.556.237.854	100	14,2	Kapanewon Sentolo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2098		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			66.883.760	0	0		7.875.200		933.496		4.380.320		1.056.660		1.400.580		7.771.056		7.771.056			Kapanewon Sentolo
2099		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	47.432.460	0	0	3	5.611.500	0	399.149	0	4.140.560	2	701.700	1	299.700	3	5.541.109	3	5.541.109	21,43	11,68	Kapanewon Sentolo
2100		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	19.451.300	0	0	21	2.263.700	0	534.347	4	239.760	4	354.960	7	1.100.880	15	2.229.947	15	2.229.947	18,52	11,46	Kapanewon Sentolo
2101		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.651.880.873	0	0		1.266.369.572		326.923.906		345.557.812		272.117.912		275.597.117		1.220.196.747		1.220.196.747			Kapanewon Sentolo
2102		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126	8.377.642.483	0	0	21	1.234.455.672	0	321.870.111	0	332.616.402	0	265.303.052	21	269.016.977	21	1.188.806.542	21	1.188.806.542	16,67	14,19	Kapanewon Sentolo
2103		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	253.166.010	0	0	12	29.440.400	0	4.732.022	3	12.015.000	3	6.675.000	3	5.550.000	9	28.972.022	9	28.972.022	12,5	11,44	Kapanewon Sentolo
2104		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	21.072.380	0	0	14	2.473.500	0	321.773	4	926.410	3	139.860	4	1.030.140	11	2.418.183	11	2.418.183	13,1	11,48	Kapanewon Sentolo
2105		Administrasi Umum Perangkat Daerah			283.481.890	0	0		27.149.000		6.590.212		6.234.591		9.617.108		4.365.460		26.807.371		26.807.371			Kapanewon Sentolo
2106		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	94.976.200	0	0	5	9.824.000	0	2.437.384	0	3.111.095	0	2.899.248	5	1.227.400	5	9.675.127	5	9.675.127	50	10,19	Kapanewon Sentolo
2107		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	188.505.690	0	0	12	17.325.000	0	4.152.828	3	3.123.496	3	6.717.860	3	3.138.060	9	17.132.244	9	17.132.244	52,94	9,09	Kapanewon Sentolo
2108		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			147.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0			Kapanewon Sentolo
2109		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapanewon Sentolo
2110		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			982.578.894	0	0		148.029.390		37.707.359		22.426.805		43.952.810		40.263.623		144.350.597		144.350.597			Kapanewon Sentolo
2111		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	214.744.576	0	0	12	31.379.876	0	6.975.857	3	7.655.303	3	7.631.342	3	9.056.472	9	31.318.974	9	31.318.974	52,94	14,58	Kapanewon Sentolo
2112		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	767.834.318	0	0	12	116.649.514	0	30.731.502	3	14.771.502	3	36.321.468	3	31.207.151	9	113.031.623	9	113.031.623	52,94	14,72	Kapanewon Sentolo
2113		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			826.694.300	0	0		158.008.680		17.411.227		26.104.700		96.869.709		16.726.447		157.112.083		157.112.083			Kapanewon Sentolo
2114		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54	555.357.020	0	0	9	63.112.880	0	16.008.900	2	19.310.500	2	13.916.180	2	13.778.400	6	63.013.980	6	63.013.980	11,11	11,35	Kapanewon Sentolo
2115		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	147.897.000	0	0	1	78.897.000	0	0	0	0	1	78.140.300	0	0	1	78.140.300	1	78.140.300	16,67	52,83	Kapanewon Sentolo
2116		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102	123.440.280	0	0	17	15.998.800	0	1.402.327	5	6.794.200	6	4.813.229	4	2.948.047	15	15.957.803	15	15.957.803	14,71	12,93	Kapanewon Sentolo
2117		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	316.561.310	0	0	100	33.458.000		7.616.594		12.283.710	134,38	8.462.944	149,79	4.422.760	149,79	32.786.008	149,79	32.786.008	149,79	10,36	Kapanewon Sentolo
2118		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			256.652.740	0	0		27.892.800		5.994.356		11.049.310		7.017.220		3.297.160		27.358.046		27.358.046			Kapanewon Sentolo
2119		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42	72.131.040	0	0	7	9.373.800	0	1.287.005	1	2.922.990	3	2.624.400	2	2.070.800	6	8.905.195	6	8.905.195	14,29	12,35	Kapanewon Sentolo
2120		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54	184.521.700	0	0	9	18.519.000	0	4.707.351	3	8.126.320	3	4.392.820	1	1.226.360	7	18.452.851	7	18.452.851	12,96	10	Kapanewon Sentolo
2121		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			59.908.570	0	0		5.565.200		1.622.238		1.234.400		1.445.724		1.125.600		5.427.962		5.427.962			Kapanewon Sentolo
2122		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72	59.908.570	0	0	12	5.565.200	0	1.622.238	3	1.234.400	3	1.445.724	3	1.125.600	9	5.427.962	9	5.427.962	12,5	9,06	Kapanewon Sentolo
2123		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	174.127.480	0	0	100	16.845.400		5.884.342		3.914.729	50	2.777.940	100	4.209.264	100	16.786.275	100	16.786.275	100	9,64	Kapanewon Sentolo
2124		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			174.127.480	0	0		16.845.400		5.884.342		3.914.729		2.777.940		4.209.264		16.786.275		16.786.275			Kapanewon Sentolo
2125		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22	174.127.480	0	0	7	16.845.400	0	5.884.342	0	3.914.729	0	2.777.940	7	4.209.264	7	16.786.275	7	16.786.275	31,82	9,64	Kapanewon Sentolo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2126		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	519.797.320	0	0	100	66.492.200		10.693.713		16.720.780	100	24.440.227	100	13.857.584	100	65.712.304	100	65.712.304	100	12,64	Kapanewon Sentolo
2127		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			519.797.320	0	0		66.492.200		10.693.713		16.720.780		24.440.227		13.857.584		65.712.304		65.712.304			Kapanewon Sentolo
2128		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	270	183.481.630	0	0	70	23.454.200	0	1.695.618	0	1.050.000	0	15.679.087	70	4.774.220	70	23.198.925	70	23.198.925	25,93	12,64	Kapanewon Sentolo
2129		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36	336.315.690	0	0	4	43.038.000	0	8.998.095	0	15.670.780	3	8.761.140	1	9.083.364	4	42.513.379	4	42.513.379	11,11	12,64	Kapanewon Sentolo
2130		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	210.878.620	0	0	100	24.546.200		2.304.409		4.722.700	80	6.246.580	100	11.150.980	100	24.424.669	100	24.424.669	100	11,58	Kapanewon Sentolo
2131		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			210.878.620	0	0		24.546.200		2.304.409		4.722.700		6.246.580		11.150.980		24.424.669		24.424.669			Kapanewon Sentolo
2132		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	32	210.878.620	0	0	6	24.546.200	0	2.304.409	0	4.722.700	0	6.246.580	6	11.150.980	6	24.424.669	6	24.424.669	18,75	11,58	Kapanewon Sentolo
2133	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			239.119.235	0	0		30.000.000		0		0		29.682.549		199.994		29.882.543		29.882.543			Kapanewon Temon
2134		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	239.119.235	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.682.549	100	199.994	100	29.882.543	100	29.882.543	100	12,5	Kapanewon Temon
2135		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			239.119.235	0	0		30.000.000		0		0		29.682.549		199.994		29.882.543		29.882.543			Kapanewon Temon
2136		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	6	239.119.235	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	29.682.549	0	199.994	1	29.882.543	1	29.882.543	16,67	12,5	Kapanewon Temon
2137		SEKRETARIAT DAERAH			94.876.552	0	0		22.200.000		0		2.086.560		9.247.900		10.538.984		21.873.444		21.873.444			Kapanewon Temon
2138		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	94.876.552	0	0	100	22.200.000		0		2.086.560	33,33	9.247.900	100	10.538.984	100	21.873.444	100	21.873.444	100	23,05	Kapanewon Temon
2139		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			94.876.552	0	0		22.200.000		0		2.086.560		9.247.900		10.538.984		21.873.444		21.873.444			Kapanewon Temon
2140		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	18	94.876.552	0	0	3	22.200.000	0	0	0	2.086.560	2	9.247.900	1	10.538.984	3	21.873.444	3	21.873.444	16,67	23,05	Kapanewon Temon
2141		KECAMATAN			11.921.417.043	0	0		1.938.979.833		436.749.381		431.294.648		492.720.915		352.596.089		1.713.361.033		1.713.361.033			Kapanewon Temon
2142		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	10.888.991.710	0	0	100	1.827.761.033		412.214.736		407.520.920		456.613.904	100	327.206.531	100	1.603.556.091	100	1.603.556.091	100	14,73	Kapanewon Temon
2143		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.063.800	0	0		9.248.800		1.271.483		4.436.020		2.303.617		918.624		8.929.744		8.929.744			Kapanewon Temon
2144		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	27.894.000	0	0	4	6.592.400	0	1.271.483	0	3.304.226	2	1.691.747	2	220.224	4	6.487.680	4	6.487.680	30,77	23,26	Kapanewon Temon
2145		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	23.169.800	0	0	21	2.656.400	0	0	6	1.131.794	5	611.870	4	698.400	15	2.442.064	15	2.442.064	18,52	10,54	Kapanewon Temon
2146		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.989.794.092	0	0		1.490.139.589		349.939.264		360.132.070		279.916.252		278.603.168		1.268.590.754		1.268.590.754			Kapanewon Temon
2147		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352	8.782.170.992	0	0	252	1.459.308.989	0	340.280.299	0	353.059.750	0	273.057.070	252	271.522.105	252	1.237.919.224	252	1.237.919.224	71,59	14,1	Kapanewon Temon
2148		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	183.212.000	0	0	12	27.750.000	0	8.625.000	3	6.375.000	3	6.375.000	3	6.375.000	9	27.750.000	9	27.750.000	52,94	15,15	Kapanewon Temon
2149		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	24.411.100	0	0	14	3.080.600	0	1.033.965	3	697.320	4	484.182	4	706.063	11	2.921.530	11	2.921.530	13,1	11,97	Kapanewon Temon
2150		Administrasi Umum Perangkat Daerah			253.210.050	0	0		31.386.100		3.844.980		4.995.380		15.997.240		5.573.382		30.410.982		30.410.982			Kapanewon Temon
2151		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	59.239.400	0	0	4	7.706.100	0	0	1	0	1	7.142.880	1	0	3	7.142.880	3	7.142.880	33,33	12,06	Kapanewon Temon
2152		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	193.970.650	0	0	12	23.680.000	0	3.844.980	4	4.995.380	3	8.854.360	3	5.573.382	10	23.268.102	10	23.268.102	58,82	12	Kapanewon Temon
2153		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			179.254.800	0	0		3.500.000		3.474.019		0		0		0		3.474.019		3.474.019			Kapanewon Temon
2154		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	179.254.800	0	0	2	3.500.000	0	3.474.019	0	0	0	0	0	0	0	3.474.019	0	3.474.019	0	1,94	Kapanewon Temon
2155		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			814.890.586	0	0		135.514.862		37.498.715		22.859.636		38.775.288		36.341.357		135.474.996		135.474.996			Kapanewon Temon

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2156		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	208.631.862	0	0	12	39.820.850	0	8.273.204	3	8.085.962	3	9.227.940	3	14.193.878	9	39.780.984	9	39.780.984	52,94	19,07	Kapanewon Temon
2157		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	606.258.724	0	0	12	95.694.012	0	29.225.511	3	14.773.674	3	29.547.348	3	22.147.479	9	95.694.012	9	95.694.012	52,94	15,78	Kapanewon Temon
2158		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.778.382	0	0		157.971.682		16.186.275		15.097.814		119.621.507		5.770.000		156.675.596		156.675.596			Kapanewon Temon
2159		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54	339.091.250	0	0	9	46.865.750	0	10.757.800	2	11.919.200	2	18.040.597	1	5.770.000	5	46.487.597	5	46.487.597	9,26	13,71	Kapanewon Temon
2160		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	167.571.832	0	0	3	96.757.832	0	0	0	1.477.014	3	94.601.172	0	0	3	96.078.186	3	96.078.186	21,43	57,34	Kapanewon Temon
2161		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98	94.115.300	0	0	23	14.348.100	0	5.428.475	10	1.701.600	13	6.979.738	0	0	23	14.109.813	23	14.109.813	23,47	14,99	Kapanewon Temon
2162		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	427.158.318	0	0	100	33.356.400		7.996.611		10.559.845	100	12.783.444	100	1.910.135	100	33.250.035	100	33.250.035	100	7,78	Kapanewon Temon
2163		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			380.850.518	0	0		26.668.600		6.147.179		8.291.365		12.145.194		0		26.583.738		26.583.738			Kapanewon Temon
2164		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42	262.455.400	0	0	7	12.900.600	0	1.572.243	4	5.424.873	1	5.891.343	0	0	5	12.888.459	5	12.888.459	11,9	4,91	Kapanewon Temon
2165		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	118.395.118	0	0	6	13.768.000	0	4.574.936	3	2.866.492	1	6.253.851	0	0	4	13.695.279	4	13.695.279	11,11	11,57	Kapanewon Temon
2166		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			46.307.800	0	0		6.687.800		1.849.432		2.268.480		638.250		1.910.135		6.666.297		6.666.297			Kapanewon Temon
2167		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72	46.307.800	0	0	12	6.687.800	0	1.849.432	3	2.268.480	3	638.250	3	1.910.135	9	6.666.297	9	6.666.297	12,5	14,4	Kapanewon Temon
2168		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	130.657.810	0	0	100	15.366.300		8.121.304		399.600	100	2.829.168	100	3.284.295	100	14.634.367	100	14.634.367	100	11,2	Kapanewon Temon
2169		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			130.657.810	0	0		15.366.300		8.121.304		399.600		2.829.168		3.284.295		14.634.367		14.634.367			Kapanewon Temon
2170		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	130.657.810	0	0	8	15.366.300	0	8.121.304	1	399.600	3	2.829.168	1	3.284.295	5	14.634.367	5	14.634.367	11,36	11,2	Kapanewon Temon
2171		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	318.571.325	0	0	100	46.778.500		5.378.427		10.935.163	100	18.018.481	100	12.100.000	100	46.432.071	100	46.432.071	100	14,58	Kapanewon Temon
2172		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			318.571.325	0	0		46.778.500		5.378.427		10.935.163		18.018.481		12.100.000		46.432.071		46.432.071			Kapanewon Temon
2173		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480	129.345.100	0	0	80	13.070.100	0	0	0	3.150.020	65	7.922.111	15	1.850.000	80	12.922.131	80	12.922.131	16,67	9,99	Kapanewon Temon
2174		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	189.226.225	0	0	4	33.708.400	0	5.378.427	2	7.785.143	1	10.096.370	1	10.250.000	4	33.509.940	4	33.509.940	16,67	17,71	Kapanewon Temon
2175		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	156.037.880	0	0	100	15.717.600		3.038.303		1.879.120	100	2.475.918	100	8.095.128	100	15.488.469	100	15.488.469	100	9,93	Kapanewon Temon
2176		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			156.037.880	0	0		15.717.600		3.038.303		1.879.120		2.475.918		8.095.128		15.488.469		15.488.469			Kapanewon Temon
2177		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	31	156.037.880	0	0	6	15.717.600	0	3.038.303	1	1.879.120	3	2.475.918	2	8.095.128	6	15.488.469	6	15.488.469	19,35	9,93	Kapanewon Temon
2178	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			226.305.335	0	0		30.000.000		0		0		29.976.339		0		29.976.339		29.976.339			Kapanewon Wates
2179		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	226.305.335	0	0	100	30.000.000		0		0	100	29.976.339	100	0	100	29.976.339	100	29.976.339	100	13,25	Kapanewon Wates
2180		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			226.305.335	0	0		30.000.000		0		0		29.976.339		0		29.976.339		29.976.339			Kapanewon Wates
2181		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	226.305.335	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	29.976.339	1	0	1	29.976.339	1	29.976.339	25	13,25	Kapanewon Wates
2182		SEKRETARIAT DAERAH			379.992.458	0	0		120.165.000		0		5.839.949		86.608.956		26.757.504		119.206.409		119.206.409			Kapanewon Wates

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2183		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	379.992.458	0	0	100	120.165.000		0		5.839.949	100	86.608.956	100	26.757.504	100	119.206.409	100	119.206.409	100	31,37	Kapanewon Wates
2184		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			379.992.458	0	0		120.165.000		0		5.839.949		86.608.956		26.757.504		119.206.409		119.206.409			Kapanewon Wates
2185		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	12	379.992.458	0	0	3	120.165.000	0	0	0	5.839.949	0	86.608.956	3	26.757.504	3	119.206.409	3	119.206.409	25	31,37	Kapanewon Wates
2186		KECAMATAN			21.333.258.552	0	0		4.594.175.031		984.971.308		806.162.654		1.724.542.860		842.059.247		4.357.736.069		4.357.736.069			Kapanewon Wates
2187		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	15.153.742.811	0	0	100	2.564.879.331		744.177.778		484.959.118		547.920.821	100	553.527.357	100	2.330.585.074	100	2.330.585.074	100	15,38	Kapanewon Wates
2188		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.960.000	0	0		10.138.200		279.720		5.931.785		0		3.901.578		10.113.083		10.113.083			Kapanewon Wates
2189		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	32.144.200	0	0	3	7.445.300	0	0	1	4.892.404	2	0	0	2.534.352	3	7.426.756	3	7.426.756	100	23,1	Kapanewon Wates
2190		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	18.815.800	0	0	21	2.692.900	0	279.720	4	1.039.381	4	0	10	1.367.226	18	2.686.327	18	2.686.327	21,43	14,28	Kapanewon Wates
2191		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.586.394.513	0	0		2.090.455.467		657.775.648		405.805.403		403.370.646		409.011.259		1.875.962.956		1.875.962.956			Kapanewon Wates
2192		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	12.328.274.413	0	0	28	2.043.938.367	0	644.934.115	0	396.367.671	0	393.700.646	28	395.622.442	28	1.830.624.874	28	1.830.624.874	19,44	14,85	Kapanewon Wates
2193		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56	240.289.000	0	0	12	43.640.500	0	11.884.733	3	8.370.000	3	9.670.000	3	12.540.000	9	42.464.733	9	42.464.733	16,07	17,67	Kapanewon Wates
2194		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	17.831.100	0	0	14	2.876.600	0	956.800	3	1.067.732	4	0	4	848.817	11	2.873.349	11	2.873.349	19,64	16,11	Kapanewon Wates
2195		Administrasi Umum Perangkat Daerah			263.078.000	0	0		39.947.200		7.351.242		11.734.371		9.190.064		11.303.440		39.579.117		39.579.117			Kapanewon Wates
2196		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	100.508.000	0	0	4	16.777.200	0	3.908.942	0	5.845.671	0	2.757.584	4	3.987.600	4	16.499.797	4	16.499.797	16	16,42	Kapanewon Wates
2197		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	162.570.000	0	0	12	23.170.000	0	3.442.300	3	5.888.700	3	6.432.480	3	7.315.840	9	23.079.320	9	23.079.320	18,75	14,2	Kapanewon Wates
2198		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161.645.200	0	0		21.645.200		0		0		21.005.304		239.760		21.245.064		21.245.064			Kapanewon Wates
2199		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	161.645.200	0	0	5	21.645.200	0	0	5	0	0	21.005.304	0	239.760	5	21.245.064	5	21.245.064	83,33	13,14	Kapanewon Wates
2200		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.463.123.686	0	0		255.016.702		62.075.307		41.129.259		52.635.795		83.128.020		238.968.381		238.968.381			Kapanewon Wates
2201		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	420.311.986	0	0	13	79.186.282	0	13.372.092	3	15.999.504	3	15.707.040	3	31.956.459	9	77.035.095	9	77.035.095	75	18,33	Kapanewon Wates
2202		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.042.811.700	0	0	12	175.830.420	0	48.703.215	3	25.129.755	3	36.928.755	3	51.171.561	9	161.933.286	9	161.933.286	75	15,53	Kapanewon Wates
2203		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			628.541.412	0	0		147.676.562		16.695.861		20.358.300		61.719.012		45.943.300		144.716.473		144.716.473			Kapanewon Wates
2204		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	399.347.450	0	0	14	79.026.450	0	8.659.700	2	10.815.700	0	16.118.700	8	41.054.300	10	76.648.400	10	76.648.400	71,43	19,19	Kapanewon Wates
2205		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		55.715.462	0	0	1	38.150.612	0	0	0	0	0	37.994.812	1	0	1	37.994.812	1	37.994.812	0	68,19	Kapanewon Wates
2206		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	173.478.500	0	0	61	30.499.500	0	8.036.161	10	9.542.600	10	7.605.500	9	4.889.000	29	30.073.261	29	30.073.261	103,57	17,34	Kapanewon Wates
2207		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	100	298.189.103	0	0	100	29.566.500		1.363.746		9.535.806	100	8.183.708	100	10.098.684	100	29.181.944	100	29.181.944	100	9,79	Kapanewon Wates
2208		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			290.132.603	0	0		26.510.000		819.180		8.703.306		7.419.695		9.255.740		26.197.921		26.197.921			Kapanewon Wates
2209		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	87.992.603	0	0	6	6.370.000	0	0	0	833.869	0	1.104.791	6	4.429.220	6	6.367.880	6	6.367.880	150	7,24	Kapanewon Wates
2210		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	202.140.000	0	0	6	20.140.000	0	819.180	0	7.869.437	0	6.314.904	6	4.826.520	6	19.830.041	6	19.830.041	66,67	9,81	Kapanewon Wates

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2211		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8.056.500	0	0		3.056.500		544.566		832.500		764.013		842.944		2.984.023		2.984.023			Kapanewon Wates
2212		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	8.056.500	0	0	12	3.056.500	0	544.566	3	832.500	3	764.013	3	842.944	9	2.984.023	9	2.984.023	75	37,04	Kapanewon Wates
2213		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	1.866.646.960	0	0	100	1.375.125.200		106.168.731		150.805.786	50	993.144.483	100	124.039.391	100	1.374.158.391	100	1.374.158.391	100	73,62	Kapanewon Wates
2214		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			247.881.900	0	0		22.131.900		6.781.766		4.452.695		3.587.080		7.288.039		22.109.580		22.109.580			Kapanewon Wates
2215		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	247.881.900	0	0	9	22.131.900	0	6.781.766	3	4.452.695	2	3.587.080	2	7.288.039	7	22.109.580	7	22.109.580	100	8,92	Kapanewon Wates
2216		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.618.765.060	0	0		1.352.993.300		99.386.965		146.353.091		989.557.403		116.751.352		1.352.048.811		1.352.048.811			Kapanewon Wates
2217		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17	900.485.900	0	0	17	895.485.900	0	2.294.724	14	23.305.087	3	864.473.770	0	5.111.064	17	895.184.645	17	895.184.645	100	99,41	Kapanewon Wates
2218		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	667.056.460	0	0	11	424.309.900	0	92.547.848	3	110.397.654	3	116.811.249	3	104.178.198	9	423.934.949	9	423.934.949	81,82	63,55	Kapanewon Wates
2219		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	51.222.700	0	0	12	33.197.500	0	4.544.393	3	12.650.350	3	8.272.384	4	7.462.090	10	32.929.217	10	32.929.217	83,33	64,29	Kapanewon Wates
2220		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100	3.916.070.497	0	0	100	608.761.000		128.510.610		158.204.044	100	172.935.648	100	148.330.775	100	607.981.077	100	607.981.077	100	15,53	Kapanewon Wates
2221		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			3.916.070.497	0	0		608.761.000		128.510.610		158.204.044		172.935.648		148.330.775		607.981.077		607.981.077			Kapanewon Wates
2222		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		3.495.738.697	0	0	405	550.736.300	0	122.510.610	154	152.787.367	60	135.642.248	166	139.023.996	380	549.964.221	380	549.964.221	0	15,73	Kapanewon Wates
2223		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	221.068.800	0	0	135	31.051.700	0	0	0	542.346	90	30.344.000	45	159.840	135	31.046.186	135	31.046.186	192,86	14,04	Kapanewon Wates
2224		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7	199.263.000	0	0	6	26.973.000	0	6.000.000	1	4.874.331	1	6.949.400	1	9.146.939	3	26.970.670	3	26.970.670	42,86	13,54	Kapanewon Wates
2225		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	100	98.609.181	0	0	100	15.843.000		4.750.443		2.657.900	80	2.358.200	100	6.063.040	100	15.829.583	100	15.829.583	100	16,05	Kapanewon Wates
2226		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			98.609.181		0		15.843.000		4.750.443		2.657.900		2.358.200		6.063.040		15.829.583		15.829.583			Kapanewon Wates
2227		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	307	98.609.181	0	0	7	15.843.000	0	4.750.443	0	2.657.900	2	2.358.200	3	6.063.040	5	15.829.583	5	15.829.583	1,63	16,05	Kapanewon Wates
2228	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			45.755.270.000		0		45.755.270.000		8.359.012.536		8.378.597.529		9.112.822.033		14.427.411.615		40.277.843.713		40.277.843.713			RSUD Nyi Ageng Serang
2229		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	86,75	45.755.270.000	0	0	82,5	45.755.270.000		8.359.012.536		8.378.597.529	86,18	9.112.822.033	86,31	14.427.411.615	86,31	40.277.843.713	86,31	40.277.843.713	99,49	88,03	RSUD Nyi Ageng Serang
2230		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.755.270.000		0		45.755.270.000		8.359.012.536		8.378.597.529		9.112.822.033		14.427.411.615		40.277.843.713		40.277.843.713			RSUD Nyi Ageng Serang
2231		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6	45.755.270.000	0	0	1	45.755.270.000	0	8.359.012.536	0	8.378.597.529	0	9.112.822.033	1	14.427.411.615	1	40.277.843.713	1	40.277.843.713	16,67	88,03	RSUD Nyi Ageng Serang
2232	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			208.548.849.199		0		215.048.849.199		43.066.877.225		43.143.217.568		59.199.366.416		66.312.836.348		211.722.297.557		211.722.297.557			RSUD Wates
2233		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES	87	208.548.849.199	0	0	85,5	215.048.849.199		43.066.877.225		43.143.217.568	85,78	59.199.366.416	85,43	66.312.836.348	85,43	211.722.297.557	85,43	211.722.297.557	98,2	101,52	RSUD Wates
2234		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0		0		6.500.000.000		0		0		6.490.000.000		0		6.490.000.000		6.490.000.000			RSUD Wates
2235		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			0	0	1	6.500.000.000	0	0	0	0	0	6.490.000.000	1	0	1	6.490.000.000	1	6.490.000.000	0	0	RSUD Wates

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2236		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			208.548.849.199		0		208.548.849.199		43.066.877.225		43.143.217.568		52.709.366.416		66.312.836.348		205.232.297.557		205.232.297.557			RSUD Wates
2237		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6	208.548.849.199	0	0	1	208.548.849.199	0	43.066.877.225	0	43.143.217.568	0	52.709.366.416	1	66.312.836.348	1	205.232.297.557	1	205.232.297.557	16,67	98,41	RSUD Wates
2238	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			41.270.598.307		0		6.114.891.222		1.462.242.474		1.755.280.997		1.173.148.608		1.354.829.139		5.745.501.218		5.745.501.218			Satuan Polisi Pamong Praja
2239		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	28.517.765.285	0	0	100	3.920.364.922		1.021.602.958		1.232.514.397		609.030.549	100	787.315.414	100	3.650.463.318	100	3.650.463.318	100	12,8	Satuan Polisi Pamong Praja
2240		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.365.700		0		11.665.200		3.653.559		2.078.235		804.000		165.517		6.701.311		6.701.311			Satuan Polisi Pamong Praja
2241		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	57.776.800	0	0	4	8.536.800	0	3.094.746	1	1.322.100	1	564.000	1	0	3	4.980.846	3	4.980.846	23,08	8,62	Satuan Polisi Pamong Praja
2242		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	20.588.900	0	0	21	3.128.400	0	558.813	4	756.135	2	240.000	4	165.517	10	1.720.465	10	1.720.465	12,35	8,36	Satuan Polisi Pamong Praja
2243		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.483.065.519		0		3.099.255.722		819.906.785		1.043.678.508		410.526.329		611.077.733		2.885.189.355		2.885.189.355			Satuan Polisi Pamong Praja
2244		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246	22.159.255.619	0	0	41	3.050.945.822	0	812.756.785	0	1.028.242.046	0	399.281.329	41	597.784.817	41	2.838.064.977	41	2.838.064.977	16,67	12,81	Satuan Polisi Pamong Praja
2245		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	305.400.000	0	0	12	45.900.000	0	7.150.000	3	14.300.000	2	10.725.000	3	13.125.000	8	45.300.000	8	45.300.000	11,11	14,83	Satuan Polisi Pamong Praja
2246		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	18.409.900	0	0	14	2.409.900	0	0	3	1.136.462	3	520.000	3	167.916	9	1.824.378	9	1.824.378	10,71	9,91	Satuan Polisi Pamong Praja
2247		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			451.488.000		0		25.748.000		880.400		1.272.000		17.592.000		2.938.400		22.682.800		22.682.800			Satuan Polisi Pamong Praja
2248		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	324	297.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2249		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	154.488.000	0	0	25	25.748.000	0	880.400	0	1.272.000	0	17.592.000	25	2.938.400	25	22.682.800	25	22.682.800	16,67	14,68	Satuan Polisi Pamong Praja
2250		Administrasi Umum Perangkat Daerah			142.925.500		0		8.287.000		233.280		0		320.000		3.131.000		3.684.280		3.684.280			Satuan Polisi Pamong Praja
2251		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	62.733.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2252		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	80.192.000	0	0	4	8.287.000	0	233.280	1	0	0	320.000	1	3.131.000	2	3.684.280	2	3.684.280	8,33	4,59	Satuan Polisi Pamong Praja
2253		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.085.000.000		0		0		0		0		0		0		0		0			Satuan Polisi Pamong Praja
2254		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11	580.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2255		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2256		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2257		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.658.071.386		0		600.782.900		170.333.518		139.786.336		129.239.862		124.703.246		564.062.962		564.062.962			Satuan Polisi Pamong Praja
2258		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	405.371.802	0	0	12	70.067.792	0	12.802.340	3	15.394.184	2	15.216.247	3	15.171.177	8	58.583.948	8	58.583.948	11,11	14,45	Satuan Polisi Pamong Praja
2259		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	5	8.601.900	0	2.408.485	1	2.143.304	1	1.408.601	2	2.054.723	4	8.015.113	4	8.015.113	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2260		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	2.252.699.584	0	0	12	522.113.208	0	155.122.693	3	122.248.848	2	112.615.014	3	107.477.346	8	497.463.901	8	497.463.901	11,11	22,08	Satuan Polisi Pamong Praja
2261		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			618.849.180		0		174.626.100		26.595.416		45.699.318		50.548.358		45.299.518		168.142.610		168.142.610			Satuan Polisi Pamong Praja
2262		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	512.082.780	0	0	16	156.831.700	0	24.706.600	2	38.816.233	2	46.590.800	4	40.907.000	8	151.020.633	8	151.020.633	7,84	29,49	Satuan Polisi Pamong Praja
2263		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	234	106.766.400	0	0	79	17.794.400	0	1.888.816	16	6.883.085	31	3.957.558	12	4.392.518	59	17.121.977	59	17.121.977	25,21	16,04	Satuan Polisi Pamong Praja
2264		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Program	100	12.752.833.022		0		2.194.526.300		440.639.516		522.766.600		564.118.059		567.513.725		2.095.037.900		2.095.037.900		16,43	Satuan Polisi Pamong Praja
2265			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100				100						100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
2266			Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA	100				100						100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2267		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.855.442.412		0		1.516.180.525		393.426.786		368.530.000		385.577.413		335.353.280		1.482.887.479		1.482.887.479			Satuan Polisi Pamong Praja
2268		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	148	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2269		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72	7.073.534.587	0	0	14	1.268.142.700	0	356.766.200	3	302.790.000	3	304.554.560	5	297.325.120	11	1.261.435.880	11	1.261.435.880	15,28	17,83	Satuan Polisi Pamong Praja
2270		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	72	1.556.907.825	0	0	12	248.037.825	0	36.660.586	3	65.740.000	2	81.022.853	3	38.028.160	8	221.451.599	8	221.451.599	11,11	14,22	Satuan Polisi Pamong Praja
2271		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2272		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			3.802.390.610		0		678.345.775		47.212.730		154.236.600		178.540.646		232.160.445		612.150.421		612.150.421			Satuan Polisi Pamong Praja
2273		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	590.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2274		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	659.672.460	0	0	1	119.672.460	0		0	10.504.580	0	51.830.569	1	54.213.185	1	116.548.334	1	116.548.334	20	17,67	Satuan Polisi Pamong Praja
2275		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	72	1.347.854.390	0	0	12	379.925.915	0	27.876.400	3	105.750.800	2	93.966.400	4	118.528.900	9	346.122.500	9	346.122.500	12,5	25,68	Satuan Polisi Pamong Praja
2276		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72	1.204.863.760	0	0	12	178.747.400	0	19.336.330	3	37.981.220	2	32.743.677	4	59.418.360	9	149.479.587	9	149.479.587	12,5	12,41	Satuan Polisi Pamong Praja
2277		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			95.000.000		0		0		0		0		0		0		0		0			Satuan Polisi Pamong Praja
2278		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	60	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
2279	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	SEKRETARIAT DAERAH			149.253.695.855		0		24.709.221.576		3.982.819.235		5.745.706.136		5.677.641.122		7.570.750.425		22.976.916.918		22.976.916.918			Sekretariat Daerah
2280		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program	100	113.579.360.642		0		19.740.913.961		3.804.363.940		4.547.539.336		4.497.478.502		5.539.522.640		18.388.904.418		18.388.904.418		16,19	Sekretariat Daerah
2281			Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	100				100						55,56		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2282			Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	100				100						100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2283			Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100						84,21		100		100		100		0		Sekretariat Daerah
2284			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100				100								100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2285		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			82.274.700		0		16.246.900		1.431.105		4.115.664		3.355.141		5.016.602		13.918.512		13.918.512			Sekretariat Daerah
2286		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	51.043.300	0	0	3	10.712.400	0	1.017.353	0	3.879.792	3	1.214.182	0	2.836.420	3	8.947.747	3	8.947.747	17,65	17,53	Sekretariat Daerah
2287		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	31.231.400	0	0	21	5.534.500	0	413.752	6	235.872	4	2.140.959	5	2.180.182	15	4.970.765	15	4.970.765	18,52	15,92	Sekretariat Daerah
2288		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.303.016.860		0		9.803.101.588		2.557.593.779		2.707.820.348		2.067.223.612		2.050.610.735		9.383.248.474		9.383.248.474			Sekretariat Daerah
2289		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	798	57.373.519.260	0	0	133	9.642.573.388	0	2.537.668.779	0	2.650.784.355	0	2.031.095.627	133	2.004.993.845	133	9.224.542.606	133	9.224.542.606	16,67	16,08	Sekretariat Daerah
2290		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	891.400.000	0	0	12	154.000.000	0	19.525.000	3	55.475.000	3	34.225.000	3	43.800.000	9	153.025.000	9	153.025.000	52,94	17,17	Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2291		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	38.097.600	0	0	14	6.528.200	0	400.000	4	1.560.993	3	1.902.985	4	1.816.890	11	5.680.868	11	5.680.868	13,1	14,91	Sekretariat Daerah
2292		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			51.100.000		0		7.000.000		0		0		0		3.200.000		3.200.000		3.200.000			Sekretariat Daerah
2293		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	51.100.000	0	0	2	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	8,33	6,26	Sekretariat Daerah
2294		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.426.268.900		0		1.209.177.800		153.772.991		192.810.514		371.397.194		337.929.102		1.055.909.801		1.055.909.801			Sekretariat Daerah
2295		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	2.536.137.900	0	0	9	446.875.300	0	69.703.276	0	109.585.321	0	95.781.588	9	100.986.355	9	376.056.540	9	376.056.540	64,29	14,83	Sekretariat Daerah
2296		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	3.890.131.000	0	0	12	762.302.500	0	84.069.715	3	83.225.193	4	275.615.606	3	236.942.747	10	679.853.261	10	679.853.261	58,82	17,48	Sekretariat Daerah
2297		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.267.991.952		0		901.657.600		0		2.427.570		166.384.030		691.104.421		859.916.021		859.916.021			Sekretariat Daerah
2298		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	62	1.267.991.952	0	0	39	901.657.600	0	0	9	2.427.570	9	166.384.030	0	691.104.421	18	859.916.021	18	859.916.021	29,03	67,82	Sekretariat Daerah
2299		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.302.023.610		0		2.800.234.653		557.122.319		609.597.779		657.435.423		863.480.179		2.687.635.700		2.687.635.700			Sekretariat Daerah
2300		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	4.446.502.538	0	0	12	789.357.037	0	109.795.703	3	219.263.903	3	170.220.943	3	218.538.061	9	717.818.610	9	717.818.610	52,94	16,14	Sekretariat Daerah
2301		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	15.855.521.072	0	0	12	2.010.877.616	0	447.326.616	3	390.333.876	3	487.214.480	3	644.942.118	9	1.969.817.090	9	1.969.817.090	52,94	12,42	Sekretariat Daerah
2302		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.005.681.500		0		2.049.724.500		117.005.403		286.340.168		642.343.099		859.046.922		1.904.735.592		1.904.735.592			Sekretariat Daerah
2303		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	448	5.774.037.300	0	0	88	1.025.611.200	0	93.810.586	30	183.561.758	22	245.636.219	22	390.270.954	74	913.279.517	74	913.279.517	16,52	15,82	Sekretariat Daerah
2304		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110	4.244.661.200	0	0	65	758.569.400	0	4.216.600	12	17.298.050	15	338.400.520	23	392.015.850	50	751.931.020	50	751.931.020	45,45	17,71	Sekretariat Daerah
2305		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.625	1.986.983.000	0	0	425	265.543.900	0	18.978.217	105	85.480.360	105	58.306.360	110	76.760.118	320	239.525.055	320	239.525.055	19,69	12,05	Sekretariat Daerah
2306		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			5.577.873.520		0		958.856.020		251.616.919		234.750.463		241.443.306		169.418.972		897.229.660		897.229.660			Sekretariat Daerah
2307		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	1.079.546.720	0	0	24	181.155.720	0	31.528.648	6	40.396.084	6	35.952.972	6	35.937.048	18	143.814.752	18	143.814.752	150	13,32	Sekretariat Daerah
2308		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	55	797.697.200	0	0	10	161.657.100	0	137.555.610	0	0	0	949.700	0	0	0	138.505.310	0	138.505.310	0	17,36	Sekretariat Daerah
2309		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	100.629.600	0	0	8	16.043.200	0	2.936.000	0	0	4	8.021.600	2	4.010.800	6	14.968.400	6	14.968.400	12,5	14,87	Sekretariat Daerah
2310		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90	3.600.000.000	0	0	12	600.000.000	0	79.596.661	3	194.354.379	3	196.519.034	3	129.471.124	9	599.941.198	9	599.941.198	10	16,67	Sekretariat Daerah
2311		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2.340.344.000		0		392.470.600		49.181.424		67.600.000		66.450.000		179.928.525		363.159.949		363.159.949			Sekretariat Daerah
2312		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8	1.178.834.300	0	0	3	211.499.200	0	37.380.000	0	38.760.000	0	38.070.000	2	90.729.325	2	204.939.325	2	204.939.325	25	17,38	Sekretariat Daerah
2313		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8	1.069.417.100	0	0	3	161.641.200	0	11.571.424	0	28.840.000	0	28.380.000	2	72.279.200	2	141.070.624	2	141.070.624	25	13,19	Sekretariat Daerah
2314		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7	92.092.600	0	0	2	19.330.200	0	230.000	0	0	0	0	1	16.920.000	1	17.150.000	1	17.150.000	14,29	18,62	Sekretariat Daerah
2315		Penataan Organisasi			1.028.749.800		0		145.325.000		11.720.000		30.455.000		18.788.420		24.879.832		85.843.252		85.843.252			Sekretariat Daerah
2316		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	261.635.000	0	0	2	35.500.000	0	8.640.000	0	1.200.000	0	5.308.420	0	3.960.000	0	19.108.420	0	19.108.420	0	7,3	Sekretariat Daerah
2317		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	29	423.965.000	0	0	4	52.000.000	0	1.940.000	0	7.510.000	0	5.110.000	4	11.556.122	4	26.116.122	4	26.116.122	13,79	6,16	Sekretariat Daerah
2318		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47	343.149.800	0	0	7	57.825.000	0	1.140.000	3	21.745.000	1	8.370.000	3	9.363.710	7	40.618.710	7	40.618.710	14,89	11,84	Sekretariat Daerah
2319		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			6.194.035.800		0		1.457.119.300		104.920.000		411.621.830		262.658.277		354.907.350		1.134.107.457		1.134.107.457			Sekretariat Daerah
2320		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	17	6.194.035.800	0	0	12	1.457.119.300	0	104.920.000	4	411.621.830	3	262.658.277	3	354.907.350	10	1.134.107.457	10	1.134.107.457	58,82	18,31	Sekretariat Daerah
2321		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian Program	100	31.507.676.654		0		4.206.695.988		131.621.131		1.079.034.400		933.812.888		1.814.466.984		3.958.935.403		3.958.935.403		12,56	Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2322			Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100				100						100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2323			Persentase Perumusan dan Monev kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan	100				100						88,89		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2324			Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	100				100						75		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2325		Administrasi Tata Pemerintahan			4.017.112.324		0		561.015.000		40.456.922		119.211.290		19.099.003		361.174.585		539.941.800		539.941.800			Sekretariat Daerah
2326		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	18	1.954.382.724	0	0	3	254.993.700	0	4.274.622	0	4.414.692	0	4.015.980	3	231.806.620	3	244.511.914	3	244.511.914	16,67	12,51	Sekretariat Daerah
2327		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	23	969.941.400	0	0	3	153.027.200	0	400.000	0	19.703.332	0	3.459.500	3	125.817.000	3	149.379.832	3	149.379.832	13,04	15,4	Sekretariat Daerah
2328		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	30	1.092.788.200	0	0	5	152.994.100	0	35.782.300	1	95.093.266	0	11.623.523	0	3.550.965	1	146.050.054	1	146.050.054	3,33	13,36	Sekretariat Daerah
2329		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			19.146.790.430		0		2.476.143.888		72.236.121		708.921.836		584.781.042		1.049.249.005		2.415.188.004		2.415.188.004			Sekretariat Daerah
2330		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	61	10.274.788.142	0	0	11	1.154.200.000	0	50.898.662	0	196.450.048	2	532.447.838	9	353.967.905	11	1.133.764.453	11	1.133.764.453	18,03	11,03	Sekretariat Daerah
2331		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	55	8.054.487.800	0	0	10	1.208.686.500	0	5.817.197	1	483.964.945	5	18.822.022	4	666.615.000	10	1.175.219.164	10	1.175.219.164	18,18	14,59	Sekretariat Daerah
2332		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	25	817.514.488	0	0	5	113.257.388	0	15.520.262	1	28.506.843	1	33.511.182	3	28.666.100	5	106.204.387	5	106.204.387	20	12,99	Sekretariat Daerah
2333		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			8.085.007.300		0		1.133.003.800		18.928.088		218.581.541		328.783.143		402.744.694		969.037.466		969.037.466			Sekretariat Daerah
2334		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.520	585.985.400	0	0	420	80.992.700	0	4.564.542	143	22.122.754	126	24.200.027	170	21.594.089	439	72.481.412	439	72.481.412	17,42	12,37	Sekretariat Daerah
2335		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	72	7.001.379.200	0	0	12	984.189.600	0	13.775.046	1	187.763.287	0	266.979.437	12	362.777.334	13	831.295.104	13	831.295.104	18,06	11,87	Sekretariat Daerah
2336		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.520	497.642.700	0	0	480	67.821.500	0	588.500	143	8.695.500	126	37.603.679	170	18.373.271	439	65.260.950	439	65.260.950	17,42	13,11	Sekretariat Daerah
2337		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			258.766.600		0		36.533.300		0		32.319.733		1.149.700		1.298.700		34.768.133		34.768.133			Sekretariat Daerah
2338		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24	258.766.600	0	0	4	36.533.300	0	0	0	32.319.733	1	1.149.700	0	1.298.700	1	34.768.133	1	34.768.133	4,17	13,44	Sekretariat Daerah
2339		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Program	100	3.951.793.041		0		650.084.327		46.834.164		112.692.400		192.422.275		176.862.302		528.811.141		528.811.141		13,38	Sekretariat Daerah
2340			Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	100				100						71,43		152,38		152,38		152,38		152,38		Sekretariat Daerah
2341			Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100				100						100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2342			Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	100				100						58,33		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
2343		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.388.823.241		0		209.520.127		14.381.733		28.198.391		39.768.706		82.661.697		165.010.527		165.010.527			Sekretariat Daerah
2344		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	30	725.749.241	0	0	5	108.483.127	0	4.458.853	0	5.162.136	1	5.017.680	0	50.813.490	1	65.452.159	1	65.452.159	3,33	9,02	Sekretariat Daerah
2345		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	71	663.074.000	0	0	11	101.037.000	0	9.922.880	3	23.036.255	3	34.751.026	5	31.848.207	11	99.558.368	11	99.558.368	15,49	15,01	Sekretariat Daerah
2346		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			546.255.800		0		85.020.400		8.368.334		20.842.517		19.196.628		22.316.570		70.724.049		70.724.049			Sekretariat Daerah
2347		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	249.448.600	0	0	2	39.666.800	0	6.287.306	0	13.738.580	0	7.725.000	1	10.279.614	1	38.030.500	1	38.030.500	8,33	15,25	Sekretariat Daerah
2348		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15	176.578.600	0	0	5	27.289.300	0	706.959	1	4.316.019	2	8.174.283	1	4.859.602	4	18.056.863	4	18.056.863	26,67	10,23	Sekretariat Daerah
2349		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	120.228.600	0	0	2	18.064.300	0	1.374.069	0	2.787.918	0	3.297.345	2	7.177.354	2	14.636.686	2	14.636.686	16,67	12,17	Sekretariat Daerah
2350		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.484.597.400		0		218.242.200		18.561.269		54.438.048		29.717.055		59.400.079		162.116.451		162.116.451			Sekretariat Daerah
2351		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360	976.789.200	0	0	60	139.838.100	0	13.489.731	9	39.074.520	10	19.741.131	0	33.332.596	19	105.637.978	19	105.637.978	5,28	10,81	Sekretariat Daerah
2352		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	24	217.139.600	0	0	4	33.569.800	0	2.821.790	0	6.916.581	2	3.230.107	2	13.108.380	4	26.076.858	4	26.076.858	16,67	12,01	Sekretariat Daerah
2353		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.440	290.668.600	0	0	240	44.834.300	0	2.249.748	0	8.446.947	90	6.745.817	0	12.959.103	90	30.401.615	90	30.401.615	6,25	10,46	Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2354		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			532.116.600		0		137.301.600		5.522.828		9.213.444		103.739.886		12.483.956		130.960.114		130.960.114			Sekretariat Daerah
2355		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	24	119.372.200	0	0	4	17.136.200	0	3.084.808	0	5.415.041	0	5.954.272	4	1.768.096	4	16.222.217	4	16.222.217	16,67	13,59	Sekretariat Daerah
2356		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	11	134.938.700	0	0	1	6.779.700	0	276.612	0	1.476.422	0	999.500	1	1.044.120	1	3.796.654	1	3.796.654	9,09	2,81	Sekretariat Daerah
2357		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	13	277.805.700	0	0	3	113.385.700	0	2.161.408	0	2.321.981	1	96.786.114	1	9.671.740	2	110.941.243	2	110.941.243	15,38	39,93	Sekretariat Daerah
2358		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian Program	100	214.865.518		0		111.527.300		0		6.440.000		53.927.457		39.898.499		100.265.956		100.265.956		46,66	Sekretariat Daerah
2359			Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo					100						100		100		100		100		0		Sekretariat Daerah
2360			Kematangan Perangkat Daerah	49,3																		0		Sekretariat Daerah
2361			Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon					96,1						94,16		94,16		94,16		94,16		0		Sekretariat Daerah
2362			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100																		0		Sekretariat Daerah
2363		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			174.273.300		0		99.277.300		0		5.040.000		51.747.457		31.228.499		88.015.956		88.015.956			Sekretariat Daerah
2364		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	108	119.914.000	0	0	18	78.790.000	0	0	0	5.040.000	0	38.596.510	18	24.624.600	18	68.261.110	18	68.261.110	16,67	56,93	Sekretariat Daerah
2365		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	6	54.359.300	0	0	1	20.487.300	0	0	0	0	0	13.150.947	1	6.603.899	1	19.754.846	1	19.754.846	16,67	36,34	Sekretariat Daerah
2366		Peningkatan Budaya Pemerintahan			40.592.218		0		12.250.000		0		1.400.000		2.180.000		8.670.000		12.250.000		12.250.000			Sekretariat Daerah
2367		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	13	40.592.218	0	0	2	12.250.000	0	0	0	1.400.000	0	2.180.000	2	8.670.000	2	12.250.000	2	12.250.000	15,38	30,18	Sekretariat Daerah
2368	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	SEKRETARIAT DPRD			246.838.556.628		0		43.465.513.080		10.465.636.789		10.726.894.122		9.327.794.018		10.284.576.809		40.804.901.738		40.804.901.738			Sekretariat DPRD
2369		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100	149.389.157.281	0	0	100	26.449.518.652		6.162.370.353		7.700.845.810		6.213.242.415	100	5.975.057.534	100	26.051.516.112	100	26.051.516.112	100	17,44	Sekretariat DPRD
2370		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.075.500		0		5.320.100		250.000		2.198.880		0		2.450.583		4.899.463		4.899.463			Sekretariat DPRD
2371		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	22.180.500	0	0	3	4.338.000	0	250.000	0	2.198.880	2	0	1	1.545.644	3	3.994.524	3	3.994.524	23,08	18,01	Sekretariat DPRD
2372		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	15.895.000	0	0	21	982.100	0	0	6	0	3	0	6	904.939	15	904.939	15	904.939	11,9	5,69	Sekretariat DPRD
2373		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.964.606.967		0		2.135.837.993		557.582.691		571.701.168		449.701.841		467.150.676		2.046.136.376		2.046.136.376			Sekretariat DPRD
2374		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198	12.667.240.167	0	0	33	2.087.452.193	0	544.157.691	0	560.826.168	0	438.826.841	33	454.287.732	33	1.998.098.432	33	1.998.098.432	16,67	15,77	Sekretariat DPRD
2375		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	281.064.200	0	0	12	47.263.700	0	13.425.000	3	10.875.000	2	10.875.000	4	11.818.145	9	46.993.145	9	46.993.145	52,94	16,72	Sekretariat DPRD
2376		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	16.302.600	0	0	14	1.122.100	0	0	3	0	3	0	4	1.044.799	10	1.044.799	10	1.044.799	11,9	6,41	Sekretariat DPRD
2377		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			119.480.000		0		14.060.000		0		510.000		12.550.000		0		13.060.000		13.060.000			Sekretariat DPRD
2378		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
2379		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	119.480.000	0	0	6	14.060.000	0	0	6	510.000	0	12.550.000	0	0	6	13.060.000	6	13.060.000	16,67	10,93	Sekretariat DPRD
2380		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.287.174.200		0		178.464.200		37.216.077		45.303.629		36.933.058		42.118.289		161.571.053		161.571.053			Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2381		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	567.234.200	0	0	12	89.394.200	0	18.962.597	3	8.627.189	3	22.953.358	3	28.272.789	9	78.815.933	9	78.815.933	52,94	13,89	Sekretariat DPRD
2382		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	719.940.000	0	0	12	89.070.000	0	18.253.480	3	36.676.440	3	13.979.700	3	13.845.500	9	82.755.120	9	82.755.120	52,94	11,49	Sekretariat DPRD
2383		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.087.846.853		0		2.022.254.000		0		1.789.000.000		224.658.660		0		2.013.658.660		2.013.658.660			Sekretariat DPRD
2384		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	2.793.150.000	0	0	3	1.793.150.000	0	0	3	1.789.000.000	0	1.150.000	0	0	3	1.790.150.000	3	1.790.150.000	60	64,09	Sekretariat DPRD
2385		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.950	1.294.696.853	0	0	409	229.104.000	0	0	406	0	3	223.508.660	0	0	409	223.508.660	409	223.508.660	20,97	17,26	Sekretariat DPRD
2386		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.790.571.470		0		1.523.552.870		383.982.571		359.482.321		357.703.145		356.652.311		1.457.820.348		1.457.820.348			Sekretariat DPRD
2387		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17	1.306.091.050	0	0	12	217.791.050	0	45.720.865	3	41.890.615	3	44.371.073	3	46.161.359	9	178.143.912	9	178.143.912	52,94	13,64	Sekretariat DPRD
2388		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	8.484.480.420	0	0	12	1.305.761.820	0	338.261.706	4	317.591.706	2	313.332.072	4	310.490.952	10	1.279.676.436	10	1.279.676.436	58,82	15,08	Sekretariat DPRD
2389		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.145.496.300		0		703.505.400		105.383.549		159.409.154		228.249.780		166.279.754		659.322.237		659.322.237			Sekretariat DPRD
2390		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	2.721.254.300	0	0	25	397.713.300	0	89.387.000	5	105.510.400	5	76.897.900	6	107.490.700	16	379.286.000	16	379.286.000	10,67	13,94	Sekretariat DPRD
2391		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	857.843.100	0	0	2	190.479.700	0	4.200.000	1	27.508.800	0	127.224.695	0	21.794.099	1	180.727.594	1	180.727.594	8,33	21,07	Sekretariat DPRD
2392		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	367	566.398.900	0	0	62	115.312.400	0	11.796.549	20	26.389.954	17	24.127.185	12	36.994.955	49	99.308.643	49	99.308.643	13,35	17,53	Sekretariat DPRD
2393		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			115.920.154.691		0		19.666.262.589		5.043.248.889		4.749.995.378		4.867.402.251		4.865.949.442		19.526.595.960		19.526.595.960			Sekretariat DPRD
2394		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	240	113.994.315.591	0	0	40	19.393.939.989	0	5.043.248.889	0	4.614.995.378	0	4.843.438.251	40	4.860.136.588	40	19.361.819.106	40	19.361.819.106	16,67	16,98	Sekretariat DPRD
2395		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	480	1.444.423.100	0	0	80	192.106.600	0	0	0	135.000.000	80	850.000	0	989.854	80	136.839.854	80	136.839.854	16,67	9,47	Sekretariat DPRD
2396		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	240	481.416.000	0	0	40	80.216.000	0	0	0	0	14	23.114.000	3	4.823.000	17	27.937.000	17	27.937.000	7,08	5,8	Sekretariat DPRD
2397		Layanan Administrasi DPRD			1.035.751.300		0		200.261.500		34.706.576		23.245.280		36.043.680		74.456.479		168.452.015		168.452.015			Sekretariat DPRD
2398		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	1.035.751.300	0	0	10	200.261.500	0	34.706.576	2	23.245.280	2	36.043.680	4	74.456.479	8	168.452.015	8	168.452.015	13,33	16,26	Sekretariat DPRD
2399		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Capaian Program	100	97.449.399.347		0		17.015.994.428		4.303.266.436		3.026.048.312		3.114.551.603		4.309.519.275		14.753.385.626		14.753.385.626		15,14	Sekretariat DPRD
2400			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	100				100						50		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
2401			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	100				100						65		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
2402			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100				100						72,92		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
2403		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			18.844.186.500		0		4.350.552.900		553.787.420		905.774.645		1.252.805.319		1.129.030.247		3.841.397.631		3.841.397.631			Sekretariat DPRD
2404		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12	979.495.500	0	0	2	57.817.000	0	41.550.800	0	1.992.262	1	2.397.600	1	799.200	2	46.739.862	2	46.739.862	16,67	4,77	Sekretariat DPRD
2405		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	38	9.861.825.600	0	0	9	1.817.970.000	0	194.338.740	2	310.611.982	2	424.166.479	5	502.145.400	9	1.431.262.601	9	1.431.262.601	23,68	14,51	Sekretariat DPRD
2406		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	1.420.611.400	0	0	4	1.420.611.400	0	317.897.880	0	198.752.995	1	508.852.500	1	314.852.229	2	1.340.355.604	2	1.340.355.604	50	94,35	Sekretariat DPRD
2407		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	16	1.717.918.000	0	0	6	1.054.154.500	0	0	3	394.417.406	1	317.388.740	2	311.233.418	6	1.023.039.564	6	1.023.039.564	37,5	59,55	Sekretariat DPRD
2408		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	32.000	4.864.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
2409		Pembahasan Kebijakan Anggaran			10.197.140.716		0		1.127.855.500		232.211.320		378.244.129		45.888.863		256.058.060		912.402.372		912.402.372			Sekretariat DPRD
2410		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	32	10.197.140.716	0	0	6	1.127.855.500	0	232.211.320	2	378.244.129	3	45.888.863	1	256.058.060	6	912.402.372	6	912.402.372	18,75	8,95	Sekretariat DPRD
2411		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			14.660.848.300		0		2.209.177.300		687.684.040		185.100.273		60.534.176		814.128.218		1.747.446.707		1.747.446.707			Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2029 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2412		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6	1.353.056.200	0	0	1	33.290.700	0	0	1	7.008.744	0	0	0	0	1	7.008.744	1	7.008.744	16,67	0,52	Sekretariat DPRD
2413		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	36	11.253.238.900	0	0	8	1.868.391.900	0	435.477.280	4	178.091.529	0	60.534.176	4	814.128.218	8	1.488.231.203	8	1.488.231.203	22,22	13,22	Sekretariat DPRD
2414		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6	2.054.553.200	0	0	1	307.494.700	0	252.206.760	1	0	0	0	0	0	1	252.206.760	1	252.206.760	16,67	12,28	Sekretariat DPRD
2415		Peningkatan Kapasitas DPRD			12.978.824.000		0		3.270.083.000		954.389.920		763.770.021		487.596.706		858.325.361		3.064.082.008		3.064.082.008			Sekretariat DPRD
2416		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	447.794.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
2417		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	18	7.447.434.550	0	0	6	2.424.978.100	0	566.885.030	1	520.368.900	1	444.133.860	2	725.815.924	4	2.257.203.714	4	2.257.203.714	22,22	30,31	Sekretariat DPRD
2418		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.044	5.083.595.400	0	0	159	845.104.900	0	387.504.890	46	243.401.121	33	43.462.846	3	132.509.437	82	806.878.294	82	806.878.294	7,85	15,87	Sekretariat DPRD
2419		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			14.570.133.300		0		2.387.335.000		687.221.106		4.990.207		681.989.080		720.140.472		2.094.340.865		2.094.340.865			Sekretariat DPRD
2420		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	22	10.502.544.300	0	0	5	2.387.335.000	0	687.221.106	2	4.990.207	1	681.989.080	1	720.140.472	4	2.094.340.865	4	2.094.340.865	18,18	19,94	Sekretariat DPRD
2421		Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	28.000	4.067.589.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
2422		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			866.108.400		0		53.857.900		37.842.401		511.488		0		899.100		39.252.989		39.252.989			Sekretariat DPRD
2423		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	24	866.108.400	0	0	4	53.857.900	0	37.842.401	1	511.488	1	0	1	899.100	3	39.252.989	3	39.252.989	12,5	4,53	Sekretariat DPRD
2424		Pembahasan Kerja Sama Daerah			499.374.500		0		499.374.500		233.297.969		149.928.039		1.086.895		145.000		384.457.903		384.457.903			Sekretariat DPRD
2425		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	499.374.500	0	0	4	499.374.500	0	233.297.969	4	149.928.039	0	1.086.895	0	145.000	4	384.457.903	4	384.457.903	100	76,99	Sekretariat DPRD
2426		Fasilitasi Tugas DPRD			24.832.783.631		0		3.117.758.328		916.832.260		637.729.510		584.650.564		530.792.817		2.670.005.151		2.670.005.151			Sekretariat DPRD
2427		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	193	11.863.840.965	0	0	45	1.543.274.600	0	179.973.523	10	307.698.778	10	452.668.327	14	387.025.269	34	1.327.365.897	34	1.327.365.897	17,62	11,19	Sekretariat DPRD
2428		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	424	7.603.879.566	0	0	73	880.089.828	0	375.142.717	18	152.301.116	21	127.871.574	16	136.175.148	55	791.490.555	55	791.490.555	12,97	10,41	Sekretariat DPRD
2429		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	73	1.415.221.900	0	0	13	81.448.400	0	49.962.220	3	2.963.190	3	3.711.063	4	5.794.200	10	62.430.673	10	62.430.673	13,7	4,41	Sekretariat DPRD
2430		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	18	3.949.841.200	0	0	3	612.945.500	0	311.753.800	0	174.766.426	0	399.600	0	1.798.200	0	488.718.026	0	488.718.026	0	12,37	Sekretariat DPRD
									1.759.814.071.787		282.614.180.111		355.297.369.569		335.676.592.599		659.986.208.826		1.633.574.351.105		1.633.574.351.105			
capaian kinerja (%)																		99,83	92,83					
edikat Kinerja																		ST	ST					

I.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala; 2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; 3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya; 4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing OPD.
II.	Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tidak tercapai sesuai dengan target; 2. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat dan penyelarasan langkah-langkah di Pemerintah Kabupaten membutuhkan waktu; 3. Terdapat paket tidak terselesaikan 100% & tidak jadi dilaksanakan;
III.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian pekerjaan menggunakan mekanisme Tender Dini terutama untuk paket yang perencanaan & konstruksinya di tahun anggaran yang sama; 3. Meningkatkan / mengoptimalkan koordinasi dengan K/L terkait kebijakan-kebijakan baru yang muncul dan menyusun antisipasi/tindaklanjut-nya di Pemerintah Kabupaten.
IV.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian pekerjaan menggunakan mekanisme Tender Dini terutama untuk paket yang perencanaan & konstruksinya di tahun anggaran yang sama; 3. Meningkatkan / mengoptimalkan koordinasi dengan K/L terkait kebijakan-kebijakan baru yang muncul dan menyusun antisipasi/tindaklanjut-nya di Pemerintah Kabupaten.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di tahun 2027. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah memerlukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu, masa kini, dan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah *(value added)* yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB digunakan sebagai salah satu indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi), sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan keadaan perekonomian dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya akan menunjukkan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) pada tahun 2025 mencapai 10.881.091 miliar Rupiah naik 474,28 miliar dari tahun 2023 yang sebesar 10.426.231 miliar rupiah. Untuk melihat lebih jelas perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada gambar berikut.

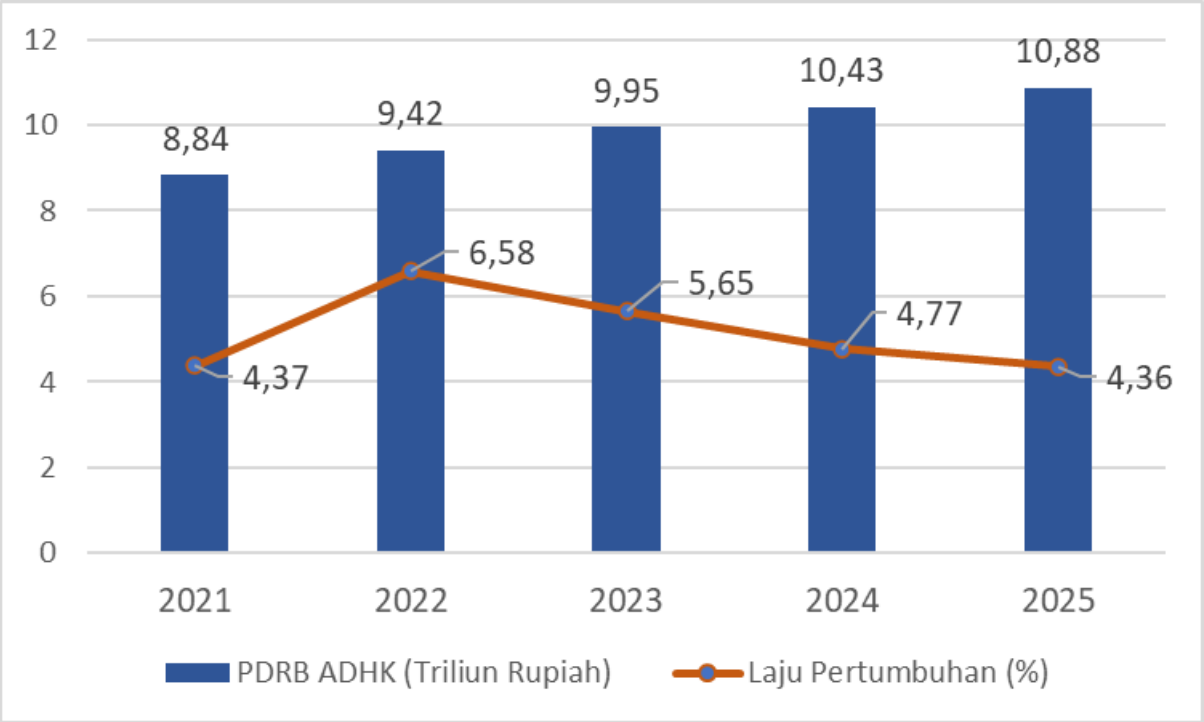

Gambar 2.50

Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2025

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 merupakan capaian yang tertinggi dengan nilai 6,58 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan ini diantaranya dipengaruhi oleh pembangunan bandara baru. Sehingga hal ini berimplikasi pada tingginya pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Sektor Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2021 kinerja perekonomian Kulon Progo yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen, tahun 2023, kinerja perekonomian menurun di angka 5,65 persen. Namun pada tahun 2024 laju pertumbuhan semakin ekonomi menurun menjadi 4,77 persen. Kemudian pada Tahun 2025 perekonomian Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami perlambatan sehingga menurun menjadi 4,36%.

Pemerataan ekonomi juga tidak terlepas dampaknya terhadap kemiskinan serta ketimpangan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 secara umum semakin kecil, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 18,01% dan kembali meningkat menjadi 18,38% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 15,64% di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 15,62% di tahun 2024. Sementara itu tingkat kemiskinan tahun 2025 menurun menjadi 14,53%.

Menurut analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, fluktuasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perubahan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo antara lain: pandemi global Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk. Masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (hampir miskin) jika pendapatannya tetap atau hanya meningkat sedikit sehingga akhirnya menjadi miskin. Secara umum kemiskinan tinggi berada dikawasan terisolir yaitu dikawasan

lereng pegunungan dan pantai yang mempunyai sumberdaya rendah. Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan DIY yang pada tahun 2025 berada pada 10,08% dan persentase nasional pada 8,25%.

Fluktuasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo juga banyak dipengaruhi oleh inflasi yang mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan secara signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp438.870,00 naik dari tahun 2023 yang sebesar Rp416.870,00. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan per kapita per bulan. Garis kemiskinan untuk tahun 2025 sebesar Rp452.717,00 naik 13.847 dibandingkan dengan tahun 2024.

Gini Rasio merupakan salah satu metode untuk menunjukan adanya ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan/ pemerataan ekonomi. Angka Gini Rasio Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 sebesar 0,367, pada tahun 2022 adalah 0,380 dan meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2023. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan DIY yang pada tahun 2023 mencapai 0,449. Tahun 2023 pemerataan pendapatan di Kulon Progo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 terlihat dari meningkatnya indeks gini. Sedangkan pada tahun 2024 nilai Gini Rasio membaik menjadi 0.373. Dengan kondisi masyarakat yang semakin sejahteranya/ terangkatnya maka akan mengurangi perbedaan/gap pendapatan antar penduduk sehingga diharapkan pengentasan kemiskinan juga akan turut menurunkan gini rasio di daerah.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah sebesar 76,97, angka ini meningkat 0,79 dari tahun 2024 dengan angka 76,18. Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo berada di bawah DIY yang pada tahun 2025 mencapai angka 82,48. Meskipun demikian Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada nilai 75,90.

Dimensi pembentuk IPM yakni dimensi pengetahuan, dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi standar hidup layak. Menurut analisis BPS, indikator usia harapan hidup pada dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Kulon Progo merupakan yang tertinggi di DIY, sedangkan pada dimensi pengetahuan capaian Kabupaten Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota di DIY.

Disamping itu perlu juga dilakukan penguatan nilai budaya untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan peraturan daerah tentang Pendidikan Karakter dengan mengembangkan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa berdasar nilai keagamaan, kebangsaan, kemataraman dan kepramukaan. Pembangunan SDM masyarakat yang berbudaya ini diperlukan juga untuk menyiasati adanya dampak global beroperasinya BIY agar SDM di Kabupaten Kulon Progo tetap memegang teguh budaya lokal yang ada bahkan menjadikan budaya lokal sebagai daya tarik bagi siapa saja yang berkunjung di Kabupaten Kulon Progo. Dengan peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya maka akan memperkuat modal kerja dan kesempatan warga masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Di sisi lain aparatur pemerintah di Kabupaten Kulon Progo perlu ditingkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya aparatur perlu ditambah dari sisi kuantitas untuk mencapai jumlah ideal, sedangkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perlu dilakukan untuk menjamin kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pelayanan publik.

3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Setiap aktivitas masyarakat sedapat mungkin dilakukan menggunakan teknologi agar mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan pelayanan. Tata kelola pelayanan publik sebagai salah satu entitas output kegiatan pemerintahan sudah selayaknya menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi agar jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berbasis teknologi informasi diharapkan akan muncul kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas. Penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi ini harus menjadi fokus yang utama, mengingat keberadaan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo tentu akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, dan efisien. Tata kelola pelayanan publik dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah

4. Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kulon Progo menjadi perhatian serius sejak dibangunnya BIY dan juga persiapan pembangunan jalan tol. Pembangunan BIY dan kawasan aerotropolis ditingkatkan dari sisi pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD Wates berstandar internasional. Kesinambungan antar moda transportasi umum di BIY juga menjadi perhatian serius dengan diaktifkan ulang nya stasiun Kedundang di Kapanewon Temon. Kesinambungan antar moda transportasi ini akan menunjang semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi atau Transit Oriented Development (TOD) di sekitar kawasan stasiun Wates dan Stasiun Kedundang.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada 5 (lima). Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pada pengelolaan irigasi,baik untuk keperluan pertanian pangan dan penyediaan air bersih, salah satu unsur penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu adalah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi agar fungsi irigasi dapat berlangsung dengan baik. Seperti telah diketahui bahwa optimalisasi ketahanan pangan berkaitan erat dengan kualitas irigasi yang mencukupi dan berfungsi baik. Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan tersebut, diperlukan penunjang infrastruktur irigasi yang mencukupi. Permasalahan dalam hal infrastruktur irigasi mulai dari data yang kurang update dan kurang tertata dengan baik, hingga ketersediaan SDM dan pembiayaan untuk pengelolaan irigasi yang masih terbatas. Di samping itu penyediaan air bersih untuk keperluan kebutuhan rumah tangga diperlukan kualitas perpipaan dan kualitas lingkungan hidup yang baik dan lestari serta berkelanjutan.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), udara (Indeks Kualitas Udara-IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substantif merupakan indikator status atau mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan

dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indikator kulitas air dihitung berdasarkan parameter Derajat keasaman (pH), Oksigen terlarut (DO), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), Kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Padatan tersuspensi total (TSS), Nitrat (NO3-N), Total fosfat (T-Phosphat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter SO2 dan NO2. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan.

Nilai IKLH tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dengan komponen IKA meningkat dari 44,24 menjadi 75,46, IKU menurun dari 91,62 menjadi 81,94, dan IKL sebesar 63,48. Penurunan nilai IKLH ini disebabkan karena turunnya nilai IKA dimana nilai IKA tahun 2024 dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi lebih rendah daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun dimana pada tahun 2023 terjadinya el nino sehingga musim kemarau semakin panjang dan air sungai yang diambil sampelnya belum menyerap limbah yang ada di dalam tanah karena curah hujan belum banyak.

5. Masih Tingginya Potensi Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum merupakan isu strategis yang muncul akibat perubahan sosial ekonomi yang cukup signifikan di masyarakat, terutama akibat dari keberadaan BIY dan rencana pembangunan jalan tol. Penanganan potensi kerawanan di masyarakat dapat dilakukan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Fokus dari pelaksanaan SPM ini adalah kegiatan pembinaan kegiatan politik daerah yang dilaksanakan 4 kali pada tahun 2022. Jumlah partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang telah dibina mencapai 139 organisasi atau seluruh organisasi yang ada di Kulon Progo telah menerima pembinaan. Dengan dibinanya seluruh organisasi tersebut, maka diharapkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang tentram dan tertib dapat tercipta.

Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum juga dapat terjadi dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Peraturan daerah yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat dengan tujuan meningkatkan ketertiban justru dapat menjadi potensi pelanggaran dan kerawanan. Untuk meminimalisir hal ini, maka dilakukan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam SPM

2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPMJD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2027 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya**
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      1) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
      2) Kualitas pendidik dan tenaga pendidikan masih kurang.
      3) Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf
      4) Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Kulon Progo
      5) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai SPM.
   b. Meningkatnya prestasi generasi muda, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      1) Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga
      2) Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan
      3) Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo
   c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      1) Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
      2) Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi;
      3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
      4) Budaya makan ikan oleh masyarakat masih rendah
   d. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      1) Belum optimalnya pengembangan/ pelestarian seni dan budaya serta pengembangan nilai-nilai luhur budaya.
      2) Lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya
      3) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya

2. Prioritas **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik**
   a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di daerah;
   c. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
   d. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;
   e. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika kurang memadai;
   f. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing masing Perangkat Daerah belum merata;
   g. Peran lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal dalam pembangunan

h. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi meliputi:
   1) Masih rendahnya kondisi sarana prasarana kebencanaan dalam rangka pemenuhan SPM
   2) Dampak reformasi birokrasi belum signifikan dalam mengungkit kinerja daerah
   3) Belum optimalnya upaya pengelolaan keuangan daerah
i. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, permasalahan yang dihadapi yaitu keberadaan PKL masih menempati lokasi fasilitas umum seperti trotoar, dan kawasan pedestrian alun-alun wates, sehingga dapat mengganggu ketertiban aktivitas umum.

3. Prioritas **Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.**
   A. **Pemberdayaan Ekonomi.** Prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan ekonomi dan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri namun demikian masih menghadapi permasalahan sebagai berikut:
      a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, pengetahuan, dan motivasi berwirausaha
      b. Akses dan kemampuan pemasaran UMKM masih terbatas
      c. Belum optimalnya kegiatan ekspor kerajinan
      d. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan belum optimal
      e. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pada kegiatan industri ekspor
      f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan lembaga keuangan
      g. Kurangnya daya tarik objek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan
      h. Pemasaran pariwisata yang belum optimal
      i. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata
      j. Masih kurangnya usaha jasa pariwisata yang bersertifikat
      k. Kemampuan pengelolaan BUMDes masih di bawah standar
      l. Belum optimalnya daya saing produk industri
      m. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani
      n. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
      o. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani
   B. **Penanggulangan Kemiskinan.** Untuk melanjutkan penurunan kemiskinan ekstrem, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan hal tersebut, namun di dalamnya terdapat permasalahan sebagai berikut:
      a. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri
      b. Diperlukan pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin,
      c. Masih terbatasnya penerima beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin,
      d. Masih terdapat cukup banyak Rumah Tidak Layak Huni.

4. Prioritas **Pengembangan Kawasan Aerotropolis**
   a. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      1) Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas.

2) Sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat belum optimal
3) Belum optimalnya infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta
4) Masih terbatasnya akses sarana air bersih, pengolahan limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga.
5) Infrastruktur saluran irigasi masih belum optimal
6) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti APILL, rambu, marka, *guardrail,* dan LPJU masih belum optimal
7) Belum optimalnya fasilitas prasaran, sarana, dan utilitas
8) Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal

b. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi meliputi:
1) Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW
2) Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW
3) Masih berprosesnya penyusunan RDTR Kulon Progo Tengah dan RDTR Kulon Progo Selatan

5. Prioritas **Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan**, memiliki permasalahan sebagai berikut:
a. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
1) Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas.
2) Sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat belum optimal
3) Belum optimalnya infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta
4) Masih terbatasnya akses sarana air bersih, pengolahan limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga.
5) Infrastruktur saluran irigasi masih belum optimal
6) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti APILL, rambu, marka, guardrail, dan LPJU masih belum optimal
7) Belum optimalnya fasilitas prasaran, sarana, dan utilitas
8) Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal

b. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi meliputi:
1) Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW
2) Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW
3) Masih berprosesnya penyusunan RDTR Kulon Progo Tengah dan RDTR Kulon Progo Selatan

c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup, memiliki permasalahan sebagai berikut:
1) Menurunnya kualitas dan kuantitas air
2) Menurunnya kualitas udara
3) Pengelolaan sampah belum optimal

2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat

memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang dihadapai saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

1. Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan antara lain:

a. Pemenuhan layanan pendidikan dasar terkait peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan belum optimal termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitasi pendidikan serta peningkatan literasi dan numerasi.

b. Kapasitas, kemampuan dan ketrampilan guru masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi kompetensi pendidik juga belum memberikan daya dukung secara langsung pada IPM.

   Sampai dengan tahun 2025, persentase guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 57,23%. Sedangkan guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV mencapai 73,41%. Berdasarkan capaian tersebut maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas pendidik. Kendala yang dihadapi selama ini dari sisi motivasi tenaga pendidik yang memasuki/menjelang purna tugas, pada kondisi itu untuk meningkatkan kapasitasnya sangatlah sulit. Di sisi yang lain, selaras dengan kebijakan nasional, bahwa sertifikasi profesi dilakukan bertahap, tidak secara bersama atau dengan kuota tertentu, sehingga ada jeda juga ada jarak waktu yang membuat seluruh pendidik mengantri melakukan sertifikasi profesinya.

c. Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK atau digitalisasi pembelajaran yang masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat

d. Lunturnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang diakibatkan perkembangan global, kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, serta perubahan nilai budaya dan tradisi

2. Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih dihadapi hingga tahun 2025 dapat diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni:

a. angka kematian ibu,
b. angka kematian bayi, dan
c. angka harapan hidup.

Dari tiga indikator tersebut, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan angka tertinggi ketiga di DIY di bawah Kabupaten Sleman, akan tetapi masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kendala yang dihadapi adalah:

- Masih adanya keterlambatan pihak keluarga dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan
- Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di rumah sakit
- Masih kurangnya kepedulian ibu dan pihak keluarga tentang bahaya ibu hamil risiko tinggi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi.

Di samping hal di atas ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor kesehatan yakni:

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan baik di sektor primer, sekunder maupun tersier sehingga pelayanan kesehatan tidak optimal
- Masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan dalam menangani berbagai penyakit baik menular maupun tidak menular
- Perlunya peningkatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal, lintas sektor maupun lintas wilayah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi:

a. Meningkatkan edukasi pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi.
b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam upaya meningkatan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
c. Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “BumilKu” dan “Matahatiku” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
d. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
e. Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas
f. Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
g. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Jampersal meliputi pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.
h. Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.
i. Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam mendukung penanganan ibu hamil terutama bumil yang berisiko tinggi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang setara. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapat akses penuh terhadap fasilitas kesehatan yang optimal, informasi medis yang dapat diakses, dan mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi. Namun demikian, dari 5.571 jiwa penyandang disabilitas, masih terdapat 65,6% yang belum tersentuh layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah melalui inovasi Posbindu Sentosa, yaitu dengan memberikan layanan kesehatan secara holistik dan paripurna terhadap penyandang disabilitas. Layanan ini termasuk mendekatkan akses dengan metode antar-jemput dan mengunjungi ke rumah penderita disabilitas.

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kulon Progo secara topografis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kawasan yaitu perbukitan, dataran, dan pesisir. Kondisi topografi tersebut berpengaruh pada perbedaan aksesibilitas wilayah. Secara umum, perkembangan dan aksesibilitas wilayah masih didominasi pada wilayah daratan (Wates, Pengasih, Sentolo, dan Lendah) dan pesisir (Temon, Panjatan, dan Galur). Daerah perbukitan yang kurang berkembang, selain disebabkan oleh faktor alam yang

menyebabkan tingginya nilai infrastruktur juga disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai subyek pembangunan di daerah tersebut yang terbatas. Kawasan perbukitan yaitu di Kapanewon Samigaluh (Kalurahan Banjarsari, Purwoharjo dan Kebonharjo), dan Kapanewon Kokap (Kalurahan Kalirejo, Hargowilis, dan Hargotirto) merupakan kantong-kantong kemiskinan yang harus dibedah dengan infrastruktur yang bisa meningkatkan aksesibilitas untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian wilayah. Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi.

Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2020, terjadi penurunan kualitas jalan yang cukup signifikan dikarenakan adanya refokusing kegiatan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap secara keseluruhan menjadi 69,14%. Penurunan ini terjadi khususnya pada jalan Lokal Primer I yang mengalami penurunan lebih besar daripada jalan Lokal Primer II. Tahun 2021 seiring dengan peningkatan alokasi untuk pemeliharaan jalan, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I dan Lokal Primer II naik menjadi 72,01%. Pada tahun 2022 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I dan Lokal Primer II naik lagi menjadi 72,7%. Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 28,32 km dengan kondisi baik 16,38 km (57,84%) dan kondisi sedang 11,54 km (40,75%). Jalan Provinsi sepanjang 175,140 km kondisi baik 81,89 km (46,76%), kondisi sedang 37,27 km (21,28%).

Pada tahun 2023, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,22% menjadi 71,82 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal primer II terjadi kenaikan kondisi mantab dari 74,09 % menjadi 74,88%.

Selain penyediaan jalan, diperlukan sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Selanjutnya dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang berlokasi di Kulon Progo, diperlukan sarana transportasi yang dapat mempercepat perjalanan manusia dan barang dari wilayah penumpang atau barang yang akan melalui BIY, maupun sebaliknya dari BIY ke wilayah di sekitar Yogyakarta. Selain dengan dibangun dan dioperasikannya Kereta Bandara, upaya meningkatkan aksesibilitas BIY juga direncanakan dengan membangun jalur Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Meskipun banyak manfaat yang akan diperoleh dengan rencana pembangunan tol tersebut, ada beberapa konsekuensi yang perlu diantisipasi. Pembangunan tol akan berpengaruh terhadap infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, terutama infrastruktur jalan dan sumber daya air. Beberapa kemungkinan yang akan muncul sebagai dampak dari

pembangunan jalan tol yaitu: tertutupnya akses masyarakat pada titik persinggungan antara Jalan Provinsi / Jalan Kabupaten/ Jalan Lingkungan dengan trase tol, terhambatnya saluran irigasi dan drainase pada titik persinggungannya dengan trase tol, peningkatan kerusakan jalan yang meliputi jalan di sekitar lokasi proyek maupun jalan yang dilalui oleh armada pengangkut bahan material, serta dampak sosial di masyarakat. Sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait mengenai rencana pengendalian dan penanganan dampak pembangunan Jalan Tol.

Selain itu, aspek infrastruktur lainnya yang masih terdapat permasalahan adalah penyediaan prasarana sarana utilitas (akses penyediaan sarana air bersih, pengolahan limbah domestik, pengelolaan sampah rumah tangga) yang masih terbatas jumlahnya. Pada Tahun 2025 cakupan layanan akses air bersih di Kabupaten Kulon Progo mencapai 98,38%. Sebagian besar masyarakat Kulon Progo masih mengakses air bersih melalui jaringan non perpipaan yaitu sebesar 50,43% sedangkan untuk akses air bersih melalui jaringan perpipaan sebesar 45,25%. Masyarakat di wilayah selatan sebagian besar mendapatkan akses air bersih perpipaan dari PDAM dan sebagian kecilnya dari Pamsimas. Sedangkan untuk di wilayah utara sebagian besar dilayani oleh Pamsimas/SPAM Perdesaan yang dikelola oleh KPSPAMS/Kelompok masyarakat, yang juga tergabung dalam Pamaskarta. Salah satu kendala jaringan perpipaan PDAM belum dapat menjangkau permukiman yang berada di wilayah utara karena topografi kawasan yang ekstrim menyebabkan biaya teknis dan operasional untuk pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumahnya menjadi besar, sehingga perlu dukungan dari segi pendanaan diluar APBD Kabupaten, baik APBD Provinsi, Danais, APBN, hibah, maupun pendanaan lainnya.

Untuk peningkatan layanan air minum di Kabupaten Kulon Progo telah beroperasi SPAM Kamijoro yang mengambil air baku dari Sungai Progo akan melayani kebutuhan air minum untuk wilayah Bantul dan Kulon Progo. Penggunaan air minum di Kulon Progo yang berasal dari Bendung Kamijoro yaitu untuk melayani YIA dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2023 sebesar 61,17% dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan 8,23%, rusak sedang 12% dan rusak berat 22,91%. Bila dibandingkan dengan kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan provinsi dan pusat, saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawahnya, terutama keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, saluran Irigasi yang masih berupa saluran tanah, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan, peningkatan menjadi saluran permanen dan pengembangannya, mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian dan swasembada pangan di Kulon Progo. Sektor pertanian yang merupakan soko guru perekonomian masyarakat secara luas harus diprioritasikan dengan membangun sinergi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan di sektor irigasi yaitu masih minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani pemakai air tentang fisik bangunan jaringan irigasi, adanya kompetisi pemanfaatan air antar sektor, penurunan ketahanan fisik dari prasarana pengendali banjir serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan irigasi. Dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, komisi irigasi terkait, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Adapun tugas dari Komisi Irigasi antara lain merumuskan rencana kebijakan, rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi, memberikan pertimbangan mengenai

izin alih fungsi lahan beririgasi, ikut merumuskan rencana tata tanam, merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, memberi masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi, memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan Provinsi, sedangkan jalan desa yang menjadi kewenangan Kalurahan dapat menjadi sasaran program Prasarana Sarana Utilitas.

Pada Sub Urusan Penataan Ruang, diketahui bahwa penataan ruang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan tata ruang yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Berdasarkan pada keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah belum optimalnya aspek perencanaan tata ruang sehingga menyebabkan aspek – aspek yang lain juga belum bisa berjalan dengan optimal. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2032 sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012. Namun, dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo belum semuanya terwadahi dalam Perda tersebut dan saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang dalam proses revisi RTRW. Beberapa permasalahan yang menyebabkan aspek perencanaan tata ruang belum berjalan dengan optimal adalah

a. Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW

   Dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo dalam 5 (lima) tahun belakangan ini cukup signifikan merubah arah pembangunan Kulon Progo antara lain keberadaan BIY, Kawasan Penyangga KSPN Borobudur, rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo, pengembangan kawasan Aerotropolis, pembangunan SPAM Regional Kamijoro, rencana pembangunan Bendung Bener sebagai salah satu alternatif sumber air baku untuk Kabupaten Kulon Progo, rencana pembangunan TPST dan SPALDT Kawasan Aerotropolis, pembangunan jalur Temon – Borobudur (Jalur Bedah Menoreh), pembangunan jalur kereta api pendukung BIY serta pengembangan kawasan strategis budaya sosial Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;

b. Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW

Proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) RTRW telah dimulai sejak Tahun 2016 dan dalam perjalannya telah melewati dua kali pergantian regulasi yang terkait PK (penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021) dan dua kali pergantian regulasi terkait substansi dalam rangka penetapan RTRW (penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN No.16 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021) sehingga Kabupaten Kulon Progo harus menyesuaikan kembali dokumen PK dan substansi RTRW. Hingga 2025 awal, capaian penyelesaian untuk proses penetapan revisi RTRW sedang dalam proses updating kelengkapan dokumen untuk keterangan kesesuaian substansi dan finalisasi substanasi RTRW sebagai syarat untuk dapat masuk ke tahapan pembahasan lintas sektor di Kementerian ATR/BPN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi revisi RTRW; agar dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

c. Masih berprosesnya penyusunan beberapa RDTR

Sebagai langkah pendetailan terhadap rencana umum tata ruang kabupaten atau RTRW, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR ini nantinya merupakan dokumen tata ruang yang operasional terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) pada perijinan sehingga informasi terkait ruang untuk berinvestasi bisa langsung diperoleh melalui dokumen RDTR ini dan menjadi landasan bagi dikeluarkannya ijin berinvestasi di daerah. Dalam revisi RTRW Kulon Progo, terdapat 6 (enam) RDTR. Sampai dengan tahun 2025, sudah ada 2 (dua) RDTR yang telah ditetapkan dan terintegrasi dengan sistem OSS, yaitu RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta melalui Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2023 dan RDTR Perkotaan Wates melalui Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2024. Empat RDTR lainnya masih dalam proses. Untuk RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur sedang proses penerbitan persetujuan Kementerian ATR, dan RDTR Kulon Progo Tengah. Untuk 2 (dua) RDTR lainnya yaitu RDTR KP Utara dan RDTR KP Selatan sedang dalam proses perbaikan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR No. 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR No. 14 Tahun 2021.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Belum optimalnya fasilitas PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas) di perumahan dan kawasan permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

(1) Terjadinya genangan air maupun banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, kondisi bangunan yang tidak memadai dan tidak terpelihara dengan baik;

(2) Kemacetan lalu lintas disebabkan penanganan jaringan jalan yang tidak terpadu dengan kawasan sekitarnya;

(3) Masih terbatasnya prasarana dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air bersih yang belum memadai dan merata, penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum ditangani secara terpadu, fasiltas PJU yang masih terbatas serta perlunya perbaikan kualitas jalan lingkungan dalam rangka memperlancar mobilitas penduduk.

Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya dapat melangsungkan kegiatannya dengan nyaman. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, baseline jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.349 unit tersebar di 12 kapanewon (tabel 2.8) pada tahun 2024. Dengan intervensi dari berbagai pihak, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan tiap tahunnya.

b. Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal

Keberadaan kawasan permukiman kumuh terutama di wilayah perkotaan masih belum tertangani secara optimal. Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 terdapat 293, 79 Ha kawasan kumuh yang tersebar di kecamatan Wates, Sentolo, Galur, Pengasih, dan Nanggulan yang perlu ditangani dan telah dilakukan penanganan. Pada Tahun 2020 terbit SK Bupati Nomor 416/A/2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan bahwa luas kawasan Kumuh di Kabupaten Kulon Progo adalah 151,78 Ha. Pada Tahun 2022 tidak terdapat pengurangan luasan kumuh sehingga sisa luasan kumuh adalah 77,51 Ha. Pada tahun 2023, dilakukan intervensi di 2 kalurahan yaitu Kalurahan Giripeni seluas 3,38 Ha dan di Kalurahan Wijimulyo seluas 1,5 Ha sehingga di tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang tersisa adalah 72,63 Ha. Pada Tahun 2024, lokasi pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 (berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor416/A/2020) Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2024 di Kalurahan Giripeni sebanyak 3,59 Ha dan Kalurahan Brosot 0,72 Ha dengan total sebanyak 4,31 Ha. Untuk Sisa Luasan Kumuh tahun 2024 dengan total sebanyak 68,32 Ha dengan rincian Kelurahan Wates sebanyak 18,44 Ha, Kalurahan Bendungan sebanyak 12,8 Ha, Kalurahan Tawangsari sebanyak 18,74 Ha, Kalurahan Sendangsari sebanyak 9,21 Ha dan Kalurahan Wijimulyo sebanyak 9,75 Ha

5. Perhubungan

Beberapa permasalahan yang terjadi pada urusan perhubungan yaitu:

1) Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi. Kecelakaan didominasi oleh kalangan produktif dan terpelajar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang cara dan disiplin berlalu lintas.
2) Pembangunan di wilayah Kulon Progo saat ini semakin pesat, namun banyak pelaku usaha belum melengkapi usahanya dengan dokumen analisis dampak lalu lintas.
3) Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Pemenuhan perlengkapan jalan berupa APILL, rambu lalu lintas, marka jalan, cermin tikungan, delineator, pagar pengaman jalan (guardrail) dan LPJU belum sesuai dengan yang seharusnya ada.
4) Keterbatasan infrastruktur informatika dalam mendukung sektor transportasi. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang memiliki kemampuan lebih baik dan memiliki manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat umumnya dan terutama dalam mendukung kelancaran pergerakan internal dan eksternal penduduk/masyarakat baik barang, jasa, maupun data. Untuk menyelesaikan hal tersebut perlu dicari solusi untuk menyelesaikan hal tersebut dalam

jangka panjang. Solusi bukan hanya menambah kapasitas jalan akan tetapi harus di dorong untuk mengimplementasikan *Intelligent Transportation System* (ITS) yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ATCS (*Area Traffic Control System*) dengan memanfaatkan teknologi *Traffic Light* terkini yang didukung dengan teknologi komunikasi dan informatika

5) Pemenuhan penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Fasilitas utama berupa Fasilitas tempat parkir kendaraan di Terminal Ngeplang, Sentolo kurang optimal, sehingga dipandang perlu untuk diperbaiki.
6) Melihat dari latar belakang tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Kulon Progo yg didominasi oleh kalangan remaja dan pelajar. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo. Diperlukan solusi yaitu penyediaan transportasi angkutan bagi pelajar di kalangan Kabupaten Kulon Progo yaitu keberadaan Bus Sekolah untuk menekan penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Selain penyediaan bus sekolah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mengajukan usulan angkutan rintisan dan angkutan KSPN yang diajukan kepada Direktorat Angkutan Jalan Kementrian Perhubungan. Adapun rintisan yang diusulkan saat ini ada 2 rute trayek angkutan rintisan dan 2 rute trayek KSPN. Untuk tahun 2027 juga mengusulkan melalui Danais untuk pemberdayaan operator angkutan wilayah Kalibawang dengan menggandeng koperasi angkutan PANDAWA yang terbentuk utk memberdayakan operator angkutan dengan skema pemberian subsidi angkutan kepada operator untuk melayani anak sekolah mulai dari rute terminal Ngeplang – Sentolo – Nanggulan – Kalibawang – Samigaluh, nantinya akan melewati 17 sekolah.
7) Setelah Pandemi Covid kepadatan transportasi mulai meningkat, seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang memadati jalan raya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sendiri tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan raya sehingga terjadilah kemacetan lalu lintas. Kemacetan terutama terjadi berada di kawasan perkotaan Wates yang menjadi pusat perekonomian. Dimana area ruas jalan Wates terdapat kawasan pertokoan, tempat kuliner yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mendatangi ruas jalan Wates tersebut. Di depan kawasan pertokoan maupun kuliner digunakan untuk area parkir kendaraan bermotor yang berdekatan dengan tepi jalan raya sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kurangnya lahan parkir menjadikan perlunya solusi untuk menentukan lokasi kantong parkir di kawasan perkotaan wates. Sempitnya ruas jalan perkotaan wates menjadikan parkir tepi jalan umum menjadi tidak ideal lagi. Semestinya untuk area parkir dibuatkan kantong-kantong parkir.
8) Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat termasuk dikalangan terpelajar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang cara dan disiplin berlalu lintas sehingga dibutuhkan contoh atau figur sebagai agen disiplin berlalu lintas dikalangan pelajar
9) Status jalan kabupaten di Kulon Progo adalah kelas III dimana konstruksinya hanya dapat menopang beban kendaraan dengan tonase tidak lebih dari 6 ton. Masih banyak kegiatan angkutan barang/ material yang melintas di jalan kabupaten dengan tonase melebihi yang sudah ditentukan sesuai kelas jalannya, dimana selain melanggar aturan juga memicu tingginya laju kerusakan jalan. Diperlukan peningkatan pengawasan dan penindakan (yustisi) terhadap kendaraan angkutan barang/ material yang melebihi tonase yang diperbolehkan.

10) Semakin banyaknya angkutan tambang yang beroperasi di beberapa kapanewon di Kabupaten Kulon Progo (8 kapanewon), serta adanya proyek rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kabupaten Kulon Progo, dan juga rencana mulainya pengoperasian Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini tentunya menambah resiko keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya yang dapat berujung pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi
11) Masih banyaknya kendaraan angkutan barang/ umum yang menghindar dari pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan dan penindakan (yustisi) di lapangan. Banyak kendaraan angkutan barang/umum menghindar dari kegiatan operasi yustisi dengan cara mencari jalan lain yang tidak terawasi, selain itu juga banyak kendaraan angkutan barang/umum yang berhenti pada 500m - 1km sebelum lokasi operasi yustisi dan menunggu hingga operasi yustisi selesai beroperasi. Kondisi ini tentunya menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan angkutan barang/ umum menjadi tidak efektif karena masih banyak kendaraan angkutan barang/ umum
12) Alat uji emisi gas buang mesin bensin / gas analyzer sudah dari tahun 2012 sehingga kinerjanya sudah tidak optimal lagi dikarenakan serta beberapa komponen sudah mulai melemah memerlukan perbaikan sedangkan permintaan untuk uji emisi ke depannya merupakan hal yang penting untuk syarat operasional bandara, syarat pajak, dan seterusnya serta sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan program langit biru.
13) Dalam rangka mengoptimalkan pemeliharaan rutin Alat Penerangan Jalan (APJ) diperlukan pengadaan unit mobil skylift baru. Hal ini didasari oleh kondisi satu-satunya unit yang tersedia saat ini merupakan pengadaan tahun 2006 (berusia 20 tahun) yang telah melampaui batas usia teknis ideal (10–15 tahun). Penurunan performa armada tersebut menjadi kendala signifikan, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berbukit dan menuntut mobilitas tinggi serta keamanan kerja yang optimal.
14) Dalam pelaksanaan pemeliharaan APILL dan RPPJ yang tinggi memerlukan sarana yang memadai berupa Sky Walker kecil untuk penanganan APIL dan RPPJ yang berada di atas badan jalan yang tidak bisa hanya sekedar menggunakan Tangga.
15) Antisipasi trase tol

6. Lingkungan hidup

a. Kualitas dan kuantitas air masih fluktuatif

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan kualitas air sungai selama 2 (dua) periode merepresentasikan kondisi pada musim penghujan dan musim kemarau. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 66 (enam puluh enam) titik pantau.

Target IKA-INA Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebesar 71,90, dengan nilai IKA-INA realisasi sebesar 75,46 di atas target yang ditetapkan. Nilai IKA-INA tahun 2025 sebesar 75,46 termasuk ke dalam kategori Sedang. Nilai IKA pada tahun 2024 merupakan nilai IKA-IP sebesar 44,24. Nilai IKA pada tahun 2025 merupakan nilai IKA-INA yang didapatkan hasil nilai IKA

sebesar 75,46, dan apabila dikonversi ke nilai IKA-IP menjadi sebesar 50,30. Apabila dibandingkan, nilai IKA-IP antara tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan dari 44,24 menjadi 50,30.

Tren kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 ke 2025 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas air sungai mengalami peningkatan. Namun, perlu diketahui bahwa tren tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi arus sungai dan faktor meteorologis pada saat dilakukan pemantauan, seperti debit aliran sungai, suhu, cuaca, kelembaban udara, dan lamanya penyinaran matahari. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan dan mempengaruhi kualitas air sungai.

Parameter yang dilakukan pengujian dalam perhitungan nilai IKA, meliputi: a) pH; b) Dissolved Oxygen (DO); c) Total Suspended Solid (TSS); d) Total Phosphate (TP); e) Nitrat; f) Chemical Oxygen Demand (COD); g) Biological Oxygen Demand (BOD); dan h) Fecal Coliform. Parameter yang dominan pada beberapa titik pantau melebihi baku mutu lingkungan terhadap hasil pemantauan tahun 2025, di antaranya meliputi Total Phosphate (TP) dan Fecal Coliform.

Sumber pencemar air sungai Total Phosphate bisa berasal dari sumber alami dan buatan manusia. Sumber alami Total Phosphate dapat berasal dari pelapukan batuan fosfat geologis, endapan atmosfer, dan pembusukan tanaman. Sumber buatan manusia Total Phosphate dapat berasal dari pupuk, kotoran hewan peliharaan, limpasan pertanian dan perkotaan, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, serta sistem septik yang rusak atau kelebihan muatan. Sedangkan, sumber pencemar air sungai Fecal Coliform dapat berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Limbah domestik dapat berasal dari: a) Limbah cair dari buangan manusia, seperti tinja dan urin; b) Limbah cair dari kegiatan rumah tangga, seperti mencuci, mandi, dan memasak; dan c) Limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa diolah. Limbah pertanian berasal dari sisa-sisa pupuk organik dari hasil pertanian yang masuk ke sungai irigasi. Kotoran hewan dapat berasal dari: a) Kotoran hewan yang mencemari air minum yang tidak didesinfeksi dengan baik; dan b) Kotoran hewan yang masuk ke sungai melalui pembuangan limbah langsung.

b. Pengelolaan sampah belum optimal

Berdasarkan hasil evaluasi Jakstrada tentang kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 jumlah timbulan sampah sebesar 80,286.09 ton/tahun. Dari jumlah tersebut jumlah sampah yang terkelola sebesar 43.907,91 ton/tahun atau 54.69% yang terdiri dari kegiatan Pengurangan sampah sebesar 17.918,34 ton/tahun atau 22,32% dan Penanganan Sampah sebesar 25.989,57 ton/tahun atau 32,37%. Data tersebut sesuai dengan Neraca Pengelolaan Sampah tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo yang telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan data Neraca Pengelolaan Sampah tersebut sampah terkelola di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun 2024. Pada saat ini target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025

- 2029 adalah sampah terkelola 51,21%, berbeda dengan tahun 2024 dimana target masih mengacu pada pengurangan dan penanganan sampah yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah. Melihat target nasional yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan capaian sebesar 54,69% telah melampaui target nasional pada tahun 2025. Hal ini tidak luput dari upaya Pengelolaan Sampah di hulu melalui kegiatan Pengurangan Sampah, sehingga sampah bisa dikelola dan selesai pada tingkat rumah tangga dan tentunya akan mengurangi beban TPA dikarenakan sampah yang masuk TPA semakin berkurang. Upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah yaitu: (1) Penguatan KSM yang sudah berjalan di tingkat Kalurahan; (2) Pembentukan atau penguatan Bank Sampah ditingkat Kalurahan dan padukuhan; (3) Penguatan kelembagaan atau manajemen sarana prasarana berupa sosialisasi, pendampingan, bimtek, dan penguatan sarpras di tingkat kalurahan; (4) Penguatan peran Pemerintah Kalurahan dari APBKAL; dan (5) Mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan, dan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada. (6) Terlaksananya Gerakan Kulon Progo “BerKELAS” Bersama Kelola Sampah, suatu gerakan bersama yang melibatkan semua stakeholder terkait dalam rangka mengelola sampah yg terintegrasi, terkonvergensi dari hulu sampai ke hilir.

7. Pertanahan

a. Belum optimalnya data base tentang pemanfaatan lahan/ tanah.
   Ketersediaan database pertanahan terkait objek dan subjek tanah, kelas, status dan titik koordinat lahan/tanah belum seluruhnya terinventarisir dan terkelola secara menyeluruh dan terpadu sehingga tak jarang memicu terjadinya sengketa tanah.
b. Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan (proses penerbitan sertifikat) tanah warga.
   Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pensertifikatan tanah warga masih belum optimal. Selama ini berbagai program sertifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BPN (program Prona).

8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Pada tahun 2025 Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah ber KTP sebanyak 349.726 jiwa kemudian Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah sebanyak 351.388, sehingga rasio penduduk ber-KTP per satuan wajib KTP baru mencapai 99,52%, atau sejumlah 349.726 jiwa. Faktor penghambat tidak tercapainya target jumlah penduduk wajib ber KTP disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP, dan belum optimalnya penjangkauan jemput bola perekaman KTP bagi kelompok rentan.
b. Masih perlu peningkatan kapasitas SDM baik di lingkungan Dinas Dukcapil, Kapanewon maupun kalurahan serta pemutakhiran sarana pendukung pada aplikasi SIAK dan memenuhi standar SMKI untuk pelayanan adminduk di Kabupaten Kulon Progo
c. Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Diperlukan tempat arsip dokumen hasil pelayanan Adminduk yang memadai. Kemampuan dalam pengelolaan

dokumen kependudukan dan catatan sipil masih terbatas. Upaya yang dilakukan dengan melakukan digitalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Dukungan daerah terhadap outcome Prioritas dalam peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital melalui program Pencatatan Sipil Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) 30 % dari total perekaman di daerah.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara komprehensif tahun 2025 terdapat sebanyak 84 korban kekerasan. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui penanganan, pendampingan dan penjangkauan dan juga pencegahan perkawinan anak.
b. Sulitnya mendeteksi kasus KDRT dan penelantaran anak kecuali yang terlaporkan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
c. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan. Ditambah dengan masih adanya kejahatan jalanan yang dilakukan anak, dan munculnya kerentanan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) baik sebagai lokasi asal, transit, maupun tujuan.
d. Perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dari pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan dibutuhkan optimalisasi koordinasi lintas daerah terkait perlindungan perempuan dan anak khususnya penanganan KTpA maupun TPPO.
e. Implementasi pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di OPD maupun kalurahan belum optimal. Dari 87 kalurahan baru 14 kalurahan yang diinisiasi sebagai kalurahan sadar gender. Belum semua OPD menyusun anggaran yang dilampiri dengan analisa Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
f. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan seperti Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan belum optimal dari segi kualitas produk, pengemasan, legalitas usaha, maupun promosi pemasaran.

10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adanya persepsi di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya usia 45 tahun keatas merasa sudah tidak produktif lagi sehingga enggan menggunakan alat kontrasepsi modern. Kecenderungannya Pasangan Usia Subur menggunakan kontrasepsi tradisional (KB alamiah) yang menyebabkan prevalensi KB aktif menurun. Pada tahun 2025 prevalensi KB mengalami penurunan dari 68,24 persen menjadi 64,55 persen, sehingga diperlukan penguatan strategi pelayanan, peningkatan kualitas konseling, serta optimalisasi peran mitra kerja dan kader dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program Keluarga Berencana.

11. Sosial

a. Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 masih tergolong tinggi dengan capaian 14,53 %, turun dari tahun 2024 yakni 15,62 %. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu menjalin kolaborasi dengan berbagai sektor dan berbagai pihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan baik dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

b. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang bersumber dari APBD masih terbatas, terutama dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan berbagai sektor, antara lain: Dana Sosial Perusahaan (CSR), Perguruan Tinggi, Baznas, dan lainnya.

c. Layanan untuk kelompok disabilitas masih terbatas, sehingga diperkuat dengan sinergitas antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan melalui pengembangan Posbindu Sentosa yang tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan pendampingan dan bantuan usaha bagi kelompok disabilitas.

12. Tenaga Kerja

a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia diantaranya minimnya ketrampilan/keahlian, penguasaan teknologi dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah dengan melaksanakan program unggulan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja.

b. Rendahnya daya juang tenaga kerja terhadap kesempatan kerja

Daya juang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tenaga kerja yang sudah bekerja namun lebih memilih untuk tidak meneruskan pekerjaannya dengan alasan yang kurang tepat seperti jam kerja yang dianggap terlalu lama, harus mengikuti aturan perusahaan, dan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya juang tenaga kerja adalah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan AMT (*Achievement Motivation Training*) bagi para pencari kerja

c. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen.

Sebagian perusahaan masih kurang tertib dalam melaksanakan norma ketenagakerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan intensifikasi pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka meminimalkan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

d. Masih kurangnya kesesuaian antara kebutuhan (kesempatan kerja) dengan ketersediaan tenaga kerja.

Peluang kerja / kesempatan kerja yang ada dengan kualifikasi tertentu belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Solusi pemecahan masalah ini adalah dengan mendorong kepada lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dirintis sehingga terwujud

link and match antara output lembaga pendidikan dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri/perusahaan.

13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Keterbatasan Keterampilan Produksi, Pemasaran dan Digitalisasi oleh UMKM.

UMKM di Kulon Progo masih menghadapi permasalahan yang cukup signifikan untuk meningkatkan daya saingnya, terutama dalam hal keterampilan produksi, pemasaran dan digitalisasi. Masih banyak UMKM yang menghasilkan produk yang kurang memiliki daya minat yang tinggi. Selain itu, kemampuan pemasaran oleh UMKM juga terbatas sehingga sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ditambah dengan era digital yang ada saat ini, kebanyakan UMKM masih kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital baik untuk meningkatkan penjualan atau pemasaran maupun untuk memperoleh informasi guna peningkatan kualitas produk yang mereka hasilkan serta pengembangan usaha yang dimiliki.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada ini dapat dilakukan berbagai pelatihan terhadap UMKM untuk peningkatan keterampilan agar menghasilkan produk yang banyak diminati masyarakat. Pelatihan dan fasilitasi pemasaran online maupun offline dengan menggandeng perusahaan e-commerce dan menggandeng beberapa perusahaan besar di Kulon Progo untuk dijadikan sebagai mitra. Pengembangan dan peningkatan aplikasi jual beli produk UMKM Kulon Progo “Pay-On Pro” dengan terus dilakukan evaluasi belanja oleh ASN pada setiap bulan dan pengenalan kepada masyarakat luas agar jangkauan pemasaran lebih luas. Pendampingan digital untuk UMKM agar lebih cepat dalam memperoleh informasi. Dengan keberadaan PLUT dan telah beroperasionalnya PLUT, pelatihan dapat dilaksanakan di PLUT dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan. Disamping itu, terdapat konsultan PLUT yang dapat mendampingi UMKM baik dari sisi produksi, pemasaran, SDM, kelembagaan maupun pembiayaan.

b. Belum optimalnya kualitas dan legalitas produk UMKM

Jumlah UMKM Kulon Progo tahun 2025 sebanyak 46.408 UMKM dengan jumlah UMKM yang memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 22.630 UMKM. Artinya terdapat 51,24 % UMKM Kulon Progo yang belum memiliki legalitas usaha. UMKM yang belum memiliki NIB tidak dapat mengakses fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah selain itu UMKM juga akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya secara formal dan meningkatkan kredibilitasnya di mata pembeli. Bukan hanya legalitas, kualitas produk lokal UMKM Kulon Progo sampai dengan saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar pengemasan maupun kesesuaian produk dengan harga. Masih terdapat banyak produk UMKM yang belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan pasar, sehingga sulit untuk bersaing dengan produk lain.

Diperlukan pendampingan yang lebih oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM dalam fasilitasi terhadap kualitas dan legalitas produk UMKM melalui kurasi. Dengan telah beroperasionalnya PLUT maka pendampingan yang lebih terhadap peningkatan kualitas dan legalitas produk UMKM dapat dilakukan pula oleh konsultan yang terdapat di PLUT.

c. Lemahnya manajemen kelembagaan koperasi

Masih lemahnya manajemen kelembagaan koperasi ditandai dengan tidak terdapat perubahan koperasi yang semula pasif menjadi aktif. Selain itu koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2025 atas tutup buku tahun 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2024 atas tutup buku tahun 2023. Dimana koperasi yang RAT pada tahun 2025 sejumlah 131 dan tahun 2024 sejumlah 151 koperasi. Jumlah koperasi sehat juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024 jumlah koperasi sehat sebanyak 15 koperasi dari 120 koperasi yang dinilai, sedangkan pada tahun 2025 jumlah koperasi sehat hanya sebanyak 4 koperasi dari 60 koperasi yang dinilai. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian. Selain itu, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia juga berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian.

Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, peningkatan pengawasan kepada koperasi, dan peningkatan kapasitas SDM koperasi dengan melakukan sosialisasi maupun pendampingan terhadap koperasi.

14. Penanaman Modal

a. Belum adanya kepastian regulasi dan tingginya harga tanah untuk berinvestasi

Pengembangan investasi di Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi kendala berupa tingginya harga tanah pada kawasan strategis, fragmentasi kepemilikan lahan, serta kebutuhan kepastian regulasi tata ruang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya investasi dan menurunkan daya saing daerah dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan penyediaan lahan siap investasi, penguatan kebijakan land banking, penyempurnaan dan kepastian regulasi tata ruang.

b. Belum optimalnya promosi investasi

Media promosi sebagai langkah awal meningkatkan peminatan investor.dirasa masih belum optimal. Promosi yang dilakukan saat ini masih terbatas pada penyediaan booklet dan leaflet serta masih minimnya jumlah promosi melalui media luar ruang. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi melalui berbagai media, tidak hanya terbatas pada media offline namun juga media online seperti media sosial.

c. Kajian IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang masih terbatas

Dengan telah disepakatinya proses RDTR kawasan bandara pada lintas sektor yang pada saat ini dalam proses pengesahan oleh Pemerintah Pusat, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian terhadap potensi dan peluang investasi kawasan aerotropolis untuk menarik calon investor. Pada saat ini kajian investasi yang ready to offer atau IPRO sebagai media informasi investasi yang informatif dan implementatif masih sangat terbatas. Sehingga Pemerintah Daerah DIY tidak dapat membantu mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada, karena syarat untuk dapat dipromosikan merupakan kajian investasi yang sudah IPRO.

Disisi lain, dengan adanya kajian IPRO akan memberikan kemudahan kepada calon investor untuk menentukan pilihan investasi, hal ini disebabkan investor menginginkan kepastian proyek investasi. Solusi yang diberikan adalah pelaksanaan kajian pengembangan investasi baik di Kawasan Aerotropolis maupun kawasan potensial investasi lainnya.

d. Belum solidnya kelembagaan asosiasi pelaku usaha

Belum solidnya kelembagaan asosiasi pelaku usaha mengakibatkan kontribusi dalam membantu percepatan investasi belum optimal. Solusi yang diberikan adalah perlunya forum investasi sebagai media optimalisasi peran asosiasi sebagai wadah dan motor penggerak bagi seluruh anggota profesi serta diharapkan mampu memperkuat kolaborasi asosiasi dan pemerintah. Selain itu perlu dilaksanakan pengawalan percepatan realisasi investasi. Dalam rangka percepatan realisasi investasi telah dibentuk Tim Percepatan Investasi Daerah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 285/A/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 3 Agustus 2020. Tugas Tim Percepatan Investasi Daerah antara lain adalah: merumuskan kebijakan investasi di Kabupaten Kulon Progo, memberikan pertimbangan atau masukan tentang investasi yang masuk ke Kabupaten Kulon Progo kepada Bupati, mengoordinasikan petunjuk dan arahan Bupati serta menginisiasi dan menyusun terobosan percepatan realisasi investasi, melakukan kajian dan analisis permasalahan/ kendala yang dihadapi investor, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan/ kendala untuk percepatan investasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

15. Kebudayaan

Untuk mendukung terbentuknya karakter Sumber Daya Manusia yang berbudaya maka diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Bahasa, Sastra, Kesejarahan, dan Museum: Pengembangan dan pelestarian bahasa, sastra, serta sejarah daerah masih menghadapi kendala. Aktivitas pembelajaran dan pengenalan sejarah di kalangan generasi muda belum merata, dan hingga saat ini Kabupaten Kulon Progo belum memiliki museum sebagai sarana edukasi, pengamanan, dan publikasi warisan budaya fisik. Ketiadaan museum membuat fasilitas untuk menampung, merawat, dan menampilkan koleksi sejarah menjadi sangat terbatas, sehingga memperlemah upaya memperkuat pengetahuan sejarah dan meningkatkan apresiasi budaya masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pelestarian jangka panjang warisan budaya fisik.
b. Warisan Budaya (Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda): Dari 397 objek yang terinventarisir di Kabupaten Kulon Progo, sampai dengan tahun 2025 hanya 203 objek yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan 25 objek yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Selain itu, pengakuan terhadap Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), khususnya jenis cerita rakyat dan permainan tradisional, masih sangat terbatas. Objek-objek tersebut belum banyak diakui dan ditetapkan sebagai WBTB di tingkat nasional. Kondisi ini menuntut kajian lebih lanjut, sehingga Warisan Budaya Tak Benda dapat dilestarikan, dikembangkan, dan dipromosikan secara lebih luas.
c. Kalurahan Budaya: Pada tahun 2025, terdapat 52 Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Tumbuh, dengan 5 kalurahan meningkat menjadi rintisan budaya kategori berkembang, sehingga total Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang menjadi 41. Sehingga masih terdapat 47 Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Tumbuh yang perlu didampingi agar dapat meningkat menjadi Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang. Selain itu, 41 Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang memerlukan pendampingan dan pembinaan lebih intensif agar dapat mencapai status sebagai Kalurahan Budaya Mandiri. Di tingkat kalurahan,

banyak sanggar/kelompok kesenian yang belum melaksanakan kegiatan secara rutin dan belum memiliki kelengkapan administratif, sehingga dibutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas untuk mengembangkan kesenian lokal secara berkelanjutan.

d. Taman Budaya Kulon Progo: Pada verifikasi usulan dana keistimewaan tahun 2027, kementerian terkait (Kementerian Kebudayaan, Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan) menekankan perlunya sharing pembiayaan antara pusat dan daerah untuk pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo, terutama terkait biaya listrik, tenaga teknis, kebersihan, dan keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan Taman Budaya masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pusat, baik melalui Dana Keistimewaan maupun DAK Non Fisik. Seiring upaya efisiensi anggaran dari pusat, diperlukan alternatif mekanisme pengelolaan dan pembiayaan dari daerah agar Taman Budaya dapat tetap berfungsi optimal sebagai pusat pelestarian dan pengembangan seni budaya.

16. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa masih belum optimal.

   Organisasi pemuda yang aktif ada 19 organisasi. Kegiatan kepemudaan yang selama ini dilakukan melalui Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), maupun kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia, maupun kegiatan lainnya seperti: kegiatan anti narkoba, kewirausahaan, ataupun kepemimpinan.

b. Peningkatan prestasi dan penambahan *talent pool* / *data base* bagi atlet berprestasi masih belum optimal.

   Pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Tahun 2025, perolehan medali emas sebanyak 45 medali, medali perak sebanyak 38 medali, dan medali perunggu 97 medali. PORDA selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan Kabupaten Kulon Progo selaku tuan rumah. Sedangkan perolehan semua medali dalam event olahraga pelajar dan umum pada tahun 2025 sebanyak 449 medali.

c. Pemenuhan Sarana dan prasarana olahraga belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

   Gedung olahraga yang dimiliki sebanyak 92 unit, dan sarana olahraga sebanyak 1.193 unit, jumlah klub olahraga 173 klub. Jumlah gedung dan sarana olahraga ini belum sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo, sehingga diperlukan sebuah kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhannya

17. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Belum optimalnya kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang disebabkan oleh: (a) regulasi yang ada belum bisa mengakomodir semua pelanggaran yang terjadi di masyarakat; (b) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku; (c) kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada di masyarakat.

b. Masih terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang disebabkan oleh: (a) kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat; (b) keterbatasan sumber daya manusia

dan infrastuktur pendukung; (c) kurangnya koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder terkait; (d) kurangnya pengawasan yang efektif

c. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel Satpol PP dibandingkan dengan luas wilayah serta dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya kecepatan dan intensitas penanganan aduan masyarakat, khususnya pada permasalahan yang bersifat lokal dan terjadi di tingkat bawah.
d. Pelaksanaan pemberdayaan Satlinmas masih menghadapi kendala, terutama terkait kondisi sumber daya manusia. Sebagian besar anggota Satlinmas kalurahan saat ini berusia relatif lanjut, sementara proses regenerasi belum berjalan optimal. Rendahnya minat generasi muda untuk bergabung sebagai anggota Satlinmas menjadi tantangan tersendiri, yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap tugas Satlinmas, keterbatasan insentif, serta minimnya sosialisasi mengenai peran strategis Satlinmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan.
e. Secara umum, permasalahan pada substansi kebencanaan adalah pada masih rendahnya kondisi sarana dan prasarana mulai dari bangunan kantor, kebutuhan pemenuhan SPM pos pemadam kebakaran yang seharusnya ada di 12 kapanewon namun baru ada di Wates dan Nanggulan, kebutuhan peningkatan sistem informasi kebencanaan, dan kebutuhan peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan pusdalops yang masih rendah.
f. Selain sarana prasarana, dalam mitigasi bencana dibutuhkan juga kajian penyusunan dokumen rencana kontinjensi seperti kebutuhan pasca bencana (jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) untuk setiap jenis bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Kulon Progo.
g. Kemajuan digital pada saat ini, seharusnya dimanfaatkan secara baik untuk kemajuan pendidikan, ekonomi dan sektor pembangunan lainnya, termasuk peradaban, budaya masyarakat. Namun demikian hal tersebut belum disikapi dengan baik dan bijaksana. Sehingga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Teknologi yang disalahgunakan dapat menjadi celah masuknya radikalisme, judi online yang merebak di masyarakat saat ini. Akses informasi yang tidak diimbangi dengan literasi baik, membuat paham ekstrem mudah menyebar, intoleransi meningkat yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Judi online yang merebak, akibat kemudahan transaksi melalui media sosial,menyebabkan kehancuran moral, konflik internal, bahkan meningkatnya tindak kriminal.
h. Belum optimalnya tingkat pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat, mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara cenderung kurang disiplin dalam menaati aturan, sehingga berdampak pada meningkatnya pelanggaran hukum.

18. Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan pelayanan publik belum bisa sepenuhnya optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

(1) Faktor SDM pelaksana. SDM adalah faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sisi kuantitas, adanya kebijakan moratorium menyebabkan jumlah SDM saat ini jauh dari jumlah ideal pastinya akan berpengaruh dalam proses penyelenggaraan

pelayanan publik. Selain itu, dari sisi kualitas bahwa belum semua SDM yang ada memahami sepenuhnya tentang konsep pelayanan publik yang seharusnya diaplikasikan.

(2) Perubahan kebijakan yang dinamis berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan.

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh kategori A- dengan nilai 87,04. Perolehan nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yaitu 83,00 dengan kategori A-. Perolehan nilai RB Tahun 2024 (87,04) merupakan penjumlahan antara nilai RB General sebesar 78,83 dengan nilai RB Tematik sebesar 8,21. Penilaian Indeks RB tahun 2024 menggunakan 34 komponen dengan rincian RB General : 24 komponen terdiri dari 2 komponen strategi pelaksanaan dan 22 capaian pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, RB Tematik : 10 komponen terdiri 5 komponen strategi pembangunan dan 5 komponen capaian indikator dampak.

(4) Secara umum, penilaian ini menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, namun masih menghadapi beberapa kendala, antara lain : Dampak reformasi birokrasi belum signifikan dalam menyelesaikan isu strategis dan mengungkit kinerja daerah, perlunya updating secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan yang menghambat kinerja organisasi, internalisasi kebijakan Reformasi Birokrasi belum secara menyeluruh, dan penguatan atas sistem manajemen SDM yang belum sepenuhnya optimal. Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pelaksanaan efisiensi anggaran pada tahun 2025 berdampak pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan menggunakan pihak ketiga/surveyor menjadi pelaksanaan survei secara mandiri. Metode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara mandiri dan menggunakan surveyor tidak jauh berbeda, namun pelaksanaan SKM dengan menggunakan surveyor cenderung menghasilkan data yang lebih netral karena netralitas yang lebih terjaga. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen dalam mengukur tingkat/indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey dari Tahun 2019 dengan nilai IKM sebesar 82,96 dan untuk capaian IKM Tahun 2020 sebesar 84,12. Pada Tahun 2021 capaian IKM mengalami penurunan menjadi 82,49 hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 menggunakan 12 indikator penilaian sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan 9 indikator penilaian (sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017), selain itu pelayanan

di masa pandemi bisa mempengaruhi persepsi penilaian dari masyarakat. Pada tahun 2022, capaian IKM kembali mengalami peningkatan yaitu pada nilai 83,268 dan pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 85,634, kemudian tahun 2024 naik lagi menjadi 86,797, dan perolehan nilai IKM Tahun 2025 naik 0,05 menjadi 86,856.

(5) Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Indikasi permasalahan ini adalah adanya tren temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal. Keterbatasan pemahaman SDM atas urgensi SPIP dan implementasinya menjadi faktor penyebab permasalahan ini. Hal ini ditunjang dengan kondisi SDM terbatas dengan beban tugas *multitasking* yang dialami oleh sebagian besar PD.

Dari permasalahan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah maupun belum optimalnya kualitas pelayanan publik, apabila tidak direncanakan dan ditindaklanjuti dengan baik akan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintah daerah.

Untuk melakukan transformasi sebagaimana mandat presiden tentang reformasi birokrasi, ada tiga poin yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan arahan tersebut, yaitu penyetaraan jabatan, perubahan struktur organisasi, dan transformasi sistem kerja yang didukung oleh SPBE. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu:

(1) Kelengkapan jabatan fungsional masih dalam proses penyesuaian, hal ini akibat dari ketentuan yang mengaturnya, yaitu Permen PAN & RB no 1 tahun 2023 yang baru saja terbit.

(2) Peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang masih tumpang tindih.

(6) Belum optimalnya upaya pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh WTP berturut-turut mulai tahun 2013. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah. Meskipun demikian belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 2.220) akan menimbulkan keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah untuk mampu membiayai belanja pembangunan.

Selain itu dinamika kebijakan pemerintah seperti ketentuan pengelolaan BUMD, Dana transfer, dan Aset serta dinamika implementasi penganggaran dari OPD turut menjadi penyumbang permasalahan ini. Peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka melalui beberapa sumber seperti pajak dan retribusi serta hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga strategi untuk menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta meningkatkan investasi daerah, perlu untuk dikedepankan melalui upaya-upaya yang inovatif.

Telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah diminta untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam penyusunannya selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daearah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (existing), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah.

(7) Keterbatasan dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dikarenakan belum lengkapnya aturan turunannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan belum bisa dilaksanakan karena aturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis belum ada sehingga belum dapat diimplementasikan. Keterlambatan terbitnya regulasi teknis perencanaan tahunan sehingga menghambat proses perencanaan tahunan.

a. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan Lembaga Keuangan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

   Kurangnya kapasitas bisa dilihat dari kurangnya ketaatan dan ketertiban pengelola terhadap peraturan yang berlaku. Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola Badan Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Desa.

b. Belum optimalnya pengendalian dan pemantauan harga kebutuhan pokok strategis. Solusi yang ditempuh pengendalian dan pemantauan harga kebutuhan pokok strategis. Hal ini masih dapat dilihat dari fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian.

   Produk-produk kebijakan bidang perekonomian masih sangat sederhana dan kurang komprehensif dalam menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan di bidang perekonomian. Hal tersebut disebabkan belum terlibatnya seluruh pihak pemangku kepentingan, antara lain akademisi/pakar yang relevan dan kapabel di bidang perekonomian. Langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan bidang perekonomian. Misalnya regulasi/kebijakan pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan lokal dari aspek budidaya (*on-farm*), pengolahan pasca panen dan pemasaran (*off-farm*). Perlunya regulasi penggunaan produk lokal.

19. Pangan

a. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

   Pada tahun 2025 penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan sebesar 87,84. Angka ini masih di bawah standar konsumsi pangan yang beragam bergizi dan seimbang dan aman yaitu 100. Untuk mencapai angka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

   - Sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di tingkat kabupaten untuk ibu – ibu anggota KWT (Kelompok Wanita Tani).
   - Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan fasilitasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini merupakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dengan menanam berbagai macam komoditas pangan. Fasilitasi sebanyak 5 KWT untuk optimalisasi lahan pekarangan beserta bimbingan teknis optimalisasi lahan pekarangan di tahun 2025

- Capaian ketersediaan energi pada tahun 2025 sebesar 3,241 kkal/kap/hari. Sedangkan capaian ketersediaan protein adalah 99,95 gr/kap/hr dan capaian ketersediaan energi dan protein 2021 – 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 2.108 Bab II
- Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Kulon Progo 2021 – 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.108 Bab II.

b. Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo no 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan, serta Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota, dengan target sebesar 96 ton. Namun sampai dengan Tahun 2025 cadangan pangan pemerintah daerah baru mencapai 41,25 ton. Pada Tahun 2026 telah terbit Instruksi Gubernur DIY Nomor B/500.1/5542/D4 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2026, Kabupaten Kulon Progo ditargetkan memiliki cadangan pangan sebanyak 83 ton. Untuk tahun 2026 telah dianggarkan untuk cadangan pangan sebesar 7,4 ton beras dan ke depan terus akan dianggarkan untuk pemenuhan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

c. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani.

Pada tahun 2025 persentase petani yang sudah menjadi anggota kelompok tani meningkat dari 55,81% menjadi 56,07%, dengan ini penyuluh memiliki peran penting untuk mendorong petani untuk menjadi anggota kelompok tani. Keberhasilan penyuluh dalam meningkatkan jumlah petani yang masuk menjadi anggota kelompok tani/kelompok wanita tani karena optimalisasi SDM penyuluh lapangan, termasuk penyuluh swadaya di masyarakat.

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peran Bumdes dan lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal terhadap pembangunan disebabkan kelembagaan tidak lengkap sehingga ada jabatan yg dirangkap, kemudian terjadi NPL (*non perfoming loan*) yang sangat tinggi disebabkan kredit macet. Kemudian di sisi lain belum optimalnya pengelolaan administrasi Pemerintah Kalurahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Regulasi tersebut berfokus pada 2 (dua) pilar kebijakan, yaitu:

a. Reformasi Birokrasi Kalurahan, berfokus untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.
b. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat, berfokus untuk mendorong keberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lokal, seperti: tranformasi ekonomi, pelestarian budaya, dan pengembangan pembangunan yang inklusif.

21. Statistik

a. Ketersediaan data statistik untuk kebutuhan perencanaan Pembangunan

Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1 sehingga ketersediaan data menjadi masalah. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah menyusun proyeksi melalui analisis makro ekonomi.

b. Penyelenggaraan statistik sektoral belum optimal

Meskipun Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Kulon Progo meningkat dari 2,00 pada tahun 2023 menjadi 2,44 pada tahun 2024, capaian tersebut masih berada pada predikat Cukup, sehingga menunjukkan bahwa tata kelola statistik sektoral, kualitas metadata, penerapan standar data, serta pemanfaatan data statistik dalam penyelenggaraan pembangunan masih perlu ditingkatkan.

c. Integrasi dan interoperabilitas data antar sistem masih perlu penyempurnaan

Portal Satu Data Kabupaten Kulon Progo telah terintegrasi dengan portal Dataku DIY dan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id), namun integrasi dengan aplikasi SIPD E-Walidata belum dilakukan.

22. Kearsipan

a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)
   1. Terbatasnya Tenaga Arsiparis: Jumlah fungsional arsiparis tidak sebanding dengan beban kerja dan volume arsip yang dihasilkan setiap SKPD.
   2. Rendahnya Kompetensi Pengelola: Banyak pengelola arsip di unit kerja yang bukan berasal dari latar belakang kearsipan atau belum mendapatkan pelatihan teknis secara berkala.
   3. Kurangnya Kepedulian (*Awareness*): Budaya kerja yang masih menganggap arsip sebagai "pekerjaan sampingan" sehingga pengelolaan belum sesuai kaidah baku.

b. Optimalisasi SRIKANDI Belum Maksimal: Implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) masih terkendala hambatan teknis dan adaptasi pengguna (user) di lapangan.

c. Keterbatasan sarana prasarana dan belum sesuai standar. Banyak perangkat daerah yang belum memiliki ruang simpan (depo/record center) yang representatif, rak arsip yang standar, serta sistem proteksi kebakaran/hama.

d. Pembinaan kearsipan belum menjangkau seluruh Pemerintah Kalurahan secara intensif, padahal Kalurahan adalah ujung tombak data kewilayahan.

23. Komunikasi dan Informatika

a. Infrastruktur Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika masih perlu ditingkatkan. Masih terbatasnya cakupan jaringan intranet berbasis fiber optik yang dapat dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Untuk Perangkat Daerah induk belum mencapai 100%, masih tersisa 15% yang belum terfasilitasi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berbasis fiber optik, yaitu pada kapanewon. Sedangkan untuk kantor kalurahan, baru tersambung kisaran 72,41%. Untuk Kantor UPTD dan Puskesmas baru beberapa saja yang

sudah tersambung jaringan intra pemerintah daerah, yaitu area yang terlewati backbone jaringan intra, selebihnya masih mengandalkan koneksi internet secara mandiri. Untuk meningkatkan layanan koneksi internet diperlukan biaya investasi yang tidak sedikit, terutama pada pengembangan infrastruktur jaringan intranet berbasis fiber optik. Infrastruktur jaringan Local Area Network (LAN) Perangkat Daerah juga belum sepenuhnya dilakukan upgrade perangkat aktif sesuai standar, sehingga perlu dilakukan desain ulang topologi jaringan LAN tersebut, serta upgrade perangkat aktif untuk mengatasi masalah bottleneck koneksi yang selama ini dirasakan. Selain itu, dari sisi keamanan informasi, belum tersedianya Firewall pada sisi network (saat ini baru tersedia firewall khusus ke arah server farm dengan kapasitas kecil), menimbulkan masalah baru. Kondisi perangkat enduser existing yang masih banyak menggunakan perangkat dengan Operating System (OS) yang sudah usang maupun OS bajakan/cracking/tidak original, mengakibatkan IP gateway terdeteksi melakukan abuse oleh beberapa server yang dituju. Hal ini mengakibatkan IP gateway Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akhirnya terblokir oleh beberapa aplikasi Pemerintah Pusat. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan penggantian perangkat enduser dengan OS yang terbaru, serta memasang firewall pada sisi network. Selain itu, untuk menjaga high availability layanan koneksi internet pemerintah daerah, perlu diprioritaskan pengadaan redundant unit router core IP transit. Untuk saat ini, unit redundansi tersebut belum tersedia. Apabila router core mengalami kendala, maka seluruh koneksi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berisiko mengalami lumpuh total (seluruh koneksi akan terputus).

b. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan informasi daerah

Pengelola informasi daerah berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ cyber, maupun media luar ruang. Pengelolaan informasi daerah salah satunya dilakukan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang merupakan pengelola informasi di setiap Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi daerah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui pengelolaan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dari sisi pelayanan informasi, optimalisasi kinerja media sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Media sosial saat ini telah berkembang menjadi salah satu kanal utama penyebarluasan informasi publik. Pengelolaan media sosial yang aktif, responsif, dan informatif akan memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat serta menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi berkala, informasi setiap saat, maupun informasi serta-merta secara lebih cepat dan luas.

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi daerah juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil monev tidak hanya menjadi ukuran tingkat kepatuhan badan publik terhadap regulasi keterbukaan informasi,

tetapi juga menjadi indikator kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas PPID, penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan website, serta pemanfaatan media sosial perlu terus ditingkatkan agar memenuhi standar pelayanan informasi.

24. Perpustakaan

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di antaranya:
   1) Keterbatasan Fasilitas seperti PC layanan perpustakaan, desain interior, toilet pengunjung, dan belum tersedianya area bermain anak di luar ruangan, ruang diskusi, dan kantin
   2) Keterbatasan armada untuk Layanan Perpustakaan Keliling.
   3) Koleksi buku perpustakaan, baik fisik maupun digital, belum bisa memenuhi kebutuhan pemustaka. Banyak buku mengalami kerusakan, selain itu juga adanya risiko buku yang tidak dikembalikan.

b. Pembinaan Perpustakaan yang Belum Optimal

   Dari 465 perpustakaan kewenangan Dinas terdiri dari perpustakaan SD, SMP, OPD, dan Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, baru 215 perpustakaan yang terakreditasi. Pelaksanaan pembinaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga tiap tahun hanya menargetkan 6 perpustakaan terakreditasi.

25. Pertanian

a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

   Usaha Dinas Pertanian dan Pangan dalam menghadapi luas lahan pertanian yang semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan dan untuk mempertahankan kecukupan pangan terutama beras, antara lain dengan:
   - Meningkatkan produktivitas lahan eksisting, agar produksi masih dapat terjaga untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten Kulon Progo meskipun luas lahan berkurang.
   - Melindungi dan mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo dengan menerbitkan Melalui Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 368/A/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 510/A/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 16.036,97 ha untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari 11.033,98 Ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan 5.002,99 Ha Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) .
   - Melaksanakan kegiatan cetak sawah baru, sampai dengan Tahun 2025 telah tercapai cetak sawah seluas 375 hektar.

b. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai.

   Masih belum meratanya sarana prasarana menjadikan inefisiensi waktu, biaya serta tenaga dalam berusaha tani baik *on-farm* maupun *off-farm*. Dalam usaha tani tingginya biaya tenaga kerja, ketersediaan sarana produksi, pengolahan pasca panen belum memadai, panjangnya rantai pemasaran dari produsen ke konsumen menyebabkan keuntungan yang didapat oleh petani minim.

Upaya yang dilakukan adalah dengan fasilitasi sarana produksi, peralatan panen dan pasca panen, bimbingan teknis serta pendampingan dan pemberdayaan kelompok, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan.

c. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani.

Petani di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar sudah berusia lanjut sehingga adopsi teknologi menjadi sulit dilakukan. Solusinya adalah perekrutan petani milenial melalui kegiatan pelatihan, fasilitasi demplot dan pengolahan. Saat ini sudah terbentuk asosiasi petani milenial di Kulon Progo. Harapan dengan adanya asosiasi ini penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian segera dapat terwujud dengan merata. Sehingga efisiensi waktu, biaya dan tenaga dapat tercapai dan memberikan hasil pertanian yang optimal bagi petani. Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan introduksi teknologi baru yaitu traktor roda 2 yang dikendalikan dengan remote control, hal ini untuk mengatasi semakin kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dan menarik minat pemuda untuk terjun ke dunia pertanian.

d. Masih adanya penyakit hewan menular.

Dibutuhkan peran serta dari petugas dan penyuluh peternakan dalam memberikan pemahaman kepada peternak akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lokasi peternakan serta akan terus diupayakan peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Pada tahun 2025 tingkat kunjungan medik veteriner ke kelompok ternak dan peternak semakin ditingkatkan untuk menangani masalah pada penyakit hewan. Untuk Pengawasan Kesehatan hewan yang dilakukan antara lain:

- Pemantauan penyakit hewan menular.
- Pengawasan lalu lintas ternak bersinergi dengan Dinas Perhubungan, TNI dan POLRI.
- Pemantauan peredaran obat hewan.
- Pengendalian penyakit antraks.
- Sosialisasi penyakit hewan strategis.
- Pengadaan obat-obatan.
- Pelayanan Kesehatan hewan.

26. Pariwisata

a. Kurangnya daya tarik obyek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan.

Untuk meningkatkan daya tarik dilakukan dengan meningkatkan aksesibiltas dan sarana prasarana pendukung di obyek wisata secara bertahap dengan mengedepankan inovasi dan melakukan kerjasama dengan stakeholder yang terkait. Selain itu dilakukan pemetaan obyek-obyek wisata untuk menggali dan menentukan keunggulan masing-masing obyek sebagai daya tarik wisata. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah melakukan promosi secara lebih intensif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan media di tempat-tempat strategis.

Fokus prioritas destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah pantai Glagah-Congot mengingat lokasi tersebut termasuk dalam rencana pengembangan kawasan Aerotropolis – *Smart Tourism*.

b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran wisata belum optimal.

Pemasaran pariwisata melalui teknologi informasi masih belum optimal, sehingga jangkauan dan kualitas penyebaran informasinya masih terbatas. Diperlukan adanya inovasi dalam kegiatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat di era digital dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan penyedia jasa pariwisata secara lebih intens.

c. Penyelenggaraan atraksi wisata yang belum mampu menarik kunjungan wisata secara signifikan. Permasalahan ini diatasi dengan melakukan inovasi dan diversifikasi atraksi wisata, baik yang dilaksanakan pemerintah, dikerjasamakan maupun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Atraksi wisata yang direncanakan diantaranya di destinasi wisata Goa Kiskendo, Waduk Sermo dan Pantai Glagah - Congot dengan menampilkan kesenian unggulan. Atraksi Unggulan di Goa Kiskendo adalah sendratari Sugriwo Subali. Atraksi Unggulan di Waduk Sermo adalah Krumpyung dan Angguk, sedangkan atraksi unggulan di Pantai Glagah - Congot adalah Sport Tourism (Glagah Lagoon Festival). Sport Tourism tidak hanya di Pantai Glagah tapi juga diselenggarakan di wilayah lain di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu melalui anggaran Dana Keistimewaan diselenggarakan berbagai atraksi diantaranya Kiskenda Mraheswara, Menoleh ke Menoreh, Romansa Pansela, dan Pentas Atraksi Wisata Budaya.

d. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata.

   Solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk pelaku wisata dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

27. Kelautan dan Perikanan

a. Keterbatasan kemampuan produksi benih ikan

   Salah satu permasalahan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Kulon Progo adalah belum terpenuhinya kebutuhan benih ikan. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya penguatan perbenihan melalui revitalisasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR), peningkatan kapasitas pembenih, sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), pengadaan induk unggul, serta penguatan kelembagaan pembenih. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan benih, mengurangi ketergantungan dari luar daerah, dan mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

b. Harga pakan ikan pabrikan semakin mahal

   Ketergantungan pembudidaya terhadap pakan ikan pabrikan menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, berdampak pada menurunnya efisiensi usaha, terutama bagi pembudidaya skala kecil yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal dan limbah organik yang berpotensi menjadi bahan baku pakan alternatif masih belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain pengembangan pilot project pakan mandiri mobile, peningkatan kapasitas pembudidaya melalui magang pengelolaan pakan mandiri, pengembangan teknologi budidaya sistem bioflok yang lebih efisien dalam penggunaan pakan, serta pemanfaatan limbah organik sebagai bahan baku pakan alami. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pakan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan daya saing usaha perikanan budidaya.

c. Keterbatasan air

Keterbatasan ketersediaan air masih menjadi kendala dalam pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Kulon Progo, terutama di wilayah Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan sebagian Pengasih yang rentan mengalami kekeringan pada musim kemarau. Prioritas pemanfaatan air lebih diutamakan untuk kebutuhan pertanian. Selain itu, pemanfaatan sumber air alternatif dan penerapan teknologi budidaya hemat air masih belum optimal. Upaya penanganan dilakukan melalui edukasi efisiensi penggunaan air, pemanfaatan sumber air alternatif serta penerapan teknologi budidaya hemat air seperti kolam terpal, recirculating aquaculture system dan pemanenan air hujan.

d. Konsumsi ikan masyarakat masih rendah

Capaian Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) Kulon Progo Tahun 2025 sebesar 10,23 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 4.735 ton, masih jauh dari capaian KIM nasional sebesar 26,08 kg/kapita/tahun (39,23%).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilaksanakan berbagai upaya melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) kepada pelajar dan masyarakat dan pelaksanaan Gerakan Makan Ikan untuk Atasi Stunting (GEMATI) melalui penerbitan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Nomor 500.5/5234. Pada Surat Edaran tersebut memuat tentang himbauan konsumsi ikan bagi ASN, penyediaan menu lauk/kudapan berbahan ikan pada rapat/pertemuan serta penyediaan menu berbahan ikan pada kegiatan posyandu. Selain itu, himbauan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyediakan menu ikan secara rutin dalam penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG), sosialisasi dan edukasi pentingnya konsumsi ikan kepada pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga balita dan anak sekolah melalui kerja sama lintas sektor, serta edukasi dan pendampingan konsumsi makan ikan pada masyarakat di lokus stunting. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya gemar makan ikan dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

e. Regenerasi nelayan masih rendah

Regenerasi nelayan di Kabupaten Kulon Progo masih menjadi tantangan, ditandai dengan dominasi nelayan berusia 40–60 tahun sebanyak 507 orang (73,9%), sementara nelayan usia 19–39 tahun hanya 108 orang (15,7%). Kondisi ini menunjukkan rendahnya minat generasi muda terhadap profesi nelayan yang berpotensi mengurangi ketersediaan tenaga kerja produktif dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan tangkap di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regenerasi nelayan melalui peningkatan daya tarik profesi nelayan, pengembangan program Sekolah Nelayan Milenial, peningkatan kompetensi dan kewirausahaan perikanan bagi generasi muda, dukungan sarana-prasarana usaha, serta penguatan kelembagaan nelayan agar tercipta sumber daya manusia perikanan yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan berkelanjutan.

f. Kesadaran nelayan terhadap keselamatan kerja relatif rendah

Nelayan masih banyak yang melaksanakan penangkapan ikan di laut tanpa menggunakan saranan pengamanan seperti pelampung dan tidak ikut serta dalam program penjaminan perlindungan keselamatan kerja (BPJS ketenagakerjaan). Upaya yang dilakukan adalah

dengan melaksanakan pelatihan/sosialisasi/bimtek keselamatan kerja dan mengikutsertakan nelayan dalam program jaminan pekerja rentan.

g. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian sumber daya perikanan masih rendah

Masih adanya oknum masyarakat yang menangkap ikan dengan alat dan bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penggunaan alat setrum, penggunaan racun, jaring pukat dan alat yang dilarang lainnya. Solusi dari masalah ini adalah dengan penumbuhan dan penguatan pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), peningkatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, sosialisasi pelestarian sumberdaya perikanan, program Jogo Kaliku Sipatin, fasilitasi sarana pengawasan, dan pembinaan/pendampingan terhadap masyarakat.

28. Perdagangan

a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera.

Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera terhadap alat timbangannya masih kurang. Walaupun cakupan tera/tera ulang terhadap alat UTTP (Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) mengalami peningkatan, namun masih banyak potensi UTTP yang belum terjangkau pelayanan. Untuk kedepannya, akan dimaksimalkan pelayanan tera pada para pelaku usaha di luar pasar serta pusat-pusat pelayanan kesehatan.

b. Pasar daerah masih kurang representatif.

Keberadaan pasar daerah masih kurang representatif dibandingkan pusat perbelanjaan atau toko swalayan. Beberapa pasar sudah mengalami kerusakan pada sarana dan prasarananya, seperti atap, talang, dan saluran pembuangan limbah. Status lahan yang digunakan untuk pasar daerah sebagian besar belum memiliki izin penggunaan. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya akses terhadap sumber dana (anggaran). Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yakni dengan memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana pasar yang rusak, percepatan pengurusan legalitas lahan pasar daerah melalui inventarisasi dan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi terkait. Selain itu masih perlu peningkatan manajemen pengelolaan pasar daerah yang cepat, tepat, valid, dan akuntabel, diantaranya melalui penyusunan bank data, validasi data, serta penertiban tata administrasi pengelolaan pasar baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya.

c. Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang belum tertata

Jumlah PKL di Kulon Progo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun adanya PKL ini dapat menggerakkan perekonomian di Kulon Progo namun keberadaannya yang seringkali menempati lokasi yang bukan peruntukannya menjadikan masalah tersendiri. Keberadaan PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan terjadinya kesemrawutan bagi wajah Kulon Progo serta berdampak pada arus lalu lintas karena adanya parkir kendaraan di badan jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan PKL pada lokasi yang representatif dan bersifat permanen guna menjamin ketertiban umum, menjaga estetika kawasan, serta dapat melindungi hak-hak PKL itu sendiri.

d. Mayoritas pelaku usaha berorientasi ekspor belum melakukan ekspor mandiri.

Beberapa di antara pelaku usaha produk potensi ekspor Kulon Progo saat ini sudah merasa nyaman dengan kerjasama menjadi supplier kepada eksportir yang ada di luar daerah. Hal ini

terjadi karena mereka menjalin kerjasama sudah sekian lama sehingga kemudian tidak ada motivasi untuk berkembang lebih besar lagi. Dinas terus mendorong pelaku usaha produk ekspor untuk mampu melakukan ekspor mandiri dengan meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan, temu usaha, dan memfasilitasi keikutsertaan di kegiatan pameran.

29. Perindustrian

a. Terbatasnya bahan baku di dalam daerah

Industri di Kulon Progo didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum. Bahan baku industri tersebut sangat tergantung pada hasil pertanian maupun ketersediaan di alam apabila ketersediaannya terbatas maka bisa mempengaruhi kondisi usaha para pengrajin. Solusinya adalah diversifikasi industri serta peningkatan kerjasama bahan baku dengan daerah lain baik regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya diperlukan adanya identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal untuk memenuhi permintaan bahan baku industri.

b. Belum optimalnya daya saing produk industri

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kulon Progo cukup besar, dengan jumlah IKM pada Tahun 2024 sebanyak 16.092 unit, sedangkan jumlah sentra sama dengan tahun sebelumnya yakni sejumlah 34 sentra. Daya saing produk industri yang dihasilkan IKM maupun sentra IKM masih kurang kompetitif dibanding daerah lain, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) pelaku usaha industri, pola pikir (mindset) dalam mengembangkan usaha, lemahnya penguasaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan diversifikasi produk, dan kondisi infrastruktur (misalnya kondisi jalan, pasokan listrik dan air).

Untuk meningkatkan daya saing produk, dilakukan pemberdayaan IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan Sentra IKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, serta melakukan upaya digitalisasi

30. Transmigrasi

Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan informasi kepada pendaftar calon transmigran mengenai potensi lokasi transmigrasi di luar Sumatera melalui penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan pelayanan ketransmigrasian, serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah DIY dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam penyelesaian masalah transmigrasi.

31. Persandian

a. Kesadaran Keamanan Informasi Pegawai Masih Beragam

Sebagian pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai keamanan informasi, seperti pengelolaan kata sandi, identifikasi email phishing, penggunaan media

penyimpanan eksternal, dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini meningkatkan risiko kebocoran data dan pengambilalihan akun.

b. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) belum dilaksanakan secara maksimal

   Sistem Kendala terbesar penerapan SMKI adalah pada spesifikasi infrastruktur TI yang tidak sesuai standar (Kriteria Data Center) Penerapan keamanan informasi menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara sistem elektronik, namun OPD belum memiliki kesadaran untuk menerapkan Sistem Keamanan Informasi secara baik dan benar. Hal ini menyebabkan berkurangnya nilai indeks keamanan informasi atau Indek KAMI. Nilai indeks KAMI 2024 dinas Komunikasi dan Informatika masuk pada kategori sistem elektronik Tinggi berada pada skor 439 dari total nilai maksimal 645 atau sebesar 68,06 % dengan tingkat kematangan II (pemenuhan kerangka kerja dasar).

c. Proses pengamanan Informasi belum bisa dilaksanakan dari tahap awal perancangan sistem informasi (security by design). Penanganan keamanan informasi seringkali dilaksanakan pada saat ada insiden keamanan informasi (respon terhadap insiden). Penerapan keamanan belum bersifat prefentif karena keterbatasan SDM dan peralatan/ tools untuk melakukan identifikasi kerawanan keamanan.

d. Keterbatasan SDM Keamanan Siber.

   Jumlah personel yang memiliki kompetensi keamanan informasi dan keamanan siber masih terbatas dibandingkan dengan jumlah layanan digital yang harus diamankan.

e. Belum Seluruh Sistem Menerapkan Otentikasi Multi Faktor (MFA). Masih terdapat layanan yang hanya mengandalkan kombinasi username dan password tanpa lapisan keamanan tambahan.

f. Kerentanan pada Website dan Aplikasi Pemerintah. Website dan aplikasi yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi memiliki celah keamanan, seperti: SQL Injection Cross Site Scripting (XSS) File Upload Vulnerability Directory Listing Clickjacking. Dampak yang sering terjadi adalah defacement website, penyisipan konten judi online, pencurian data pengguna. serta gangguan layanan publik.

32. Penanggulangan bencana dan kebakaran

Kabupaten Kulon Progo memiliki karakteristik wilayah yang beragam, meliputi kawasan pegunungan/perbukitan Menoreh di bagian utara, dataran tengah, serta kawasan pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup kompleks, antara lain bencana tanah longsor di wilayah perbukitan (Samigaluh, Kokap, Kalibawang), banjir dan genangan di wilayah dataran dan bantaran sungai, serta ancaman bencana pesisir seperti abrasi, gelombang tinggi, dan potensi tsunami di wilayah selatan (Temon, Panjatan, Galur). Selain itu, meningkatnya aktivitas pembangunan strategis, seperti pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), jaringan jalan tol, dan kawasan aerotropolis, turut meningkatkan eksposur risiko bencana serta potensi kejadian kebakaran permukiman dan bangunan gedung.

Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat

sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kapasitas penanggulangan bencana, baik dari aspek sumber daya, sistem pendukung, kelembagaan, maupun kesiapsiagaan masyarakat, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Kulon Progo meliputi:

a. Tingginya tingkat kerawanan bencana yang belum diimbangi kapasitas penanggulangan

   Karakteristik wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari kawasan perbukitan rawan longsor, dataran rawan banjir, serta wilayah pesisir dengan potensi abrasi dan tsunami menyebabkan tingkat risiko bencana relatif tinggi dan beragam. Namun demikian, kapasitas penanggulangan bencana, baik dari sisi sarana prasarana, peralatan, maupun jangkauan layanan, masih belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas dan luas wilayah rawan bencana, sehingga berpotensi mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan saat terjadi bencana.

b. Belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi kebencanaan

   Kualitas pendataan kejadian bencana di Kabupaten Kulon Progo telah mengalami peningkatan dan secara umum telah mampu mendukung pencatatan kejadian bencana secara lebih sistematis. Namun demikian, pemanfaatan data kejadian bencana tersebut sebagai dasar perencanaan yang berbasis risiko, penguatan mitigasi, serta pengambilan keputusan lintas sektor masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Integrasi data kejadian bencana dengan data pendukung lainnya, seperti data kerentanan wilayah, data sosial ekonomi, dan data infrastruktur, belum sepenuhnya optimal sehingga analisis risiko bencana dan penentuan prioritas intervensi masih perlu ditingkatkan.

c. Keterbatasan kapasitas SDM, kelembagaan, dan peralatan

   Pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, kesiapsiagaan operasional, serta kemampuan koordinasi lintas sektor yang kuat, didukung oleh kelembagaan yang efektif dan peralatan yang memadai. Namun demikian, kapasitas SDM aparatur, relawan, dan unsur pendukung lainnya masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun kesinambungan pembinaan.

   Di sisi lain, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran juga menghadapi keterbatasan dukungan sarana prasarana dan peralatan yang bersifat spesifik, berteknologi khusus, serta membutuhkan biaya pengadaan dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesiapan operasional dan jangkauan layanan, terutama dalam penanganan kejadian bencana dan kebakaran yang memerlukan respon cepat dan peralatan khusus. Selain itu, penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait belum sepenuhnya berjalan optimal.

d. Masih bervariasinya tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat.

   Upaya peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo telah diinisiasi melalui pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Namun demikian, tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana masih menunjukkan variasi antar kalurahan, seiring dengan perbedaan tingkat kematangan dan keberlanjutan pelaksanaan Kaltana. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahaman, kesiapan, dan kemampuan untuk melakukan upaya mitigasi serta respon awal secara mandiri, khususnya di wilayah rawan yang belum terjangkau penguatan secara

berkelanjutan. Kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran masih memerlukan peningkatan dari sisi cakupan, kualitas, dan kesinambungan agar ketangguhan masyarakat dapat terbentuk secara merata.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2027, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2025, perkiraan tahun 2026, proyeksi tahun 2027, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2027 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi 2021-2027

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 mengalami fluktuasi selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 PDRB ADHK pada posisi 8.838,14 miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2022, nilai PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo mulai meningkat seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas masyarakat menjadi sebesar 9.419,36 miliar Rupiah, selanjutnya pada tahun 2023 PDRB ADHK mengalami peningkatan lagi menjadi 9.951,95 miliar Rupiah. Pada tahun 2024, angka dari BPS menunjukkan peningkatan namun melemah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada 10.426,23 miliar Rupiah. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2025 PDRB ADHK sebesar 10.881,10 miliar Rupiah.

Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo sebesar 12.642,56 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2022, seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai normal PDRB meningkat menjadi 14.325,95 miliar Rupiah dan kembali meningkat signifikan menjadi 15.841,40 miliar Rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, PDRB ADHB juga mengalami perlambatan peningkatan yaitu pada 16.916,29 miliar Rupiah. Hal ini juga terjadi pada tahun 2025 yaitu PDRB 17.929,51 miliar Rupiah. Kenaikan PDRB Kabupaten Kulon Progo di masa mendatang diproyeksikan banyak disumbang dari sektor Transportasi dan Pergudangan, seiring makin meningkatnya aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga diprediksi akan meningkat dengan mulai beroperasinya beberapa hotel berbintang

terutama yang berada di sekitar BIY. Kemudian mulai dibangunnya proyek Trase Tol Solo-Yogyakarta-Bandara YIA akan meningkatkan PDRB dari sektor konstruksi. Di samping itu, diproyeksikan juga sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengarah ke hilirisasi industri. Berdasarkan hal tersebut maka PDRB ADHB diproyeksikan akan menjadi sebesar 19.284,00 miliar Rupiah pada tahun 2026 dan 20.822,00 miliar Rupiah pada Tahun 2027.

Selengkapnya nilai proyeksi PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kulon Progo disajikan pada gambar berikut ini.

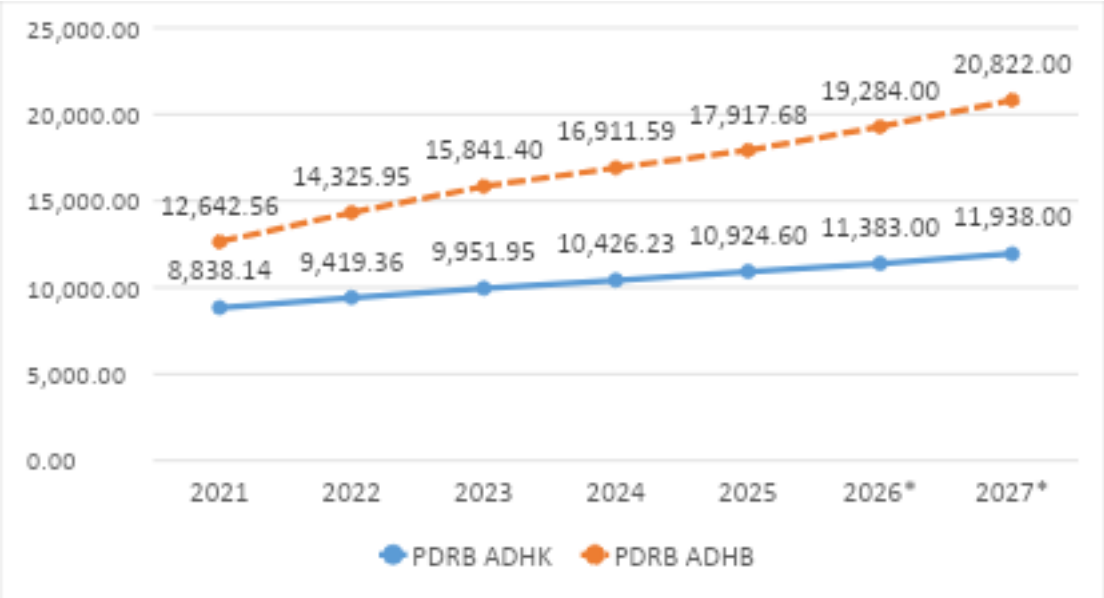

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026

*) Angka proyeksi

Gambar 3.1

PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo

Tahun 2021-2025, Proyeksi 2026 dan 2027 (miliar rupiah)

Selama periode 2021-2025 struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo selalu didominasi oleh 5 sektor lapangan usaha, yaitu Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Namun mulai tahun 2021 terjadi pergeseran kategori penyokong perekonomian Kabupaten Kulon Progo yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menggeser lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi kelima. Kondisi demikian ini tetap berlanjut pada Tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi perubahan di mana pada 5 posisi teratas adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan. Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dimana distribusi tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan namun sudah mengalami penurunan yang stabil selama 4 tahun terakhir.

Terdapat 3 sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2025 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertanian, Sektor Konstruksi, dan Sektor Transportasi dan

Pergudangan. Ketiganya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15,63%, 14,57% dan 14,29%. Berikut perkembangan kontribusi 6 terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

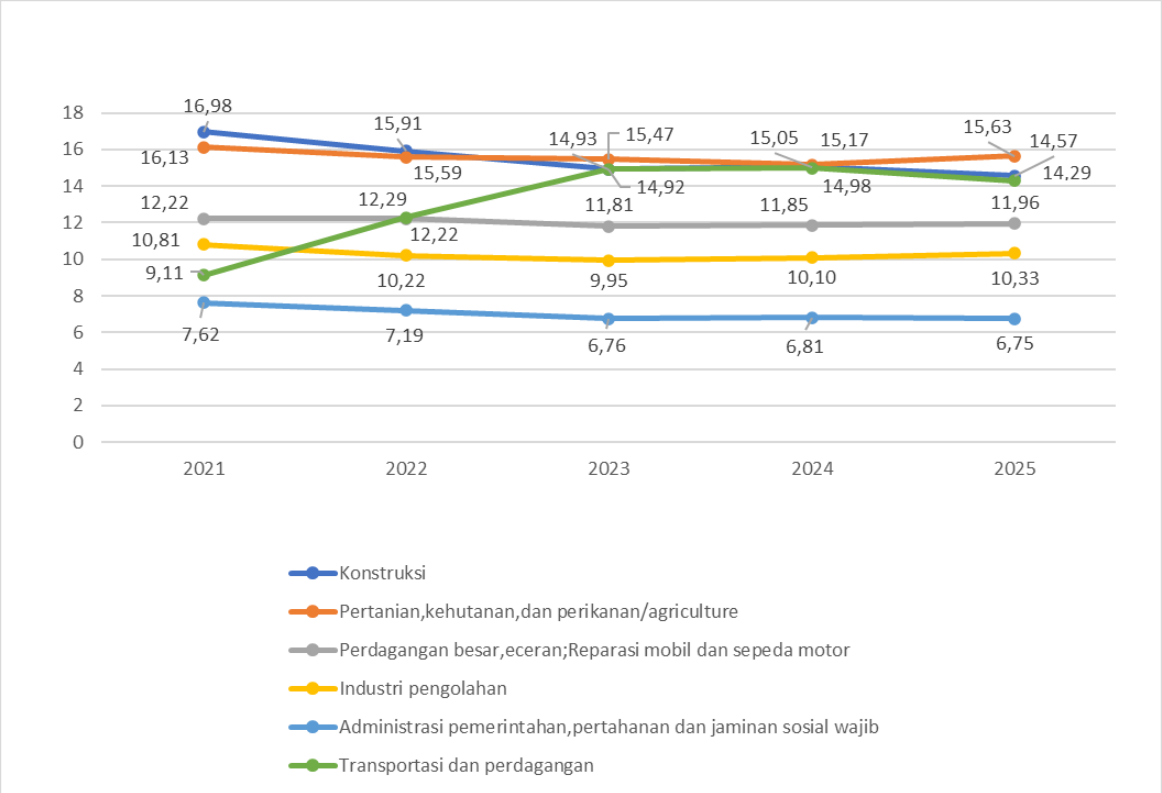

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026.

Gambar 3.2

Kontribusi Enam Sektor Terbesar pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2021-2025 (%)

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 10,88 triliun Rupiah, atau mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 10,43 triliun Rupiah. Pada tahun 2025, sektor yang tumbuh cukup tinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,32%), disusul sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,24%) kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian (7,22%). Distribusi masing-masing sektor usaha ditampilkan pada Gambar 3.3.

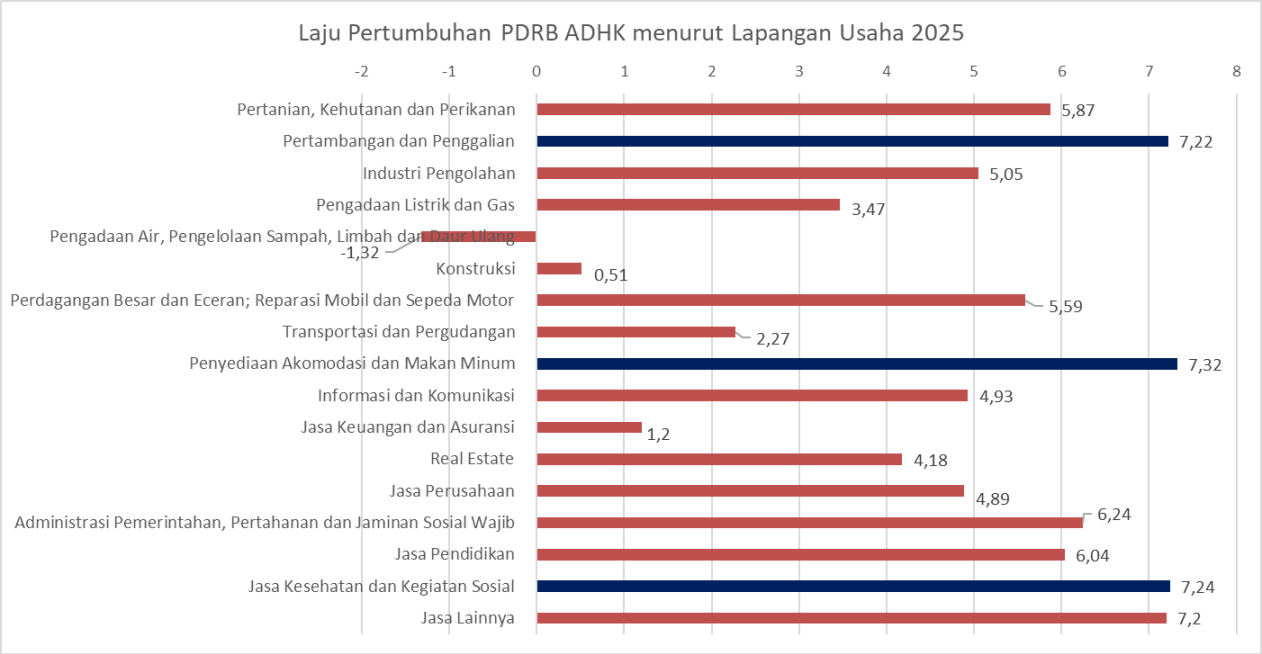

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026

Gambar 3.3

Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2025 Menurut Lapangan Usaha (%)

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang mengalami rebound dari posisi -3,45% menjadi 4,37%, dan meningkat lagi menjadi 6,58% pada tahun 2022 namun kembali mengalami perlambatan menjadi 5,65% pada tahun 2023.

Nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sektor konstruksi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo mulai mengalami perlambatan akibat telah selesainya pembangunan BIY dan infrastruktur pendukungnya. Sektor lain yang mulai mengambil alih peran sebagai pemilik laju pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, terutama selama 3 tahun terakhir. Namun sektor Konstruksi diprediksi masih akan tumbuh seiring dengan akan dibangunnya trase Tol Solo-Yogya-BIY di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,36%, diproyeksikan nilai pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami penguatan pada tahun 2026 menjadi sebesar 4,61%, kemudian pada tahun 2027 diproyeksikan akan kembali naik menjadi 4,88%.

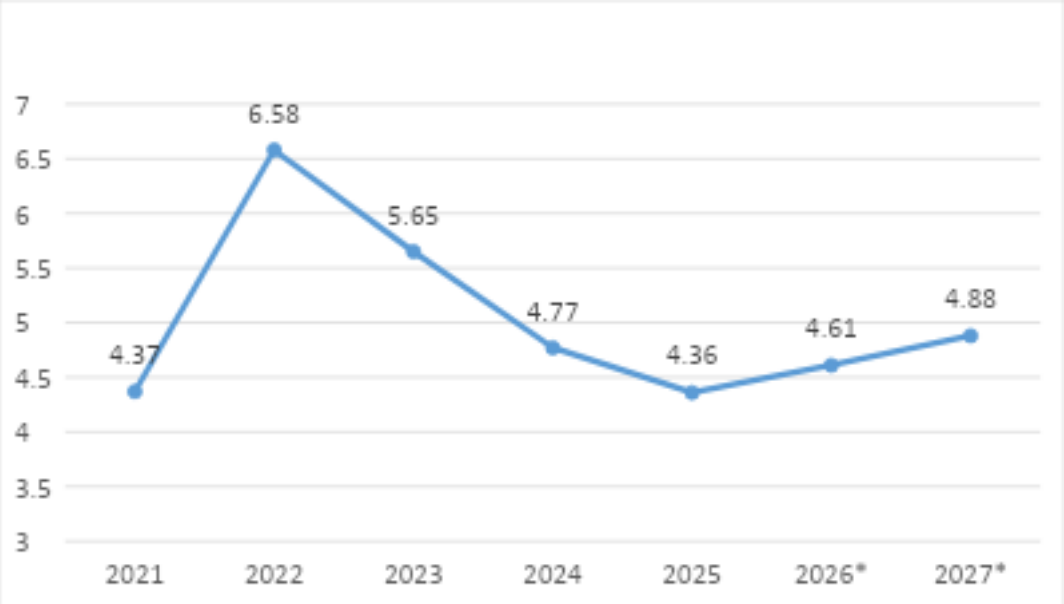

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2026.

*) Angka proyeksi.

Gambar 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2021-2025 dan Proyeksi 2026-2027

3.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2021-2025, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Nilai PDRB per kapita pada tahun 2021 sebesar 28,85 juta Rupiah. Kemudian berturut-turut mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 32,51 juta Rupiah di tahun 2022, kemudian 35,76 juta Rupiah di tahun 2023 dan 37,98 juta Rupiah di tahun 2024 serta 40,07 juta Rupiah pada tahun 2025. Diproyeksikan pada tahun 2026 nilai PDRB per kapita ADHB akan mencapai 42,90 juta Rupiah dan tahun 2027 sebesar 46,10 juta Rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sepanjang 2021-2025 dan proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

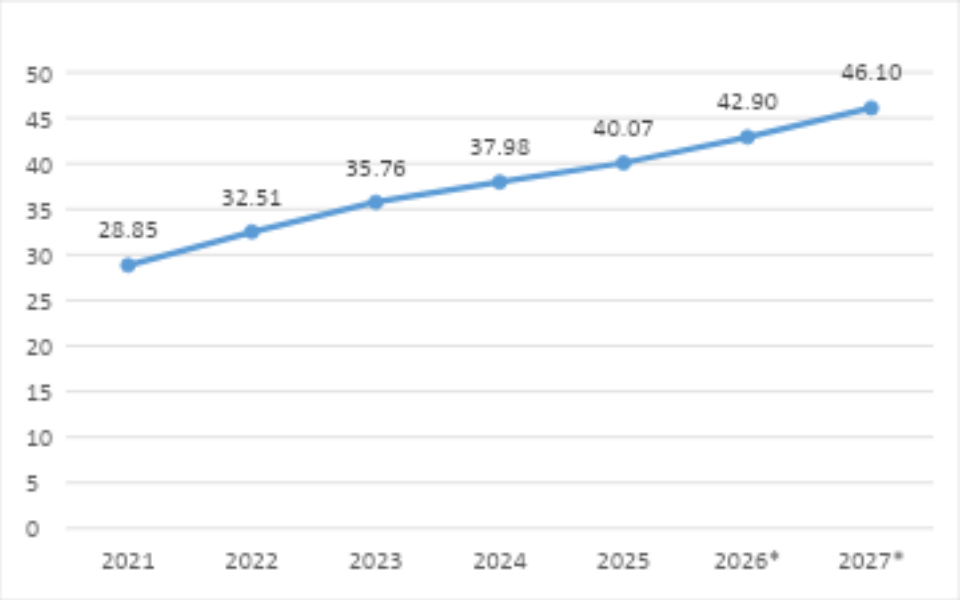

Sumber: BPS Kulon Progo, 2027

*) Angka proyeksi.

Gambar 3.5

PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2021-2025 dan Proyeksi 2026-2027 (juta Rupiah)

3.1.4 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo periode 2020-2025 selalu berada di bawah TPT DIY maupun Nasional. Tahun 2020 dan 2021 angka TPT Kulon Progo meningkat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan Pandemi Covid-19, yaitu pada 3,71% dan 3,69%. Selanjutnya TPT Kulon Progo mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,00%, kemudian menjadi 2,64% pada tahun 2023, dan terus menurun menjadi 2,01% pada tahun 2024, namun sedikit meningkat menjadi 2,14% pada tahun 2025.

Penguatan ekonomi menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di Kulon Progo dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan sebesar 13 ribu penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Kesempatan kerja di Kulon Progo juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT. Melihat tren dan kondisi yang mulai membaik, TPT Kulon Progo diharapkan terus mengalami penurunan. Walaupun TPT tahun 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,13 persen poin dari 2,01% menjadi 2,14%, namun berdasarkan data dan informasi dari BPS bahwa triwulan IV tahun 2025 pembangunan di Kabupaten Kulon Progo cukup pesat dibandingkan triwulan sebelumnya, maka diproyeksikan TPT akan mengalami penurunan. Proyeksi TPT Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 sebesar 2,12% dan 2,10% pada tahun 2027.

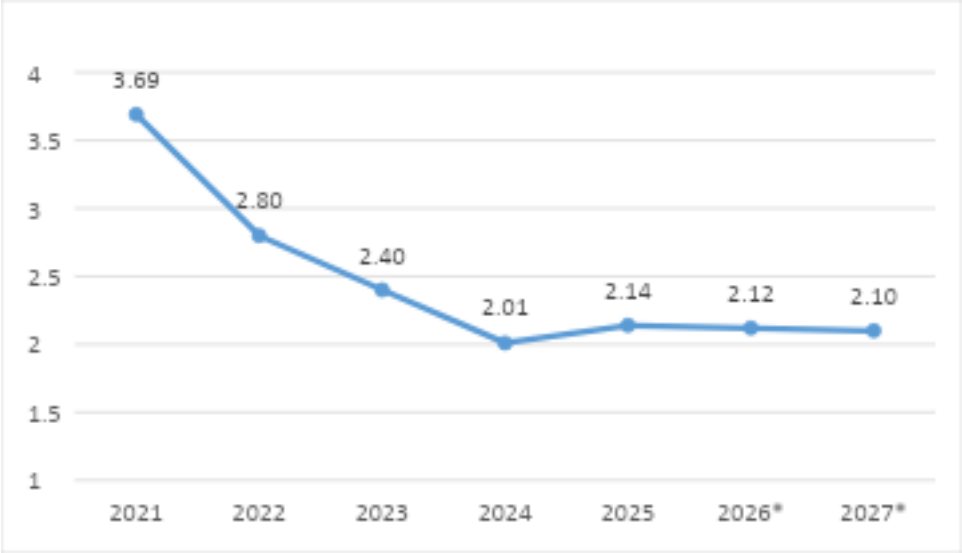

Sumber: BPS Kulon Progo, 2026

*) Angka proyeksi.

Gambar 3.6

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2021-2025 dan Proyeksi 2026 dan 2027

3.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo pada periode 2021-2025 cenderung menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin Kulon Progo pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan dengan dari 18,01% menjadi 18,38%. Namun setelah itu terjadi penurunan tajam di tahun 2022 yakni menjadi 16,39%. Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya perekonomian dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengangkat banyak penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun hingga menjadi 15,62% pada tahun 2024 dan 14,53% di tahun 2025, kemudian diproyeksikan tingkat kemiskinan akan kembali turun pada tahun 2026 menjadi sebesar 14,26% dan 13,26% pada tahun 2027.

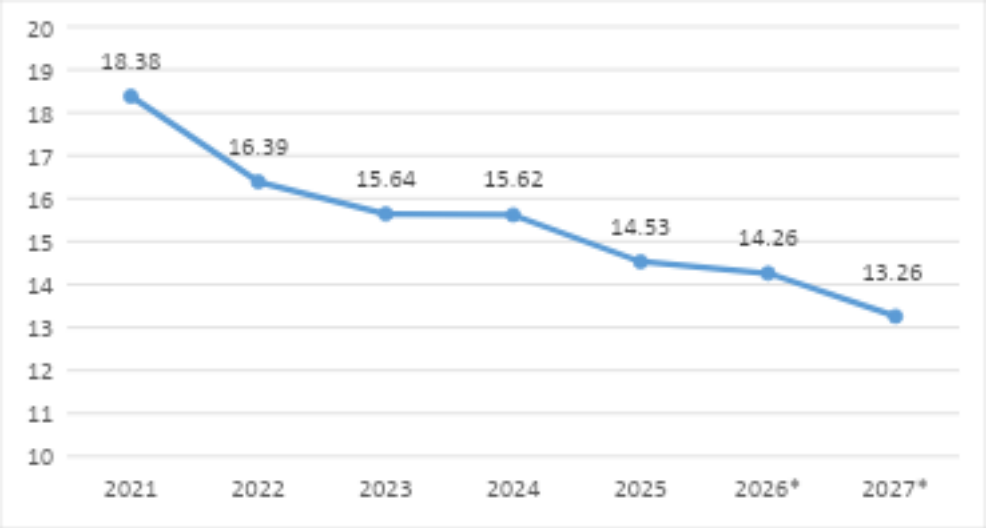

Sumber: BPS Kulon Progo, 2026

*) Angka proyeksi.

Gambar 3.7

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027

3.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2023 memiliki trend meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,373 dan diproyeksikan akan terus menurun menjadi 0,357 di tahun 2025. Beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2018 khususnya proyek BIY dan infrastruktur pelengkap mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari proses ganti rugi, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung. Di sisi lain, masyarakat yang berdomisili di lokasi yang jauh dari proyek konstruksi mempunyai tingkat pengeluaran yang relatif sama dari periode sebelumnya. Akibatnya nilai Rasio Gini sedikit meningkat yang berarti kesenjangan sedikit melebar.

Secara umum, terjadinya penguatan pada sisi ekonomi yang terindikasi dengan tingkat pertumbuhan positif pada semua sektor perekonomian, diharapkan pada semua pelaku ekonomi dapat meningkatkan pengeluarannya sehingga pada tingkat ketimpangan antar kelompok yang terindikasi pada nilai Rasio Gini dapat menurun secara bertahap. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo yang terus tumbuh positif, serta adanya upaya pemerintah meningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, maka diproyeksikan nilai Rasio Gini juga mengalami penurunan sehingga pada tahun 2026 Rasio Gini diproyeksikan akan menurun menjadi 0,345 dan tahun 2027 menjadi 0,342.

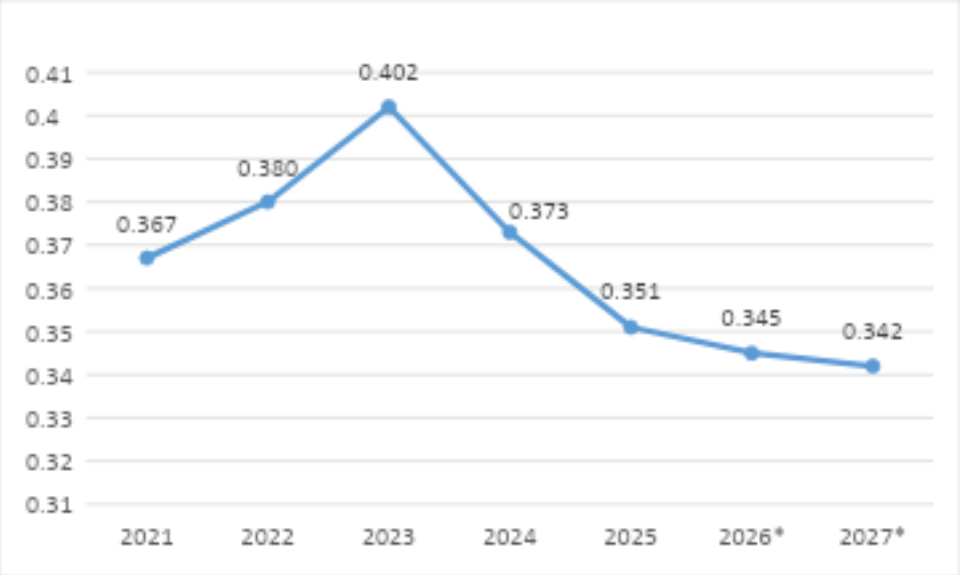

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025;

*) Angka proyeksi.

Gambar 3.8

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027

3.1.7 Sumber Daya Manusia

Indikator yang mampu merangkum berbagai aspek dan dimensi dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan, khususnya pembangunan manusia antarwilayah dan antarnegara maupun perkembangan antarwaktu. United Nation Development Programme (UNDP) merilis Human Development Index (HDI) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990 (Human Development Reports, 1990). Selanjutnya secara berkala, indeks tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia antarwilayah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), HDI diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah Dimensi Kesehatan atau peluang hidup (*longevity*), Dimensi Pendidikan/Pengetahuan (*knowledge*) serta Dimensi Ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2021 IPM Kabupaten Kulon Progo sebesar 74,73 menjadi 76,18 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 76,97. Pada tahun 2026 nilai IPM diproyeksikan meningkat menjadi 77,09 dan tahun 2027 menjadi 77,65.

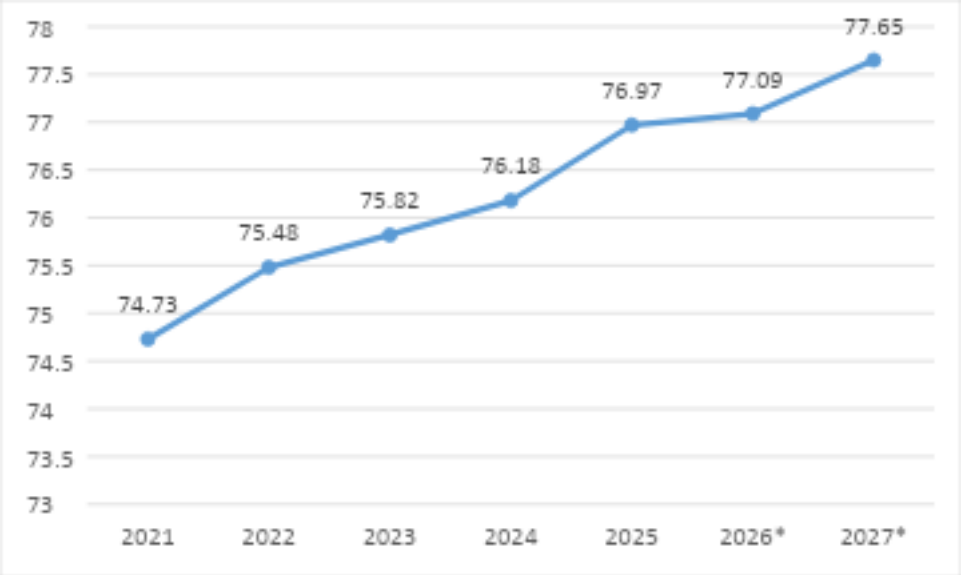

Gambar 3.9

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026.

*) Angka proyeksi

3.1.8 Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi sampai dengan Tahun 2025 mencapai Rp 566.856 juta yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 15.705 juta (2,8%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 551.151 juta (97,2%). Realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 59,77% dibanding tahun sebelumnya yang bernilai Rp 354.783 juta. Untuk mendukung realisasi penanaman modal pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan berbagai kajian investasi, forum investasi, identifikasi lahan potensi investasi, dukungan terkait tata ruang serta peningkatan komoditas unggulan melalui revitalisasi sentra IKM, dukung pada sektor pertanian, dan pemanfaatan PLUT untuk meningktakan kelas UMKM. Kegiatan yang direncanakan tersebut diharapakan dapat mewujudkan investasi yang tidak hanya memberikan peningkatan realisasi investasi tetapi juga memberikan nilai tambah untuk perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan daya saing daerah. Selain mendorong invesatasi baru yang masuk, Pemerintah Kulon Progo juga meningkatkan proses pembinaan, pengawasan, dan verifikasi untuk menghasilkan data realisasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah.

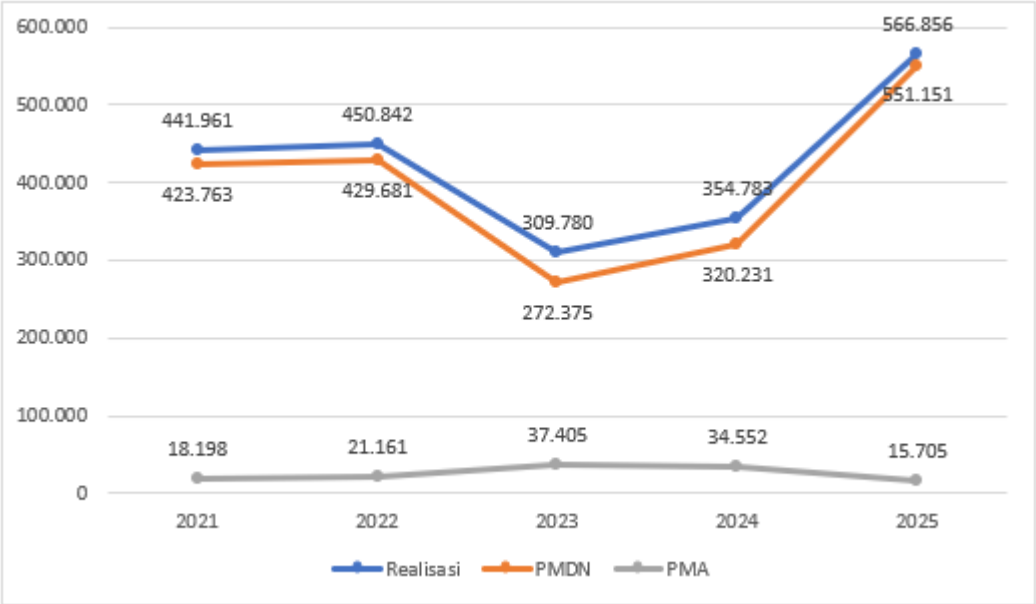

Gambar 3.10

Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan perwujudan siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Selain prinsip-prinsip umum tersebut, kebijakan keuangan daerah harus menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan nasional, yang diwujudkan melalui sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan alokasi anggaran mandatory spending yang meliputi belanja Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah wajib menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai *single application*. Penerapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan adanya integrasi yang utuh antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak terdapat program dan kegiatan dalam KUA-PPAS maupun APBD yang tidak memiliki dasar pada RKPD. Dengan demikian, prinsip keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dapat terjaga secara sistematis dan terukur.

Lebih lanjut, penyusunan kebijakan belanja daerah harus didasarkan pada instrumen penganggaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Penggunaan instrumen tersebut merupakan implementasi prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, dimana setiap alokasi belanja harus memiliki dasar perhitungan yang rasional, wajar, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, anggaran yang disusun tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Terakhir, kebijakan keuangan daerah juga responsif terhadap isu-isu strategis nasional yang bersifat tematik dan menjadi prioritas pemerintah termasuk peningkatan penggunaan produk dalam

negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pengalokasian anggaran untuk isu-isu tersebut menjadi indikator penting dalam menilai relevansi dan keberpihakan kebijakan daerah terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo. Kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan akan menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan, mulai dari penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya diarahkan pada upaya peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penguatan kualitas tata kelola yang akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, perkembangan regulasi, capaian kinerja pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta potensi riil yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan ini diperlukan agar target pendapatan yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan mampu menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2027, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo masih didominasi oleh pendapatan transfer sebagai sumber pendanaan utama pembangunan daerah. Pendapatan transfer diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 62,23% dari total pendapatan daerah (sudah termasuk DAIS (BKK DIY) namun belum termasuk Dana Alokasi Khusus/DAK). Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai 35,29%, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan peran kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 2,48% terhadap total pendapatan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi salah satu fokus dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Kulon Progo. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan melalui perbaikan tata kelola, penguatan pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah. Meskipun demikian, capaian pendapatan daerah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memerlukan perhatian dan pengelolaan secara berkelanjutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PAD antara lain:

a. Potensi beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan daerah;
b. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi

daerah yang belum sepenuhnya optimal;

c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah pada sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah, termasuk pemanfaatan aset daerah, sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta berbagai layanan publik yang menjadi objek pajak dan retribusi daerah;
d. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, strategi peningkatan PAD Tahun 2027 diarahkan pada upaya yang realistis, terukur, dan berkelanjutan melalui:

a. Penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sesuai potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat;
b. Optimalisasi digitalisasi pelayanan dan sistem pemungutan pendapatan daerah guna meningkatkan kemudahan, ketepatan, dan transparansi transaksi;
c. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana pendukung, dan pengelolaan pada sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan daerah, termasuk pelayanan kesehatan, pariwisata, pemanfaatan aset daerah, serta layanan publik lainnya yang menjadi sumber pajak dan retribusi daerah;
d. Penguatan pengelolaan piutang daerah serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah;
e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi melalui pengelolaan yang lebih produktif dan akuntabel;
f. Peningkatan tata kelola, pembinaan, dan evaluasi kinerja BUMD secara berkelanjutan.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur pendapatan Kabupaten Kulon Progo masih ditopang oleh pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan transfer, pemerintah daerah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang diusulkan untuk memperoleh pendanaan transfer pemerintah pusat, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kesiapan pelaksanaan, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menyelaraskan dan menajamkan program-program pembangunan daerah dengan program keistimewaan DIY yang mengacu pada 4 urusan program keistimewaan DIY yakni urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan tata ruang dan urusan pertanahan agar mendapatkan pembiayaan yang integratif dengan Dana Keistimewaan..
c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah serta memperkuat tertib administrasi dan kualitas pelaporan sebagai bagian dari upaya memenuhi indikator yang menjadi dasar pengalokasian berbagai skema transfer pemerintah;
d. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung optimalisasi perolehan pendapatan transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2024 ini terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah,** terdiri dari:
   a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
   b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.
2. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari:
   1) Transfer Pemerintah Pusat

      Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana desa. Dana transfer pemerintah pusat yang tertuang di pendapatan Kabupaten Kulon Progo adalah:

      a. DAU

         DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      b. DAK

         DAK adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

      c. Dana Insentif Fiskal

         Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu.

d. DBH

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

e. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer antar daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

b. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota melalui mekanisme BKK Dana Keistimewaan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur pendapatan daerah juga didukung secara signifikan oleh pendapatan transfer, yang terdiri atas transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, yang penyusunannya telah mengacu pada regulasi yang ditetapkan. Guna memaksimalkan potensi tersebut, langkah-langkah strategis yang diambil meliputi:

1. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan menginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat dan akurat,
2. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dan tertib administrasi sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer daerah.

Gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Tahun 2023 s.d. 2027 Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	APBD 2026	RKPD Tahun 2027
1	2	4	5	6	6	7
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**324.053.666.353,00**	**358.092.879.847,53**	**381.422.361.688,00**	**424.085.256.892,00**	**421.452.788.985,70**
4.1.01	Pajak daerah	96.627.182.570,00	91.693.644.130,00	145.820.896.290,00	156.780.343.700,00	144.094.163.650,00
4.1.02	Retribusi daerah	12.060.319.478	215.272.262.235,09	210.732.864.508,00	242.180.002.681,00	253.060.971.062,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.348.267.703	19.879.182.059,23	17.819.305.307,00	18.569.986.393,00	19.635.471.022,70
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	197.017.896.601,93	31.247.791.423,21	7.049.295.583,00	6.554.924.118,00	4.662.183.251,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.363.943.255.399,00**	**1.395.982.702.035,00**	**1.297.270.275.134,00**	**1.113.427.990.504,00**	**743.203.751.704,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.148.566.329.471,00**	**1.177.030.159.444,00**	**1.141.034.610.800,00**	**933.336.053.000,00**	**654.344.772.000,00**
4.2.01.01	Dana Desa	104.694.668.000,00	105.234.651.000,00	97.403.860.000,00	82.633.102.000,00	0
4.2.01.02	Intensif Fiskal	54.259.365.000,00	36.800.569.000,00	14.827.618.000,00	0	0
4.2.01.03	Dana Perimbangan	989.612.296.071,00				
4.2.01.03	Dana Bagi Hasil (DBH)		19.358.558.000,00	25.615.730.000,00	60.152.584.306,00	
4.2.01.04	Dana Alokasi Umum (DAU)		729.450.461.000,00	733.351.415.000,00	645.780.492.000,00	
4.2.01.05	Dana Alokasi Khusus (DAK)		286.185.920.444,00	269.835.987.800,00	196.358.179.000,00	
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**215.376.925.928,00**	**218.952.542.591,00**	**156.235.664.334,00**	**180.091.937.504,00**	**88.858.979.704,00**

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	APBD 2026	RKPD Tahun 2027
1	2	4	5	6	6	7
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					65.445.014.104
4.2.02.02	Pendapatan Dana Keistimewaan					23.413.965.600
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.000.000.000,00**	**936.000.000,00**	**0**	**0**	**29.597.448.414**
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	936.000.000,00	0	0	**29.597.448.414**
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.695.996.921.752,01**	**1.755.011.581.882,53**	**1.678.692.636.822,00**	**1.566.207.650.973,00**	**1.194.253.989.103,70**

*) Proyeksi 2026 belum memasukkan DAK

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2026 (Data 24 Februari 2026)

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027, yaitu peningkatan sumber daya manusia, inovasi daerah, dan infrastruktur menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga mendukung prioritas pembangunan daerah yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya, optimalisasi tata kelola pemerintahan, inovasi daerah dan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan aerotropolis, serta pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui pemeliharaan rutin jalan, pembangunan infrastruktur di tingkat kapanewon, serta dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Tahun 2027.

Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilakukan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, aset lainnya, serta belanja modal BLUD. Sementara itu, belanja transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan ASN struktural/ fungsional, THR dan gaji ketigabelas ASN, serta penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut juga meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah dan DPRD, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran jaminan kesehatan baik bagi ASN, Kepala Daerah, maupun DPRD. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/ anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan.

c. Belanja Subsidi

Program subsidi bunga pinjaman produktif masyarakat kepada Bank Kulon Progo telah selesai pada tahun 2026.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya yang memiliki surat keterangan terdaftar, atau institusi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ditujukan untuk belanja prioritas program/ kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2027.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Tahun 2023 s.d. 2027 dituangkan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Tahun 2023 s.d. 2027 Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	APBD 2026	RKPD Tahun 2027
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*
5.1	**Belanja Operasi**	**1.290.493.325.958,73**	**1.399.220.075.937,45**	**1.349.469.933.512,00**	**1.338.074.771.139,00**	**1.094.984.966.755,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	678.460.423.981,00	749.270.869.613,81	773.472.002.554,00	714.864.438.043,00	587.363.810.839,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	488.475.760.197,73	519.967.182.561,64	473.424.811.962,00	543.559.281.646,00	460.055.027.376,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	-	0,00	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.556.758.500,00	1.615.328.250,00	1.746.484.500,00	828.225.509,00	192.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	102.941.294.780,00	111.386.580.761,00	82.407.996.096,00	69.696.986.341,00	39.027.524.540,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.059.088.500,00	16.980.114.751,00	18.418.638.400,00	9.125.839.600,00	8.346.604.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**219.397.654.552,00**	**188.155.116.808,23**	**176.645.118.985,00**	**112.348.063.938,00**	**51.282.948.717,87**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.136.746.385,00	1.276.605.632,00	9.020.050.000,00	195.000.000,00	608.615.352,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.671.552.586,00	50.602.165.775,00	33.038.339.461,00	30.538.806.600,00	13.183.801.069,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.912.285.113,00	56.268.253.301,23	53.435.422.554,00	35.060.899.338,00	13.985.144.600,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.049.816.657,00	75.499.283.698,00	78.920.594.570,00	41.984.770.100,00	23.491.135.696,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.375.553.811,00	3.878.075.484,00	2.169.512.400,00	4.468.687.900,00	14.252.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.700.000,00	630.732.918,00	61.200.000,00	99.900.000,00	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.092.325.768,00**	**2.536.789.038,00**	**21.950.602.527,00**	**4.000.000.000,00**	5.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**183.786.789.969,00**	**188.657.841.287,00**	**189.290.148.844,00**	**172.315.675.058,00**	**91.13633.628.858,00**
TOTAL JUMLAH BELANJA		**1.694.770.096.247,73**	**1.778.569.823.070,68**	**1.737.355.803.868,00**	**1.626.738.510.135,00**	**1.242.901.544.330,87**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2026 (data per 24 Februari 2026); Proyeksi belanja tahun 2027 belum termasuk DAK, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; penerimaan pinjaman daerah; dan penerimaan piutang daerah. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah meliputi: penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Arah kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan keuangan daerah dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan APBD. Pembiayaan daerah tetap diarahkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran secara optimal, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. Struktur pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang penggunaannya dioptimalkan untuk mendukung pendanaan program prioritas. Pemanfaatan SiLPA diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis, mendesak, dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal dilakukan secara selektif, berbasis kajian kelayakan, dan memperhatikan kebutuhan riil serta kinerja entitas penerima, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Realisasi dan Proyeksi/ Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 s.d. 2027 dituangkan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 s.d. 2027

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026	RKPD Tahun 2027
1	2	4	5	6	6	7
6.1	**Penerimaan pembiayaan**					
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	165.114.099.031,22	120.467.732.132,50	63.163.167.046,00	62.900.000.000,00	50.000.000.000
6.1.02	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	4.800.000.000	0	0	0

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026	RKPD Tahun 2027
1	2	4	5	6	6	7
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**165.114.099.031,22**	**125.267.732.132,50**	**63.163.167.046,00**	**62.900.000.000,00**	**50.000.000.000**
6.2	**Pengeluaran pembiayaan**					
6.2.01	Penyertaan modal (Investasi) daerah	45.873.192.403,00	7.307.807.724,00	4.500.000.000,00	2.369.140.838,00	1.352.444.773
6.2.02	Pembayaran cicilan utang jatuh tempo	-	4.800.000.000,00			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**45.873.192.403,00**	**12.107.807.724,00**	**4.500.000.000,00**	**2.369.140.838,00**	**1.352.444.773**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**119.240.906.628,22**	**113.159.924.408,50**	**58.663.167.046,00**	**60.530.859.162,00**	**48.647.555.227**

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025 (Data per 24 Februari 2026)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029.

Rumusan tujuan dan sasaran daerah beserta indikator dan target pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2026-2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	
					Realisasi	Tahun ke-2	Tahun ke-3
					2025	2026	2027 (Penargetan dari Prov. DIY)
1	**Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**76,97**	**77,09-77,93**	**77,65-78,61 (79,28 - 80,05)**
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,71	75,78 - 75-86	75,86 - 76,07
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,55	14,58-14,64	14,64-14,70
2	**Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo**		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**14,53**	**13,69 - 14,69**	**13,26 - 14,26 (13,26-14,26)**
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.499	11.728-12.005	12.030-12.346
3	**Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius**		**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Nilai**	**63,31**	**65,00-67,00**	**66,00-68,00**
		Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,91	60,50-61,50	61,00-62,00
4	**Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah**		**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,36**	**4,61-4,95**	**4,88-5,16 (5,17-6,37)**
		Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	40,63	41,03 - 42,23	41,04 - 42,24
			PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	40.069,34	42.865-43.357	45.874-46.666
			Nilai PDRB Sektor Penyediaan	Miliar rupiah	728,16	766,86 - 1.360,34	857,40 - 1.504,26

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	
					Realisasi	Tahun ke-2	Tahun ke-3
					2025	2026	2027 (Penargetan dari Prov. DIY)
			Akomodasi Makan Minum				
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.852,33	2.048,17 - 2.159,39	2.216,00 - 2.349,08
5	**Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah**		**Rasio Gini**	**Nilai**	**0,351**	**0,345-0,330**	**0,342-0,327 (0,339 - 0,345)**
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,14	2,12-1,62 `	2,10-1,60 (1,74-2,06)
6	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**85,71**	**87,90**	**88,20**
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)*	Nilai	4,19	1,41 - 1,50	1,41-1,50
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A [83,87]	A [85,3]	A [86,4]
			Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,856	86,90	86,95
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,195	3,23	3,24
7	**Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis**		**Crime Rate**	**Nilai**	**67,04**	**61,00**	**60,00**
		Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Nilai	6,99	7,42	7,46
			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	
					Realisasi	Tahun ke-2	Tahun ke-3
					2025	2026	2027 (Penargetan dari Prov. DIY)
8	**Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur**		**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**%**	**88,70**	**88,75**	**88,80**
		Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,90	89,95	90,00
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	49,54	50,15	51,03
			Tingkat Pelayanan Jalan (*level of service)*	Nilai	A (0,09)	A / Arus Bebas [0-0,2]	A / Arus Bebas [0-0,2]
9	**Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana**		**Indeks Risiko Bencana**	**Nilai**	**152,65**	**135,07 - 140,07**	**133,44 - 138,44**
		Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	75,46	69,84	69,93
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,67	0,68	0,69

*) Transisi Indikator Baru. Realisasi 2025 adalah Indeks SPBE, target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi

Sumber data: Bapperida Kulon Progo, 2026

4.2 Tema Pembangunan Tahun 2027

Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan penahapan pembangunan pada RPJMD Kulon Progo 2025-2029, tema pembangunan RKPD DIY Tahun 2027, dan tema indikator RKP tahun 2027. Tema pembangunan pada RKPD Tahun 2027 yaitu:

"Peningkatan Sumber Daya Manusia, Inovasi Daerah, dan Infrastruktur menuju Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Peningkatan SDM merupakan sebuah upaya atau proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan manusia secara terus-menerus (Chris Rowley dan Keith Jakcson, 2012).

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda).

Infrastruktur adalah seluruh struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial (seperti bangunan, pasokan listrik, jalan), yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan (Laeli Aizah, 2020).

Pembangunan Ekonomi diartikan sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (Michael P. Todaro, 2006)

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan Masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan Wilayah (Bappenas)

Pembangunan Berkelanjutan: pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Bappenas, 2016).

Selanjutnya untuk menjawab perwujudan tema tersebut, ditetapkan 5 prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya**

   Prioritas ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi ketidaktercapaian sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan juga menjawab isu strategis daerah yaitu sumber daya manusia yang belum kompetitif jika dibandingkan dengan daerah lain baik di DIY maupun sebagian kecil wilayah di Indonesia.

   Fokus prioritas ini adalah peningkatan upaya pemerintah kabupaten untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan kebudayaan serta berbagai kebijakan manajemen SDM dan berbagai pelatihan keterampilan yang diperlukan masyarakat Kulon Progo dan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

2. **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik**

   Prioritas ini ditujukan untuk:

a. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah serta optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
c. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
d. Mewujudkan *good governance* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
e. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan ekonomi dan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sesuai dengan tema pembangunan, pembangunan ekonomi di sini juga diartikan sebagai pembangunan ekonomi inklusif di mana selain fokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, juga perluasan akses dan kesempatan untuk seluruh golongan masyarakat.

Selain pemberdayaan ekonomi, prioritas ini juga bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah masih tingginya angka kemiskinan. Fokus dari prioritas ini spesifik pada intervensi penduduk miskin melalui klaster pertama penanggulangan kemiskinan yaitu pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan perlindungan terhadap keterlantaran.

Perlindungan sosial dilakukan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dengan fokus pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Lokal, fasilitasi terhadap penerima bantuan sosial disertai dengan edukasi, pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, pemberian bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, penanganan kawasan kumuh, bantuan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan.

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Kulon Progo, fokus utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan daerah. Hal ini menjadi perhatian karena, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kulon Progo masih berada di posisi atas dengan jumlah kemiskinan yang cukup tinggi. Program penanggulangan kemiskinan dapat efektif jika program kegiatan didasarkan pada basis data kemiskinan yang akurat dan pemetaan wilayah lokasi program yang tepat.

Program penanggulangan kemiskinan dapat efektif jika program kegiatan didasarkan pada basis data kemiskinan yang akurat dan pemetaan wilayah lokasi program yang tepat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan strategi kebijakan dengan menentukan lokus intervensi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasar 7 (tujuh) bidang prioritas, meliputi:

1. **Bidang Kemiskinan Konsumsi**

   Analisis penentuan lokasi prioritas berdasarkan data jumlah kemiskinan desil 1 dan 2 dengan jumlah kepala keluarga perempuan tidak bekerja desil 1 dan 2.

2. **Bidang Pendidikan**

   Analisis lokasi prioritas bidang pendidikan ditentukan berdasarkan sebaran persentase penduduk miskin pada desil 1 dan desil 2 yang tinggi dan sebaran penduduk usia 12-17 tahun tidak sekolah yang tinggi di tiap-tiap Kapanewon. Penduduk usia 12-17 tahun yang tidak sekolah diambil mengingat berdasarkan analisis determinan di bidang Pendidikan, indikator yang perlu ditingkatkan aalah angka partisipasi murni (APM) SMP dan sederajat di Kabupaten Kulon Progo.

3. **Bidang Kesehatan**

   Penentuan Lokasi prioritas program bidang kesehatan di Kulon Progo berdasarkan analisis kuadran menggunakan indikator prevalensi stunting (indikator utama) dengan indikator gizi buruk (indikator pendukung). Wilayah prioritas yang dipilih untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan urutan prevalensi stunting dan gizi buruk tertinggi per kapanewon.

4. **Bidang Ketenagakerjaan**

   Analisis prioritas lokasi bidang ketenagakerjaan ditentukan berdasarkan sebaran persentase penduduk miskin pada desil 1 dan desil 2 yang tinggi dan sebaran penduduk usia 15-65 tahun tidak bekerja yang tinggi di tiap-tiap Kapanewon. Penduduk usia 15-65 tahun yang tidak sekolah diambil mengingat berdasarkan analisis determinan di bidang ketenagakerjaan, indikator yang perlu dicapai ialah menurunkan Angka Pengangguran Terbuka. Sementara jika mengacu pada kategori usia angkatan kerja nasional, penduduk yang termasuk usia angkatan kerja ialah yang berusia 15-65 tahun.

5. **Bidang Kesetaraan Gender**

   Penentuan lokasi prioritas program bidang kesetaraan gender di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan analisis kuadran menggunakan indikator jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak (indicator utama) dengan indikator jumlah penanganan kasus (indicator pendukung), serta jumlah UMKM yang dikelola perempuan (indicator utama) dengan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan UMKM (indicator pendukung).

6. **Bidang Kesejahteraan Sosial**

   Penentuan lokasi prioritas bidang sosial Kabupaten Kulon Progo dengan analisis kuadran menggunakan indikator jumlah disabilitas (indikator utama) disandingkan dengan jumlah disabilitas yang telah menerima bantuan (indikator pendukung) dan jumlah penduduk miskin desil 1-2 (indikator pendukung).

7. **Bidang Infrastruktur Dasar**

   Penentuan lokasi prioritas bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Kulon Progo dengan analisis kuadran menggunakan indikator utama jumlah kemiskinan pada desil 1 - 2 disandingkan dengan jumlah akses sanitasi belum layak. Wilayah atau Kapanewon yang akan menjadi prioritas adalah berdasarkan jumlah akses sanitasi paling banyak dengan jumlah jumlah penduduk miskin yang paling banyak.

Kemudian untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitasi ibadah haji, saat ini Kabupaten Kulon Progo sudah membuka layanan embarkasi dan debarkasi haji mulai tahun 2026. Keberadaan Embarkasi Haji di Kabupaten Kulon Progo berpusat pada penggunaan layanan berbasis hotel di kawasan Yogyakarta International Airport (YIA), yang menjadi inovasi pertama di Indonesia. Fasilitas ini memberikan efisiensi waktu, kenyamanan bagi jemaah, dan melayani ribuan jemaah dari wilayah DIY serta Karesidenan Kedu, Jawa Tengah.

Berikut adalah analisis potensi dampaknya terhadap pembangunan daerah:

1. Sektor Pariwisata dan Perhotelan

a. Dampak Langsung: Konsep embarkasi berbasis hotel menggandeng sejumlah fasilitas di sekitar YIA, seperti Novotel dan Ibis, yang memberikan dorongan okupansi selama musim haji

b. Potensi Jangka Panjang: Mendorong investasi infrastruktur akomodasi baru, MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), dan memperkuat citra kawasan Temon sebagai pusat transit premium.

2. Sektor Jasa & Perdagangan: Membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat DIY, khususnya melalui peningkatan layanan akomodasi perhotelan, biro perjalanan (travel), dan menjamurnya bisnis oleh-oleh serta grosir perlengkapan ibadah di sekitar bandara
3. Sektor Transportasi: Mendorong lonjakan aktivitas mobilitas darat dan udara menuju kawasan bandara YIA, memicu pengembangan rute pendukung, serta efisiensi waktu tempuh bagi jemaah asal DIY dan Jawa Tengah bagian selatan
4. Penyediaan Infrastruktur Pendukung: Mendorong percepatan fasilitas pendukung skala besar, seperti pelebaran akses jalan, penyediaan fasilitas *One Stop Service* imigrasi-kesehatan, dan ruang tunggu representatif.
5. Pelayanan Publik: Mempercepat birokrasi layanan haji menjadi lebih terpadu, singkat, dan ramah lansia berkat penerapan konsep karantina berbasis hotel dibandingkan asrama konvensional
6. Optimalisasi Aset Daerah dan Bandara (YIA)

   Dampak Langsung: Mengurangi kepadatan di Asrama Haji Donohudan dan Bandara Adi Soemarmo. Ini memaksimalkan utilitas penerbangan internasional YIA dan infrastruktur penunjang di sekitarnya
7. Tantagan Sektor UMKM Lokal
   a. Evaluasi Dampak Ekonomi: Pada penyelenggaraan awal, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum merasakan dampak maksimal atau lonjakan omzet yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh lokasi titik kumpul pengantar jemaah yang terlalu spesifik, terbatasnya durasi transit, dan rendahnya mobilitas pengantar.
   b. Arah Pengembangan: Pemkab Kulon Progo terus melakukan evaluasi guna mendekatkan pusat kegiatan UMKM (seperti di Ruang Terbuka Publik Bulak Tabak) dengan akses pergerakan jemaah dan pengantar agar perputaran ekonomi lokal bisa merata
8. Peningkatan Citra dan Pengembangan Ekosistem
   a. Dampak Langsung: Sistem layanan modern (*One Stop Service*) di area embarkasi memangkas alur birokrasi, pemeriksaan dokumen, hingga kesehatan menjadi lebih cepat

b. Potensi Jangka Panjang: Membuka peluang besar pengembangan *Islamic Center*, serta pasar perjalanan umrah dan haji khusus dengan pangsa pasar dari Jawa Tengah bagian selatan dan barat.

4. Pengembangan Kawasan Aerotropolis

Prioritas ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan kawasan di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta sebagai pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya dan pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya terutama perkotaan Wates. Prioritas ini juga upaya untuk meningkatkan akses wilayah di Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bila dikaitkan dengan Tema RKP 2027 yang mengandung kata kunci produktivitas, investasi, industri maka perencanaan pembangunan daerah di Kuloin Progo Tahun 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Konektivitas dan Produktivitas: Mengoptimalkan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi dengan Jalan Nasional, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), jalur kereta api bandara, serta rencana Jalan Tol Solo-YIA guna mempercepat arus logistik dan mobilitas di kawasan selatan Pulau Jawa.
b. Daya Tarik Investasi: Menjadikan kawasan ini pusat pertumbuhan ekonomi baru berskala nasional hingga internasional bagi sektor jasa, MICE *(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),* pariwisata, serta pembangunan fasilitas pendukung terpadu di sekitar bandara.
c. Hilirisasi dan Industrialisasi: Mendorong kawasan industri di sekitar YIA yang fokus pada pengolahan, perdagangan, dan jasa guna membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Pengembangan kawasan Aerotropolis diarahkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing wilayah melalui pengembangan pusat kegiatan berbasis bandar udara, kawasan industri, logistik, perdagangan, dan jasa. Namun demikian, pengembangan kawasan tersebut perlu dilaksanakan secara terencana dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian. Prinsip tersebut menjadi penting agar pembangunan tidak mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian produktif yang berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pengembangan Aerotropolis harus disinergikan dengan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Penetapan zona perlindungan pertanian menjadi instrumen penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan, sehingga pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan yang memiliki tingkat kesesuaian lebih tinggi dan tidak mengganggu lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung pangan.

Dalam konsep pengembangan Aerotropolis, salah satu program prioritas yang diusung adalah **Smart Agriculture**, yaitu pendekatan pembangunan pertanian yang berorientasi pada pelestarian potensi lokal melalui perlindungan lahan pertanian, seperti Lahan Surjan, Lahan Sawah Dilindungi

(LSD), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta pengembangan komoditas pertanian unggulan. Program ini didukung dengan penerapan inovasi dan adaptasi teknologi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian di tengah perkembangan kawasan Aerotropolis.

5. **Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan**

   Prioritas ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dengan memadukan aspek kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup dengan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pabaik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Fokus pada prioritas ini antara lain melalui program Pengendalian Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Persampahan; Peningkatan kapasitas SDM tangguh bencana; dan pengadaan sarpras penanganan bencana.

   Selain itu, fokus kerja pada prioritas ini adalah penyelesaian pembangunan jaringan internet di seluruh Perangkat Daerah dan kalurahan prioritas, penyelesaian regulasi penataan ruang, peningkatan sarana prasarana kerja, dan Peningkatan Inovasi Daerah.

4.3 Evaluasi Efektifitas Program Prioritas 2025-2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mencapai 76,97 atau 100,97 persen dari target 76,00-76,23 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Usia Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target IPM di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 mencapai 14,53 persen atau mencapai 100 persen dari target 14,12-15,12 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan, dimana pada tahun 2025 mencapai 100 persen dari target 10.732,40-11.732,40 ribu rupiah. Keadaaan ini menandakan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program pembangunan sektor perlindungan dan pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi, penguatan kelembagaan dan peningatan partisipasi masyarakat, berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 realisasi masih menggunakan angka realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 63,31 atau mencapai 98,92 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 64,00-66,00 atau sebesar 95,58 persen dari target yang ditetapkan dalam RKPD-P sebesar 66,24-67,50 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target IPK di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program pembangunan sektor pengembangan seni adat dan

tradisi, pengembangan sejarah dan bahasa sastra, pengelolaan kekayaan budaya berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

PDRB Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) pada tahun 2025 menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mencapai 4,36 persen atau 91,21 persen dari target yang sebesar 4,78-5,38 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target LPE di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program pembangunan sektor perindustrian, pertanian, koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata, pelayanan investasi, berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mencapai 0,351 atau mencapai 105,65 persen dari target 0,372-0,402 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2025 mencapai 100 persen dari target 1,95-2,55. Hal ini mengisyaratkan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target rasio gini di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program prioritas pembangunan di sektor pemerataan insfrastruktur, penataan ruang, penanaman modal, perlindungan sosial, ketenagakerjaan berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mendasarkan pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/255/RB.06/2026 mencapai sebesar 85,71 atau mencapai 97,95 persen dari target 87,50 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target IRB di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program prioritas pembangunan sektor keuangan, administrasi kepegawaian, keakuratan perencanaan dan pencapaian target pembangunan, pelayanan publik, administrasi kearsipan dokumen publik serta pengawasan berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

Angka Crime Rate Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah sebesar 55,65 atau mencapai 110,24 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu 62,00 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Angka capaian Crime Rate sebesar 55,65 artinya bahwa telah terjadi kejadian kejahatan sejumlah 55-56 pada setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Kulon Progo. Keadaaan ini menandakan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target penurunan angka kriminal (Crime Rate) di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program pembangunan sektor trantibum dan penegakan peraturan daerah berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

Capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2025 adalah sebesar 88,70 atau mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 88,70 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan daerah ini didukung oleh capaian indikator sasaran daerah Persentase Kesesuaian Pola Ruang; Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan Tingkat Pelayanan Jalan (level of service/LOS). Hal ini mengindikasikan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kulon Progo

berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program prioritas pembangunan di sektor pekerjaan umum, perhubungan, sarana prasarana bina marga, ciptakarya, permukimam dan pengairan serta penataan ruang dan pemanfaatan ruang berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo

Capaian Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 adalah sebesar 107,52 atau mencapai 124,13 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 136,71-141,71 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Keadaaan ini menandakan bahwa program-program prioritas pendukung pencapaian target IRB di Kulon Progo berjalan efektif baik di tahun 2025 dan dilanjutkan tahun 2026 serta direncanakan untuk terus dilaksanakan di tahun 2027. Program-program prioritas pembangunan di sektor penananggulan bencana, infrastruktur, perldinungan sosial dan lingkungan hidup berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

4.4 Keselarasan Tema RKPD Tahun 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah ***"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan".*** Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025-2045 yakni:

1. Mewujudkan manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman & demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah sasaran-sasaran pokok. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan panduan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan holistik. Secara esensial, sasaran ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Sasaran-sasaran pokok tersebut yaitu:

A. Misi 1
   1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
   2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
   3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
   4. Meningkatnya pengembangan & pelestarian kebudayaan
   5. Terwujudnya Kesetaraan Gender
B. Misi 2
   1. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah
   2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah
   3. Terjangkaunya Pemenuhan Kebutuhan Bermukim
C. Misi 3
   1. Meningkatnya Regulasi dan Tata Kelola yang Akuntabel
   2. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

3. Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman

D. Misi 4

1. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas
2. Terwujudnya Daerah yang Berketahanan dan Berdaulat Pangan
3. Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045, dengan penekanan pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Pada periode satu (2025-2029), arah kebijakan akan berfokus dalam penguatan fondasi pembangunan daerah. Hal ini meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari Kabupaten Kulon Progo. Ketika kondisi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi lingkungan dalam kondisi baik kemudian dengan dukungan kualitas pemerintahan yang mumpuni maka dapat menjadi penggerak pembangunan daerah di periode selanjutnya yang akan masuk menuju percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan penegasan tersebut, maka tema pembangunan 2027 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia, Inovasi Daerah, dan Infrastruktur menuju Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** telah selaras dengan penekanan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD 2025-2029. Penekanan prioritas adalah pada penguatan fondasi pembangunan baik dari segi sumber daya manusia dan juga infrastruktur.

4.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Tahun 2027 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Tema pembangunan 2027 yaitu **"Peningkatan Sumber Daya Manusia, Inovasi Daerah, dan Infrastruktur menuju Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029 pada tahun ketiga (tahun 2027) yaitu "**Penguatan Ekonomi Lokal dan Tata Kelola: Mendorong pemberdayaan UMKM, inovasi produk lokal, dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik**". Adapun penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2027 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-2029 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Keselarasan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	
Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027
Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya; Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya; dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto; PDRB Per Kapita (ADHB); Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	
Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	Rasio Gini	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Pemerintahan Digital (Indesk Pemdi); Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP); Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK); Indeks Kepuasan Masyarakat; Indeks Maturitas SPIP	Optimalisasi tata kelola pemerintahan, inovasi daerah dan pelayanan publik
Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	Crime Rate	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI); Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	Optimalisasi tata kelola pemerintahan, inovasi daerah dan pelayanan publik
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	1. Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum; Tingkat Pelayanan Jalan (level of service)	
Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

4.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 mencantumkan tujuan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 adalah:

1. Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat
2. Mengecilnya ketimpangan wilayah
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik

Adapun sasaran pembangunan tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Keselarasan prioritas pembangunan dalam RKPD Kulon Progo 2027 dengan RPJMD DIY 2022-2027 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kulon Progo 2027 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027

Tujuan Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027	Indikator	Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027		Prioritas Pembangunan 2027
		Sasaran	Indikator	
Terwujudnya kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI=Inclusive Growth Index)	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan soaial budaya; 3. Pengembangan kawasan aerotropolis
	Indeks Kebahagiaan	Penghidupan Ekonomi yang layak	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 2. Pendapatan Per Kapita (Rp Juta) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4. Inflasi	
		Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan soaial budaya;

Tujuan Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027	Indikator	Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027		Prioritas Pembangunan 2027
		Sasaran	Indikator	
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada kawasan belum maju	1. Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Demokrasi Indonesia	Optimalisasi tata kelola pemerintahan, inovasi daerah dan pelayanan publik
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

4.7 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027

Dengan mengusung Tema Pembangunan Daerah pada RKPD DIY 2027 yakni **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Perwujudan Pancamulia** dimana kebijakan ini dititikberatkan pada pemerataan pembangunan di wilayah selatan, penguatan Reformasi Kalurahan, dan penuntasan target jangka menengah. Sedangkan Tema Pembangunan Daerah pada RKPD Kulon Progo 2027 yakni **Peningkatan Sumber Daya Manusia, Inovasi Daerah, dan Infrastruktur menuju Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.** Oleh sebab itu penyelarasan kedua tema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Visi Ekonomi yang sama yakni Kulon Progo mengadopsi penuh frasa "pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dari Pemda DIY untuk menekan ketimpangan wilayah dengan Kabupaten/Kota lain di DIY maupun dalam internal daerah Kulon Progo.
b. Akselerasi Wilayah Selatan: Pemda DIY menargetkan lonjakan PDRB dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul hingga 40,24%. Kulon Progo menjawabnya dengan berfokus pada penguatan infrastruktur ekonomi dengan dukungan beberapa program khususnya di wilayah pantai selatan seperti Aerotropolis, JJLS, dan Kawasan Pariwisata.
c. Peningkatan Kualitas SDM: Arahan Gubernur DIY untuk memprioritaskan indikator kualitas SDM dan kemiskinan diturunkan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo ke dalam pilar "Peningkatan Sumber Daya Manusia"
d. Inovasi dan Tata Kelola Modern: Fokus DIY pada digitalisasi dan ketahanan daerah diselaraskan lewat strategi "Inovasi Daerah" di tingkat kabupaten

Sedangkan pada tahap penyelarasan prioritas pembangunan DIY dengan Kulon Progo adalah sampai dengan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2027 ini disusun, prioritas pembangunan DIY tahun 2027 yang bersumber dari RKPD DIY tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2027 telah selaras dengan prioritas pembangunan DIY pada tahun 2027. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD DIY 2027 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2027

No	Prioritas Pembangunan DIY 2027	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2027
1.	Penurunan tingkat kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	● Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan ● Pengembangan kawasan aerotropolis
3.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	● Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan ● Pengembangan kawasan aerotropolis
5.	Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan, inovasi daerah dan pelayanan publik
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

4.8 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2027

Pada RKP tahun 2027, terdapat 8 prioritas nasional (PN) yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusiar
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Birua
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2027 dengan Prioritas Nasional 2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Keselarasan Prioritas Nasional pada RKP 2027 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2027

No	Prioritas Nasional 2027	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2027	Indikator Tujuan Daerah	Target 2027
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	77,65-78,61 66,00-68,00
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Kemiskinan - Rasio Gini	4,88-5,16 13,26 - 14,26 0,342-0,327
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	● Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya ● Pengembangan kawasan aerotropolis	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Pertumbuhan Ekonomi - Rasio Gini - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	77,65-78,61 66,00-68,00 4,88-5,16 0,342-0,327 88,80

No	Prioritas Nasional 2027	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2027	Indikator Tujuan Daerah	Target 2027
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	77,65-78,61 66,00-68,00
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Kemiskinan - Rasio Gini	4,88-5,16 13,26 - 14,26 0,342-0,327
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Kemiskinan - Rasio Gini	4,88-5,16 13,26 - 14,26 0,342-0,327
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	● Optimalisasi tata kelola pemerintahan, inovasi daerah dan pelayanan publik ● Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya	- Indeks Reformasi Birokrasi - Crime Rate - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	88,20 60,00 77,65-78,61 66,00-68,00
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	● Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan ● Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	88,80 77,65-78,61 66,00-68,00

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

4.9 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama

Untuk menjamin keselarasan Kegiatan Prioritas Utama, disusun dukungan pemerintah kabupaten terhadap Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama. Keselarasan Prioritas hingga dukungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama

NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027	KETERANGAN
1	Prioritas Nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2	Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		3. Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		4. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		6. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		7. Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027	KETERANGAN
		8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		9. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		10. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		11. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		12. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
		13. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
3	Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	14. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		15. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		16. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027	KETERANGAN
4	Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	17. Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		18. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		19. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		20. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		21. Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In- Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		22. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		23. Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027	KETERANGAN
		24.Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		25.Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		26.nvestasi Pelayanan Kesehatan Primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		27.Penurunan Kematian Ibu dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		28.Pencegahan dan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		29.Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		30.Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027	KETERANGAN
		31.Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	32.Pengembangan hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
6	Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	33.Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		34.Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		35.Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
7	Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	36.Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
		37.Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027	KETERANGAN
8	Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	38.Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
		39.Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Dari 8 Prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2027 yang didalamnya memuat total 83 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang telah diselarasakan dengan bebarapa Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut misalnya dapat digambarkan pada Prioritas Nasional 1 yakni Prioritas Nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dengan KPU Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), maka di daerah telah didukung dan diselaraskan dengan Program PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK. Sedangkan pada Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dengan KPU Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau telah diselaraskan dengan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA). Tercatat ada sebanyak 39 KPU yang telah diselaraskan dengan program dan kegiatan pemvangunan yang ada dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo 2027 seperti terlihat dalam Tabel 4.6 diatas.

4.10 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Untuk meningkatkan keselarasan Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Kulon Progo, maka Pemkab Kulon Progo melaksanakan beberapa intervensi pendukung Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT INTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B 11 (PEMBANGUNAN KOTA TERPADU - INVESTASI)	Kawasan Aerotropolis YIA (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan)	Pembangunan Pantai Glagah - Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo	Pantai Glagah - Pantai Congot	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Priwisata
		Persiapan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta– Kulon Progo (YIA)	Exit tol Yogyakarta YIA	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pertaru
B17 (PEMBANGUNAN KOTA TERPADU - INDUSTRI)	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat (D.I Kalibawang)	Daerah Irigasi Kalibawang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPKP
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPKP
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serang dan DAS Progo	DAS Progo	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Dalam mendukung pengembangan Kawasan Aerotropolis Yogyakarta International Airport (YIA), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan penetapan kebijakan pelaksanaan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas pembangunan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi sangat penting mengingat tingginya tekanan investasi dan perubahan penggunaan lahan di kawasan Aerotropolis yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan produktif, berkembangnya kawasan terbangun yang tidak terkendali, serta munculnya kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

Pelaksanaan kebijakan penataan ruang dilakukan melalui beberapa instrumen pengendalian yang saling melengkapi, yaitu:

1. Pengenaan Sanksi Administratif

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya. Sanksi tersebut dapat berupa: teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan pembangunan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi kegiatan; pencabutan persetujuan atau perizinan berusaha; pembatalan persetujuan bangunan gedung apabila tidak sesuai ketentuan tata ruang; pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang; pemulihan fungsi ruang; dan pengenaan denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat pelanggaran dan tetap mengedepankan asas pembinaan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan umum.

2. Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi, dan Penertiban Pemanfaatan Ruang (WASMATLITRIK)

Sebagai bentuk pengendalian yang bersifat preventif dan korektif, Pemerintah Daerah juga melaksanakan kegiatan WASMATLITRIK secara berkala melalui:

- pemantauan perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan Aerotropolis;
- pengawasan kesesuaian pembangunan terhadap RTRW, RDTR, KKPR, dan ketentuan zonasi;
- identifikasi dini terhadap indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang;
- evaluasi terhadap perkembangan investasi dan perubahan penggunaan lahan;
- verifikasi lapangan terhadap laporan masyarakat;
- penertiban bangunan maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pelaksanaan WASMATLITRIK dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Satpol PP, Dinas PUPKP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kapanewon dan Kalurahan, serta instansi/ Perangkat Daerah terkait lainnya.

3. Penegakan Hukum oleh PPNS Penataan Ruang

Apabila ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang, melakukan pemeriksaan dokumen dan perizinan, pemeriksaan lapangan,

mengumpulkan bukti dan menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan tata ruang sesuai kewenangannya.

Keberadaan PPNS menjadi instrumen penting dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran tata ruang, khususnya terhadap pembangunan komersial, pergudangan maupun permukiman yang berkembang tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang di kawasan Aerotropolis.

4. Penerapan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang

Selain pendekatan penegakan hukum, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai instrumen ekonomi untuk mengarahkan pemanfaatan ruang.

Insentif diberikan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat yang memanfaatkan ruang sesuai rencana tata ruang, antara lain melalui:

- percepatan pelayanan perizinan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- prioritas penyediaan infrastruktur dasar;
- kemudahan pelayanan investasi pada lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW dan RDTR;
- prioritas program pembangunan kawasan;
- kemudahan akses terhadap program pemerintah sesuai kewenangan daerah.

Sebaliknya, disinsentif diterapkan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan pemanfaatan ruang, antara lain melalui:

- pembatasan pemberian persetujuan pemanfaatan ruang;
- pembatasan pembangunan infrastruktur pendukung;
- pengetatan persyaratan teknis pembangunan;
- pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
- pengenaan kewajiban pemulihan lingkungan atau kompensasi sesuai ketentuan;
- penerapan sanksi administratif apabila pelanggaran tetap dilakukan.

Pendekatan insentif-disinsentif bertujuan mengarahkan investasi agar terkonsentrasi pada zona-zona yang telah direncanakan dalam RDTR sehingga perkembangan kawasan Aerotropolis berlangsung lebih efisien, tertata, dan berkelanjutan.

Melalui penerapan kebijakan penataan ruang yang didukung oleh sanksi administratif, WASMATLITRIK, PPNS Penataan Ruang, serta mekanisme insentif-disinsentif, diharapkan mampu: menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR Kawasan Aerotropolis YIA; mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif yang tidak terkendali; mencegah tumbuhnya bangunan dan kawasan yang tidak sesuai peruntukan; menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat; mengoptimalkan sinergi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Kulon Progo, Bandara YIA, kawasan pariwisata Pantai Glagah–Congot, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; dan mewujudkan pengembangan Kawasan Aerotropolis yang tertib, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai prinsip penataan ruang.

4.11 Penerapan Proyek Strategis Nasional dan Dukungan terhadap Asta Cita

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam rangka Pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029, intervensi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 4.8

Intervensi Kabupaten Kulon Progo terhadap Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:	● Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ● penerapan data tunggal kemiskinan ● pemenuhan perlindungan sosial ● Pendanaan usaha mikro melalui KerisKu ● Fasilitasi budi daya dan benih perikanan ● Hibah sarana dan alat bantu penangkapan ikan ● Pelatihan pertanian ● bantuan sosial pangan pada keluarga	● Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ● Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota" ● Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ● Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil ● Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	● Bapperida ● Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ● Dinas Perindustrian Koperasi & UKM ● Dinas Kelautan dan Perikanan ● Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Sekolah Rakyat	Penyiapan lokasi	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan	Program Direktif Presiden

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
				Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	Ketahanan Pangan	● Pengembangan KSPP/Lumbung Pangan/Mataraman ● Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah ● Penguatan Cadangan Pangan ● Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) ● Pengembangan Pangan Hewani	● Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ● Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga ● Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota ● Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota ● Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman ● Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi ● Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih ● Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota ● Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota ● Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
			● Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain ● Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan		
5	Jaminan Kesehatan Nasional	Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
6	Program Makan Bergizi Gratis	Pembekalan higiene dan sanitasi kepada pengelola MBG	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Program Direktif Presiden
7	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Menengah	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Direktif Presiden
8	Pengendalian Inflasi	Pemantauan dan evaluasi harga kebutuhan pokok masyarakat Operasi Pasar terkait komoditas kebutuhan bahan pokok masyarakat	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan	

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
9	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pelatihan manajemen koperasi dan pelatihan bisnis bagi personil Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	Program Direktif Presiden
10	Kemudahan Perizinan di Daerah	Pelayanan perizinan berusaha melalui OSS Pemantauan pelaksanaan kegiatan perusahaan setelah diberikan izin berusaha	1. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 3. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Tabel 4.9

Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita, Hasil Kesepakatan Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
1	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	240	325
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	532	80
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		100

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		15
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	338	338
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1	1
2	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	21
3	1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	50
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	-	1
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	-	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	km	-	4,5
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	-	120
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	189	240
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	1	1
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	73	70

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
5	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat inggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	-	200
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	-	200
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	1
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	7	7
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1944	1944
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	46000	46000

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
7	1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	96	96
			Pengesahan Peraturan Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	122	8
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		2676
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatnya efektivitas	Layanan pendampingan	Layanan pendampingan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan	Orang	30	30

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota			
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	32	32
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	105	105
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	2	2
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah						
11	1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara,	Lokasi	57	57

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)			
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	2
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	70	70
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatnya kualitas layanan	Pencatatan, Penatausahaan dan	Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	Dokumen		48000

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			
13	1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1
14	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	Laporan / Dokumen	1	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)			
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1
15	1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	60	60
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	4

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
16	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	2	2
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan		1
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	12	12

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	0	1
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	80	80
			Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	5	3
20			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang	Orang	12	12

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	950	500
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%		80
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan	Dokumen	1	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4	4
22	1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)						

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
	untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
23	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	4	4

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	1	1
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	20	20
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	1
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	4

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	100	100
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	4
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0	60
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	2	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	1
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	1

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
28	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	12
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	2
29	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
30	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Penyuluhan Transmigrasi	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	50	50
			Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	4	4
31	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	360	400

NO	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG 2026	SUBKEGIATAN RKPD 2027	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	0	105
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	50	20

4.12 Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik

a. Alokasi bidang pendidikan sesuai SPM

Pemenuhan alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo 2027 secara konsisten diarahkan untuk memenuhi ambang batas minimal 20% dari APBD. Integrasi kebijakan ini mengacu pada Perbup Kulon Progo No. 49 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025-2029, yang mewajibkan seluruh penganggaran daerah berorientasi pada pencapaian target layanan dasar urusan wajib. Secara umum rencana belanja yang ditetapkan dalam RKPD 2027 yang sesuai dengan mandatory spending di Kabupaten Kulon Progo sudah disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang sudah mencakup 37, 07 % dari total belanja daerah pada tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan anggaran fungsi pendidikan untuk membiayai indikator-indikator SPM berikut:

1. Pemenuhan Layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
2. Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan
3. Pemenuhan Mutu dan Distribusi Pendidik/Tenaga Kependidikan
4. Strategi Pengamanan Anggaran Pendidikan di Kulon Progo

b. Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar DBH/transfer

Pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) untuk infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 diarahkan untuk mematuhi amanat UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil/transfer. Sesuai amanat peraturan tersebut untuk pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap, dimana pada tahun 2027 Kabupaten Kulon Progo baru memenuhi 36, 88 %.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan pemenuhan belanja tersebut:

1. Refocusing dan Efisiensi Belanja Birokrasi
2. Peningkatan Pagu Anggaran Infrastruktur secara Bertahap
3. Fokus Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
4. Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penurunan Kemiskinan

Tabel 4.10

Gambaran Konsistensi Program Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan	4	4	
2.	Kesehatan	5	5	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	9	
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	3	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	5	
6.	Sosial	5	5	
7.	Tenaga Kerja	5	5	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	5	
9.	Pangan	3	3	
10.	Pertanahan	4	4	
11.	Lingkungan Hidup	9	9	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	
15.	Perhubungan	2	2	
16.	Komunikasi dan Informatika	4	4	
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4	4	
18.	Penanaman Modal	6	6	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	2	2	
20.	Statistik	1	1	
21.	Persandian	1	1	

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	Kebudayaan	2	2	
23.	Perpustakaan	2	2	
24.	Kearsipan	2	2	
25.	Kelautan dan Perikanan	5	5	
26.	Pariwisata	4	4	
27.	Pertanian	7	7	
28.	Perdagangan	5	5	
29.	Perindustrian	1	1	
30.	Transmigrasi	1	1	
31.	Sekretariat Daerah	4	4	
32.	Sekretariat DPRD	1	1	
33.	Perencanaan	3	3	
34.	Keuangan	3	3	
35.	Kepegawaian	3	3	
36.	Penelitian dan Pengembangan	2	2	
37.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2	2	
38.	Unsur Kewilayahan Kapanewon	6	6	
39.	Unsur Pemerintahan Umum Kesbangpol	5	5	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Tabel 4.11

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

No.	Program Prioritas Presiden	No.	Program Hasil Terbaik Cepat Nasional	No.	Dukungan Aktivitas Di Kabupaten
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.	1	Penyediaan Per Makanan, Kegiatan POSYANDU Balita dan Lansia, PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA, PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2	Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Cek Kesehatan Gratis di 21 Puskesmas, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular.
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	3	Program Keistimewaan Lumbung Mataraman, PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.	4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5	Pemberantasan kemiskinan.	5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.	5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, Penyelenggaraan

No.	Program Prioritas Presiden	No.	Program Hasil Terbaik Cepat Nasional	No.	Dukungan Aktivitas Di Kabupaten
					Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.	6	Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Untuk ASN
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	7	Program Padat Karya Infrastruktur Pedesaan, Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Program SPALD: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	8	Intessifikasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk PAD
9	Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif.			9	Program Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No.	Program Prioritas Presiden	No.	Program Hasil Terbaik Cepat Nasional	No.	Dukungan Aktivitas Di Kabupaten
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.			10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.			11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.			12	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.			13	PROGRAM PERENCANAAN, LINGKUNGAN HIDUP, PROGRAM PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN/ATAU, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kotakota inovatif, karateristikmandiri lainnya.			14	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS, KELUARGA

No.	Program Prioritas Presiden	No.	Program Hasil Terbaik Cepat Nasional	No.	Dukungan Aktivitas Di Kabupaten
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.				
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.				
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.				

4.13 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2026 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026.

Pada tahun 2026 berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada tahap masa reses III tahun 2023/ 2024 dan reses I tahun 2024/ 2025, terdapat 3.551 usulan permasalahan yang disampaikan dari 40 anggota DPRD (legislatif) kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (eksekutif). Berbagai usulan permasalahan tersebut disampaikan secara resmi melalui Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Usulan permasalahan tersebut terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yakni:

1. Sekretariat Daerah: 97 usulan permasalahan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: 53 usulan permasalahan
3. Dinas Kesehatan: 19 usulan permasalahan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 8 usulan permasalahan
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 14 usulan permasalahan
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga: 40 usulan permasalahan
7. Dinas Kebudayaan: 36 usulan permasalahan
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 10 usulan permasalahan
9. Dinas Perdagangan: 12 usulan permasalahan
10. Dinas Tenaga Kerja: 397 usulan permasalahan
11. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM: 43 usulan permasalahan
12. Dinas Pertanian dan Pangan: 437 usulan permasalahan
13. Dinas Kelautan dan Perikanan: 39 usulan permasalahan
14. Dinas Pariwisata: 35 usulan permasalahan
15. Dinas Lingkungan Hidup: 18 usulan permasalahan
16. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman: 2.132 usulan permasalahan
17. Dinas Perhubungan: 155 usulan permasalahan
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 5 usulan permasalahan

Kemudian untuk sinkronisasi dengan program prioritas daerah yakni:

1. Prioritas pengembangan kawasan aerotropolis merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Penanggulangan kemiskinan merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
4. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan usulan permasalahan di OPD Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.13.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo :

Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yaitu:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
3. Menyelaraskan usulan Pokir dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan;
4. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Kulon Progo melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026;
5. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Kulon Progo;
7. Memastikan rencana pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
9. Mendukung terwujudnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang lebih baik.

4.13.2. Rekomendasi DPRD

Rekomendasi dari DPRD untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja adalah agar penyusunan RKPD tahun berikutnya dapat diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target:

1. Pelaksanaan kegiatan/ subkegiatan agar memperhatikan manfaat (*output*) dan dampak (*impact*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Perangkat Daerah agar melakukan perencanaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/ kegiatan dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
3. Perangkat daerah agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum optimal serta memperhitungkan dampak (outcome) dari subkegiatan/ kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026

4.14 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah

Penerapan manajemen risiko dalam penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan

berorientasi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Manajemen risiko dilaksanakan secara sistematis melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Kegiatan ini merupakan proses yang terintegrasi dengan seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara efektif serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat.

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi risiko, analisis tingkat kemungkinan dan dampak risiko, evaluasi tingkat risiko, penetapan strategi pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Risiko yang diidentifikasi mencakup berbagai aspek meliputi risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, risiko pelaksanaan program dan kegiatan, risiko pengadaan barang dan jasa, risiko sumber daya manusia, risiko pemanfaatan teknologi informasi, serta risiko eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, bencana alam, perubahan iklim, maupun kondisi sosial masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, setiap perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyusun langkah-langkah mitigasi, menetapkan penanggung jawab pengendalian risiko, serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan. Hasil pengelolaan risiko menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Strategi mitigasi risiko diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah, penguatan tata kelola keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses identifikasi dan pengendalian risiko secara efektif.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan berkesinambungan, diharapkan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 mampu mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi kinerja pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu contoh yang bisa ditampilkan adalah Unit Manajemen Risiko Pembangunan di Bapperida Kulon Progo adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773247, Kode Pos 55651

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 050 / 9.f / I / 2025

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, perlu adanya penyelenggaraaan proses pengelolaan risiko yaitu Manajemen Risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

KESATU : Proses Manajemen Risiko meliputi:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan.

KEDUA : Proses Penilaian Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikai Resiko
2. Analisis Resiko
3. Evaluasi Resiko

KETIGA : Identifikasi Resiko sebagaimana dimaksud dalam 2 diktum KEDUA dilaksanakan dengan mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari program/kegiatan/sub-kegiatan.

KEEMPAT : Menetapkan Tahapan Identifikasi Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Memahami tujuan OPD/Program/kegiatan/Sub kegiatan

   Memahami tujuan substantive dengan mempertimbangkan tujuan manajerial OPD/Program/kegiatan/Sub kegiatan. Dengan melihat pada dokumen-dokumen perencanaan.

2. Mengidentifikasi kejadian risiko (*risk event*)

   Kejadian Risiko merupakan kemungkinan kejadian yang dapat terjadi di masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko. Identifikasi Risiko dapat dilakukan dengan

memperhatikan Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.

3. Mencari Penyebab

   Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menjadi penyebab. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya *fishbone diagram*.

4. Menentukan dampak

   Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi.

5. Menentukan Kategori Risiko

   Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori Risiko. Setiap Unit Pemilik Risiko wajib memiliki Kategori Risiko.

6. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam Table Identifikasi Risiko (ada di lampiran 1 excel Tabel Identifikasi Risiko).

KELIMA : Menetapkan Identifikasi Risiko dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. *Brainstorming*
2. *Focus Group Discussion* (FGD)
3. *Check-list;* dan
4. *Flowcharting*

KEENAM : Menetapkan proses Identifikasi Risiko dilakukan oleh masing-masing satuan terkecil pemilik risiko kegiatan (PPTK) dengan menyusun Tabel Identifikasi Risiko sebagaimana maksud dalam dictum KEEMPAT angka 6 untuk kemudian dituangkan dalam Register Risiko.

KETUJUH : Menetapkan kategori risiko minimal di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Keuangan	Risiko yang disebabkan oleh factor-faktor keuangan
Risiko Teknologi	Risiko yang disebabkan oleh factor-faktor teknologi
Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko yang disebabkan faktor-faktor SDM
Risiko Sistem dan Prosedur	Risiko yang disebabkan oleh factor desain dan/atau implementasi system

	dan prosedur
Risiko Alam	Risiko yang disebabkan oleh factor-faktor alam
Risiko Sarpras	Risiko yang disebabkan oleh ketersediaan sarpras atau tidak optimalnya sarpras
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi
Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan public/masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif organisasi

KEDELAPAN : Menetapkan terhadap risiko yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA untuk memahami sifat-sifat risiko yang selanjutnya digunakan untuk menentukan peringkat risiko. Pada Analisis Risiko ditentukan besarnya kemungkinan dan dampak risiko berdasarkan kriteria yang sudah dirumuskan dalam tahap penetapan konteks.

KESEMBILAN : Menetapkan Tahapan Analisis Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi Sistem Pengendalian yang sudah ada
2. Mengestimasi level kemungkinan risiko
3. Mengestimasi level dampak risiko
4. Menentukan nilai (skor) risiko dan level risiko
5. Menyusun peta risiko

KESEPULUH : Menetapkan tahapan Inventarisasi Sistem Pengendalian yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada dictum KESEMBILAN merupakan upaya untuk mengurangi level kemungkinan dan/atau dampak risiko. Sistem Pengendalian Internal dapat berupa:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Pengawasan melekat
c. Review berjenjang
d. Regulasi dan pemantauan rutin atas risiko tersebut

KESEBELAS : Menetapkan tahapan Estimasi level kemungkinan risiko dilaksanakan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan Sistem Pengendalian Internal yang sudah ada dan berbagai factor atau isu terkait risiko tersebut.

KEDUABELAS : Menetapkan Skala level dan kriteria kemungkinan risiko sebagaimana dimaksud dalam dictum KESEMBILAN angka 2 menggunakan skala 5 dengan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Kepala Bappeda ini.

KETIGABELAS : Menetapkan berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahapan Identifikasi Risiko kemudian ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak risiko tersebut. Estimasi level dampak risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan Sistem Pengendalian Internal yang sudah ada dan berbagai factor atau isu dari risiko terkait.

KEEMPATBELAS : Menetapkan Skala level dan kriteria dampak risiko sebagaimana dimaksud dalam dictum KESEMBILAN angka 3 menggunakan skala 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bapperida ini.

KELIMABELAS : Menetapkan nilai (skor) risiko dan lavel resiko sebagaimana dimaksud dalam dictum KESEMBILAN angka 4 menggunakan skala 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bapperida ini.

KEENAMBELAS : Menetapkan tahapan Menyusun Peta Risiko sebagaimana maksud dalam dictum KESEMBILAN angka 5 merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko dalam sebuah diagram sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bapperida ini

KETUJUHBELAS : Menetapkan Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Prioritas Risiko berdasarkan besaran risiko
2. Menentukan Risiko Utama

KEDELAPANBELAS : Menetapkan penyusunan Prioritas Risiko dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Besaran Risiko Tertinggi mendapat prioritas paling tinggi
b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) risiko yang memiliki besaran nilai risiko yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak
c. Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori Risiko atau penyebabnya
d. Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan *judgment* pemilik Risiko

KESEMBILANBELAS : Menetapkan Selera Risiko (*risk appetite*) dengan berpedoman pada Skala Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam dictum KELIMABELAS sebagai berikut:

a. Skor 1-2 (sangat rendah) tidak perlu dilakukan penanganan risiko;
b. Skor 3-4 (rendah), Skor 5-9 (sedang), Skor 10-12 (tinggi), Skor 15- 25 (sangat tinggi) perlu dilakukan penanganan risiko untuk menurunkan level risiko;
c. Terhadap skor risiko yang perlu ditangani, dilakukan evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan bersama yang bertujuan menurunkan level risiko hingga level sangat rendah.

KEDUAPULUH : Menetapkan penentuan Risiko Utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Seluruh Risiko yang berada di luar area *acceptable risk* (risiko yang dapat diterima) disebut sebagai Risiko Utama dan akan dilakukan Penanganan Risiko
b. Risiko yang berada pada area *acceptable risk* (risiko yang dapat diterima) tidak perlu dilakukan Penanganan Risiko

KEDUAPULUHSATU : Menetapkan berdasarkan selera risiko (*risk appetite*) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESEMBILANBELAS maka toleransi risiko (risk tolerance) yang dapat diterima oleh Badan Pembangunan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah adalah paling besar atau

maksimal pada level skor risiko 2(dua) atau pada level sangat rendah.

KEDUAPULUHDUA : Menetapkan Penanganan Risiko dapat dilaksanakan satu dari empat perlakuan sebagai berikut:

a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut,
b. Berbagai risiko (*risk sharing/transfer*), yaitu Tindakan mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko
c. Mitigasi (*mitigasi*), yaitu melakukan perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko, atau mengurangi keduanya yaitu kemungkinan dan dampak;
d. Menerima risiko (risk acceptance), yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut.

KEDUAPULUHTIGA : Berdasarkan Penanganan Risiko yang telah dipilih sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUAPULUH, penanganan risiko dituangkan dalam kolom Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Register Risiko dengan tujuan menghasilkan penurunan level skala risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima mengacu kepada toleransi risiko.

KEDUAPULUHEMPAT : Menetapkan terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah di input pada Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUAPULUHSATU kemudian dapat menghasilkan penurunan skor risiko ke tingkat yang dapat diterima atau menurunkan skor risiko ke tingkat yang masih perlu dikelola Kembali sebagai risiko sisa (*residual risk*).

KEDUAPULUHLIMA : Menetapkan terhadap level skor risiko residual yang lebih tinggi dari toleransi risiko dilakukan Penanganan Risiko Kembali hingga diperoleh skor risiko dibawah toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dictum KESEMBILANBELAS

KEDUAPULUHENAM : Menetapkan atas Penanganan Risiko yang dilakukan perlu dilaksanakan Pemantauan Pengendalian Risiko yang dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Pemantauan berkelanjutan (*on-going monitoring*) yang dilakukan secara terus menerus atas seluruh factor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi organisasi dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi
b. Pemantauan berkala yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya untuk memantau pelaksanaan Rencana Tindak Penanganan

dan tren perubahan level risiko

c. Reviu Implementasi Manajemen Risiko oleh penanggung jawab/pengelola risiko yang dilakukan dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku

KEDUAPULUHTUJUH : Terhadap hasil pemantauan pada dictum ketigabelas dilakukan Tindakan rencana aksi oleh pemilik risiko berupa perbaikan pengendalian risiko dengan mengisi form pemantauan

KEDUAPULUHDELAPAN : pengendalian risiko

Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPERIDA

Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196904161993031006

REGISTER RISIKO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

Register Risiko
Nama Perangkat Daerah : BAPPERIDA
Tujuan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang tesponsif dan akuntabel
Sasaran : Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan,
: Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
: Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah
Indikator Kinerja : Persentasi Indikator kinerjasasaran perangkat daerah dalam RPDyang mencapai target
Persentase kinerja OPDdengan Predikat sangat tinggi (91% -100%)
Satuan inovasi daerah yangmatang

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan															
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersusun tepat waktu		Usulan DAK dan BKK ditolak atau diterima	Ketidak lengkapan usulan	Belum optimalnya hasil pembangunan karena tidak selarasnya perencanaan pembangunan N+1 di level pusat dan daerah	Melakukan pemantauan kontribusi dan alokasi atas kegiatan yang bersifat mendukung tematik, lintas sektor dan kewilayahan serta pusat daerah pada tahap penyusunan dokumen Perencanaan	C	2	3	11	Tinggi	Melakukan harmonisasi program kegiatan yang bersifat mendukung tematik, lintas sektor dan kewilayah serta pusat daerah pada tahap penyusunan dokumen Perencanaan Kabupaten	kabid. Anarenbang	APBD
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersusun tepat waktu		Masing-masing sektor menyusun perencanaan sesuai kepentingan masing-masing	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang integratif, tematik, dan spasial dan pengetahuan serta pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan belum terinternalisasi dengan baik di OPD pelaksana kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanan Pembanguan Daerah belum optimal kualitasnya	Melakukan koordinasi dan sinergi secara intensif antar sektor	C	2	3	11	Tinggi	Sejak awal proses perencanaan berkoordinasi dan bersinergi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan		APBD

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mutakhir		Masih terdapat data yang belum valid, akurat dan konsisten	Proses pengumpulan data di produsen data (OPD) belum memenuhi standar	Analisis yang dilakukan kurang akurat dan mendalam	Melakukan koordinasi dengan pembina data (BPS), walidata (Dinas Kominfo) dan OPD produsen data.	C	4	3	16	Sangat Tinggi	Berkoordinasi sejak awal perencanaan sehingga masing-masing pihak dapat mengawal proses perencanaan dengan baik		APBD
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan tepat waktu		Usulan Program dan kegiatan Danais bisa ditolak atau diterima oleh Paniradya	Ada usulan Program dan kegiatan yang tidak lengkap, kurang RKA, KAK atau RAB	Syarat mengajukan usulan belum lengkap	Mengundang OPD untuk konfirmasi hambatan dan permasalahan serta koordinasi dengan BKAD	UC	2	2	7	Sedang			DAIS
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah															
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1	Penyusunan prioritas pembangunan/ alokasi anggaran kurang memuaskan OPD, Kapanewon, Anggota Dewan, dan masyarakat	Anggaran terbatas dan banyaknya usulan yang masuk	Ada wilayah/ kelompok yang merasa tidak terakomodir usulannya	Merekap usulan yang ada dengan cermat dan menyusun prioritas dengan memperhatikan keterwakilan usulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku	C	2	3	11	Tinggi	Mengefektifkan koordinasi sesuai mekanisme yang ada dalam rangka merumuskan penyusunan prioritas anggaran yang dapat mewakili semua elemen	Bappeda, OPD terkait	APBD
			1	Penulisan usulan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan (Jalan, PJU, perlengkapan jalan yang terkait dengan nama ruas jalan)	Pengusul belum memahami SK Ruas Jalan	Kesalahan pengalokasian anggaran pada subkegiatan yang dituju	Sosialisasi SK Ruas Jalan	C	2	3	11	Tinggi	Berkoordinasi dengan pengusul untuk memperhatikan SK Jalan pada saat pengusulan	Bappeda, OPD terkait	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1	Keterlambatan penyampaian bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	- koordinasi dengan OPD lambat - adanya usulan tambahan/ ganti usulan dari Pokok Pikiran Dewan yang melewati tata waktu yang ditentukan	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi usulan program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Rapat Koordinasi	C	2	3	11	Tinggi	Mengefektifikan koordinasi dengan: '- mematuhi jadwal yang telah disusun - mengintensifkan koordinasi dengan OPD dan DPRD terkait usulan perencanaan	Bappeda	APBD
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan budaya	Terkelolanya Situs Warisan Geologi di Kabupaten Kulon Progo		kurangnya keterpaduan, sinergitas dan kolaborasi dalam pengelolaan Geosite	kurangnya pemahaman Pengelola dan masyarakat	pengelolaan Geosite kurang optimal, dampak peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak signifikan dirasakan oleh masyarakat	- rapat koordinasi - pembentukan Forum Geoheritage Kabupaten dan Pengelola Geosite - Monev	C	2	2	7	Sedang	- sosialisasi diintensifkan - perumusan rencana induk pengelolaan	Bappeda, OPD, masyarakat terkait	
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam															
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan dan pengendalian bidang SDA tepat waktu	1.	Keterlambatan penyampaian bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bidang Anarenbang belum menyampaikan bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi usulan program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan bidang Anarenbang	C	2	3	11	Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	APBD

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					OPD belum menyampaikan bahan perencanaan dan pengendalian.	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD	C	4	3	16	Sangat Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi dan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian tepat waktu	1.	Keterlambatan penyampaian bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bidang Anarenbang belum menyampaikan bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi usulan program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan bidang Anarenbang	C	2	3	11	Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	APBD

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					OPD belum menyampaikan bahan perencanaan dan pengendalian.	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD	C	4	3	16	Sangat Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi dan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan dan pengendalian bidang PPM tepat waktu	1	Keterlambatan penyampaian bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bidang Anarenbang belum menyampaikan bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi usulan program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan bidang Anarenbang	C	2	3	11	Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi	Kabid. PPM	APBD

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					OPD belum menyampaikan bahan perencanaan dan pengendalian.	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD	C	4	3	16	Sangat Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi dan monitoring	Kabid. PPM	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan Manusia tepat waktu	1.	Keterlambatan penyampaian bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bidang Anarenbang belum menyampaikan bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi usulan program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan bidang Anarenbang	C	2	3	11	Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi	Kepala Bidang PPM	APBD
					OPD belum menyampaikan bahan perencanaan dan pengendalian.	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD	C	4	3	16	Sangat Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi dan monitoring	Kepala Bidang PPM	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan dan pengendalian bidang PPM tepat waktu		Keterlambatan penyampaian bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bidang Anarenbang belum menyampaikan bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi usulan program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD	C	2	3	11	Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi	Kabid. PPM	APBD
					OPD belum menyampaikan bahan perencanaan dan pengendalian.	Bahan integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai bahan untuk koordinasi dan verifikasi program pembangunan dengan perangkat daerah tidak sesuai jadwal.	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD	C	4	3	16	Sangat Tinggi	Peningkatan intensitas koordinasi dan monitoring	Kabid. PPM	
Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian															
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi daerah	1.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Perangkat Daerah tidak melaporkan inovasinya dan/atau kurangnya bukti dukung inovasi yang dilaksanakan	Indeks Inovasi Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan	Koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah	UC	3	3	14	Tinggi	Penetapan satuan inovasi dalam SK Bupati	Bid Rindal	APBD
			2.	kurangnya minat pelajar dan masyarakat untuk berinovasi	peserta kreanova menoreh tidak sesuai rencana	Anugrah Iptek Kreanova Menoreh tidak terlaksana	koordinasi dan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat	C	2	3	11	Tinggi	meningkatkan sosialisasi dan perpanjangan waktu pendaftaran		

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		1.	dosen/praktisi kurang berminat untuk melakukan diseminasi hasil penelitian / teknologi tepat guna	rendahnya anggaran bahan penelitian/teknologi tepat guna	Tidak tercapainya target hasil pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan	koordinasi dan komunikasi dengan perguruan tinggi dan akademisi					Sangat Rendah			
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	pengendalian & evaluasi pelaksanaan pembangunan tepat waktu		Keterlambatan entry data kinerja OPD secara berkala setiap bulan dengan sistem informasi monev (MonevKu)	OPD tidak mematuhi waktu penyampaian pelaporan yang telah ditetapkan di setiap bulannya	Informasi kinerja kurang valid	Pengumuman lewat running text aplikasi serta grup whatsapp.	C	2	2	7	Sedang	Peningkatan koordinasi dan komunikasi	Kabid Litbangdal	APBD
				Keterlambatan penyampaian data capaian metadata indikator kinerja program dan indikator kinerja utama setiap triwulan	OPD tidak mematuhi waktu penyampaian pelaporan sesuai surat edaran	Informasi kinerja kurang valid	Pengiriman surat edaran ke OPD serta pelaksanaan desk dengan OPD	UC	4	3	16	Sangat Tinggi	Peningkatan koordinasi dan komunikasi	Kabid Litbangdal	
		Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan		Dokumen laporan hasil evalusi program Pemda tidak selesai tepat waktu	Koordinasi dengan berbagai pihak dan monev di lapangan memakan waktu yang cukup signifikan untuk dapat mengetahui akar permasalahan & peluang solusi yg diharapkan	Progres pelaporan program pemda sangat kompleks dengan cakupan materi yang memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk pihak eksternal	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	C	2	3	11	Tinggi	Melakukan koordinasi dan penentuan skala prioritas terhadap jumlah program pemda yang ditangani		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		keterlambatan penyampaian laporan karena kurangnya ketepatan data capaian kinerja yang disampaikan oleh OPD	penyampaian data kinerja dari OPD kurang valid	informasi capaian kinerja OPD kurang valid sehingga laporan menjadi terlambat	pengendalian dilakukan secara triwulanan	C	2	2	7	Sedang	peningkatan koordinasi dan komunikasi	Kabid Litbangdal	APBD

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY		keterlambatan penyampaian laporan usulan verifikasi tahapan Dana Keistimewaan kepada Paniradya	Penyerapan anggaran pada OPD pengampu Dana Keistimewaan mengalami keterlambatan dari rencana / realisasi tidak sesuai target pada anggaran kas	Syarat verifikasi tahapan belum terpenuhi	Mengundang OPD untuk konfirmasi hambatan dan permasalahan serta koordinasi dengan BKAD	UC	2	4	13	Tinggi	Peningkatan koordinasi dan komunikasi	Kabid Litbangdal	DAIS
Sekretariat															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD		Keterlambatan Penetapan Pagu Anggaran	Perencanaan (penyusunan Pra RKA) di PPTK tidak tepat waktu	PPTK menunggu kepastian alokasi dana sehingga proses penyusunan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.	Menyusun dokumen perencanaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan	UC	1	2	3	Rendah	Koordinasi dengan Bidang Perencanaan Untuk memberikan Pagu Perangkat daerah Tepat Waktu	Perencana pada Sekretaris	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD		Keterlambatan pelaporan pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Penyampaian laporan kinerja dari masing masing kegiatan/PPTK tidak tepat waktu	Tidak tercapainya targetkinerja instansi pemerintah	Melaksakanan penagihan data sesuai jadwal entry Monevku	C	1	1	1	Sangat Rendah	Koordinasi secara berkala dan terstruktur dalam rangka pengendalian dan pelaporan kinerja	Perencana pada Sekretaris	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai ASN (PNS dan PPPK) secara benar dan tepat waktu		Keterlambatan dalam penyediaan gaji dan tunjangan	Perubahan aplikasi keuangan daerah	Mengganggu keberlangsungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi keuangan yang baru	UC	2	2	7	Sedang	Melakukan konsultasi dengan BKAD secara intensif tentang peggunaan aplikasi keuangan daerah	Kasubag Keuangan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terhambatnya proses penyediaan honorarium pejabat penatausahaan keuangan dan barang.	Perubahan aplikasi keuangan daerah	Menghambat kelancaran penyediaan honorarium pejabat penatausahaan keuangan	Melakukan konsultasi dengan BUD dan pengampu pengelola keuangan OPD lain nya tentang aplikasi keuangan yang baru	UC	2	2	7	Sedang	Membuat forum pengelola keuangan dengan OPD lain dan sub bagian keuangan	Kasubag Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD		Terlambatnya penyelesaian dokumen laporan keuangan	Pengurangan personil sub bagian keuangan sehingga terbatasnya penyusun laporan keuangan	Menghambat tersusunnya dokumen laporan keuangan	Membagi tugas dengan staf bagian keuangan sehingga tujuan tetap bisa tercapai	UC	3	3	14	Tinggi	Meningkatkan pendayagunaan SDM sub bagian keuangan	Kasubag Keuangan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terpenuhinya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1	Terlambatnya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Dijadwalkannya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Mengambat Penilaian Kinerja Pegawai.	Koordinasi dengan tim Penilaian Kinerja Pegawai.	C	2	2	7	Sedang	Meningkatkan pendayagunaan SDM dalam Penilaian Kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kompetensi pegawai		Tidak terkirimnya peserta diklat	Jadwal penyelenggaraan diklat bersamaan dengan waktu	Tidak tercapainya target kinerja instansi	Koordinasi dengan manajemen terkait	UC	1	3	5	Sedang	Membuat peta manajemen talenta dan koordinasi penyampaian	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan	1	Tidak terpenuhinya peralatan kantor yang belum teranggarkan	Terbatasnya penganggaran dan kurang cermatnya dalam	Menghambat pelaksanaan pekerjaan	Membuat check list kebutuhan peralatan dan perlengkapan	C	1	2	3	Rendah	Pengusulan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya fasilitas untuk rapat serta biaya konsultasi dan	1	Belanja untuk fasilitas rapat, konsultasi dan koordinasi tidak mencukupi karena	Kurangnya dukungan anggaran.	Tidak tercapainya target kinerja instansi	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia	C	1	2	3	Rendah	Mengusulkan anggaran untuk fasilitasi, rapat-rapat, konsultasi dan	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/ C	Status risiko			Katagori risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Keterangan
			No	Uraian Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang memadai.	1	Terlambatnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	Keterlambatan administrasi pengadaan peralatan dan	Keluhan pemanfaatan atas pelayanan pemerintah.	Penjadwalan tahapan pengadaan dan kelengkapan	C	1	2	3	Rendah	Mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam melengkapi	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	1	Tidak terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	Penggunaan jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik tidak	Pemutusan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Hemat energi, memantau penggunaan jasa secara rutin.	C	1	2	3	Rendah	Membuat edaran penghematan sumber daya energi dan mengajukan	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	1	Tidak terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Terbatasnya penganggaran dan kurang cermatnya dalam	Menghambat pelaksanaan pekerjaan.	Membuat cek list kebutuhan.	C	1	2	3	Rendah	Pengusulan kebutuhan pada perubahan anggaran berjalan atau tahun	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya	1	Tidak terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan.	Terbatasnya penganggaran dan kurang cermatnya dalam	Menghambat pelaksanaan pekerjaan.	Membuat cek list kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya	C	1	2	3	Rendah	Pengusulan kebutuhan jasa pemeliharsaan, biaya pemeliharaan,	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor atau bangunan lainnya.	1	Tidak terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya.	Terbatasnya penganggaran dan kurang cermatnya dalam	Menghambat pelaksanaan pekerjaan.	Membuat cek list kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	C	1	2	3	Rendah	Pengusulan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan sarana dan prasarana	1	Tidak terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.	Terbatasnya penganggaran dan kurang cermatnya dalam	Menghambat pelaksanaan pekerjaan.	Membuat cek lis kebutuhan pemeliharaan sarana dan	C	1	2	3	Rendah	Pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau	Kasubag Umum dan Kepegawai an	

Wates, 20 Oktober 2025
Mengetahui/ menyetujui
Kepala BAPPERIDA,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BAPPERIDA

Ir. Muh. Agis Nugroho, MMA.
NIP 19690416 199303 1 006

RISIKO KECURANGAN ATAS PROGRAM KEGIATAN
PADA BAPPERIDA KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	TAHAPAN PROSES	NAMA RISIKO	SKENARIO RISIKO	PIHAK TERKAIT	JENIS RISIKO KECURANGAN	PEMILIK RISIKO	URAIAN PENYEBAB	INDIKATOR/ GEJALA/ RED FLAG	RISIKO INHEREN			PENGENDALIAN TERPASANG	RISIKO RESIDUAL SETELAH			RESPON TERHADAP RISIKO	RENCANA MITIGASI		
									KEMUNGKIN	DAMPA	STATUS		KEMUNGKIN	DAMPA	STATUS		URAIAN	JADWAL	PENANGGUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	10	11	12	13	14	5	6	7
A	**PERENCANAAN PENGANGGARAN**																		
1	**Penyusunan RKPD**	Intervensi dalam pelaksanaan dan atau hasil kegiatan Musrenbang sesuai kehendak pribadi/pihak tertentu sehingga dapat merugikan negara	Musrenbang tidak mengacu pada rencana nasional dan atau diarahkan untuk program yang menguntungkan kepentingan pihak tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat atau disesuaikan dengan janji politik. Memasukkan kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil musrenbang, RPJMD dan pokok-pokok pikiran untuk menguntungkan pihak tertentu	Tim TAPD, Kepala Bappeda, Anggota Dewan	Penyalahgunaan wewenang	Kepala Bappeda	Musrenbang tidak mengacu pada rencana nasional dan atau diarahkan untuk program yang menguntungkan kepentingan pihak tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat atau disesuaikan dengan janji politik. Memasukkan kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil Musrenbang, RPJMD dan pokok-pokok pikiran untuk menguntungkan pihak tertentu	ada permintaan memindah anggaran dan atau lokasi kegiatan	3	3	9	1. Forum Konsultasi publik dan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD. 2. Reviu TAPD. 3. Reviu RKPD (keselarasan program/kegiatan antar dokumen perencanaan) oleh Inspektorat daerah. 4. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, dan sikronisasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan oleh Bappeda. 5. Pengalokasian pagu kewilayahan. 6. Aplikasi SIPD dari Kemendagri.	2	2	4	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan	1. Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi terintegrasi untuk pengendalian, administrasi dalam perencanaan dan penganggaran APBD yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan dan sosialisasi e-budgeting kepada setiap level user sejak pelaksanaan Musrenbang Desa s.d. Pengesahan APBD 2. Menyusun matriks hasil Musrenbang dan keterkaitannya dengan program dan kegiatan dalam RKPD untuk dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi/media sosial	**Mulai musrenbang sampai penetapan anggaran**	**Bappeda, dan Tim TAPD**
		Risiko suap/gratifikasi dalam penyusunan anggaran sehingga merugikan anggaran.	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD berpotensi menerima sesuatu supaya segera dapat terbit nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Permintaan uang dari anggota DPRD sebagai imbalan atas pengesahan RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD menjadi Perda Suap/Gratifikasi dalam negosiasi kepala PD dengan TAPD dalam penetapan plafon anggaran	Tim TAPD, Kepala Bappeda, Anggota Dewan	Penyalahgunaan wewenang	TAPD, Kepala Badan, kabid Anarenbang	1. Keterbatasan waktu 2. Sulitnya pengawasan internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan fraud di tingkat eselon II ke atas 3. Kerjasama antara tim penyusun RKPD, TAPD dan OPD Pengusul 4. Tekanan atasan / eksternal 5. Lemahnya partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pihak terkait	terjadinya penerimaan suap agar proses APBD lancar	2	3	6	1. Pengawasan oleh KPK dan Inspektorat Daerah. 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala PD & Bupati 3. Layanan pengaduan 4. Akses masyarakat atas proses penetapan APBD melalui Rapat Paripurna APBD secara terbuka	1	3	3	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan	1. Melaksanakan perencanaan anggaran sesuai jadwal 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh DPRD 3. Mengoptimalkan *whistleblowing system* yang sudah terbentuk. 4. Inspektorat agar meningkatkan kerja sama dengan APH dalam upaya represif penanganan korupsi. 5. Bappeda mengirimkan atensi kepada Inspektorat terhadap program-program dengan risiko tinggi yang diusulkan oleh PD. 6. Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi		
B	**TAHAP PELAKSANAAN**																		
	Pengadministrasian	Pembuatan dokumen fiktif untuk mendukung pencairan dana atau persetujuan pencairan kegiatan	Tidak melaksanakan perjalanan dinas tetapi di ikutkan dalam surat perintak perjalanan dinas	PPTK kegiatan, staf pelaksana	Penyalahgunaan anggaran kegiatan	Kepala Badan, PPTK	Perlu lebih teliti dan rinci dalam pencermatan Bukti dukung untuk memperkuat pertanggung jawaban administrasi kegiatan	Pegawai yang menerima surat tugas masih ada di rumah atau di lokasi lain	2	3	6	1. Tiket pesawat dan atau kereta, juga Bording pass harus sesuai nama yang di ajukan 2. tiket hotel juga harus sesuai 3. Perlu memperkuat bukti dukung fota	1	2	3	Mitigasi untuk mengurangi kemungkinan	1. Meningkatkan sosialisasi tentang penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang		
C	**TAHAP PENGADAAN**																		
	Pengadaan barang dan jasa	PA/KPA dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menerima Gratifikasi dari calon Penyedia atau penyedia	Calon Penyedia atau Penyedia menjanjikan imbalan tertentu untuk melancarkan pengadaan yang akan dikerjakan	Vendor, PPTK kegiatan, staf pelaksana	Menerima suap, gratifikasi	Kepala Badan, PPTK	1. Kolusi antara PA/KPA dengan calon penyedia 2. Tekanan atasan/pihak eksternal 3. Penyusun RKA SKPD tidak memiliki kompetensi di bidang barang/jasa yang diadakan		3	3	6	Reviu berjenjang RKA SKPD oleh PD Verifikasi Pengkajian & Klarifikasi RKA oleh TAPD Reviu RKA SKPD oleh Inspektorat Daerah	1	2	3	Mitigasi untuk mengurangi kemungkinan	1. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) sesuai dengan e-katalog 2. Pembahasan bersama setiap kegiatan dengan semua pihak terkait untuk medapatkan SSH yang sesuai dengan standar 3. Usulan anggaran pengadaan harus didukung KAK/analisa kebutuhan riil dan pedoman/juknis spesifikasi barang		

D	**TAHAP PERTANGGUNG JAWABAN**																			
		Pembayaran barang atau jasa tidak sah sehingga menimbulkan kerugian negara	1.Membuat bukti pengeluaran fiktif atas barang atau jasa yang pembayarannya ditagihkan kepada unit kerja 2. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah tanggal bukti yang sudah pernah ditagihkan ke unit kerja (pemeliharaan aset) 3. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	1. PPTK; 2. Bendahara Pengeluaran 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan	Korupsi (Perbuatan Curang)	Kepala OPD	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan Kurangnya pengawasan Intern dari perangkat daerah	1. Kurang lengkapnya bukti pembayaran	1	4	3	Juklak Perbub Nomor 100 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan; Menigkatkan nilai Integritas dan Komitmen Pegawai untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum	1	3	4	Mitigasi untuk mengurangi kemungkinan	1. Meningkatkan sosialisasi tentang penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa;	Semester 2 Tahun 2024	Kepala Bagian Umum
E	**TAHAP EVALUASI**																			
		Suap/gratifikasi oleh audit kepada tim audit/monev	1. Dalam melaksanakan penugasan audit, tim audit menyimpulkan adanya beberapa permasalahan/temuan audit. Menindaklanjuti hal tersebut, auditi memberikan dan/atau tim audit meminta sejumlah barang/uang kepada tim audit dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan permasalahan/temuan audit 2. Tim Audit meminta kemudahan pelayanan publik untuk diri sendiri/keluarga/kerabat Tim Audit kepada auditi	1. Perangkat Daerah yang diperiksa; 2. Inspektorat Daerah 3. Tim Audit 4. BPK	1. Penyuapan (Bribery) 2. Gratifikasi yang tidak sah (Illegal Gratuities)	Kepala OPD	1. Kurang/ lemahnya integritas pegawai; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pencegahan kecurangan belum optimal 3. Pengelolaan WBS tidak optimal	1. Tim audit/monev memiliki preferensi terhadap objek pengawasan tertentu 2. Tim audit/monev terkesan menutup-nutupi proses pengawasan dari atasan atau sejawat	2	5	7	1. berkas penugasan dilengkapi klausul tim tidak menerima gratifikasi 2. Database hubungan kekerabatan 3. Pedoman dan SOP Pengelolaan WBS melalui E-LAPOR	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan	1. Meningkatkan sosialisasi WBS termasuk jaminan keamanan pelapor 2. dst.	Semester 2 Tahu	UPG perangkat daerah

Wates, 20 Januari 2025

Mengetahui/ menyetujui

Kepala BAPPERIDA,

Ir. Moh. Aris Nugroho, MMA.

NIP. 19690416 199303 1 006

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan Akhir RKPD ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang berasal dari penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.

5.1. Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo (APBD Kabupaten)

Program Kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga						**268.371.670.842,00**							**503.215.753.708,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**255.860.109.258,00**							**483.709.844.935,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**255.860.109.258,00**							**483.709.844.935,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.312.348.078,00**							**370.049.793.652,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	222.312.348.078,00						-	370.049.793.652,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						179.013.500,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		177.189.750,00	
		-						179.013.500,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		177.189.750,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.791.500,00						-	10.712.250,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	163.222.000,00						-	166.477.500,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.791.500,00							10.712.250,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	15.791.500,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	10.712.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						163.222.000,00							166.477.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	163.222.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	166.477.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						218.783.147.567,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		367.142.689.070,00	
		-						218.783.147.567,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		367.142.689.070,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	1.462.802.700,00						-	1.540.443.332,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	52.733.700,00						-	64.766.313,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	217.267.611.167,00						-	365.537.479.425,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						217.267.611.167,00							365.537.479.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	3170 Orang/bulan	217.267.611.167,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	365.537.479.425,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.462.802.700,00							1.540.443.332,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	1.462.802.700,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	1.540.443.332,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						52.733.700,00							64.766.313,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	52.733.700,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	64.766.313,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.764.500,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		7.531.894,00	
		-						2.764.500,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		7.531.894,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	2.764.500,00						-	7.531.894,00	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.764.500,00							7.531.894,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	2.764.500,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	7.531.894,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						283.964.254,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		128.973.258,00	
		-						283.964.254,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		128.973.258,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	255.121.954,00						-	69.525.820,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	28.842.300,00						-	59.447.438,00	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.842.300,00							59.447.438,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	28.842.300,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	59.447.438,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						255.121.954,00							69.525.820,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	255.121.954,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	69.525.820,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						37.136.000,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		100.000.000,00	
		-						37.136.000,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	37.136.000,00						-	100.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						37.136.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	37.136.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.617.738.457,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.692.659.613,00	
		-						2.617.738.457,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.692.659.613,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	325.356.544,00						-	344.129.913,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.292.381.913,00						-	1.348.529.700,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						325.356.544,00							344.129.913,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	325.356.544,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	344.129.913,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.292.381.913,00							1.348.529.700,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.292.381.913,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	1.348.529.700,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						408.583.800,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		800.750.067,00	
		-						408.583.800,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		800.750.067,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	96.000.000,00						-	431.823.067,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	208.589.200,00						-	228.511.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	103.994.600,00						-	140.416.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						208.589.200,00							228.511.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	39 Unit	208.589.200,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	228.511.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						96.000.000,00							431.823.067,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	96.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	431.823.067,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						103.994.600,00							140.416.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	240 Unit	103.994.600,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	140.416.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**33.403.822.380,00**							**112.461.377.454,00**	
			Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	-		-	57,25 %	9.868.179.000,00						-	31.938.076.550,00	
			Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	-		-	57,53 %	22.901.486.380,00						-	78.987.243.195,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan	-		-	100 %	19.300.108.700,00						-	59.858.680.438,00	
			Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan	-		-	100 %	14.103.713.680,00						-	52.917.697.016,00	
			Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	-		-	84,33 %	19.300.108.700,00						-	59.858.680.438,00	
			Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	-		-	84,43 %	9.868.179.000,00						-	31.938.076.550,00	
			Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak	-		-	73,66 %	33.403.822.380,00						-	112.461.377.454,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						19.300.108.700,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		59.989.930.438,00	
		-						19.300.108.700,00					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		59.989.930.438,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	8.914.000,00						-	183.750.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	25.095.600,00						-	81.375.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	8.920.000,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	10.312.000,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	113.050.000,00						-	392.490.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	10.612.000,00						-	78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	96.174.200,00						-	132.961.500,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	-	10.538.552.000,00						-	9.100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	196.768.000,00						-	325.237.500,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	2.547.875.400,00						-	3.517.500.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	12.891.600,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	1.494.000.000,00						-	3.848.250.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	3.482.500.000,00						-	3.839.458.769,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	425.386.900,00						-	645.750.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	-	66.061.400,00						-	160.634.140,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	0,00						-	37.009.395.279,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	143.455.600,00						-	304.920.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	89.540.000,00						-	122.708.250,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.494.000.000,00							3.848.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	1.494.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	3.848.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						113.050.000,00							392.490.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	113.050.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	392.490.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						143.455.600,00							304.920.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	2000 Peserta Didik	143.455.600,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	304.920.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						10.538.552.000,00							9.100.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	827 Orang	10.538.552.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	9.100.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						96.174.200,00							132.961.500,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	1199 Orang	96.174.200,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	132.961.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						66.061.400,00							160.634.140,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	335 Satuan Pendidikan	66.061.400,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	160.634.140,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						0,00							37.009.395.279,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	335 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	37.009.395.279,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						89.540.000,00							122.708.250,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	694 Orang	89.540.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	122.708.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						10.612.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	50 Orang	10.612.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						10.312.000,00							63.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	10.312.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	63.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						12.891.600,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	50 Orang	12.891.600,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	52.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						8.914.000,00							183.750.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	8.914.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	183.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						8.920.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	8.920.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	52.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						30.000.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	2 Komunitas	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.095.600,00							81.375.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	25.095.600,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	81.375.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.482.500.000,00							3.839.458.769,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	8 Unit	3.482.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	3.839.458.769,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						196.768.000,00							325.237.500,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	325 Orang	196.768.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	325.237.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						425.386.900,00							645.750.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	335 Satuan Pendidikan	425.386.900,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	645.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						2.547.875.400,00							3.517.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	33600 Peserta Didik	2.547.875.400,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	3.517.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						9.881.999.000,00					Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		32.148.076.550,00	
		-						9.881.999.000,00					Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		32.148.076.550,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	7.500.000,00						-	36.750.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	16.440.000,00						-	57.750.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	6.140.000,00						-	47.250.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	20.585.300,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	13.820.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	112.600.000,00						-	325.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	13.820.000,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	75.024.400,00						-	108.706.500,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	3.249.890.700,00						-	1.188.164.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	173.562.000,00						-	246.750.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	2.233.126.800,00						-	2.887.500.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	633.011.600,00						-	686.700.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	14.720.800,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	3.057.067.300,00						-	3.937.500.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	-	35.239.600,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	0,00						-	21.862.255.800,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	211.541.600,00						-	393.750.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	7.908.900,00						-	28.750.000,00	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.057.067.300,00							3.937.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	5 Unit	3.057.067.300,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	3.937.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						112.600.000,00							325.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	112.600.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	325.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						2.233.126.800,00							2.887.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	18461 Peserta Didik	2.233.126.800,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	2.887.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						211.541.600,00							393.750.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	2000 Peserta Didik	211.541.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	393.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						3.249.890.700,00							1.188.164.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	305 Orang	3.249.890.700,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	1.188.164.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						75.024.400,00							108.706.500,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	872 Orang	75.024.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	108.706.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						35.239.600,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	67 Satuan Pendidikan	35.239.600,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						0,00							21.862.255.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	21.862.255.800,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						7.908.900,00							28.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	67 Orang	7.908.900,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	28.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						13.820.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	85 Orang	13.820.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	52.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						13.820.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	13.820.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						14.720.800,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	85 Orang	14.720.800,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	52.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						7.500.000,00							36.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	36.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						6.140.000,00							47.250.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	6.140.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	47.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						20.585.300,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	2 Komunitas	20.585.300,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						16.440.000,00							57.750.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	16.440.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	57.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						633.011.600,00							686.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	67 Satuan Pendidikan	633.011.600,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	686.700.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						173.562.000,00							246.750.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	80 Orang	173.562.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	246.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						3.601.377.680,00					Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		19.443.562.757,00	
		-						3.601.377.680,00					Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		19.443.562.757,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	-	98.500.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	22.503.500,00						-	89.250.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	7.280.000,00						-	26.250.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	7.500.000,00						-	47.250.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	17.476.600,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	56.198.400,00						-	157.500.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	0,00						-	11.700.727.500,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	38.808.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	-	2.473.564.280,00						-	3.288.614.175,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	191.118.400,00						-	237.037.500,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	47.598.600,00						-	623.183.582,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	84.817.500,00						-	341.250.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	424.690.000,00						-	2.467.500.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	-	131.322.400,00						-	183.750.000,00	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						47.598.600,00							623.183.582,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	387 Peserta Didik	47.598.600,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	623.183.582,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						2.473.564.280,00							3.288.614.175,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	1439 Orang	2.473.564.280,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	3.288.614.175,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						38.808.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	338 Orang	38.808.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						56.198.400,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	825 Satuan Pendidikan	56.198.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	157.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						0,00							11.700.727.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	11.700.727.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						131.322.400,00							183.750.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	827 Orang	131.322.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	183.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						22.503.500,00							89.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	22.503.500,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	89.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						7.500.000,00							47.250.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	47.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						17.476.600,00							52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	2 Komunitas	17.476.600,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	52.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						7.280.000,00							26.250.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	7.280.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	26.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						191.118.400,00							237.037.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	100 Orang	191.118.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	237.037.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						424.690.000,00							2.467.500.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	4 Unit	424.690.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	2.467.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						98.500.000,00							150.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	1 Paket	98.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						84.817.500,00							341.250.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	827 Satuan Pendidikan	84.817.500,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	341.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						646.657.000,00					Satuan Pendidikan Kesetaraan		1.908.807.709,00	
		-						646.657.000,00					Satuan Pendidikan Kesetaraan		1.908.807.709,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	11.000.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	4.960.000,00						-	18.375.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	5.000.000,00						-	21.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	8.552.000,00						-	10.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	256.095.600,00						-	81.900.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	6.852.000,00						-	12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	290.030.000,00						-	768.576.009,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	28.149.000,00						-	78.750.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	31.018.400,00						-	94.500.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	0,00						-	707.206.700,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	5.000.000,00						-	36.750.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						290.030.000,00							768.576.009,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	900 Peserta Didik	290.030.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	768.576.009,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						256.095.600,00							81.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	20 Orang	256.095.600,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	81.900.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						31.018.400,00							94.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	12 Satuan Pendidikan	31.018.400,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	94.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0,00							707.206.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	10 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	707.206.700,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						5.000.000,00							36.750.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-		-	20 Orang	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	36.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						11.000.000,00							78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						5.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	21.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						8.552.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	8.552.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	10.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						4.960.000,00							18.375.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	4.960.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	18.375.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						6.852.000,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	15 Orang	6.852.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	12.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						28.149.000,00							78.750.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	100 Peserta Didik	28.149.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	78.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**63.172.200,00**							**81.302.000,00**	
			Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	-		-	2 Kurikulum	63.172.200,00						-	81.302.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						63.172.200,00					Satuan Pendidikan		81.302.000,00	
		-						63.172.200,00					Satuan Pendidikan		81.302.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-		-	-	63.172.200,00						-	81.302.000,00	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						63.172.200,00							81.302.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	63.172.200,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	81.302.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**54.446.600,00**							**88.371.829,00**	
			Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	-		-	43,34 %	54.446.600,00						-	88.371.829,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						54.446.600,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan		88.371.829,00	
		-						54.446.600,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan		88.371.829,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	37.197.000,00						-	60.871.829,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	17.249.600,00						-	27.500.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						37.197.000,00							60.871.829,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Dokumen	37.197.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	60.871.829,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						17.249.600,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Laporan	17.249.600,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	27.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.511.561.584,00**							**19.505.908.773,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**12.511.561.584,00**							**19.505.908.773,00**	
5.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**716.869.600,00**							**1.243.589.423,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha.	-		-	37,01 %	716.869.600,00						-	1.243.589.423,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						89.125.800,00					Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		218.898.577,00	
		-						89.125.800,00					Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		218.898.577,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	7.500.000,00						-	47.250.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	45.030.900,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	36.594.900,00						-	121.648.577,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						7.500.000,00							47.250.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	5 Orang	7.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	47.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						36.594.900,00							121.648.577,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	80 Orang	36.594.900,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	121.648.577,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						45.030.900,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	45 Orang	45.030.900,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						627.743.800,00					Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo		1.024.690.846,00	
		-						627.743.800,00					Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo		1.024.690.846,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	6.750.000,00						-	73.940.846,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						620.993.800,00							950.750.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	620.993.800,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	950.750.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						6.750.000,00							73.940.846,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	3 Organisasi	6.750.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	73.940.846,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**11.794.691.984,00**							**18.262.319.350,00**	
			Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.	-		-	56 %	11.794.691.984,00						-	18.262.319.350,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.445.003.384,00					Masyarakat Kulon Progo		7.847.319.350,00	
		-						1.445.003.384,00					Masyarakat Kulon Progo		7.847.319.350,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	1.445.003.384,00						-	7.847.319.350,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						1.445.003.384,00							7.847.319.350,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	3 Unit	1.445.003.384,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	7.847.319.350,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						10.349.688.600,00					Pelaku Olahraga di wilayah Kabupaten Kulon Progo		10.415.000.000,00	
		-						10.349.688.600,00					Pelaku Olahraga di wilayah Kabupaten Kulon Progo		10.415.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	592.245.800,00						-	5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	9.708.242.800,00						-	5.350.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	49.200.000,00						-	65.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						49.200.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	12 Orang	49.200.000,00	Kab. Kulon Progo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	65.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						592.245.800,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	500 Orang	592.245.800,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						9.708.242.800,00							5.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	950 Orang	9.708.242.800,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	5.350.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Dinas Kesehatan						**116.696.086.354,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**116.696.086.354,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**116.696.086.354,00**							**0,00**	
7.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**96.306.284.121,00**							**0,00**	
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 persen	96.257.894.321,00						-	0,00	
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	16.997.800,00						-	0,00	
			-	-		-	-	31.392.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.997.800,00					-		0,00	
		-						16.997.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.017.900,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.979.900,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.017.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	12.017.900,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.979.900,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	21 Laporan	4.979.900,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						93.987.532.041,00					-		0,00	
		-						93.987.532.041,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	235.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	93.737.032.041,00						-	0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						93.737.032.041,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1428 Orang/bulan	93.737.032.041,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						235.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	235.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	3 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.941.600,00					-		0,00	
		-						129.941.600,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	120.646.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.295.600,00						-	0,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.295.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.295.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120.646.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	120.646.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.392.000,00					-		0,00	
		-						31.392.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	31.392.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						31.392.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	31.392.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.744.022.880,00					-		0,00	
		-						1.744.022.880,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	381.256.760,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.362.766.120,00						-	0,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						381.256.760,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	381.256.760,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.362.766.120,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.362.766.120,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						396.397.800,00					-		0,00	
		-						396.397.800,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	276.534.800,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	89.863.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						276.534.800,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	276.534.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						89.863.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	89.863.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
8.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**20.373.673.333,00**							**0,00**	
			% Pemenuhan UKP UKM	-		-	88,46 persen	20.373.673.333,00						-	0,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.406.342.800,00					-		0,00	
		-						2.406.342.800,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	4.110.000,00						-	0,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	151.035.300,00						-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	2.100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	-	151.197.500,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						151.197.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	1 Unit	151.197.500,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						4.110.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	4.110.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						2.100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	2.100.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						151.035.300,00							0,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	1 Paket	151.035.300,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						17.957.879.433,00					-		0,00	
		-						17.957.879.433,00					-		0,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	4.784.000,00						-	0,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	8.465.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	5.464.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	16.599.998.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	150.596.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	65.410.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	4.586.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	-	3.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	370.687.700,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	5.679.500,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	7.830.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	60.159.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	107.361.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	5.517.800,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	1.996.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	35.695.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	101.996.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	186.943.350,00						-	0,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	42.145.483,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	3.960.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	51.893.200,00						-	0,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	3.897.500,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	51.480.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	5.517.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	-	71.913.700,00						-	0,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						60.159.800,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3310 Orang	60.159.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						7.830.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3268 Orang	7.830.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						5.464.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3122 Orang	5.464.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						8.465.700,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	19016 Orang	8.465.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.784.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	56761 Orang	4.784.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.517.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	89540 Orang	5.517.500,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						51.480.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	62634 Orang	51.480.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						3.897.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	13050 Orang	3.897.500,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						51.893.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	5150 Orang	51.893.200,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.960.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1435 Orang	3.960.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						186.943.350,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	4118 Orang	186.943.350,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						101.996.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	5725 Orang	101.996.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						150.596.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	150.596.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						65.410.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	65.410.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.586.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	4.586.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						16.599.998.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	16.599.998.800,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						3.900.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	1 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						5.679.500,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	5.679.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						370.687.700,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	1 Dokumen	370.687.700,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						71.913.700,00							0,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	1 Unit	71.913.700,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						35.695.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	336 Orang	35.695.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						1.996.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	141 Orang	1.996.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						42.145.483,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	20 Orang	42.145.483,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						107.361.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	107.361.600,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						5.517.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	5.517.800,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						9.451.100,00					-		0,00	
		-						9.451.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	-	5.487.900,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	3.963.200,00						-	0,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						3.963.200,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	40 Unit	3.963.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						5.487.900,00							0,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	1 Dokumen	5.487.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
9.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**5.729.400,00**							**0,00**	
			Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial	-		-	97,68 persen	5.729.400,00						-	0,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						5.729.400,00					-		0,00	
		-						5.729.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	5.729.400,00						-	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						5.729.400,00							0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	21 Orang	5.729.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	21 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
10.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**4.800.000,00**							**0,00**	
			% Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar	-		-	91,72 persen	4.800.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						4.800.000,00					-		0,00	
		-						4.800.000,00					-		0,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	4.800.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						4.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	32 Unit	4.800.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
11.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**5.599.500,00**							**0,00**	
			% Pemenuhan UKP UKM	-		-	88,46 persen	5.599.500,00						-	0,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.599.500,00					-		0,00	
		-						5.599.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	5.599.500,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.599.500,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	5.599.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah Wates						**190.745.040.000,00**							**185.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**190.745.040.000,00**							**185.500.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**190.745.040.000,00**							**185.500.000.000,00**	
12.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**190.745.040.000,00**							**185.500.000.000,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi	-		-	100 %	190.745.040.000,00						-	185.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						190.745.040.000,00					-		185.500.000.000,00	
		-						190.745.040.000,00					-		185.500.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	190.745.040.000,00						-	185.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						190.745.040.000,00							185.500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	190.745.040.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	185.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
		RSUD Nyi Ageng Serang						**41.898.450.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41.898.450.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**41.898.450.000,00**							**0,00**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**41.898.450.000,00**							**0,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	-		-	85,75 persen	41.898.450.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						41.898.450.000,00					-		0,00	
		-						41.898.450.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	41.898.450.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						41.898.450.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	41.898.450.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	RSUD Nyi Ageng Serang
		PUSKESMAS GALUR I						**1.313.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.313.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.313.000.000,00**							**0,00**	
14.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.313.000.000,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.313.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.313.000.000,00					-		0,00	
		-						1.313.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.313.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.313.000.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.313.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS GALUR I
		PUSKESMAS GALUR II						**1.031.149.180,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.031.149.180,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.031.149.180,00**							**0,00**	
15.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.031.149.180,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.031.149.180,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.031.149.180,00					-		0,00	
		-						1.031.149.180,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.031.149.180,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.031.149.180,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.031.149.180,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS GALUR II
		PUSKESMAS GIRIMULYO I						**1.130.795.876,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.036.795.876,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.036.795.876,00**							**0,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.036.795.876,00**							**0,00**	
			Capaian indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.036.795.876,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.036.795.876,00					-		0,00	
		-						1.036.795.876,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.036.795.876,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.036.795.876,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.036.795.876,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**94.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**94.000.000,00**							**0,00**	
17.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**94.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	94.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						94.000.000,00					-		0,00	
		-						94.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	-	94.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota						94.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	94.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Girimulyo || Desa Giripurwo || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
		PUSKESMAS GIRIMULYO II						**1.479.095.333,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.479.095.333,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.479.095.333,00**							**0,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.479.095.333,00**							**0,00**	
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.479.095.333,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.479.095.333,00					-		0,00	
		-						1.479.095.333,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.479.095.333,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.479.095.333,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.479.095.333,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
		PUSKESMAS KALIBAWANG						**2.409.298.450,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.409.298.450,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.409.298.450,00**							**0,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.409.298.450,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	86.95 %	2.409.298.450,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.409.298.450,00					-		0,00	
		-						2.409.298.450,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.409.298.450,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.409.298.450,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.409.298.450,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
		PUSKESMAS KOKAP I						**1.572.241.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.572.241.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.572.241.000,00**							**0,00**	
20.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.572.241.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.572.241.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.572.241.000,00					-		0,00	
		-						1.572.241.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.572.241.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.572.241.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.572.241.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	PUSKESMAS KOKAP I
		PUSKESMAS KOKAP II						**1.005.462.300,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.005.462.300,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.005.462.300,00**							**0,00**	
21.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.005.462.300,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	85,04 %	1.005.462.300,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.005.462.300,00					-		0,00	
		-						1.005.462.300,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.005.462.300,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.005.462.300,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.005.462.300,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS KOKAP II
		PUSKESMAS LENDAH I						**1.594.888.415,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.594.888.415,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.594.888.415,00**							**0,00**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.594.888.415,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.594.888.415,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.594.888.415,00					-		0,00	
		-						1.594.888.415,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.594.888.415,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.594.888.415,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.594.888.415,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS LENDAH I
		PUSKESMAS LENDAH II						**1.539.184.460,00**							**0,00**	
	X							**1.539.184.460,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.539.184.460,00**							**0,00**	
23.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.539.184.460,00**							**0,00**	
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.539.184.460,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.539.184.460,00					-		0,00	
		-						1.539.184.460,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.539.184.460,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.539.184.460,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	1.539.184.460,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS LENDAH II
		PUSKESMAS NANGGULAN						**2.527.486.916,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.527.486.916,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.527.486.916,00**							**0,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.527.486.916,00**							**0,00**	
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	2.527.486.916,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.527.486.916,00					-		0,00	
		-						2.527.486.916,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.527.486.916,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.527.486.916,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.527.486.916,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
		PUSKESMAS PANJATAN I						**1.601.176.100,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.601.176.100,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.601.176.100,00**							**0,00**	
25.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.601.176.100,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	86.67 %	1.601.176.100,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.601.176.100,00					-		0,00	
		-						1.601.176.100,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.601.176.100,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.601.176.100,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.601.176.100,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
		PUSKESMAS PANJATAN II						**1.678.888.479,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.678.888.479,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.678.888.479,00**							**0,00**	
26.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.678.888.479,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84 %	1.678.888.479,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.678.888.479,00					-		0,00	
		-						1.678.888.479,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.678.888.479,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.678.888.479,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.678.888.479,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
		PUSKESMAS PENGASIH I						**1.767.165.300,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.767.165.300,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.767.165.300,00**							**0,00**	
27.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.767.165.300,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.767.165.300,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.767.165.300,00					-		0,00	
		-						1.767.165.300,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.767.165.300,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.767.165.300,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.767.165.300,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
		PUSKESMAS PENGASIH II						**1.744.910.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.744.910.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.744.910.000,00**							**0,00**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.744.910.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.744.910.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.744.910.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.744.910.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.744.910.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.744.910.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.744.910.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
		PUSKESMAS SAMIGALUH I						**1.676.534.034,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.676.534.034,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.676.534.034,00**							**0,00**	
29.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.676.534.034,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.676.534.034,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.676.534.034,00					-		0,00	
		-						1.676.534.034,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.676.534.034,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.676.534.034,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.676.534.034,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
		PUSKESMAS SAMIGALUH II						**1.118.009.671,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.118.009.671,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.118.009.671,00**							**0,00**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.118.009.671,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	1.118.009.671,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.118.009.671,00					-		0,00	
		-						1.118.009.671,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.118.009.671,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.118.009.671,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.118.009.671,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
		PUSKESMAS SENTOLO I						**2.802.575.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.583.600.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.583.600.000,00**							**0,00**	
31.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.583.600.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	2.583.600.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.583.600.000,00					-		0,00	
		-						2.583.600.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.583.600.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.583.600.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.583.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**218.975.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**218.975.000,00**							**0,00**	
32.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**218.975.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	218.975.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						218.975.000,00					-		0,00	
		-						218.975.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	-	218.975.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota						218.975.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	218.975.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Sentolo || Desa Sukoreno || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Sentolo || Desa Kaliagung || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Sentolo || Desa Sentolo || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Sentolo || Desa Banguncipto || 1	Dana Keistimewaan DIY	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
		PUSKESMAS SENTOLO II						**1.674.805.839,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.641.005.839,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.641.005.839,00**							**0,00**	
33.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.641.005.839,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	84,87 %	1.641.005.839,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.641.005.839,00					-		0,00	
		-						1.641.005.839,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.641.005.839,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.641.005.839,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.641.005.839,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**33.800.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**33.800.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
34.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**33.800.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	33.800.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						33.800.000,00					-		0,00	
		-						33.800.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	-	33.800.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota						33.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	33.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Sentolo || Desa Tuksono || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
		PUSKESMAS TEMON I						**2.317.500.572,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.273.500.572,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.273.500.572,00**							**0,00**	
35.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.273.500.572,00**							**0,00**	
			Cakupan indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	86,947 %	2.273.500.572,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.273.500.572,00					-		0,00	
		-						2.273.500.572,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.273.500.572,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.273.500.572,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.273.500.572,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS TEMON I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**44.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
36.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**44.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	44.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						44.000.000,00					-		0,00	
		-						44.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	-	44.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota						44.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	44.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Temon || Desa Temon Wetan || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	PUSKESMAS TEMON I
		PUSKESMAS TEMON II						**980.512.069,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**980.512.069,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**980.512.069,00**							**0,00**	
37.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**980.512.069,00**							**0,00**	
			Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	85,56 %	980.512.069,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						980.512.069,00					-		0,00	
		-						980.512.069,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	980.512.069,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						980.512.069,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	980.512.069,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS TEMON II
		PUSKESMAS WATES						**3.025.680.428,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.025.680.428,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.025.680.428,00**							**0,00**	
38.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.025.680.428,00**							**0,00**	
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-		-	100 %	3.025.680.428,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.025.680.428,00					-		0,00	
		-						3.025.680.428,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.025.680.428,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.025.680.428,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	3.025.680.428,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	0,00	PUSKESMAS WATES
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman						**67.885.243.434,87**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**67.885.243.434,87**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**53.951.958.811,87**							**0,00**	
39.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.108.599.596,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	6.108.599.596,00						-	0,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.619.900,00					-		0,00	
		-						23.619.900,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.369.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	8.250.300,00						-	0,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.369.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	15.369.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.250.300,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	8.250.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.668.521.913,00					-		0,00	
		-						4.668.521.913,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	138.240.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	11.700.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.518.581.913,00						-	0,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.518.581.913,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	95 Orang/bulan	4.518.581.913,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						138.240.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	138.240.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						11.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	11.700.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						356.550.000,00					-		0,00	
		-						356.550.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	356.550.000,00						-	0,00	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						356.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	356.550.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		0,00	
		-						10.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						628.062.183,00					-		0,00	
		-						628.062.183,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	324.095.580,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	238.871.603,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	65.095.000,00						-	0,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						324.095.580,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	324.095.580,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.095.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	65.095.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						238.871.603,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	238.871.603,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						421.845.600,00					-		0,00	
		-						421.845.600,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	368.845.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	53.000.600,00						-	0,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						368.845.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	20 Unit	368.845.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						53.000.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	49 Unit	53.000.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
40.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**6.017.919.650,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	6.017.919.650,00						-	0,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						188.398.000,00					-		0,00	
		-						188.398.000,00					-		0,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	98.573.900,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	-	89.824.100,00						-	0,00	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						89.824.100,00							0,00	
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	304 Lembaga	89.824.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya						98.573.900,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	5 Unit	98.573.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.829.521.650,00					-		0,00	
		-						5.829.521.650,00					-		0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-		-	-	2.366.331.500,00						-	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	-	3.463.190.150,00						-	0,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						2.366.331.500,00							0,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-		-	1 KM	2.366.331.500,00	Kab. Kulon Progo	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						3.463.190.150,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	5,15 KM	3.463.190.150,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
41.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**574.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	574.000.000,00						-	0,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						574.000.000,00					-		0,00	
		-						574.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	-	574.000.000,00						-	0,00	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						574.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	50 SR	574.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
42.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.502.875.100,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.502.875.100,00						-	0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.502.875.100,00					-		0,00	
		-						1.502.875.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	1.052.680.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	250.195.100,00						-	0,00	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						250.195.100,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	250.195.100,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						200.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						1.052.680.000,00							0,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	100 Rumah Tangga	1.052.680.000,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
43.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**71.444.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	71.444.000,00						-	0,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						71.444.000,00					-		0,00	
		-						71.444.000,00					-		0,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	-	71.444.000,00						-	0,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						71.444.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	180 Dokumen	71.444.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
44.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**35.582.913.061,87**							**0,00**	
			-	-		-	-	35.582.913.061,87						-	0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						35.582.913.061,87					-		0,00	
		-						35.582.913.061,87					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	-	507.041.900,00						-	0,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	1.150.192.500,00						-	0,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	-	403.265.700,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	2.240.580.200,00						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	10.878.913.052,87						-	0,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	20.402.919.709,00						-	0,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						507.041.900,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	5 Dokumen	507.041.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						403.265.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	807 KM	403.265.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						10.878.913.052,87							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	40 KM	10.878.913.052,87	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen PKB	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	0 KM	0,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen PKB	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						2.240.580.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	0,7 KM	2.240.580.200,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen PKB	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-		-	0 Meter	0,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						20.402.919.709,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	4,5 KM	20.402.919.709,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.150.192.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	40 Jembatan	1.150.192.500,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen PKB	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	0 Meter	0,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
45.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**362.286.404,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	362.286.404,00						-	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						110.106.804,00					-		0,00	
		-						110.106.804,00					-		0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	-	110.106.804,00						-	0,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						110.106.804,00							0,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	75 Orang	110.106.804,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						252.179.600,00					-		0,00	
		-						252.179.600,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	252.179.600,00						-	0,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						252.179.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	120 Paket Pekerjaan	252.179.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
46.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**3.731.921.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	3.731.921.000,00						-	0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						3.731.921.000,00					-		0,00	
		-						3.731.921.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		-	-	3.731.921.000,00						-	0,00	
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						3.731.921.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		-	6 Dokumen	3.731.921.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.13.5.02.0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**13.933.284.623,00**							**0,00**	
47.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**808.425.739,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	808.425.739,00						-	0,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						60.000.000,00					-		0,00	
		-						60.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						60.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	3 Unit Rumah	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit Rumah	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						748.425.739,00					-		0,00	
		-						748.425.739,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	-	748.425.739,00						-	0,00	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						748.425.739,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	3 Dokumen	748.425.739,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
48.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**4.254.418.984,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	4.254.418.984,00						-	0,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						4.254.418.984,00					-		0,00	
		-						4.254.418.984,00					-		0,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	4.254.418.984,00						-	0,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						4.254.418.984,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	240 Unit Rumah	4.254.418.984,00	Kab. Kulon Progo	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						0,00							0,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
49.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**8.870.439.900,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	8.870.439.900,00						-	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						8.870.439.900,00					-		0,00	
		-						8.870.439.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	-	89.119.900,00						-	0,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	8.781.320.000,00						-	0,00	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						89.119.900,00							0,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	1 Laporan	89.119.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						8.781.320.000,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	70 Lokasi	8.781.320.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja						**5.456.714.601,00**							**8.512.649.333,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.456.714.601,00**							**8.512.649.333,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.456.714.601,00**							**8.512.649.333,00**	
50.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.797.888.601,00**							**6.277.296.747,00**	
			Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	-		-	100 %	3.787.904.601,00						-	5.742.296.747,00	
			-	-		-	-	9.984.000,00						-	535.000.000,00	
			undefined	-		-	undefined undefined	18.240.000,00						-	133.748.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.946.000,00					-		16.832.200,00	
		-						8.946.000,00					-		16.832.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.312.300,00						-	13.340.100,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.633.700,00						-	3.492.100,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.312.300,00							13.340.100,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	7.312.300,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.340.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.633.700,00							3.492.100,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.633.700,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.492.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.831.083.641,00					-		4.244.528.953,00	
		-						2.831.083.641,00					-		4.244.528.953,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	38.065.000,00						-	51.900.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.723.200,00						-	3.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.791.295.441,00						-	4.189.428.953,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.791.295.441,00							4.189.428.953,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	2.791.295.441,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.189.428.953,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						38.065.000,00							51.900.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	38.065.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	51.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.723.200,00							3.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.723.200,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18.240.000,00					-		133.748.000,00	
		-						18.240.000,00					-		133.748.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	108.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	18.240.000,00						-	25.748.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							108.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	54 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	108.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						18.240.000,00							25.748.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	25 Orang	18.240.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.748.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.944.200,00					-		26.927.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						78.944.200,00					-		26.927.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	68.864.000,00						-	14.381.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.080.200,00						-	12.546.700,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.080.200,00							12.546.700,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.080.200,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.546.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						68.864.000,00							14.381.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	68.864.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.381.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.984.000,00					-		535.000.000,00	
		-						9.984.000,00					-		535.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.984.000,00						-	35.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.984.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	9.984.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						649.779.960,00					-		1.175.589.594,00	
		-						649.779.960,00					-		1.175.589.594,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	60.118.500,00						-	67.060.802,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	589.661.460,00						-	615.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	493.528.792,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.118.500,00							67.060.802,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	60.118.500,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	67.060.802,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							493.528.792,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	493.528.792,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						589.661.460,00							615.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	589.661.460,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	615.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.910.800,00					-		144.670.300,00	
		-						200.910.800,00					-		144.670.300,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	187.596.100,00						-	126.875.900,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	13.314.700,00						-	17.794.400,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						187.596.100,00							126.875.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	17 Unit	187.596.100,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	126.875.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.314.700,00							17.794.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	39 Unit	13.314.700,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.794.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
51.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.658.826.000,00**							**2.215.352.586,00**	
			Persentase penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-		-	100 %	52.950.000,00						-	641.171.640,00	
			Persentase penanganan ketertiban umum danketentraman masyarakat	-		-	100 %	1.604.624.000,00						-	1.574.180.946,00	
			-	-		-	-	1.252.000,00						-	20.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.604.624.000,00					-		1.574.180.946,00	
		-						1.604.624.000,00					-		1.574.180.946,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	50.399.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	75.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	1.295.250.000,00						-	1.252.406.946,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	-	182.375.000,00						-	271.774.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	-	1.000.000,00						-	20.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	12 Bulan Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.295.250.000,00							1.252.406.946,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	12 Dokumen	1.295.250.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.252.406.946,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						182.375.000,00							271.774.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	12 Dokumen laporan	182.375.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	271.774.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						1.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						75.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	12 Dokumen	75.600.000,00	Kab. Kulon Progo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						50.399.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	50.399.000,00	Kab. Kulon Progo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						52.950.000,00					-		641.171.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						52.950.000,00					-		641.171.640,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	26.000.000,00						-	211.446.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	0,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	26.950.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	-	0,00						-	199.725.440,00	
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						26.950.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	1 Laporan	26.950.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	110.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						0,00							199.725.440,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	199.725.440,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						26.000.000,00							211.446.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	211.446.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						1.252.000,00					-		20.000.000,00	
		-						1.252.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	-	1.252.000,00						-	20.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS						1.252.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	12 orang Laporan	1.252.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**4.550.794.547,00**							**7.288.360.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.550.794.547,00**							**4.288.360.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.550.794.547,00**							**4.288.360.000,00**	
52.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.627.769.947,00**							**2.409.380.000,00**	
			Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tingg	-		-	100 %	12.286.400,00						-	11.800.000,00	
			Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	2.615.483.547,00						-	2.397.580.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.286.400,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		11.800.000,00	
		-						12.286.400,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		11.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.848.200,00						-	8.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.438.200,00						-	3.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.848.200,00							8.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	10.848.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.438.200,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.438.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.833.627.390,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		1.947.480.000,00	
		-						1.833.627.390,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		1.947.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	27.446.800,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.596.600,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.804.583.990,00						-	1.900.080.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.804.583.990,00							1.900.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	1.804.583.990,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.900.080.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						27.446.800,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	27.446.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.596.600,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.596.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						41.548.189,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		19.400.000,00	
		-						41.548.189,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		19.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	41.548.189,00						-	19.400.000,00	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						41.548.189,00							19.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	41.548.189,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	19.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90.155.000,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		10.000.000,00	
		-						90.155.000,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	90.155.000,00						-	10.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						90.155.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	90.155.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.978.568,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		222.700.000,00	
		-						286.978.568,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		222.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	119.427.412,00						-	56.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	163.620.256,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.930.900,00						-	6.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						119.427.412,00							56.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	119.427.412,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	56.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.930.900,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	3.930.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						163.620.256,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	163.620.256,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	160.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						363.174.400,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		198.000.000,00	
		-						363.174.400,00					BPBD Kabupaten Kulon Progo		198.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	342.408.000,00						-	176.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.766.400,00						-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						342.408.000,00							176.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	23 Unit	342.408.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	176.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.766.400,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	20 Unit	20.766.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	22.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
53.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**819.951.400,00**							**966.120.000,00**	
			Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana	-		-	100 %	3.801.500,00						-	88.800.000,00	
			Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana	-		-	100 %	816.149.900,00						-	877.320.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						116.943.200,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		36.900.000,00	
		-						116.943.200,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		36.900.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	16.943.200,00						-	36.900.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						16.943.200,00							36.900.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	200 Orang	16.943.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	36.900.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						94.666.500,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		271.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						94.666.500,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		271.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	0,00						-	103.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	29.484.400,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	49.362.100,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	15.820.000,00						-	49.600.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						29.484.400,00							14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	9 Unit	29.484.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	14.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						15.820.000,00							49.600.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	200 Orang	15.820.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	49.600.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						0,00							103.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	103.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						49.362.100,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	190 Orang	49.362.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						604.540.200,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo yang terdampak bencana		568.820.000,00	
		-						604.540.200,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo yang terdampak bencana		568.820.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	-	569.012.000,00						-	532.420.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	35.528.200,00						-	36.400.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						569.012.000,00							532.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	1 Dokumen	569.012.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	532.420.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						35.528.200,00							36.400.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	110 Orang	35.528.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	36.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						3.801.500,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		88.800.000,00	
		-						3.801.500,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		88.800.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	2.767.200,00						-	69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	1.034.300,00						-	19.800.000,00	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						1.034.300,00							19.800.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	1.034.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	19.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						2.767.200,00							69.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	2.767.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	69.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
54.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**1.103.073.200,00**							**812.860.000,00**	
			Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran	-		-	100 %	1.093.378.800,00						-	766.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase pembinaan relawan kebakaran	-		-	100 %	9.694.400,00						-	46.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.093.378.800,00					Warga yang terdampak kebakaran dan memerlukan penyelamatan, evakuasi di Kulon Progo		866.860.000,00	
		-						1.093.378.800,00					Warga yang terdampak kebakaran dan memerlukan penyelamatan, evakuasi di Kulon Progo		866.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	0,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	-		-	-	35.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	947.664.000,00						-	635.460.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	10.714.800,00						-	24.900.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						947.664.000,00							635.460.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	947.664.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	635.460.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						0,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	6.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran						35.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaranTerlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	-		-	5 laporan	35.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						10.714.800,00							24.900.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	4 Unit	10.714.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	24.900.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						9.694.400,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana kebakaran di Kulon Progo		46.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.694.400,00					Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana kebakaran di Kulon Progo		46.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	-	4.744.600,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	4.949.800,00						-	31.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						4.949.800,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	50 Orang	4.949.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	31.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						4.744.600,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	5 Desa/Kelurahan	4.744.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**3.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**3.000.000.000,00**	
55.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**3.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	3.000.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		3.000.000.000,00	
		-						0,00					-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	-		-	-	0,00						-	3.000.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya						0,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	3.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**8.393.894.062,00**							**14.633.550.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.145.165.762,00**							**13.626.790.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**8.145.165.762,00**							**13.626.790.000,00**	
56.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.531.656.312,00**							**3.646.220.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	3.531.656.312,00						-	3.646.220.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.414.000,00					ASN		21.280.000,00	
		-						17.414.000,00					ASN		21.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.910.400,00						-	13.480.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.503.600,00						-	7.800.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.910.400,00							13.480.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	12.910.400,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.480.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.503.600,00							7.800.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	4.503.600,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.800.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.750.197.023,00					ASN		2.922.820.000,00	
		-						2.750.197.023,00					ASN		2.922.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	45.605.300,00						-	35.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.985.700,00						-	9.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.698.606.023,00						-	2.877.770.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.698.606.023,00							2.877.770.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	43 Orang/bulan	2.698.606.023,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.877.770.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.605.300,00							35.950.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	45.605.300,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.950.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.985.700,00							9.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	5.985.700,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.100.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						41.880.836,00					ASN		34.650.000,00	
		-						41.880.836,00					ASN		34.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	35.991.136,00						-	27.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.889.700,00						-	7.300.000,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.889.700,00							7.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.889.700,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.300.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.991.136,00							27.350.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	35.991.136,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.350.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						72.316.620,00					ASN		72.930.000,00	
		-						72.316.620,00					ASN		72.930.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	72.316.620,00						-	72.930.000,00	
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						72.316.620,00							72.930.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	72.316.620,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	72.930.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						521.170.333,00					ASN		472.520.000,00	
		-						521.170.333,00					ASN		472.520.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	64.548.627,00						-	58.530.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	456.621.706,00						-	413.990.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						64.548.627,00							58.530.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	64.548.627,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	58.530.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						456.621.706,00							413.990.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	456.621.706,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	413.990.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.677.500,00					ASN		122.020.000,00	
		-						128.677.500,00					ASN		122.020.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	116.084.600,00						-	106.340.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	12.592.900,00						-	15.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						116.084.600,00							106.340.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	20 Unit	116.084.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	106.340.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.592.900,00							15.680.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	17 Unit	12.592.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.680.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
57.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**63.587.500,00**							**88.540.000,00**	
			Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-		-	59,02 %	63.587.500,00						-	88.540.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.641.500,00					Organisasi kemasyarakatan kab kulon progo		10.000.000,00	
		-						1.641.500,00					Organisasi kemasyarakatan kab kulon progo		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		-	-	1.641.500,00						-	10.000.000,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						1.641.500,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		-	1 Dokumen	1.641.500,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	10.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						61.946.000,00					PSKS Kelembagaan dan PSKS Perseorangan		78.540.000,00	
		-						61.946.000,00					PSKS Kelembagaan dan PSKS Perseorangan		78.540.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	55.673.100,00						-	22.840.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	6.272.900,00						-	55.700.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						55.673.100,00							22.840.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	7 Lembaga	55.673.100,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	22.840.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						6.272.900,00							55.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	37 Orang	6.272.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	55.700.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
58.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**501.372.500,00**							**612.020.000,00**	
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	-		-	100 %	501.372.500,00						-	612.020.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						490.372.500,00					Masyarakat, LKS		597.620.000,00	
		-						490.372.500,00					Masyarakat, LKS		597.620.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.664.900,00						-	37.270.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.454.000,00						-	31.060.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.106.000,00						-	23.620.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	423.375.000,00						-	425.160.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	8.722.700,00						-	48.070.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	25.049.900,00						-	20.440.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						423.375.000,00							425.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	462 Orang	423.375.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	425.160.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						17.454.000,00							31.060.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	17.454.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	31.060.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						8.722.700,00							48.070.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	85 Orang	8.722.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	48.070.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						25.049.900,00							20.440.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	60 Orang	25.049.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	20.440.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	24 Orang	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	12.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						2.106.000,00							23.620.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Orang	2.106.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	23.620.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						1.664.900,00							37.270.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	16 Orang	1.664.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	37.270.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						11.000.000,00					LKS		14.400.000,00	
		-						11.000.000,00					LKS		14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	14.400.000,00	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						11.000.000,00							14.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	3 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	14.400.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
59.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**3.859.736.150,00**							**8.959.450.000,00**	
			Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	-		-	29,13 %	3.859.736.150,00						-	8.959.450.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						3.859.736.150,00					Penerima manfaat		8.959.450.000,00	
		-						3.859.736.150,00					Penerima manfaat		8.959.450.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	-	60.249.425,00						-	96.450.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	14.900.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	3.774.523.225,00						-	8.784.710.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	-	10.063.500,00						-	75.890.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						60.249.425,00							96.450.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	10000 Orang	60.249.425,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	96.450.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						14.900.000,00							2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	750 Orang	14.900.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	2.400.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						3.774.523.225,00							8.784.710.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1944 Orang	3.774.523.225,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	8.784.710.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						10.063.500,00							75.890.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	46000 Usulan	10.063.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	75.890.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
60.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**137.130.800,00**							**235.360.000,00**	
			Persentase Penanganan Korban Bencana	-		-	100 %	137.130.800,00						-	235.360.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						24.682.800,00					Korban Bencana Alam dan Non Alam		69.360.000,00	
		-						24.682.800,00					Korban Bencana Alam dan Non Alam		69.360.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	24.682.800,00						-	69.360.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						24.682.800,00							69.360.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	160 Orang	24.682.800,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	69.360.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						112.448.000,00					Tagana dan KSB		166.000.000,00	
		-						112.448.000,00					Tagana dan KSB		166.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	450.000,00						-	17.880.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	111.998.000,00						-	148.120.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						450.000,00							17.880.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	17 Kampung	450.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	17.880.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						111.998.000,00							148.120.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	121 Orang	111.998.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	148.120.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
61.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**51.682.500,00**							**85.200.000,00**	
			Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	-		-	100 %	51.682.500,00						-	85.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						51.682.500,00					pemeliharaan TMP		85.200.000,00	
		-						51.682.500,00					pemeliharaan TMP		85.200.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	-	51.682.500,00						-	85.200.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						51.682.500,00							85.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	1 Makam	51.682.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	85.200.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**248.728.300,00**							**1.006.760.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**248.728.300,00**							**965.930.000,00**	
62.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**43.821.400,00**							**116.770.000,00**	
			Indeks Pemberdayaan Gender	-		-	71,70 Nilai	31.854.900,00						-	68.850.000,00	
			Indeks Pemberdayaan Gender	-		-	Nilai 71,70	11.966.500,00						-	47.920.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						11.966.500,00					OPD, Kalurahan, GOW,Masyarakat		47.920.000,00	
		-						11.966.500,00					OPD, Kalurahan, GOW,Masyarakat		47.920.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	11.966.500,00						-	47.920.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						11.966.500,00							47.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	6 Laporan	11.966.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	47.920.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						31.854.900,00					desa prima, P2WKSS, Industri Rumahan, masyarakat , GOW		68.850.000,00	
		-						31.854.900,00					desa prima, P2WKSS, Industri Rumahan, masyarakat , GOW		68.850.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	31.854.900,00						-	68.850.000,00	
	2.08.02.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						31.854.900,00							68.850.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	31.854.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	68.850.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
63.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**133.611.500,00**							**485.850.000,00**	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	-		-	10,24 per 100.000 penduduk	133.611.500,00						-	485.850.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						10.827.100,00					perempuan dan anak		206.750.000,00	
		-						10.827.100,00					perempuan dan anak		206.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	10.827.100,00						-	206.750.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						10.827.100,00							206.750.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	8 Kegiatan	10.827.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	206.750.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						122.784.400,00					perempuan korban kekerasan		279.100.000,00	
		-						122.784.400,00					perempuan korban kekerasan		279.100.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	122.784.400,00						-	279.100.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						122.784.400,00							279.100.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	122.784.400,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	279.100.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
64.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**45.331.400,00**							**227.810.000,00**	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	-		-	10,24 per 100.000 penduduk	45.331.400,00						-	227.810.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						45.331.400,00					perempuan dan anak		227.810.000,00	
		-						45.331.400,00					perempuan dan anak		227.810.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	45.331.400,00						-	227.810.000,00	
	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						45.331.400,00							227.810.000,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	45.331.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	227.810.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
65.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**21.092.100,00**							**119.100.000,00**	
			Persentase Kalurahan layak anak	-		-	11,49 %	21.092.100,00						-	119.100.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						21.092.100,00					opd, LSM, Forum anak,		119.100.000,00	
		-						21.092.100,00					opd, LSM, Forum anak,		119.100.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	21.092.100,00						-	119.100.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						21.092.100,00							119.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	52 Lembaga	21.092.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	119.100.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
66.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**4.871.900,00**							**16.400.000,00**	
			Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani	-		-	0,02 %	3.099.100,00						-	16.400.000,00	
			-	-		-	-	1.772.800,00						-	0,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.099.100,00					Anak		16.400.000,00	
		-						3.099.100,00					Anak		16.400.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	3.099.100,00						-	16.400.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						3.099.100,00							16.400.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	32 Orang	3.099.100,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	16.400.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.772.800,00					-		0,00	
		-						1.772.800,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	1.772.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						1.772.800,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	10 Lembaga	1.772.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**40.830.000,00**	
67.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**40.830.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	40.830.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		40.830.000,00	
		-						0,00					-		40.830.000,00	
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	-		-	-	0,00						-	40.830.000,00	
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan						0,00							40.830.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	-		-	30 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	40.830.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Tenaga Kerja						**10.525.604.222,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.495.308.522,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**10.495.308.522,00**							**0,00**	
68.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.601.397.522,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	3.601.397.522,00						-	0,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.809.800,00					-		0,00	
		-						14.809.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	11.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.809.800,00						-	0,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.809.800,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	3.809.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.051.840.431,00					-		0,00	
		-						3.051.840.431,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	38.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.999.800,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.010.840.631,00						-	0,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.010.840.631,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	38 Orang/bulan	3.010.840.631,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						38.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.999.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	2.999.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						69.514.020,00					-		0,00	
		-						69.514.020,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	47.000.220,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.513.800,00						-	0,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.513.800,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.513.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						47.000.220,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	47.000.220,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.960.000,00					-		0,00	
		-						12.960.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.960.000,00						-	0,00	
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.960.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	12.960.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.243.771,00					-		0,00	
		-						284.243.771,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	165.151.331,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	119.092.440,00						-	0,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						165.151.331,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	165.151.331,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						119.092.440,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	119.092.440,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.029.500,00					-		0,00	
		-						168.029.500,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	122.667.400,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.362.100,00						-	0,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						122.667.400,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	20 Unit	122.667.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.362.100,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	26 Unit	25.362.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
69.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**51.119.200,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	51.119.200,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						51.119.200,00					-		0,00	
		-						51.119.200,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	-	43.733.600,00						-	0,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		-	-	7.385.600,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						43.733.600,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	2 Dokumen	43.733.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						7.385.600,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		-	5 Orang	7.385.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
70.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**501.070.200,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	501.070.200,00						-	0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						488.134.200,00					-		0,00	
		-						488.134.200,00					-		0,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	-	2.361.100,00						-	0,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	-	28.185.000,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	457.588.100,00						-	0,00	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						2.361.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	2 Lembaga	2.361.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						28.185.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	2 Unit	28.185.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						457.588.100,00							0,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	96 Orang	457.588.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						6.903.400,00					-		0,00	
		-						6.903.400,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		-	-	6.903.400,00						-	0,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						6.903.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		-	16 Lembaga	6.903.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.032.600,00					-		0,00	
		-						6.032.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-		-	-	6.032.600,00						-	0,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						6.032.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-		-	1 Dokumen	6.032.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
71.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**5.727.049.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	5.727.049.400,00						-	0,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						5.610.702.900,00					-		0,00	
		-						5.610.702.900,00					-		0,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	-	76.740.100,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	-	5.533.962.800,00						-	0,00	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						76.740.100,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	1920 Orang	76.740.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						5.533.962.800,00							0,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	640 Orang	5.533.962.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						116.346.500,00					-		0,00	
		-						116.346.500,00					-		0,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-		-	-	116.346.500,00						-	0,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						116.346.500,00							0,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-		-	2510 Orang	116.346.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
72.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**614.672.200,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	614.672.200,00						-	0,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						55.946.800,00					-		0,00	
		-						55.946.800,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	54.326.800,00						-	0,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	-	1.620.000,00						-	0,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						1.620.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	8 Perusahaan	1.620.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						54.326.800,00							0,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	6 Laporan	54.326.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						558.725.400,00					-		0,00	
		-						558.725.400,00					-		0,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	-	17.563.800,00						-	0,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	-	541.161.600,00						-	0,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						17.563.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	2 Perkara	17.563.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						541.161.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	2676 Orang	541.161.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**30.295.700,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**30.295.700,00**							**0,00**	
73.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**30.295.700,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	30.295.700,00						-	0,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.295.700,00					-		0,00	
		-						30.295.700,00					-		0,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	1.464.800,00						-	0,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	578.900,00						-	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		-	-	28.252.000,00						-	0,00	
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						28.252.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		-	2 Kepala Keluarga	28.252.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						578.900,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	50 Kepala Keluarga	578.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						1.464.800,00							0,00	
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	4 Orang	1.464.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja
		Dinas Pertanian dan Pangan						**16.366.342.867,00**							**21.683.213.637,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**745.920.000,00**							**721.668.476,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**745.920.000,00**							**721.668.476,00**	
74.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**745.920.000,00**							**721.668.476,00**	
			Jumlah Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	-		-	90 Ha	745.920.000,00						-	721.668.476,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						745.920.000,00					-		721.668.476,00	
		-						745.920.000,00					-		721.668.476,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		-	-	745.920.000,00						-	721.668.476,00	
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						745.920.000,00							721.668.476,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		-	1 Dokumen	745.920.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	721.668.476,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**494.453.100,00**							**555.276.519,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**194.453.100,00**							**555.276.519,00**	
75.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**58.979.100,00**							**485.541.639,00**	
			Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari	-		-	2.955 Kkal/Kapita/Hari	58.979.100,00						-	198.450.000,00	
			Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari	-		-	2.955,00 Kkal /Kapita/Hari	0,00						-	287.091.639,00	
			Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari	-		-	1.904,4 Kkal/ Kapita/Hari	58.979.100,00						-	198.450.000,00	
			Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari	-		-	1.904,40 Kkal /Kapita/Hari	0,00						-	287.091.639,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						58.979.100,00					-		198.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						58.979.100,00					-		198.450.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.766.800,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	1.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	55.612.300,00						-	0,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	-	0,00						-	198.450.000,00	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						0,00							198.450.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	3 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	198.450.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						55.612.300,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	105 Keluarga	55.612.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						1.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	1 laporan	1.600.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						1.766.800,00							0,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	1.766.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						0,00					-		287.091.639,00	
		-						0,00					-		287.091.639,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	-	0,00						-	287.091.639,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						0,00							287.091.639,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	287.091.639,00	Dinas Pertanian dan Pangan
76.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**111.633.200,00**							**22.372.614,00**	
			Persentase Desa Kategori Tahan dan Sangat Tahan Pangan	-		-	27,27 %	111.633.200,00						-	22.372.614,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						111.633.200,00					-		22.372.614,00	
		-						111.633.200,00					-		22.372.614,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	-	6.320.000,00						-	22.372.614,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	105.313.200,00						-	0,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						105.313.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	105.313.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						6.320.000,00							22.372.614,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	2 Laporan	6.320.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	22.372.614,00	Dinas Pertanian dan Pangan
77.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**23.840.800,00**							**47.362.266,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	-		-	93,33 %	23.840.800,00						-	47.362.266,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						23.840.800,00					-		47.362.266,00	
		-						23.840.800,00					-		47.362.266,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	0,00						-	37.362.266,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	-	23.840.800,00						-	10.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						23.840.800,00							10.000.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	23.840.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	10.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						0,00							37.362.266,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	37.362.266,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**300.000.000,00**							**0,00**	
78.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**300.000.000,00**							**0,00**	
			Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Lahan Surjan dan Kelompok Wanita Tani Lumbung Mataraman yang Terfasilitasi	-		-	32,53 %	300.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						300.000.000,00					-		0,00	
		-						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman						300.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	-		-	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.125.969.767,00**							**20.406.268.642,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**15.125.969.767,00**							**20.406.268.642,00**	
79.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.292.486.667,00**							**14.073.403.363,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.258.838.594,00						-	1.786.307.500,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	7.033.648.073,00						-	12.287.095.863,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						57.933.600,00					-		72.000.000,00	
		-						57.933.600,00					-		72.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	14.712.300,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	43.221.300,00						-	54.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.712.300,00							18.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	14.712.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	18.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.221.300,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	13 Laporan	43.221.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	54.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.975.714.473,00					-		12.215.095.863,00	
		-						6.975.714.473,00					-		12.215.095.863,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	54.700.000,00						-	82.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	8.818.700,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.912.195.773,00						-	12.120.095.863,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.912.195.773,00							12.120.095.863,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1260 Orang/bulan	6.912.195.773,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberday aan Ekonomi dan Penang gulangan Kemiskinan		-	12.120.095.863,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54.700.000,00							82.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	54.700.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberday aan Ekonomi dan Penang gulangan Kemiskinan		-	82.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.818.700,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	8.818.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberday aan Ekonomi dan Penang gulangan Kemiskinan		-	13.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		12.307.500,00	
		-						0,00					-		12.307.500,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	0,00						-	3.307.500,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	9.000.000,00	
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							3.307.500,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberday aan Ekonomi dan Penang gulangan Kemiskinan		-	3.307.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	9.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.870.500,00					-		103.000.000,00	
		-						46.870.500,00					-		103.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	32.122.600,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.747.900,00						-	38.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.747.900,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	14.747.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	38.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						32.122.600,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	32.122.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	65.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14.629.000,00					-		37.000.000,00	
		-						14.629.000,00					-		37.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	14.629.000,00						-	37.000.000,00	
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						14.629.000,00							37.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	14.629.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	37.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						928.021.094,00					-		915.075.000,00	
		-						928.021.094,00					-		915.075.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	201.851.458,00						-	220.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	726.169.636,00						-	694.575.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						201.851.458,00							220.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	201.851.458,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	220.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						726.169.636,00							694.575.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	726.169.636,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	694.575.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						269.318.000,00					-		718.925.000,00	
		-						269.318.000,00					-		718.925.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	311.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	199.674.400,00						-	330.750.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	49.643.600,00						-	77.175.000,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						199.674.400,00							330.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	126 Unit	199.674.400,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	330.750.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							311.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	311.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						49.643.600,00							77.175.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	46 Unit	49.643.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	77.175.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
80.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.790.432.700,00**							**2.663.858.278,00**	
			Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan dan Kondisinya Baik	-		-	75,53 %	1.790.432.700,00						-	2.663.858.278,00	
			Populasi Ternak	-		-	173.752 animal unit	1.790.432.700,00						-	2.663.858.278,00	
			Produktivitas Bawang Merah	-		-	129,80 kuintal/ha	1.790.432.700,00						-	2.663.858.278,00	
			Produktivitas Cabai	-		-	59,40 kuintal/ha	1.790.432.700,00						-	2.663.858.278,00	
			Produktivitas Jagung	-		-	69,38 kuintal/ha	1.790.432.700,00						-	2.663.858.278,00	
			Produktivitas Padi	-		-	71,31 kuintal/ha	1.376.184.010,00						-	2.267.858.278,00	
			Produktivitas Padi	-		-	71,31 kuintal/ha	414.248.690,00						-	396.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						414.248.690,00					-		396.000.000,00	
		-						414.248.690,00					-		396.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	69.583.300,00						-	0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	328.664.790,00						-	396.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	-	16.000.600,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						16.000.600,00							0,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	1 Laporan	16.000.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						328.664.790,00							396.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	1 Laporan	328.664.790,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	396.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						69.583.300,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	1 Ton	69.583.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						909.105.300,00					-		1.510.000.000,00	
		-						909.105.300,00					-		1.510.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	818.363.900,00						-	1.060.000.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	90.741.400,00						-	450.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						818.363.900,00							1.060.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	1 Dokumen	818.363.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	1.060.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						90.741.400,00							450.000.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	1 Dokumen	90.741.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	450.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						467.078.710,00					-		757.858.278,00	
		-						467.078.710,00					-		757.858.278,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	467.078.710,00						-	757.858.278,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						467.078.710,00							757.858.278,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	17 Ekor	467.078.710,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	757.858.278,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
81.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**4.096.797.600,00**							**2.530.004.167,00**	
			Persentase Lahan yang Terfasilitasi Irigasi	-		-	8,90 %	4.096.797.600,00						-	2.530.004.167,00	
			Persentase Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian	-		-	28,23 %	4.096.797.600,00						-	2.530.004.167,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						408.537.800,00					-		610.000.000,00	
		-						408.537.800,00					-		610.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	-	321.037.800,00						-	460.000.000,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	87.500.000,00						-	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						321.037.800,00							460.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	1 Dokumen	321.037.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	460.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						87.500.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	87.500.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						3.688.259.800,00					-		1.920.004.167,00	
		-						3.688.259.800,00					-		1.920.004.167,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	3.219.454.700,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	-	468.805.100,00						-	720.004.167,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						3.219.454.700,00							1.200.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	7 Unit	3.219.454.700,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	1.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						468.805.100,00							720.004.167,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	1 Unit	468.805.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	720.004.167,00	Dinas Pertanian dan Pangan
82.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**608.251.100,00**							**1.027.225.000,00**	
			Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Hewan	-		-	98,69 %	608.251.100,00						-	1.027.225.000,00	
			Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	-		-	90,55 %	226.165.100,00						-	272.000.000,00	
			Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	-		-	90,55 %	382.086.000,00						-	755.225.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						325.711.700,00					-		482.225.000,00	
		-						325.711.700,00					-		482.225.000,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-		-	-	99.512.000,00						-	99.225.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	-	226.199.700,00						-	383.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						99.512.000,00							99.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-		-	1 Laporan	99.512.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	99.225.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						226.199.700,00							383.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	1 Laporan	226.199.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	383.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						226.165.100,00					-		272.000.000,00	
		-						226.165.100,00					-		272.000.000,00	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-		-	-	98.740.600,00						-	103.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	-	127.424.500,00						-	169.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						127.424.500,00							169.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	1 laporan	127.424.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	169.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM						98.740.600,00							103.000.000,00	
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-		-	1 Laporan	98.740.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	103.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						56.374.300,00					-		273.000.000,00	
		-						56.374.300,00					-		273.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	-	34.051.400,00						-	78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	-		-	-	22.322.900,00						-	195.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						34.051.400,00							78.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	1 Laporan	34.051.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	78.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan						22.322.900,00							195.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	-		-	2 Produk	22.322.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	195.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
83.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**81.587.000,00**							**111.777.834,00**	
			Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	-		-	95,85 %	81.587.000,00						-	111.777.834,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						81.587.000,00					-		111.777.834,00	
		-						81.587.000,00					-		111.777.834,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	-	81.587.000,00						-	111.777.834,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						81.587.000,00							111.777.834,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	907,8 Ha	81.587.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	111.777.834,00	Dinas Pertanian dan Pangan
84.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**256.414.700,00**							**0,00**	
			Persentase Penerapan Teknologi yang Dianjurkan	-		-	75,86 %	256.414.700,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						256.414.700,00					-		0,00	
		-						256.414.700,00					-		0,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	256.414.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						256.414.700,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	12 Unit	256.414.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)						**9.807.895.279,00**							**10.113.728.575,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.828.280.079,00**							**5.881.045.206,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**3.828.280.079,00**							**5.881.045.206,00**	
85.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.208.208.571,00**							**4.056.744.534,00**	
			-	-		-	-	3.208.208.571,00						-	4.056.744.534,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.862.600,00					-		25.200.000,00	
		-						17.862.600,00					-		25.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.493.900,00						-	16.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.368.700,00						-	8.400.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.493.900,00							16.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	15.493.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	16.800.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.368.700,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.368.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	8.400.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.478.688.635,00					-		3.038.455.000,00	
		-						2.478.688.635,00					-		3.038.455.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	55.527.400,00						-	92.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	24.535.100,00						-	47.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.398.626.135,00						-	2.898.705.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.398.626.135,00							2.898.705.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	36 Orang/bulan	2.398.626.135,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	2.898.705.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						55.527.400,00							92.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	55.527.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	92.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						24.535.100,00							47.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	24.535.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	47.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.899.600,00					-		103.962.303,00	
		-						178.899.600,00					-		103.962.303,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	159.342.000,00						-	65.250.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.557.600,00						-	38.712.303,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.557.600,00							38.712.303,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.557.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	38.712.303,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						159.342.000,00							65.250.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	159.342.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	65.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.694.000,00					-		162.038.063,00	
		-						36.694.000,00					-		162.038.063,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	36.694.000,00						-	162.038.063,00	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.694.000,00							162.038.063,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	36.694.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	162.038.063,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						295.996.736,00					-		249.685.066,00	
		-						295.996.736,00					-		249.685.066,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	88.279.000,00						-	95.035.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	207.717.736,00						-	154.649.566,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						88.279.000,00							95.035.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	88.279.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	95.035.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						207.717.736,00							154.649.566,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	207.717.736,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	154.649.566,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.067.000,00					-		477.404.102,00	
		-						200.067.000,00					-		477.404.102,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	40.500.000,00						-	169.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	136.656.500,00						-	181.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	22.910.500,00						-	126.904.102,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						136.656.500,00							181.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	136.656.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	181.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.500.000,00							169.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	40.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	169.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.910.500,00							126.904.102,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	20 Unit	22.910.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	126.904.102,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
86.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**397.471.508,00**							**1.421.151.937,00**	
			Persentase Perencanaan Penataan Ruang	-		-	85,71 %	115.494.408,00						-	597.704.533,00	
			-	-		-	-	281.977.100,00						-	823.447.404,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						115.494.408,00					-		597.704.533,00	
		-						115.494.408,00					-		597.704.533,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	8.300.000,00						-	314.278.902,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	-	42.935.408,00						-	78.950.631,00	
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	64.259.000,00						-	204.475.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						8.300.000,00							314.278.902,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	314.278.902,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota						64.259.000,00							204.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	64.259.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	204.475.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						42.935.408,00							78.950.631,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	1 Laporan	42.935.408,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	78.950.631,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						226.839.000,00					-		634.123.899,00	
		-						226.839.000,00					-		634.123.899,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	-	193.500.600,00						-	315.500.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-		-	-	33.338.400,00						-	318.623.899,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						193.500.600,00							315.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	100 Layanan	193.500.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	315.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						33.338.400,00							318.623.899,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-		-	1 Sistem Informasi	33.338.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	318.623.899,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						55.138.100,00					-		189.323.505,00	
		-						55.138.100,00					-		189.323.505,00	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	-		-	-	1.198.500,00						-	60.637.500,00	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	-		-	-	50.448.800,00						-	109.369.323,00	
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-		-	-	3.490.800,00						-	19.316.682,00	
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						3.490.800,00							19.316.682,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-		-	5 Kasus	3.490.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	19.316.682,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan						1.198.500,00							60.637.500,00	
		Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	-		-	300 Dokumen	1.198.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	60.637.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR						50.448.800,00							109.369.323,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	-		-	1 Dokumen	50.448.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	109.369.323,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
87.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**222.600.000,00**							**403.148.735,00**	
			-	-		-	-	222.600.000,00						-	403.148.735,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00					-		403.148.735,00	
		-						0,00					-		403.148.735,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	-		-	-	0,00						-	180.563.735,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-		-	-	0,00						-	222.585.000,00	
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang						0,00							180.563.735,00	
		Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	180.563.735,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.13.5.01.0008	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00							222.585.000,00	
		Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	222.585.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis						222.600.000,00					-		0,00	
		-						222.600.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	-		-	-	222.600.000,00						-	0,00	
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang						222.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	-		-	1 Dokumen	222.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.979.615.200,00**							**4.232.683.369,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5.979.615.200,00**							**4.232.683.369,00**	
88.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**8.443.700,00**							**32.554.586,00**	
			-	-		-	-	8.443.700,00						-	32.554.586,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.443.700,00					-		32.554.586,00	
		-						8.443.700,00					-		32.554.586,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	8.443.700,00						-	32.554.586,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						8.443.700,00							32.554.586,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	10 Berita Acara	8.443.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	32.554.586,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
89.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**2.652.752.400,00**							**1.624.742.592,00**	
			-	-		-	-	2.652.752.400,00						-	1.624.742.592,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.652.752.400,00					-		1.624.742.592,00	
		-						2.652.752.400,00					-		1.624.742.592,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	2.652.752.400,00						-	1.624.742.592,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.652.752.400,00							1.624.742.592,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	391 Dokumen	2.652.752.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	1.624.742.592,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
90.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**189.963.300,00**							**539.254.141,00**	
			-	-		-	-	189.963.300,00						-	539.254.141,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						189.963.300,00					-		539.254.141,00	
		-						189.963.300,00					-		539.254.141,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	122.456.800,00						-	404.161.080,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	67.506.500,00						-	135.093.061,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						67.506.500,00							135.093.061,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	67.506.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	135.093.061,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						122.456.800,00							404.161.080,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	300 Dokumen	122.456.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	404.161.080,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
91.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**						**3.128.455.800,00**							**2.036.132.050,00**	
			-	-		-	-	3.128.455.800,00						-	2.036.132.050,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						1.458.443.000,00					-		925.650.100,00	
		-						1.458.443.000,00					-		925.650.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-		-	-	1.175.115.000,00						-	854.945.800,00	
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	-		-	-	283.328.000,00						-	70.704.300,00	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						1.175.115.000,00							854.945.800,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-		-	4 Dokumen	1.175.115.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	854.945.800,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa						283.328.000,00							70.704.300,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	-		-	4 Dokumen	283.328.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	70.704.300,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						1.670.012.800,00					-		1.110.481.950,00	
		-						1.670.012.800,00					-		1.110.481.950,00	
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	-		-	-	1.446.500.000,00						-	1.013.294.850,00	
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-		-	-	223.512.800,00						-	97.187.100,00	
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten						223.512.800,00							97.187.100,00	
		Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-		-	30 Dokumen	223.512.800,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	97.187.100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						1.446.500.000,00							1.013.294.850,00	
		Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	-		-	80 Berita Acara	1.446.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	1.013.294.850,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
		Dinas Lingkungan Hidup						**12.571.773.410,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.571.773.410,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**12.571.773.410,00**							**0,00**	
92.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.475.992.581,00**							**0,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	4.475.992.581,00						-	0,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.795.900,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
		-						14.795.900,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	11.624.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.171.100,00						-	0,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.624.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	11.624.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.171.100,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	3.171.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.112.286.849,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
		-						3.112.286.849,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	52.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	6.659.100,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.052.727.749,00						-	0,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.052.727.749,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	48 Orang/bulan	3.052.727.749,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						52.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	52.900.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.659.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	6.659.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
		-						15.000.000,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.954.700,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						86.954.700,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	70.655.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	16.299.700,00						-	0,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.299.700,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.299.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.655.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	70.655.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.559.000,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						36.559.000,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	36.559.000,00						-	0,00	
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.559.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	36.559.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						621.692.532,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
		-						621.692.532,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	227.267.240,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	394.425.292,00						-	0,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						227.267.240,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	227.267.240,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						394.425.292,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	394.425.292,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						588.703.600,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
		-						588.703.600,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	153.725.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	410.205.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	24.773.100,00						-	0,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						410.205.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	37 Unit	410.205.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						153.725.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	153.725.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.773.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	33 Unit	24.773.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
93.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**200.055.600,00**							**0,00**	
			Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	-		-	100 %	200.055.600,00						-	0,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						200.055.600,00					Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		0,00	
		-						200.055.600,00					Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		0,00	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-		-	-	200.055.600,00						-	0,00	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						200.055.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-		-	1 Dokumen	200.055.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
94.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**689.468.200,00**							**0,00**	
			Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	-		-	31 Parameter	689.468.200,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						689.468.200,00					Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		0,00	
		-						689.468.200,00					Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		0,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-		-	-	81.835.900,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	87.013.600,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	23.599.300,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	150.689.200,00						-	0,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	346.330.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						150.689.200,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	2 Dokumen	150.689.200,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						87.013.600,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	87.013.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						81.835.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-		-	57 Lokasi	81.835.900,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						23.599.300,00							0,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	2 Dokumen	23.599.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						346.330.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	2 Dokumen	346.330.200,00	Kab. Kulon Progo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
95.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.808.083.700,00**							**0,00**	
			Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	-		-	66,04 %	1.808.083.700,00						-	0,00	
			Persentase Taman Kondisi	-		-	79,59 %	1.808.083.700,00						-	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.808.083.700,00					Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		0,00	
		-						1.808.083.700,00					Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	-	190.120.000,00						-	0,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.617.963.700,00						-	0,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						1.617.963.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	8,6 Ha	1.617.963.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						190.120.000,00							0,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	1275 Unit	190.120.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Air Tanah	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
96.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**19.588.300,00**							**0,00**	
			Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	-		-	57,14 %	19.588.300,00						-	0,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						19.588.300,00					Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						19.588.300,00					Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		0,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	19.588.300,00						-	0,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						19.588.300,00							0,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	70 Badan Usaha	19.588.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
97.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**73.124.800,00**							**0,00**	
			Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	-		-	77,38 %	73.124.800,00						-	0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						73.124.800,00					Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		0,00	
		-						73.124.800,00					Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		0,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	-	34.935.600,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-		-	-	38.189.200,00						-	0,00	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						38.189.200,00							0,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-		-	180 Orang	38.189.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						34.935.600,00							0,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	3 Lembaga	34.935.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
98.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**7.894.000,00**							**0,00**	
			Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-		-	100 %	7.894.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						7.894.000,00					Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		0,00	
		-						7.894.000,00					Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		0,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	-	7.894.000,00						-	0,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						7.894.000,00							0,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	15 Pengaduan	7.894.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
99.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**5.297.566.229,00**							**0,00**	
			Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	-		-	28,64 %	5.297.566.229,00						-	0,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						5.297.566.229,00					Meningkatnya tata kelola persampahan		0,00	
		-						5.297.566.229,00					Meningkatnya tata kelola persampahan		0,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	-		-	-	441.543.800,00						-	0,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	-	4.856.022.429,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						441.543.800,00							0,00	
		Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	-		-	1 Laporan	441.543.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						4.856.022.429,00							0,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	12.025 Ton	4.856.022.429,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
100.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			Persentase pengurangan sampah	-		-	0 %	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Berkurangnya sampah		0,00	
		-						0,00					Berkurangnya sampah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**4.694.120.707,00**							**4.791.648.305,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.694.120.707,00**							**4.791.648.305,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.694.120.707,00**							**4.791.648.305,00**	
101.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.779.350.507,00**							**4.058.329.589,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	3.779.350.507,00						-	4.051.429.589,00	
			-	-		-	-	0,00						-	6.900.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.928.500,00					-		21.655.418,00	
		-						15.928.500,00					-		21.655.418,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.726.100,00						-	9.310.657,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.202.400,00						-	12.344.761,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.726.100,00							9.310.657,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	12.726.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.310.657,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.202.400,00							12.344.761,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	3.202.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.344.761,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.969.847.216,00					-		2.996.530.842,00	
		-						2.969.847.216,00					-		2.996.530.842,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	30.686.300,00						-	42.854.707,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.898.200,00						-	6.244.368,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.936.262.716,00						-	2.947.431.767,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.936.262.716,00							2.947.431.767,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	46 Orang/bulan	2.936.262.716,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.947.431.767,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						30.686.300,00							42.854.707,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	30.686.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	42.854.707,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.898.200,00							6.244.368,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	2.898.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.244.368,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		6.900.000,00	
		-						0,00					-		6.900.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	6.900.000,00	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							6.900.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	61 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.900.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.471.700,00					-		45.233.696,00	
		-						29.471.700,00					-		45.233.696,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	13.947.400,00						-	24.994.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.524.300,00						-	20.239.696,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.524.300,00							20.239.696,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.524.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.239.696,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.947.400,00							24.994.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	13.947.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.994.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						321.095.684,00					-		146.399.200,00	
		-						321.095.684,00					-		146.399.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	78.950.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	321.095.684,00						-	27.449.200,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							78.950.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	9 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	78.950.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						321.095.684,00							27.449.200,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	321.095.684,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.449.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						320.265.107,00					-		626.598.933,00	
		-						320.265.107,00					-		626.598.933,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	116.411.000,00						-	112.570.740,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	203.854.107,00						-	514.028.193,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						116.411.000,00							112.570.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	116.411.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	112.570.740,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						203.854.107,00							514.028.193,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	203.854.107,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	514.028.193,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.742.300,00					-		215.011.500,00	
		-						122.742.300,00					-		215.011.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	58.713.200,00						-	62.520.100,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	52.073.600,00						-	92.348.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	11.955.500,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	10.143.400,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						58.713.200,00							62.520.100,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	58.713.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	62.520.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						52.073.600,00							92.348.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	17 Unit	52.073.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	92.348.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						11.955.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	11.955.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							10.143.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	11 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.143.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
102.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**602.825.900,00**							**490.006.244,00**	
			Persentase Penduduk memiliki Kartu Identitas	-		-	92,23 %	602.825.900,00						-	490.006.244,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						602.825.900,00					-		490.006.244,00	
		-						602.825.900,00					-		490.006.244,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	-	581.186.400,00						-	459.274.656,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-		-	-	13.312.300,00						-	20.365.671,00	
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-		-	-	8.327.200,00						-	10.365.917,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						13.312.300,00							20.365.671,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-		-	1 Dokumen	13.312.300,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.365.671,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						581.186.400,00							459.274.656,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	48000 Dokumen	581.186.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	459.274.656,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan						8.327.200,00							10.365.917,00	
		Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-		-	2303 Laporan	8.327.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.365.917,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
103.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**187.918.900,00**							**123.010.840,00**	
			Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	-		-	99,60 %	116.441.800,00						-	35.210.840,00	
			-	-		-	-	71.477.100,00						-	87.800.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						71.477.100,00					-		87.800.000,00	
		-						71.477.100,00					-		87.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-		-	-	24.497.200,00						-	35.900.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-		-	-	46.979.900,00						-	51.900.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						24.497.200,00							35.900.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-		-	5000 Dokumen	24.497.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.900.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						46.979.900,00							51.900.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-		-	5000 Layanan	46.979.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	51.900.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						116.441.800,00					-		35.210.840,00	
		-						116.441.800,00					-		35.210.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	116.441.800,00						-	35.210.840,00	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						116.441.800,00							35.210.840,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	135 Laporan	116.441.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.210.840,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
104.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**102.245.500,00**							**94.454.719,00**	
			Inovasi pelayanan	-		-	2 Satuan Inovasi	102.245.500,00						-	94.454.719,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						72.072.400,00					-		43.797.300,00	
		-						72.072.400,00					-		43.797.300,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	-	72.072.400,00						-	43.797.300,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						72.072.400,00							43.797.300,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	2 Dokumen	72.072.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	43.797.300,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						26.626.900,00					-		35.518.000,00	
		-						26.626.900,00					-		35.518.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	4.649.800,00						-	11.759.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	21.977.100,00						-	23.759.000,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						4.649.800,00							11.759.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	3 Dokumen	4.649.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	11.759.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						21.977.100,00							23.759.000,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	3 Laporan	21.977.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.759.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						3.546.200,00					-		15.139.419,00	
		-						3.546.200,00					-		15.139.419,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-		-	-	3.546.200,00						-	15.139.419,00	
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						3.546.200,00							15.139.419,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-		-	1 Laporan	3.546.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.139.419,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
105.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**21.779.900,00**							**25.846.913,00**	
			Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	-		-	100 %	21.779.900,00						-	25.846.913,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						21.779.900,00					-		25.846.913,00	
		-						21.779.900,00					-		25.846.913,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	21.779.900,00						-	25.846.913,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						21.779.900,00							25.846.913,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	21.779.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.846.913,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**12.738.044.614,00**							**9.378.994.484,10**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.558.044.614,00**							**9.212.942.863,66**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**224.075.000,00**							**112.731.415,66**	
106.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**						**224.075.000,00**							**112.731.415,66**	
			Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi	-		-	100 %	224.075.000,00						-	112.731.415,66	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						224.075.000,00					-		112.731.415,66	
		-						224.075.000,00					-		112.731.415,66	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-		-	-	224.075.000,00						-	112.731.415,66	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						224.075.000,00							112.731.415,66	
		Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-		-	4 Dokumen	224.075.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	112.731.415,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**11.437.564.148,00**							**8.515.828.290,00**	
107.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.211.818.844,00**							**4.093.842.003,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	3.211.818.844,00						-	4.093.842.003,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.830.500,00					-		39.282.650,00	
		-						11.830.500,00					-		39.282.650,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.137.100,00						-	32.022.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.693.400,00						-	7.260.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.137.100,00							32.022.650,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	9.137.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	32.022.650,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.693.400,00							7.260.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.693.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.260.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.615.818.221,00					-		3.482.139.724,00	
		-						2.615.818.221,00					-		3.482.139.724,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	35.600.000,00						-	43.253.870,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.955.500,00						-	3.632.662,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.569.262.721,00						-	3.435.253.192,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.569.262.721,00							3.435.253.192,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	2.569.262.721,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.435.253.192,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						35.600.000,00							43.253.870,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	35.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	43.253.870,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.955.500,00							3.632.662,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	10.955.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.632.662,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66.186.400,00					-		36.750.362,00	
		-						66.186.400,00					-		36.750.362,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	55.993.800,00						-	18.212.920,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.192.600,00						-	18.537.442,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.192.600,00							18.537.442,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	10.192.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.537.442,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55.993.800,00							18.212.920,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	55.993.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.212.920,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						23.890.000,00					-		30.000.000,00	
		-						23.890.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	23.890.000,00						-	30.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.890.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	23.890.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.255.523,00					-		338.064.354,00	
		-						318.255.523,00					-		338.064.354,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	87.644.000,00						-	146.673.514,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	230.611.523,00						-	191.390.840,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						87.644.000,00							146.673.514,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	87.644.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	146.673.514,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						230.611.523,00							191.390.840,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	230.611.523,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	191.390.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.838.200,00					-		167.604.913,00	
		-						175.838.200,00					-		167.604.913,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	120.401.300,00						-	121.585.519,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	39.936.900,00						-	21.019.394,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.401.300,00							121.585.519,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	59 Unit	120.401.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	121.585.519,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.500.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	15.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						39.936.900,00							21.019.394,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	7 Unit	39.936.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.019.394,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
108.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**5.471.252.704,00**							**2.411.756.570,00**	
			Persentase BUMDes Kategori Maju	-		-	22,99 %	5.471.252.704,00						-	2.411.756.570,00	
			Persentase Kalurahan Kategori TDD	-		-	50,57 %	5.471.252.704,00						-	2.411.756.570,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						5.471.252.704,00					-		2.411.756.570,00	
		-						5.471.252.704,00					-		2.411.756.570,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	76.633.200,00						-	87.573.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	-	1.178.401.500,00						-	40.097.101,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	-	12.249.100,00						-	25.218.578,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	2.010.429.304,00						-	2.164.456.044,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	-	2.588.700,00						-	17.919.495,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	-	9.069.900,00						-	24.246.948,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	-	15.411.100,00						-	30.361.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	0,00						-	21.883.334,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	2.166.469.900,00						-	0,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						15.411.100,00							30.361.320,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	87 Dokumen	15.411.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.361.320,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						2.588.700,00							17.919.495,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	2.588.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.919.495,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						2.010.429.304,00							2.164.456.044,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	1 Dokumen	2.010.429.304,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.164.456.044,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						9.069.900,00							24.246.948,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	87 Dokumen	9.069.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.246.948,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						2.166.469.900,00							0,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	3 Laporan	2.166.469.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						0,00							21.883.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	4 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.883.334,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						1.178.401.500,00							40.097.101,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	1.178.401.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	40.097.101,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						12.249.100,00							25.218.578,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	87 Dokumen	12.249.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.218.578,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						76.633.200,00							87.573.750,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	2 Dokumen	76.633.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	87.573.750,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
109.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**2.754.492.600,00**							**2.010.229.717,00**	
			Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti	-		-	16 %	2.754.492.600,00						-	2.010.229.717,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.754.492.600,00					-		2.010.229.717,00	
		-						2.754.492.600,00					-		2.010.229.717,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	-	901.595.200,00						-	1.713.541.831,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.852.897.400,00						-	296.687.886,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						1.852.897.400,00							296.687.886,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	4 Lembaga	1.852.897.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	296.687.886,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						901.595.200,00							1.713.541.831,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	16 Laporan	901.595.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.713.541.831,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**896.405.466,00**							**584.383.158,00**	
110.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**177.609.900,00**							**89.321.232,00**	
			Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	-		-	84,09 %	177.609.900,00						-	89.321.232,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						177.609.900,00					-		89.321.232,00	
		-						177.609.900,00					-		89.321.232,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	128.164.900,00						-	30.686.205,00	
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	-		-	-	49.445.000,00						-	58.635.027,00	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						49.445.000,00							58.635.027,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	-		-	12 Laporan	49.445.000,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	58.635.027,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						128.164.900,00							30.686.205,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	128.164.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	30.686.205,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
111.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**450.245.066,00**							**187.706.453,00**	
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	-		-	61,37 %	450.245.066,00						-	187.706.453,00	
			Persentase Unmet Need	-		-	14,01 %	450.245.066,00						-	187.706.453,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						348.956.741,00					-		73.211.897,00	
		-						348.956.741,00					-		73.211.897,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	-	348.956.741,00						-	73.211.897,00	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						348.956.741,00							73.211.897,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	4 Organisasi	348.956.741,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	73.211.897,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						101.288.325,00					-		114.494.556,00	
		-						101.288.325,00					-		114.494.556,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-		-	-	53.408.325,00						-	39.716.556,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	47.880.000,00						-	74.778.000,00	
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						53.408.325,00							39.716.556,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-		-	1 Dokumen	53.408.325,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	39.716.556,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						47.880.000,00							74.778.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	47.880.000,00	Kab. Kulon Progo	Penghematan Belanja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	74.778.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
112.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**268.550.500,00**							**307.355.473,00**	
			Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera	-		-	6,79 %	268.550.500,00						-	307.355.473,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						56.350.500,00					-		118.504.565,00	
		-						56.350.500,00					-		118.504.565,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	19.200.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	-	37.150.500,00						-	93.504.565,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						37.150.500,00							93.504.565,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	1 Laporan	37.150.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	93.504.565,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						19.200.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	1 Laporan / Dokumen	19.200.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						212.200.000,00					-		188.850.908,00	
		-						212.200.000,00					-		188.850.908,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	176.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	36.200.000,00						-	8.850.908,00	
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga						36.200.000,00							8.850.908,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	1 Laporan	36.200.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	8.850.908,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						176.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	1 Laporan	176.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**180.000.000,00**							**166.051.620,44**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**180.000.000,00**							**166.051.620,44**	
113.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**180.000.000,00**							**166.051.620,44**	
			Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	-		-	13,79 %	180.000.000,00						-	166.051.620,44	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						180.000.000,00					-		166.051.620,44	
		-						180.000.000,00					-		166.051.620,44	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	180.000.000,00						-	166.051.620,44	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						180.000.000,00							166.051.620,44	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	166.051.620,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Dinas Perhubungan						**16.396.837.344,00**							**21.859.638.596,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**750.000.000,00**							**2.582.667.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**750.000.000,00**							**2.582.667.800,00**	
114.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**750.000.000,00**							**2.582.667.800,00**	
			-	-		-	-	750.000.000,00						-	2.582.667.800,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						750.000.000,00					-		2.582.667.800,00	
		-						750.000.000,00					-		2.582.667.800,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	-		-	-	0,00						-	1.542.667.800,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		-	-	750.000.000,00						-	1.040.000.000,00	
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Perhubungan
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						750.000.000,00							1.040.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		-	2 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	1.040.000.000,00	Dinas Perhubungan
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates						0,00							1.542.667.800,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	-		-	4 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	1.542.667.800,00	Dinas Perhubungan
	1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	0,00	Dinas Perhubungan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.646.837.344,00**							**19.276.970.796,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**15.646.837.344,00**							**19.276.970.796,00**	
115.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.895.378.594,00**							**6.374.460.096,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	3.147.956.110,00						-	3.526.618.500,00	
			Presentase Peningkatan Pennjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo	-		-	100 %	1.540.000,00						-	2.200.000,00	
			Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	299.605.300,00						-	505.872.400,00	
			Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	399.848.484,00						-	2.253.269.196,00	
			Presentase Peningkatan Penunjanng Urusan Pemerintah DaerahKabpaten/Kota	-		-	100 %	46.428.700,00						-	86.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.531.600,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.500.000,00	
		-						18.531.600,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.585.400,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	7.946.200,00						-	26.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.585.400,00							17.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	10.585.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	17.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.946.200,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	7.946.200,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	26.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.129.424.510,00					Kabupaten Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan		3.483.118.500,00	
		-						3.129.424.510,00					Kabupaten Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan		3.483.118.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	44.959.300,00						-	72.518.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	11.041.800,00						-	20.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.073.423.410,00						-	3.390.000.000,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.073.423.410,00							3.390.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	48 Orang/bulan	3.073.423.410,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.390.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.959.300,00							72.518.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	44.959.300,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	72.518.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						11.041.800,00							20.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	11.041.800,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.600.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.540.000,00					Kabupaten Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.200.000,00	
		-						1.540.000,00					Kabupaten Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.540.000,00						-	2.200.000,00	
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.540.000,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	5 Dokumen	1.540.000,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	2.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.428.700,00					Kabupaten Kulon Progo. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.500.000,00	
		-						46.428.700,00					Kabupaten Kulon Progo. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	31.055.200,00						-	54.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.373.500,00						-	32.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.373.500,00							32.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.373.500,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	32.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						31.055.200,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	31.055.200,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	54.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.329.000,00					Kab. Kulon Progo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelrahan		1.895.339.000,00	
		-						8.329.000,00					Kab. Kulon Progo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelrahan		1.895.339.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	8.329.000,00						-	1.895.339.000,00	
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.329.000,00							1.895.339.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	8.329.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.895.339.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.519.484,00					Kab, Kulon Progo, Seluruh Kecamatan, Selurh Kelurahan		357.930.196,00	
		-						391.519.484,00					Kab, Kulon Progo, Seluruh Kecamatan, Selurh Kelurahan		357.930.196,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	189.025.500,00						-	194.054.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	202.493.984,00						-	163.875.696,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						189.025.500,00							194.054.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	189.025.500,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	194.054.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						202.493.984,00							163.875.696,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	202.493.984,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	163.875.696,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						299.605.300,00					Kab.Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		505.872.400,00	
		-						299.605.300,00					Kab.Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		505.872.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	242.745.400,00						-	355.872.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	56.859.900,00						-	150.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						242.745.400,00							355.872.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	34 Unit	242.745.400,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	355.872.400,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						56.859.900,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	31 Unit	56.859.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
116.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**11.751.458.750,00**							**12.902.510.700,00**	
			Ketersediaan Perlengkapan Jalan	-		-	20,47 %	6.442.000,00						-	25.540.000,00	
			Ketersediaan Perlengkapan Jalan	-		-	20,47 %	621.358.600,00						-	703.900.000,00	
			Persentase ketersediaan perlengkapan Jalan	-		-	20.47 %	9.816.787.350,00						-	10.422.643.400,00	
			Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan	-		-	20.47 %	792.339.500,00						-	1.046.427.300,00	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	-		-	59,29 %	307.680.700,00						-	347.000.000,00	
			Persentase Tingkat kualitas layanan transportasi	-		-	100 %	206.850.600,00						-	357.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9.816.787.350,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.422.643.400,00	
		-						9.816.787.350,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.422.643.400,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	506.499.000,00						-	542.460.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	7.334.806.900,00						-	6.269.430.500,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	1.318.619.400,00						-	3.207.289.900,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	656.862.050,00						-	403.463.000,00	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1.318.619.400,00							3.207.289.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	77 Unit	1.318.619.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	3.207.289.900,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						506.499.000,00							542.460.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	52 Unit	506.499.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	542.460.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						656.862.050,00							403.463.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	4.287 Unit	656.862.050,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	403.463.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						7.334.806.900,00							6.269.430.500,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	3760 Unit	7.334.806.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	6.269.430.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						307.680.700,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		347.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						307.680.700,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		347.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	307.680.700,00						-	347.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						307.680.700,00							347.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	4 Unit	307.680.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	347.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						321.112.200,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		570.000.000,00	
		-						321.112.200,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		570.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	321.112.200,00						-	570.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						321.112.200,00							570.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	321.112.200,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	570.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						206.850.600,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		357.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						206.850.600,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		357.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-		-	-	119.985.000,00						-	229.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	-	86.865.600,00						-	128.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						119.985.000,00							229.000.000,00	
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-		-	5639 Unit	119.985.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	229.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						86.865.600,00							128.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	21 Unit	86.865.600,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	128.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						621.358.600,00					Kab.Klon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		703.900.000,00	
		-						621.358.600,00					Kab.Klon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		703.900.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	-	381.015.300,00						-	380.300.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	240.343.300,00						-	323.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						240.343.300,00							323.600.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-		-	3 Laporan	240.343.300,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	323.600.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						381.015.300,00							380.300.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	4 Laporan	381.015.300,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	380.300.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						6.442.000,00					Kab.Kulon Progo, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan		25.540.000,00	
		-						6.442.000,00					Kab.Kulon Progo, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan		25.540.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	6.442.000,00						-	25.540.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						6.442.000,00							25.540.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	2 Laporan	6.442.000,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	25.540.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						471.227.300,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		476.427.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						471.227.300,00					Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		476.427.300,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	471.227.300,00						-	476.427.300,00	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						471.227.300,00							476.427.300,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	3 Unit	471.227.300,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Jasa Umum	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	476.427.300,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**7.261.967.706,00**							**9.977.436.461,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.261.967.706,00**							**9.977.436.461,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.961.285.206,00**							**9.284.149.649,00**	
117.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.456.356.336,00**							**3.376.820.693,00**	
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	-		-	100 %	3.456.356.336,00						-	3.376.820.693,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46.461.700,00					-		56.688.171,00	
		-						46.461.700,00					-		56.688.171,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.339.900,00						-	16.993.894,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	37.121.800,00						-	39.694.277,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.339.900,00							16.993.894,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	9.339.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.993.894,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.121.800,00							39.694.277,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	37.121.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	39.694.277,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.977.842.130,00					-		2.898.166.740,00	
		-						2.977.842.130,00					-		2.898.166.740,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	38.992.500,00						-	56.718.759,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	3.725.900,00						-	6.929.688,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.935.123.730,00						-	2.834.518.293,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.935.123.730,00							2.834.518.293,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	2.935.123.730,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.834.518.293,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						38.992.500,00							56.718.759,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	38.992.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	56.718.759,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.725.900,00							6.929.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	3.725.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.929.688,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.000.000,00					-		25.385.760,00	
		-						14.000.000,00					-		25.385.760,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	14.000.000,00						-	25.385.760,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						14.000.000,00							25.385.760,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	14.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.385.760,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						88.240.400,00					-		87.691.467,00	
		-						88.240.400,00					-		87.691.467,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	71.592.000,00						-	62.009.921,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	16.648.400,00						-	25.681.546,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.648.400,00							25.681.546,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.648.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.681.546,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						71.592.000,00							62.009.921,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	71.592.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	62.009.921,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						68.041.250,00					-		26.540.916,00	
		-						68.041.250,00					-		26.540.916,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	68.041.250,00						-	26.540.916,00	
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						68.041.250,00							26.540.916,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	68.041.250,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	26.540.916,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.419.456,00					-		122.739.251,00	
		-						165.419.456,00					-		122.739.251,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	27.225.080,00						-	21.130.208,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	138.194.376,00						-	101.609.043,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.225.080,00							21.130.208,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	27.225.080,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.130.208,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						138.194.376,00							101.609.043,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	138.194.376,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	101.609.043,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96.351.400,00					-		159.608.388,00	
		-						96.351.400,00					-		159.608.388,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	7.000.000,00						-	28.201.082,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	73.186.600,00						-	104.896.249,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	16.164.800,00						-	26.511.057,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						73.186.600,00							104.896.249,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	16 Unit	73.186.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	104.896.249,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000,00							28.201.082,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.201.082,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						16.164.800,00							26.511.057,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	29 Unit	16.164.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	26.511.057,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
118.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**495.785.220,00**							**848.637.425,00**	
			Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)	-		-	88.10 %	495.785.220,00						-	848.637.425,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						495.785.220,00					-		848.637.425,00	
		-						495.785.220,00					-		848.637.425,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	453.234.620,00						-	596.941.152,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	42.550.600,00						-	251.696.273,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						453.234.620,00							596.941.152,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	1 Laporan	453.234.620,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	596.941.152,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						42.550.600,00							251.696.273,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	42.550.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	251.696.273,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
119.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.009.143.650,00**							**5.058.691.531,00**	
			Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)	-		-	82.50 %	3.009.143.650,00						-	5.058.691.531,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.009.143.650,00					-		5.058.691.531,00	
		-						3.009.143.650,00					-		5.058.691.531,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	86.401.750,00						-	576.309.812,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	3.610.000,00						-	116.862.618,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	-	27.889.600,00						-	151.693.961,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	48.772.300,00						-	227.605.811,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	2.842.470.000,00						-	3.986.219.329,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						3.610.000,00							116.862.618,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	3.610.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	116.862.618,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						27.889.600,00							151.693.961,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	1 Dokumen	27.889.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	151.693.961,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						48.772.300,00							227.605.811,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	2 Layanan	48.772.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	227.605.811,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						2.842.470.000,00							3.986.219.329,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	40 Titik	2.842.470.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.986.219.329,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						86.401.750,00							576.309.812,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	2 Aplikasi	86.401.750,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	576.309.812,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**96.671.000,00**							**217.985.024,00**	
120.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**96.671.000,00**							**217.985.024,00**	
			Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	-		-	98.06 %	96.671.000,00						-	217.985.024,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						96.671.000,00					-		217.985.024,00	
		-						96.671.000,00					-		217.985.024,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	-	94.673.000,00						-	197.332.564,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	-	1.998.000,00						-	20.652.460,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						1.998.000,00							20.652.460,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	80 %	1.998.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.652.460,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						94.673.000,00							197.332.564,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	80 %	94.673.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	197.332.564,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**204.011.500,00**							**475.301.788,00**	
121.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**204.011.500,00**							**475.301.788,00**	
			Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	-		-	55.61 %	204.011.500,00						-	475.301.788,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						204.011.500,00					-		475.301.788,00	
		-						204.011.500,00					-		475.301.788,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	6.101.000,00						-	23.227.866,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	197.910.500,00						-	452.073.922,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						6.101.000,00							23.227.866,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	6.101.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.227.866,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						197.910.500,00							452.073.922,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	4 Laporan	197.910.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	452.073.922,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						**3.653.364.568,00**							**3.867.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.498.447.618,00**							**3.700.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3.498.447.618,00**							**3.700.000.000,00**	
122.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.895.772.318,00**							**3.034.000.000,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	2.895.772.318,00						-	3.034.000.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.250.400,00					Perangkat Daerah		8.000.000,00	
		-						14.250.400,00					Perangkat Daerah		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	11.188.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.062.400,00						-	3.500.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.188.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	11.188.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.062.400,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	3.062.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.339.812.537,00					ASN		2.529.500.000,00	
		-						2.339.812.537,00					ASN		2.529.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	27.900.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	4.200.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.307.712.537,00						-	2.500.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.307.712.537,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	2.307.712.537,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.500.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						27.900.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	27.900.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.200.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	4.200.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						61.307.656,00					Perangkat Daerah		41.000.000,00	
		-						61.307.656,00					Perangkat Daerah		41.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	47.107.656,00						-	26.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.200.000,00						-	14.500.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.200.000,00							14.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	14.200.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						47.107.656,00							26.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	47.107.656,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	26.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13.648.000,00					Perangkat Daerah		0,00	
		-						13.648.000,00					Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	13.648.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.648.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	13.648.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						375.241.725,00					Perangkat Daerah		370.000.000,00	
		-						375.241.725,00					Perangkat Daerah		370.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	160.405.284,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	214.836.441,00						-	170.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.405.284,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	160.405.284,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	200.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						214.836.441,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	214.836.441,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	170.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.512.000,00					Perangkat Daerah		90.000.000,00	
		-						91.512.000,00					Perangkat Daerah		90.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	59.729.500,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	31.782.500,00						-	35.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						59.729.500,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	16 Unit	59.729.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	55.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						31.782.500,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	52 Unit	31.782.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
123.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**104.656.050,00**							**117.500.000,00**	
			Persentase Koperasi Sehat	-		-	31,10 %	104.656.050,00						-	117.500.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						104.656.050,00					Koperasi		117.500.000,00	
		-						104.656.050,00					Koperasi		117.500.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-		-	-	104.406.050,00						-	116.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	-	250.000,00						-	1.500.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						104.406.050,00							116.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-		-	20 Unit Usaha	104.406.050,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	116.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						250.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	10 Unit Usaha	250.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	1.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
124.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**41.925.000,00**							**43.000.000,00**	
			Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas	-		-	53,79 %	41.925.000,00						-	43.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						41.925.000,00					UMKM		43.000.000,00	
		-						41.925.000,00					UMKM		43.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	5.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	36.425.000,00						-	40.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						5.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	5.500.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	3.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						36.425.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	50 Unit Usaha	36.425.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
125.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**456.094.250,00**							**501.000.000,00**	
			Omzet usaha mikro	-		-	183600000000 Rupiah	456.094.250,00						-	501.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						456.094.250,00					KUMKM		501.000.000,00	
		-						456.094.250,00					KUMKM		501.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	456.094.250,00						-	501.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0008	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						456.094.250,00							501.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	1 Lembaga	456.094.250,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	501.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**154.916.950,00**							**167.500.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**154.916.950,00**							**167.500.000,00**	
126.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**154.916.950,00**							**167.500.000,00**	
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	-		-	16507 Unit	154.916.950,00						-	167.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						154.916.950,00					IKM		167.500.000,00	
		-						154.916.950,00					IKM		167.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	-	4.753.900,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	4.240.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	142.861.850,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	160.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	-	2.900.500,00						-	0,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						160.700,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	1 Dokumen	160.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						4.240.000,00							3.500.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	2 Dokumen	4.240.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	3.500.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						4.753.900,00							4.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	2 Dokumen	4.753.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	4.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						142.861.850,00							160.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	3 Dokumen	142.861.850,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	160.000.000,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						2.900.500,00							0,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	2 Dokumen	2.900.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**2.875.773.755,00**							**4.048.850.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.875.773.755,00**							**4.048.850.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**2.875.773.755,00**							**4.048.850.000,00**	
127.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.531.734.755,00**							**3.189.150.000,00**	
			-	-		-	-	2.531.734.755,00						-	3.189.150.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.808.900,00					Masyarakat Kulon Progo		21.000.000,00	
		-						9.808.900,00					Masyarakat Kulon Progo		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	8.189.300,00						-	11.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.619.600,00						-	9.500.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.189.300,00							11.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	8.189.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	11.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.619.600,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.619.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	9.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.857.512.415,00					Masyarakat Kulon Progo		2.194.650.000,00	
		-						1.857.512.415,00					Masyarakat Kulon Progo		2.194.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	30.600.000,00						-	33.150.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.617.400,00						-	11.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.824.295.015,00						-	2.150.000.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.824.295.015,00							2.150.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	1.824.295.015,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	2.150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						30.600.000,00							33.150.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	30.600.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	33.150.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.617.400,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	2.617.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	11.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kulon Progo		35.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kulon Progo		35.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						65.418.900,00					Masyarakat Kulon Progo		160.000.000,00	
		-						65.418.900,00					Masyarakat Kulon Progo		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	48.530.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	16.888.900,00						-	65.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.888.900,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.888.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48.530.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	48.530.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	95.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.887.000,00					Masyarakat Kulon Progo		60.000.000,00	
		-						35.887.000,00					Masyarakat Kulon Progo		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	35.887.000,00						-	60.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.887.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	35.887.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						454.470.240,00					-		520.000.000,00	
		-						454.470.240,00					-		520.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	158.857.632,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	295.612.608,00						-	340.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						158.857.632,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	158.857.632,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	180.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						295.612.608,00							340.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	295.612.608,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	340.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.637.300,00					Masyarakat Kulon Progo		270.000.000,00	
		-						108.637.300,00					Masyarakat Kulon Progo		270.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	63.251.400,00						-	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	45.385.900,00						-	90.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						63.251.400,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	15 Unit	63.251.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	120.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.385.900,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	44 Unit	45.385.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	90.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
128.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**8.550.900,00**							**140.000.000,00**	
			-	-		-	-	8.550.900,00						-	140.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						8.550.900,00					Masyarakat Kulon Progo		140.000.000,00	
		-						8.550.900,00					Masyarakat Kulon Progo		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	8.550.900,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						8.550.900,00							140.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	8.550.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	140.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
129.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**87.707.100,00**							**200.000.000,00**	
			-	-		-	-	87.707.100,00						-	200.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						87.707.100,00					Masyarakat Kulon Progo		200.000.000,00	
		-						87.707.100,00					Masyarakat Kulon Progo		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	-	87.707.100,00						-	200.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						87.707.100,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	87.707.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
130.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**211.786.600,00**							**343.000.000,00**	
			-	-		-	-	211.786.600,00						-	343.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						211.786.600,00					Masyarakat Kulon Progo		343.000.000,00	
		-						211.786.600,00					Masyarakat Kulon Progo		343.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	895.700,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	2.155.800,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	208.735.100,00						-	286.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						208.735.100,00							286.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	2000 Pelaku Usaha	208.735.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	286.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						2.155.800,00							15.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	10 Pelaku Usaha	2.155.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						895.700,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	10 Kegiatan Usaha	895.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	42.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
131.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**1.073.100,00**							**55.200.000,00**	
			-	-		-	-	1.073.100,00						-	55.200.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.073.100,00					Masyarakat Kulon Progo		55.200.000,00	
		-						1.073.100,00					Masyarakat Kulon Progo		55.200.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	898.400,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	174.700,00						-	200.000,00	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						898.400,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	12 Kegiatan Usaha	898.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						174.700,00							200.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	1 Kegiatan Usaha	174.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
132.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**34.921.300,00**							**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	34.921.300,00						-	50.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						34.921.300,00					Masyarakat Kulon Progo		50.000.000,00	
		-						34.921.300,00					Masyarakat Kulon Progo		50.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	-	34.921.300,00						-	50.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						34.921.300,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	4 Dokumen	34.921.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						**17.178.935.769,00**							**20.384.293.800,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.178.935.769,00**							**20.384.293.800,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**17.178.935.769,00**							**20.384.293.800,00**	
133.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.903.629.769,00**							**5.705.293.800,00**	
			Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi.	-		-	100,00 %	4.903.629.769,00						-	5.680.293.800,00	
			-	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						41.489.000,00					Masyarakat Umum		32.000.000,00	
		-						41.489.000,00					Masyarakat Umum		32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	24.960.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	16.529.000,00						-	17.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						24.960.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	24.960.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.529.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	16.529.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.112.163.880,00					Masyarakat Umum		3.583.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						3.112.163.880,00					Masyarakat Umum		3.583.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	54.766.500,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	7.500.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.049.897.380,00						-	3.500.000.000,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.049.897.380,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	39 Orang/bulan	3.049.897.380,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54.766.500,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	54.766.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	65.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.500.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Umum		25.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Umum		25.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						90.740.300,00					Masyarakat Umum		120.000.000,00	
		-						90.740.300,00					Masyarakat Umum		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	68.006.300,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.734.000,00						-	20.000.000,00	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.734.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.734.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						68.006.300,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	14 Laporan	68.006.300,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.105.000,00					Masyarakat Umum		35.000.000,00	
		-						10.105.000,00					Masyarakat Umum		35.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.105.000,00						-	35.000.000,00	
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.105.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	10.105.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.433.565.689,00					Masyarakat Umum		1.530.293.800,00	
		-						1.433.565.689,00					Masyarakat Umum		1.530.293.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	92.419.845,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.341.145.844,00						-	1.435.293.800,00	
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						92.419.845,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	92.419.845,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	95.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.341.145.844,00							1.435.293.800,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.341.145.844,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.435.293.800,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						215.565.900,00					Masyarakat Umum		415.000.000,00	
		-						215.565.900,00					Masyarakat Umum		415.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	89.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	92.988.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	33.577.900,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						92.988.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	17 Unit	92.988.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	130.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						89.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	89.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	250.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						33.577.900,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	26 Unit	33.577.900,00	Kab. Kulon Progo	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
134.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.323.022.000,00**							**3.000.000.000,00**	
			Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya.	-		-	72.300 Orang	1.323.022.000,00						-	3.000.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.323.022.000,00					Masyarakat umum dan pelaku seni budaya		3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.323.022.000,00					Masyarakat umum dan pelaku seni budaya		3.000.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	1.323.022.000,00						-	3.000.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						1.323.022.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	2 Objek	1.323.022.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Kalibawang || Desa Banjaroyo || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya			-	3.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
135.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**10.602.284.000,00**							**9.444.000.000,00**	
			-	-		-	-	10.602.284.000,00						-	9.444.000.000,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman						1.056.000.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		1.150.000.000,00	
		-						1.056.000.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		1.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	-		-	-	206.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	-		-	3 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	-		-	2 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						206.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	-		-	1 Unit	206.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						696.600.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		750.000.000,00	
		-						696.600.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		750.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	-		-	-	266.600.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	-		-	-	330.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						266.600.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	-		-	4 Objek	266.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	250.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya						330.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	-		-	21 Objek	330.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	-		-	3 Objek	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya						1.998.020.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		2.000.000.000,00	
		-						1.998.020.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		2.000.000.000,00	
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	-		-	-	1.998.020.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota						1.998.020.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	-		-	1 Objek	1.998.020.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	2.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						520.000.000,00					Pelaku Seni Budaya.		550.000.000,00	
		-						520.000.000,00					Pelaku Seni Budaya.		550.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	-		-	-	520.000.000,00						-	550.000.000,00	
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya						520.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	-		-	6 Unit	520.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	550.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						6.681.664.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		7.194.000.000,00	
		-						6.681.664.000,00					Masyarakat Umum, Peserta Didik, dan Pelaku Seni Budaya.		7.194.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	-		-	-	140.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	-		-	-	1.100.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	1.900.000.000,00						-	2.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	-		-	-	403.137.300,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-		-	-	864.526.700,00						-	870.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	-		-	-	550.000.000,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	-		-	-	74.000.000,00						-	74.000.000,00	
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya						550.000.000,00							550.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	-		-	1 Laporan	550.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	550.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	-		-	1 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya						403.137.300,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	-		-	1 Laporan	403.137.300,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan						350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	-		-	10 Orang	350.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	-		-	3 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						1.900.000.000,00							2.300.000.000,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	4 Laporan	1.900.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	2.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah						140.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	-		-	2 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						74.000.000,00							74.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	-		-	75 Orang	74.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	74.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						600.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-		-	4 Laporan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	-		-	2 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						864.526.700,00							870.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-		-	4 Laporan	864.526.700,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	870.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**4.100.443.572,00**							**4.593.307.136,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.100.443.572,00**							**4.593.307.136,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.992.113.822,00**							**4.306.977.264,00**	
136.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.867.018.922,00**							**3.890.409.780,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	3.867.018.922,00						-	3.890.409.780,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.872.500,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		7.345.000,00	
		-						8.872.500,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		7.345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.292.000,00						-	3.575.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.580.500,00						-	3.770.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.292.000,00							3.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	6.292.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.575.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.580.500,00							3.770.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.580.500,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.770.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.003.002.084,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.032.027.278,00	
		-						3.003.002.084,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.032.027.278,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	27.797.400,00						-	28.785.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.784.600,00						-	4.050.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.972.420.084,00						-	2.999.192.278,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.972.420.084,00							2.999.192.278,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	38 Orang/bulan	2.972.420.084,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.999.192.278,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						27.797.400,00							28.785.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	27.797.400,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.785.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.784.600,00							4.050.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	2.784.600,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.050.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.498.661,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		59.590.000,00	
		-						37.498.661,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		59.590.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	23.976.361,00						-	36.360.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.522.300,00						-	23.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.522.300,00							23.230.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.522.300,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.230.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.976.361,00							36.360.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	23.976.361,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	36.360.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						131.175.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		101.000.000,00	
		-						131.175.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		101.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	131.175.000,00						-	101.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						131.175.000,00							101.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	131.175.000,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	101.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						390.019.377,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		374.304.502,00	
		-						390.019.377,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		374.304.502,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	115.532.977,00						-	109.987.502,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	274.486.400,00						-	264.317.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115.532.977,00							109.987.502,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	115.532.977,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	109.987.502,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						274.486.400,00							264.317.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	274.486.400,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	264.317.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						296.451.300,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		316.143.000,00	
		-						296.451.300,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		316.143.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	158.651.300,00						-	156.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	99.707.600,00						-	116.340.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	38.092.400,00						-	43.303.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						99.707.600,00							116.340.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	99.707.600,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	116.340.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						158.651.300,00							156.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	158.651.300,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	156.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						38.092.400,00							43.303.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	35 Unit	38.092.400,00	Kab. Kulon Progo	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	43.303.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
137.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**122.575.900,00**							**332.449.584,00**	
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-		-	219132 Orang	120.030.600,00						-	290.449.584,00	
			-	-		-	-	2.545.300,00						-	42.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						120.030.600,00					Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat umum		290.449.584,00	
		-						120.030.600,00					Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat umum		290.449.584,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	15.813.600,00						-	103.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-		-	-	1.311.200,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	1.237.200,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	13.594.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	-	88.074.600,00						-	149.449.584,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						1.237.200,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	4 Perpustakaan	1.237.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	18.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						88.074.600,00							149.449.584,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	1 Perpustakaan	88.074.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	149.449.584,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						13.594.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	1 Perpustakaan	13.594.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	12.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						1.311.200,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-		-	36100 Eksemplar	1.311.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	8.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						15.813.600,00							103.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	600 Eksemplar	15.813.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	103.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.545.300,00					Perpustakaan kalurahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		42.000.000,00	
		-						2.545.300,00					Perpustakaan kalurahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		42.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	-	2.545.300,00						-	42.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						2.545.300,00							42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	3 Perpustakaan	2.545.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	42.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
138.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**2.519.000,00**							**84.117.900,00**	
			Naskah Kuno yang Terdata	-		-	13 Naskah	2.519.000,00						-	84.117.900,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						2.519.000,00					Masyarakat pemilik naskah kuno, kalurahan se-Kab. Kulon Progo		84.117.900,00	
		-						2.519.000,00					Masyarakat pemilik naskah kuno, kalurahan se-Kab. Kulon Progo		84.117.900,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	1.414.800,00						-	73.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	1.104.200,00						-	11.117.900,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						1.414.800,00							73.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	20 Orang	1.414.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	73.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						1.104.200,00							11.117.900,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	1 Eksemplar	1.104.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	11.117.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**108.329.750,00**							**286.329.872,00**	
139.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**108.329.750,00**							**286.329.872,00**	
			Nilai ASKI Perangkat Daerah	-		-	87,5 Nilai	108.329.750,00						-	286.329.872,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						100.244.650,00					Perangkat Daerah, BUMD		218.038.872,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						100.244.650,00					Perangkat Daerah, BUMD		218.038.872,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	4.658.800,00						-	41.200.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	-	95.585.850,00						-	176.838.872,00	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						95.585.850,00							176.838.872,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	12000 Berkas	95.585.850,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	176.838.872,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						4.658.800,00							41.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	4.658.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	41.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						6.050.000,00					Perangkat Daerah, BUMD		56.670.000,00	
		-						6.050.000,00					Perangkat Daerah, BUMD		56.670.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	-	6.050.000,00						-	56.670.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						6.050.000,00							56.670.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	10000 Arsip	6.050.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	56.670.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						2.035.100,00					Arsip LKD		11.621.000,00	
		-						2.035.100,00					Arsip LKD		11.621.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	2.035.100,00						-	11.621.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						2.035.100,00							11.621.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	100 Pengguna	2.035.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	11.621.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Kelautan dan Perikanan						**4.025.998.408,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.025.998.408,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.025.998.408,00**							**0,00**	
140.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.033.945.258,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	3.033.945.258,00						-	0,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.841.800,00					-		0,00	
		-						12.841.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.291.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.550.000,00						-	0,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.291.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	9.291.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	3.550.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.631.708.178,00					-		0,00	
		-						2.631.708.178,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	39.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.633.800,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.590.174.378,00						-	0,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.590.174.378,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	518 Orang/bulan	2.590.174.378,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						39.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	39.900.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.633.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.633.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						41.462.600,00					-		0,00	
		-						41.462.600,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	34.163.500,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.299.100,00						-	0,00	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.299.100,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.299.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						34.163.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	34.163.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.875.000,00					-		0,00	
		-						9.875.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.875.000,00						-	0,00	
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.875.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.875.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.386.880,00					-		0,00	
		-						228.386.880,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	63.642.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	164.744.880,00						-	0,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						63.642.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	63.642.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						164.744.880,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	164.744.880,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.670.800,00					-		0,00	
		-						109.670.800,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	99.946.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.724.800,00						-	0,00	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						99.946.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	42 Unit	99.946.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.724.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	13 Unit	9.724.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
141.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**136.837.050,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	136.837.050,00						-	0,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						32.083.900,00					-		0,00	
		-						32.083.900,00					-		0,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	-	32.083.900,00						-	0,00	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						32.083.900,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	14 Unit	32.083.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.572.800,00					-		0,00	
		-						14.572.800,00					-		0,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	14.572.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						14.572.800,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	60 Orang	14.572.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						90.180.350,00					-		0,00	
		-						90.180.350,00					-		0,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	-	90.180.350,00						-	0,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						90.180.350,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	1 Layanan	90.180.350,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
142.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**498.173.700,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	498.173.700,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						27.500.000,00					-		0,00	
		-						27.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	-	27.500.000,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						27.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	1 Kelompok	27.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						470.673.700,00					-		0,00	
		-						470.673.700,00					-		0,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-		-	-	35.433.900,00						-	0,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	363.360.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	71.879.800,00						-	0,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						363.360.000,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Unit	363.360.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.433.900,00							0,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-		-	1 Dokumen	35.433.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						71.879.800,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	59 Unit	71.879.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
143.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**33.615.500,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	33.615.500,00						-	0,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						33.615.500,00					-		0,00	
		-						33.615.500,00					-		0,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	12.515.500,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	21.100.000,00						-	0,00	
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						12.515.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	60 Pelaku Usaha	12.515.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						21.100.000,00							0,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	30 Pelaku Usaha	21.100.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
144.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**323.426.900,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	323.426.900,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						12.116.900,00					-		0,00	
		-						12.116.900,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	12.116.900,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						12.116.900,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	30 Unit Usaha	12.116.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						311.310.000,00					-		0,00	
		-						311.310.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-		-	-	311.310.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						311.310.000,00							0,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-		-	25 Pelaku Usaha	311.310.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Dinas Pariwisata						**8.460.755.428,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.900.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.900.000.000,00**							**0,00**	
145.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**1.900.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.900.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						1.400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						1.400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	-		-	-	1.400.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						1.400.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	-		-	7 Objek	1.400.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						500.000.000,00					Masyarakat Kulon Progo		0,00	
		-						500.000.000,00					Masyarakat Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah						350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	-		-	4 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Keistimewaan DIY	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.560.755.428,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**6.560.755.428,00**							**0,00**	
146.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.735.696.070,00**							**0,00**	
			Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	2.606.066.570,00						-	0,00	
			Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 undefined	129.629.500,00						-	0,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.673.800,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						13.673.800,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.559.500,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.114.300,00						-	0,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.559.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	9.559.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.114.300,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	21 Laporan	4.114.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.129.665.448,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						2.129.665.448,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	42.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	3.499.900,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.083.365.548,00						-	0,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.083.365.548,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	27/12 Orang/bulan	2.083.365.548,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Daerah - LRA Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						42.800.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	42.800.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.499.900,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	3.499.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						69.936.066,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						69.936.066,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	51.388.766,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.547.300,00						-	0,00	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.547.300,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	18.547.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						51.388.766,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	51.388.766,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.614.000,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						32.614.000,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	32.614.000,00						-	0,00	
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.614.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	32.614.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360.177.256,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						360.177.256,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	114.424.568,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	245.752.688,00						-	0,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						114.424.568,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	114.424.568,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						245.752.688,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	245.752.688,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.629.500,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						129.629.500,00					ASN Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.759.800,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	76.038.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	27.831.700,00						-	0,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						76.038.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	15 Unit	76.038.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.759.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	25.759.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						27.831.700,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	107 Unit	27.831.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
147.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**3.423.575.433,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	3.423.575.433,00						-	0,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						3.206.466.133,00					Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						3.206.466.133,00					Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-		-	-	3.206.466.133,00						-	0,00	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						3.206.466.133,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-		-	3 Dokumen	3.206.466.133,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						149.015.300,00					Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						149.015.300,00					Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	149.015.300,00						-	0,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						149.015.300,00							0,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	8 Unit	149.015.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						68.094.000,00					Pelaku Usaha di Kabupaten Kulon Progo		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						68.094.000,00					Pelaku Usaha di Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	68.094.000,00						-	0,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						68.094.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	44 Pelaku Usaha	68.094.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
148.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**273.897.925,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	273.897.925,00						-	0,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						273.897.925,00					Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara yang akan berkunjung di Destinasi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						273.897.925,00					Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara yang akan berkunjung di Destinasi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	190.898.125,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	82.999.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						190.898.125,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	190.898.125,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						82.999.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Promosi	82.999.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
149.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**127.586.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	127.586.000,00						-	0,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						127.586.000,00					Pelaku Usaha di Kabupaten Kulon Progo		0,00	
		-						127.586.000,00					Pelaku Usaha di Kabupaten Kulon Progo		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	-	77.706.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	-	49.880.000,00						-	0,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						77.706.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	60 Orang	77.706.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						49.880.000,00							0,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	40 Orang	49.880.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Pariwisata
		Dinas Perdagangan						**8.266.408.600,00**							**16.035.386.066,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.266.408.600,00**							**16.035.386.066,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**8.266.408.600,00**							**16.035.386.066,00**	
150.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.160.793.606,00**							**4.222.940.673,00**	
			Persentase subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	-		-	100 %	4.160.793.606,00						-	4.222.940.673,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.374.000,00					-		14.635.600,00	
		-						18.374.000,00					-		14.635.600,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.455.600,00						-	6.955.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.918.400,00						-	7.680.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.455.600,00							6.955.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	12.455.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	6.955.600,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.918.400,00							7.680.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	5.918.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	7.680.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.542.204.250,00					-		3.633.247.488,00	
		-						3.542.204.250,00					-		3.633.247.488,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	49.100.000,00						-	58.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	19.831.600,00						-	22.254.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.473.272.650,00						-	3.552.393.488,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.473.272.650,00							3.552.393.488,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	47 Orang/bulan	3.473.272.650,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	3.552.393.488,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						49.100.000,00							58.600.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	49.100.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	58.600.000,00	Dinas Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						19.831.600,00							22.254.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	19.831.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	22.254.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.723.600,00					-		39.053.600,00	
		-						58.723.600,00					-		39.053.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	45.509.100,00						-	20.598.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.214.500,00						-	18.455.600,00	
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.214.500,00							18.455.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.214.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	18.455.600,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						45.509.100,00							20.598.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	45.509.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	20.598.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.632.000,00					-		18.371.700,00	
		-						12.632.000,00					-		18.371.700,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.632.000,00						-	18.371.700,00	
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.632.000,00							18.371.700,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	12.632.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	18.371.700,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						374.092.356,00					-		346.643.385,00	
		-						374.092.356,00					-		346.643.385,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	166.034.084,00						-	172.199.409,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.058.272,00						-	174.443.976,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						166.034.084,00							172.199.409,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	166.034.084,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	172.199.409,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						208.058.272,00							174.443.976,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	208.058.272,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	174.443.976,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.767.400,00					-		170.988.900,00	
		-						154.767.400,00					-		170.988.900,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	131.296.100,00						-	144.936.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	23.471.300,00						-	26.052.700,00	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						131.296.100,00							144.936.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	21 Unit	131.296.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	144.936.200,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.471.300,00							26.052.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	14 Unit	23.471.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	26.052.700,00	Dinas Perdagangan
151.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**3.770.516.736,00**							**11.321.325.171,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase pasar rakyat kondisi baik	-		-	44 %	3.770.516.736,00						-	11.321.325.171,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3.354.907.236,00					-		10.761.325.171,00	
		-						3.354.907.236,00					-		10.761.325.171,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	2.367.349.636,00						-	2.550.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	987.557.600,00						-	8.211.325.171,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						987.557.600,00							8.211.325.171,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	2 Unit	987.557.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	8.211.325.171,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						2.367.349.636,00							2.550.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	25 Unit	2.367.349.636,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	2.550.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						415.609.500,00					-		560.000.000,00	
		-						415.609.500,00					-		560.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	213.918.900,00						-	265.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						213.918.900,00							265.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	2800 Dokumen	213.918.900,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	265.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						201.690.600,00							295.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	4130 Dokumen	201.690.600,00	Kab. Kulon Progo	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	295.000.000,00	Dinas Perdagangan
152.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**205.240.400,00**							**334.951.763,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Stabilitas harga bahan pokok antar waktu	-		-	5,82 %	205.240.400,00						-	334.951.763,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						3.627.600,00					-		84.951.763,00	
		-						3.627.600,00					-		84.951.763,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	-	3.627.600,00						-	84.951.763,00	
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						3.627.600,00							84.951.763,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	1 Laporan	3.627.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	84.951.763,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						201.612.800,00					-		250.000.000,00	
		-						201.612.800,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	200.150.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-		-	-	1.462.800,00						-	0,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						1.462.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-		-	12 Laporan	1.462.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						200.150.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	200.150.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	250.000.000,00	Dinas Perdagangan
153.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**43.595.000,00**							**0,00**	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	-		-	18 orang	43.595.000,00						-	0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						43.595.000,00					-		0,00	
		-						43.595.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	-	43.595.000,00						-	0,00	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						43.595.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	2 Pelaku Usaha	43.595.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	0,00	Dinas Perdagangan
154.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**86.262.858,00**							**156.168.459,00**	
			Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	-		-	92,68 %	86.262.858,00						-	156.168.459,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						86.262.858,00					-		156.168.459,00	
		-						86.262.858,00					-		156.168.459,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	-	86.262.858,00						-	156.168.459,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						86.262.858,00							156.168.459,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	4800 Unit	86.262.858,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	156.168.459,00	Dinas Perdagangan
		Sekretariat Daerah						**24.478.498.882,00**							**24.882.025.923,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.478.498.882,00**							**24.882.025.923,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.478.498.882,00**							**24.882.025.923,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
155.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.555.821.718,00**							**18.673.792.200,00**	
			1. Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi; 2. Presentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi ; 3. Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan	-		-	100%; 100%; 100% undefined	4.610.562.956,00						-	4.412.400.000,00	
			1. Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi; 2. Presentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi ; 3. Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan	-		-	100%; 100%; 100%	14.945.258.762,00						-	14.261.392.200,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.200.000,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		13.000.000,00	
		-						14.200.000,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.700.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	5.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.700.000,00							8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	10.700.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.595.999.596,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		9.653.595.200,00	
		-						9.595.999.596,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		9.653.595.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	122.550.000,00						-	147.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	3.338.500,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	9.470.111.096,00						-	9.500.595.200,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.470.111.096,00							9.500.595.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	133 Orang/bulan	9.470.111.096,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.500.595.200,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						122.550.000,00							147.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	122.550.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	147.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.338.500,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	3.338.500,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.000.000,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		10.000.000,00	
		-						7.000.000,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	7.000.000,00						-	10.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.051.642.800,00					Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.053.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.051.642.800,00					Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.053.430.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	700.147.900,00						-	639.330.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	351.494.900,00						-	414.100.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						351.494.900,00							414.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	351.494.900,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	414.100.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						700.147.900,00							639.330.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	700.147.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	639.330.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.094.466.400,00					Lingkup Sekretariat Daerah		72.720.000,00	
		-						1.094.466.400,00					Lingkup Sekretariat Daerah		72.720.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.094.466.400,00						-	72.720.000,00	
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.094.466.400,00							72.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	88 Unit	1.094.466.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	72.720.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.442.500.956,00					Lingkup Sekretariat Daerah		3.474.400.000,00	
		-						3.442.500.956,00					Lingkup Sekretariat Daerah		3.474.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	802.506.501,00						-	727.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.639.994.455,00						-	2.747.200.000,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						802.506.501,00							727.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	802.506.501,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	727.200.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.639.994.455,00							2.747.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	2.639.994.455,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.747.200.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.744.510.341,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.975.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.744.510.341,00					Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.975.560.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	592.179.141,00						-	691.850.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	860.473.300,00						-	942.330.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	291.857.900,00						-	341.380.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						860.473.300,00							942.330.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	72 Unit	860.473.300,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	942.330.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						592.179.141,00							691.850.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	9 Unit	592.179.141,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	691.850.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						291.857.900,00							341.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	240 Unit	291.857.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	341.380.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						963.899.600,00					Bupati dan Wakil Bupati		922.047.000,00	
		-						963.899.600,00					Bupati dan Wakil Bupati		922.047.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	627.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	178.797.000,00						-	178.797.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	16.043.200,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	142.059.400,00						-	126.250.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						178.797.000,00							178.797.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang/Bulan	178.797.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	178.797.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						142.059.400,00							126.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	10 Paket	142.059.400,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	126.250.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						16.043.200,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	8 Orang	16.043.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						627.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	10 Orang/Bulan	627.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						399.337.200,00					Bupati, Wakil Bupati, Sekda		386.040.000,00	
		-						399.337.200,00					Bupati, Wakil Bupati, Sekda		386.040.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	180.267.100,00						-	191.900.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	46.077.000,00						-	14.140.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	172.993.100,00						-	180.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						180.267.100,00							191.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	180.267.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	191.900.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						172.993.100,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	172.993.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	180.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						46.077.000,00							14.140.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	46.077.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.140.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						74.202.825,00					Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		175.000.000,00	
		-						74.202.825,00					Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	10.219.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	28.470.400,00						-	56.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	35.513.425,00						-	73.500.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						10.219.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	2 Dokumen	10.219.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	45.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						35.513.425,00							73.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	5 Laporan	35.513.425,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	73.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						28.470.400,00							56.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	8 Dokumen	28.470.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	56.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.168.062.000,00					Pimpinan Derah dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		938.000.000,00	
		-						1.168.062.000,00					Pimpinan Derah dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		938.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	1.168.062.000,00						-	938.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.168.062.000,00							938.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	1 Laporan	1.168.062.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	938.000.000,00	Sekretariat Daerah
156.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**4.600.138.945,00**							**5.536.912.857,00**	
			1. Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat; 2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ; 3. Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan	-		-	100%; 100%; 100%	4.600.138.945,00						-	5.536.912.857,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						329.661.025,00					Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		700.300.000,00	
		-						329.661.025,00					Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		700.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	74.781.600,00						-	190.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	239.315.925,00						-	344.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	15.563.500,00						-	165.500.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						239.315.925,00							344.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	3 Dokumen	239.315.925,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	344.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						15.563.500,00							165.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	4 Dokumen	15.563.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	165.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						74.781.600,00							190.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	5 Dokumen	74.781.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	190.800.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.291.429.920,00					Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		3.380.612.857,00	
		-						3.291.429.920,00					Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		3.380.612.857,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	1.418.518.500,00						-	1.849.612.857,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	683.043.120,00						-	143.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	1.189.868.300,00						-	1.388.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						1.418.518.500,00							1.849.612.857,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	10 Dokumen	1.418.518.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.849.612.857,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						1.189.868.300,00							1.388.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	9 Dokumen	1.189.868.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.388.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						683.043.120,00							143.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	4 Dokumen	683.043.120,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	143.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						948.751.600,00					Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		1.411.000.000,00	
		-						948.751.600,00					Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		1.411.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	888.648.200,00						-	1.220.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	19.239.200,00						-	103.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	40.864.200,00						-	88.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						19.239.200,00							103.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	420 Dokumen	19.239.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	103.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						888.648.200,00							1.220.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	12 Kasus	888.648.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.220.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						40.864.200,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	420 Dokumen	40.864.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	88.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						30.296.400,00					Pemkab Kulon Progo		45.000.000,00	
		-						30.296.400,00					Pemkab Kulon Progo		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	30.296.400,00						-	45.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						30.296.400,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	4 Dokumen	30.296.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	45.000.000,00	Sekretariat Daerah
157.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**261.830.419,00**							**664.551.058,00**	
			1. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian; 2. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	-		-	100%; 100%; 100%	261.830.419,00						-	664.551.058,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						135.891.419,00					Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		238.401.058,00	
		-						135.891.419,00					Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		238.401.058,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	65.333.619,00						-	123.901.058,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	69.634.200,00						-	113.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	923.600,00						-	1.500.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						65.333.619,00							123.901.058,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	5 Dokumen	65.333.619,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	123.901.058,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						923.600,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	1 Laporan	923.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						69.634.200,00							113.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	12 Dokumen	69.634.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	113.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						40.767.800,00					Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		92.600.000,00	
		-						40.767.800,00					Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		92.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	36.582.600,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	1.860.500,00						-	20.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	2.324.700,00						-	30.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						36.582.600,00							42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	2 Dokumen	36.582.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	42.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						2.324.700,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	2 Laporan	2.324.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						1.860.500,00							20.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	2 Laporan	1.860.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.600.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						74.641.900,00					Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		254.000.000,00	
		-						74.641.900,00					Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		254.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	1.485.200,00						-	37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	70.915.100,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	2.241.600,00						-	49.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						70.915.100,00							168.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	60 Dokumen	70.915.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	168.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						1.485.200,00							37.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	4 Dokumen	1.485.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	37.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						2.241.600,00							49.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	240 Orang	2.241.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	49.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						10.529.300,00					Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani		79.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						10.529.300,00					Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani		79.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	-	2.460.200,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	-	2.080.200,00						-	25.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	-	5.988.900,00						-	20.800.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						5.988.900,00							20.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	4 Dokumen	5.988.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya			-	20.800.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						2.080.200,00							25.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	2 Dokumen	2.080.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.750.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						2.460.200,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	2 Dokumen	2.460.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	33.000.000,00	Sekretariat Daerah
158.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**60.707.800,00**							**4.769.808,00**	
			-	-		-	-	60.707.800,00						-	4.769.808,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						43.207.800,00					-		4.000.000,00	
		-						43.207.800,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	15.085.800,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	-		-	-	28.122.000,00						-	2.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan AsliKabupaten/Kota						28.122.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	-		-	18 Lembaga	28.122.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						15.085.800,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	1 Dokumen	15.085.800,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						17.500.000,00					-		2.769.808,00	
		-						17.500.000,00					-		2.769.808,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.500.000,00						-	2.769.808,00	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota						17.500.000,00							2.769.808,00	
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	2.769.808,00	Sekretariat Daerah
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**35.109.779.629,00**							**37.837.512.836,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.109.779.629,00**							**37.837.512.836,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**35.109.779.629,00**							**37.837.512.836,00**	
159.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.004.700.158,00**							**24.377.408.420,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	24.004.700.158,00						-	24.377.408.420,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.112.800,00					Sekretariat DPRD		7.137.000,00	
		-						10.112.800,00					Sekretariat DPRD		7.137.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	8.966.700,00						-	3.568.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.146.100,00						-	3.568.500,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.966.700,00							3.568.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	8.966.700,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.568.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.146.100,00							3.568.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.146.100,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.568.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.237.375.444,00					Sekretariat DPRD		2.120.247.915,00	
		-						2.237.375.444,00					Sekretariat DPRD		2.120.247.915,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	39.912.800,00						-	46.760.100,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.746.100,00						-	3.036.100,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.195.716.544,00						-	2.070.451.715,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.195.716.544,00							2.070.451.715,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	33 Orang/bulan	2.195.716.544,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.070.451.715,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						39.912.800,00							46.760.100,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	39.912.800,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	46.760.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.746.100,00							3.036.100,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.746.100,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.036.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18.212.000,00					Sekretariat DPRD		21.084.000,00	
		-						18.212.000,00					Sekretariat DPRD		21.084.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	18.212.000,00						-	21.084.000,00	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						18.212.000,00							21.084.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	18.212.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.084.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						194.236.600,00					Sekretariat DPRD		221.742.000,00	
		-						194.236.600,00					Sekretariat DPRD		221.742.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	105.654.500,00						-	126.174.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	88.582.100,00						-	95.568.000,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						88.582.100,00							95.568.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	88.582.100,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	95.568.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						105.654.500,00							126.174.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	105.654.500,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	126.174.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						48.739.000,00					Sekretariat DPRD		316.056.000,00	
		-						48.739.000,00					Sekretariat DPRD		316.056.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	48.739.000,00						-	316.056.000,00	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						48.739.000,00							316.056.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	48.739.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	316.056.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.636.208.110,00					Sekretariat DPRD		1.653.403.720,00	
		-						1.636.208.110,00					Sekretariat DPRD		1.653.403.720,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	221.894.000,00						-	217.660.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.414.314.110,00						-	1.435.743.720,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						221.894.000,00							217.660.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	221.894.000,00	Kab. Kulon Progo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	217.660.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.414.314.110,00							1.435.743.720,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.414.314.110,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.435.743.720,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						779.156.100,00					Sekretariat DPRD		614.484.600,00	
		-						779.156.100,00					Sekretariat DPRD		614.484.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	96.845.700,00						-	59.709.100,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	581.756.000,00						-	464.708.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.554.400,00						-	90.067.300,00	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						581.756.000,00							464.708.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	22 Unit	581.756.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	464.708.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						96.845.700,00							59.709.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	96.845.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	59.709.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.554.400,00							90.067.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	61 Unit	100.554.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	90.067.300,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						18.841.674.304,00					DPRD		19.223.043.685,00	
		-						18.841.674.304,00					DPRD		19.223.043.685,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	18.670.021.104,00						-	18.950.340.385,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	80.240.000,00						-	80.240.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	91.413.200,00						-	192.463.300,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						18.670.021.104,00							18.950.340.385,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	40 Orang/Bulan	18.670.021.104,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.950.340.385,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						91.413.200,00							192.463.300,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	40 Paket	91.413.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	192.463.300,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						80.240.000,00							80.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	40 Orang	80.240.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	80.240.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						238.985.800,00					DPRD, Sekretariat DPRD		203.778.000,00	
		-						238.985.800,00					DPRD, Sekretariat DPRD		203.778.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	-	238.985.800,00						-	203.778.000,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						238.985.800,00							203.778.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	10 Laporan	238.985.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	203.778.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
160.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**11.105.079.471,00**							**13.456.535.916,00**	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	-		-	100 %	941.523.000,00						-	1.583.286.200,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	-		-	100 %	4.201.441.271,00						-	6.015.241.216,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	-		-	100 %	1.692.572.000,00						-	1.988.746.200,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	-		-	100 %	1.368.817.500,00						-	1.749.298.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	-		-	100 %	146.060.200,00						-	162.450.100,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	-		-	100 %	2.754.665.500,00						-	1.957.513.300,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	-		-	100 %	2.754.665.500,00						-	1.957.513.300,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	-		-	100 %	941.523.000,00						-	1.583.286.200,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	-		-	100 %	7.262.830.771,00						-	9.753.286.316,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	-		-	100 %	146.060.200,00						-	162.450.100,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	-		-	100 %	4.096.383.400,00						-	3.798.621.572,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	-		-	100 %	1.943.690.071,00						-	4.367.815.944,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	-		-	100 %	941.523.000,00						-	1.583.286.200,00	
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	-		-	100 %	4.123.483.000,00						-	3.706.812.200,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.754.665.500,00					DPRD, Masyarakat		1.957.513.300,00	
		-						2.754.665.500,00					DPRD, Masyarakat		1.957.513.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	2.063.332.200,00						-	1.094.239.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	-	183.845.700,00						-	184.335.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	-	62.092.700,00						-	70.756.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	-	445.394.900,00						-	608.181.200,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						183.845.700,00							184.335.700,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	2 Dokumen	183.845.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	184.335.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						2.063.332.200,00							1.094.239.700,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	8 Dokumen	2.063.332.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.094.239.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						62.092.700,00							70.756.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	1 Dokumen	62.092.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	70.756.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						445.394.900,00							608.181.200,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	2800 Orang	445.394.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	608.181.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						2.257.751.200,00					DPRD		1.647.425.272,00	
		-						2.257.751.200,00					DPRD		1.647.425.272,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	2.257.751.200,00						-	1.647.425.272,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						2.257.751.200,00							1.647.425.272,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	6 Dokumen	2.257.751.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.647.425.272,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.692.572.000,00					DPRD		1.988.746.200,00	
		-						1.692.572.000,00					DPRD		1.988.746.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	-	1.135.399.500,00						-	1.375.381.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	-	234.185.000,00						-	263.953.100,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	322.987.500,00						-	349.411.700,00	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						234.185.000,00							263.953.100,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	1 Dokumen	234.185.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	263.953.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						1.135.399.500,00							1.375.381.400,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	4 Dokumen	1.135.399.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.375.381.400,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						322.987.500,00							349.411.700,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	322.987.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	349.411.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						941.523.000,00					DPRD, Masyarakat		1.583.286.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						941.523.000,00					DPRD, Masyarakat		1.583.286.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	276.523.700,00						-	735.588.100,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	664.999.300,00						-	847.698.100,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						276.523.700,00							735.588.100,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	1 Dokumen	276.523.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	735.588.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						664.999.300,00							847.698.100,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	114 Dokumen	664.999.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	847.698.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1.368.817.500,00					DPRD, Masyarakat		1.749.298.900,00	
		-						1.368.817.500,00					DPRD, Masyarakat		1.749.298.900,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	-	926.257.400,00						-	1.168.205.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	442.560.100,00						-	581.093.200,00	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						926.257.400,00							1.168.205.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	3 Dokumen	926.257.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.168.205.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						442.560.100,00							581.093.200,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-		-	2800 Orang	442.560.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	581.093.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						146.060.200,00					DPRD		162.450.100,00	
		-						146.060.200,00					DPRD		162.450.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	-	146.060.200,00						-	162.450.100,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						146.060.200,00							162.450.100,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	4 Laporan	146.060.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	162.450.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						1.943.690.071,00					DPRD		4.367.815.944,00	
		-						1.943.690.071,00					DPRD		4.367.815.944,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	-	239.057.300,00						-	266.754.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-		-	-	255.195.100,00						-	813.877.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	845.979.300,00						-	1.948.355.800,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	603.458.371,00						-	1.338.828.444,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						845.979.300,00							1.948.355.800,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	14 Dokumen	845.979.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.948.355.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						603.458.371,00							1.338.828.444,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	77 Laporan	603.458.371,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.338.828.444,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						239.057.300,00							266.754.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	12 Dokumen	239.057.300,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	266.754.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						255.195.100,00							813.877.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-		-	1 Dokumen	255.195.100,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	813.877.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						**5.879.416.321,00**							**6.850.732.276,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**187.227.000,00**							**91.531.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**187.227.000,00**							**91.531.000,00**	
161.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**187.227.000,00**							**91.531.000,00**	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-		-	100 persen	187.227.000,00						-	91.531.000,00	
	4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang						42.227.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		37.359.000,00	
		-						42.227.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		37.359.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	-		-	-	42.227.000,00						-	37.359.000,00	
	4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang						42.227.000,00							37.359.000,00	
		Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	-		-	4 Dokumen	42.227.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	37.359.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						145.000.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		54.172.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						145.000.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		54.172.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	-		-	-	40.000.000,00						-	13.923.000,00	
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-		-	-	105.000.000,00						-	40.249.000,00	
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						105.000.000,00							40.249.000,00	
		Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-		-	4 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	40.249.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						40.000.000,00							13.923.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	-		-	3 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.923.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.692.189.321,00**							**6.759.201.276,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**5.326.673.421,00**							**6.190.558.982,00**	
162.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.713.760.246,00**							**4.868.536.554,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi	-		-	100 persen	4.713.760.246,00						-	4.868.536.554,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.916.300,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		12.359.331,00	
		-						11.916.300,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		12.359.331,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.287.000,00						-	7.040.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.629.300,00						-	5.319.331,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.287.000,00							7.040.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	9.287.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.040.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.629.300,00							5.319.331,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.629.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.319.331,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.865.928.104,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		3.991.592.033,00	
		-						3.865.928.104,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		3.991.592.033,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	36.048.700,00						-	45.116.033,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	37.075.600,00						-	37.453.198,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.792.803.804,00						-	3.909.022.802,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.792.803.804,00							3.909.022.802,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	52 Orang/bulan	3.792.803.804,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.909.022.802,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						36.048.700,00							45.116.033,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	36.048.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	45.116.033,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						37.075.600,00							37.453.198,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	37.075.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	37.453.198,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		28.743.170,00	
		-						30.000.000,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		28.743.170,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	30.000.000,00						-	28.743.170,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							28.743.170,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	15 Orang	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.743.170,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						255.810.267,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		160.871.705,00	
		-						255.810.267,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		160.871.705,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	230.605.767,00						-	137.746.957,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.204.500,00						-	23.124.748,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.204.500,00							23.124.748,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	25.204.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.124.748,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						230.605.767,00							137.746.957,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	230.605.767,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	137.746.957,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						51.116.000,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		115.783.573,00	
		-						51.116.000,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		115.783.573,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	51.116.000,00						-	115.783.573,00	
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						51.116.000,00							115.783.573,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	51.116.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	115.783.573,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.376.375,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		324.999.943,00	
		-						317.376.375,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		324.999.943,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	111.285.972,00						-	102.364.177,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	206.090.403,00						-	222.635.766,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.285.972,00							102.364.177,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	111.285.972,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	102.364.177,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						206.090.403,00							222.635.766,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	206.090.403,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	222.635.766,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.613.200,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		234.186.799,00	
		-						181.613.200,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		234.186.799,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	14.000.000,00						-	30.156.768,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	127.651.800,00						-	138.652.742,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	39.961.400,00						-	65.377.289,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						127.651.800,00							138.652.742,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	28 Unit	127.651.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	138.652.742,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.000.000,00							30.156.768,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	14.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.156.768,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						39.961.400,00							65.377.289,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	50 Unit	39.961.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	65.377.289,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
163.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**388.589.475,00**							**761.445.463,00**	
			Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	-		-	99,89 persen	388.589.475,00						-	761.445.463,00	
			Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	100 persen	299.307.900,00						-	530.521.435,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						288.637.400,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		490.271.130,00	
		-						288.637.400,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		490.271.130,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	-	282.637.400,00						-	462.577.305,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-		-	-	6.000.000,00						-	27.693.825,00	
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						6.000.000,00							27.693.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-		-	3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.693.825,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						282.637.400,00							462.577.305,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	3 Dokumen	282.637.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	462.577.305,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						10.670.500,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		40.250.305,00	
		-						10.670.500,00					Perangkat daerah Bapperida Kulon Progo		40.250.305,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	-	10.670.500,00						-	40.250.305,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						10.670.500,00							40.250.305,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	3 Dokumen	10.670.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	40.250.305,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						89.281.575,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		230.924.028,00	
		-						89.281.575,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		230.924.028,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	6.787.900,00						-	48.753.888,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	82.493.675,00						-	182.170.140,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						82.493.675,00							182.170.140,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	10 Laporan	82.493.675,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	182.170.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						6.787.900,00							48.753.888,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	8 Laporan	6.787.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	48.753.888,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
164.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**224.323.700,00**							**560.576.965,00**	
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	-		-	100 %	90.013.700,00						-	267.719.636,00	
			Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	-		-	100 persen	87.758.000,00						-	186.428.926,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Pemerintahan dan Pembanguan manusia tepat waktu	-		-	100 persen	90.013.700,00						-	267.719.636,00	
			Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam tepat waktu	-		-	100 persen	46.552.000,00						-	106.428.403,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						90.013.700,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		267.719.636,00	
		-						90.013.700,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		267.719.636,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	41.892.800,00						-	81.084.793,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	6.176.100,00						-	54.229.615,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	41.944.800,00						-	132.405.228,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						6.176.100,00							54.229.615,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	6 Dokumen	6.176.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	54.229.615,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						41.944.800,00							132.405.228,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	8 Laporan	41.944.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	132.405.228,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						41.892.800,00							81.084.793,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	6 Dokumen	41.892.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	81.084.793,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						46.552.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		106.428.403,00	
		-						46.552.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		106.428.403,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	5.275.800,00						-	30.613.413,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	41.276.200,00						-	75.814.990,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						5.275.800,00							30.613.413,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	6 Dokumen	5.275.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.613.413,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						41.276.200,00							75.814.990,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	6 Dokumen	41.276.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	75.814.990,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						87.758.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		186.428.926,00	
		-						87.758.000,00					Seluruh perangkat daerah di Kulon Progo		186.428.926,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	45.015.000,00						-	90.714.847,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	42.743.000,00						-	95.714.079,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						45.015.000,00							90.714.847,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	6 Dokumen	45.015.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	90.714.847,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						42.743.000,00							95.714.079,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	6 Dokumen	42.743.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	95.714.079,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**365.515.900,00**							**568.642.294,00**	
165.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**116.316.200,00**							**156.986.178,00**	
			Capaian Inovasi Daerah	-		-	211 Satuan Inovasi	116.316.200,00						-	156.986.178,00	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						116.316.200,00					Seluruh perangkat daerah dan masyarakat di Kulon Progo		156.986.178,00	
		-						116.316.200,00					Seluruh perangkat daerah dan masyarakat di Kulon Progo		156.986.178,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-		-	-	92.416.100,00						-	110.199.944,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-		-	-	23.900.100,00						-	46.786.234,00	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						92.416.100,00							110.199.944,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-		-	5 Dokumen	92.416.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	110.199.944,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						23.900.100,00							46.786.234,00	
		Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-		-	18 Laporan	23.900.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	46.786.234,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
166.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**249.199.700,00**							**411.656.116,00**	
			Capaian Riset Daerah	-		-	62,5 persen	249.199.700,00						-	411.656.116,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						249.199.700,00					Seluruh perangkat daerah dan masyarakat di Kulon Progo		411.656.116,00	
		-						249.199.700,00					Seluruh perangkat daerah dan masyarakat di Kulon Progo		411.656.116,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-		-	-	249.199.700,00						-	411.656.116,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						249.199.700,00							411.656.116,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-		-	1 Naskah	249.199.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	411.656.116,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Keuangan dan Aset Daerah						**125.682.575.412,00**							**239.705.834.960,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**125.682.575.412,00**							**239.705.834.960,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**125.682.575.412,00**							**239.705.834.960,00**	
167.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**27.967.011.194,00**							**33.177.671.249,00**	
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 -	787.843.161,00						-	1.011.625.311,00	
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 .-	114.010.609,00						-	235.876.071,00	
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	27.065.157.424,00						-	31.930.169.867,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.091.300,00					BKAD		14.650.207,00	
		-						10.091.300,00					BKAD		14.650.207,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.708.400,00						-	9.481.677,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.382.900,00						-	5.168.530,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.708.400,00							9.481.677,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	5.708.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.481.677,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.382.900,00							5.168.530,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	4.382.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.168.530,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.065.157.424,00					BKAD		31.930.169.867,00	
		-						27.065.157.424,00					BKAD		31.930.169.867,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	83.881.300,00						-	105.876.331,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	2.587.200,00						-	5.471.918,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	35.694.400,00						-	42.453.939,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	26.942.994.524,00						-	31.776.367.679,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.942.994.524,00							31.776.367.679,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	75 Orang/bulan	26.942.994.524,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	31.776.367.679,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						83.881.300,00							105.876.331,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	83.881.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	105.876.331,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.587.200,00							5.471.918,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	2.587.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.471.918,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						35.694.400,00							42.453.939,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	35.694.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	42.453.939,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.010.609,00					BKAD		235.876.071,00	
		-						114.010.609,00					BKAD		235.876.071,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	89.770.309,00						-	203.795.825,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.240.300,00						-	32.080.246,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.240.300,00							32.080.246,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	24.240.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	32.080.246,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.770.309,00							203.795.825,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	89.770.309,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	203.795.825,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						53.546.000,00					BKAD		60.681.863,00	
		-						53.546.000,00					BKAD		60.681.863,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	53.546.000,00						-	60.681.863,00	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						53.546.000,00							60.681.863,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	53.546.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	60.681.863,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						421.055.461,00					BKAD		520.080.163,00	
		-						421.055.461,00					BKAD		520.080.163,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	115.104.929,00						-	184.497.084,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	305.950.532,00						-	335.583.079,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115.104.929,00							184.497.084,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	115.104.929,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	184.497.084,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						305.950.532,00							335.583.079,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	305.950.532,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	335.583.079,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303.150.400,00					Seluruh Perangkat Daerah		416.213.078,00	
		-						303.150.400,00					Seluruh Perangkat Daerah		416.213.078,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	12.500.000,00						-	16.153.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	226.015.800,00						-	285.646.092,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	64.634.600,00						-	114.413.486,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						226.015.800,00							285.646.092,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	33 Unit	226.015.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	285.646.092,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.500.000,00							16.153.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	12.500.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.153.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						64.634.600,00							114.413.486,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	107 Unit	64.634.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	114.413.486,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
168.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**93.819.274.118,00**							**200.138.463.230,00**	
			Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan	-		-	100	369.390.000,00						-	343.113.771,00	
			Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan	-		-	100 undefined	167.311.060,00						-	368.843.852,00	
			Cakupan pengelolaan anggaran	-		-	100 -	536.701.060,00						-	711.957.623,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan pengelolaan Perbendaharaan	-		-	95,89	369.390.000,00						-	343.113.771,00	
			-	-		-	-	93.282.573.058,00						-	199.426.505.607,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						369.390.000,00					Seluruh Perangkat Daerah		343.113.771,00	
		-						369.390.000,00					Seluruh Perangkat Daerah		343.113.771,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	36.500.000,00						-	73.581.794,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	99.486.500,00						-	128.089.511,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	1.385.300,00						-	35.566.135,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	232.018.200,00						-	105.876.331,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						36.500.000,00							73.581.794,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	4 Dokumen	36.500.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	73.581.794,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						1.385.300,00							35.566.135,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	85 Dokumen	1.385.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.566.135,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						232.018.200,00							105.876.331,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	12 Dokumen	232.018.200,00	Kab. Kulon Progo	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	105.876.331,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						99.486.500,00							128.089.511,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	2 Dokumen	99.486.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	128.089.511,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						124.898.700,00					Seluruh Perangkat Daerah		277.807.409,00	
		-						124.898.700,00					Seluruh Perangkat Daerah		277.807.409,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	33.541.300,00						-	60.681.863,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	-	470.300,00						-	11.430.628,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	-	618.500,00						-	14.971.814,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	90.268.600,00						-	190.723.104,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						33.541.300,00							60.681.863,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	110 Dokumen	33.541.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	60.681.863,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						618.500,00							14.971.814,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	12 Dokumen	618.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.971.814,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						470.300,00							11.430.628,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	2 Dokumen	470.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	11.430.628,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						90.268.600,00							190.723.104,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	42 Orang	90.268.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	190.723.104,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						42.412.360,00					Seluruh Perangkat Daerah		91.036.443,00	
		-						42.412.360,00					Seluruh Perangkat Daerah		91.036.443,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	-	392.360,00						-	9.495.112,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	360.700,00						-	8.828.940,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	313.000,00						-	7.582.205,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	41.346.300,00						-	65.130.186,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						392.360,00							9.495.112,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	168 Dokumen	392.360,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.495.112,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						313.000,00							7.582.205,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	17 Laporan	313.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.582.205,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						360.700,00							8.828.940,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	504 Laporan	360.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.828.940,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						41.346.300,00							65.130.186,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	41.346.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	65.130.186,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						93.282.573.058,00					-		199.426.505.607,00	
		-						93.282.573.058,00					-		199.426.505.607,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	70.923.239.321,00						-	177.657.314.634,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	17.359.333.737,00						-	16.719.190.973,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	5.000.000.000,00						-	5.050.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						70.923.239.321,00							177.657.314.634,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	12 Laporan	70.923.239.321,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	177.657.314.634,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.000.000.000,00							5.050.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	2 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.050.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						17.359.333.737,00							16.719.190.973,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	2 Laporan	17.359.333.737,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.719.190.973,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
169.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**117.327.100,00**							**251.960.478,00**	
			Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	89,76 -	117.327.100,00						-	251.960.478,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						117.327.100,00					Seluruh Perangkat Daerah		251.960.478,00	
		-						117.327.100,00					Seluruh Perangkat Daerah		251.960.478,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	6.250.300,00						-	29.112.358,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	33.759.800,00						-	78.853.885,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	-	1.066.500,00						-	24.725.987,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	347.900,00						-	7.787.439,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	75.902.600,00						-	111.480.809,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						75.902.600,00							111.480.809,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	3 Dokumen	75.902.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	111.480.809,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						347.900,00							7.787.439,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	3 Dokumen	347.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.787.439,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						1.066.500,00							24.725.987,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	2 Laporan	1.066.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.725.987,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						6.250.300,00							29.112.358,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	6 Dokumen	6.250.300,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	29.112.358,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						33.759.800,00							78.853.885,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	4 Laporan	33.759.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	78.853.885,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
170.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**3.778.963.000,00**							**6.137.740.003,00**	
			Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah	-		-	36,97 -	3.778.963.000,00						-	6.137.740.003,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.778.963.000,00					Seluruh Perangkat Daerah		6.137.740.003,00	
		-						3.778.963.000,00					Seluruh Perangkat Daerah		6.137.740.003,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	1.536.000,00						-	37.317.731,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	164.871.200,00						-	407.027.530,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	71.227.000,00						-	67.254.565,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	9.208.200,00						-	23.051.347,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	66.041.900,00						-	85.873.579,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	1.531.864.900,00						-	2.704.548.924,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	-	1.733.256.700,00						-	2.198.905.170,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	10.733.600,00						-	19.512.097,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	190.223.500,00						-	594.249.060,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						9.208.200,00							23.051.347,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	2 Dokumen	9.208.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.051.347,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						1.536.000,00							37.317.731,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	4 Dokumen	1.536.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	37.317.731,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						1.531.864.900,00							2.704.548.924,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	8 Laporan	1.531.864.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.704.548.924,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						1.733.256.700,00							2.198.905.170,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	1.733.256.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.198.905.170,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						190.223.500,00							594.249.060,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	29 Layanan	190.223.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	594.249.060,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						164.871.200,00							407.027.530,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	164.871.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	407.027.530,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						71.227.000,00							67.254.565,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	2 Dokumen	71.227.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	67.254.565,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						66.041.900,00							85.873.579,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	2 Laporan	66.041.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	85.873.579,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						10.733.600,00							19.512.097,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	10.733.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	19.512.097,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**132.477.294.236,00**							**147.493.342.498,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.000.000,00**							**108.122.633,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**150.000.000,00**							**108.122.633,00**	
171.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**150.000.000,00**							**108.122.633,00**	
			Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	-		-	100 Persen	150.000.000,00						-	108.122.633,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						150.000.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		108.122.633,00	
		-						150.000.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		108.122.633,00	
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	-		-	-	150.000.000,00						-	108.122.633,00	
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat KeistimewaanKabupaten/Kota						150.000.000,00							108.122.633,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	108.122.633,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**132.327.294.236,00**							**147.385.219.865,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**131.366.217.636,00**							**146.564.635.413,00**	
172.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**129.794.792.996,00**							**143.531.892.955,00**	
			Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 Persen	146.882.300,00						-	156.750.000,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 Persen	129.647.910.696,00						-	143.375.142.955,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.513.400,00					Perangkat Daerah		14.500.000,00	
		-						17.513.400,00					Perangkat Daerah		14.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	11.027.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	6.486.000,00						-	14.500.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.027.400,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	11.027.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.486.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	6.486.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.249.453.558,00					Perangkat Daerah		143.051.812.955,00	
		-						129.249.453.558,00					Perangkat Daerah		143.051.812.955,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	42.300.000,00						-	57.650.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.240.500,00						-	13.340.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	129.201.913.058,00						-	142.980.822.955,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						129.201.913.058,00							142.980.822.955,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	2380 Orang/bulan	129.201.913.058,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	142.980.822.955,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						42.300.000,00							57.650.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	42.300.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	57.650.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.240.500,00							13.340.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	5.240.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.340.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						148.307.600,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		82.850.000,00	
		-						148.307.600,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		82.850.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	139.161.900,00						-	65.350.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.145.700,00						-	17.500.000,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.145.700,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.145.700,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						139.161.900,00							65.350.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	139.161.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	65.350.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.196.000,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						15.196.000,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.196.000,00						-	0,00	
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.196.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	15.196.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						217.440.138,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		225.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						217.440.138,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		225.980.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	71.083.182,00						-	77.230.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	146.356.956,00						-	148.750.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						71.083.182,00							77.230.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	71.083.182,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	77.230.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						146.356.956,00							148.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	146.356.956,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	148.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146.882.300,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		156.750.000,00	
		-						146.882.300,00					Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo		156.750.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	55.935.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	69.210.300,00						-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	21.737.000,00						-	26.750.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						69.210.300,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	69.210.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	80.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						55.935.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	55.935.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.737.000,00							26.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	17 Unit	21.737.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	26.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
173.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.571.424.640,00**							**3.032.742.458,00**	
			Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi	-		-	252 Orang	1.571.424.640,00						-	3.032.742.458,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kedisiplinan ASN	-		-	99,83 Persen	12.779.700,00						-	85.125.000,00	
			Persentase Kedisiplinan ASN	-		-	99,83 Persen	1.558.644.940,00						-	2.947.617.458,00	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	-		-	78,44 Persen	1.571.424.640,00						-	3.032.742.458,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						613.591.200,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		1.070.900.000,00	
		-						613.591.200,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		1.070.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	100.901.500,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	-	499.859.700,00						-	810.450.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	12.830.000,00						-	95.450.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						499.859.700,00							810.450.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	2 Dokumen	499.859.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	810.450.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						100.901.500,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	100.901.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	165.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						12.830.000,00							95.450.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Laporan	12.830.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	95.450.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						392.693.500,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		535.810.000,00	
		-						392.693.500,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		535.810.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	30.534.300,00						-	75.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	-	326.013.600,00						-	385.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	36.145.600,00						-	75.250.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						30.534.300,00							75.560.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	252 Dokumen	30.534.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik			-	75.560.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						36.145.600,00							75.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	600 Dokumen	36.145.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	75.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						326.013.600,00							385.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	5 Dokumen	326.013.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	385.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						552.360.240,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		1.340.907.458,00	
		-						552.360.240,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		1.340.907.458,00	
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	-		-	-	26.479.100,00						-	65.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	-	19.841.600,00						-	57.500.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	7.992.540,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-		-	-	498.047.000,00						-	1.198.557.458,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						7.992.540,00							19.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	50 Orang	7.992.540,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	19.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						19.841.600,00							57.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	20 Orang	19.841.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	57.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						498.047.000,00							1.198.557.458,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-		-	1 Dokumen	498.047.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.198.557.458,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						26.479.100,00							65.850.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	-		-	100 Orang	26.479.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	65.850.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						12.779.700,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		85.125.000,00	
		-						12.779.700,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		85.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	-	12.779.700,00						-	85.125.000,00	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						12.779.700,00							85.125.000,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	5 Orang	12.779.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	85.125.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**961.076.600,00**							**820.584.452,00**	
174.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**961.076.600,00**							**820.584.452,00**	
			ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi	-		-	44,83 Persen	961.076.600,00						-	820.584.452,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						961.076.600,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		820.584.452,00	
		-						961.076.600,00					ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		820.584.452,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	961.076.600,00						-	820.584.452,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						961.076.600,00							820.584.452,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	1 Laporan	961.076.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	820.584.452,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat Daerah						**11.159.179.480,00**							**10.278.092.713,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.159.179.480,00**							**10.278.092.713,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**11.159.179.480,00**							**10.278.092.713,00**	
175.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.097.775.580,00**							**10.095.953.125,00**	
			-	-		-	-	11.097.775.580,00						-	10.095.953.125,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.952.900,00					Inspektorat Daerah		18.500.000,00	
		-						30.952.900,00					Inspektorat Daerah		18.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.697.100,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	25.255.800,00						-	15.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.697.100,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	5.697.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.255.800,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	25.255.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.626.781.712,00					Inspektorat Daerah		9.155.562.212,00	
		-						10.626.781.712,00					Inspektorat Daerah		9.155.562.212,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	43.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.182.800,00						-	5.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	10.582.598.912,00						-	9.114.862.212,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.582.598.912,00							9.114.862.212,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	62 Orang/bulan	10.582.598.912,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.114.862.212,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						43.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.182.800,00							5.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.182.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.700.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.842.000,00					Inspektorat Daerah		35.585.943,00	
		-						14.842.000,00					Inspektorat Daerah		35.585.943,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	14.842.000,00						-	35.585.943,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						14.842.000,00							35.585.943,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	14.842.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.585.943,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						121.149.400,00					Inspektorat Daerah		90.775.300,00	
		-						121.149.400,00					Inspektorat Daerah		90.775.300,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	105.162.000,00						-	71.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.987.400,00						-	19.775.300,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.987.400,00							19.775.300,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.987.400,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	19.775.300,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						105.162.000,00							71.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	105.162.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	71.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.956.000,00					Inspektorat Daerah		450.160.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.956.000,00					Inspektorat Daerah		450.160.900,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.956.000,00						-	450.160.900,00	
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.956.000,00							450.160.900,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	9.956.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	450.160.900,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.910.968,00					Inspektorat Daerah		127.000.789,00	
		-						150.910.968,00					Inspektorat Daerah		127.000.789,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	81.686.832,00						-	97.000.789,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	69.224.136,00						-	30.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						81.686.832,00							97.000.789,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	81.686.832,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	97.000.789,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						69.224.136,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	69.224.136,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.182.600,00					Inspektorat Daerah		218.367.981,00	
		-						143.182.600,00					Inspektorat Daerah		218.367.981,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	12.516.000,00						-	26.011.781,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	111.303.500,00						-	157.566.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	19.363.100,00						-	34.789.900,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						111.303.500,00							157.566.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	19 Unit	111.303.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	157.566.300,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.516.000,00							26.011.781,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	12.516.000,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	26.011.781,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.363.100,00							34.789.900,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	178 Unit	19.363.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	34.789.900,00	Inspektorat Daerah
176.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**44.285.400,00**							**95.263.481,00**	
			-	-		-	-	44.285.400,00						-	95.263.481,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						32.228.600,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		79.131.581,00	
		-						32.228.600,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		79.131.581,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	5.830.500,00						-	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	4.311.500,00						-	4.202.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	4.117.600,00						-	23.456.912,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	4.287.500,00						-	15.576.969,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	3.940.500,00						-	9.997.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	4.779.200,00						-	11.872.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	4.961.800,00						-	14.025.900,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						3.940.500,00							9.997.300,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	42 Laporan	3.940.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.997.300,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						4.287.500,00							15.576.969,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	109 Laporan	4.287.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.576.969,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						4.961.800,00							14.025.900,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	134 Laporan	4.961.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.025.900,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						4.779.200,00							11.872.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	170 Laporan	4.779.200,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	11.872.300,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						4.117.600,00							23.456.912,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	87 Laporan	4.117.600,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.456.912,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						4.311.500,00							4.202.200,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	5 Kesepakatan	4.311.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.202.200,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						5.830.500,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	5 Dokumen	5.830.500,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						12.056.800,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		16.131.900,00	
		-						12.056.800,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		16.131.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	12.056.800,00						-	9.474.300,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	0,00						-	6.657.600,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						0,00							6.657.600,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	5 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.657.600,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						12.056.800,00							9.474.300,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	54 Laporan	12.056.800,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.474.300,00	Inspektorat Daerah
177.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**17.118.500,00**							**86.876.107,00**	
			-	-		-	-	17.118.500,00						-	86.876.107,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						3.616.900,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		6.476.900,00	
		-						3.616.900,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		6.476.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	-	3.616.900,00						-	6.476.900,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						3.616.900,00							6.476.900,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	4 Rekomendasi	3.616.900,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.476.900,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						13.501.600,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		80.399.207,00	
		-						13.501.600,00					Seluruh Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		80.399.207,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	6.951.100,00						-	21.098.100,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	3.042.700,00						-	35.890.765,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	1.949.100,00						-	8.177.400,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	1.558.700,00						-	15.232.942,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						1.558.700,00							15.232.942,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	6 perangkat daerah	1.558.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.232.942,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						1.949.100,00							8.177.400,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	1 perangkat daerah	1.949.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.177.400,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						6.951.100,00							21.098.100,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	9 Kegiatan	6.951.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.098.100,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						3.042.700,00							35.890.765,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	7 perangkat daerah	3.042.700,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.890.765,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Temon						**1.742.698.774,00**							**1.997.028.265,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
178.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Lingkup Kapanewon Temon		0,00	
		-						0,00					Lingkup Kapanewon Temon		0,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Temon
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**0,00**	
179.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Lingkup Kapanewon Temon		0,00	
		-						30.000.000,00					Lingkup Kapanewon Temon		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Temon
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.712.698.774,00**							**1.997.028.265,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.712.698.774,00**							**1.997.028.265,00**	
180.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.624.389.274,00**							**1.812.086.837,00**	
			Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	229.172.052,00						-	302.643.500,00	
			Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.395.217.222,00						-	1.509.443.337,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.409.500,00					Lingkup Kapanewon Temon		8.572.300,00	
		-						12.409.500,00					Lingkup Kapanewon Temon		8.572.300,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.792.000,00						-	4.155.400,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.617.500,00						-	4.416.900,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.792.000,00							4.155.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	9.792.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.155.400,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.617.500,00							4.416.900,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.617.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.416.900,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.382.807.722,00					Lingkup Kapanewon Temon		1.500.871.037,00	
		-						1.382.807.722,00					Lingkup Kapanewon Temon		1.500.871.037,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	22.600.000,00						-	30.850.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.898.700,00						-	4.157.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.357.309.022,00						-	1.465.863.537,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.357.309.022,00							1.465.863.537,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	20 Orang/bulan	1.357.309.022,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.465.863.537,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						22.600.000,00							30.850.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	22.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.850.000,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.898.700,00							4.157.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	2.898.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.157.500,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.508.000,00					Lingkup Kapanewon Temon		44.657.800,00	
		-						17.508.000,00					Lingkup Kapanewon Temon		44.657.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	9.762.100,00						-	34.745.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.745.900,00						-	9.912.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.745.900,00							9.912.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.745.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.912.400,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.762.100,00							34.745.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	9.762.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	34.745.400,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.622.000,00					Lingkup Kapanewon Temon		35.000.000,00	
		-						9.622.000,00					Lingkup Kapanewon Temon		35.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.622.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.622.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	17 Unit	9.622.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.000.000,00	Kapanewon Temon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						133.135.652,00					Lingkup Kapanewon Temon		134.066.400,00	
		-						133.135.652,00					Lingkup Kapanewon Temon		134.066.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	31.346.516,00						-	33.228.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	101.789.136,00						-	100.837.700,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.346.516,00							33.228.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	31.346.516,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	33.228.700,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.789.136,00							100.837.700,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	101.789.136,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	100.837.700,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.906.400,00					Lingkup Kapanewon Temon		88.919.300,00	
		-						68.906.400,00					Lingkup Kapanewon Temon		88.919.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.465.900,00						-	12.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	51.160.900,00						-	60.191.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.279.600,00						-	15.978.300,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.160.900,00							60.191.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	51.160.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	60.191.000,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.465.900,00							12.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.465.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.750.000,00	Kapanewon Temon
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.279.600,00							15.978.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	15 Unit	15.279.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	15.978.300,00	Kapanewon Temon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
181.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**35.772.400,00**							**79.059.675,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	35.772.400,00						-	79.059.675,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						33.048.200,00					Lingkup Kapanewon Temon		71.135.675,00	
		-						33.048.200,00					Lingkup Kapanewon Temon		71.135.675,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	8.942.700,00						-	21.677.375,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	24.105.500,00						-	49.458.300,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						24.105.500,00							49.458.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	4 Laporan	24.105.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	49.458.300,00	Kapanewon Temon
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.942.700,00							21.677.375,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	7 Dokumen	8.942.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.677.375,00	Kapanewon Temon
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.724.200,00					Lingkup Kapanewon Temon		7.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.724.200,00					Lingkup Kapanewon Temon		7.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.724.200,00						-	7.924.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.724.200,00							7.924.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.724.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.924.000,00	Kapanewon Temon
182.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**9.691.500,00**							**23.145.924,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon Yang Disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	9.691.500,00						-	23.145.924,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.691.500,00					Lingkup Kapanewon Temon		23.145.924,00	
		-						9.691.500,00					Lingkup Kapanewon Temon		23.145.924,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.691.500,00						-	23.145.924,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						9.691.500,00							23.145.924,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	9.691.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.145.924,00	Kapanewon Temon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
183.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**31.214.300,00**							**54.565.129,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-		-	100 %	31.214.300,00						-	54.565.129,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						31.214.300,00					Lingkup Kapanewon Temon		54.565.129,00	
		-						31.214.300,00					Lingkup Kapanewon Temon		54.565.129,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	26.048.900,00						-	31.460.629,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	5.165.400,00						-	23.104.500,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5.165.400,00							23.104.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	80 Orang	5.165.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.104.500,00	Kapanewon Temon
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						26.048.900,00							31.460.629,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Laporan	26.048.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	31.460.629,00	Kapanewon Temon
184.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**11.631.300,00**							**28.170.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa Yang Tepat Waktu	-		-	100 %	11.631.300,00						-	28.170.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						11.631.300,00					Lingkup Kapanewon Temon		28.170.700,00	
		-						11.631.300,00					Lingkup Kapanewon Temon		28.170.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	11.631.300,00						-	28.170.700,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						11.631.300,00							28.170.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	11.631.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.170.700,00	Kapanewon Temon
		Kapanewon Wates						**4.454.064.085,00**							**5.513.741.865,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**24.288.923,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
185.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
			Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Kapanewon Wates		24.288.923,00	
		-						0,00					Kapanewon Wates		24.288.923,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							24.288.923,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.288.923,00	Kapanewon Wates
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**160.000.000,00**							**34.004.493,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**160.000.000,00**							**34.004.493,00**	
186.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**160.000.000,00**							**34.004.493,00**	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi	-		-	100 %	160.000.000,00						-	34.004.493,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						160.000.000,00					Kapanewon Wates		34.004.493,00	
		-						160.000.000,00					Kapanewon Wates		34.004.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	160.000.000,00						-	34.004.493,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						160.000.000,00							34.004.493,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	4 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	34.004.493,00	Kapanewon Wates
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.294.064.085,00**							**5.455.448.449,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.294.064.085,00**							**5.455.448.449,00**	
187.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.277.564.885,00**							**2.562.859.265,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	344.196.374,00						-	449.435.920,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.933.368.511,00						-	2.113.423.345,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.478.600,00					Kapanewon Wates		8.300.000,00	
		-						8.478.600,00					Kapanewon Wates		8.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.573.600,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.905.000,00						-	3.300.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.573.600,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	6.573.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.905.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.905.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.300.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.924.889.911,00					Kapanewon Wates		2.105.123.345,00	
		-						1.924.889.911,00					Kapanewon Wates		2.105.123.345,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	39.500.000,00						-	39.329.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.711.100,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.883.678.811,00						-	2.062.793.645,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.883.678.811,00							2.062.793.645,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	28 Orang/bulan	1.883.678.811,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.062.793.645,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						39.500.000,00							39.329.700,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	39.500.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	39.329.700,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.711.100,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.711.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.434.100,00					Kapanewon Wates		44.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						33.434.100,00					Kapanewon Wates		44.880.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	19.599.100,00						-	27.880.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.835.000,00						-	17.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.835.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.835.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						19.599.100,00							27.880.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	19.599.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.880.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.867.600,00					Kapanewon Wates		30.000.000,00	
		-						9.867.600,00					Kapanewon Wates		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.867.600,00						-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.867.600,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	9.867.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232.735.974,00					Kapanewon Wates		245.830.420,00	
		-						232.735.974,00					Kapanewon Wates		245.830.420,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	65.038.746,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	167.697.228,00						-	175.830.420,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.038.746,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	65.038.746,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	70.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						167.697.228,00							175.830.420,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	167.697.228,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	175.830.420,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.158.700,00					Kapanewon Wates		128.725.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						68.158.700,00					Kapanewon Wates		128.725.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	35.129.700,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	48.150.800,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.007.900,00						-	28.595.800,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.150.800,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	17 Unit	48.150.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	65.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							35.129.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.129.700,00	Kapanewon Wates
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.007.900,00							28.595.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	41 Unit	20.007.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.595.800,00	Kapanewon Wates
188.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**42.666.100,00**							**64.569.156,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	42.666.100,00						-	64.569.156,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						39.958.500,00					Kapanewon Wates		53.569.156,00	
		-						39.958.500,00					Kapanewon Wates		53.569.156,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	16.239.000,00						-	37.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	23.719.500,00						-	16.569.156,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						23.719.500,00							16.569.156,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	4 Laporan	23.719.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.569.156,00	Kapanewon Wates
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.239.000,00							37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	5 Dokumen	16.239.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	37.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.707.600,00					Kapanewon Wates		11.000.000,00	
		-						2.707.600,00					Kapanewon Wates		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.707.600,00						-	11.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.707.600,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.707.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	11.000.000,00	Kapanewon Wates
189.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.320.431.700,00**							**2.147.428.433,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	9.999.700,00						-	50.000.000,00	
			Persentase DokumenPembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	1.310.432.000,00						-	2.097.428.433,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.999.700,00					Kapanewon Wates		50.000.000,00	
		-						9.999.700,00					Kapanewon Wates		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.999.700,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						9.999.700,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	9 Laporan	9.999.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.310.432.000,00					Kapanewon Wates		2.097.428.433,00	
		-						1.310.432.000,00					Kapanewon Wates		2.097.428.433,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	-	25.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	77.752.000,00						-	939.428.433,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	367.680.000,00						-	480.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	840.000.000,00						-	640.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						77.752.000,00							939.428.433,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	17 Lembaga Kemasyarakatan	77.752.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	939.428.433,00	Kapanewon Wates
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						840.000.000,00							640.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	16 Unit	840.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	640.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						367.680.000,00							480.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	11 Pokmas / Ormas	367.680.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	480.000.000,00	Kapanewon Wates
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						25.000.000,00							38.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	38.000.000,00	Kapanewon Wates
190.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**643.924.000,00**							**663.975.455,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibun	-		-	100 %	643.924.000,00						-	663.975.455,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						643.924.000,00					Kapanewon Wates		663.975.455,00	
		-						643.924.000,00					Kapanewon Wates		663.975.455,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	23.706.600,00						-	36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	5.950.200,00						-	38.851.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	614.267.200,00						-	589.123.755,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						614.267.200,00							589.123.755,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	405 Orang	614.267.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Kulon Progo || Kecamatan Wates || Kelurahan Wates || 0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	589.123.755,00	Kapanewon Wates
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5.950.200,00							38.851.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	70 Orang	5.950.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	38.851.700,00	Kapanewon Wates

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						23.706.600,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Laporan	23.706.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	36.000.000,00	Kapanewon Wates
191.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**9.477.400,00**							**16.616.140,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	9.477.400,00						-	16.616.140,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.477.400,00					Kapanewon Wates		16.616.140,00	
		-						9.477.400,00					Kapanewon Wates		16.616.140,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	9.477.400,00						-	16.616.140,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						9.477.400,00							16.616.140,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	7 Laporan	9.477.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.616.140,00	Kapanewon Wates
		Kapanewon Panjatan						**1.858.732.631,00**							**2.175.466.294,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**24.288.923,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
192.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		24.288.923,00	
		-						0,00					-		24.288.923,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						0,00							24.288.923,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-		-	3 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.288.923,00	Kapanewon Panjatan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**8.501.122,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**8.501.122,00**	
193.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**8.501.122,00**	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	8.501.122,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					-		8.501.122,00	
		-						30.000.000,00					-		8.501.122,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	8.501.122,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							8.501.122,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.501.122,00	Kapanewon Panjatan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.828.732.631,00**							**2.142.676.249,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.828.732.631,00**							**2.142.676.249,00**	
194.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.752.172.631,00**							**1.958.332.841,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.745.079.131,00						-	1.950.951.941,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	7.093.500,00						-	7.380.900,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.093.500,00					Kab. Kulon Progo		7.380.900,00	
		-						7.093.500,00					Kab. Kulon Progo		7.380.900,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.739.200,00						-	4.702.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.354.300,00						-	2.678.400,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.739.200,00							4.702.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	5.739.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.702.500,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.354.300,00							2.678.400,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.354.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.678.400,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.334.678.835,00					-		1.647.022.230,00	
		-						1.334.678.835,00					-		1.647.022.230,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	25.600.000,00						-	35.369.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	858.300,00						-	3.456.700,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.308.220.535,00						-	1.608.196.030,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.308.220.535,00							1.608.196.030,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	19 Orang/bulan	1.308.220.535,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.608.196.030,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.600.000,00							35.369.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	25.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	35.369.500,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						858.300,00							3.456.700,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	858.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.456.700,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						13.855.400,00					-		22.989.500,00	
		-						13.855.400,00					-		22.989.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	5.540.000,00						-	14.656.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.315.400,00						-	8.333.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.315.400,00							8.333.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.315.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.333.000,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.540.000,00							14.656.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	5.540.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.656.500,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.875.000,00					-		20.398.900,00	
		-						9.875.000,00					-		20.398.900,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.875.000,00						-	20.398.900,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.875.000,00							20.398.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.875.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.398.900,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.533.236,00					-		180.082.711,00	
		-						157.533.236,00					-		180.082.711,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	28.884.432,00						-	28.275.323,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	128.648.804,00						-	151.807.388,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.884.432,00							28.275.323,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	28.884.432,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.275.323,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						128.648.804,00							151.807.388,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	128.648.804,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	151.807.388,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						229.136.660,00					-		80.458.600,00	
		-						229.136.660,00					-		80.458.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	154.233.460,00						-	17.558.600,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	61.817.600,00						-	62.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	13.085.600,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.817.600,00							62.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	11 Unit	61.817.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	62.900.000,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						154.233.460,00							17.558.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	154.233.460,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.558.600,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.085.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	11 Unit	13.085.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Panjatan
195.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**37.424.900,00**							**67.357.455,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	37.424.900,00						-	67.357.455,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						34.496.100,00					Kab. Kulon Progo		57.189.455,00	
		-						34.496.100,00					Kab. Kulon Progo		57.189.455,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	7.840.000,00						-	16.189.455,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	26.656.100,00						-	41.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						26.656.100,00							41.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan	26.656.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	41.000.000,00	Kapanewon Panjatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.840.000,00							16.189.455,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	3 Dokumen	7.840.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.189.455,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.928.800,00					-		10.168.000,00	
		-						2.928.800,00					-		10.168.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.928.800,00						-	10.168.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.928.800,00							10.168.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.928.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.168.000,00	Kapanewon Panjatan
196.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**8.155.100,00**							**29.241.566,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	8.155.100,00						-	29.241.566,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8.155.100,00					Kab. Kulon Proogo		29.241.566,00	
		-						8.155.100,00					Kab. Kulon Proogo		29.241.566,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	8.155.100,00						-	29.241.566,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.155.100,00							29.241.566,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	8.155.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	29.241.566,00	Kapanewon Panjatan
197.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**27.980.000,00**							**67.153.528,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-		-	undefined undefined	27.980.000,00						-	67.153.528,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.980.000,00					Kab. Kulon Progo		67.153.528,00	
		-						27.980.000,00					Kab. Kulon Progo		67.153.528,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	24.300.000,00						-	44.238.948,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	3.680.000,00						-	22.914.580,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						3.680.000,00							22.914.580,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	76 Orang	3.680.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	22.914.580,00	Kapanewon Panjatan
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						24.300.000,00							44.238.948,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Laporan	24.300.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	44.238.948,00	Kapanewon Panjatan
198.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.000.000,00**							**20.590.859,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	3.000.000,00						-	20.590.859,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.000.000,00					Kab. Kulon Progo		20.590.859,00	
		-						3.000.000,00					Kab. Kulon Progo		20.590.859,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	3.000.000,00						-	20.590.859,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.000.000,00							20.590.859,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.590.859,00	Kapanewon Panjatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Galur						**1.870.822.838,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
199.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**0,00**	
200.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					-		0,00	
		-						30.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.840.822.838,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.840.822.838,00**							**0,00**	
201.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.763.791.838,00**							**0,00**	
			Persentase Sub Kegiatan Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.752.973.838,00						-	0,00	
			Persentase Sub Kegiatan Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	10 %	10.818.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.818.000,00					-		0,00	
		-						10.818.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	8.978.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.840.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.978.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	8.978.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.840.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.840.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.477.116.351,00					-		0,00	
		-						1.477.116.351,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.873.800,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.450.242.551,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.450.242.551,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	19 Orang/bulan	1.450.242.551,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.873.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.873.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.059.900,00					-		0,00	
		-						19.059.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	13.227.900,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.832.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.832.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.832.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.227.900,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	13.227.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.997.000,00					-		0,00	
		-						15.997.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.997.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.997.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	15.997.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.658.087,00					-		0,00	
		-						173.658.087,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	32.899.794,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	140.758.293,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.899.794,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	32.899.794,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						140.758.293,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	140.758.293,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.142.500,00					-		0,00	
		-						67.142.500,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	7.174.300,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	49.534.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.433.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						49.534.700,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	49.534.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.174.300,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	7.174.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.433.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10 Unit	10.433.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
202.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**32.557.800,00**							**0,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	32.557.800,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						30.156.700,00					-		0,00	
		-						30.156.700,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	5.599.500,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	24.557.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						24.557.200,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	6 Laporan	24.557.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.599.500,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	3 Dokumen	5.599.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.401.100,00					-		0,00	
		-						2.401.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.401.100,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.401.100,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.401.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
203.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**9.657.800,00**							**0,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	9.657.800,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.657.800,00					-		0,00	
		-						9.657.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.657.800,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						9.657.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	9.657.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
204.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**31.588.900,00**							**0,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-		-	100 %	31.588.900,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						31.588.900,00					-		0,00	
		-						31.588.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	25.774.300,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	5.814.600,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5.814.600,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	70 Orang	5.814.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						25.774.300,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Laporan	25.774.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
205.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.226.500,00**							**0,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	3.226.500,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.226.500,00					-		0,00	
		-						3.226.500,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	3.226.500,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.226.500,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	6 Laporan	3.226.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Galur
		Kapanewon Lendah						**1.896.501.049,00**							**2.021.412.284,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**24.288.923,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
206.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
			Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Kapanewon/ kalurahan		24.288.923,00	
		-						0,00					Kapanewon/ kalurahan		24.288.923,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							24.288.923,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.288.923,00	Kapanewon Lendah
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**8.992.972,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**8.992.972,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
207.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**8.992.972,00**	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	8.992.972,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Kapanewon/ kalurahan		8.992.972,00	
		-						30.000.000,00					Kapanewon/ kalurahan		8.992.972,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	8.992.972,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							8.992.972,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial Budaya		-	8.992.972,00	Kapanewon Lendah
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.866.501.049,00**							**1.988.130.389,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.866.501.049,00**							**1.988.130.389,00**	
208.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.805.302.749,00**							**1.819.704.094,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tingg	-		-	100 %	68.947.600,00						-	79.606.700,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.736.355.149,00						-	1.740.097.394,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.959.700,00					Kapanewon		10.713.400,00	
		-						6.959.700,00					Kapanewon		10.713.400,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.117.100,00						-	7.787.700,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	842.600,00						-	2.925.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.117.100,00							7.787.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	6.117.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.787.700,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						842.600,00							2.925.700,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	842.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.925.700,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.528.130.188,00					Kapanewon		1.533.451.578,00	
		-						1.528.130.188,00					Kapanewon		1.533.451.578,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	19.700.000,00						-	33.557.700,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.582.800,00						-	2.992.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.506.847.388,00						-	1.496.901.578,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.506.847.388,00							1.496.901.578,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	23 Orang/bulan	1.506.847.388,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.496.901.578,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						19.700.000,00							33.557.700,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	19.700.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	33.557.700,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.582.800,00							2.992.300,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.582.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	2.992.300,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15.613.600,00					Kapanewon		31.130.200,00	
		-						15.613.600,00					Kapanewon		31.130.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	5.520.000,00						-	16.190.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.093.600,00						-	14.940.200,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.093.600,00							14.940.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.093.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.940.200,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.520.000,00							16.190.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	5.520.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.190.000,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					Kapanewon		3.667.000,00	
		-						10.000.000,00					Kapanewon		3.667.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	3.667.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							3.667.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.667.000,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.651.661,00					Kapanewon		161.135.216,00	
		-						175.651.661,00					Kapanewon		161.135.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	36.763.033,00						-	33.543.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	138.888.628,00						-	127.592.016,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.763.033,00							33.543.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	36.763.033,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	33.543.200,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						138.888.628,00							127.592.016,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	138.888.628,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	127.592.016,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.947.600,00					Kapanewon		79.606.700,00	
		-						68.947.600,00					Kapanewon		79.606.700,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	5.442.100,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	55.636.200,00						-	61.111.900,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	13.311.400,00						-	13.052.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						55.636.200,00							61.111.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	55.636.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	61.111.900,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							5.442.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.442.100,00	Kapanewon Lendah
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.311.400,00							13.052.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	13 Unit	13.311.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.052.700,00	Kapanewon Lendah
209.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**26.459.200,00**							**73.180.901,00**	
			Persentase pelayanan non perizinan	-		-	100 %	1.275.400,00						-	10.000.000,00	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	25.183.800,00						-	63.180.901,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.183.800,00					Kapanewon/ kalurahan		63.180.901,00	
		-						25.183.800,00					Kapanewon/ kalurahan		63.180.901,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	6.108.300,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	19.075.500,00						-	40.180.901,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						19.075.500,00							40.180.901,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	6 Laporan	19.075.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	40.180.901,00	Kapanewon Lendah
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.108.300,00							23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	5 Dokumen	6.108.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.000.000,00	Kapanewon Lendah
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.275.400,00					Kapanewon/ kalurahan		10.000.000,00	
		-						1.275.400,00					Kapanewon/ kalurahan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	1.275.400,00						-	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						1.275.400,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	1.275.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.000.000,00	Kapanewon Lendah
210.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.714.100,00**							**18.981.057,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	5.714.100,00						-	18.981.057,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5.714.100,00					Kapanewon/ kalurahan		18.981.057,00	
		-						5.714.100,00					Kapanewon/ kalurahan		18.981.057,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	5.714.100,00						-	18.981.057,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.714.100,00							18.981.057,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	5.714.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.981.057,00	Kapanewon Lendah
211.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**26.862.900,00**							**55.447.394,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	-		-	100 %	26.862.900,00						-	55.447.394,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						26.862.900,00					Kapanewon/ kalurahan		55.447.394,00	
		-						26.862.900,00					Kapanewon/ kalurahan		55.447.394,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	24.487.600,00						-	33.447.394,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	2.375.300,00						-	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						2.375.300,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	20 Orang	2.375.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	22.000.000,00	Kapanewon Lendah
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						24.487.600,00							33.447.394,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	24.487.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	33.447.394,00	Kapanewon Lendah
212.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.162.100,00**							**20.816.943,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	2.162.100,00						-	20.816.943,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.162.100,00					Kapanewon/ kalurahan		20.816.943,00	
		-						2.162.100,00					Kapanewon/ kalurahan		20.816.943,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	2.162.100,00						-	20.816.943,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						2.162.100,00							20.816.943,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	6 Laporan	2.162.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.816.943,00	Kapanewon Lendah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Sentolo						**1.727.847.251,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
213.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						0,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**0,00**	
214.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						30.000.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.697.847.251,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.697.847.251,00**							**0,00**	
215.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.627.035.051,00**							**0,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	6.185.000,00						-	0,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	10 %	10.332.700,00						-	0,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.610.517.351,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.185.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						6.185.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.297.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	888.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.297.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	5.297.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						888.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	21 Laporan	888.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.351.722.842,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						1.351.722.842,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	26.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	901.800,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.324.021.042,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.324.021.042,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	19 Orang/bulan	1.324.021.042,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	26.800.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						901.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	901.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						10.332.700,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						10.332.700,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	6.748.800,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.583.900,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.583.900,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.583.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.748.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	6.748.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.615.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						9.615.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.615.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.615.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	9.615.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.363.109,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						163.363.109,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	38.618.933,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	124.744.176,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.618.933,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	38.618.933,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.744.176,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	124.744.176,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.816.400,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						85.816.400,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	21.331.500,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	53.883.200,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.601.700,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						53.883.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	53.883.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						21.331.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	21.331.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.601.700,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	8 Unit	10.601.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
216.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**22.629.000,00**							**0,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	22.629.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						21.035.200,00					-		0,00	
		-						21.035.200,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	7.550.200,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	13.485.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						13.485.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	4 Laporan	13.485.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.550.200,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	5 Dokumen	7.550.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.593.800,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						1.593.800,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	1.593.800,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						1.593.800,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	1.593.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
217.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**6.502.400,00**							**0,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kap. yang disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	6.502.400,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						6.502.400,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						6.502.400,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	6.502.400,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.502.400,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	8 Laporan	6.502.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
218.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**36.364.800,00**							**0,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	-		-	100 %	36.364.800,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						36.364.800,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						36.364.800,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	27.150.600,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	9.214.200,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						9.214.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	40 Orang	9.214.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						27.150.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	27.150.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
219.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.316.000,00**							**0,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	5.316.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.316.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
		-						5.316.000,00					Lingkup Kapanewon Sentolo Kab. Kulon Progo		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	5.316.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.316.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	5.316.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Sentolo
		Kapanewon Pengasih						**1.741.854.751,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
220.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Masyarakat di Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						0,00					Masyarakat di Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**0,00**	
221.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan						30.000.000,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						30.000.000,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.03.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan						30.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.711.854.751,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.711.854.751,00**							**0,00**	
222.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.625.302.051,00**							**0,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	218.270.274,00						-	0,00	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.407.031.777,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.061.700,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						9.061.700,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.704.700,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.357.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.704.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	7.704.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.357.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.357.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.407.031.777,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						1.407.031.777,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	22.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.543.600,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.382.888.177,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.382.888.177,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	1.382.888.177,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						22.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	22.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.543.600,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.543.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						10.814.200,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						10.814.200,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	4.888.600,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.925.600,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.925.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.925.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.888.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	4.888.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.591.000,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						11.591.000,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	11.591.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						11.591.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	11.591.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.425.174,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						141.425.174,00					Kapanewon Pengasih		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	23.927.766,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	117.497.408,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.927.766,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	23.927.766,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						117.497.408,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	117.497.408,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.378.200,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						45.378.200,00					Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	36.276.100,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.102.100,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.276.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	36.276.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.102.100,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	8 Unit	9.102.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
223.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**34.057.100,00**							**0,00**	
			Persentase pelayanan non perizinan	-		-	100 %	34.057.100,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						31.923.100,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						31.923.100,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	5.128.100,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	26.795.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						26.795.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	11 Laporan	26.795.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.128.100,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	5 Dokumen	5.128.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.134.000,00					Masyarakat di seluruh Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						2.134.000,00					Masyarakat di seluruh Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.134.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.134.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.134.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
224.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.742.200,00**							**0,00**	
			Persentase dokumen Pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	-		-	100 %	7.742.200,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7.742.200,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						7.742.200,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.742.200,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.742.200,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	7.742.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
225.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**39.493.600,00**							**0,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 %	39.493.600,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						39.493.600,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						39.493.600,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	27.488.300,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	12.005.300,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						12.005.300,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	75 Orang	12.005.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						27.488.300,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	27.488.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
226.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.259.800,00**							**0,00**	
			Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-		-	100 %	5.259.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.259.800,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
		-						5.259.800,00					Kapanewon Pengasih dan Kalurahan se Kapanewon Pengasih		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	5.259.800,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.259.800,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	5.259.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Pengasih
		Kapanewon Kokap						**1.723.935.351,00**							**1.739.764.540,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**24.288.923,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
227.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		24.288.923,00	
		-						0,00					-		24.288.923,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							24.288.923,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		-	24.288.923,00	Kapanewon Kokap
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
228.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
			-	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.000.000,00	Kapanewon Kokap
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.693.935.351,00**							**1.685.475.617,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.693.935.351,00**							**1.685.475.617,00**	
229.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.599.947.467,00**							**1.545.007.703,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.599.947.467,00						-	1.545.007.703,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.837.100,00					-		11.158.769,00	
		-						9.837.100,00					-		11.158.769,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.703.500,00						-	6.858.769,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.133.600,00						-	4.300.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.703.500,00							6.858.769,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	7.703.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.858.769,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.133.600,00							4.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.133.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.300.000,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.351.977.123,00					-		1.286.358.126,00	
		-						1.351.977.123,00					-		1.286.358.126,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	23.194.100,00						-	21.319.550,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.643.200,00						-	5.879.419,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.327.139.823,00						-	1.259.159.157,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.327.139.823,00							1.259.159.157,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	20 Orang/bulan	1.327.139.823,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.259.159.157,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						23.194.100,00							21.319.550,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	23.194.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	21.319.550,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.643.200,00							5.879.419,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.643.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.879.419,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.115.673,00					-		9.933.800,00	
		-						16.115.673,00					-		9.933.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	10.180.000,00						-	4.224.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.935.673,00						-	5.709.800,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.935.673,00							5.709.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.935.673,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	5.709.800,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.180.000,00							4.224.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	10.180.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.224.000,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.802.000,00					-		32.000.000,00	
		-						29.802.000,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	29.802.000,00						-	32.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.802.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	29.802.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	32.000.000,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130.091.471,00					-		140.537.026,00	
		-						130.091.471,00					-		140.537.026,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	27.923.543,00						-	28.568.937,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	102.167.928,00						-	111.968.089,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.923.543,00							28.568.937,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	27.923.543,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	28.568.937,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.167.928,00							111.968.089,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	102.167.928,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	111.968.089,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.124.100,00					-		65.019.982,00	
		-						62.124.100,00					-		65.019.982,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	54.553.700,00						-	56.590.930,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	7.570.400,00						-	8.429.052,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						54.553.700,00							56.590.930,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	54.553.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	56.590.930,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Kokap
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.570.400,00							8.429.052,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	8 Unit	7.570.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.429.052,00	Kapanewon Kokap
230.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**34.481.700,00**							**63.265.392,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	29.770.500,00						-	55.800.000,00	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	% 100	4.711.200,00						-	7.465.392,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						29.770.500,00					-		55.800.000,00	
		-						29.770.500,00					-		55.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	5.530.500,00						-	12.100.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	24.240.000,00						-	43.700.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						24.240.000,00							43.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	6 Laporan	24.240.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	43.700.000,00	Kapanewon Kokap
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.530.500,00							12.100.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	9 Dokumen	5.530.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.100.000,00	Kapanewon Kokap
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.711.200,00					Masyarakat Kapanewon Kokap		7.465.392,00	
		-						4.711.200,00					Masyarakat Kapanewon Kokap		7.465.392,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	4.711.200,00						-	7.465.392,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4.711.200,00							7.465.392,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	4.711.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.465.392,00	Kapanewon Kokap
231.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**14.882.084,00**							**14.388.164,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	14.882.084,00						-	14.388.164,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.882.084,00					Kab. Kulon Progo		14.388.164,00	
		-						14.882.084,00					Kab. Kulon Progo		14.388.164,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	14.882.084,00						-	14.388.164,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						14.882.084,00							14.388.164,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	14.882.084,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.388.164,00	Kapanewon Kokap
232.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**35.781.100,00**							**53.702.553,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	-		-	100 %	35.781.100,00						-	53.702.553,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						35.781.100,00					-		53.702.553,00	
		-						35.781.100,00					-		53.702.553,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	28.965.600,00						-	27.681.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	6.815.500,00						-	26.020.753,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						6.815.500,00							26.020.753,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	200 Orang	6.815.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	26.020.753,00	Kapanewon Kokap
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						28.965.600,00							27.681.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	28.965.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.681.800,00	Kapanewon Kokap
233.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**8.843.000,00**							**9.111.805,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	8.843.000,00						-	9.111.805,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.843.000,00					-		9.111.805,00	
		-						8.843.000,00					-		9.111.805,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	8.843.000,00						-	9.111.805,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						8.843.000,00							9.111.805,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	8.843.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.111.805,00	Kapanewon Kokap
		Kapanewon Girimulyo						**1.685.733.267,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
234.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**0,00**	
235.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					-		0,00	
		-						30.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Keistimewaan DIY	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.655.733.267,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.655.733.267,00**							**0,00**	
236.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.568.509.767,00**							**0,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.568.509.767,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.389.200,00					Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		0,00	
		-						9.389.200,00					Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.858.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.530.800,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.858.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	6.858.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.530.800,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.530.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.324.069.627,00					Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		0,00	
		-						1.324.069.627,00					Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	27.700.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.769.900,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.294.599.727,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.294.599.727,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	20 Orang/bulan	1.294.599.727,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						27.700.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	27.700.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.769.900,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.769.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						23.543.000,00					Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah		0,00	
		-						23.543.000,00					Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	10.879.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.664.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.664.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.664.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.879.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	10.879.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.875.000,00					Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		0,00	
		-						9.875.000,00					Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.875.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.875.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.875.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.262.940,00					Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		0,00	
		-						128.262.940,00					Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.095.048,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	102.167.892,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.095.048,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	26.095.048,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.167.892,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	102.167.892,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.370.000,00					Meningkatnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kondisi baik		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						73.370.000,00					Meningkatnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kondisi baik		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	19.858.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	47.104.800,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.407.200,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						47.104.800,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	47.104.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.858.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	19.858.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.407.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	6.407.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
237.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**31.319.000,00**							**0,00**	
			Persentase Pelayanan non perizinan	-		-	100 %	31.319.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						30.551.000,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0,00	
		-						30.551.000,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	8.820.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	21.731.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						21.731.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	10 Laporan	21.731.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.820.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	5 Dokumen	8.820.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						768.000,00					Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0,00	
		-						768.000,00					Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	768.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						768.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	768.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
238.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**8.280.000,00**							**0,00**	
			Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	-		-	100 %	8.280.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8.280.000,00					Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dalam pembangunan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						8.280.000,00					Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dalam pembangunan		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	8.280.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.280.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	8.280.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
239.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**43.934.500,00**							**0,00**	
			Persentase Penanganan gangguan trantibum	-		-	100 %	43.934.500,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						43.934.500,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		0,00	
		-						43.934.500,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	28.728.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	15.206.500,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						15.206.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	37 Orang	15.206.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						28.728.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Laporan	28.728.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
240.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.690.000,00**							**0,00**	
			Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-		-	100 %	3.690.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.690.000,00					Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		0,00	
		-						3.690.000,00					Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	3.690.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.690.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	3.690.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Girimulyo
		Kapanewon Nanggulan						**1.905.509.086,00**							**2.164.142.423,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**24.288.923,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
241.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
			Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					-		24.288.923,00	
		-						0,00					-		24.288.923,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							24.288.923,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.288.923,00	Kapanewon Nanggulan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**9.715.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**9.715.500,00**	
242.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**9.715.500,00**	
			Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	9.715.500,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					-		9.715.500,00	
		-						30.000.000,00					-		9.715.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	9.715.500,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							9.715.500,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.715.500,00	Kapanewon Nanggulan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.875.509.086,00**							**2.130.138.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.875.509.086,00**							**2.130.138.000,00**	
243.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.807.640.086,00**							**1.984.600.000,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.807.640.086,00						-	1.984.600.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.799.900,00					-		8.300.000,00	
		-						9.799.900,00					-		8.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.799.900,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	3.800.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.799.900,00							4.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	7.799.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.500.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							3.800.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.800.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.566.362.586,00					-		1.830.500.000,00	
		-						1.566.362.586,00					-		1.830.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	24.383.400,00						-	27.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	1.900.000,00						-	3.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.540.079.186,00						-	1.800.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.540.079.186,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	21 Orang/bulan	1.540.079.186,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah an, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.800.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						24.383.400,00							27.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	24.383.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah an, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.400.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.900.000,00							3.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.900.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah an, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	3.100.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						14.719.500,00					-		36.700.000,00	
		-						14.719.500,00					-		36.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	9.220.000,00						-	27.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.499.500,00						-	9.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.499.500,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.499.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah an, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.500.000,00	Kapanewon Nanggulan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.220.000,00							27.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	9.220.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.200.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.105.000,00					-		20.000.000,00	
		-						10.105.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.105.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.105.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	10.105.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	20.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.338.800,00					-		36.000.000,00	
		-						142.338.800,00					-		36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	15.843.084,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	126.495.716,00						-	18.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.843.084,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	15.843.084,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						126.495.716,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	126.495.716,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	18.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.314.300,00					-		71.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						64.314.300,00					-		71.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.268.800,00						-	10.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	48.045.500,00						-	48.800.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.045.500,00							48.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	48.045.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	48.800.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.268.800,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	6.268.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.300.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
244.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**28.679.600,00**							**59.300.000,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	7.000.000,00						-	7.300.000,00	
			Prosentase Pelayanan Non Perijinan	-		-	100 %	21.679.600,00						-	52.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						21.679.600,00					Semua Kalurahan Kapanewon Nanggulan		52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						21.679.600,00					Semua Kalurahan Kapanewon Nanggulan		52.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	16.679.600,00						-	39.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						16.679.600,00							39.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	6 Laporan	16.679.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	39.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.000.000,00							13.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	9 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.000.000,00					-		7.300.000,00	
		-						7.000.000,00					-		7.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	7.000.000,00						-	7.300.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						7.000.000,00							7.300.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.300.000,00	Kapanewon Nanggulan
245.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.900.000,00**							**14.938.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Prosentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang tepat waktu	-		-	100 %	7.900.000,00						-	14.938.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7.900.000,00					-		14.938.000,00	
		-						7.900.000,00					-		14.938.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.900.000,00						-	14.938.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.900.000,00							14.938.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	7.900.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.938.000,00	Kapanewon Nanggulan
246.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**28.974.900,00**							**41.300.000,00**	
			Persentase Pananganan Gangguan Trantibum	-		-	100 %	28.974.900,00						-	41.300.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						28.974.900,00					-		41.300.000,00	
		-						28.974.900,00					-		41.300.000,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	26.975.200,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	1.999.700,00						-	9.300.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						1.999.700,00							9.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	40 Orang	1.999.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.300.000,00	Kapanewon Nanggulan
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						26.975.200,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	5 Laporan	26.975.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	32.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
247.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.314.500,00**							**12.000.000,00**	
			Persentase rekomendasi Produk Hukum Desa tepat Waktu	-		-	100 %	2.314.500,00						-	12.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.314.500,00					-		12.000.000,00	
		-						2.314.500,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	2.314.500,00						-	12.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						2.314.500,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	2.314.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.000.000,00	Kapanewon Nanggulan
		Kapanewon Samigaluh						**1.897.447.248,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
248.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
			Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Kapanewon Samigaluh		0,00	
		-						0,00					Kapanewon Samigaluh		0,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	-	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**0,00**	
249.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi.	-		-	100 %	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Kapanewon Samigaluh		0,00	
		-						30.000.000,00					Kapanewon Samigaluh		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.867.447.248,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.867.447.248,00**							**0,00**	
250.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.786.846.848,00**							**0,00**	
			Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	-		-	100 %	1.786.846.848,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.694.800,00					-		0,00	
		-						10.694.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.074.200,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.620.600,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.074.200,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	9.074.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.620.600,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	1.620.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.515.751.872,00					-		0,00	
		-						1.515.751.872,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	25.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.807.200,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.488.344.672,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.488.344.672,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	22 Orang/bulan	1.488.344.672,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	25.600.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.807.200,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	1.807.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.715.900,00					-		0,00	
		-						18.715.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	8.402.600,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.313.300,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.313.300,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.313.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.402.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	8.402.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.526.000,00					-		0,00	
		-						17.526.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	17.526.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17.526.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	17.526.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.826.776,00					-		0,00	
		-						143.826.776,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	19.770.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	124.055.976,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.770.800,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	19.770.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.055.976,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	124.055.976,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.331.500,00					-		0,00	
		-						80.331.500,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.256.100,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	64.763.700,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.311.700,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						64.763.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	64.763.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.256.100,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.256.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.311.700,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	8 Unit	9.311.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
251.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**28.086.000,00**							**0,00**	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	28.086.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						26.551.600,00					-		0,00	
		-						26.551.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	9.529.300,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	17.022.300,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						17.022.300,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	3 Laporan	17.022.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.529.300,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	7 Dokumen	9.529.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.534.400,00					-		0,00	
		-						1.534.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	1.534.400,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						1.534.400,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	1.534.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
252.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**13.387.900,00**							**0,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu.	-		-	100 %	13.387.900,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						13.387.900,00					-		0,00	
		-						13.387.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.387.900,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13.387.900,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	5 Laporan	13.387.900,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
253.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**33.965.000,00**							**0,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-		-	100 %	33.965.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.965.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						33.965.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	25.428.400,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	8.536.600,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						8.536.600,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	6 Orang	8.536.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						25.428.400,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	25.428.400,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
254.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.161.500,00**							**0,00**	
			Persentase rekomendasi produk hukum desa yang disampaikan tepat waktu.	-		-	100 %	5.161.500,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.161.500,00					-		0,00	
		-						5.161.500,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	5.161.500,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.161.500,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	5.161.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Kapanewon Samigaluh
		Kapanewon Kalibawang						**1.876.834.174,00**							**2.070.284.833,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**24.288.923,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
255.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**0,00**							**24.288.923,00**	
			Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	-		-	100 %	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						0,00					Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		24.288.923,00	
		-						0,00					Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		24.288.923,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	-	0,00						-	24.288.923,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						0,00							24.288.923,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	24.288.923,00	Kapanewon Kalibawang
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**9.715.622,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**9.715.622,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
256.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**9.715.622,00**	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	9.715.622,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi		9.715.622,00	
		-						30.000.000,00					Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi		9.715.622,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	30.000.000,00						-	9.715.622,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							9.715.622,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.715.622,00	Kapanewon Kalibawang
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.846.834.174,00**							**2.036.280.288,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.846.834.174,00**							**2.036.280.288,00**	
257.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.771.241.374,00**							**1.854.348.178,00**	
			Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	1.771.241.374,00						-	1.854.348.178,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.851.400,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		11.500.000,00	
		-						8.851.400,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.579.700,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.271.700,00						-	4.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.579.700,00							7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	6.579.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.000.000,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.271.700,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.271.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.500.000,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.513.729.700,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		1.526.736.195,00	
		-						1.513.729.700,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		1.526.736.195,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	26.800.000,00						-	29.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.640.700,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.484.289.000,00						-	1.492.436.195,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.484.289.000,00							1.492.436.195,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	21 Orang/bulan	1.484.289.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.492.436.195,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.800.000,00							29.800.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	26.800.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	29.800.000,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.640.700,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	2.640.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	4.500.000,00	Kapanewon Kalibawang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						10.870.698,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		38.750.800,00	
		-						10.870.698,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		38.750.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	5.259.598,00						-	30.800.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.611.100,00						-	7.950.800,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.611.100,00							7.950.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.611.100,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.950.800,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.259.598,00							30.800.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	5.259.598,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	30.800.000,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		13.213.109,00	
		-						10.000.000,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		13.213.109,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	13.213.109,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							13.213.109,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	13.213.109,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.296.776,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		171.317.874,00	
		-						153.296.776,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		171.317.874,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	25.629.156,00						-	25.979.156,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	127.667.620,00						-	145.338.718,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.629.156,00							25.979.156,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	25.629.156,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	25.979.156,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						127.667.620,00							145.338.718,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	127.667.620,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	145.338.718,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74.492.800,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		97.330.200,00	
		-						74.492.800,00					Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah		97.330.200,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.833.000,00						-	6.945.300,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	66.737.500,00						-	75.680.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.922.300,00						-	14.704.900,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						66.737.500,00							75.680.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	66.737.500,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	75.680.000,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.833.000,00							6.945.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	1.833.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	6.945.300,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.922.300,00							14.704.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	5.922.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	14.704.900,00	Kapanewon Kalibawang
258.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**22.448.000,00**							**64.418.029,00**	
			Persentase pelayanan non perizinan	-		-	100 %	2.568.200,00						-	7.714.200,00	
			Persentase Pelayanan Non Perizinan	-		-	100 %	19.879.800,00						-	56.703.829,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						19.879.800,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		56.703.829,00	
		-						19.879.800,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		56.703.829,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	4.784.600,00						-	16.488.629,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	15.095.200,00						-	40.215.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						15.095.200,00							40.215.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	5 Laporan	15.095.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	40.215.200,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.784.600,00							16.488.629,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	5 Dokumen	4.784.600,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	16.488.629,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.568.200,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		7.714.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.568.200,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		7.714.200,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.568.200,00						-	7.714.200,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.568.200,00							7.714.200,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.568.200,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	7.714.200,00	Kapanewon Kalibawang
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**10.450.700,00**							**23.054.420,00**	
			Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	10.450.700,00						-	23.054.420,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.450.700,00					Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan		23.054.420,00	
		-						10.450.700,00					Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan		23.054.420,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.450.700,00						-	23.054.420,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.450.700,00							23.054.420,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	3 Laporan	10.450.700,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	23.054.420,00	Kapanewon Kalibawang
260.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**34.994.100,00**							**72.323.448,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-		-	100 %	34.994.100,00						-	72.323.448,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						34.994.100,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		72.323.448,00	
		-						34.994.100,00					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		72.323.448,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	23.566.300,00						-	33.828.648,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	11.427.800,00						-	38.494.800,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						11.427.800,00							38.494.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	16 Orang	11.427.800,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	38.494.800,00	Kapanewon Kalibawang
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						23.566.300,00							33.828.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Laporan	23.566.300,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	33.828.648,00	Kapanewon Kalibawang
261.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**7.700.000,00**							**17.636.213,00**	
			Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-		-	100 %	7.700.000,00						-	17.636.213,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.700.000,00					Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan		17.636.213,00	
		-						7.700.000,00					Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan		17.636.213,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	7.700.000,00						-	17.636.213,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						7.700.000,00							17.636.213,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	5 Laporan	7.700.000,00	Kab. Kulon Progo	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	17.636.213,00	Kapanewon Kalibawang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**4.820.300.354,00**							**5.165.125.209,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**4.820.300.354,00**							**5.165.125.209,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4.820.300.354,00**							**5.165.125.209,00**	
262.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.815.579.554,00**							**1.892.875.907,00**	
			Persentase Sub kegiatan Berkinerja Sangat Tinggi	-		-	100 %	124.280.000,00						-	114.992.700,00	
			-	-		-	-	1.691.299.554,00						-	1.777.883.207,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.025.200,00					Kesatuan Bangsa dan Politik		17.100.000,00	
		-						17.025.200,00					Kesatuan Bangsa dan Politik		17.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.388.400,00						-	8.750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.636.800,00						-	8.350.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.388.400,00							8.750.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	12.388.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.636.800,00							8.350.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	4.636.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	8.350.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.551.362.793,00					-		1.537.320.307,00	
		-						1.551.362.793,00					-		1.537.320.307,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	30.300.000,00						-	29.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.490.600,00						-	9.520.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.515.572.193,00						-	1.498.200.307,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.515.572.193,00							1.498.200.307,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	23 Orang/bulan	1.515.572.193,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.498.200.307,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						30.300.000,00							29.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	30.300.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	29.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.490.600,00							9.520.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	5.490.600,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	9.520.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						43.787.000,00					-		40.487.900,00	
		-						43.787.000,00					-		40.487.900,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	33.114.100,00						-	27.514.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.672.900,00						-	12.973.450,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.672.900,00							12.973.450,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.672.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	12.973.450,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						33.114.100,00							27.514.450,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	33.114.100,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	27.514.450,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.538.000,00					-		100.000.000,00	
		-						29.538.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	29.538.000,00						-	10.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	90.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.538.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	29.538.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.611.761,00					-		100.075.000,00	
		-						66.611.761,00					-		100.075.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.570.785,00						-	29.450.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.040.976,00						-	70.625.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.570.785,00							29.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	26.570.785,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	29.450.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						40.040.976,00							70.625.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	40.040.976,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	70.625.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.254.800,00					Kesatuan Bangsa dan Politik		97.892.700,00	
		-						107.254.800,00					Kesatuan Bangsa dan Politik		97.892.700,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	91.579.800,00						-	97.892.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.675.000,00						-	0,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						91.579.800,00							97.892.700,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	91.579.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	97.892.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.675.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	25 Unit	15.675.000,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
263.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.021.136.300,00**							**1.217.081.183,00**	
			Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	-		-	90 %	1.021.136.300,00						-	1.217.081.183,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.021.136.300,00					Kesatuan Bangsa dan Politik		1.217.081.183,00	
		-						1.021.136.300,00					Kesatuan Bangsa dan Politik		1.217.081.183,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	192.264.800,00						-	295.889.983,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	828.871.500,00						-	921.191.200,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						192.264.800,00							295.889.983,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	180 Orang	192.264.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	295.889.983,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						828.871.500,00							921.191.200,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	46 Orang	828.871.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	921.191.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
264.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.407.263.300,00**							**1.392.466.969,00**	
			Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos	-		-	70 %	1.407.263.300,00						-	1.392.466.969,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.407.263.300,00					-		1.392.466.969,00	
		-						1.407.263.300,00					-		1.392.466.969,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-		-	-	33.205.500,00						-	173.550.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	1.374.057.800,00						-	1.218.916.469,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.374.057.800,00							1.218.916.469,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	400 Orang	1.374.057.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	1.218.916.469,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka						33.205.500,00							173.550.500,00	
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-		-	2 Kegiatan	33.205.500,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	173.550.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
265.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**101.845.200,00**							**139.819.559,00**	
			Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		-	89 %	101.845.200,00						-	139.819.559,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						101.845.200,00					-		139.819.559,00	
		-						101.845.200,00					-		139.819.559,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	101.845.200,00						-	139.819.559,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						101.845.200,00							139.819.559,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	2 Laporan	101.845.200,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	139.819.559,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
266.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**136.504.900,00**							**150.009.614,00**	
			Persentase hasil penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti	-		-	57 %	136.504.900,00						-	150.009.614,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						136.504.900,00					-		150.009.614,00	
		-						136.504.900,00					-		150.009.614,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	136.504.900,00						-	150.009.614,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						136.504.900,00							150.009.614,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	400 Orang	136.504.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	150.009.614,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
267.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**337.971.100,00**							**372.871.977,00**	
			Persentase laporan penanganan konflik sosial	-		-	100 %	337.971.100,00						-	372.871.977,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						337.971.100,00					-		372.871.977,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						337.971.100,00					-		372.871.977,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	109.787.900,00						-	115.658.309,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	94.055.400,00						-	114.626.459,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	134.127.800,00						-	142.587.209,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						134.127.800,00							142.587.209,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	105 Orang	134.127.800,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	142.587.209,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						94.055.400,00							114.626.459,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	20 Orang	94.055.400,00	Kab. Kulon Progo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	114.626.459,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						109.787.900,00							115.658.309,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	4 Dokumen	109.787.900,00	Kab. Kulon Progo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah dan Pelayanan Publik		-	115.658.309,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							**1.242.901.544.330,87**							**1.335.778.817.020,10**	

5.2. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuanagn Daerah bahwa kedudukan Dana Keistimewaan diposisikan sebagai dana transfer dari APBN (Bendahara Umum Negara) yang masuk ke dalam sturktur APBD DIY dimana pendapatan dicatat sebagai bagian dari pendapatan tansfer pemerintah pusat sedangkan belanja dialokasikan khusus pada program/kegiatan urusan keistimewaan. Melalui Pergub sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ini, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, hingga pelaporan Dana Keistimewaan wajib tunduk pada tata kelola administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan tranparan. Harmonisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan perencanaan dana keistimewaan tidak berjalan sendiri artinya program/kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY. Proses ini meminimalkan terjadinya tumpang tindih anggaran antara dana reguler APBD dengan Dana Keistimewaan untuk program/ kegiatan pembangunan yang sama.

Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pasal 11 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Perencanaan atau Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai menggunakan Dana Keistimewaan DIY masih bersifat indikatif dikarenakan masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2027, sehingga belum dapat dituangkan dalam tahapan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027.

5.3. Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik belum masuk sebagai komponen belanja di dalam kerangka anggaran penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan belum bisa diberikan atau dipasang nilai/ pagu anggarannya. Hingga penetapan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 ini, belum ada informasi dari Bappenas maupun Kementerian teknis lainnya terkait dengan alokasi DAK.

5.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pada tahapan Rancangan Akhir RKPD, jumlah belanja Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2027 belum dapat diproyeksikan.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/ pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator tujuan, indikator sasaran daerah, indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah, indikator kinerja program, dan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ditampilkan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	
					RPJMD (Penargetan dari Prov. DIY)	RAKORTEK
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,97	77,09-77,93	77,65-78,61 (79,28 - 80,05)	
2.	Tingkat Kemiskinan	%	14,53	13,69 - 14,69	13,26 - 14,26 (13,26-14,26)	14,26
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	63,31	65,00 - 67,00	66,00 - 68,00	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	4,61-4,95	4,88-5,16 (5,17-6,37)	
5.	Rasio Gini	Nilai	0,351	0,345 - 0,330	0,342 - 0,327 (0,339 - 0,345)	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85,71	87,90	88,20	
7.	Crime Rate	Nilai	67,04	61,00	60,00	
8.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,70	88,75	88,80	
9.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,65	135,07 - 140,07	133,44 - 138,44	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	
					RPJMD	RAKORTEK
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,71	75,78 - 75-86	75,86 - 76,07	
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,55	14,58-14,64	14,64-14,70	
3.	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.499	11.728-12.005	12.030-12.346	
4.	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,91	60,50 - 61,50	61,00 - 62,00	
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	40,06	41,03 - 42,23	41,04 - 42,24	
6.	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	37.976,68	42.865-43.357	45.874-46.666	
7.	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Miliar rupiah	655,55	766,86-1.360,34	857,40-1.504,26	
8.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.709,15	2.048,17-2.159,39	2.216,00-2.349,08	
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,14	1,90 - 2,50	1,90 - 2,45 (1,74-2,06)	
10.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	4,19	1,41-1,50	1,41-1,50	1,5
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A [83,87]	A [85,3]	A [86,4]	
12.	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,856	86,90	86,95	
14.	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,195	3,23	3,24	

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	
					RPJMD	RAKORTEK
15.	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Nilai	6,99	7,42	7,46	
16.	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100	100	100	
17.	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,90	89,95	90,00	
18.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	49,54	50,15	51,03	
19.	Tingkat Pelayanan Jalan *(level of service)*	Kategori	A [0,09]	A / Arus Bebas [0-0,2]	A / Arus Bebas [0-0,2]	
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	75,46	69,84	69,93	
21.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,67	0,68	0,69	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga							
1.	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan di semua Jenjang	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	%	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	%	98,91	98,92	98,94	98,94
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	30,47	32,59	34,78	
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	Nilai	59,66	61,91	64,16	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	Nilai	77,785	78,54	79,29	
		Persentase Penguatan Pendidikan Karakter	Nilai	58,05	59,12	59,82	
3.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda berprestasi	%	70,59	76,47	82,35	
4.	Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum	%	50,68	50,78	51,13	
Dinas Kesehatan							
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	30,65	62,56	64,14	64,14
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	12,57	10,32	10,26	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	n/a	16,20	15,40	15,4
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman							
7.	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Capaian Akses Air Minum Aman	%	30,19	31,28	32,88	32,88
		Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	94,65	94,58	94,58	
		Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	65,10	65,14	65,42	
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,88	69,03	69,18	69,18
8.	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	6,60	19,76	24,89	
Satuan Polisi Pamong Praja							
9.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
10.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase penanggulangan bencana	%	93,18	94,32	95,45	
		Persentase penanggulangan kebakaran	%	100	100	100	
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,34	0,60	0,59	
12.	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,145	0,13	0,13	
Dinas Tenaga Kerja							
13.	Pengurangan pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,46	76,44 - 78,94	76,48 - 78,98	
Dinas Pertanian dan Pangan							
14.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,8	90,2	91,30	
15.	Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis - Padi	ton	125.559	126.727	127.994	
		Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis - Jagung	ton	20.030	23.943	24.182	
		Produksi Komoditas Hortikultura Strategis - Cabai	kuintal	383.052	386.814	390.682	
		Produksi Komoditas Hortikultura Strategis - Bawang Merah	kuintal	74.775	130.925	132.235	
		Produksi Daging - Sapi	ton	634,28	650	653	
		Produksi Daging - Kambing	ton	569,52	553	555	
		Produksi Daging - Domba	ton	598,13	604	607	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Produksi Daging - Ayam	ton	13.194,70	13.017	13.082	
		DO: Daging ayam: ayam pedaging					
		Produksi Telur - Ayam Buras	ton	520,94	499	501	
		Produksi Telur - Ayam Ras Petelur	ton	15.799,20	16.318	16.400	
		Produksi Telur - itik	ton	764,2	633	636	
		Produksi Telur - Burung Puyuh	ton	545,63	573	576	
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)							
16.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	33,33	50,00	66,67	
		Persentase tertib administrasi pertanahan	%	64,12	72,27	76,33	
Dinas Lingkungan Hidup							
17.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	75,46	72,1	72,3	
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	81,94	75,71	75,72	
		Persentase Pengelolaan Persampahan	%	50,87	50,13	51,99	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
18.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	89,844	89,19	89,19	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
19.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	anak	1,98	2	1,99	
20.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa (kalurahan) Mandiri	%	95,40	87,36	89,66	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Dinas Perhubungan							
21.	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi daerah	Tingkat kualitas layanan transportasi	%	100	100	100	
Dinas Komunikasi dan Informatika							
22.	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Predikat	88,1 (menuju informatif)	Informatif	Informatif	
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
23.	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	%	12,71	32,692	37,32	
		Jumlah UMKM MIkro yang naik subkelas	Unit Usaha	22.630	20.653	23.267	
24.	Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Rp	3.004.598.649.377	2.735.445.369.345,69	2.738.200.259.828,91	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
25.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai Investasi	Rp (Juta)	566.856	170.000	180.000	
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)							
26.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan	%	53,76	53,76	56,81	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
27.	Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai TGM	Nilai	57,09	57,09	76,00	57,50
28.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Nilai ASKE	Nilai	85,55	85,55	87,00	
Dinas Kelautan dan Perikanan							
29.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rupiah	492.871.981.500	493.536.453.500	494.503.844.000	
Dinas Pariwisata							
30.	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Pendapatan sektor pariwisata	Rupiah	6.980.745.000	7.827.461.229	8.062.285.138	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Dinas Perdagangan							
31.	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Rupiah	2.820.842.167.179	2.865.527.205.476	2.941.228.019.000	
Sekretariat Daerah							
32.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai / kategori	sedang (3,3246)	sedang (3,3274)	sedang (3,3376)	
		Nilai Kinerja TPID	Nilai	85,36	95,00	95,10	
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,69	12,73	12,75	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	86,35	82,70	82,75	
33.	Meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,319	85,1	85,2	
Sekretariat DPRD							
34.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	100	100	100	
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah							
35.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian kinerja	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja	Nilai	52,53	52,57	52,65	
36.	Meningkatnya riset dan Inovasi Daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	Inovasi	91	89	93	
Badan Keuangan dan Aset Daerah							
37.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Realisasi Belanja APBD	%	92,83	95,89	96,08	
		Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	%	*	89,76	90,64	
		Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	30,75	26,62	27,15	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
38.	Meningkatnya kualitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83,18	83,20	83,40	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Inspektorat Daerah							
39.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,19	3,21	3,22	
		Capaian MCP KPK	%	82,4	95	95,5	
		Nilai Komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	18,65	20	21	
12 Kapanewon							
40.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,72	87,29	87,34	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
41.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100	
Semua Perangkat Daerah							
42.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	*	A (>80-90)	A (>80-90)	
43.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	*	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.4

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2027

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga							
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak	%	73,45	73,56	73,66	
		Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	85,12	84,43	84,53	
		Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	57,23	57,25	57,53	
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik	%	41,61	41,88	43,36	
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	Kurikulum	1	2	2	
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha	%	37,76	36,33	37,01	
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.	%	55,76	55,78	56,00	
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya	%	27,09	32,84	38,81	
Dinas Kesehatan							
7.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FASYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	93,75	91,84	100,00	
		Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan	%	*			
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	98,44	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	99,71	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98,33	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Balita	%	98,12	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	98,52	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	114,13	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	103,81	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	103,30	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	116,94	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	99,32	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	168,83	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	104,85	100	100	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	88,93	91,29	92,24	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	43,01	100	100	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,98	99,18	99,21	
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES	angka	85,43	86,00	86,50	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	angka	86,31	85,75	86,25	
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial	%	99,67	97,64	97,68	
10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pendampingan	%	22,73	25,56	27,78	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	%	8,40	9,52	13,17	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kel/Kalurahan yang Menerapkan GERMAS	%	34,09	47,73	64,77	
12.	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi	%	46,74	47,83	51,09	
13.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	23,81	28,57	33,33	
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman							
14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	66,94	65,22	65,51	
15.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	98,38	98,46	98,87	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
16.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,35	8,53	8,72	15,16
17.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	%	58,73	58,80	58,83	
18.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Penanganan Jalan	%	8,44	8,11	8,24	
19.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	100	100	100	
		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	%	100	100	100	
20.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Keterisian Hunian	%	46,99	47,74	47,74	
21.	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	6,60	19,76	24,89	
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	2,34	5,39	8,29	
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,62	29,69	29,76	
23.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	100	100	100	
Satuan Polisi Pamong Praja							
24.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	
25.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%	302,00	22,73	51,14	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
26.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana	%	100	100	100	
		Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana	%	100	100	100	
27.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan relawan kebakaran	%	100	100	100	
		Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran	%	100	100	100	
28.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Prosentase layanan dasar penanggulangan bencana dan kebakaran yang terfasilitasi Dana Keistimewaan	%	*	33,33	50,00	
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
29.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	67,21	59,02	73,77	
30.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti					
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100
		Persentase gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100
31.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial	%	31,98	29,13	28,64	
32.	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	%	100	100	100	
33.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	%	100	100	100	
34.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	70,60	71,70	71,71	
35.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	19,59	10,24	8,41	
36.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak	%	24,14	11,49	13,79	
37.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,038	0,02	0,02	
38.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	*	0,040	0,040	
Dinas Tenaga Kerja							

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
39.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	%	100	100	100	
40.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	%	100	93,75	95,83	
41.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	79,95	80,02	80,11	
42.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	%	48,36	44,12	52,94	
43.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi	%	100	100	100	
44.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	*	93,75	93,75	
Dinas Pertanian dan Pangan							
45.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/Kapita/ Hari	3.241,00	2.953,00	2.955,00	
		Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/Kapita/ Hari	1.811,00	1.879,90	1.904,40	
46.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa kategori tahan dan sangat tahan pangan	Desa	22,73	25,00%	27,27%	
47.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	%	91,67	92,50%	93,33%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
48.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	kuintal/ha	62,05	70,61	71,31	
		Produktivitas jagung	kuintal/ha	54,13	68,69	69,38	
		Produktivitas cabai	kuintal/ha	80,40	58,8	59,4	
		Produktivitas bawang merah	kuintal/ha	100,60	128,5	129,8	
		Populasi ternak	Animal Unit	174.696	172.888	173.752	
		Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	%	74,63	75,35	75,53	
49.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terfasilitasi jalan pertanian	%	28,21	28,16	28,23	
		Persentase lahan yang terfasilitasi irigasi	%	8,67	8,79	8,90	
50.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	%	75,68	75,77	75,86	
51.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang ditangani	%	98,77	95,65	95,85	
52.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	%	92,38	90,36	90,55	
		Persentase Keberhasilan penanganan penyakit hewan	%	99,53	98,65	98,69	
53.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah luas pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Ha	80	85	90	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
54.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas kelompok tani lahan surjan dan kelompok wanita tani lumbung mataraman yang terfasilitasi	%	*	29,11	32,53	
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)							
55.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	%	28,57	71,43	85,71	
		Persentase pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	%	100	100	100	
56.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100	
57.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemanfaatan tanah Kalurahan	%	100	100	100	
58.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Ketersediaan Dokumen Inventarisasi Tanah PEMDA	%	100			
59.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tertib administrasi tanah Pemda	%	115,60	74,10	74,69	
60.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	16,67	30,00	53,75	
		Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan	%	*	NA	50	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten					
61.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	%	64,18	72,27	76,33	
		Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	22,10	33,33	50,00	
Dinas Lingkungan Hidup							
62.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	%	65,00	54,29	57,14	
63.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	27	29	31	
64.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup	%	50	100	100	
65.	Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi cakupan layanan pengelolaan sampah	%	31,72	27,82	28,64	
66.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	%	28,30	54,72	66,04	
		Persentase Taman Kondisi Baik	%	81,63	77,55	79,59	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
67.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	100	
68.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	%	100	77,11	77,38	
69.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengurangan sampah	%	21,37	35,01	36,97	
70.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penanganan sampah	%	29,50	15,12	15,02	
		Prosentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	%	0,00	6,13	9,20	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
71.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki kartu identitas	%	91,62	92,20	92,23	
72.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran	%	99,65	99,55	99,60	
73.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Inovasi pelayanan	Satuan Inovasi	2	2	2	
74.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
75.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	%	81,82	82,95	84,09	
76.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	64,55	60,10	61,37	
		Persentase unmet need	%	7,01	14,55	14,01	
77.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga yang terlayani konseling keluarga sejahtera	%	7,11	6,57	6,79	
78.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan kategori TDD	%	50,57	48,28	50,57	
		Persentase BUMDes kategori Maju	%	41,38	20,69	22,99	
79.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Swadaya masyarakat dalam program TMMD dan Karya Bakti	%	19,44	14	16	
80.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi	%	38,64	76,14	100,00	
81.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	%	0,00	11,49	13,79	
Dinas Perhubungan							

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
82.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	57,14	57,86	59,29	
		Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	19,95	20,08	20,47	
83.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	16,96	17,01	17,38	
Dinas Komunikasi dan Informatika							
84.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	%	24,11	27,40	32,88	
		Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	22,73	40,91	61,36	
85.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	22,73	40,91	61,36	
86.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik	%	63,91	61,90	66,67	
87.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata	%	61,90	71,43	80,95	
88.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	%	0,00	74,22	75,78	
89.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
	Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi					
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
90.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	6,35	24,04	31,10	
91.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas	%	48,76	47,99	53,79	
92.	Program Pengembangan UMKM	Omzet usaha mikro	Rp	182.040.000.000	177.600.000.000	183.600.000.000	
93.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	Unit	16.262	16.357	16.507	
94.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	pelaku usaha	2	5	10	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
95.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	33,33	35	40	
96.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	%	100	100	100	
97.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	%	100	85,71	88,57	
98.	Program Pengelolaan Data	Persentase dokumen data investasi yang disajikan	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
	dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
99.	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan dan Perizinan	Nilai	88,10	85-89.85	85,25-89.9	
100.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	100	100	
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)							
101.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman	Kegiatan	7	8	8	
		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan	Warisan Budaya	229	233	242	
		Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan Kalurahan Budaya kategori Berkembang	Kelurahan/ Kalurahan	62	64	66	
		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	81,74	82,56	83,92	
102.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	Orang	71.894	71.300	72.300	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
103.	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	222.912	219.032	219.132	
104.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Naskah kuno yang terdata	Naskah	11	12	13	
105.	Program Pengelolaan Arsip	Nilai ASKI Perangkat Daerah	Nilai	86,53	87	87,5	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
106.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Dokumen	*	200	200	
Dinas Kelautan dan Perikanan							
107.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	2.198,208	2.200,00	2.205,00	
108.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	16.989,005	17.044,00	17.119,00	
109.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	90	67	70	
110.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan ikan	Kg	303.934	184.000	184.500	
111.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	70,15	68,66	69,78	
		Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	%	50,00	50,00	50,00	
Dinas Pariwisata							
112.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Objek Pariwisata Dalam Kondisi Baik.	Lokasi	2	3	4	
113.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Orang	1.965.918	2.043.348	2.104.648	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
114.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi	Pelaku Usaha	210	186	196	
115.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	358.686	129.097	132.970	
Dinas Perdagangan							
116.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu	%	5,23	5,87	5,82	
117.	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	Orang	12	15	18	
118.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	90,58	91,74	92,68	
119.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik	%	40,00	40,00	44,00	
120.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	*	100	100	
Sekretariat Daerah							
121.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
		Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	%	100	100	100	
122.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	100	100	
		Persentase Perumusan dan Monev kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan	%	100	100	100	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	
123.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	152,38	100	100	
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	100	100	
		Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100	100	100	
124.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	100	NA	NA	
		Kematangan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi	*	49,07	49,10	
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	94,16	NA	NA	
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	*	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
Sekretariat DPRD							
125.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	%	100	100	100	
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	%	100	100	100	
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah							
126.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	
		Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	%	99,83	99,88	99,89	
127.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu	%	100	100	100	
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu	%	100	100	100	
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
128.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Capaian Riset Daerah	%	*	50	62,50	
129.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian Inovasi Daerah	Satuan Inovasi	324	210	326	
130.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100	
Badan Keuangan dan Aset Daerah							
131.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	
		Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	
		Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar	%	*	82,22	84	
132.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	*	100	100	
133.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	*	374.078	377.958	
		Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	*	2.740	2.855	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
134.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi	%	*	43,14	44,83	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
135.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	76,59	77,01	78,44	
		Persentase Kedisiplinan ASN	%	90,82	99,82	99,83	
		Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi	Orang	242	247	252	
136.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	%	*	100	100	
Inspektorat Daerah							
137.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	80,00	86,14	88,41	
138.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	
12 Kapanewon							
139.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100	100	100	
140.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100	100	100	
141.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	100	100	
142.	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
	Pemerintahan Desa						
143.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100	
144.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100	100	100	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
145.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	81,71	90,00	91,58	
146.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Siswa yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilos	%	78,80	65,00	70,00	
147.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	84,97	84,56	89,26	
148.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Hasil Penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti	%	17,39	34,78	56,52	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target		
				2025	2026	2027	
						RPJMD	RAKORTEK
149.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial	%	100	100,00	100,00	
Semua Perangkat Daerah							
150.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	NA	100	100	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.5

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
I.4	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (IE 16)**		
I.4.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	90,63
I.4.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,17–13,17
I.4.4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	39,55
I.5	**Lingkungan Hidup Berkualitas (IE 15)**		
I.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,93
I.5.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	15,16
I.5.3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15,02
I.5.4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	89,01
I.6	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE 17)**		
I.6.2	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,67
I.6.3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	133,44–138,447
I.7	**Demografi**		
I.7.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,44
I.7.2	Rasio Penduduk	-	98,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
I.7.3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	781,23
I.7.4	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Nilai	5,82
I.7.5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	85,70
I.7.6	Rate Nett Recent Migrasi		9,04
I.7.7	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	87,57
I.7.8	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	94,62
I.7.9	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00
I.7.9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	99,91
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
II.1	**Kesejahteraan Ekonomi**		
II.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,82-5,42
II.1.2	Tingkat Kemiskinan	%	13,26–14,26
II.1.3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp juta	45,87–46,67
II.1.4	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp juta	26,58–27,04
II.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,90–2,45
II.1.6	Rasio Gini	Nilai	0,342 - 0,327
II.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,80–77,16
II.1.8	Kemiskinan Ekstrem	%	0,50
II.2	**Kesehatan untuk Semua (IE 1)**		
II.2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,58–79,83
II.2.2	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,37
II.2.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	16,20
II.2.4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	100,00
II.2.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	91,29
II.2.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,26–99,95
II.2.9	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	
II.2.10	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	
II.2.11	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	
II.2.12	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	
II.2.13	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	
II.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE 2)**		
II.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,46
II.3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7–15,79
II.3.3	Angka Literasi SD	%	74,19
II.3.4	Angka Numerasi SD	%	64,61
II.3.5	Angka Literasi SMP	%	85,11
II.3.6	Angka Numerasi SMP	%	73,70
II.3.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21
II.3.9	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	81,66–83,66
II.3.10	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	43,60–45,60

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
II.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE 3)**		
II.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	42,83–47,83
II.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE 13)**		
II.5.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	65,00–67,00
II.6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE 14)**		
II.6.1	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	70,00
II.6.2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	67,10
II.6.3	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,093-0,142
II.6.4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Nilai	92,00
II.6.5	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,89
II.6.6	Proporsi perempuan dalam posisi struktural pemerintahan	%	43,87
II.6.7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	70,00
II.6.8	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	58,20
II.6.9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	70,70
II.6.10	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	8,20
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
III.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**		
III.1.1	Angka Ketergantungan	%	50,10
III.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)**		
III.2.1	Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,63–11,08
III.2.2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,98–6,98
III.2.3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,66–3,66
III.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,44–78,94
III.2.6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	56,00 (inovatif)
III.2.7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten	%	2,05–2,55
III.2.8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,7
III.2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	71,85–72,85
III.2.10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,64
III.2.11	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,66
III.2.12	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	95,83
III.2.13	Persentase pekerja informal	%	64,80-68,98
III.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (IE 7)**		
III.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,03–42,23
III.5.2	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	9,07
III.6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE 8)**		
III.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	52,93
III.6.3	Persentase Desa Mandiri	%	100
III.7	**Stabilitas Ekonomi Makro (IE 11)**		
III.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,66–0,79

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
III.7.2	Total Kredit per PDRB	%	25,30–28,24
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
IV.1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE 9)**		
IV.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	91,50
IV.1.2	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	1,41–1,50
IV.1.3	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,57 (A/Pelayanan Prima)
IV.2	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial (IE 10)**		
IV.2.1	Persentase Penegakan Perda	%	100,00
IV.3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE 12)**		
IV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,83

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.6

Indikator Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2026

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.1.1.	Pendidikan		
1.1.1.1.	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,03
1.1.1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,94
1.1.1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,82
1.1.1.4.	Iklim keamanan SMP	%	75,82
1.1.1.5.	Iklim Kebhinekaan SD	%	78,59
1.1.1.6.	Iklim Kebhinekaan SMP	%	74,7
1.1.1.7.	Iklim Inklusivitas SD	%	65,32
1.1.1.8.	Iklim Inklusivitas SMP	%	64,84
1.1.1.9.	Iklim Keamanan SD	%	81,13
1.1.1.10.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	74,19
1.1.1.11.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	64,61
1.1.1.12.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	85,11
1.1.1.13.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,7

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.14.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	77,5
1.1.1.15.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	77,58
1.1.2.	Kesehatan		
1.1.2.1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	62,56
1.1.2.2.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,21
1.1.2.3.	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	1
1.1.2.4.	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	10,32
1.1.2.5.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17,5
1.1.2.6.	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77
1.1.2.7.	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	1,4
1.1.2.8.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	11,4
1.1.2.9.	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	100
1.1.2.10.	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	30
1.1.2.11.	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	%	100
1.1.2.12.	Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	100
1.1.2.13.	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	%	22
1.1.2.14.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	71
1.1.2.15.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	7
1.1.2.16.	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23,4
1.1.2.17.	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	100
1.1.2.18.	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	55
1.1.2.19.	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252
1.1.3.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1.1.3.1.	Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	31,28
1.1.3.2.	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha	1.773
1.1.3.3.	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	5
1.1.3.4.	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	3

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.3.5.	Penetapan RTRW	Perda	1
1.1.3.6.	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	6
1.1.3.7.	Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	2
1.1.5.	Ketenteraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1.1.5.1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	85,96
1.1.5.2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	89,85
1.1.5.3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	76
1.1.6.	Sosial		
1.1.6.5.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100
1.1.6.6.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100
1.1.6.7.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100
1.1.7.	Tenaga Kerja		
1.1.7.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	22,07
1.1.7.2.	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	8.640
1.1.7.3.	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bersertifikat	Orang	144
1.1.8.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
1.1.8.1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,175
1.1.8.2.	Persentase ARG Daerah	%	6,2
1.1.8.3.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	801
1.1.8.4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	79,09
1.1.8.7.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,11
1.1.9.	Pangan		
1.1.9.1.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu & Keamanan Pangan	%	92,58
1.1.9.3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,2
1.1.11.	Lingkungan Hidup		
1.1.11.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,84
1.1.11.2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	64,1
1.1.11.3.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Pengumpulan Sampah	Persentase	47,31-64,00
1.1.12.	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana		

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.12.2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	3
1.1.12.3.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-Rata Anak Per Wanita	1,1
1.1.12.4.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%	85,70
1.1.14.	Komunikasi & Informatika		
1.1.14.1.	Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	1
1.1.14.2.	Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2
1.1.14.3.	Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2
1.1.15.	Koperasi Usaha Kecil & Menengah		
1.1.15.1.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	2,70
1.1.15.4.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3,76
1.1.15.5.	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	4,6
1.1.15.6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berkoperasi	Persentase	26
1.1.16.	Penanaman Modal		
1.1.16.1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	0,180
1.1.17.	Kepemudaan & Olahraga		
1.1.17.1.	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persentase	15,93
1.1.17.2.	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persentase	18,25
1.1.17.3.	Indeks Pembangunan Pemuda	Niai	72,50
1.1.17.4.	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan)	Persentase	21,43
1.1.17.5.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	Persentase	33,44
1.1.17.6.	Jumlah Kampanye Olahraga yang Terselenggara Setahun Terakhir	Kegiatan	10
1.1.17.7.	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	54,65
1.1.17.8.	Persentase Olahragawan Dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional/Internasional)	Persentase	55
1.1.18.	Statistik		
1.1.18.1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	0

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.20.	Kebudayaan		
1.1.20.1.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Menonton Pertunjukan Seni	%	78
1.1.20.2.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Tempat/Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Bersifat Kebendaan	%	5,0
1.1.20.3.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	%	2,8
1.1.20.4.	Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan atau Menghadiri Upacara Adat Dalam Setahun Terakhir	%	16,60
1.1.20.5.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	42,86
1.1.20.6.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal (Bahasa Daerah atau Budaya Lokal) dan/atau Ekskul Kesenian	%	16,67
1.1.20.7.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni yang Menjadikan Keterlibatannya itu Sebagai Sumber Penghasilan (Dalam Setahun Terakhir)	%	0,51
1.1.21.	Perpustakaan		
1.1.21.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	21
1.1.21.2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,50
1.1.22.	Kearsipan		
1.1.22.1.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	86
1.1.23.	Kelautan & Perikanan		
1.1.23.3.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.200
1.1.23.4.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17119
1.1.24.	Pariwisata		
1.1.24.1.	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Rp	2.259.400.000.000
1.1.24.2.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	24.632.000
1.1.24.3.	Rasio PDB Pariwisata	%	4,06
1.1.25.	Pertanian		
1.1.25.1.	Jumlah Produksi Jagung	Ton	23.943
1.1.25.2.	Jumlah Produksi Padi	Ton	127.994
1.1.25.3.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	386.814
1.1.25.4.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Bawang Merah	Ton	130.925
1.1.25.7.	Jumlah Produksi Daging (Sapi,Kerbau, Domba, Kambing, Ayam, Itik, Babi)	Ton	14.823
1.1.25.8.	Jumlah Produksi Telur	Ton	18.023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.25.9.	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16.037

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2027 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemda DIY tahun 2027 dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/ pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/ pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut Permendagri tersebut, tata cara pengendalian dilaksanakan dengan penyajian program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi PD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing PD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.
2. PD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 berlandaskan pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD DIY Tahun 2022-2027, dan RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029.
2. Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo 2027 merupakan acuan/ pedoman bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD 2027.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam Rancangan Awal RKPD 2027 yaitu: “**Penguatan Sumber Daya Manusia, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya”.** Program dan

kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing PD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif.

4. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Wates, 2 Juli 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN